



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2025-2029



SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263, 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.



3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama periode 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. PD dalam menyusun Renstra PD;
 - b. Pemerintah Provinsi dalam menyusun RKPD; dan
 - c. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:



BAB I	:	PENDAHULUAN
1.1	:	LATAR BELAKANG
1.2	:	DASAR HUKUM PENYUSUNAN
1.3	:	HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA
1.4	:	MAKSUD DAN TUJUAN
1.5	:	SISTEMATIKA PENULISAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM DAERAH
2.1	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.2	:	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
2.3	:	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB III	:	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
3.1	:	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
3.2	:	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV	:	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
4.1	:	PROGRAM PERANGKAT DAERAH
4.2	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB V	:	PENUTUP

- (2) Penjabaran Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra PD.

- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 AGUSTUS 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 AGUSTUS 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ...2025 NOMOR ...2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.....(2_ 113/ 2025)



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I-6
1.3.1 RPJMD dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan.....	I-6
1.3.2 RPJMD dan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	I-8
1.3.3 RPJMD dan RPJM Nasional	I-10
1.3.4 RPJMD dan Rencana Strategis	I-12
1.3.5 RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	I-12
1.3.6 RPJMD dan RPPLH.....	I-13
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-14
1.4.1 Maksud	I-14
1.4.2 Tujuan.....	I-14
1.5 Sistematika Penulisan	I-15
 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....	 II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah	II-1
2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam	II-6
2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-33
2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	II-61
2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas	II-76
2.1.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim ...	II-82
2.1.1.7 Demografi	II-87
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-89
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II-89
2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua	II-102
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata	II-106

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif	II-112
2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-113
2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan gender, dan Masyarakat Inklusif	II-115
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-126
2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-126
2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	II-129
2.1.3.3 Transformasi Digital	II-136
2.1.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II-140
2.1.3.5 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II-141
2.1.3.6 Stabilitas Ekonomi Makro	II-167
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II-173
2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	II-173
2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	II-181
2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	II-190
2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah	II-193
2.2. Gambaran Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	II-228
2.2.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	II-229
2.2.1.1 Pendapatan Daerah	II-231
2.2.1.2 Belanja Daerah	II-237
2.2.1.3 Pembiayaan Daerah	II-243
2.2.1.4 Neraca Daerah	II-244
2.2.1.5 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	II-250
2.2.2 Kerangka Pendanaan.....	II-254
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis	II-272
2.3.1 Permasalahan Pembangunan.....	II-273
2.3.1.1 Kerentanan dan Risiko Kondisi Geografi	II-273
2.3.1.2 Pengelolaan Sumberdaya Air Belum Berkelanjutan	II-275
2.3.1.3 Tingginya Alih Fungsi Lahan dan Gambut	II-275
2.3.1.4 Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah belum Optimal	II-276
2.3.1.5 Kerentanan Ketahanan Pangan	II-278

2.3.1.6 Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah masih Tinggi	II-280
2.3.1.7 Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Rendah	II-284
2.3.1.8 Transformasi Ekonomi belum Optimal	II-287
2.3.1.9 Ancaman Stabilitas Daerah Masih Tinggi	II-288
2.3.1.10 Inovasi Daerah Masih Belum Optimal	II-289
2.3.1.11 Reformasi Birokrasi yang Belum Optimal	II-289
2.3.2 Isu Strategis Daerah	II-290
2.3.2.1 Isu Strategis Global	II-290
2.3.2.2 Isu Strategis Nasional	II-293
2.3.2.3 Isu Strategis Regional	II-296
2.3.2.4 Isu Strategis Sumatera Selatan	II-307
2.3.2.5 Isu Strategis KLHS RPJMD	II-318

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH	III-1
3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	III-1
3.1.1 Visi dan Misi	III-1
3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III-3
3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas	
Pembangunan Daerah	III-14
3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan	III-14
3.2.2 Arah Kebijakan Kewilayahan	III-26
3.2.2.1 Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	III-26
3.2.2.2 Proyek Strategis Nasional	III-29
3.2.2.3 Kawasan Strategis Nasional di Wilayah Provinsi ...	III-37
3.2.2.4 Kawasan Strategis Provinsi	III-40
3.2.2.5 Indikator Makro dan Arah Kebijakan	
Pembangunan Kabupaten/Kota	III-50
3.2.2.6 Pembangunan Jalan Khusus Batubara	III-126
3.2.3 Prioritas Pembangunan	III-131
3.2.3.1 Program Strategis Gubernur dan Wakil Gubernur.	III-135
3.2.3.2 Sinkronisasi RPJPD, RTRW dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan	III-140
3.2.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-144

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	IV-1
4.1 Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	IV-16
 BAB V PENUTUP.....	 V-1
5.1 Kaidah Pelaksanaan	V-2
5.2 Pedoman Transisi	V-4

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Wilayah Daratan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	II-1
Tabel 2. 2	Ketinggian Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.....	II-3
Tabel 2. 3	Kelerengan Provinsi Sumatera Selatan	II-5
Tabel 2. 4	Jenis Tanah Provinsi Sumatera Selatan	II-6
Tabel 2. 5	Kondisi Klimatologi Provinsi Sumatera Selatan	II-8
Tabel 2. 6	Formasi Batuan Provinsi Sumatera Selatan	II-9
Tabel 2. 7	Tutupan Lahan Provinsi Sumatera Selatan	II-16
Tabel 2. 8	Luas Tutupan Lahan Provinsi Sumatera Selatan.....	II-18
Tabel 2. 9	Indikatif FEG di masing-masing KHG skala 1:250.000	II-22
Tabel 2. 10	Luasan Perubahan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006, 2013, dan 2020	II-27
Tabel 2. 11	Bencana Alam di Provinsi Sumatera Selatan	II-31
Tabel 2. 12	Daya Dukung dan Daya Tampung Air Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.....	II-37
Tabel 2. 13	Status Air Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	II-38
Tabel 2. 14	Jasa Pengaturan Air di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 (satuan Ha).....	II-42
Tabel 2. 15	Jasa Pemurnian Air Perkabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	II-45
Tabel 2. 16	Jasa Penyediaan Air per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	II-47
Tabel 2. 17	Daerah Irigasi di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat	II-48
Tabel 2. 18	Daerah Irigasi Rawa di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat	II-48
Tabel 2. 19	Kondisi Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi	II-49
Tabel 2. 20	Kondisi Jaringan Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi ..	II-50

Tabel 2. 21	Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	II-51
Tabel 2. 22	Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	II-52
Tabel 2. 23	Produksi Tanaman Perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan (ton), 2020-2024	II-56
Tabel 2. 24	Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	II-58
Tabel 2. 25	Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatera Selatan (ton), 2020-2024	II-59
Tabel 2. 26	Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kode KBLI 2 Digit di Sumatera Selatan, 2024	II-59
Tabel 2. 27	Daya Tarik Unggulan Provinsi Sumatera Selatan	II-61
Tabel 2. 28	Potensi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Selatan	II-62
Tabel 2. 29	Peringkat Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2024	II-68
Tabel 2. 30	Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan	II-69
Tabel 2. 31	Produktivitas Tanaman Pangan dan Palawija di Provinsi Sumatera Selatan (kuintal/ha), 2020-2023...	II-71
Tabel 2. 32	Produksi Tanaman Pangan dan Palawija di Provinsi Sumatera Selatan (ton), 2020-2024	II-72
Tabel 2. 33	Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024	II-75
Tabel 2. 34	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2020 – 2024	II-79
Tabel 2. 35	Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Tahun 2023 ...	II-80
Tabel 2. 36	Sampah Terkelola Sumatera Selatan Tahun 2024	II-81
Tabel 2. 37	Proporsi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Sub Sektor Tahun 2019-2023	II-84
Tabel 2. 38	Nilai IKD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	II-86
Tabel 2. 39	Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2024	II-88

Tabel 2. 40	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral (%).....	II-91
Tabel 2. 41	Perkembangan PDRB Harga Berlaku & Harga Konstan 2010.....	II-92
Tabel 2. 42	Lapangan Usaha Utama Sumatera Selatan	II-93
Tabel 2. 43	Struktur Ekonomi Sumatera Selatan	II-94
Tabel 2. 44	PDRB ADHK 2010 Sumatera Selatan Tahun 2010-2024.....	II-94
Tabel 2. 45	Rekapitulasi Income dan Labour Multiplier di Sumsel	II-96
Tabel 2. 46	Indikator Kemiskinan Sumatera Selatan 2010-2024 ..	II-97
Tabel 2. 47	Komponen IPM Sumatera Selatan 2005-2024	II-101
Tabel 2. 48	Nilai Tukar Petani Menurut Sektor di Sumatera Selatan	II-102
Tabel 2. 49	Indeks Keluarga Sehat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024	II-105
Tabel 2. 50	Nilai Indeks Literasi Digital Tahun 2020.....	II-110
Tabel 2. 51	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ..	II-113
Tabel 2. 52	Indeks Kualitas Keluarga Sumatera Selatan Tahun 2022-2023.....	II-116
Tabel 2. 53	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.....	II-123
Tabel 2. 54	Struktur Ketenagakerjaan (% Total Tenaga Kerja)	II-128
Tabel 2. 55	Distribusi Persentase PDRB Industri Pengolahan atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2020-2024	II-129
Tabel 2. 56	Realisasi Rasio PDRB Industri Pengolahan (miliar Rupiah) Tahun 2020-2024	II-130
Tabel 2. 57	Realisasi Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (Miliar Rupiah), 2020-2024	II-131
Tabel 2. 58	Rasio Kewirausahaan Daerah (Dalam Ribu Orang) per Agustus	II-132
Tabel 2. 59	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 sampai 2024 (%).....	II-134
Tabel 2. 60	Indeks TDN Sumatera Selatan Tahun 2022.....	II-138
Tabel 2. 61	Kondisi Jalan Nasional di Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2024	II-144

Tabel 2. 62	Kondisi Jalan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2023	II-145
Tabel 2. 63	Kondisi Jalan Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024	II-146
Tabel 2. 64	Komposisi Panjang Jalan Menurut Statusnya di Sumatera Selatan Tahun 2024	II-147
Tabel 2. 65	Rute dan Panjang Rel PT. KA Divre III di Wilayah Sumbagsel.....	II-148
Tabel 2. 66	Jumlah Wilayah di Sekitar Sungai	II-149
Tabel 2. 67	Daftar Dermaga Sungai dan Danau di Sumatera Selatan	II-151
Tabel 2. 68	Daftar Tambatan Perahu Bantuan Bersifat Khusus Untuk Pemerintah Kabupaten Banyuasin	II-154
Tabel 2. 69	Produktivitas Angkutan Penyeberangan Tanjung Api - Api	II-157
Tabel 2. 70	Intensitas Angkutan Kendaraan Berdasarkan Golongan.....	II-157
Tabel 2. 71	Lalu Lintas Angkutan Udara Penumpang Melalui.....	II-159
Tabel 2. 72	Lalu Lintas Angkutan Udara Penumpang Melalui Bandara Silampari Lubuk Linggau.....	II-159
Tabel 2. 73	Jumlah Kepala Keluarga Kekurangan Rumah (Backlog) di Provinsi Sumatera Selatan, 2023.....	II-161
Tabel 2. 74	Kategori Desa di Sumatera Selatan berdasarkan Indeks Desa.....	II-164
Tabel 2. 75	Persentase Desa Mandiri Tahun 2019-2024 di Provinsi Sumatera Selatan	II-166
Tabel 2. 76	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 sampai dengan 2024 .	II-167
Tabel 2. 77	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Provisinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024.....	II-168
Tabel 2. 78	Indikator Indeks Reformasi Hukum.....	II-174
Tabel 2. 79	Nilai Indeks SPBE Provinsi Sumatera Selatan	II-176
Tabel 2. 80	Indeks Pelayanan Publik Sumatera Selatan.....	II-177
Tabel 2. 81	Capaian Indeks Integritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 - 2024.....	II-178
Tabel 2. 82	Indeks Internal SPI Berdasarkan Unit Kerja	II-179

Tabel 2. 83	Indeks Eksternal SPI Berdasarkan Unit Kerja	II-180
Tabel 2. 84	Kegiatan Penegakan Perda pada Tahun 2023	II-181
Tabel 2. 85	Kegiatan Penegakan Perda pada Tahun 2024	II-183
Tabel 2. 86	Hasil Capaian Pelaporan Aksi HAM	II-185
Tabel 2. 87	Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (Metode Baru) 2021 - 2023.....	II-186
Tabel 2. 88	Rekapitulasi Jumlah PNS Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2024 (data per Desember 2024).....	II-190
Tabel 2. 89	Rekapitulasi Jumlah Fungsional Berdasarkan Evaluasi Jabatan Tahun 2024 (data per Desember 2024).....	II-190
Tabel 2. 90	Indikator Kinerja Utama Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah.....	II-193
Tabel 2. 91	Indikator Kinerja Daerah Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah.....	II-197
Tabel 2. 92	Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2024	II-232
Tabel 2. 93	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.....	II-246
Tabel 2. 94	Rasio Likuiditas Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	II-248
Tabel 2. 95	Rasio Solvabilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	II-249
Tabel 2. 96	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024	II-250
Tabel 2. 97	Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2024.....	II-252
Tabel 2. 98	Surplus/Defisit Riil Anggaran	II-253
Tabel 2. 99	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran.....	II-253
Tabel 2. 100	Rasio SILPA terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2024	II-253
Tabel 2. 101	Proyeksi Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan 2025-2030.....	II-262

Tabel 2. 102	Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2030.....	II-268
Tabel 2. 103	Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2030	II-271
Tabel 2. 104	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029.....	II-272
Tabel 3. 1	Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	III-8
Tabel 3. 2	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	III-15
Tabel 3. 3	Sandingan sasaran pembangunan antara RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	III-28
Tabel 3. 4	Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025-2029.	III-29
Tabel 3. 5	Progress Proyek Strategis di Provinsi Sumatera Selatan	III-31
Tabel 3. 6	Capaian dan Target Indikator Makro Kota Palembang	III-51
Tabel 3. 7	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Banyuasin	III-55
Tabel 3. 8	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Ilir	III-62
Tabel 3. 9	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komerling Ilir	III-66
Tabel 3. 10	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Banyuasin	III-71
Tabel 3. 11	Capaian dan Target Indikator Makro Kota Lubuk Linggau	III-76
Tabel 3. 12	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas.....	III-79
Tabel 3. 13	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas Utara.....	III-84
Tabel 3. 14	Capaian dan Target Indikator Makro Kota Pagar Alam	III-88
Tabel 3. 15	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Lahat	III-92
Tabel 3. 16	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Empat Lawang.....	III-96
Tabel 3. 17	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Muara Enim	III-101
Tabel 3. 18	Capaian dan Target Indikator Makro Kota Prabumulih	III-106

Tabel 3. 19	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten PALI	III-109
Tabel 3. 20	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten OKU Timur	III-113
Tabel 3. 21	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komerling Ulu	III-117
Tabel 3. 22	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten OKU Selatan	III-123
Tabel 3. 23	Perusahaan dengan Produksi Batubara Terbesar Tahun 2024.....	III-127
Tabel 3. 24	Jalan Khusus Batubara (Eksisting) di Provinsi Sumatera Selatan	III-128
Tabel 3. 25	Rencana Pembangunan Jalan Khusus Batubara di Provinsi Sumatera Selatan	III-128
Tabel 3. 26	Pelabuhan Khusus di Provinsi Sumatera Selatan (Eksisting dan Rencana)	III-129
Tabel 3. 27	Keterkaitan Misi dan Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	III-132
Tabel 3. 28	Persandingan antara Prioritas Nasional RPJMN dengan Prioritas Pembangunan Daerah	III-133
Tabel 3. 29	Keterkaitan Misi dan Program Strategis HDCU RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	III-135
Tabel 3. 30	Sinkronisasi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044 dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029.....	III-140
Tabel 3. 31	Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	III-145
Tabel 4. 1	Program Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	IV-2
Tabel 4. 2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030.....	IV-17
Tabel 4. 3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan	IV-18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-13
Gambar 2. 1	Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan	II-2
Gambar 2. 2	Peta Topografi Provinsi Sumatera Selatan	II-4
Gambar 2. 3	Peta Kelerengan Provinsi Sumatera Selatan	II-5
Gambar 2. 4	Peta Jenis Tanah Provinsi Sumatera Selatan.....	II-7
Gambar 2. 5	Peta Klimatologi Provinsi Sumatera Selatan	II-8
Gambar 2. 6	Peta Geologi Provinsi Sumatera Selatan	II-11
Gambar 2. 7	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Sumatera Selatan.....	II-13
Gambar 2. 8	Peta Tutupan Lahan Provinsi Sumatera Selatan.....	II-17
Gambar 2. 9	Peta Tutupan Lahan Provinsi Sumatera Selatan.....	II-18
Gambar 2. 10	Peta Fungsi Ekosistem Gambut Provinsi	II-20
Gambar 2. 11	Luas Indikatif Fungsi Ekosistem Gambut.....	II-21
Gambar 2. 12	Luas KHG di Masing-Masing Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.....	II-24
Gambar 2. 13	Proporsi Indikatif Fungsi Ekosistem Gambut di Setiap Kabupaten/Kota	II-25
Gambar 2. 14	Peta Kesatuan Hidrologis Gambut	II-26
Gambar 2. 15	Alih Fungsi Lahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006, 2013, 2020	II-27
Gambar 2. 16	Emisi Berbasis Lahan Historis Sumatera Selatan Tahun 2000-2020	II-28
Gambar 2. 17	Lima Jenis Alih Fungsi Historis dengan Nilai Emisi Terbesar di Sumatera Selatan	II-29
Gambar 2. 18	Peta Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan	II-31
Gambar 2. 19	Peta Bahaya Bencana Cuaca Ekstrem Provinsi Sumatera Selatan.....	II-32
Gambar 2. 20	Peta Batas Wilayah Fungsional Provinsi Sumatera Selatan.....	II-33
Gambar 2. 21	Peta Fungsional Kawasan Bentang Alam Provinsi Sumatera Selatan.....	II-34

Gambar 2. 22	Peta Fungsional Kawasan Vegetasi Alam Provinsi Sumatera Selatan.....	II-34
Gambar 2. 23	Peta Status Air Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Wilayah Fungsional	II-36
Gambar 2. 24	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.....	II-38
Gambar 2. 25	Persentase Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	II-39
Gambar 2. 26	Grafik Kebutuhan Air Provinsi Sumatera Selatan.....	II-39
Gambar 2. 27	Ketersediaan Air Provinsi Sumatera Selatan.....	II-40
Gambar 2. 28	Cadangan Air/Selisih Provinsi Sumatera Selatan	II-40
Gambar 2. 29	Sebaran Jasa Pengaturan Air Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.....	II-41
Gambar 2. 30	Persentase Jasa Pengaturan Air Provinsi Sumatera Selatan.....	II-43
Gambar 2. 31	Sebaran Spasial Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.....	II-44
Gambar 2. 32	Persentase Jasa Pengaturan Pemurnian Air di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	II-45
Gambar 2. 33	Peta Jasa Penyediaan Air di Provinsi Sumatera Selatan.....	II-46
Gambar 2. 34	Persentase Jasa Penyediaan Air Provinsi Sumatera Selatan.....	II-47
Gambar 2. 35	Kapasitas Tampung Air di Provinsi Sumatera Selatan (m ³ /kapita), 2018-2022	II-52
Gambar 2. 36	Jumlah Air Disalurkan di Provinsi Sumatera Selatan (m ³), 2019-2023.....	II-53
Gambar 2. 37	Grafik Kebutuhan Pangan Provinsi Sumatera Selatan	II-54
Gambar 2. 38	Grafik Ketersediaan Pangan Provinsi Sumatera Selatan.....	II-55
Gambar 2. 39	Grafik Selisih/Cadangan Pangan Provinsi Sumatera Selatan.....	II-55
Gambar 2. 40	Pemenuhan Kebutuhan Listrik per Kapita di Provinsi Sumatera Selatan (KWh), 2020-2024.....	II-64

Gambar 2. 41	Produksi Listrik di Provinsi Sumatera Selatan (KWh), 2020-2024.....	II-65
Gambar 2. 42	Pemanfaatan dan Pengembangan Aneka Energi Baru Terbarukan	II-65
Gambar 2. 43	Porsi EBT dalam Bauran Energi Provinsi Sumatera Selatan.....	II-66
Gambar 2. 44	Peta Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan.....	II-67
Gambar 2. 45	Peta Indeks Ketahanan Pangan Pulau Sumatera Tahun 2024.....	II-68
Gambar 2. 46	Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan	II-70
Gambar 2. 47	Prevalensi Ketidacukupan Pangan (%), 2018-2024.	II-71
Gambar 2. 48	Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2024.....	II-73
Gambar 2. 49	Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.....	II-74
Gambar 2. 50	Sebaran Capaian RT Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota Sumatera Selatan 2024	II-76
Gambar 2. 51	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.....	II-77
Gambar 2. 52	Persentase Akses Sanitasi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2024.....	II-79
Gambar 2. 53	Peta Sebaran Capaian RT Akses Sanitasi Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	II-80
Gambar 2. 54	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sumatera Selatan 2020-2024.....	II-84
Gambar 2. 55	Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2023-2024.....	II-86
Gambar 2. 56	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2024	II-89
Gambar 2. 57	Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan.....	II-90
Gambar 2. 58	Analisis Growth PDRB Sumatera Selatan 2017-2022	II-93
Gambar 2. 59	Income dan Labour Multiplier Sumsel 2017-2022	II-95
Gambar 2. 60	Perkembangan Kemiskinan Sumatera Selatan	II-96
Gambar 2. 61	PDRB Per kapita Harga Berlaku dan Harga Konstan Sumatera Selatan.....	II-98

Gambar 2. 62	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Selatan.....	II-99
Gambar 2. 63	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Agustus 2022-Agustus 2024 (%).....	II-99
Gambar 2. 64	Gini Rasio Provinsi Sumatera Selatan	II-100
Gambar 2. 65	Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Selatan....	II-101
Gambar 2. 66	Umur Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018-2024	II-103
Gambar 2. 67	Indeks Keluarga Sehat Provinsi Sumatera Selatan ...	II-104
Gambar 2. 68	Stunting di Provinsi Sumatera Selatan	II-106
Gambar 2. 69	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Berdasarkan Jenis Kelamin. 2018-2024.....	II-106
Gambar 2. 70	Harapan Lama Sekolah (HLS) Berdasarkan Jenis Kelamin, 2018-2024.....	II-107
Gambar 2. 71	Angka Literasi/Numerasi Provinsi Sumatera Selatan	II-108
Gambar 2. 72	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Sumatera Selatan.....	II-109
Gambar 2. 73	Capaian Indeks Literasi Digital Tahun 2021	II-111
Gambar 2. 74	Nilai Indeks Literasi Digital Tiga Wilayah di Indonesia Tahun 2022.....	II-111
Gambar 2. 75	Nilai Indeks Literasi Digital Tahun 2020-2022	II-112
Gambar 2. 76	Indeks Pembangunan Kebudayaan.....	II-114
Gambar 2. 77	Indeks Perlindungan Anak Kabupaten/Kota Sumatera Selatan Tahun 2023.....	II-115
Gambar 2. 78	Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2024	II-117
Gambar 2. 79	Perkembangan Dimensi Kesehatan Reproduksi, 2018-2024.....	II-118
Gambar 2. 80	Perkembangan Indikator Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan dengan Pendidikan Minimal SMA, Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2024	II-119
Gambar 2. 81	Perkembangan Indikator Keterwakilan di Legislatif, 2018-2024.....	II-119
Gambar 2. 82	Perkembangan Dimensi Pasar Tenaga Kerja, 2018-2024.....	II-120

Gambar 2. 83	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota, 2023-2024.....	II-121
Gambar 2. 84	Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sumatera Selatan.....	II-122
Gambar 2. 85	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Sumatera Selatan.....	II-124
Gambar 2. 86	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).....	II-125
Gambar 2. 87	Angka Kelahiran Total (Total Fertilly Rate/TFR) Per wanita usia subur (15-49 Tahun) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2024	II-126
Gambar 2. 88	Angka Ketergantungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II-127
Gambar 2. 89	Distribusi Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan 2024	II-128
Gambar 2. 90	Rasio Kewirausahaan Daerah Tahun 2020-2024.....	II-133
Gambar 2. 91	Perkembangan Angkatan Kerja dan TPAK Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Selatan.....	II-135
Gambar 2. 92	Skor Indeks Inovasi Daerah di Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2024.....	II-136
Gambar 2. 93	Capaian Nilai Indeks TIK Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023	II-138
Gambar 2. 94	Capaian Nilai Sub Indeks TIK Provinsi Sumatera Selatan, 2019-2023.....	II-139
Gambar 2. 95	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Provinsi Sumatera Selatan	II-140
Gambar 2. 96	Persentase Nilai Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Selatan.....	II-141
Gambar 2. 97	Jumlah Penumpang Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan.....	II-149
Gambar 2. 98	Angkutan Sungai di Sungai Musi	II-149
Gambar 2. 99	Pelabuhan Penyebrangan Tanjung Api-api	II-158
Gambar 2. 100	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Selatan, 2023	II-160
Gambar 2. 101	Jumlah Kepala Keluarga MBR yang Tidak Memiliki Rumah di Provinsi Sumatera Selatan, 2023	II-161

Gambar 2. 102 Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Hunian Layak Sumatera Selatan	II-164
Gambar 2. 103 Perkembangan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2019-2024 di Provinsi Sumsel	II-165
Gambar 2. 104 Inflasi Sumatera Selatan	II-172
Gambar 2. 105 Hasil SPI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2024.....	II-179
Gambar 2. 106 Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Selatan, 2019-2023.....	II-186
Gambar 2. 107 Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime rate) (Per 100.000 Penduduk) di Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2023	II-188
Gambar 2. 108 Jumlah Kasus dan Penyelesaian Tindak Pidana di Provinsi Sumatera Selatan (%), 2019-2023.....	II-189
Gambar 2. 109 Skor Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2024	II-191
Gambar 2. 110 Skor Indeks Daya Saing Daerah Menurut Pilar di Provinsi Sumatera Selatan, 2024.....	II-192
Gambar 2. 111 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2024	II-234
Gambar 2. 112 Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2024..	II-235
Gambar 2. 113 Proporsi Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2024	II-236
Gambar 2. 114 Proporsi Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2024.....	II-237
Gambar 2. 115 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2024	II-238
Gambar 2. 116 Proporsi Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2024	II-239
Gambar 2. 117 Proporsi Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2024	II-241

Gambar 2. 118	Proporsi Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2024.....	II-242
Gambar 2. 119	Proporsi Realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2024	II-244
Gambar 3. 1	Peta Kawasan di Provinsi Sumatera Selatan	III-27
Gambar 3. 2	Peta Proyek Strategis di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI No.12 Tahun 2024	III-31
Gambar 3. 3	Lingkup Wilayah Patungraya Agung	III-39
Gambar 3. 4	Peta Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Selatan ..	III-40
Gambar 3. 5	KSP Kawasan Sekayu dan Sekitarnya	III-41
Gambar 3. 6	KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya	III-43
Gambar 3. 7	Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya	III-44
Gambar 3. 8	KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya	III-46
Gambar 3. 9	KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya	III-48
Gambar 3. 10	Peta Arah Pengembangan Wilayah Kota Palembang	III-52
Gambar 3. 11	Peta Arah Pengembangan Wilayah Kab Banyuasin	III-56
Gambar 3. 12	Peta Arah Pengembangan Wilayah Kab Ogan Ilir ..	III-63
Gambar 3. 13	Peta Arah Pengembangan Wilayah Kab Ogan Komering Ilir	III-67
Gambar 3. 14	Peta Arah Pengembangan Wilayah Kab Musi Banyuasin	III-72
Gambar 3. 15	Peta Arah Pengembangan Wilayah Kota Lubuk Linggau	III-77
Gambar 3. 16	Peta Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas	III-80
Gambar 3. 17	Peta Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.....	III-85
Gambar 3. 18	Peta Arah Pengembangan Wilayah Kota Pagar Alam	III-89
Gambar 3. 19	Peta Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Lahat	III-93
Gambar 3. 20	Peta Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Empat Lawang.....	III-97
Gambar 3. 21	Peta Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Muara Enim	III-101

Gambar 3. 22	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kota Prabumulih	III-107
Gambar 3. 23	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kab PALI	III-110
Gambar 3. 24	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kab OKU Timur	III-114
Gambar 3. 25	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kab OKU	III-118
Gambar 3. 26	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kab OKU Selatan	III-123
Gambar 3. 27	Produksi Batubara Sumatera Selatan 2024-2025 (juta ton)	III-127

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Daerah untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. RPJMD adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah karena masa akhir jabatan kepala daerah periode 2018-2023 berakhir, maka Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Periode Transisi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026. Selanjutnya, periode pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 dimulai

sejak dilantiknya Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang pada tanggal 20 Februari 2025.

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 merupakan RPJMD Pertama dari tahapan pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD untuk periode ini, memiliki nilai strategis yang sangat tinggi, karena RPJMD yang disusun ini, merupakan periode pertama dimana tuntutan untuk mencapai target RPJPD juga memasuki periode pertama. Selain itu, RPJMD Tahun 2025-2029 ini juga selaras dan berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029. Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah “SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA” dalam rangka mencapai visi tersebut dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 7 Misi yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing.
2. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Mewujudkan keterkaitan (*nexus*) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.

7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 melewati beberapa tahapan sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD antara lain Forum Konsultasi Publik pada tanggal 19 Maret 2025, Pengajuan kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan awal bersama pada tanggal 27 Maret 2025, Pembahasan dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD pada tanggal 8 April 2025, Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Gubernur dengan Ketua DPRD tentang Rancangan Awal RPJMD pada tanggal 16 Mei 2025, Konsultasi Rancangan Awal RPJMD ke Kemendagri pada tanggal 28 Mei 2025, Musrenbang RPJMD pada tanggal 16 Juni 2025, Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Ketua DPRD dan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD pada tanggal 7 Agustus 2025, Evaluasi Ranperda tentang RPJMD oleh Kemendagri pada tanggal 14 Agustus 2025, dan berbagai tahapan lainnya sampai dengan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada tanggal 29 Agustus 2025.

Penyusunan RPJMD, telah melalui analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif dalam rangka mendukung perumusan isu-isu strategis daerah dan arah kebijakan serta rencana program pembangunan. Salah satu rekomendasi yang menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan dan program pembangunan. Untuk itu RPJMD Provinsi Sumatera Selatan juga didasarkan pada KLHS RPJMD dalam rangka mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7).

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka penyusunan RPJMD ini sudah memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan.

Keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, secara detail seperti dijelaskan sebagai berikut:

1.3.1 RPJMD dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 merupakan RPJMD Pertama dari tahapan pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD untuk periode ini memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan

ke depan, karena sekaligus menjadi tahap awal untuk mencapai target periode pertama RPJPD.

Pada RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 dinyatakan visi yang ingin dicapai oleh Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2045 adalah: “Sumsel Maju, Terdepan dan Berkelanjutan (MAPAN)”. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, misi Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 adalah (1) Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumber Daya Manusia Berkarakter dan Berdaya Saing, (2) Mewujudkan Transformasi Ekonomi Menuju Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional, (3) Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Berkualitas, (4) Memantapkan Ketahanan Daerah Tangguh, Berkualitas dan Berkelanjutan, (5) Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi, (6) Mewujudkan Pemerataan Antar Daerah dan Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan, (7) Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, dan (8) Memperkuat Kemandirian dan Inovasi Pembiayaan Pembangunan.

Tahapan pertama RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini difokuskan untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur. Fokus pembangunan ini dilaksanakan melalui berbagai arah kebijakan. Adapun arah kebijakan pada tahapan kesatu ini, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan, keterampilan dan kesehatan.
2. Peningkatan perlindungan sosial adaptif melalui perluasan perlindungan yang menyeluruh sesuai dengan kerentanan yang berprinsip adil dan inklusif.
3. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kompetensi (*upskilling/reskilling*).
4. Peningkatan infrastruktur terutama di bidang jalan, transportasi, energi, dan komunikasi dalam rangka mendukung pusat pertumbuhan.
5. Peningkatan iklim investasi di seluruh sektor perekonomian pada lingkup Industri Kecil dan Menengah, UMKM, Koperasi, BUMD, BUMDes.
6. Pengembangan IPTEK, inovasi dan digitalisasi di seluruh sektor pembangunan.
7. Identifikasi potensi *green economy*, *blue economy*, dan *circular economy* di seluruh wilayah.

8. Pengembangan daya tarik daerah, terutama dalam bidang pariwisata dan budaya.
9. Identifikasi produk unggulan yang berkelanjutan dalam menuju hilirisasi produk.
10. Pengembangan teknologi di bidang energi dalam mendukung transisi energi yang berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan.
11. Peningkatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah; peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari pendanaan inovatif; peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.
12. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, kebebasan sipil dan kesetaraan, kapasitas fungsi dan integritas lembaga demokrasi.
13. Peningkatan ketahanan keluarga dan pengarusutamaan gender.
14. Penguatan toleransi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan menghargai keberagaman, serta penguatan kebudayaan dalam melestarikan warisan budaya lokal dan nasional.
15. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut.
16. Penyelarasan rencana pembangunan dan tata ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.
17. Pengembangan teknologi di bidang pangan dan air untuk meningkatkan produktivitas Sumber Daya Alam.
18. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar kawasan permukiman, bidang pendidikan dan kesehatan di semua wilayah terutama di daerah terpencil dan tertinggal.

1.3.2 RPJMD dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Pulau Sumatera dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Selatan. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota sebagai pusat

pertumbuhan dan pusat kegiatan. RTRW Provinsi Sumatera Selatan memuat strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang untuk mewujudkan pembangunan yang merata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Sesuai dengan RTRW Provinsi Sumatera Selatan, pengembangan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang yang terdiri dari kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Kebijakan dan strategi penataan ruang ini diintegrasikan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sehingga terjadi sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen rencana tata ruang.

Sinkronisasi dan sinergi RPJMD dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan juga diarahkan:

- (1) Selaras dengan tujuan penataan ruang dalam RTRW “mewujudkan ruang wilayah provinsi yang produktif, berkualitas dan harmonis berbasis potensi sumber daya lokal menuju provinsi maju, unggul dan terdepan secara berkelanjutan”.
- (2) Selaras dengan kebijakan penataan ruang dalam RTRW, sebagaimana kebijakan penataan ruang Provinsi Sumatera Selatan merupakan upaya mewujudkan tujuan penataan ruang. Terdapat 7 (tujuh) kebijakan tata ruang Provinsi Sumatera Selatan yang mengakomodir 3 (tiga) aspek utama yaitu aspek struktur ruang, aspek pola ruang, dan kawasan strategis provinsi sebagai berikut:
 - a. Pengembangan sistem pusat permukiman secara berhierarki, terpadu dan berkualitas serta berketahanan iklim;
 - b. Pengembangan dan peningkatan konektivitas serta aksesibilitas sistem jaringan prasarana wilayah yang berkualitas secara terpadu;
 - c. Pemantapan kawasan berfungsi lindung secara berkelanjutan;
 - d. Pengembangan fungsi budidaya secara produktif, terpadu dan berkelanjutan berbasis potensi wilayah;
 - e. Pengembangan kawasan strategis berbasis potensi wilayah;
 - f. Pemanfaatan ruang secara produktif, harmonis dan berkelanjutan;
 - g. Pengendalian fungsi lindung dan fungsi budidaya secara berkelanjutan.

Dalam menyusun RPJMD, selain berpedoman pada RTRW Provinsi Sumatera Selatan, juga perlu memperhatikan RTRW Nasional dan RTRW daerah/provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini adalah Provinsi: Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka

Belitung. Telaah terhadap RTRW provinsi yang berbatasan tersebut diarahkan untuk: (1) tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi; (2) keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi dan kabupaten/kota; (3) dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.3.3 RPJMD dan RPJM Nasional

Periode pelaksanaan RPJMD Sumatera Selatan 2025-2029 bersinggungan dengan dokumen perencanaan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Dalam penyusunannya, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 memperhatikan RPJMN, dan harus disinkronisasikan dan diselaraskan dengan agenda Asta Cita Pemerintahan 2025-2029 serta kebijakan dan berbagai program prioritas yang ditetapkan.

Dasar hukum penyelarasan RPJMD dengan RPJMN didasarkan pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa “RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya **berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional**, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif”.

Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan “RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan **berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.**”

Selain itu juga pada Pasal 272 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 disebutkan bahwa, “Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam **rencana strategis perangkat daerah** sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) **diselaraskan dengan** pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam **rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian** untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.”

Visi RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dimana visi tersebut dirumuskan menjadi 8 (delapan) misi yang dikenal sebagai asta cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan wilayah yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 untuk mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Dukungan terhadap prioritas pembangunan wilayah dan sejumlah Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang lokasinya

berada di Provinsi Sumatera Selatan menjadi bagian dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

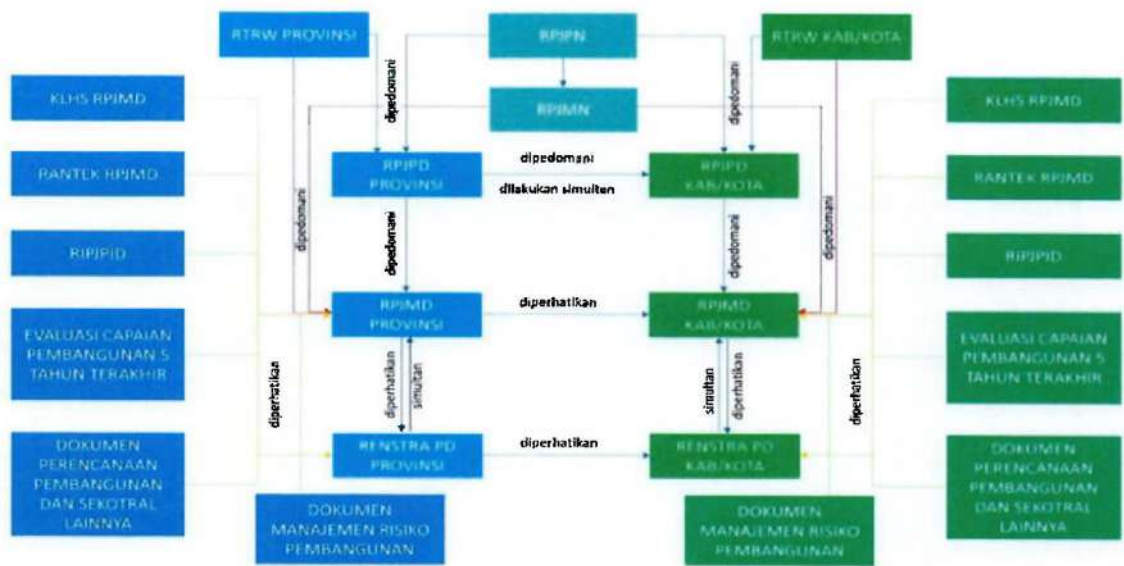
1.3.4 RPJMD dan Rencana Strategis

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan. Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan PD disertai dengan indikator kinerja utama dan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Strategis PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja PD (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

1.3.5 RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran, serta bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dengan adanya RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, artinya akan menjadi pedoman untuk RKPD Perubahan tahun 2025 dan RKPD induk tahun 2026 sampai 2029 atau periode terakhir pada siklus perencanaan lima tahunan.

1.3.6 RPJMD dan RPPLH

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan daerah. Penyusunan RPPLH diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 10 sampai dengan Pasal 12, yang menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun RPPLH sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan. RPPLH memuat gambaran mengenai kondisi sumber daya alam, potensi dan permasalahan lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta arah kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang harus menjadi acuan dalam setiap perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa RPPLH menjadi dasar dan wajib dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini menunjukkan bahwa RPPLH bukanlah dokumen yang berdiri

sendiri, melainkan instrumen yang memastikan agar setiap arah kebijakan pembangunan daerah selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan harus mengintegrasikan substansi RPPLH ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, hingga program pembangunan daerah.

Kedudukan RPPLH dalam RPJMD sangat penting, karena melalui dokumen ini pemerintah daerah memiliki pijakan yang kuat dalam menentukan batas pemanfaatan sumber daya alam, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta menjaga kualitas lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung yang ada. Integrasi RPPLH ke dalam RPJMD dimaksudkan agar pembangunan daerah tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekologi, keseimbangan sosial, serta keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan secara komprehensif dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan secara umum yang berisi rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang disusun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2025-2029.

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi para pihak dalam rangka terjaganya konsistensi perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan, sebagaimana diamanatkan baik dalam dokumen perencanaan tingkat nasional, regional maupun provinsi.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mendukung terwujudnya visi dan misi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2045 dalam mempercepat pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dengan fokus pada pemantapan kelembagaan dan pengelolaan sumberdaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan proses percepatan pembangunan;
2. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh pihak yang akan memerlukan panduan dalam rangka keselarasan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal;
4. Mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu pembangunan serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pencapaian kinerja yang didasari oleh analisis data-data yang terkini dan akurat;
5. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapainya pemanfaatan potensi daerah secara optimal.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 : LATAR BELAKANG

1.2 : DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1.3 : HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

1.4 : MAKSUD DAN TUJUAN

1.5 : SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.2 : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

	2.3	: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB III		: VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
	3.1	: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
	3.2	: STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV		: PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
	4.1	: PROGRAM PERANGKAT DAERAH
	4.2	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB V		: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

A. Luas dan Letak Geografis

Provinsi Sumatera Selatan memiliki letak strategis, terletak antara 1°25'13"-4°55'17" Lintang Selatan dan 102°3'52"-106°19'45" Bujur Timur dengan batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan posisi geografis adalah:

- Sebelah Utara : Provinsi Jambi
- Sebelah Selatan : Provinsi Lampung
- Sebelah Barat : Provinsi Bengkulu
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Secara administrasi, Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 kabupaten/kota yang dibagi menjadi 13 wilayah kabupaten dan 4 wilayah kota dengan Ibukota Provinsi berada di Kota Palembang. Provinsi Sumatera Selatan memiliki luas sebesar 86.771,918 km² yang meliputi wilayah daratan dan wilayah perairan pesisir. Provinsi Sumatera Selatan memiliki 241 kecamatan, 403 kelurahan, dan 2.856 desa. Luas wilayah terbesar yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu seluas 17.075,713 km², sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kota Palembang seluas 352,523 km².

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Daratan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	Ogan Komering Ulu	3.774,497	13	14	143
2	Ogan Komering Ilir	17.075,713	18	13	314
3	Muara Enim	6.763,912	22	10	246
4	Lahat	4.333,065	24	18	360
5	Musi Rawas	6.122,588	14	13	186
6	Musi Banyuasin	14.550,788	15	13	229
7	Banyuasin	12.258,593	21	25	288

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
8	Ogan Komering Ulu Timur	3.412,716	20	7	305
9	Ogan Komering Ulu Selatan	4.369,252	19	7	252
10	Ogan Ilir	2.302,858	16	14	227
11	Empat Lawang	2.234,097	10	9	147
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1.842,563	5	6	65
13	Musi Rawas Utara	5.937,803	7	7	82
14	Palembang	352,523	18	107	0
15	Pagar Alam	625,913	5	35	0
16	Lubuklinggau	367,726	8	72	0
17	Prabumulih	447,311	6	33	12
Sumatera Selatan		86.771,918	241	403	2.856

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, diolah



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Peta Batas Administrasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-1-6117 Tahun 2022 dan Garis Pantai Tahun 2021, BIG

B. Kondisi Fisik Wilayah

1) Topografi dan Kemiringan Lereng

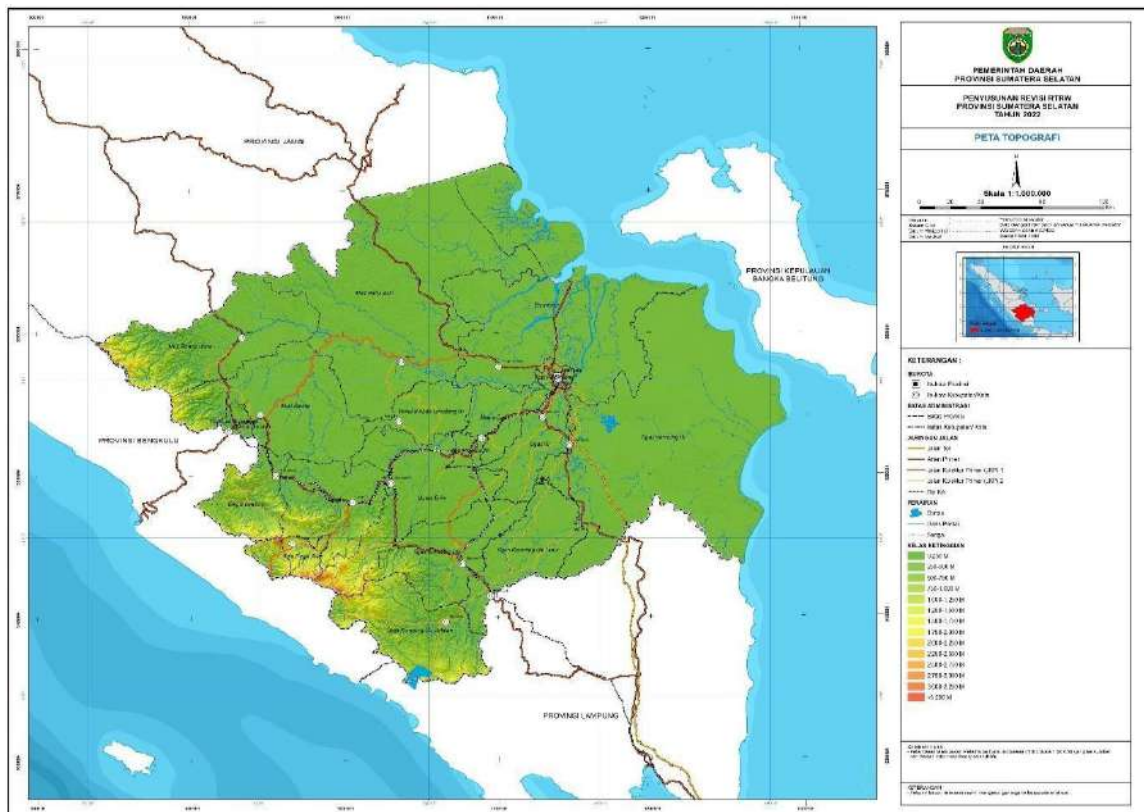
Provinsi Sumatera Selatan memiliki topografi yang bervariasi mulai dari daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan dengan ketinggian wilayah antara 80-3.162 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sebanyak 85% wilayah Provinsi Sumatera Selatan berada pada ketinggian rata-

rata antara 250-500 mdpl pada bagian tengah sampai ke wilayah pesisir di bagian utara. Salah satu kota dengan topografi tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kota Pagar Alam dengan titik tertinggi berada di puncak Gunung Dempo (3.173 mdpl), diikuti oleh Gunung Bungkok dengan ketinggian 2.125 mdpl, kemudian Gunung Seminung dengan ketinggian 1.964 mdpl, dan Gunung Patah dengan ketinggian 1.107 mdpl. Wilayah Timur merupakan daerah pantai yang terdiri dari rawa dan perairan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasi di wilayah timur berupa tumbuhan Palmase dan kayu rawa (Bakau).

Tabel 2. 2 Ketinggian Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Luas Ketinggian (ha)				
		Sangat Rendah 0-600 mdpl	Rendah 600-1.200 mdpl	Sedang 1200-1.800 mdpl	Cukup Tinggi 1.800-2.400mdpl	Tinggi 2.400-3.300 mdpl
1	Ogan Komering Ulu	346.489,82	25.422,91	4.928,22	608,74	-
2	Ogan Komering Ilir	1.706.898,63	-	-	-	-
3	Muara Enim	580.795,50	35.524,63	37.245,43	20.273,62	2.551,99
4	Lahat	291.438,92	104.124,50	33.486,69	3.046,27	1.210,08
5	Musi Rawas	570.783,52	26.879,07	14.082,15	514,03	-
6	Musi Banyuasin	1.455.078,76	-	-	-	-
7	Banyuasin	1.226.275,57	-	-	-	-
8	Ogan Komering Ulu Selatan	242.100,98	154.554,61	36.180,42	4.007,24	81,95
9	Ogan Komering Ulu Timur	341.271,62	-	-	-	-
10	Ogan Ilir	230.285,79	-	-	-	-
11	Empat Lawang	139.942,69	62.433,66	18.797,90	2.076,21	159,22
12	Penukal Abab Lematang Ilir	184.256,33	-	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	487.164,66	66.845,60	33.526,70	6.243,34	-
14	Kota Palembang	35.250,59	-	-	-	-
15	Kota Prabumulih	44.731,12	-	-	-	-
16	Kota Pagar Alam	2.133,43	32.137,05	18.294,04	7.616,65	2.410,14
17	Kota Lubuklinggau	36.753,03	19,53	-	-	-
Sumatera Selatan		7.921.650,97	507.941,57	196.541,55	44.386,10	6.413,37

Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044



Gambar 2. 2 Peta Topografi Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

Kelas kelerengan Provinsi Sumatera Selatan dibagi ke dalam lima kelas kelerengan berupa kelas datar dengan kemiringan 0-2%, landai dengan kemiringan 2-15%, agak curam dengan kemiringan 15-25%, curam dengan kemiringan 25-40%, dan sangat curam dengan tingkat kemiringan lebih dari 40%. Berdasarkan data olah spasial, Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh kelas kelerengan datar (0-2%) sebesar 78,65% atau seluas 6.825.713,57 ha. Sementara kelas lereng sangat curam dengan tingkat kemiringan >40% hanya sebesar 144,09 ha yang tersebar di wilayah selatan.

No	Kabupaten/Kota	Luas Kelerengan (ha)				
		Datar (0-2%)	Landai (2-15%)	Agak Curam (15-25%)	Curam (25-40%)	Sangat Curam >40%
15	Kota Prabumulih	42.140,40	2.590,71	-	-	-
16	Kota Pagar Alam	14.790,54	47.187,79	568,32	43,02	1,64
17	Kota Lubuklinggau	21.280,92	15.480,77	8,67	2,20	-
Sumatera Selatan		6.825.713,57	1.834.627,24	15.107,90	1.340,75	144,09

Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

A. Jenis Tanah

Keadaan jenis tanah di Sumatera Selatan terdiri dari beberapa jenis yaitu:

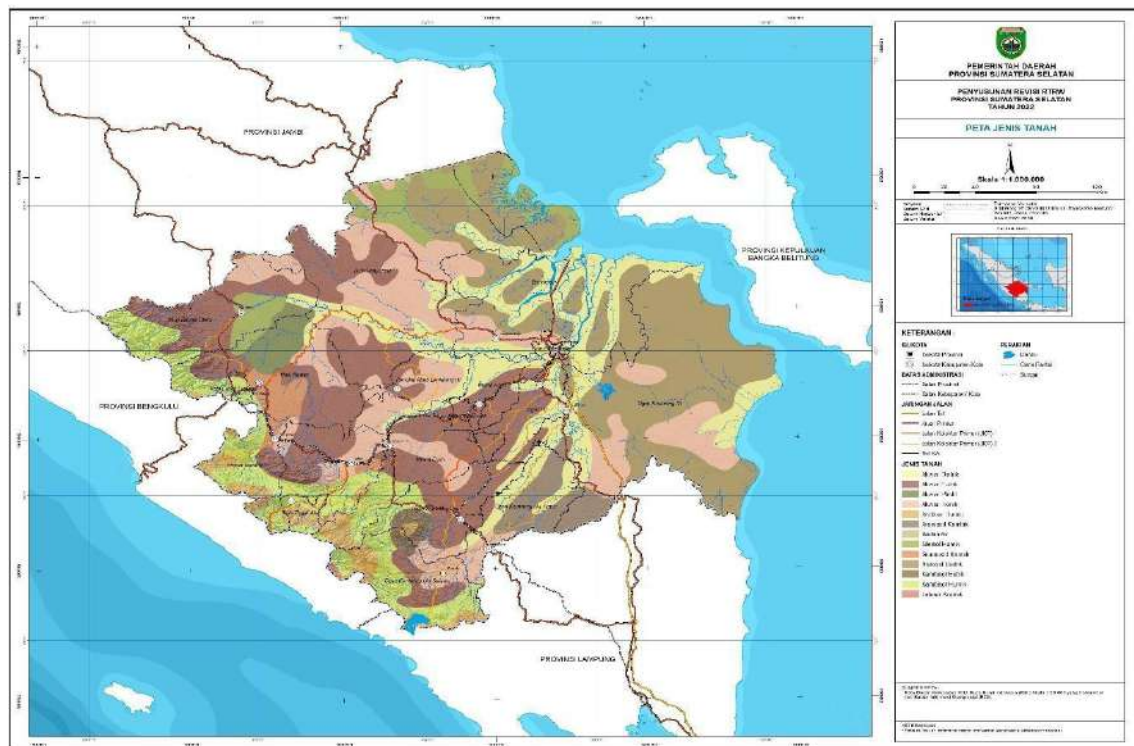
- Alluvial, jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur, total luas 4.954.800,82 ha atau sekitar 57% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan, terdapat di sepanjang Sungai Musi, Sungai Lematang, Sungai Ogan, Sungai Komering, dan Punggung Bukit Barisan. Tanah Aluvial umumnya subur karena memiliki kandungan air yang cukup. Tanah ini banyak dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan kelapa, palawija, jagung, kedelai, ketela pohon, dan umbi-umbian.
- Histosol (tanah gambut), terdapat di sepanjang pantai dan dataran rendah. Luas tanah gambut pada Provinsi Sumatera Selatan mencapai 1.794.484,26 ha atau sekitar 20% dari luas Provinsi Sumatera Selatan.
- Litosol, tersebar di pinggiran pegunungan terjal Danau Ranau dengan Patahan di sepanjang Bukit Barisan.
- Hidromorf, tersebar di dataran rendah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim.

Tabel 2. 4 Jenis Tanah Provinsi Sumatera Selatan

Jenis Tanah	Luas (Ha)	Luas (%)
Aluvial Distrik	1.369.910,70	15,79
Aluvial Eutrik	1.878.429,02	21,65
Aluvial Plintit	139.870,43	1,61
Aluvial Tionik	1.566.590,68	18,05
Andosol Humic	237.747,38	2,74
Arenosol Kambik	238.227,35	2,75
Badan Air	10.982,20	0,13

Jenis Tanah	Luas (Ha)	Luas (%)
Gleisol Humik	405.042,52	4,67
Grumusol Kromik	136.809,25	1,58
Histosol Distrik	1.794.484,26	20,68
Kambisol Eutrik	64.406,32	0,74
Kambisol Humik	829.216,90	9,56
Latosol Kromik	5.216,55	0,06
Grand Total	8.676.933,55	100,00

Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044



Gambar 2. 4 Peta Jenis Tanah Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

B. Klimatologi

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai iklim tropis dan basah dengan curah hujan per tahun pada tahun 2021 mencapai 2.598,20 mm. Curah hujan tersebut masih masuk ke dalam kategori normal karena rata-rata curah hujan tahunan wilayah di Indonesia berkisar di angka 2.000 mm. Untuk hari hujan paling tinggi berada di bulan November dan Desember dengan jumlah hari hujan mencapai 23 hari.

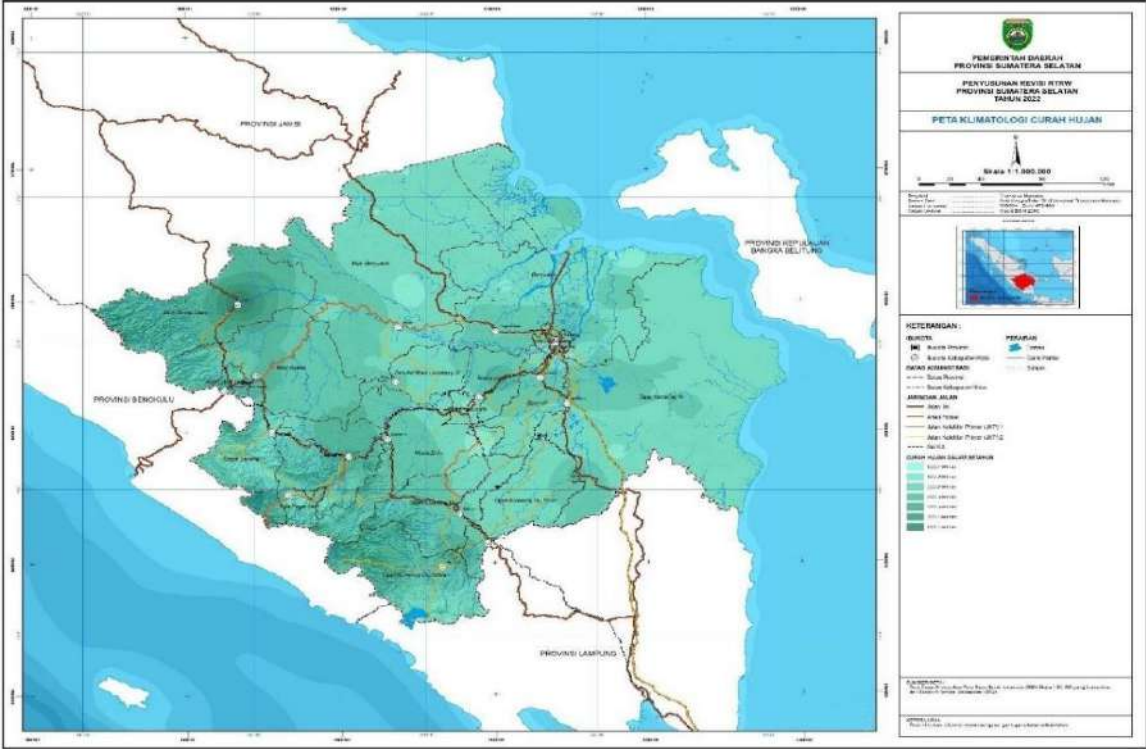
Suhu udara di Provinsi Sumatera Selatan masih terhitung normal, dengan suhu rata-rata tahunan 29,10 C°, karena masih berkisar 21,3 C° hingga

29,7 C°. Kelembaban udara pada Provinsi Sumatera Selatan terhitung cukup tinggi karena untuk kelembaban udara rata-rata dalam satu tahun mencapai 78,50%.

Tabel 2. 5 Kondisi Klimatologi Provinsi Sumatera Selatan

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Suhu Udara rata-rata (C°)	Kelembaban Udara rata-rata (%)	Tekanan Udara (mb)	Kecepatan Angin (Knot)
Januari	235,70	17	27,70	82,10	1.008,30	3,90
Februari	181,40	19	28,20	80,90	1.008,90	4,10
Maret	251,90	19	28,80	78,50	1.008,30	2,80
April	127,60	13	29,20	77,30	1.008,90	2,30
Mei	144,80	15	29,80	77,70	1.007,70	2,40
Juni	60,00	8	29,80	74,70	1.009,00	2,80
Juli	124,70	6	29,50	73,40	1.008,70	3,30
Agustus	116,10	13	28,80	77,40	1.009,30	3,10
September	229,00	12	29,20	78,90	1.008,70	3,00
Oktober	118,10	12	30,10	78,30	1.008,40	2,80
November	421,40	23	28,90	80,50	1.007,40	2,00
Desember	587,50	23	28,80	83,30	1.009,10	3,00
Tahunan	2.598,20	235	29,10	78,50	1.008,60	2,90

Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044



Gambar 2. 5 Peta Klimatologi Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

C. Geologi

Geologi Cekungan Sumatera Selatan adalah suatu hasil kegiatan tektonik yang berkaitan erat dengan penunjaman Lempeng Indi-Australia, yang bergerak ke arah utara hingga timur laut terhadap Lempeng Eurasia yang relatif diam. Zona penunjaman lempeng meliputi daerah sebelah barat Pulau Sumatera dan selatan Pulau Jawa. Beberapa lempeng kecil (*micro-plate*) yang berada di antara zona interaksi tersebut turut bergerak dan menghasilkan zona konvergensi dalam berbagai bentuk dan arah. Penunjaman lempeng Indi-Australia tersebut dapat mempengaruhi keadaan batuan, morfologi, tektonik dan struktur di Sumatera Selatan. Tumbukan tektonik lempeng di Pulau Sumatera menghasilkan jalur busur depan, magmatik, dan busur belakang.

Batuan yang mendasari Cekungan Sumatera Selatan merupakan kompleks batuan berumur pra-tersier, yang terdiri dari batu gamping, andesit, granodiorit, pilit, kuarsit dan granit. Jenis batuan yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- (1). Formasi Lahat terdiri dari endapan tufa, aglomerat, breksi tufan, andesit, serpih, batu lanau, batu pasir dan batubara;
- (2). Formasi Talang Akar terdiri dari batu pasir berukuran butir kasar-sangat kasar, serpih, batu lanau dan batubara;
- (3). Formasi Baturaja terdiri dari batu gamping terumbu, serpih gampingan dan napal atau batu lempung gampingan;
- (4). Formasi Baturaja terdiri dari serpih gampingan dan serpih lempungan;
- (5). Formasi Air Benakat dengan penyusun utama batu pasir;
- (6). Formasi Muara Enim terdiri dari batu pasir, batu lanau, batu lempung dan batubara; dan
- (7). Formasi Kasai terdiri dari batu pasir tufaan dan tufa.

Tabel 2. 6 Formasi Batuan Provinsi Sumatera Selatan

Umur/ Masa	Formasi Batuan	Luas (Ha)
Jura	Batuan Terobosan	6.381,46
	Formasi Asai	2.781,52
	Granit	604,96
Kapur	Diorite Kuarsa	491,60
	Formasi Garba	7.262,59
	Formasi Lingsing	7.924,29
	Formasi Menanga	143,21
	Formasi Peneta	17.851,76
	Formasi Rawas	9.381,14

Umur/ Masa	Formasi Batuan	Luas (Ha)
	Formasi Saling	11.230,51
Trias	Formasi Sepingtang	1.452,21
	Formasi Situlanglang	2.145,32
	Granit Kapur	20.538,07
	Granodiorit	4.687,15
	Satuan Batuan Ultrabasa	181,57
Kuarter	Aluvial	540.478,01
	Andesit	7.098,28
	Batuan Gunungapi Kuarter	55.048,38
	Batuan Gunungapi Peuet Sague, Meuntoi	458,92
	Batuan Gunungapi Rhyo-andesite	16.944,00
	Endapan Danau	2.676.134,78
	Endapan Rawa	136.279,08
	Formasi Kasai	1.749.522,41
	Formasi Meulaboh	42.180,15
	Formasi Pasumah	299,40
	Formasi Ranau	273.390,72
	Formasi Serei	1.313,79
	Granit	91.415,06
	Gunungapi Dempo	224.886,67
	Gunungapi Masurai	110.963,45
	Gunungapi Pesawaran	61.864,62
	Gunungapi Sekincau	101.569,86
	Pasir Kuarsa	11.532,32
	Porfiri Andesit dan dasit	67.298,74
	Pusat Gunungapi Geureundong	36.487,92
	Satuan Batuan GunungApi Andesit Basal	2.503,33
Neogen	Bancuh Tak Terpetakan	9.569,89
	Batuan Intrusi	6.624,84
	Dasite Piabung	80,32
	Diorit	1.626,46
	Formasi Air Benakat	626.207,16
	Formasi Bal	17.568,94
	Formasi Baong	11.931,87
	Formasi Gumai	145.878,39
	Formasi Gunungapi Haranggaol	1.843,49
	Formasi Hulusimpang	171.624,65
	Formasi Kikim	80.262,48
	Formasi Kueh	4.497,09
	Formasi Lakitan	18.808,99
	Formasi Maonai	149,74
	Formasi Muara Enim	1.220.022,01

D. Hidrologi dan Hidrogeologi

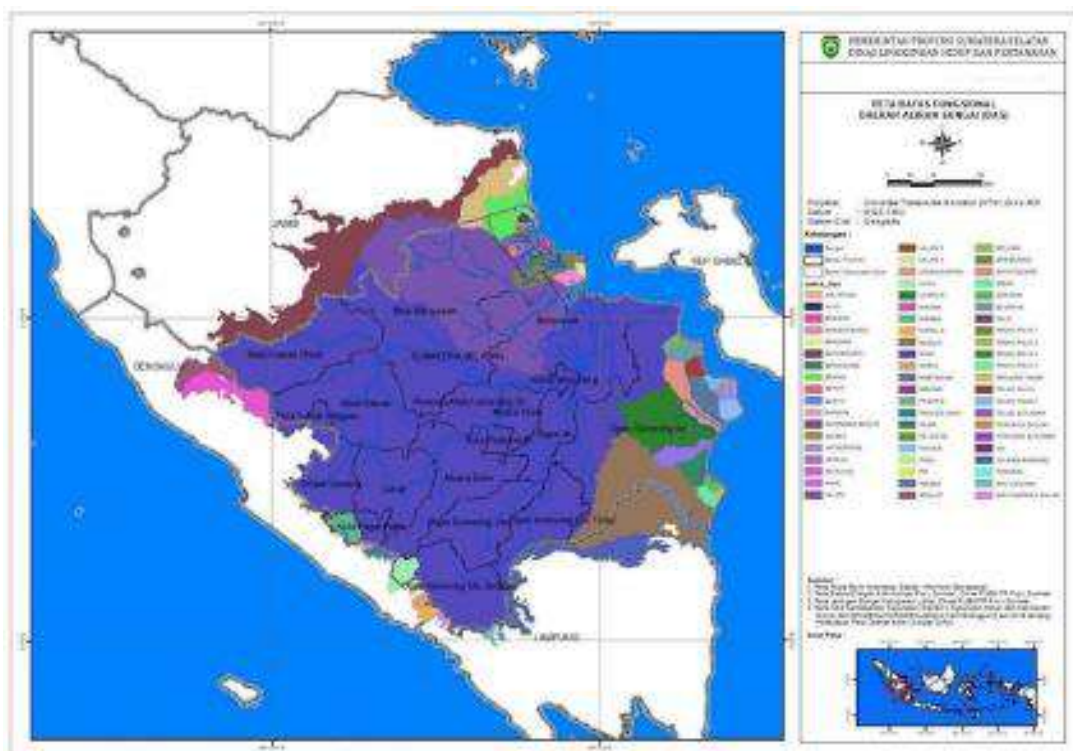
Wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah kaya sumber daya air. Sumber daya air dibedakan menjadi sumber daya permukaan dan air tanah. Persediaan air di wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya sangat tergantung dari sungai-sungai utama. Terdapat sembilan sungai besar atau sungai utama di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Sungai Musi, Sungai Rawas, Sungai Lakitan, Sungai Kelingi, Sungai Semangus, Sungai Lematang, Sungai Komering, Sungai Ogan, dan Sungai Batanghari Leko (atau dikenal juga dengan sebutan Batanghari Sembilan). Sebagian besar sungai-sungai di Provinsi Sumatera Selatan bermata air dari Bukit Barisan, kecuali Sungai Mesuji, Sungai Lalan, dan Sungai Banyuasin. Sungai yang bermata air dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai Musi beserta anak sungainya seperti Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Rupit, dan Sungai Rawas.

Air sungai di Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya berwarna keruh dan membawa endapan lempung. Endapan muncul karena kegiatan penebangan pohon-pohon di hutan yang menyebabkan terjadinya erosi di daerah hulu dan sedimentasi di sepanjang aliran sungai. Kondisi tersebut juga dapat mengakibatkan pendangkalan dan pergeseran pola aliran sungai.

Air permukaan merupakan sumber daya air paling strategis karena dapat dimanfaatkan langsung untuk berbagai keperluan makhluk hidup. Ketersediaan air permukaan di Provinsi Sumatera Selatan dipengaruhi keberadaan lebak, embung, dan rawa. Sebagian besar wilayah merupakan dataran aluvial sehingga ketinggian tanahnya relatif seragam. Kondisi yang datar demikian menyebabkan pengaturan air kurang lancar sehingga timbul daerah genangan pada wilayah yang ketinggiannya hampir sejajar sungai. Selain sungai, Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki sumber daya air berupa rawa dan danau. Daerah rawa terdapat di dataran rendah berupa rawa lebak dan rawa pasang surut. Sedangkan danau yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan antara lain Danau Air Hitam, Danau Ranau, Danau Matana, dan Danau Jembawan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 7 (tujuh) Wilayah Sungai

(WS) meliputi WS Batanghari, WS Bengkulu-Alas-Talo, WS Mesuji-Tulang Bawang, WS Musi-Sugihan-Banyuasin, WS Nasai-Padang-Guci, WS Sebelat-Ketahun-Legi, dan WS Semangka. 7 (tujuh) Wilayah sungai tersebut terbagi ke dalam 50 (lima puluh) Daerah Aliran Sungai (DAS), dan secara fungsional wilayahnya terbagi dalam 62 (enam puluh dua) Daerah Aliran Sungai (DAS), yang tentunya akan berpengaruh terhadap pembangunan. Untuk lebih jelasnya mengenai Wilayah Sungai dan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.7



Gambar 2. 7 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Secara fungsional ada 22 (dua puluh dua) DAS yang melintas batas wilayah administrasi provinsi lain, yaitu:

- 1) DAS Air Hitam melintasi sebagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai hulunya berada di Kabupaten Banyuasin dan hilirnya berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
- 2) DAS Alas melintasi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan sebagai hulu dan Provinsi Bengkulu di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma merupakan bagian hilir.
- 3) Hulu DAS Bangkenang berada pada Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di Kecamatan Dempo Selatan dan

Kecamatan Tanjung Sakti, serta melintasi Kabupaten Kaur dan hilirnya berada di Kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Kedurang yang merupakan wilayah Provinsi Bengkulu.

- 4) Hulu DAS Batanghari melintasi Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, dan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, serta melintasi Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi dan bermuara di Kabupaten Tanjung Jabung tepatnya di Kecamatan Nipah Panjang Provinsi Jambi.
- 5) DAS Benuh melintasi Provinsi Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan hulu DAS Benuh dan bermuara pada Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- 6) DAS Ketahun melintasi wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan sebagai hulu DASnya dan bermuara di Provinsi Bengkulu di Kabupaten Lebong.
- 7) DAS Kinal melintasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan hulu dari DAS Kinal ini, serta bermuara di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
- 8) Hulu DAS Lalan berlokasi di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dan melintasi wilayah Kabupaten Musi Banyuasin serta bermuara pada Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- 9) Hulu DAS Luas berlokasi di Kabupaten Lahat dan melintasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, serta bermuara di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
- 10) Hulu DAS Manna berlokasi di Kabupaten Empat Lawang dan melintasi Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan serta Kabupaten Bengkulu Selatan dengan hilir di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.
- 11) Hulu DAS Manula berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dan melintasi Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dengan hilir di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.
- 12) Hulu DAS Mesuji berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan hilir di Kabupaten Ogan Komering

Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan juga di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

- 13) DAS Musi yang merupakan DAS terbanyak melintas pada sebagian besar wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, dimana hulu DAS ini berada di Provinsi Bengkulu Kabupaten Kepahiang, melintas juga di Provinsi Jambi dan Provinsi Lampung dan bermuara di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- 14) Hulu DAS Nasal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan hilir di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
- 15) Hulu DAS Padang Guci berada pada wilayah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dan bermuara pada Kabupaten Kedurang Provinsi Bengkulu.
- 16) DAS Pino, hulu DAS ini berada pada wilayah Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Empat Lawang tepatnya di Kecamatan Tanjung Sakti, melintasi Kabupaten Bengkulu Selatan dan bermuara di Kabupaten Selema Provinsi Bengkulu.
- 17) DAS Seblat, hulu DAS ini berada di Kabupaten Merangi Kecamatan Jangkat Provinsi Jambi, melintasi juga Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan bermuara ke Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu di Kecamatan Lebong Utara.
- 18) DAS Seluma melintasi wilayah Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang yang merupakan bagian hulu, melintasi juga di wilayah Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah dan berhilir di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.
- 19) DAS Talo melintasi wilayah Kecamatan Pasemah Air Keruh dan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan bagian hulu, serta memiliki hilir di Kabupaten Seluma yang merupakan bagian wilayah Provinsi Bengkulu.
- 20) DAS Tulang Bawang melintasi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang merupakan bagian hulu dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, serta melintasi juga pada wilayah Kabupaten Waykanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Mesuji dan bermuara di Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan wilayah yang ada di Provinsi Lampung.

- 21) DAS Way Semaka memiliki hulu di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, serta melintasi wilayah yang ada di Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Barat yang merupakan bagian hilir.
- 22) DAS Way Simpang Balak memiliki hulu pada Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, melintasi wilayah Provinsi Lampung, dan bermuara di Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

E. Penutupan Lahan

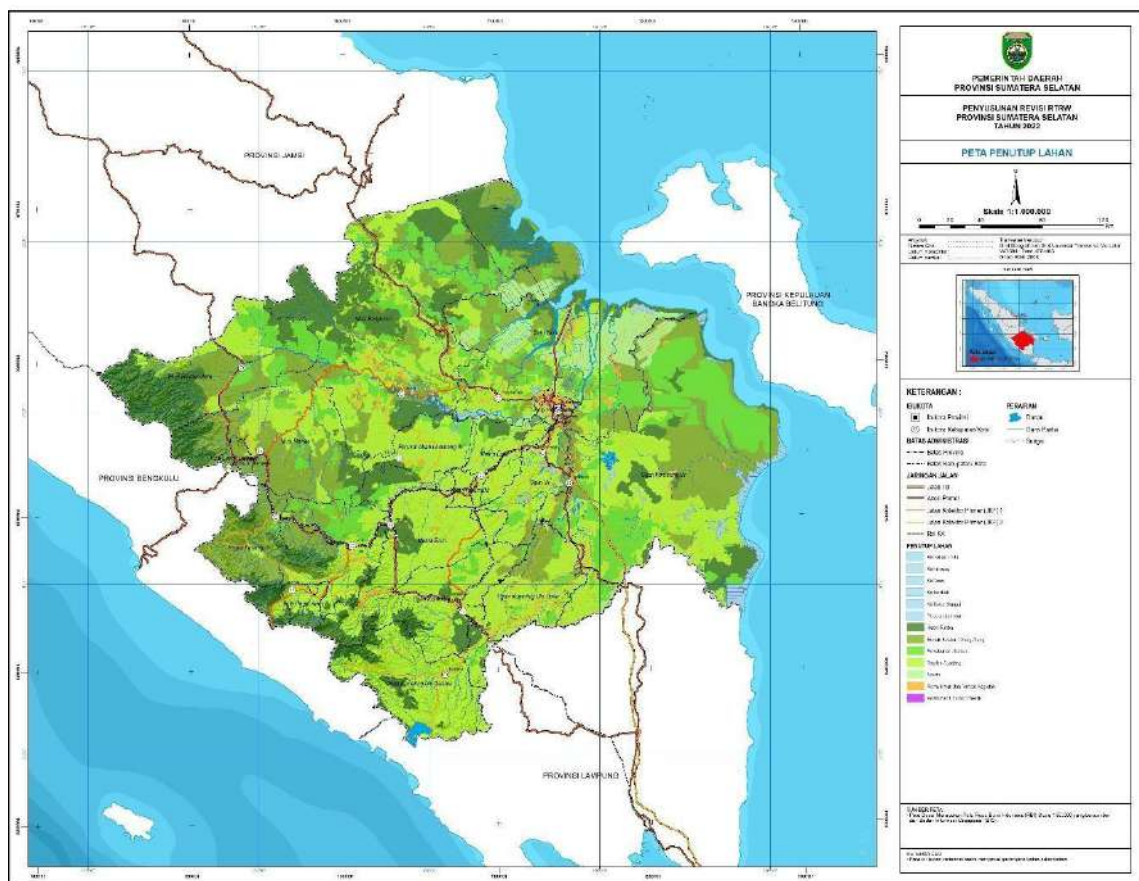
Berdasarkan data KLHK dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat dua jenis penutupan lahan yang meningkat terus menerus yaitu permukiman dan perkebunan. Penutupan lahan permukiman meningkat sebesar 16.057,97 ha pada rentang waktu lima tahun terakhir, dan penutup lahan perkebunan meningkat sebesar 265.606,72 ha. Sementara itu terdapat dua jenis penutupan lahan yang menurun terus menerus setiap tahunnya yaitu rawa dan hutan lahan kering sekunder. Apabila dilihat dari komposisi penutupan lahan di tahun terakhir, Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh penutupan lahan pertanian lahan kering dan perkebunan dengan komposisi sebesar 48,77%.

Tabel 2. 7 Tutupan Lahan Provinsi Sumatera Selatan

Tutupan Lahan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Badan Air	87.769,90	87.885,26	101.230,07	90.103,45	87.209,31
Bandara/ Pelabuhan	466,70	466,70	470,43	545,35	545,35
Hutan Lahan Kering Primer	281.191,25	307.759,11	310.473,63	308.852,11	294.365,92
Hutan Lahan Kering Sekunder	317.601,00	277.655,12	274.875,24	271.935,74	261.026,20
Hutan Mangrove Primer	77.220,21	76.369,45	77.080,82	77.816,97	75.052,57
Hutan Mangrove Sekunder	92.468,98	91.189,49	92.060,07	85.531,52	79.054,09
Hutan Rawa Primer	10.321,19	10.321,19	10.416,63	10.514,72	10.140,64
Hutan Rawa Sekunder	58.142,34	53.912,90	56.764,37	63.144,24	64.951,45
Hutan Tanaman	336.617,57	314.740,86	496.623,71	332.583,19	717.575,52
Lahan Terbuka	564.746,88	492.406,26	334.050,47	661.799,00	49.960,61
Perkebunan	1.255.928,30	1.406.494,02	1.409.104,12	1.425.791,02	1.521.535,01
Permukiman	224.172,03	229.609,30	232.860,10	247.934,32	240.230,00

Tutupan Lahan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertambangan	31.956,05	33.214,38	34.117,68	46.732,21	33.104,99
Pertanian Lahan Kering	518.025,79	532.470,90	529.285,55	516.232,76	514.642,38
Pertanian Lahan Kering Campur	2.857.280,88	2.749.069,69	2.807.832,27	2.763.487,57	2.728.870,23
Rawa	105.270,71	102.676,01	101.092,99	100.311,14	96.629,70
Savana/ Padang Rumput	109.583,72	83.079,06	89.885,75	48.199,99	391,17
Sawah	466.804,60	483.081,95	487.713,90	480.321,21	473.843,31
Semak Belukar	334.436,86	414.378,46	281.864,20	139.543,89	426.379,13
Semak Belukar Rawa	924.592,06	914.144,42	921.048,78	980.679,21	983.469,74
Tambak	60.889,01	54.561,52	66.635,26	63.426,42	56.508,70
Grand Total	8.676.933,55	8.676.933,55	8.676.933,55	8.676.933,55	8.676.933,55

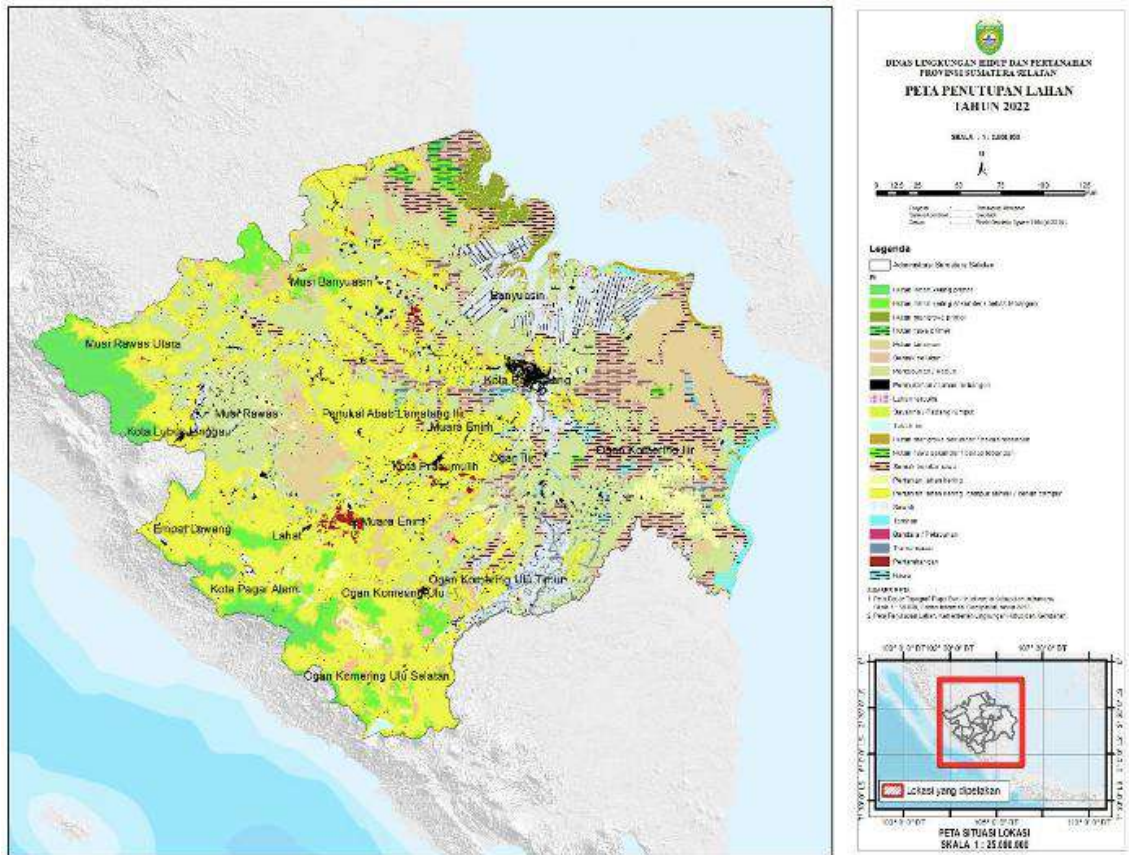
Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044



Gambar 2. 8 Peta Tutupan Lahan Provinsi Sumatera Selatan
Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

Tutupan lahan merupakan keadaan biofisik dari permukaan bumi dan lapisan di bawahnya. Tutupan lahan menjelaskan keadaan fisik permukaan bumi dalam berbagai kategori seperti lahan pertanian, perkebunan, gunung

dan hutan. Tutupan lahan adalah atribut dari permukaan dan bawah permukaan lahan yang mengandung biota, tanah, topografi, air tanah dan permukaan, serta struktur manusia. Pengelompokan tutupan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dapat diamati dari jenis tutupan lahan berdasarkan peta tutupan lahan KLHK tahun 2022 yang dapat dilihat pada Gambar 2.8 dan Tabel 2.8.



Gambar 2. 9 Peta Tutupan Lahan Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2. 8 Luas Tutupan Lahan Provinsi Sumatera Selatan

Tutupan Lahan 2022	Luas (Ha)	Luas (%)
Hutan lahan kering primer	291.097,37	3,34
Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	278.024,13	3,19
Hutan mangrove primer	92.384,19	1,06
Hutan rawa primer	9.587,04	0,11
Hutan tanaman	746.045,94	8,56
Semak belukar	233.575,13	2,68
Perkebunan / Kebun	2.123.964,91	24,37
Permukiman / Lahan terbangun	178.667,55	2,05

Tutupan Lahan 2022	Luas (Ha)	Luas (%)
Lahan terbuka	34.861,96	0,40
Tubuh air	88.026,45	1,01
Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	65.366,18	0,75
Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	61.879,98	0,71
Semak belukar rawa	954.346,16	10,95
Pertanian lahan kering	301.555,95	3,46
Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	2.490.887,04	28,58
Sawah	522.057,85	5,99
Tambak	61.008,43	0,70
Bandara / Pelabuhan	871,55	0,01
Transmigrasi	45.320,55	0,52
Pertambangan	38.348,16	0,44
Rawa	96.741,94	1,11
Grand Total	8.715.490,00	100,00

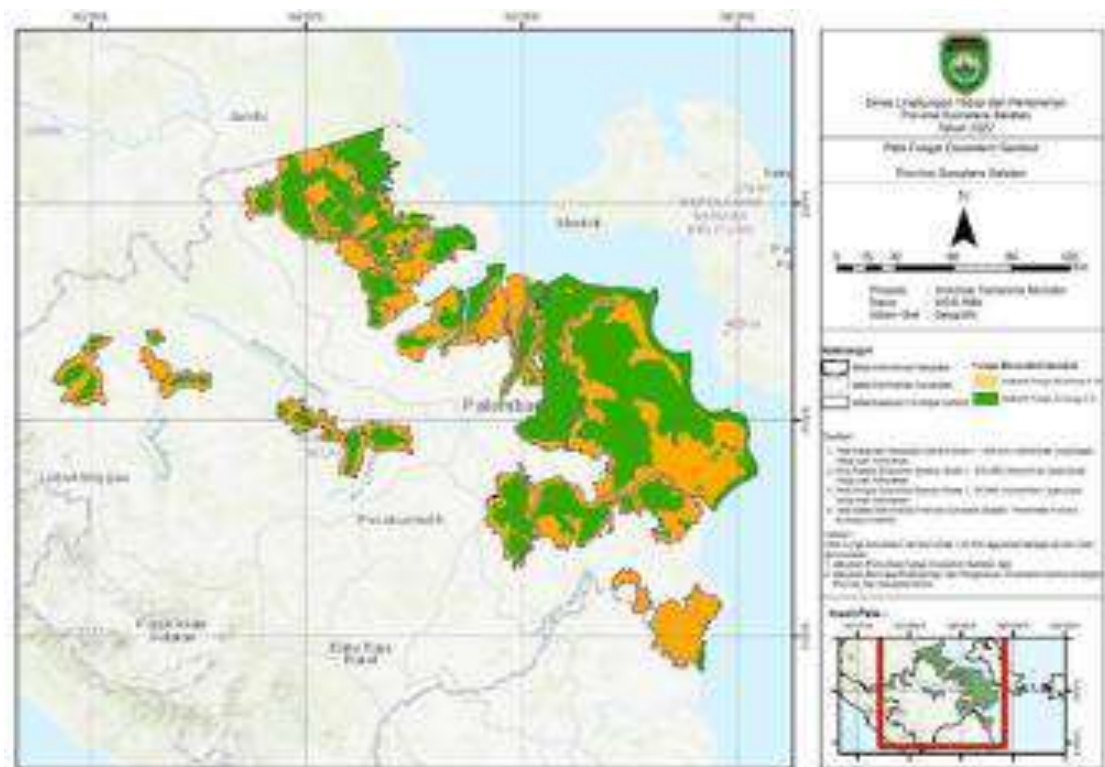
Sumber: Peta Tutupan Lahan KLHK Tahun 2022

Terdapat 22 kelas tutupan lahan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Lahan pertanian dan perkebunan mendominasi luasan tutupan lahan, khususnya pertanian lahan kering campur yang mencapai 28,58% (2.490.887,04 Ha) dari keseluruhan total luas wilayah. Diikuti dari sektor perkebunan dengan luas 2.123.964,91 Ha (24,37%). Total keseluruhan lahan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian sekitar 38% dan lahan perkebunan sebesar 24,37%, sehingga lebih dari setengah lahan di Provinsi Sumatera Selatan dimanfaatkan menjadi lahan yang produktif dalam mendukung sektor pertanian dan perkebunan.

F. Fungsi Ekologis Gambut

KHG merupakan ekosistem gambut yang pada umumnya terletak di antara dua sungai, di antara sungai dengan laut atau rawa-rawa. Pengelolaan lahan dalam satu KHG ini akan saling mempengaruhi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Fungsi ekosistem gambut terdiri dari fungsi lindung dan fungsi budidaya ekosistem gambut. Fungsi lindung ekosistem gambut didefinisikan sebagai tatanan unsur gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan

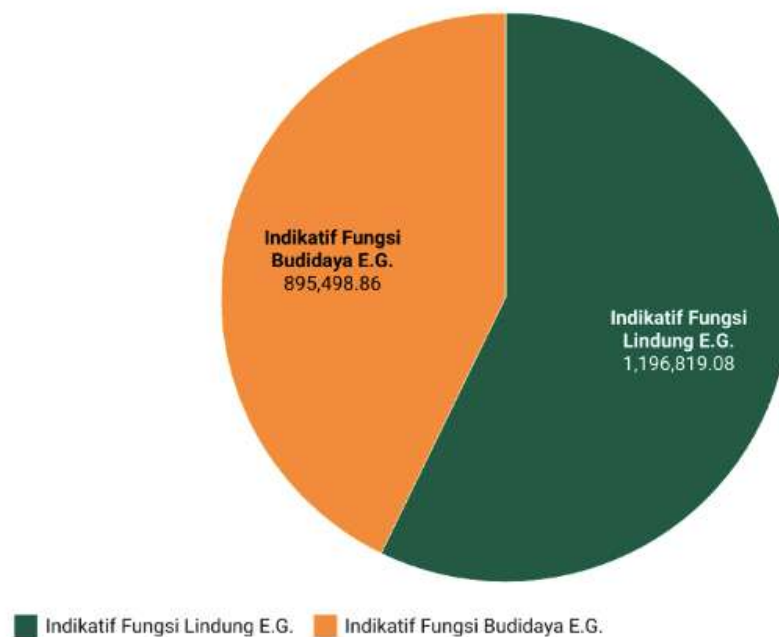
tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi ekosistem gambut. Sedangkan fungsi budidaya ekosistem gambut didefinisikan sebagai tatanan unsur gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas ekosistem gambut melalui kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukungnya untuk dapat melestarikan fungsi ekosistem gambut. Definisi tersebut merujuk pada Permen LHK Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut.



Gambar 2. 10 Peta Fungsi Ekosistem Gambut Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029

Berdasarkan peta indikatif fungsi ekosistem gambut skala 1:250.000 terkoreksi, ekosistem gambut Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh fungsi lindung dengan luas 1,1 juta Ha atau 53% dari total luas ekosistem gambut yang ada, sedangkan fungsi budidaya mencakup 0,98 juta Ha atau 47% luasan ekosistem gambut. Dominasi fungsi lindung ekosistem gambut di Sumatera Selatan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam upaya perlindungan fungsi ekosistem gambut yang telah ditetapkan.



Gambar 2. 11 Luas Indikatif Fungsi Ekosistem Gambut

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029

Berdasarkan luasannya, KHG Sungai Sugihan - Sungai Lumpur yang merupakan KHG dengan luas terbesar di Sumatera Selatan memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Setidaknya 34,10% dari total fungsi lindung ekosistem gambut berada di KHG ini, diikuti kemudian oleh KHG Sungai Saleh - Sungai Sugihan (14,90%) dan KHG Sungai Sibumbang – Sungai Talang Rimba (5,41%). Konfigurasi fungsi budidaya menunjukkan KHG Sungai Saugihan – Sungai Lumpur memberikan pengaruh yang juga signifikan dengan 25,98% fungsi budidaya berada di KHG ini, diikuti berikutnya oleh KHG Sungai Burung – Sungai Way Mesuji (8,35%) dan KHG Sungai Sibumbang – Sungai Talang Rimba (4,56%).

Berdasarkan pengolahan data geospasial peta fungsi ekosistem gambut di 36 KHG yang ada di Sumatera Selatan terhadap luas masing-masing KHG menunjukkan, KHG Sungai Saleh – Sungai Sugihan yang memiliki komposisi fungsi lindung sebesar 87,71% atau 0,17 juta hektar dari luas total, disusul kemudian oleh KHG Sungai Air Hitam Laut - Sungai Buntu Kecil dengan persentase fungsi lindung sebanyak 86,14%. Tabel berikut ini menunjukkan sebaran fungsi ekosistem gambut pada setiap KHG yang ada di Sumatera Selatan.

Dengan diterbitkannya SK MenLHK terbaru mengenai inventarisasi Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000 pada 11 KHG:

1. KHG Aek Musi - Sungai Upang
2. KHG Aek Sebatik - Aek Musi
3. KHG Delta Talang
4. KHG Sei Lalan - Sungai Bentayan
5. KHG Sungai Beberi - Sungai Way Mesuji
6. KHG Sungai Burung - Sungai Way Mesuji
7. KHG Sungai Musi - Sungai Rawas
8. KHG Sungai Penu - Sungai Abah
9. KHG Sungai Tandatuan - Sungai Beberi
10. KHG Sungai Bentayan - Sungai Penimpahan
11. KHG Sungai Rumpit - Sungai Rawas

Terdapat perubahan luasan proporsi Fungsi Ekosistem Gambut yang semula luasan fungsi budidaya Ekosistem Gambut sebesar 895.498,87 Ha meningkat menjadi 1.017.706,31 Ha, sedangkan untuk fungsi lindung Ekosistem Gambut mengalami penurunan dari 1.196.819,08 Ha menjadi 1.074.690,51 Ha. Penurunan luasan fungsi lindung pada Ekosistem Gambut sudah selayaknya menjadi perhatian utama mengingat peranannya yang begitu krusial. Data tersebut yang selanjutnya akan digunakan dalam proses analisis dokumen RPPEG Provinsi Sumatera Selatan. Adapun data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.9 sebagai berikut.

Tabel 2. 9 Indikatif FEG di masing-masing KHG skala 1:250.000

No	Nama KHG	Indikatif Fungsi Budidaya E.G. (Ha)	%	Indikatif Fungsi Lindung E.G. (Ha)	%	Luas (Ha)
1	KHG Sungai Sugihan - Sungai Lumpur	253.513,35	39,97	380.812,86	60,03	634.326,21
2	KHG Sungai Saleh - Sungai Sugihan	23.303,78	12,29	166.311,29	87,71	189.615,07
3	KHG Sungai Sibumbang - Sungai Talangrimba	44.470,13	42,41	60.380,82	57,59	104.850,94
4	KHG Sungai Burung - Sungai Way Mesuji	87.000,29	99,97	26,38	0,03	87.026,67
5	KHG Sungai Burnai - Sungai Sibumbang	34.417,65	39,88	51.882,90	60,12	86.300,55
6	KHG Sungai Sembilang - Sungai Lalan	41.472,23	49,09	43.009,52	50,91	84.481,75
7	KHG Sungai Merang - Sungai Ngirawan	34.481,46	42,11	47.396,49	57,89	81.877,95

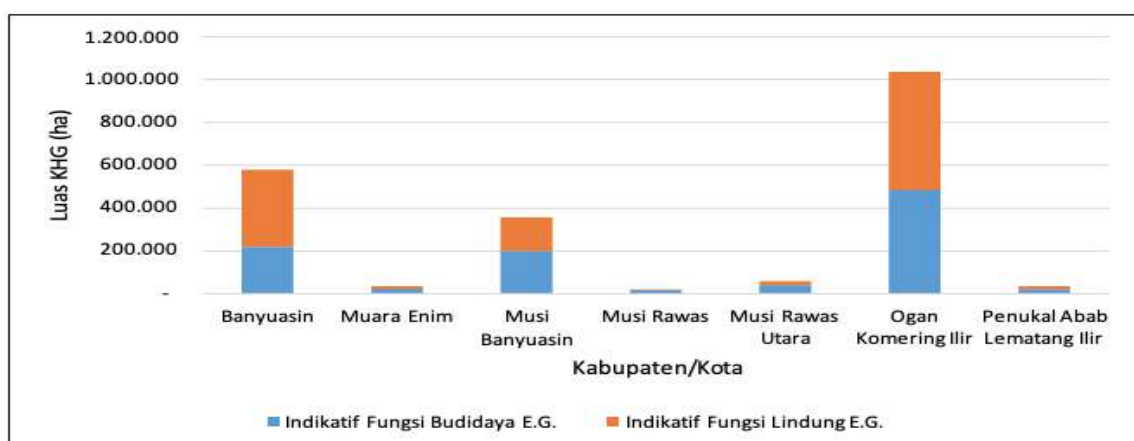
No	Nama KHG	Indikatif Fungsi Budidaya E.G. (Ha)	%	Indikatif Fungsi Lindung E.G. (Ha)	%	Luas (Ha)
8	KHG Sungai Lalan - Sungai Merang	36.378,29	45,13	44.228,55	54,87	80.606,84
9	KHG Sungai Ngirawan - Sungai Sembilang	33.251,59	45,35	40.077,66	54,65	73.329,25
10	KHG Sungai Ulakkedondong - Sungai Lumpur	39.078,94	54,68	32.383,73	45,32	71.462,67
11	KHG Sungai Air Hitam Laut - Sungai Buntu Kecil	8.787,65	13,86	54.602,01	86,14	63.389,66
12	KHG Air Banyuasin - Air Lalang	34.800,12	57,43	25.791,59	42,57	60.591,71
13	KHG Sungai Rumpit - Sungai Rawas	45.978,31	95,38	2.226,51	4,62	48.204,82
14	KHG Sungai Musi - Sungai Saleh	18.341,49	40,85	26.555,63	59,15	44.897,12
15	KHG Sungai Bentayan -Sungai Penimpahan	42.895,05	100,00		0,00	42.895,05
16	KHG Air Banyuasin - Sungai Musi	15.134,72	38,44	24.236,32	61,56	39.371,04
17	KHG Aek Sebatik - Aek Musi	31.643,67	99,78	70,79	0,22	31.714,45
18	KHG Sungai Musi - Sungai Blidah	16.707,07	53,80	14.348,93	46,20	31.056,00
19	KHG Sungai Musi - Sungai Penu	19.282,81	69,55	8.443,16	30,45	27.725,97
20	KHG Aek Musi - Sungai Upang	25.955,45	100,00		0,00	25.955,45
21	KHG Sungai Musi - Sungai Aek Lematang	13.111,90	51,25	12.472,86	48,75	25.584,76
22	KHG Sungai Medak - Sungai Lalan	13.066,03	53,22	11.485,05	46,78	24.551,08
23	KHG Sungai Musi - Sungai Empasan	14.503,34	66,29	7.376,58	33,71	21.879,92
24	KHG Sei Lalan - Sungai Bentayan	21.072,64	100,00		0,00	21.072,64
25	KHG Sungai Penimpahan - Sungai Air Hitam	8.542,79	59,20	5.887,26	40,80	14.430,06
26	KHG Sungai Musi - Sungai Rawas	14.324,70	100,00		0,00	14.324,70
27	KHG Sungai Saleh - Sungai Batanghari	8.946,50	76,31	2.776,74	23,69	11.723,24
28	KHG Sungai Talang - Sungai Ulakkedondong	5.434,19	52,31	4.954,13	47,69	10.388,32
29	KHG Sungai Tandatuan - Sungai Beberi	8.664,22	100,00		0,00	8.664,22
30	KHG Sungai Beberi - Sungai Way Mesuji	8.594,08	100,00		0,00	8.594,08
31	KHG Sungai Penu - Sungai Abah	5.580,19	72,62	2.103,38	27,38	7.683,57
32	KHG Sungai Kalumpang	4.342,85	60,36	2.852,51	39,64	7.195,36
33	KHG Sungai Alur - Sungai Lintang	3.056,06	60,48	1.996,85	39,52	5.052,91
34	KHG Delta Talang	1.572,01	100,00		0,00	1.572,01
35	KHG Sungai Mesuji - Sungai Kebumangah	0,5	100,00		0,00	0,5

No	Nama KHG	Indikatif Fungsi Budidaya E.G. (Ha)	%	Indikatif Fungsi Lindung E.G. (Ha)	%	Luas (Ha)
36	KHG Sungai Mesuji - Sungai Tulangbawang	0,3	100,00		0,00	0,3
Total		1.017.706,31	49	1.074.690,1	51	2.092.317,4

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029

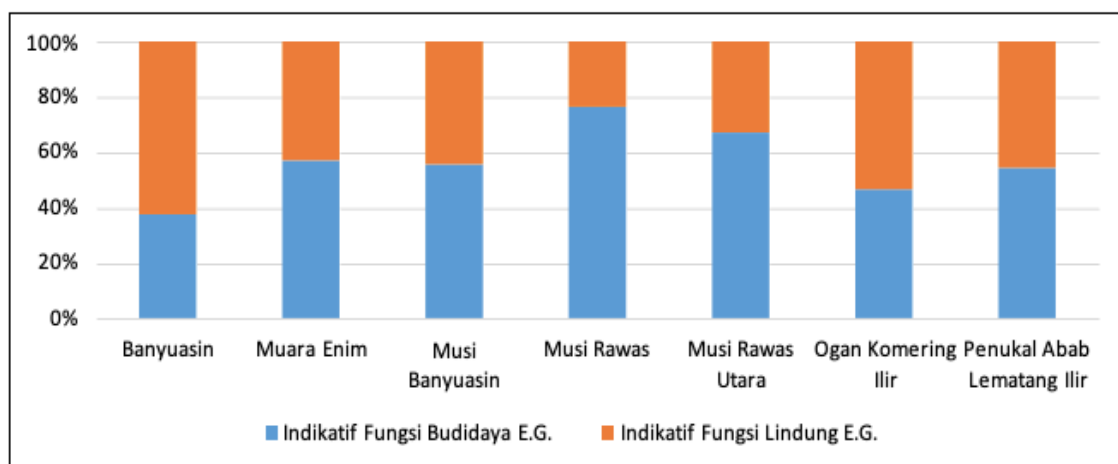
Indikatif fungsi ekosistem gambut tersebut tersebar di 7 kabupaten/kota yang termasuk kedalam KHG, indikatif fungsi ekosistem gambut lindung paling luas terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas 0,55 juta Ha atau 49,30% dari seluruh fungsi lindung gambut yang ada di Sumatera Selatan. Kabupaten Banyuasin yang merupakan kabupaten dengan luas KHG terbesar kedua terindikasi memiliki fungsi lindung gambut seluas 0,36 juta Ha atau 32,13% dari total fungsi lindung, sementara Musi Banyuasin teridentifikasi memiliki 0,16 juta Ha fungsi lindung atau setara 14,01%. Fungsi lindung lainnya tersebar di kabupaten/kota lainnya dengan persentase yang tidak signifikan.

Dengan luasan KHG terbesar, distribusi fungsi budidaya yang paling luas juga berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas 0,48 juta Ha atau 49,12% dari total indikatif fungsi budidaya yang ada di Sumatera Selatan. Secara berturut-turut, kabupaten dengan luasan indikatif fungsi budidaya lainnya adalah Banyuasin seluas 0,22 juta Ha (22,06%) dan Musi Banyuasin seluas 0,20 juta Ha (20,02%).



Gambar 2. 12 Luas KHG di Masing-Masing Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029



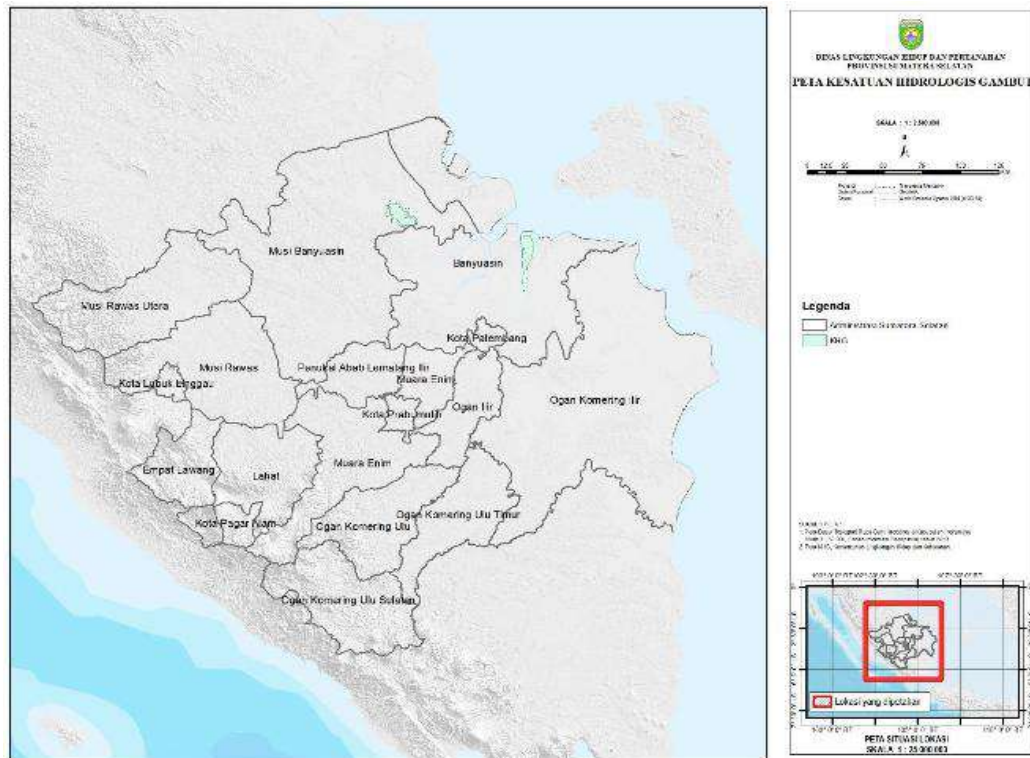
Gambar 2. 13 Proporsi Indikatif Fungsi Ekosistem Gambut di Setiap Kabupaten/Kota

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029

Berdasarkan proporsi terhadap luasan KHG di masing-masing kabupaten, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Banyuasin adalah kabupaten dengan proporsi luas fungsi lindung yang lebih dominan dibanding fungsi budidaya, sedangkan Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Penukal Abab Lematang Ilir memiliki proporsi fungsi budidaya yang lebih dominan.

Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) merupakan sebuah ekosistem gambut yang berada di antara dua sungai dan/atau di antara sungai dan laut dan/atau pada genangan ataupun kawasan rawa. Kawasan KHG memiliki fitur kubah gambut. Artinya, karena letak datarannya lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya, maka secara alamiah dapat menampung dan menyimpan air lebih banyak dan memasok air ke daerah sekelilingnya. Klasifikasi KHG dipecah menjadi dua, yakni kubah gambut dan non-kubah gambut. Aliran air dalam sebuah KHG saling berinteraksi dan mempengaruhi terhadap kondisi ekosistem gambut. KHG diberi nama sesuai dengan sungai yang mengapitnya, misalnya KHG Saleh-Sugihan, artinya ekosistem itu terletak di antara Sungai Saleh dan Sungai Sugihan.

Peta KHG juga dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan dapat dilihat pada Gambar 2.14. Pada peta tersebut dapat dilihat bahwa luasan Kesatuan Hidrologis Gambut yang dipetakan oleh KLHK pada provinsi Sumatera Selatan yaitu 47.135,83 Ha.



Gambar 2. 14 Peta Kesatuan Hidrologis Gambut
Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029

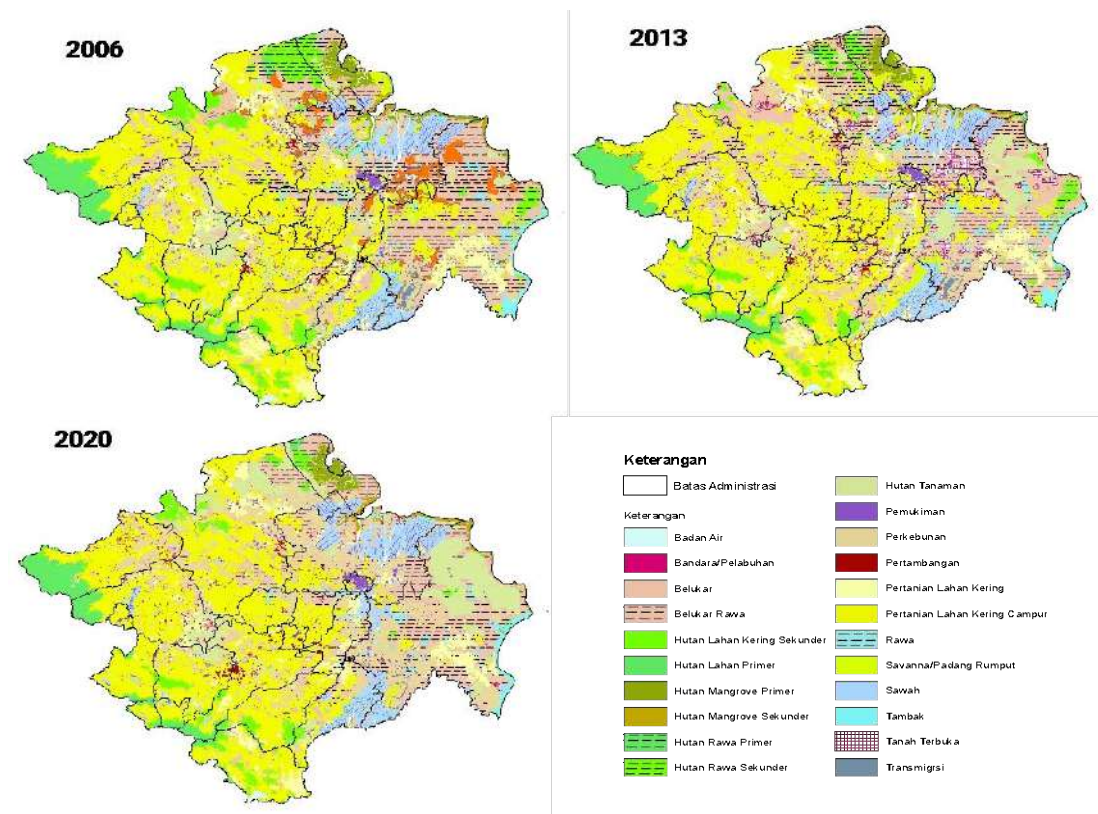
G. Kondisi Kerawanan Bencana Wilayah

1) Perubahan Iklim

Perubahan iklim ditandai dengan berbagai fenomena hidrometeorologis atau bencana yang terjadi di atmosfer, air dan lautan. Dengan meningkatnya pelepasan emisi di atmosfer, maka mengakibatkan perubahan pada proses alami yang terjadi di air dan lautan, termasuk meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi.

Sumbangan Emisi Berbasis Lahan

Salah satu sumbangan terbesar emisi di Sumatera Selatan berasal dari sektor berbasis lahan. Hal ini terjadi ketika terdapat alih fungsi lahan dari suatu tutupan lahan dengan cadangan karbon yang tinggi ke tutupan lahan dengan cadangan yang lebih rendah.



Gambar 2. 15 Alih Fungsi Lahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006, 2013, 2020

Sumber: KLHS Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Secara historis, analisis data dari KLHS untuk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2006, 2013 dan 2020 menunjukkan adanya perbedaan signifikan untuk beberapa tutupan lahan. Salah satu alih fungsi lahan yang perlu menjadi perhatian adalah pada penurunan tutupan lahan hutan. Beberapa kabupaten dengan tingkat penurunan tutupan lahan hutan tinggi adalah Ogan Komering Ilir, Musi Bayuasin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara.

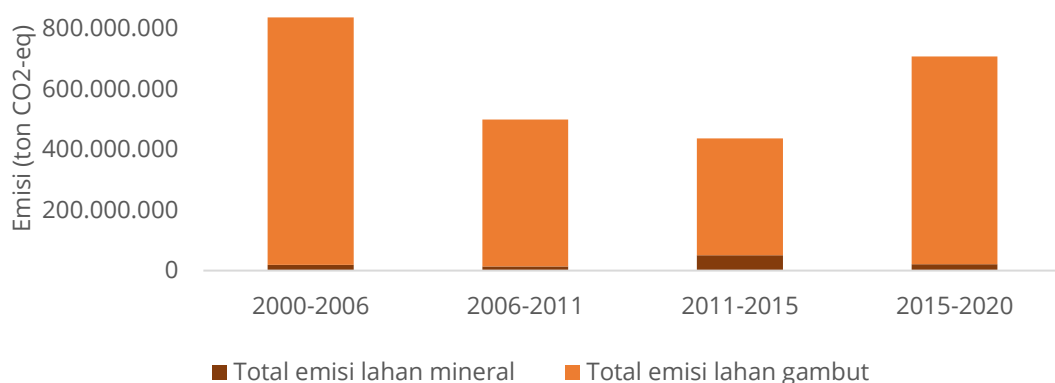
Tabel 2. 10 Luasan Perubahan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006, 2013, dan 2020

No	Tutupan lahan	Luas (ha)			Luas Perubahan Tutupan Lahan 2006-2020 (ha)
		2006	2013	2020	
1	Perkebunan	677.683,00	778.343,35	1.393.055,72	715.372,72
2	Hutan Tanaman	259.745,00	424.527,66	726.660,00	466.915,00
3	Sawah	412.330,00	402.795,08	500.453,44	88.123,44
4	Pertanian Lahan Kering Campur	2.857.434,00	2.841.779,84	2.920.091,62	62.657,62
5	Hutan Mangrove Sekunder	57.550,00	67.563,99	81.757,25	24.207,25
6	Badan Air	80.084,00	94.313,52	89.651,84	9.567,84
7	Pemukiman	166.888,00	168.441,96	172.254,55	5.366,55

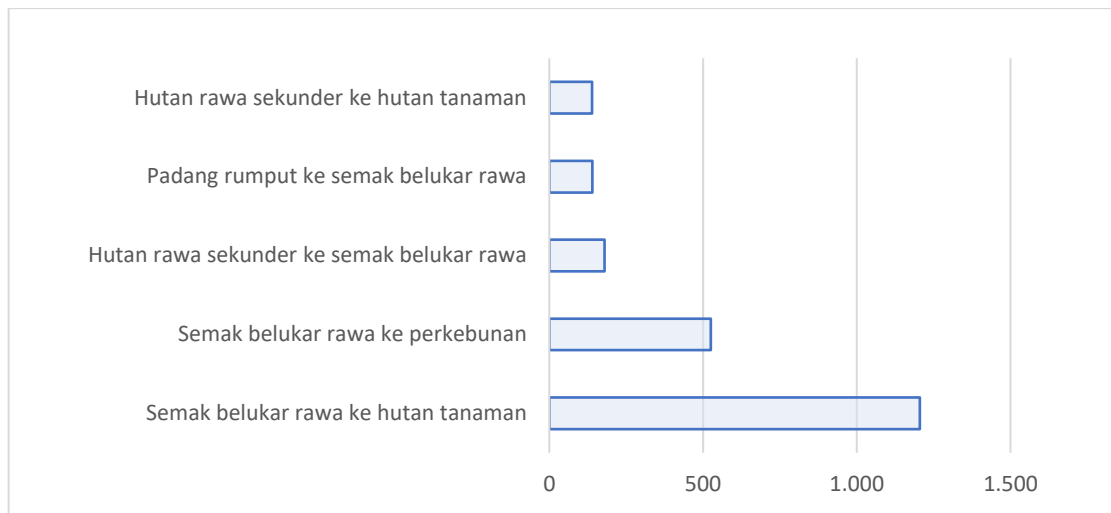
No	Tutupan lahan	Luas (ha)			Luas Perubahan Tutupan Lahan 2006-2020 (ha)
		2006	2013	2020	
8	Pertambangan	28.362,00	28.194,75	33.653,19	5.291,19
9	Hutan Lahan Primer	293.434,00	296.455,88	298.510,98	5.076,98
10	Bandara/Pelabuhan	232,00	247,26	549,81	317,81
11	Tambak	59.266,00	59.703,47	57.275,98	-1.990,02
12	Hutan Rawa Primer	18.414,00	9.069,23	10.267,17	-8.146,83
13	Transmigrasi	55.482,00	55.164,00	42.943,94	-12.538,06
14	Pertanian Lahan Kering	558.544,00	549.699,27	521.286,41	-37.257,59
15	Hutan Mangrove Primer	116.570,00	101.170,37	76.094,01	-40.475,99
16	Rawa	144.226,00	153.354,39	97.841,19	-46.384,81
17	Hutan Lahan Kering Sekunder	386.961,00	273.826,25	264.552,66	-122.408,34
18	Belukar	434.659,00	619.556,55	279.070,45	-155.588,55
19	Hutan Rawa Sekunder	227.987,00	163.228,70	65.763,02	-162.223,98
20	Savanna/Padang Rumput	217.377,00	236.506,69	396,07	-216.980,93
21	Tanah Terbuka	315.843,00	297.117,63	50.648,69	-265.194,31
22	Belukar Rawa	1.325.861,00	1.047.512,18	996.118,45	-329.742,55

Sumber: KLHS RTRW Sumatera Selatan 2024-2044

Berdasarkan perubahan tutupan lahan di atas, sebagian besar emisi yang dihasilkan di Sumatera Selatan selama tahun 2000-2020 berasal dari emisi lahan gambut. Hal ini diakibatkan oleh potensi emisi lahan gambut yang bukan hanya berasal dari adanya alih fungsi tutupan lahan, namun juga berasal dari emisi yang dihasilkan dari ekosistem gambut itu sendiri. Jenis perubahan tutupan lahan yang berkontribusi terhadap pelepasan emisi terbesar dapat dilihat pada Gambar 2.17. Alih fungsi dari semak belukar rawa ke hutan tanaman menyumbang pelepasan emisi terbesar pada kurun waktu 2000–2020.



Gambar 2. 16 Emisi Berbasis Lahan Historis Sumatera Selatan Tahun 2000-2020



Gambar 2. 17 Lima Jenis Alih Fungsi Historis dengan Nilai Emisi Terbesar di Sumatera Selatan

2) Bencana Hidrometeorologi

Banyak kejadian bencana yang dialami Provinsi Sumatera Selatan selama 20 tahun terakhir, diantaranya kekeringan, suhu ekstrem, banjir, karhutla, dan kerawanan pangan, sebagai salah satu dampak dari perubahan iklim. Dilihat dari capaian Indeks Risiko Bencana, Sumatera Selatan cenderung mengalami penurunan pada tahun 2015-2024, namun masih masuk kategori tinggi sehingga perlu penanganan berupa perencanaan pembangunan yang berorientasi pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Beberapa kabupaten dengan risiko paling tinggi adalah Kabupaten Empat Lawang, Muara Enim dan Musi Rawas. Adapun isu yang perlu diatasi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tenaga kerja yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama tenaga kerja di sektor perkebunan dan pertanian, serta pekerja keluarga, terutama perempuan.

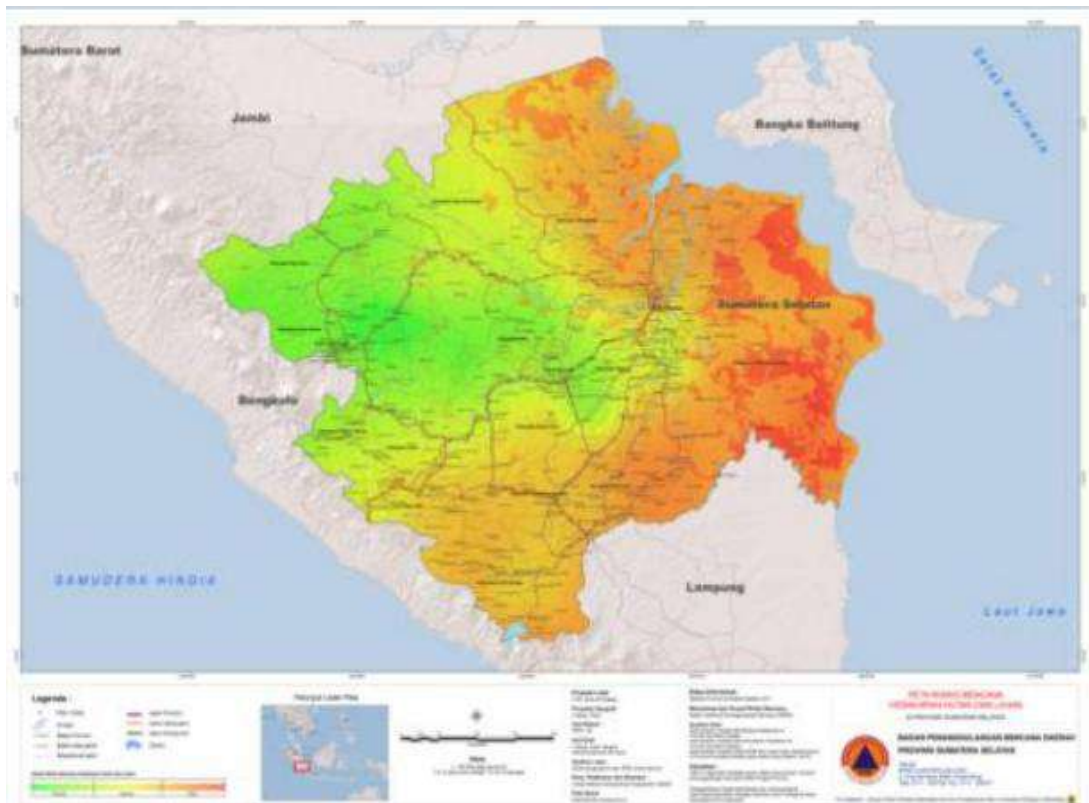
3) Bencana Banjir

Bencana banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Selama kurun waktu dari tahun 2014 hingga Tahun 2023 tercatat 364 kejadian banjir di Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu penyebab banjir adalah semakin berkurangnya kawasan hutan lindung di daerah hulu dan merupakan penyebab yang paling dominan di wilayah ini. Berikut adalah kondisi banjir di DAS Musi:

- Di Sub DAS Musi banjir bandang sering terjadi. Pada tahun 1999 di Talang Padang beberapa rumah roboh diterjang banjir. Di Sub DAS Batanghari Leko banjir terjadi dipertemuan dengan Sungai Musi;
- Di Sub DAS Rawas banjir terjadi di Bingin Teluk dan Noman;
- Di Sub DAS Lematang banjir di Belimbing dan Pagar Alam;
- Di Sub DAS Ogan banjir terjadi di Muara Kuang;
- Di Sub DAS Komering banjir terjadi di Muaradua;
- Di pertemuan Sungai Musi-Sungai Kelingi, Sungai Musi-Sungai Lakitan dan Sungai Musi-Sungai Rawas terjadi pada saat debit air sedang tinggi di sungai-sungai;
- Wilayah kota di hilir seperti Palembang dan Sekayu.

4) Kebakaran Hutan dan Lahan

Sementara itu, potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah seluas 8.851.703,00 ha dan berada pada kelas tinggi, yang meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas 2.319.835,00 ha, kelas sedang 3.249.973,00 ha, dan kelas tinggi dengan luas 3.281.895,00 ha. Luas tertinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas rendah adalah 381.050,00 ha, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sedangkan pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 673.019,00 ha. Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah wilayah yang memiliki potensi bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan yang tertinggi untuk kelas tinggi, yaitu 1.258.461,00 ha. Kejadian bencana alam cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir, pada tahun 2021 sebanyak 81, meningkat menjadi 201 di tahun 2023. Bencana alam terbanyak sepanjang tahun 2023 adalah kebakaran hutan, kondisi ini disebabkan oleh perubahan iklim El-Nino yang berdampak pada musim kering yang lebih lama sehingga mendorong terjadinya kebakaran hutan.



Gambar 2. 18 Peta Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Dokumen RPB Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2026

Dalam interval 20 tahun terakhir, kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan tertinggi berada pada tahun 2017 dengan total luasan 727.174 ha. Pada rentang waktu 2021-2024, kejadian kebakaran mengalami penurunan hingga tahun 2024. Kebakaran yang terjadi paling parah berada pada area Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), terutama pada tahun 2015 dan 2019. Selain itu, selama 2006-2021 areal terbakar banyak terjadi secara berulang di lokasi yang sama, yakni daerah Timur Provinsi Sumatera Selatan seperti di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin dan Banyuasin. Akibat adanya kebakaran pada lahan gambut, maka terjadi peningkatan kerusakan ekosistem gambut, terutama pada areal konsesi, baik HTI dan HGU.

Tabel 2. 11 Bencana Alam di Provinsi Sumatera Selatan

Jenis Bencana	2021	2022	2023	2024
Tanah Longsor	4	9	12	1
Banjir	39	38	37	43
Kebakaran hutan	24	32	126	13
Angin Puting Beliung	24	26	26	8
Total	91	105	201	65

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025; BMKG Sumsel 2024

5) Cuaca Ekstrem

Total luas bahaya cuaca ekstrem di Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan adalah 6.339.456,00 ha. Dari total luas bahaya tersebut, luas bahaya dengan kelas tinggi seluas 3.602.047,00 ha, kelas rendah seluas 21,00 ha, dan kelas sedang seluas 2.737.388,00 ha. Selain itu, total luas bahaya kekeringan di Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan adalah 8.853.691,00 ha dan berada pada kelas Sedang. Secara terinci, luas bahaya dengan kelas rendah 1.171.586,00 ha, kelas sedang seluas 7.676.694,00 ha, dan kelas tinggi seluas 5.411,00 ha.



Gambar 2. 19 Peta Bahaya Bencana Cuaca Ekstrem Provinsi Sumatera Selatan

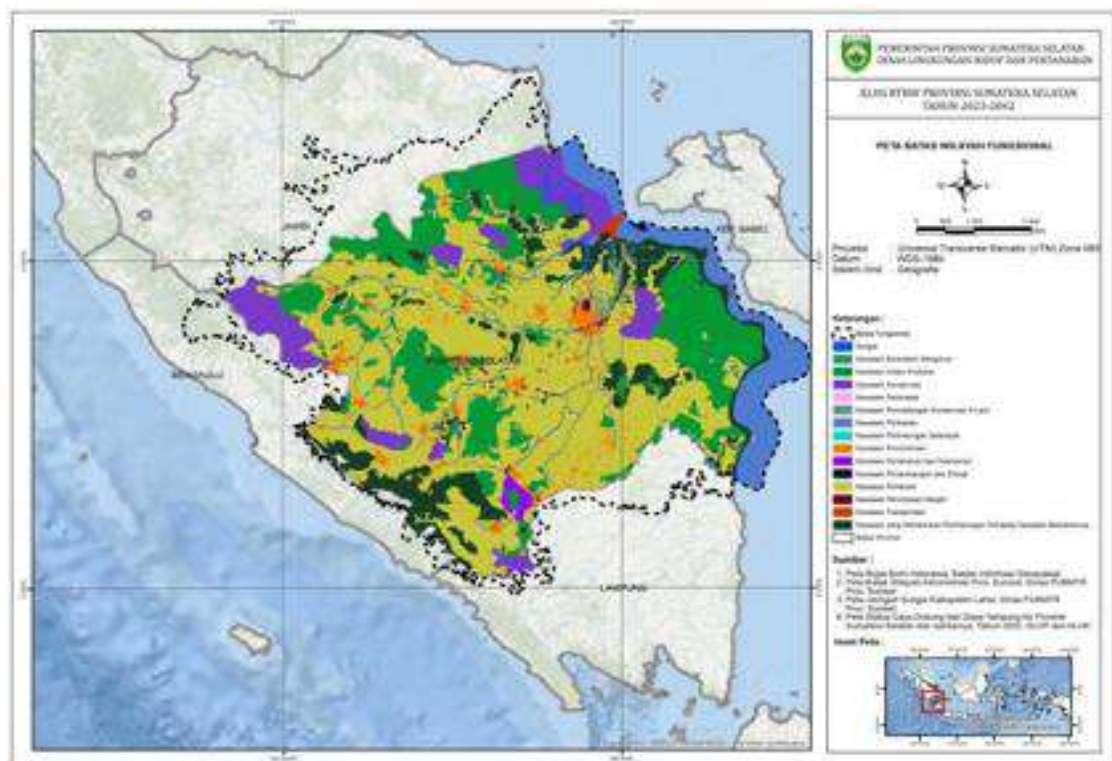
Sumber: Dokumen RPB Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2026

Sebaran luas bahaya kekeringan masing-masing kabupaten/kota memperlihatkan bahwa kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas rendah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu 1.007.667,00 ha, sedangkan Kabupaten Musi Banyuasin adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas sedang dengan luas 1.405.948,00 ha, dan Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan wilayah yang memiliki luas tertinggi potensi bahaya kekeringan dengan kelas tinggi di Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas 5.411,00 ha.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Batas fungsional atau biasa juga dikatakan batas ekologis, adalah deliniasi yang mempertimbangkan wilayah sekitarnya yang memiliki interkoneksi yang didelineasi berdasarkan batas ekologis. Batas ekologis atau fungsional yang didelineasi berdasarkan pertimbangan aspek karakteristik bentang alam dan vegetasi asli (Peta Wilayah Ecoregion), dan batas Daerah Aliran Sungai (Peta DAS), dengan luasan mencapai ±10,6 juta hektar yang dapat dilihat pada Gambar 2. 20. Batas fungsional /ekologis tersebut melintasi batas berbagai wilayah administrasi di sekitarnya, yaitu:

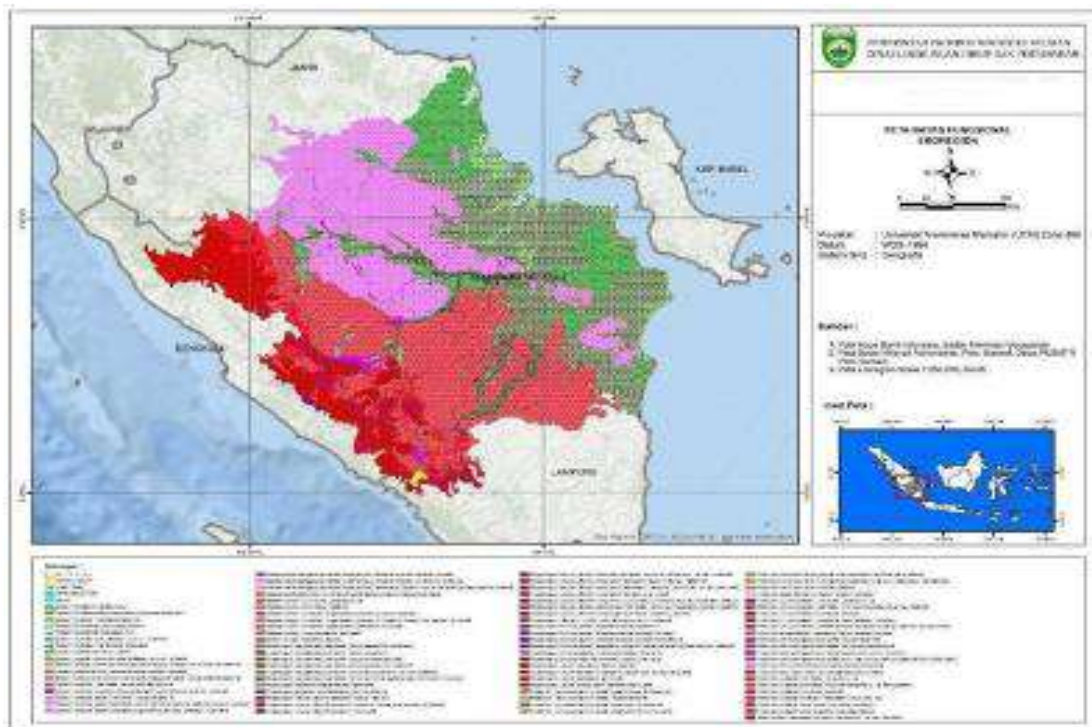
- Provinsi Jambi di sebelah Utara
- Provinsi Bengkulu di sebelah Barat
- Provinsi Lampung di sebelah Selatan
- Provinsi Bangka Belitung di sebelah Timur



Gambar 2. 20 Peta Batas Wilayah Fungsional Provinsi Sumatera Selatan
Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

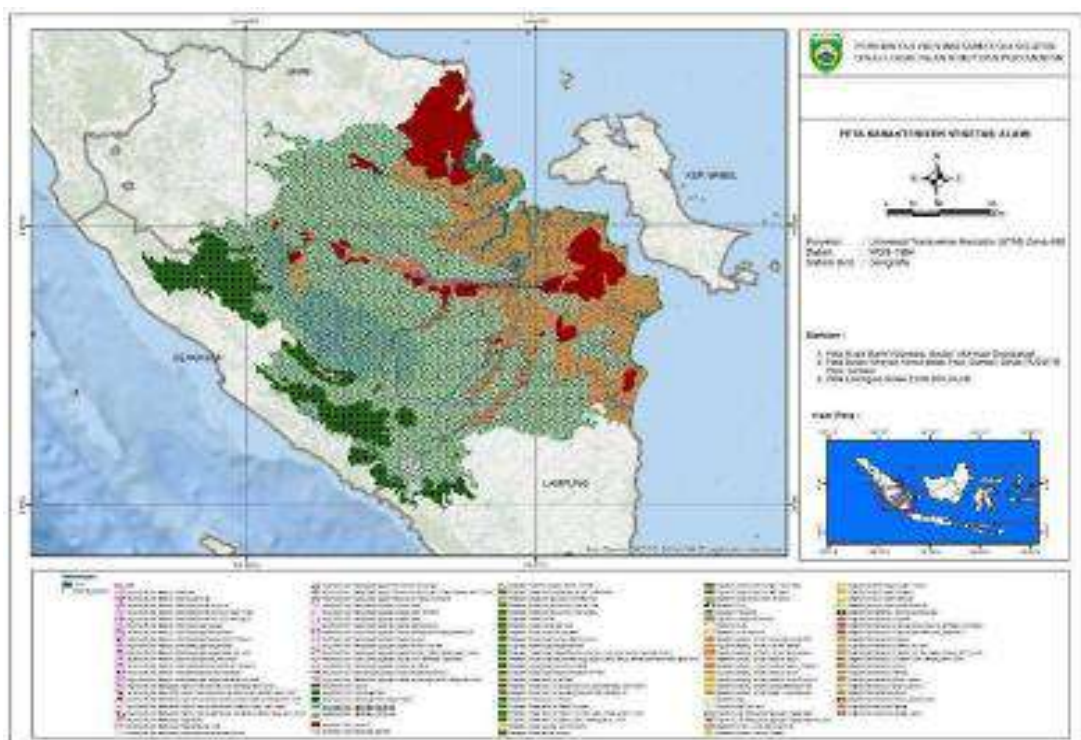
Dalam konteks keberlanjutan, kualitas hidup masyarakat Provinsi Sumatera Selatan sangat dipengaruhi oleh dan mempengaruhi status dan kondisi lingkungan hidup. Delineasi batas fungsional wilayah Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada SK Menteri LHK Nomor SK 1272 Tahun 2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi

Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000 yang ditampilkan pada Gambar 2.21 dan Gambar 2.22



**Gambar 2. 21 Peta Fungsional Kawasan Bentang Alam
Provinsi Sumatera Selatan**

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



**Gambar 2. 22 Peta Fungsional Kawasan Vegetasi Alam
Provinsi Sumatera Selatan**

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Secara umum, sebaran ekosistem Pulau Sumatera terdiri dari 3 (tiga) ekosistem dominan, yakni:

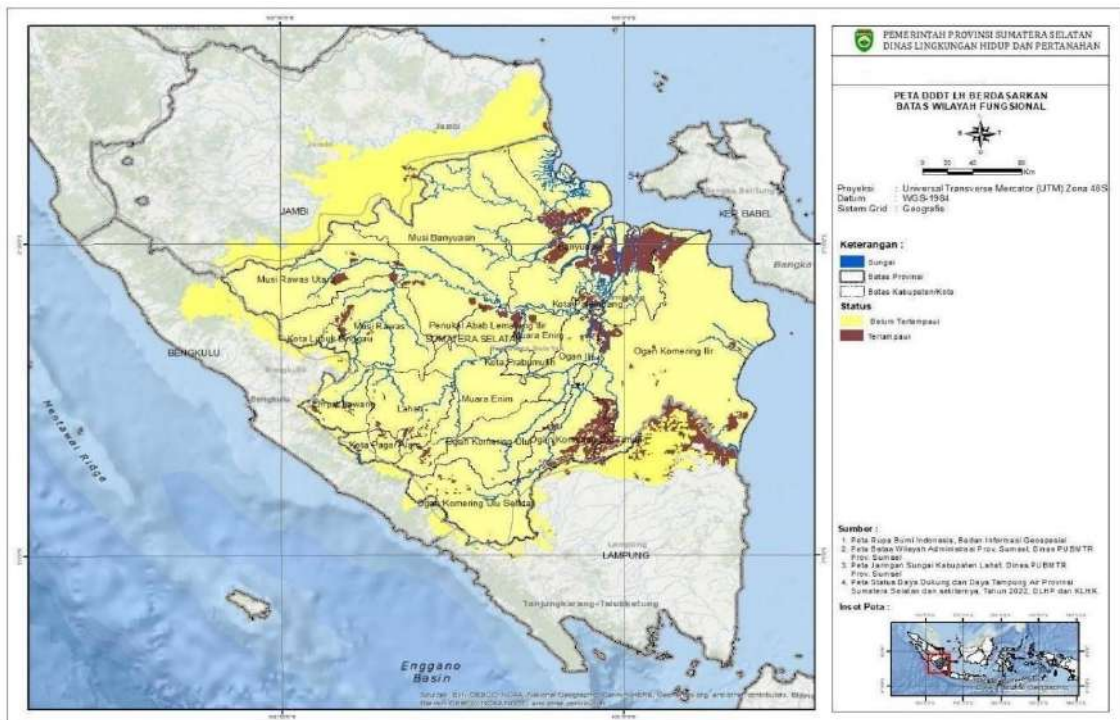
- 1) **dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat bervegetasi hutan dipterokarpa pamah**, yaitu ekosistem yang terbentuk akibat aktivitas tektonik dan menghasilkan bentang alam lipatan dan hutan lebat yang selalu hijau sepanjang tahun sehingga berperan sebagai pengatur dinamika ekosistem dan pengatur kualitas udara;
- 2) **dataran organik bermaterial gambut bervegetasi hutan gambut**, yaitu ekosistem yang terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati dan terus bertambah karena proses dekomposisi yang lambat. Dataran ini memiliki potensi cadangan karbon dan pengaturan hidrologi yang besar. Adapun terdapat potensi bencana dari pengelolaan lahan gambut yang tidak berkelanjutan, yakni penurunan permukaan lahan gambut dan kebakaran hutan dan lahan; dan
- 3) **perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat bervegetasi hutan dipterokarpa pamah**, yaitu ekosistem yang terbentuk akibat aktivitas tektonik sehingga menghasilkan penampakan dataran tinggi dengan kelerengan lebih dari 16%. Ekosistem ini menjadi ekosistem untuk spesies mamalia besar seperti gajah, harimau, tapir dan rusa.

A. Potensi Air

Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumatera Selatan menurut ketentuan pemerintah terdiri dari DAS Musi yang luasnya 59,942 km² dan DAS Sugihan, serta sembilan sungai besar yang ada di Sumatera Selatan. Sungai-sungai tersebut merupakan potensi sumber daya air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan rumah tangga.

Daya Dukung Daya Tampung Air

Daya dukung daya tampung air di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 2. 23 berikut ini.



Gambar 2. 23 Peta Status Air Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Wilayah Fungsional

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Selatan memiliki ketersediaan air sebanyak 89.861.218.593,14 m³ per tahun (data termuktahir 2022), dengan jumlah ketersediaan air paling banyak di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, dan Banyuasin. Dari sisi pemanfaatannya, kebutuhan air di Provinsi Sumatera Selatan yaitu 37.040.269.526,98 m³ per tahun, dengan Kabupaten Banyuasin sebagai daerah dengan jumlah pemanfaatan air terbanyak, diikuti Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan air setiap tahunnya, maka Provinsi Sumatera Selatan masih memiliki cadangan air sebanyak 52.820.949.066,16 m³ per tahun, jauh melampaui kebutuhan air per tahun. Cadangan air paling banyak terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan yang paling sedikit terdapat di Kota Palembang.

Total keseluruhan status daya dukung dan daya tampung air yang telah “terlampau” di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu seluas 615.622,99 ha atau 7,10% dari total luas Provinsi Sumatera Selatan. Secara spasial, kabupaten/kota dengan status daya dukung dan daya tampung air yang telah “terlampau” relatif tinggi, yaitu Kota Palembang seluas 12.879,48 ha (35,29%),

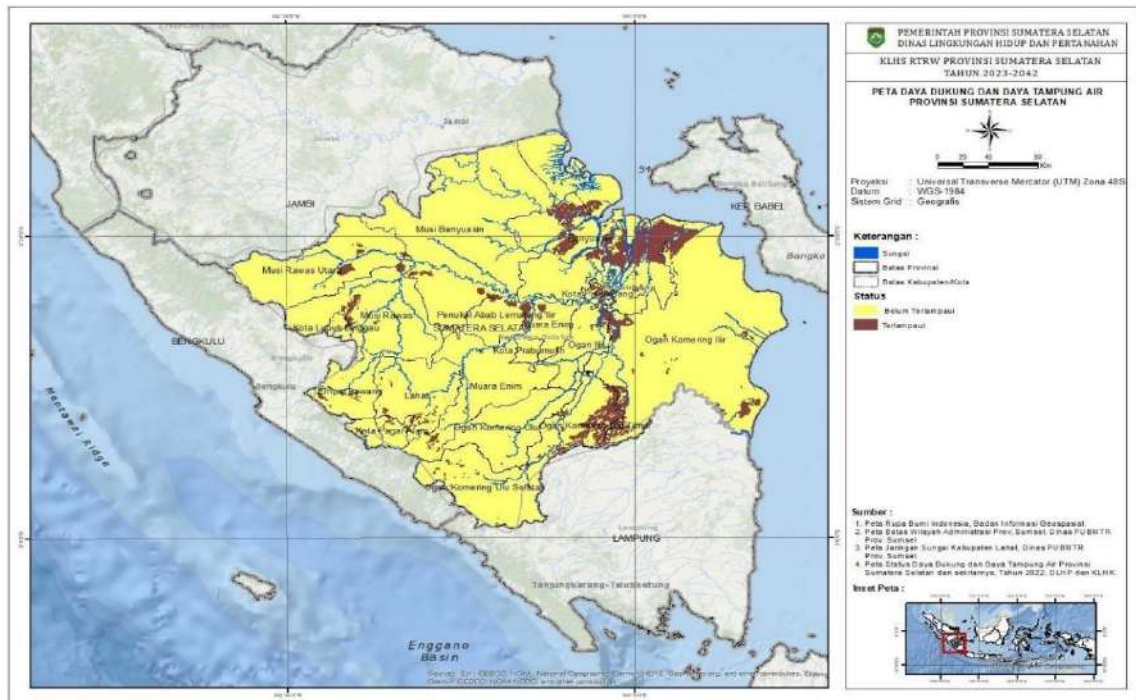
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur seluas 87.205,15 ha (25,48%), dan Kabupaten Banyuasin seluas 220.538,94 ha (17,67%). Sementara itu, status daya dukung dan daya tampung air yang telah terlampaui di kabupaten/kota lainnya rata-rata masih di bawah 10%.

Tabel 2. 12 Daya Dukung dan Daya Tampung Air Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (ha)	Jumlah Populasi (jiwa)	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Cadangan Air (m ³ /tahun)
Banyuasin	1.226.275,6	819.268	12.726.760.773,63	7.020.795.839,54	5.705.964.934,08
Empat Lawang	223.409,7	335.012	2.342.404.465,18	1.175.078.871,00	1.167.325.594,18
Kota Lubuklinggau	36.772,6	229.044	352.090.988,42	208.689.257,85	143.401.730,57
Kota Pagar Alam	62.591,3	146.861	668.352.162,58	308.279.914,29	360.072.248,29
Kota Palembang	35.250,6	1.668.168	327.638.558,68	196.575.727,43	131.062.831,25
Kota Prabumulih	44.731,1	197.716	501.597.019,76	225.966.728,77	275.630.290,99
Lahat	433.306,5	435.212	4.354.397.420,05	1.913.390.009,09	2.441.007.410,96
Muara Enim	676.391,2	593.362	7.302.742.929,26	2.406.134.029,81	4.896.608.899,44
Musi Banyuasin	1.455.078,8	620.539	13.720.490.689,16	5.625.823.778,82	8.094.666.910,34
Musi Rawas	612.258,8	405.078	6.609.302.541,90	2.450.529.137,27	4.158.773.404,63
Musi Rawas Utara	593.780,3	194.672	6.794.822.660,82	1.721.188.830,92	5.073.633.829,90
Ogan Ilir	230.285,8	420.796	2.552.407.572,62	1.309.091.247,44	1.243.316.325,18
Ogan Komering Ilir	1.706.899,0	736.258	17.075.698.729,51	5.800.018.563,60	11.275.680.165,91
Ogan Komering Ulu	377.449,7	369.273	3.927.762.990,09	1.457.386.592,03	2.470.376.398,06
Ogan Komering Ulu Selatan	436.925,2	416.254	4.581.573.091,32	1.697.528.338,89	2.884.044.752,42
Ogan Komering Ulu Timur	341.271,6	734.278	4.251.853.147,76	2.775.729.825,82	1.476.123.321,94
Penukal Abab Lematang Ilir	184.256,3	195.808	1.771.322.852,43	748.062.834,42	1.023.260.018,01
Provinsi Sumatera Selatan	8.676.933,6	8.517.599	89.861.218.593,14	37.040.269.526,98	52.820.949.066,16

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Secara keseluruhan, status daya dukung dan daya tampung air yang telah “Terlampaui” di Provinsi Sumatera Selatan yaitu seluas 615.622,99 Ha atau 7,10 % dari total luas Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan untuk kabupaten/kota dengan status daya dukung dan daya tampung air yang telah “Terlampaui” relatif tinggi yaitu Kota Palembang seluas 12.879,48 Ha (35,29%), Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur seluas 87.205,15 Ha (25,48%), dan Kabupaten Banyuasin seluas 220.538,94 Ha (17,67%).



Gambar 2. 24 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

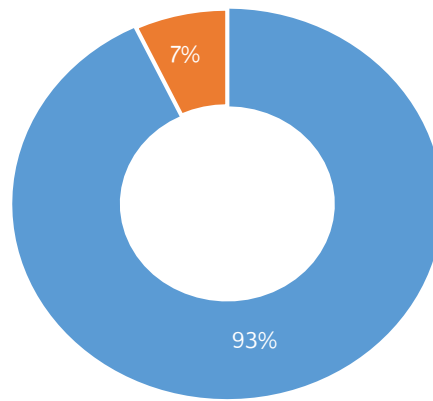
Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Tabel 2. 13 Status Air Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Status DDDT Air (Ha)		Total Keseluruhan
		Belum Terlampaui	Terlampaui	
1	Banyuasin	1,027,516.48	220,538.94	1,248,055.42
2	Empat Lawang	223,061.35	9,187.36	232,248.72
3	Kota Lubuklinggau	35,518.08	1,202.08	36,720.16
4	Kota Pagar Alam	57,832.24	5,581.11	63,413.35
5	Kota Palembang	23,612.38	12,879.48	36,491.86
6	Kota Prabumulih	47,825.80	0	47,825.80
7	Lahat	408,667.07	14,933.45	423,600.51
8	Muara Enim	664,215.54	15,111.92	679,327.46
9	Musi Banyuasin	1,377,840.28	51,002.74	1,428,843.02
10	Musi Rawas	594,723.11	18,117.13	612,840.24
11	Musi Rawas Utara	578,296.26	16,142.28	594,438.54
12	Ogan Ilir	211,223.45	15,970.55	227,194.01
13	Ogan Komering Ilir	1,578,480.21	122,936.33	1,701,416.54
14	Ogan Komering Ulu	374,878.70	1,888.99	376,767.69
15	Ogan Komering Ulu Selatan	431,539.31	6,697.33	438,236.64
16	Ogan Komering Ulu Timur	255,092.26	87,205.15	342,297.41
17	Penukal Abab Lematang Ilir	167,862.54	16,228.14	184,090.68
		8,058,185.06	615,622.99	8,673,808.05

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Tabel 2.13 menunjukkan status air berdasarkan kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan. Secara umum, status daya dukung dan daya tampung air di Provinsi Sumatera Selatan masih berada pada kategori aman yaitu 93% belum terlampaui dan 7% terlampaui seperti yang disajikan pada Gambar 2. 25.

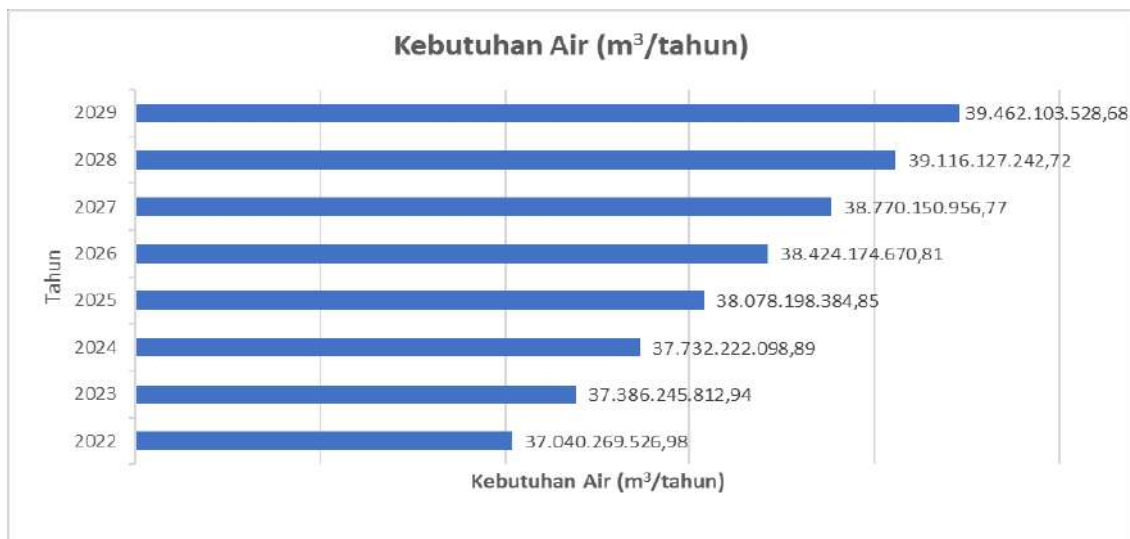


■ Belum terlampaui ■ Terlampaui

Gambar 2. 25 Persentase Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

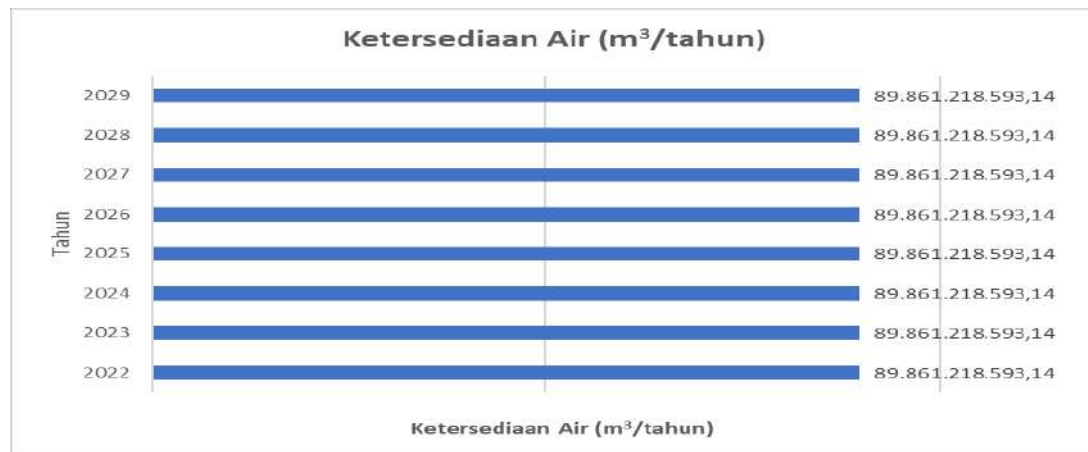
Skenario Daya Dukung dan Daya Tampung Air



Gambar 2. 26 Grafik Kebutuhan Air Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

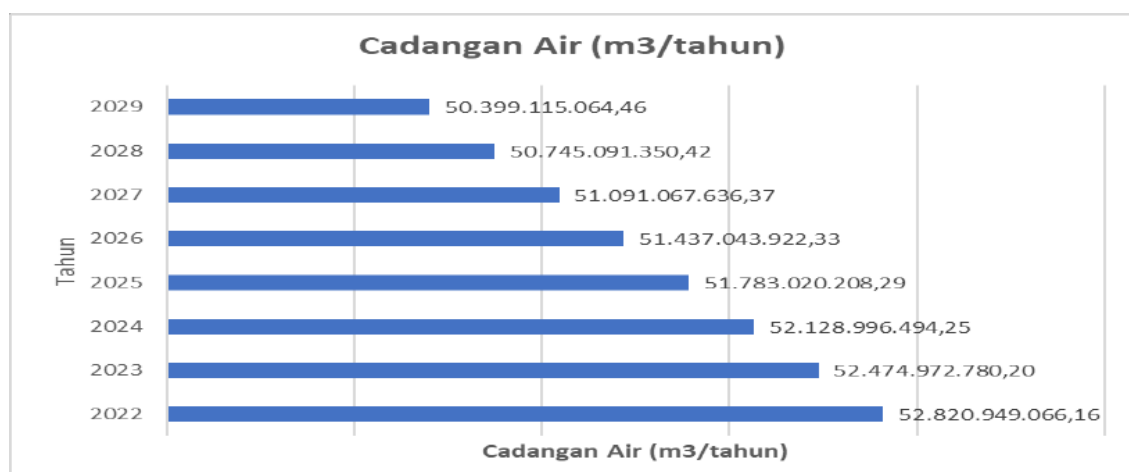
Proyeksi kebutuhan air di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 hingga 2029 (2.19). Pada tahun 2022, total kebutuhan air tercatat sebesar 37,04 miliar m³ per tahun. Angka ini meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 39,46 miliar m³ per tahun pada tahun 2029 dengan kenaikan rata- rata tahunan berada dalam kisaran 0,8–1%.



Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Gambar 2. 27 Ketersediaan Air Provinsi Sumatera Selatan

Ketersediaan air di Provinsi Sumatera Selatan diproyeksikan tetap stabil pada angka 89,86 miliar m³ per tahun sepanjang periode 2022 hingga 2029 (Gambar 2. 27). Meskipun ketersediaan air tetap terjaga, tantangan utama yang dihadapi adalah tren kebutuhan air yang terus meningkat dari tahun ke tahun (Gambar 2. 28) yang diproyeksikan mencapai 39,46 miliar m³ pada tahun 2029 sehingga penting untuk mengelola sumber daya air ini secara berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 2. 28 Cadangan Air/Selisih Provinsi Sumatera Selatan

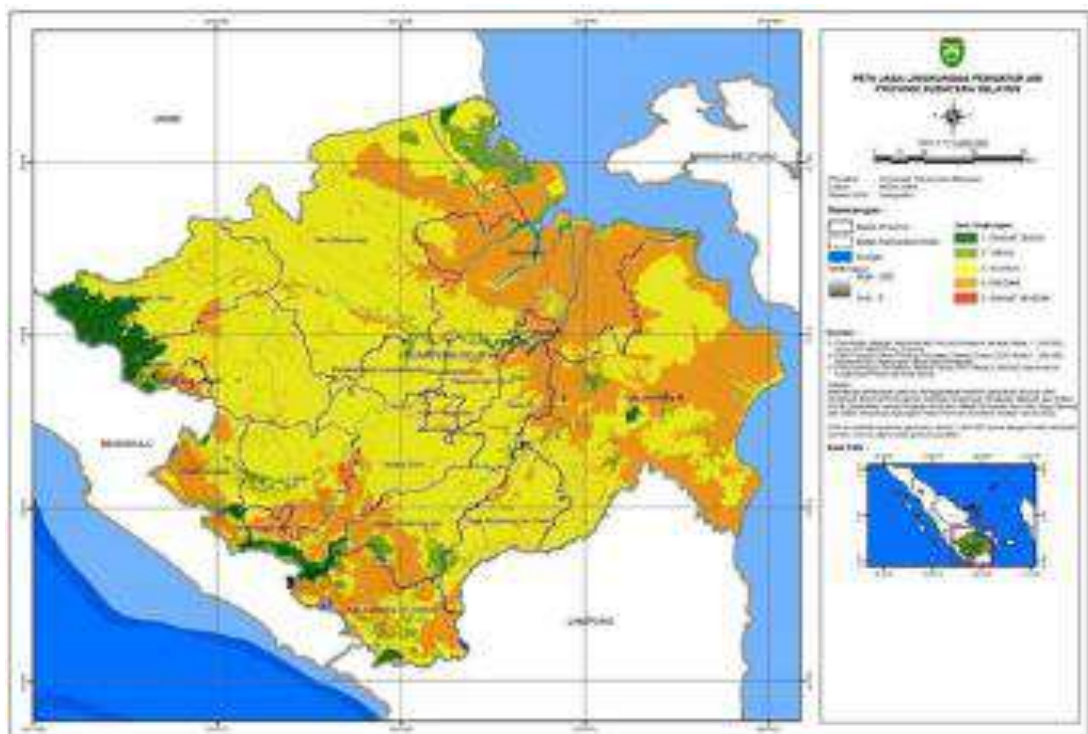
Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Cadangan air atau selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren penurunan secara bertahap dari tahun 2022 hingga 2029 (Gambar 2. 28). Pada tahun 2022, cadangan air tercatat sebesar 52,82 miliar m³ per tahun, dan diproyeksikan terus menurun hingga mencapai 50,40 miliar m³ per tahun pada tahun 2029. Dengan kondisi cadangan air yang masih ada di tahun 2029 maka daya dukung air tidak terlampaui.

Jasa Ekosistem Pengatur Air

Kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengatur air merupakan fungsi dari bentang alam, vegetasi alami, dan penutupan lahan. Hasil perhitungan dan analisis indeks jasa pengaturan air menunjukkan bahwa terdapat lima kategori jasa lingkungan pengaturan air yang terpetakan secara spasial, yaitu kategori kelas sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

Kategori dengan luasan paling besar adalah kelas sedang yaitu lebih dari separuh luas provinsi, yakni sebesar 5.133.113 Ha atau 58,90%. Kategori ini secara spasial teramati di seluruh wilayah, dengan sebaran terluas terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 1.137.418 Ha dan yang terkecil adalah Kota Palembang sebesar 9.666 Ha.



Gambar 2. 29 Sebaran Jasa Pengaturan Air Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

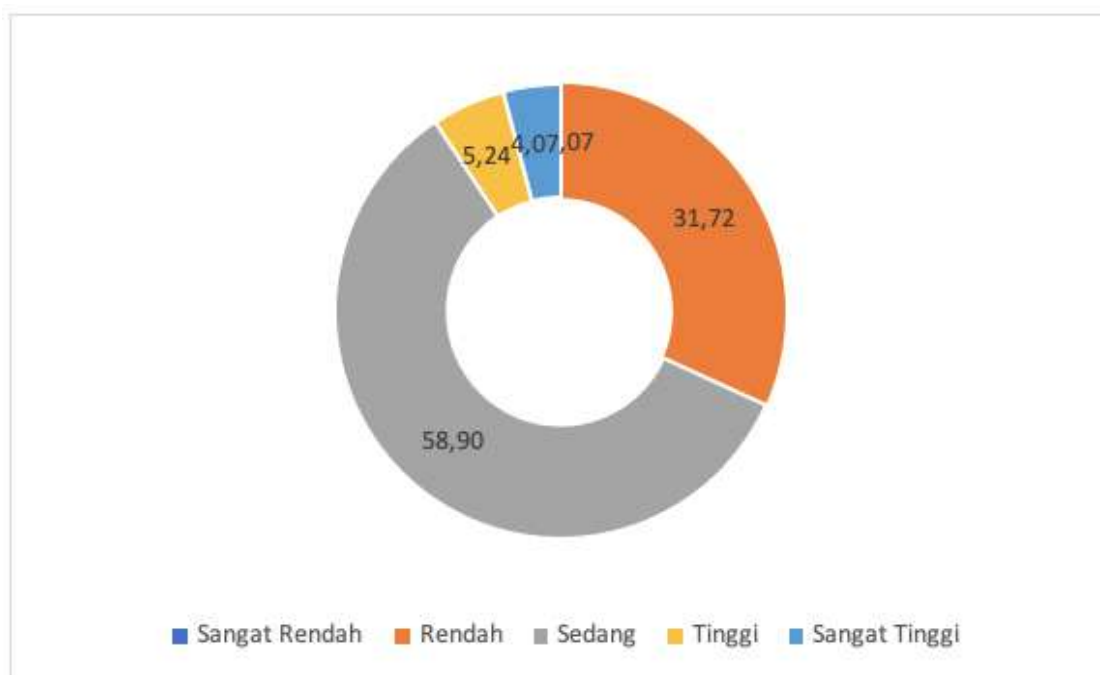
Indeks jasa lingkungan pengaturan air dalam kategori tinggi memiliki luasan 457.123 Ha atau 5,24% dari luas keseluruhan wilayah yang tersebar pada hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan kecuali Kota Lubuk Linggau dan Kota Prabumulih. Adapun luas lahan terbesar persebarannya terdapat di Kabupaten Banyuasin sebesar 152.249 Ha dan kabupaten/kota yang terkecil luasannya adalah Kota Palembang hanya seluas 2.677 Ha. Sementara indeks jasa lingkungan pengaturan air kategori sangat tinggi dengan luasan hanya 354.514 Ha atau 4,07% dari luas keseluruhan wilayah ini tersebar hampir pada seluruh kabupaten/kota kecuali Kota Lubuk Linggau.

Indeks jasa lingkungan pengaturan air berikutnya adalah kategori sangat rendah dengan luasan 5.903 Ha atau 0,07% dari luas keseluruhan Provinsi Sumatera Selatan. Kategori ini secara spasial tidak signifikan teramati, karena sebarannya sangat terbatas dan tersebar dalam spot-spot sangat kecil.

Tabel 2. 14 Jasa Pengaturan Air di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 (satuan Ha)

No	Kabupaten/Kota	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Banyuasin	-	716.934	333.547	152.249	50.845	1.253.575
2	Empat Lawang	665	101.339	97.692	17.551	5.871	223.118
3	Kota Lubuk Linggau	1.974	16.821	18.141	-	-	36.936
4	Kota Pagar Alam	199	28.744	16.874	8.996	8.638	63.451
5	Kota Palembang	-	22.744	9.666	2.677	1.566	36.654
6	Kota Prabumulih	-	7.666	40.161	-	94	47.921
7	Lahat	1.921	99.576	298.690	25.371	9.665	435.224
8	Muara Enim	595	114.893	526.742	17.074	24.015	683.318
9	Musi Banyuasin	-	268.534	1.137.418	19.388	10.409	1.435.749
10	Musi Rawas	123	51.288	504.850	18.285	41.434	615.980
11	Musi Rawas Utara	-	30.105	398.893	13.950	153.762	596.710
12	Ogan Ilir	-	79.983	137.004	8.139	2.899	228.025
13	Ogan Komering Ilir	-	857.680	772.594	65.781	15.303	1.711.359
14	Ogan Komering Ulu	77	111.086	221.961	41.132	3.804	378.059
15	Ogan Komering Ulu Selatan	349	204.362	165.750	46.701	22.637	439.799
16	Ogan Komering Ulu Timur	-	48.943	281.817	11.271	2.506	344.537
17	Penukal Abab Lematang Ilir	-	4.138	171.314	8.557	1.066	185.075
Total		5.903	2.764.837	5.133.113	457.123	354.514	8.715.490

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



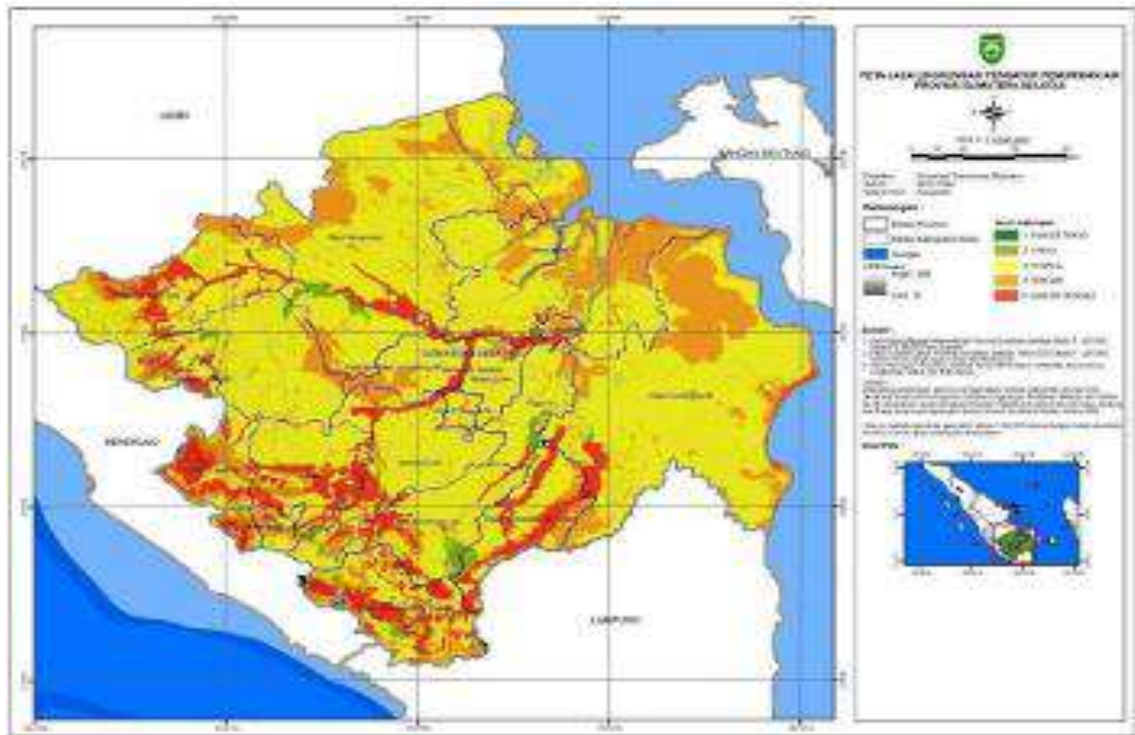
Gambar 2. 30 Persentase Jasa Pengaturan Air Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Jasa Pengatur Pemurnian Air

Kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengatur pemurnian air dan pengolahan limbah merupakan fungsi dari bentang alam, vegetasi alami, dan penutupan lahan. Hasil dari pemetaan jasa lingkungan pengatur pemurnian air di Provinsi Sumatera Selatan, hanya terdapat 4 (empat) kategori indeks jasa lingkungan pengatur pemurnian air. Berurutan dari yang memiliki sebaran lahan paling luas terdiri dari kategori sedang, rendah, sangat rendah, dan tinggi.

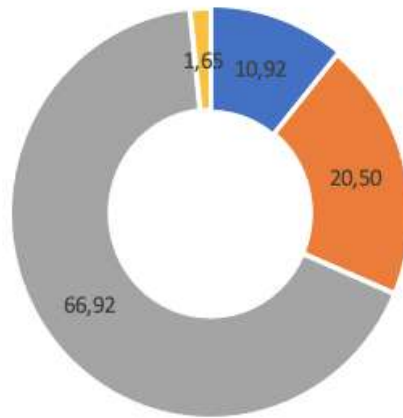
Secara umum, hasil perhitungan indeks kinerja jasa lingkungan pengatur pemurnian air dan pengolahan limbah di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 66,92% total wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki indeks kinerja dengan kategori sedang, 20,50% dengan kategori rendah, dan 10,92% dengan kategori sangat rendah. Tidak ada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki indeks kinerja dengan kategori sangat tinggi, dan hanya sebagian kecil wilayah (1,65%) yang memiliki indeks kinerja dengan kategori tinggi.



Gambar 2. 31 Sebaran Spasial Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Indeks jasa lingkungan yang terkategori kelas sedang menunjukkan sebaran secara spasial yang mendominasi seluruh wilayah Sumatera Selatan dengan luas lahan sebesar 5.832.441 Ha atau 66,92%. Kategori kelas sangat rendah mengiringi dengan luas lahan sebesar 952.114 Ha atau 10,92% dari total luas lahan di Provinsi Sumatera Selatan, berikutnya adalah kategori kelas tinggi dengan luas lahan sebesar 143.869 Ha atau hanya 1,65% dari luas wilayah di Provinsi Sumatera Selatan. dimana sebaran secara spasial tidak signifikan teramati karena tersebar secara sporadis. Sedangkan indeks jasa lingkungan untuk pengaturan pemurnian air kategori sangat tinggi tidak terdapat di Provinsi Sumatera Selatan.



■ Sangat Rendah ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi ■ Sangat Tinggi

Gambar 2. 32 Persentase Jasa Pengaturan Pemurnian Air di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

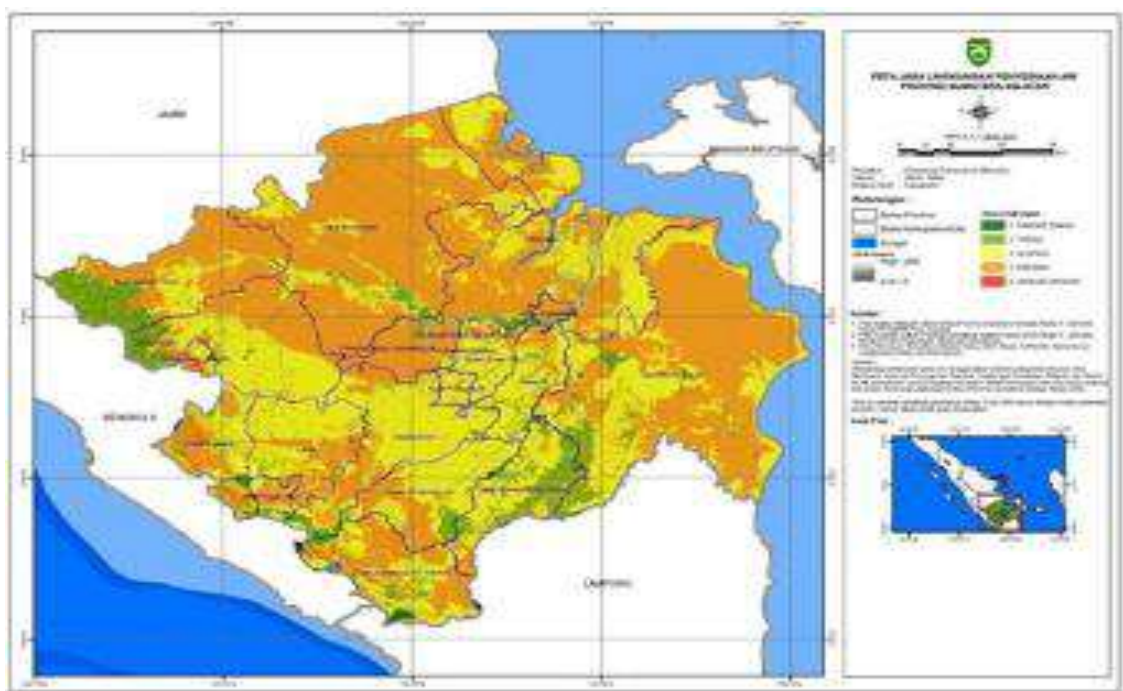
Tabel 2. 15 Jasa Pemurnian Air Perkabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

No	Kab/Kota	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Banyuasin	33.664	399.686	814.876	5.348	-	1.253.575
2	Empat Lawang	80.872	67.614	74.499	133	-	223.118
3	Kota Lubuk Linggau	15.561	2.103	19.262	10	-	36.936
4	Kota Pagar Alam	8.776	20.526	30.431	3.718	-	63.451
5	Kota Palembang	5.803	17.175	12.764	912	-	36.654
6	Kota Prabumulih	2.034	6.496	39.390	1	-	47.921
7	Lahat	119.911	67.503	243.374	4.437	-	435.224
8	Muara Enim	98.119	66.454	505.705	13.040	-	683.318
9	Musi Banyuasin	62.755	285.175	1.058.983	28.836	-	1.435.749
10	Musi Rawas	23.200	81.866	495.847	15.068	-	615.980
11	Musi Rawas Utara	105.888	99.536	391.281	6	-	596.710
12	Ogan Ilir	5.149	22.053	184.911	15.913	-	228.025
13	Ogan Komering Ilir	61.694	445.366	1.194.560	9.740	-	1.711.359
14	Ogan Komering Ulu	53.314	30.459	273.843	20.443	-	378.059
15	Ogan Komering Ulu Selatan	147.639	80.907	196.814	14.439	-	439.799
16	Ogan Komering Ulu Timur	115.454	55.716	161.556	11.811	-	344.537
17	Penukal Abab Lematang Ilir	12.282	38.431	134.345	17	-	185.075
Total		952.114	1.787.065	5.832.441	143.869	-	8.715.490

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Jasa Ekosistem Penyedia Air

Kinerja jasa lingkungan penyedia air di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 51,79% dari total wilayah memiliki indeks kinerja dengan kategori rendah. Persentase wilayah yang memiliki indeks kinerja dengan kategori sedang yaitu sebanyak 39,39% dan kategori tinggi 8,06%. Hanya sedikit wilayah di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki indeks kinerja dengan kategori sangat tinggi sebesar 0,60% dan sangat rendah sebanyak 0,16%. Secara spasial, sebaran keduanya kurang signifikan karena dalam spot-spot yang kecil, menunjukkan luas lahan yang sangat terbatas.



Gambar 2. 33 Peta Jasa Penyediaan Air di Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



Gambar 2. 34 Persentase Jasa Penyediaan Air Provinsi Sumatera Selatan
Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Tabel 2. 16 Jasa Penyediaan Air per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

No	Kab/Kota	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Banyuasin	4.520	679.286	517.121	45.608	7.040	1.253.575
2	Empat Lawang	769	101.187	108.273	12.327	562	223.118
3	Kota Lubuk Linggau	1.974	16.810	17.153	999	-	36.936
4	Kota Pagar Alam	199	31.404	20.575	11.272	-	63.451
5	Kota Palembang	-	27.121	4.114	3.853	1.566	36.654
6	Kota Prabumulih	-	7.666	39.842	319	94	47.921
7	Lahat	1.921	142.701	274.523	14.383	1.697	435.224
8	Muara Enim	1.349	160.552	474.603	43.655	3.159	683.318
9	Musi Banyuasin	499	1.159.686	242.673	23.900	8.992	1.435.749
10	Musi Rawas	123	235.352	314.586	63.345	2.573	615.980
11	Musi Rawas Utara	1.050	326.456	111.919	155.690	1.596	596.710
12	Ogan Ilir	-	45.743	159.280	20.103	2.899	228.025
13	Ogan Komering Ilir	1.344	1.056.954	535.294	109.997	7.770	1.711.359
14	Ogan Komering Ulu	77	110.703	239.019	26.597	1.664	378.059
15	Ogan Komering Ulu Selatan	349	206.907	186.938	35.565	10.040	439.799
16	Ogan Komering Ulu Timur	3	45.254	174.062	122.712	2.506	344.537
17	Penukal Abab Lematang Ilir	-	159.556	13.111	11.912	497	185.075
Total		14.178	4.513.339	3.433.084	702.236	52.654	8.715.490

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Tabel 2. 17 Daerah Irigasi di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

No.	Nama Daerah Irigasi (DI)	Kabupaten/Kota	Luasan (Ha)
1	D.I. Komering Selatan/Way Komering	Kab. Ogan Komering Ilir dan Kab. OKU Timur	57.488
2	D.I. Kelingi Tugu Mulyo	Kab. Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau	10.163
3	D.I. Air Keruh	Kab. Empat Lawang	3.152
4	D.I. Lintang Kanan	Kab. Empat Lawang	3.054
5	D.I. Lintang Kiri	Kab. Empat Lawang	3.038
6	D.I. Air Lakitan	Kab. Musi Rawas	9.500
7	D.I. Muara Riben	Kota Pagar Alam	3.050
	Jumlah		89.445

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015

Tabel 2. 18 Daerah Irigasi Rawa di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

No.	Nama Daerah Irigasi Rawa (DIR)	Luasan (Ha)
Kabupaten Banyuasin		
1	D.I.R. Air Saleh	17.011
2	D.I.R. Air Senda	4.711
3	D.I.R. Delta Air Sugihan Kiri	34.690
4	D.I.R. Delta Cinta Manis	5.554
5	D.I.R. Delta Upang	5.896
6	D.I.R. Gasing Puntian	4.830
7	D.I.R. Ka. Agung Hilir	9.777
8	D.I.R. Karang Agung I	6.300
9	D.I.R. Kr. Agung Tengah	4.001
10	D.I.R. Kumbang Padang	4.268
11	D.I.R. Padang Sugihan	10.200
12	D.I.R. Pulau Rimau	28.184
13	D.I.R. Telang I	18.676
14	D.I.R. Telang II	9.660
Kabupaten Musi Banyuasin		
15	D.I.R. Air Tenggulang	6.156
16	D.I.R. Kr. Agung Hilir	6.350
17	D.I.R. Kr. Agung II/Tengah	17.000
Kabupaten Ogan Ilir		
18	D.I.R. Lbk. Tanjung Seteko	3.876

No.	Nama Daerah Irigasi Rawa (DIR)	Luasan (Ha)
19	D.I.R. Ogan Keramasan I + II	9.660
Kabupaten Ogan Komering Ilir		
20	D.I.R. M. Gajah Mati	5.950
21	D.I.R. Sugihan Kanan	20.885
22	D.I.R. Sungai Lumpur	3.500
	Jumlah	237.133

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015

Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015, memiliki luasan total sebesar 41.541 ha untuk Daerah Irigasi dan 49.509 ha untuk Daerah Irigasi Rawa. Pada tahun 2023, Kondisi Jaringan Daerah Irigasi Permukaan kewenangan Provinsi Sumsel 2023 dengan kondisi baik 77,53%, rusak berat 4,45%.

Tabel 2. 19 Kondisi Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2023

No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (Ha) Daerah Irigasi	Kondisi (%) TA 2023			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Kabupaten Empat Lawang						
1	D.I. Air Keban	1.500	79,93	10,75	9,32	0,00
Kabupaten Lahat						
2	D.I. Air Gohong	1.200	70,29	19,05	10,66	0,00
3	D.I. Air Makim	1.000	100,00	0,00	0,00	0,00
4	D.I. Air Manna I	1.500	91,06	7,83	1,11	0,00
5	D.I. Air Merendang	1.341	95,22	4,78	0,00	0,00
6	D.I. Air Mulak	1.645	0,00	0,00	0,00	100,00
7	D.I. Air Pangi	1.001	75,88	16,08	8,04	0,00
8	D.I. Masam Bulau	1.500	98,29	1,71	0,00	0,00
9	D.I. Tebing Panjang	1.256	100,00	0,00	0,00	0,00
Kabupaten Muara Enim						
10	D.I. Ataran Sungai Air Deras (Cahaya Alam)	1.000	62,58	21,00	12,76	3,67
11	D.I. Danau Tampang	2.690	49,44	25,00	22,75	2,80
12	D.I. Endikat Bengkulu /T.Bute	1.500	74,05	24,47	1,48	0,00
13	D.I. Lecah Paye	1.295	46,33	22,01	15,05	16,62
14	D.I. Tunggul Bute	2.400	51,00	25,00	15,16	8,84
Kabupaten Musi Rawas						
15	D.I. Air Deras I	1.461	91,15	7,37	1,48	0,00
16	D.I. Air Gegas	2.300	60,00	24,43	12,47	3,10
17	D.I. Air Satan	1.175	84,19	11,22	4,59	0,00
18	D.I. Megang Tikip	1.077	70,20	23,92	5,87	0,00
Kota Pagar Alam						
19	D.I. Air Merah	1.500	58,00	21,00	13,13	7,88

No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (Ha) Daerah Irigasi	Kondisi (%) TA 2023			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
20	D.I. Pasemah	1.107	90,70	9,30	0,00	0,00
21	D.I. Selangis Besar/ Jemair	1.020	86,49	13,51	0,00	0,00
22	D.I. Selangis Kecil	1.352	58,00	25,35	11,26	5,38
Kabupaten OKU Selatan						
23	D.I. Air Pius	1.600	100,00	0,00	0,00	0,00
24	D.I. Air Sungkai	1.500	100,00	0,00	0,00	0,00
25	D.I. Air Sunur	1.701	100,00	0,00	0,00	0,00
Kabupaten OKU Timur						
26	D.I. Air Gilas	1.050	58,00	21,00	13,00	8,00
27	D.I. Lebak Datuk	2.102	99,45	0,55	0,00	0,00
28	D.I. Lebak Semendawai	1.768	63,04	19,27	10,89	6,80
Jumlah		41.541	77,53	12,70	5,33	4,45

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Kondisi jaringan irigasi rawa kewenangan provinsi di Sumatera Selatan pada tahun 2023 dengan kondisi baik sebesar 15,69% dan rusak berat sebesar 84,31%.

Tabel 2. 20 Kondisi Jaringan Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2023

No	Nama Daerah Irigasi Rawa (DIR)	Luas DIR (Ha) (Permen PUPR No. 14 Tahun 2015)	Kondisi (%) TA 2023			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Kabupaten Muara Enim						
1	D.I.R Air Putak	1.200	0,00	0,00	0,00	100,00
Kabupaten Musi Banyuasin						
2	D.I. R Bailangu	2.150	0,00	0,00	0,00	100,00
3	D.I. R Buntiale	2.000	0,00	0,00	0,00	100,00
4	D.I. R Danau Cala	1.769	5,65	0,00	0,00	94,35
5	D.I.R Lumpatan	1.300	0,00	0,00	0,00	100,00
6	D.I.R Pinang Banjar	1.000	47,82	0,00	0,00	52,18
7	D.I.R Rantau Panjang	1.922	0,00	0,00	0,00	100,00
Kabupaten Banyuasin						
8	D.I.R Rantau Bayur	1.500	0,00	0,00	0,00	100,00
Kabupaten Ogan Ilir						
9	D.I.R Lbk Bakung	2.975	0,00	0,00	0,00	100,00
10	D.I.R Lbk Lorok	1.681	0,00	0,00	0,00	100,00
11	D.I.R Lbk Parit	1.575	0,00	0,00	0,00	100,00
12	D.I.R Lbk Purna Jaya	2.002	0,00	0,00	0,00	100,00
13	D.I.R Lbk Tj Pering	2.559	25,43	0,00	0,00	74,57
14	D.I.R Lbk Palas	2.450	46,16	0,00	0,00	53,84
15	D.I.R Lbk Tiang Bilik	1.750	0,00	0,00	0,00	100,00

No	Nama Daerah Irigasi Rawa (DIR)	Luas DIR (Ha) (Permen PUPR No. 14 Tahun 2015)	Kondisi (%) TA 2023			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Kabupaten Ogan Komering Ilir						
16	D.I.R Bumi Agung	1.750	46,63	0,00	0,00	53,37
17	D.I.R Doros	1.400	17,86	0,00	0,00	82,14
18	D.I.R Jejawi	1.400	100,00	0,00	0,00	0,00
19	D.I.R Mesuji Ilir/ S. Buaya	2.916	0,00	0,00	0,00	100,00
20	D.I.R Pancur	2.450	10,20	0,00	0,00	89,80
21	D.I.R Sangkaji	1.400	83,29	0,00	0,00	16,71
22	D.I.R Suka Pulih	1.750	24,99	0,00	0,00	75,01
23	D.I.R Ulak Jermun/Jermal	1.050	9,52	0,00	0,00	90,48
Kabupaten OKU Timur						
24	D.I.R Lebak Datuk	1.960	0,00	0,00	0,00	100,00
25	D.I.R Lebak Pauh	2.100	0,00	0,00	0,00	100,00
26	D.I.R Lebak Semendawai	1.400	70,71	0,00	0,00	29,29
27	D.I.R Lebak Tobong	2.100	0,00	0,00	0,00	100,00
	Jumlah	49.509	15,69	0,00	0,00	84,31

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Berikut ini rekapitulasi Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015.

Tabel 2. 21 Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah D.I.	Luasan Total (Ha)
1	Kab. Empat Lawang	18	5.614
2	Kab. Lahat	214	13.348
3	Kab. Muara Enim	241	24.327
4	Kab. Musi Rawas	43	7.203
5	Kab. Ogan Komering Ulu	34	3.824
6	Kab. OKU Selatan	41	5.179
7	Kab. OKU Timur	1	650
8	Kota Lubuklinggau	5	1.529
9	Kota Pagar Alam	99	5.025
	Jumlah	696	66.699

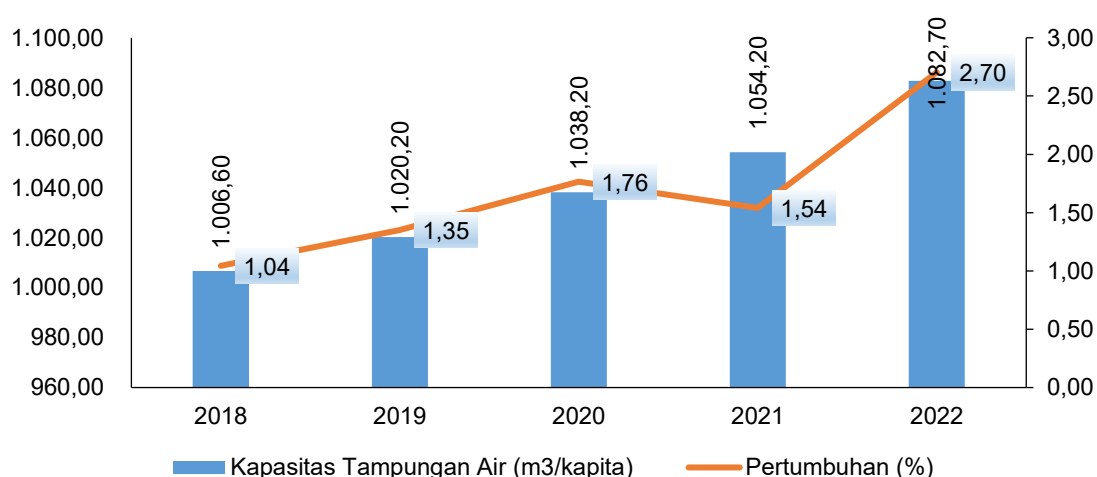
Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015

Tabel 2. 22 Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah D.I.R	Luasan Total (Ha)
1	Kab. Banyuasin	3	2.066
2	Kab. Muara Enim	4	2.757
3	Kab. Musi Banyuasin	56	17.812
4	Kab. Ogan Ilir	50	14.704
5	Kab. Ogan Komering Ilir	3	1.019
6	Kab. OKU Timur	1	700
7	Kota Palembang	2	341
	Jumlah	119	39.399

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015

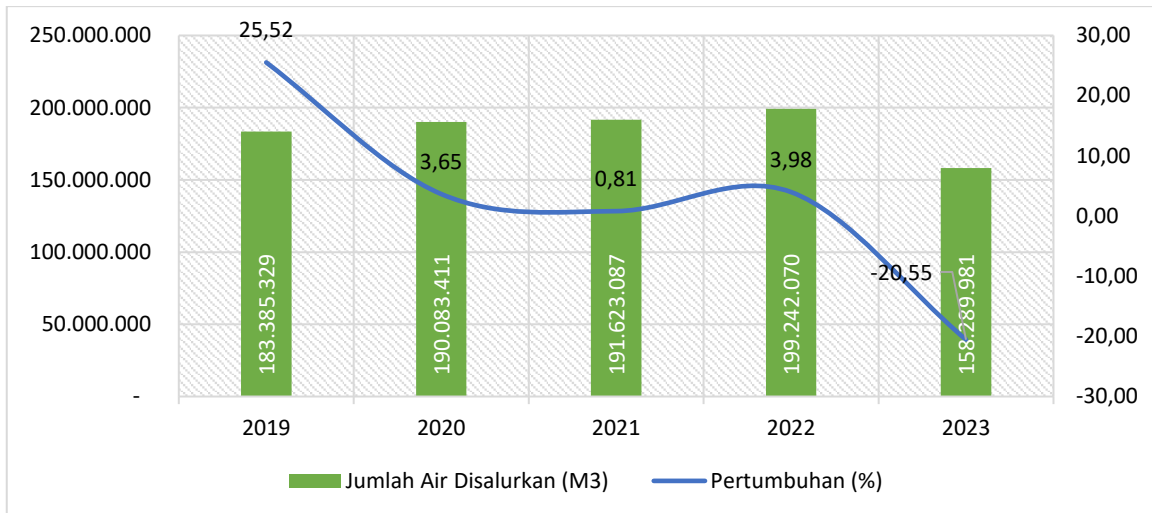
Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi air yang sangat besar, baik air permukaan maupun air tanah yaitu sebanyak 89.861.218.593,14 m³ per tahun dengan jumlah sungai utama sebanyak 9 sungai dan lebih dari 1.000 sungai kecil. Dari sisi pemanfaatannya, kebutuhan air di Provinsi Sumatera Selatan yaitu 37.040.269.526,98 m³ per tahun. Berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan air setiap tahunnya, maka Provinsi Sumatera Selatan masih memiliki cadangan air sebanyak 52.820.949.066,16 m³ per tahun. Namun, Provinsi Sumatera Selatan juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dan isu yang harus diatasi untuk mengelola sumber daya air ini secara berkelanjutan, terutama tantangan terhadap dampak perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan penggunaan sumber daya air yang tidak berkelanjutan.



Gambar 2. 35 Kapasitas Tampung Air di Provinsi Sumatera Selatan (m³/kapita), 2018-2022

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2023

Potensi jumlah air disalurkan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 mencapai 158.289.981 m³ menurun sebesar -20,55 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 199.242.070 m³ pada tahun 2022. Isu potensi jumlah air yang dapat disalurkan berkaitan dengan ketersediaan air dalam suatu wilayah, serta kapasitas infrastruktur dan sistem pengelolaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.



Gambar 2. 36 Jumlah Air Disalurkan di Provinsi Sumatera Selatan (m³), 2019-2023

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2025

Ketersediaan air sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti curah hujan, sungai, danau, reservoir, sumber air tanah, dan sumber-sumber air lainnya. Hal ini sangat tergantung dari pembangunan infrastruktur baru di masing-masing wilayah dalam upaya penyediaan sumber air minum layak. Selain itu, ketersediaan air juga tergantung pada variabilitas musiman dan kekurangan pasokan air selama musim kemarau yang dapat mempengaruhi pasokan air minum, serta isu lain yang mempengaruhi ketersediaan air seperti pencemaran air dari aktivitas industri, pertanian, dan limbah domestik.

B. Ketahanan Pangan

Adanya degradasi pada berbagai ekosistem di Sumatera Selatan memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Diantaranya, perubahan iklim membuat kemampuan lahan untuk menyediakan pangan yang bergizi untuk masyarakat menjadi rentan terhadap disrupsi, seperti gangguan hama, menurunnya kesuburan lahan, dan rusaknya hasil panen karena bencana.

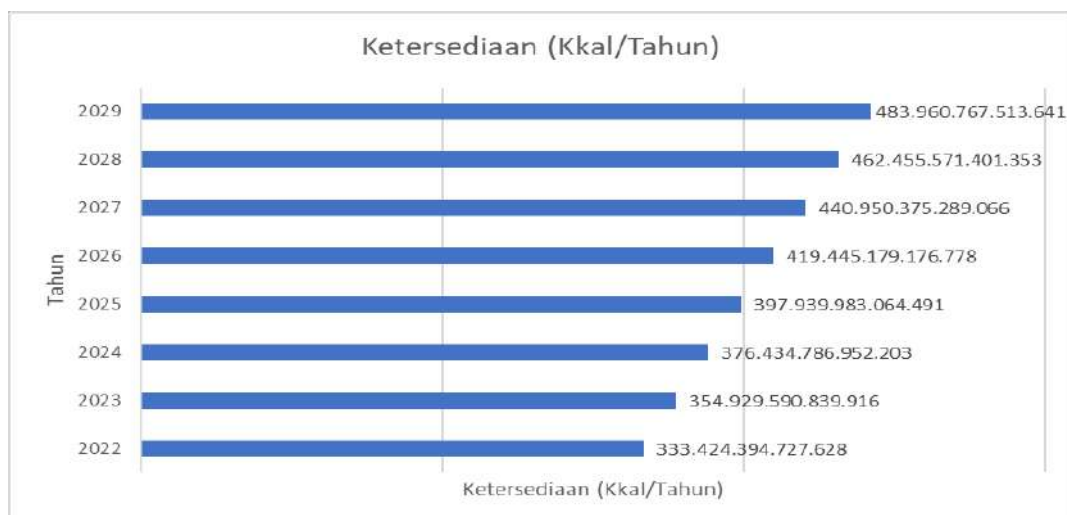
Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan pangan di Provinsi Sumatera Selatan cukup tinggi. Pada tahun 2045 diperkirakan sebesar 8.370.305.158.500 Kkal/tahun, kabupaten/kota dengan kebutuhan cukup tinggi sebagian besar berada di Kota Palembang dengan kebutuhan sebesar 1.551.185.504.500 Kkal/tahun. Sementara kebutuhan pangan terendah berada di Kota Pagar Alam dengan jumlah kebutuhan pangan sebanyak 127.637.233.250 Kkal/tahun. Dilihat dari status daya dukung dan daya tampung pangan, Provinsi Sumatera Selatan secara umum masih tergolong aman. Luasan terlampaui di tahun 2045 diproyeksi sebesar 31.281 ha (0,36%), sedangkan luasan yang belum terlampaui 8.842.527 ha (99,64%). Kota dengan status melampaui tertinggi yaitu Kota Palembang dengan luasan 17,602 ha (48,24%).



Gambar 2. 37 Grafik Kebutuhan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

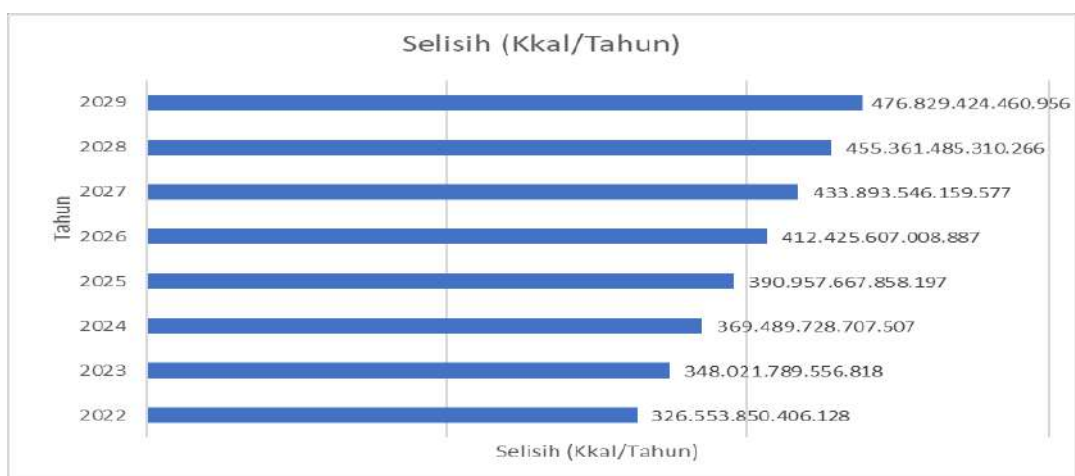
Gambar 2.38 yang merupakan proyeksi kebutuhan pangan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 hingga 2029. Pada tahun 2022, total kebutuhan pangan tercatat sebesar 6.870.544.321.500 Kkal per tahun. Angka ini meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 7.131.343.052.685 Kkal per tahun pada tahun 2029.



Gambar 2. 38 Grafik Ketersediaan Pangan Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Ketersediaan pangan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan selama periode 2022-2029. Pada tahun 2022, ketersediaan pangan tercatat sebesar 333,42 triliun Kkal per tahun, dan diproyeksikan meningkat menjadi 483,96 triliun Kkal per tahun pada tahun 2029.



Gambar 2. 39 Grafik Selisih/Cadangan Pangan Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Kebutuhan dan ketersediaan pangan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan dinamika yang positif sepanjang periode 2022 hingga 2029, dengan peningkatan pada kedua aspek tersebut. Pada tahun 2022, ketersediaan pangan tercatat sebesar 333,42 triliun Kkal per tahun, sedangkan kebutuhan pangan lebih kecil di angka 6,87 triliun Kkal per tahun, menghasilkan selisih cadangan pangan sebesar 326,55 triliun Kkal per tahun.

Tren ini terus berlanjut, di mana pada tahun 2029 ketersediaan pangan meningkat menjadi 483,96 triliun Kkal per tahun, sementara kebutuhan pangan 7,12 triliun Kkal per tahun tetap dapat dipenuhi sehingga menghasilkan cadangan sebesar 476,83 triliun Kkal per tahun. Dengan kondisi surplus pangan ini maka daya dukung pangan belum terlampaui.

C. Perkebunan

Potensi perkebunan di Sumatera Selatan cukup beragam mulai dari karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, dan komoditi lainnya. Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan termasuk dalam 10 Provinsi terbesar penghasil kelapa sawit di Indonesia. Sumatera Selatan pada periode 2020-2024 menunjukkan bahwa produksi komoditi kelapa sawit cukup mendominasi, diikuti oleh produksi karet, produksi kopi dan produksi kelapa. Perkembangan produksi kelapa sawit saat ini menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2020-2024. Pada tahun 2024 (data termutakhir) produksi kelapa sawit mencapai 3.399.995,63 ton meningkat dari 3.323.670 ton pada tahun 2020. Secara riil peningkatan produksi kelapa sawit selama 2020-2024 meningkat sebesar 2,30% dengan rata-rata peningkatan produksi per tahunnya sebesar 0,43%. Permasalahan yang dihadapi tanaman kelapa sawit di Sumatera Selatan diantaranya adanya isu lingkungan seperti deforestasi, pencemaran lingkungan dari limbah pabrik kelapa sawit, dan pembukaan lahan dengan cara membakar. Permasalahan lainnya merupakan permasalahan teknis seperti masih adanya penggunaan benih yang tidak bersertifikat, banyak tanaman tua yang belum diremajakan, serangan hama dan penyakit, harga yang berfluktuasi, konflik agraria, dan permasalahan tenaga kerja yang kurang mendapat jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

Tabel 2. 23 Produksi Tanaman Perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan (ton), 2020-2024

Komoditi	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Peningkatan Produksi (%)
Kelapa Sawit	3.323.670,00	3.445.027,00	3.354.192,00	3.370.527,92	3.399.995,63	0,43
Karet	1.215.233,00	1.246.559,00	1.069.561,00	1.003.780,13	1.008.362,07	-2,58
Kopi	163.868,00	211.681,48	208.043,49	206.655,70	218.667,51	3,67
Kelapa	57.732,00	58.121,20	61.273,50	61.563,76	61.647,20	1,40
Lainnya	93.546	210.489	322.304	178.329,19	190.152,28	25,00

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Perkembangan produksi tanaman kopi juga menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2020-2024, dimana produksi mengalami peningkatan sebesar 54.799,51 ton meningkat dari tahun 2020 atau sebesar 33,44% dengan rata-rata peningkatan tiap tahun sebesar 3,67%.

Walaupun produksi tinggi, pada 2024 ekspor kopi dari Sumatera Selatan belum berkontribusi maksimal. Ada fenomena terjadinya kebocoran wilayah (*regional leakage*) karena sebagian besar hasil kopi dijual lokal atau melalui rute ekspor dari Lampung sehingga dampak nilai ekspor belum dirasakan optimal di Sumatera Selatan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ekspor langsung kopi Sumatera Selatan mencapai Rp8,86 Milyar pada periode Januari-Juni 2025.

Tanaman perkebunan lainnya di Sumatera Selatan yang tumbuh positif adalah kelapa, dengan rata-rata peningkatan produksi per tahun sebesar 1,40%. Bukan hanya kelapa bulat, produk turunan seperti *virgin coconut oil* (VCO), minyak kelapa murni, arang-arang, dan asap cair (*biochar*) punya peluang ekspor tinggi karena permintaan global untuk produk alami dan ramah lingkungan meningkat. Pasar global, termasuk China, Jepang, Eropa, telah mulai menyerap produk turunan kelapa Indonesia, menandakan potensi besar jika rantai nilai digarap serius (sumber: Ditjenbun 2023).

Untuk komoditi karet, Sumatera Selatan tetap menjadi provinsi penghasil karet utama di Indonesia meskipun dilihat dari rata-rata peningkatan produksinya mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar -2,58%. Hal ini dikarenakan sektor ini menghadapi banyak tantangan seperti produktivitas menurun akibat dari tingginya jumlah tanaman tua atau rusak, harga yang tidak stabil bahkan rendah, serangan penyakit dan banyaknya lahan-lahan yang beralih ke tanaman sawit dan komoditi lainnya.

D. Kehutanan

Provinsi Sumatera Selatan memiliki kawasan hutan yang terdiri dari Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi Terbatas, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, Taman Nasional dan Taman Nasional Laut dengan luas total 3.375.563.51 ha. Fungsi kawasan hutan paling luas yaitu kawasan hutan produksi dengan luas sebesar 1.687.928,6 ha atau sebesar 19,45%. Sementara itu, fungsi kawasan hutan yang memiliki luas paling kecil adalah Taman Wisata Alam dengan luas 223,23 ha atau sebesar

0,003%. Fungsi kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 24 Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Fungsi Kawasan Hutan	Luas (Ha)	% terhadap Luas Wilayah Prov.
Hutan Lindung	566.557,68	6,53
Hutan Produksi	1.687.928,6	19,45
Hutan Produksi Konversi	139.555,45	1,61
Hutan Produksi Terbatas	213.817,01	2,46
Suaka Margasatwa	256.010,67	2,95
Taman Wisata Alam	223,23	0,003
Taman Nasional	463.186,67	5,34
Taman Nasional Laut	48.756,51	0,56
Luas Kawasan Hutan	3.375.563.51	38,90
Luas Wilayah Prov. Sumsel	8.676.933,55	100,00

Sumber: Statistik 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

E. Perikanan

Sumatera Selatan memiliki potensi sumber daya perairan sungai dan laut yang cukup besar, namun produksi perikanan budidaya di Provinsi Sumatera Selatan masih belum dikembangkan secara optimal. Produksi perikanan budidaya di beberapa wilayah di Sumatera Selatan juga mengalami penurunan. Berdasarkan tabel capaian produksi perikanan budidaya tahun 2020-2024, secara umum angka ini masih sangat jauh dari capaian yang diharapkan. Hal tersebut karena pada tahun 2020– 2022 para pelaku usaha perikanan termasuk bidang perikanan budidaya terdampak resesi ekonomi karena pandemi Covid-19. Pada tahun tersebut banyak rumah tangga pembudidaya yang tidak lagi mampu membiayai operasional budidaya perikanan, sehingga produktivitasnya menurun. Pembatasan kegiatan sosial (*social distancing*) juga mengakibatkan masyarakat tidak dapat memutar modal sehingga mengakibatkan produksi menurun, dalam rentang waktu tersebut banyak lahan yang dijadikan media budidaya terbengkalai atau berubah menjadi lahan pertanian maupun pemukiman. Hingga tahun 2024 dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan resesi ekonomi di berbagai bidang belum sepenuhnya pulih ditambah lagi dengan harga pakan pabrikan yang semakin mahal menyebabkan produksi perikanan budidaya belum mencapai target yang diharapkan.

Produksi perikanan budidaya dapat ditingkatkan melalui penerapan teknologi, manajemen yang baik, dan dukungan kebijakan. Namun, penurunan produksi sering terjadi karena penyakit, pencemaran, perubahan iklim, atau

kesalahan pengelolaan. Keberlanjutan menjadi kunci agar budidaya perikanan tetap produktif tanpa merusak lingkungan.

Tabel 2. 25 Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatera Selatan (ton), 2020-2024

Prov/Kab/Kota	Total Produksi Perikanan Budidaya (Ton)					Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Sumatera Selatan	357,138	274,051	249,378	323,352	292,062	-4,90
Ogan Komering Ulu	447	465	608	705	766	14,43
Ogan Komering Ilir	89,276	19,119	13,785	40,354	82,088	-2,08
Muara Enim	7,645	7,959	8,269	8,546	9,245	4,87
Lahat	316	315	324	334	173	-13,96
Musi Rawas	78,436	60,874	32,951	73,712	11,022	-38,77
Musi Banyuasin	23,960	25,119	26,340	27,167	12,067	-15,76
Banyuasin	41,423	42,724	44,214	45,204	45,658	2,46
OKU Selatan	1,180	1,928	1,888	2,214	2,351	18,79
OKU Timur	48,740	49,799	52,999	56,411	56,720	3,86
Ogan Ilir	8,161	8,811	9,533	10,017	11,546	9,06
Empat Lawang	877	1,108	1,059	1,175	1,250	9,28
PALI	522	573	513	536	740	9,10
Musi Rawas Utara	700	1,246	1,223	1,038	359	-15,38
Palembang	49,851	47,941	49,448	49,458	54,534	2,27
Prabumulih	772	862	660	473	269	-23,20
Pagar Alam	1,548	1,605	1,693	1,727	1,944	5,87
Lubuklinggau	3,284	3,601	3,871	4,282	1,329	-20,24

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2024

F. Industri

Industri Provinsi Sumatera Selatan memiliki peranan yang sangat baik terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Selatan, berada pada posisi ke-2 setelah sektor pertambangan. Klasifikasi industri tahun 2024 (data termutakhir) menunjukkan total IBS sebanyak 331 unit dengan industri makanan mendominasi IBS di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik sebanyak 37 unit.

Tabel 2. 26 Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kode KBLI 2 Digit di Sumatera Selatan, 2024

KBLI	Klasifikasi Industri	IBS
10	Makanan	160
11	Minuman	19
13	Tekstil	5
14	Pakaian Jadi	6

KBLI	Klasifikasi Industri	IBS
16	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	18
17	Kertas dan Barang dari kertas	6
18	Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	4
19	Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	6
20	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	12
21	Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	1
22	Karet, Barang dari Karet dan Plastik	37
23	Barang Galian Bukan Logam	20
24	Logam Dasar	2
25	Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	11
28	Mesin dan Perlengkapan YTDL	2
29	Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	2
30	Alat Angkutan Lainnya	2
31	Furnitur	13
32	Industri Pengolahan Lainnya	3
33	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	2
Jumlah		331

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2025

Industri sebagai pusat pertumbuhan sangat diperlukan sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan wilayah. Pusat pertumbuhan industri di Sumatera Selatan akan dikembangkan pada rencana Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri Tanjung Carat dan Tanjung Enim yang diharapkan dapat menarik investasi, utamanya terkait dengan aspek perencanaan dan pembangunan. Dalam pengembangannya Kawasan Industri perlu dikelola secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah provinsi dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, Kawasan Peruntukan Industri di Sumatera Selatan mempunyai luas lebih kurang 33.589 Ha. Pengembangan rencana Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri Tanjung Carat dan Tanjung Enim menjadi sangat relevan dan strategis karena telah sejalan pola ruang dan struktur ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 yang bertujuan memperluas basis industri dan menarik investasi serta menjadi bagian dari agenda besar transformasi ekonomi Sumatera Selatan

menuju pusat pertumbuhan industri berbasis sumber daya alam berkelanjutan, terhubung secara efisien melalui pelabuhan dan infrastruktur pendukung yang modern.

G. Pariwisata

Sumatera Selatan merupakan provinsi yang memiliki daya tarik yang lengkap, mulai dari daya tarik alam, sejarah dan budaya hingga daya tarik buatan. Daya tarik memiliki pengaruh dalam meningkatnya kunjungan wisatawan ke suatu daerah. Kunjungan wisatawan dalam negeri maupun luar negeri setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan kunjungan yang disebabkan terjadinya pandemi covid-19. Pada tahun 2021 kunjungan wisatawan ke Provinsi Sumatera Selatan mulai meningkat kembali, hal ini tentunya tidak terlepas dari daya tarik unggulan yang dimiliki Sumatera Selatan.

Tabel 2. 27 Daya Tarik Unggulan Provinsi Sumatera Selatan

No	Daya Tarik Unggulan	Kabupaten/Kota
1	Bukit Sulap	Lubuklinggau
2	Danau Ranau	Ogan Komering Ulu Selatan
3	Gunung Dempo	Pagar Alam
4	Hutan Punti Kayu	Palembang
5	Sungai Musi	Palembang
6	Benteng Kuto Besak	Palembang
7	Jembatan Ampera	Palembang
8	Kampung Kapiten 7 Ulu	Palembang
9	Klenteng 9 Ulu	Palembang
10	Masjid Agung	Palembang
11	Museum Balaputra Dewa	Palembang
12	Pulo Kemaro	Palembang
13	Rumah Rakit	Palembang
14	Pusat Kerajinan Songket 32 Ilir	Palembang
15	Situs Candi Bumiayu	Muara Enim

Sumber: Ripparprov Sumatera Selatan 2015 – 2025

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

A. Pertambangan

Pertambangan Provinsi Sumatera Selatan memiliki kontribusi yang sangat baik terhadap perekonomian wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pertambangan Sumatera Selatan meliputi mineral logam, panas bumi, dan batu bara. Provinsi Sumatera Selatan juga kaya akan sumber daya non logam,

minyak dan gas bumi. Hal tersebut dapat dilihat dari cadangan terbukti SDA yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2. 28 Potensi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Selatan

Sumber Daya Alam	Potensi Cadangan	Cadangan Tereka/Mungkin	Cadangan Terbukti
Mineral Logam	Besi Primer	1.131.840,00	0
Mineral Logam	Emas Primer	8,87	0,21
Mineral Logam	Perak	55,66	1,12
Mineral Logam	Seng	165,648	0
Mineral Logam	Tembaga	29	0
Mineral Logam	Timbal	19,488	122,792862
Panas Bumi	Panas Bumi Bukit Lumut Balai (Operasi)	0	110
Panas Bumi	Panas Bumi Lawang	55	0
Panas Bumi	Panas Bumi Marga Bayur	111	0
Panas Bumi	Panas Bumi Rantau Dedap - Segamit	49	92
Panas Bumi	Panas Bumi Tanjungsakti	80	0
Panas Bumi	Panas Bumi Ulu Danau	0	0
Panas Bumi	Panas Bumi Way Selabung	68	0
Batu Bara	Eksplorasi	13.867,33	-
Batu Bara	Evaluasi Potensi	13,38	-
Batu Bara	Konstruksi	81,24	-
Batu Bara	Operasi Produksi	29.378,47	-
Batu Bara	Propeksi	352,49	-
Batu Bara	Survei Tinjau	329,93	-
Minyak & Gas Bumi	Minyak Bumi	63,84	391,98
Minyak & Gas Bumi	Gas	901,02	4.428,26
Mineral Non Logam	Andesit	256.550.000	-
Mineral Non Logam	Granit	-	-
Mineral Non Logam	Marmer	-	-
Mineral Non Logam	Sirtu	210.000	-
Mineral Non Logam	Tras	1.650.000	-
Mineral Non Logam	Felspar	2.216.000	1.299.200
Mineral Non Logam	Kaolin	-	-
Mineral Non Logam	Lempung	2.594.958.673	15.751.311
Mineral Non Logam	Perlit	-	-
Mineral Non Logam	Toseki	-	-
Mineral Non Logam	Batugamping	861.753.289	235.743.000
Mineral Non Logam	Bentonit	749.000	-
Mineral Non Logam	Pasirkuarsa	1.650.000	-

Sumber: Diolah dari Geoportal ESDM, diunduh tahun 2022

Untuk pertambangan batubara, Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki jalan khusus batubara eksisting sebagai berikut :

No	Perusahaan	Jarak (Km)	Trase
1	PT. Servo Lintas Raya	± 120	Pelabuhan PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya di Kabupaten PALI hingga Stockpile Muara Tiga Besar PT. Bukit Asam, Tbk, Kabupaten Muara Enim
2	PT. Musi Mitra Jaya	± 133	Pelabuhan PT. Sriwijaya Bara Logistik di Kabupaten Musi Banyuasin hingga Stockpile PT. Gorby Putra Utama, Kabupaten Musi Rawas Utara
3	PT. Energate Prima Indonesia	± 51	Pelabuhan PT. Energate Prima Indonesia di Kabupaten PALI hingga Desa Benuang, Kabupaten PALI

Fungsi jalan khusus batubara yaitu dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan umum, mengurangi risiko kecelakaan yang melibatkan truk batubara dan kendaraan lain, mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi pengangkutan, mendukung aktivitas pertambangan dan meningkatkan perekonomian daerah serta pembangunan jalan khusus ini merupakan bagian dari tanggung jawab pengusaha batubara untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 500.11/004/INSTRUKSI/DISHUB/2025 tanggal 02 Juli 2025 tentang Penggunaan Jalan Khusus Pertambangan Bagi Kendaraan Angkutan Batubara di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sehingga ditargetkan tanggal 1 Januari 2026 truk pengangkut batubara sudah tidak ada lagi yang lewat jalur umum.

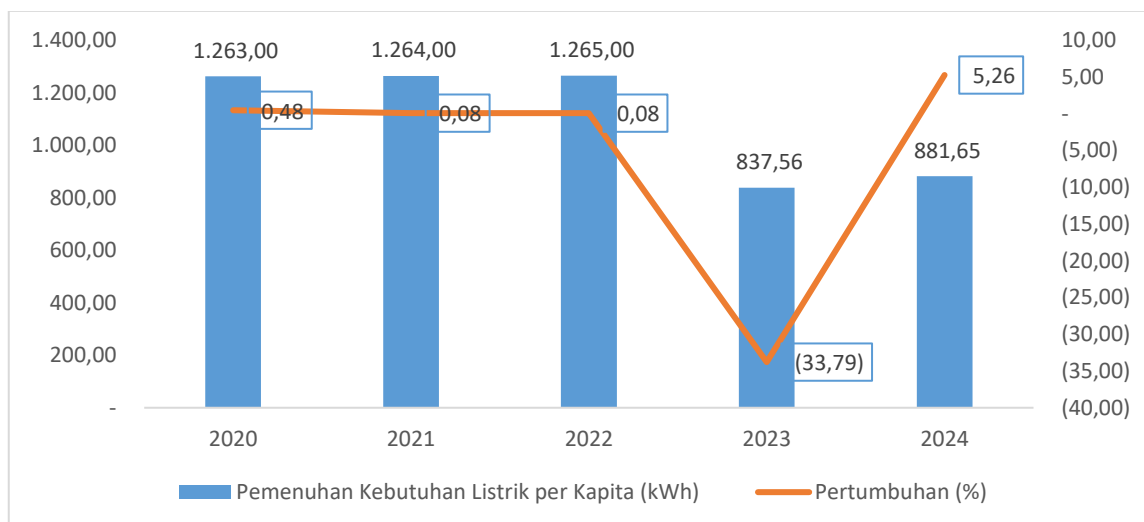
Berikut data rencana Pembangunan Jalan Khusus batubara yang akan diselesaikan pada tahun 2025:

No	Perusahaan	Jarak (Km)	Trase
1	PT. Servo Lintas Raya	<u>28</u>	Stockpile Muara Tiga Besar PT. Bukit Asam, Tbk, Kab. Muara Enim hingga Stockpile PT. Bara Anugrah Sejahtera, Kab. Muara Enim
2	PT. Abani Andalus Energi	<u>120</u>	Desa Benuang, Kab. PALI hingga Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim

No	Perusahaan	Jarak (Km)	Trase
3	PT. Tiga Putri Bersaudara	<u>30</u>	Simpang PT. Muara Alam Sejahtera, Kab. Lahat hingga Stockpile KM 107 PT. Servo Lintas Raya, Kab. Muara Enim
4	PT. RMK Energy	<u>85</u>	Emplacement PT. Truba Bara Banyu Enim, Gunung Megang hingga WIUP PT. Duta Energy Mineratama, Tanjung Enim
5	PT. Marga Bara Jaya	<u>92</u>	Stockpile PT. Triaryani, Kabupaten Musi Rawas Utara hingga Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin

B. Ketahanan Energi

Ketahanan energi adalah isu strategis yang penting untuk Sumatera Selatan dan mencakup sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan dalam rangka menjaga pasokan energi yang andal, berkelanjutan, dan terjangkau. Berdasarkan data dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), pemenuhan kebutuhan listrik per kapita di Sumatera Selatan pada tahun 2024 (data termutakhir) mencapai 881,65 kWh. Pertumbuhan pemenuhan kebutuhan listrik per kapita di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren yang meningkat, pada 2024 tumbuh sebesar 5,26%.

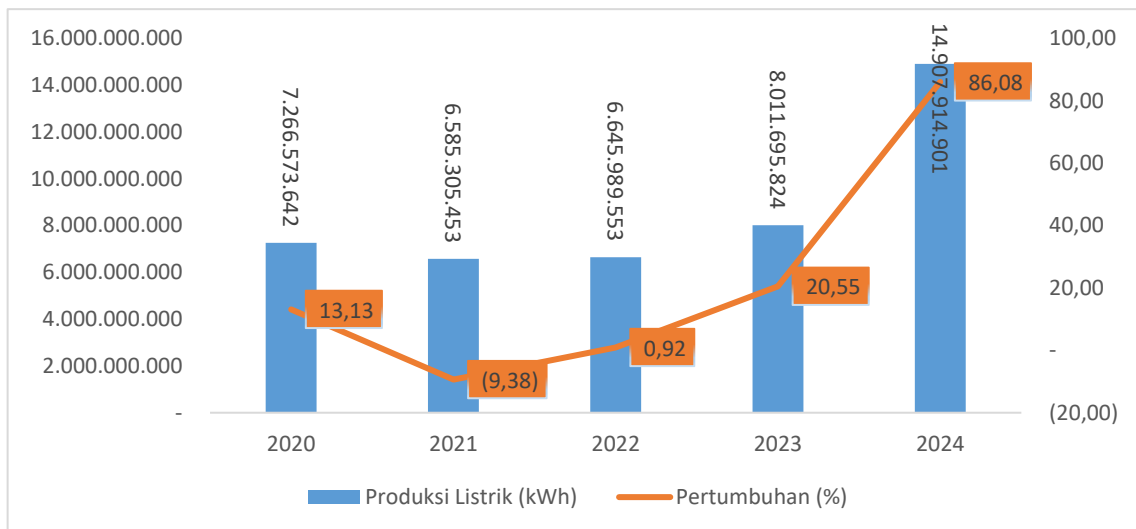


Gambar 2. 40 Pemenuhan Kebutuhan Listrik per Kapita di Provinsi Sumatera Selatan (KWh), 2020-2024

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sumsel

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi listrik di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 (data termutakhir) mencapai

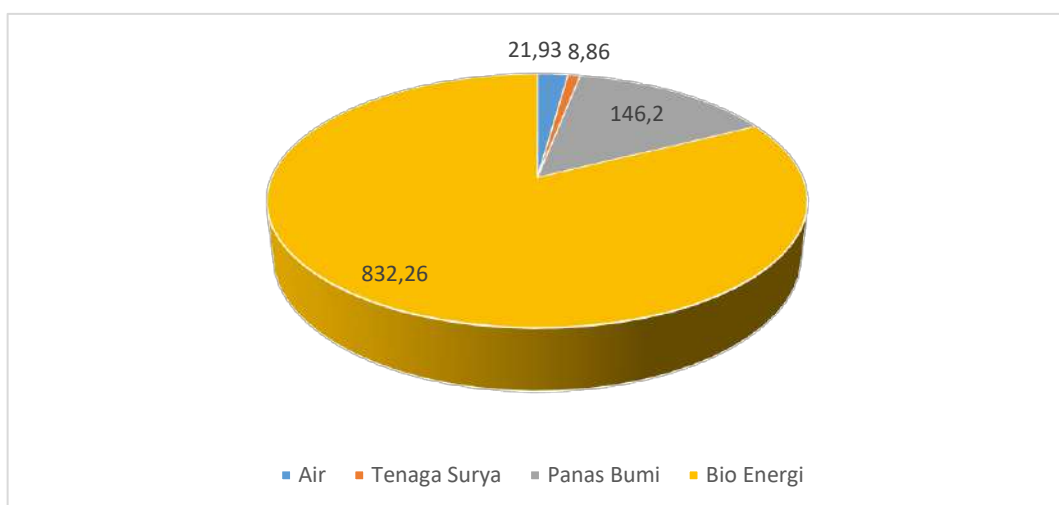
14.907.914.901 kWh. Angka ini meningkat sebesar 86,08% dari tahun sebelumnya yang mencapai 8.011.695.824 kWh pada 2023 dikarenakan PLTU MT Sumsel 8 dengan kapasitas 2 x 600 MW sudah beroperasi (Gambar 2.41).



Gambar 2. 41 Produksi Listrik di Provinsi Sumatera Selatan (KWh), 2020-2024

Sumber: PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera di Pekanbaru

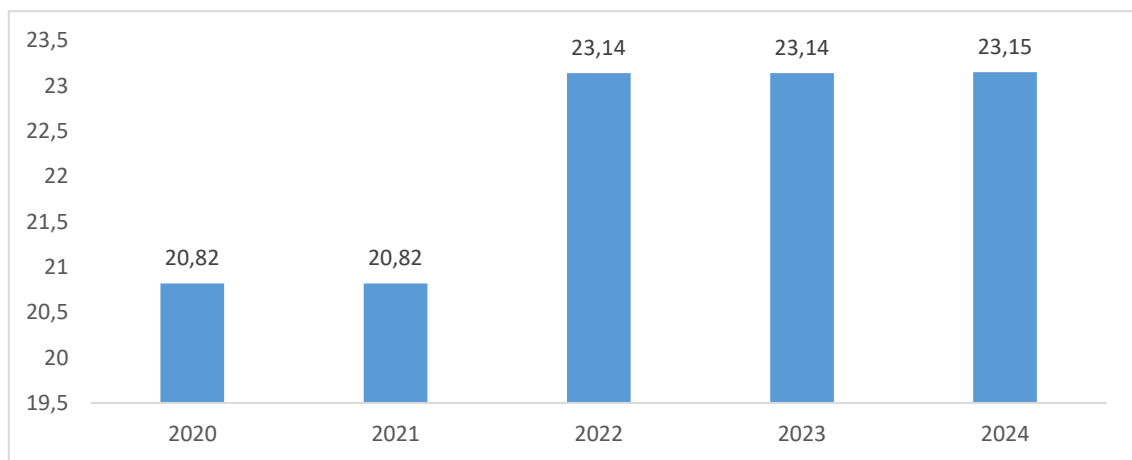
Provinsi Sumatera Selatan telah mengembangkan energi baru terbarukan yang bersumber dari Air sebesar 21,93 MW, Tenaga Surya sebesar 8,86 MW, panas bumi dan bio energi masing-masing sebesar 146,2 MW dan 832,26 MW. Sebaran aneka energi baru dan terbarukan menyebar di kabupaten/kota di Sumatera Selatan dengan total kapasitas terpasang sebesar 1.009,28 MW.



Gambar 2. 42 Pemanfaatan dan Pengembangan Aneka Energi Baru Terbarukan

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, 2025

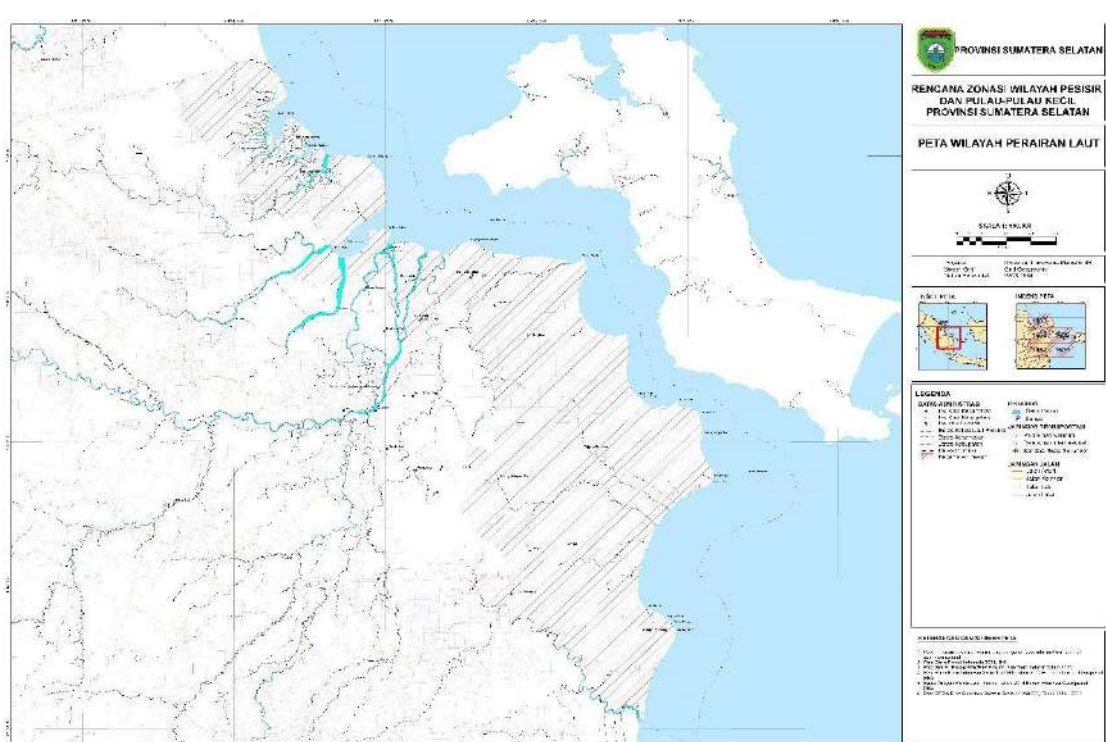
Porsi EBT dalam bauran energi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 mencapai 23,15%. Angka ini masih lebih tinggi dari target pemerintah Indonesia yang sebesar 23,0% pada tahun 2025 (Perusahaan Listrik Negara, 2022). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi porsi kapasitas pembangkit terbarukan di Sumatera Selatan yaitu; (1) potensi sumber daya alam untuk pembangkit listrik terbarukan, seperti biomassa, panas bumi, dan energi air; (2) implementasi dukungan kebijakan pemerintah yang menetapkan target bauran energi terbarukan sebesar 23,0% pada tahun 2025; dan (3) tingkat investasi terhadap pembangunan pembangkit listrik terbarukan.



Gambar 2. 43 Porsi EBT dalam Bauran Energi Provinsi Sumatera Selatan

C. Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Provinsi Sumatera Selatan memiliki kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada di 2 Kabupaten yaitu Ogan Komering Ilir dan Banyuasin. Berdasarkan materi teknis RZWP3K Tahun 2022, cakupan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Banyuasin mencakup 5 kecamatan pesisir dari 19 kecamatan, yaitu Kecamatan Banyuasin II, Makarti Jaya, Air Saleh, Muara Telang dan Muara Sugihan, sedangkan untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir juga mencakup 4 kecamatan dari 18 kecamatan, yaitu Kecamatan Air Sugihan, Tanjung Selapan, Cengal dan Sungai Menang. Untuk wilayah perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mencakup perairan Selat Bangka, Laut Cina Selatan dan Laut Jawa.



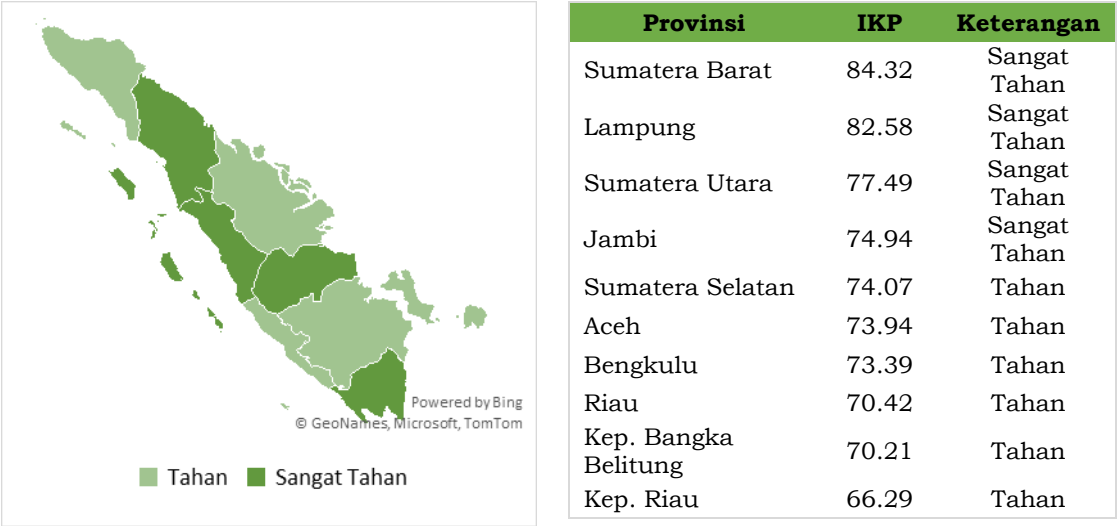
Gambar 2. 44 Peta Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan

D. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks ketahanan pangan dilihat dari pengukuran 3 (tiga) aspek pangan utama, yakni ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Menggunakan data IKP 2024 dari Badan Pangan Nasional, secara umum Sumatera Selatan masuk ke kategori provinsi dengan status “Tahan” dan masih di atas Provinsi Aceh. Sumatera Selatan termasuk provinsi dengan status “Tahan” yang paling tinggi. Namun, masih diperlukan pengoptimalan penggunaan lahan pertanian guna meningkatkan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Terlebih lagi, fokus pada pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan dan gizi diperlukan guna pencapaian TPB, terutama tujuan 1 (tanpa kemiskinan) dan tujuan 2 (tanpa kelaparan) (Gambar 2.45).

Ketahanan pangan di antara kabupaten/kota menggambarkan bahwa ketahanan pangan di Sumatera Selatan sudah baik, namun ada beberapa kabupaten hingga kecamatan yang perlu menjadi fokus penanganan kerawanan pangan pada periode berikutnya. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Palembang, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Pali, Musi Rawas dan Ogan Ilir memiliki Indeks Ketahanan Pangan yang lebih tinggi, sedangkan Kota Pagar Alam memiliki nilai Indeks Ketahanan Pangan yang

paling rendah. Diperlukan upaya untuk meningkatkan dan meratakan resiliensi pangan di Sumatera Selatan, utamanya kabupaten/kota di daerah Barat dan kabupaten/kota dengan nilai IKP tinggi perlu dipertahankan. Pada wilayah yang memiliki status agak tahan dan tahan perlu mempertahankan penggunaan lahan pertanian agar tetap dapat memenuhi pasokan pangan dengan baik.



Gambar 2. 45 Peta Indeks Ketahanan Pangan Pulau Sumatera Tahun 2024

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024 (diolah)

Ketahanan pangan tahun 2024 menunjukkan mayoritas kecamatan berada dalam rentang kelas tahan dan sangat tahan. Sumatera selatan memiliki dua wilayah dengan status yang agak rentan. Wilayah ini perlu mendapatkan perhatian lebih dalam upaya peningkatan ketahanan pangan. Perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian secara efisien guna meningkatkan ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Tabel 2. 29 Peringkat Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2024

Kab/Kota	IKP	Skor	Kelas Ketahanan dan Kerentanan
OKU Timur	85.17	6	Sangat Tahan
Palembang	83.62	6	Sangat Tahan
OKI	79.54	6	Sangat Tahan
Musi banyuasin	79.48	6	Sangat Tahan
Banyuasin	79.17	6	Sangat Tahan
Pali	78.79	6	Sangat Tahan
Musi Rawas	77.66	6	Sangat Tahan

Kab/Kota	IKP	Skor	Kelas Ketahanan dan Kerentanan
Ogan Ilir	77.55	6	Sangat Tahan
Muara Enim	75.62	5	Tahan
OKU Selatan	75.37	5	Tahan
Lahat	75.19	5	Tahan
OKU	73.01	5	Tahan
Prabumulih	68.11	5	Tahan
Empat Lawang	67.42	4	Agak Tahan
Lubuk Linggau	66.10	4	Agak Tahan
Musi Rawas Utara	59.58	3	Agak Rentan
Pagar Alam	57.79	3	Agak Rentan

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024 (diolah)

Meskipun capaian IKP Sumatera Selatan pada tingkat kabupaten/kota cukup baik, namun sejak 2020 posisi provinsi ini masih berada di atas peringkat 20 nasional, bahkan di tingkat Sumatera masih tertinggal dari Provinsi Lampung dan Jambi.

Dalam Periode Tahun 2020-2024 peringkat terbaik Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan hanya berada di posisi 20 yaitu pada tahun 2023 dan pada tahun berikutnya IKP kembali turun ke posisi 21 meskipun secara skor naik 0,25 poin.

Tabel 2. 30 Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Skor IKP	Peringkat Nasional
2020	68,67	27
2021	69,55	27
2022	69,64	25
2023	73,82	20
2024	74,07	21

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024 (diolah)

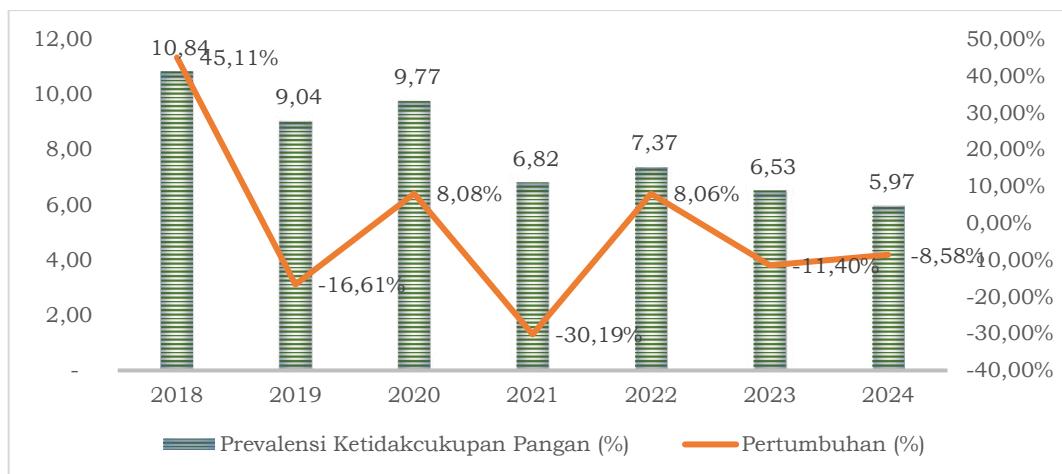


Gambar 2. 46 Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024 (diolah)

Aspek ketahanan pangan dapat diukur dari prevalensi ketidakcukupan pangan. Berdasarkan data Susenas, prevalensi ketidakcukupan pangan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 (data termutakhir) mencapai 5,97%. Angka ini lebih rendah dari prevalensi ketidakcukupan pangan nasional yang mencapai 8,27% tahun 2024.

Ketahanan pangan sangat rentan terhadap tingkat inflasi terutama inflasi pangan. Inflasi pangan secara umum didorong oleh kenaikan harga pangan terutama beras. Beras penyumbang inflasi tertinggi di Sumatera Selatan. Meningkatnya inflasi pangan berdampak pada menurunnya daya beli, dan akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Salah satu indikator dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.



Gambar 2. 47 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (%), 2018-2024

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2025

Di sisi lain, Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi pangan yang sangat besar. Luas lahan pertanian mencapai $\pm$ 1,5 juta ha, dengan komoditas unggulan berupa tanaman padi, palawija, dan perkebunan. Luas panen tanaman pangan padi di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 521.092,21 ha pada 2024 meningkat sebesar 3,63% dari tahun sebelumnya yang seluas 504.143,03 ha pada 2023.

Tabel 2.31 menyajikan data produktivitas tanaman pangan dan palawija dimana rata-rata sebagian besar komoditas mengalami pertumbuhan produktivitas yang positif dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024). Komoditi yang mengalami pertumbuhan produktivitas yang signifikan adalah komoditi Padi yaitu sebesar 2,95% selama 5 (lima) tahun terakhir. Sementara, komoditi Ubi Jalar dan Kacang Tanah yang produktivitasnya mengalami penurunan yaitu masing-masing sebesar -2,87% dan -2,35%.

Tabel 2. 31 Produktivitas Tanaman Pangan dan Palawija di Provinsi Sumatera Selatan (kuintal/ha), 2020-2023

Komoditi	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan (%)
Padi	49,75	51,44	54,06	56,19	55,83	2,95
Jagung	67,60	64,17	71,05	62,36	65,89	-0,23
Kedelai	15,80	15,81	13,28	14,65	14,99*	-0,83
Kacang Tanah	15,58	13,83	14,42	15,47	13,97*	-2,35
Kacang Hijau	7,23	6,07	7,47	8,54	7,18*	1,35
Ubi Kayu	356,22	385,63	360,32	365,16	359,60*	0,38
Ubi Jalar	265,75	245,04	247,83	240,27	236,01*	-2,87

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2024

Tanaman pangan utama seperti padi pada tahun 2024 produktivitasnya mencapai 55,83 kuintal/ha, turun bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 56,19 kuintal/ha pada tahun 2023 atau turun sebesar -0,64%. Sementara itu, wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan produktivitas tertinggi pada tahun 2024 adalah Kabupaten OKU Timur yaitu sebesar 65,65 kuintal/ha dan daerah dengan produktivitas padi terendah adalah Kota Prabumulih yaitu sebesar 38,55 kuintal/ha pada 2024.

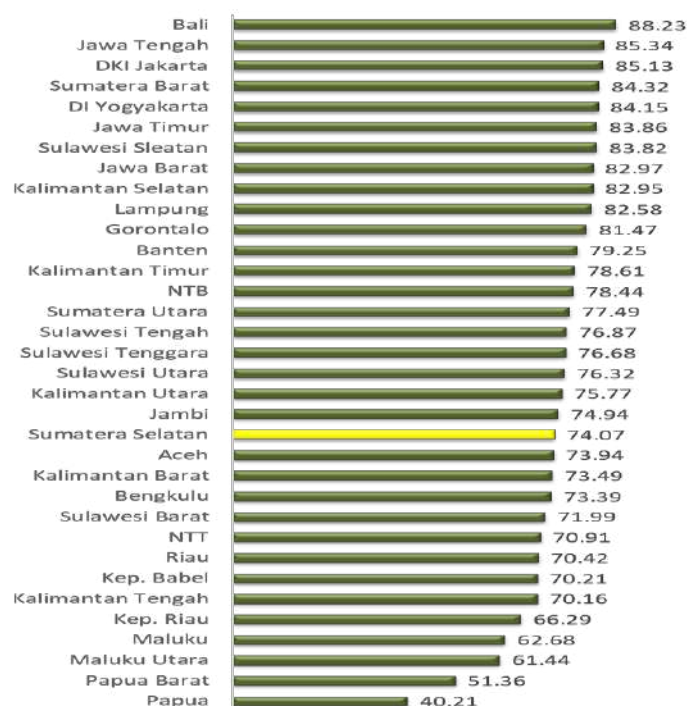
Tabel 2. 32 Produksi Tanaman Pangan dan Palawija di Provinsi Sumatera Selatan (ton), 2020-2024

Komoditi	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan (%)
Padi	2,743,060	2,552,443	2.775.069	2.832.774	2.909.412	1,64
Jagung	927.757	954.025	1.012.791	826.836	833.952	-2,13
Kedelai	1.066	402	39	48.79	865*	386
Kacang Tanah	2.331	1.712	1.491	1.566	1.113,40*	-15,83
Kacang Hijau	453	320	209	219,51	140,87*	-23,71
Ubi Kayu	154.975	307.088	242.044	184.875	146.607,02*	8,16
Ubi Jalar	26.155	28.445	29.891	27.974	23.007,23*	-2,58

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2024

Sementara itu, pertumbuhan produktivitas tanaman palawija pada tahun 2024 seperti komoditi Jagung tumbuh sebesar 5,67%; Kedelai tumbuh sebesar 2,31%; Kacang Tanah turun sebesar -9,70%; Kacang Hijau turun sebesar -5,93%; Ubi Kayu turun sebesar -1,52%; dan Ubi Jalar turun sebesar -1,77% jika dibandingkan tahun sebelumnya pada 2023.

Tabel 2.32 menunjukkan bahwa produksi komoditi tanaman pangan dan palawija di Provinsi Sumatera Selatan mengalami beberapa pertumbuhan yang positif dan negatif selama 2020-2024. Penurunan produksi yang signifikan terdapat pada komoditi Kacang Hijau, turun hingga mencapai -23,71%; Kacang Tanah turun sebesar -15,83%; Ubi Jalar turun sebesar -2,58%; Jagung turun sebesar -2,13%; selama 5 (lima) tahun terakhir. Sementara komoditi pangan yang mengalami pertumbuhan positif selama 5 (lima) tahun terakhir adalah komoditi Kedelai tumbuh sebesar 386%; Ubi Kayu sebesar 8,16%; dan Padi sebesar 1,64%.



Gambar 2. 48 Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2024

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

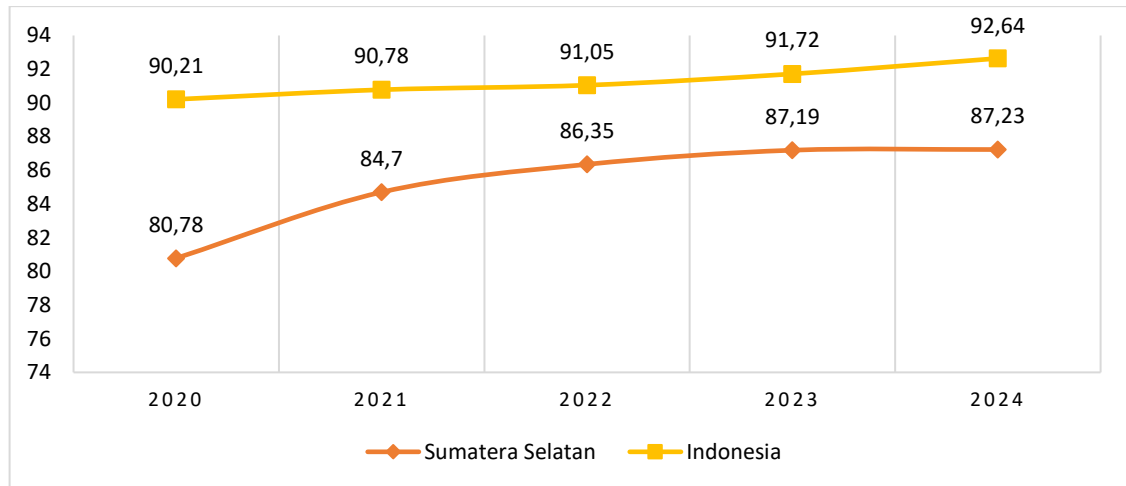
Selain itu, komoditas pangan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi yang cukup baik, karena sektor perikanan memiliki peranan bagi pemasukan perekonomian melalui mata pencaharian masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk pangan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 memiliki total produksi tangkapan perikanan mencapai 158.918 ton, ini terdiri perikanan tangkap di laut sebesar 85.693 ton dan perikanan umum daratan sebesar 73.225 ton dari seluruh wilayah kabupaten dan kota, angka ini turun sebesar 2,41% dari tahun sebelumnya.

Dilihat dari ketersediaan pangan, Sumatera Selatan memang relatif baik namun dilihat dari keterjangkauan (aksesibilitas) dan pemanfaatan pangan Sumatera Selatan memiliki kerentanan pangan yang tinggi. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Sumatera Selatan tahun 2024 menempati urutan ke 21 dari 34 provinsi. Secara regional IKP Sumatera Selatan masih jauh di bawah Provinsi Sumatera Barat, Lampung, dan Sumatera Utara (Gambar 2.48).

E. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Berdasarkan Data Susenas BPS, akses rumah tangga terhadap fasilitas air bersih layak di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2020 sebesar 80,78% menjadi 87,23% pada tahun

2024. Pada tahun 2023, akses capaian tertinggi dicapai Kota Lubuklinggau sebesar 97,52% dan terendah di Kabupaten Empat Lawang sebesar 65,94%. Tantangan yang cukup berat untuk mencapai target RPD 2024- 2026 Sumatera Selatan di tahun 2025 sebesar 89,35 persen. Untuk Kondisi Capaian Pelayanan Air Minum perpipaan di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 23,93% dan untuk Capaian Akses Air Minum Aman pada tahun 2024 sebesar 30,85%.



Gambar 2. 49 Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumsel, 2025

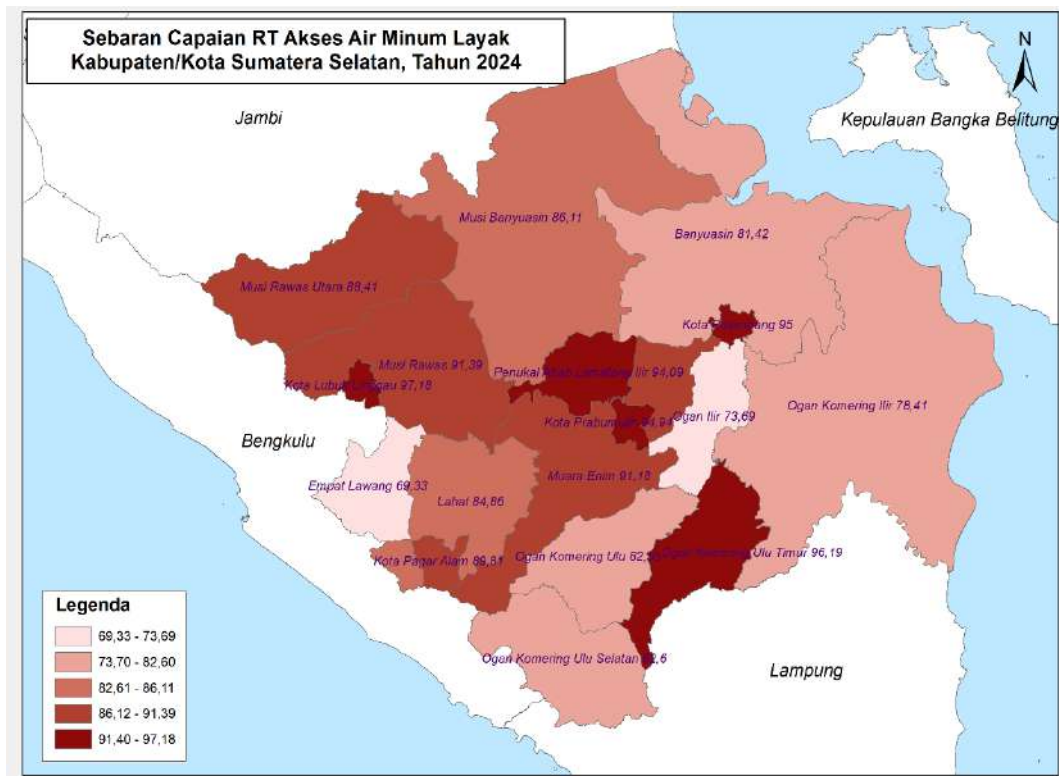
Capaian nasional Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak pada tahun 2023 adalah sebesar 91,72% dimana target yang harus dipenuhi pada akhir periode RPJMN 2020-2024 adalah sebesar 100%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah pusat telah menentukan kegiatan prioritas strategis berupa Akses Air Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) dimana pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha (Sumber: RPJMN 2020-2024). Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan SPAM Regional yaitu jaringan air bersih perpipaan yang melintasi dua Kabupaten/Kota dimana untuk pemenuhan kebutuhan domestik agar masyarakat menikmati air minum berkualitas. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu jarak antarkabupaten yang cukup jauh dan sebagian besar berupa hutan dan rawa.

Tabel 2. 33 Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ogan Komering Ulu	78,98	81,78	82,76	82,33	82,55
2	Ogan Komering Ilir	84,23	79,02	78,52	80,59	78,41
3	Muara Enim	82,15	89,48	91,51	90,78	91,18
4	Lahat	67,44	81,67	84,35	86,16	84,86
5	Musi Rawas	77,08	83,15	93,22	89,34	91,39
6	Musi Banyuasin	84,72	79,37	81,75	85,58	86,11
7	Banyu Asin	70,38	76,97	78,25	80,66	81,42
8	Ogan Komering Ulu Selatan	67,75	77,12	76,52	80,18	82,60
9	Ogan Komering Ulu Timur	89,91	93,32	94,15	96,92	96,19
10	Ogan Ilir	73,08	72,53	71,88	75,10	73,69
11	Empat Lawang	31,41	51,87	64,85	65,94	69,33
12	Penukal Abab Lematang Ilir	83,90	87,49	85,78	91,18	94,09
13	Musi Rawas Utara	73,24	80,33	87,13	86,25	88,41
14	Kota Palembang	92,40	97,43	97,96	96,71	95,00
15	Kota Prabumulih	96,40	93,77	98,42	95,69	94,94
16	Kota Pagar Alam	88,95	93,16	85,76	88,58	89,81
17	Kota Lubuklinggau	97,10	96,10	96,41	97,52	97,18
Sumatera Selatan		80,78	84,70	86,35	87,19	87,23
Nasional		90,21	90,78	91,05	91,72	92,64

Sumber : BPS Sumsel, 2025

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya persentase akses rumah tangga terhadap air minum layak di Provinsi Sumatera Selatan yaitu: (1) minimnya pembangunan infrastruktur air minum, seperti jaringan pipa dan instalasi pengolahan air (IPA), faktor geografis yang mengakibatkan pembangunan memerlukan biaya tinggi; (2) faktor ekonomi yang menyebabkan masyarakat miskin khususnya di daerah perdesaan tidak mampu membayar biaya air minum yang relatif mahal; dan (3) tingkat kesadaran masyarakat dalam meningkatkan permintaan masyarakat terhadap air minum layak masih rendah, karena faktor budaya masyarakat perdesaan yang masih menggunakan sumber air minum tradisional, seperti air sumur gali dan air sungai.



Gambar 2. 50 Sebaran Capaian RT Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota Sumatera Selatan 2024

Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2025 (diolah)

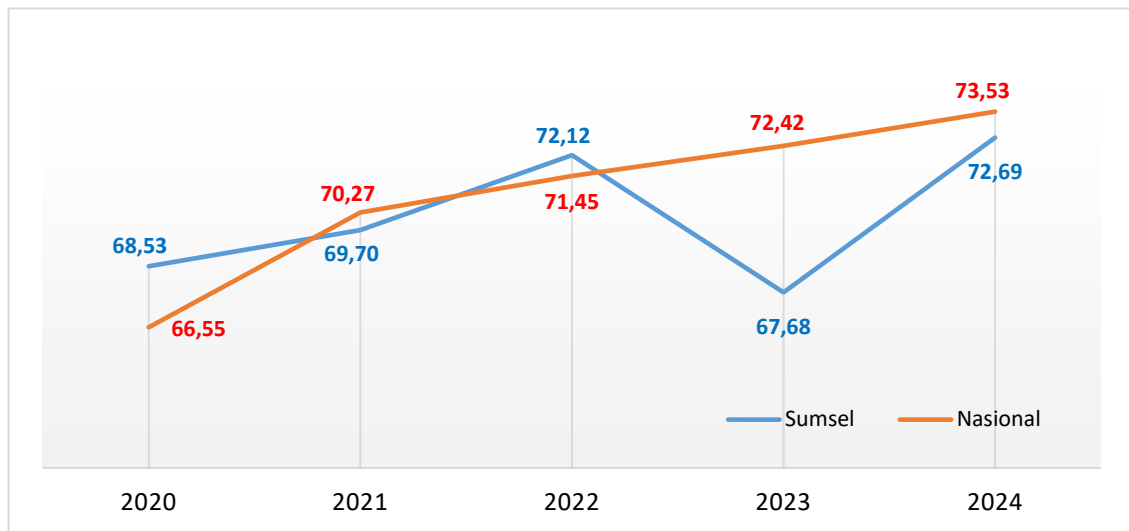
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, kapasitas tampungan air di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 1.082,7 m³ per kapita. Angka ini masih relatif lebih rendah dari kapasitas tampungan air nasional yang mencapai 1.200 m³ per kapita. Isu dan tantangan pemenuhan kebutuhan air di Provinsi Sumatera Selatan bergantung pada: (1) perubahan iklim yang dapat berdampak negatif terhadap ketersediaan air baku; (2) ketersediaan lahan terbatas menjadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur tampungan air seperti pembangunan waduk dan bendungan; dan (3) kesadaran masyarakat dalam penggunaan air yang efisien.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 masuk dalam range kategori sedang dan baik. Untuk tahun 2022, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup masuk dalam kategori baik yaitu berkisar antara 70 sampai dengan 90. Akan tetapi terjadi lagi penurunan Nilai IKLH pada tahun 2023, yaitu sebesar 67,68 jika dibandingkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 72,12. Hal ini juga disebabkan oleh adanya

perubahan perhitungan indikator IKLH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Perubahan perhitungan indikator IKLH ini melibatkan perubahan perhitungan indikator penyusunnya yaitu Indeks kualitas udara (IKU), Indeks kualitas air (IKA), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).



Gambar 2. 51 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. Sebelum adanya perubahan perhitungan Indikator IKLH, IKU dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu Sulfur Dioksida (SO₂) dan Nitrogen dioksida (NO₂), akan tetapi setelah adanya perubahan perhitungan, ada penambahan parameter PM_{2.5} (Particulate Matter 2.5 mikron).

Sebelum adanya perubahan perhitungan indikator IKLH, Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan status mutu dengan metode Indeks Pencemaran, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003, setelah adanya perubahan perhitungan indikator IKLH, IKA dihitung dengan tidak membandingkan kualitas air (modifikasi dari metode NSF – WQI, *National Sanitation Foundation – Water Quality Index*). Nilai Maksimum IKA pada perubahan perhitungan indikator IKLH ini adalah 100.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), hutan merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim dan tempat tumbuhnya plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menghitung indeks tutupan hutan yang pertama kali dilakukan adalah menjumlahkan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi. Pada perubahan perhitungan indikator IKLH, IKTL dihitung dengan mengakomodir semua jenis tutupan lahan (23 klasifikasi tutupan lahan) yang sebelumnya hanya 9 jenis tutupan lahan.

Capaian IKLH tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 72,69 (tercapai) dari nilai target sebesar 71,93. Hal ini dipengaruhi nilai IKL meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan tahun 2024 kebakaran hutan dan lahan lebih sedikit (area gambut) serta curah hujan yang cukup tinggi. Kondisi ini juga menyebabkan nilai IKU meningkat dan melebihi target. Namun demikian ada dua indikator yang belum mencapai target yaitu nilai Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Air Laut. Belum tercapainya nilai IKA dikarenakan tingginya aktivitas pertambangan dan perkebunan sehingga mempengaruhi kualitas air sungai, dengan indeks pencemaran sedang yaitu Kabupaten Musi Banyuasin ada 1 (satu) titik dan Kabupaten Muara Enim ada 2 (dua) titik. Serta sungai Kota Palembang sebanyak 59 (lima puluh sembilan) titik dan Kabupaten Muara Enim sebanyak 63 (enam puluh tiga) titik mengalami pencemaran ringan. Selain itu, belum tercapai nilai Indeks Kualitas Air Laut dikarenakan masih tingginya TSS di Kabupaten OKI yang tersebar di lima lokasi dan masih tingginya minyak lemak di daerah muara laut karena banyaknya pencemaran dari wilayah daratan.

B. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses sanitasi yang layak Provinsi Sumatera Selatan sebesar 82,36% pada tahun 2024. Kondisi lahan basah di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Selatan menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan sanitasi yang layak. Diperlukan biaya yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur sanitasi di daerah lahan basah dibandingkan di daerah lahan kering. Tantangan yang dihadapi yaitu meningkatkan keterpaduan penanganan sanitasi antar Kabupaten/Kota. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.



Gambar 2. 52 Persentase Akses Sanitasi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2024
 Sumber: Badan Pusat Statistik Sumsel, 2024

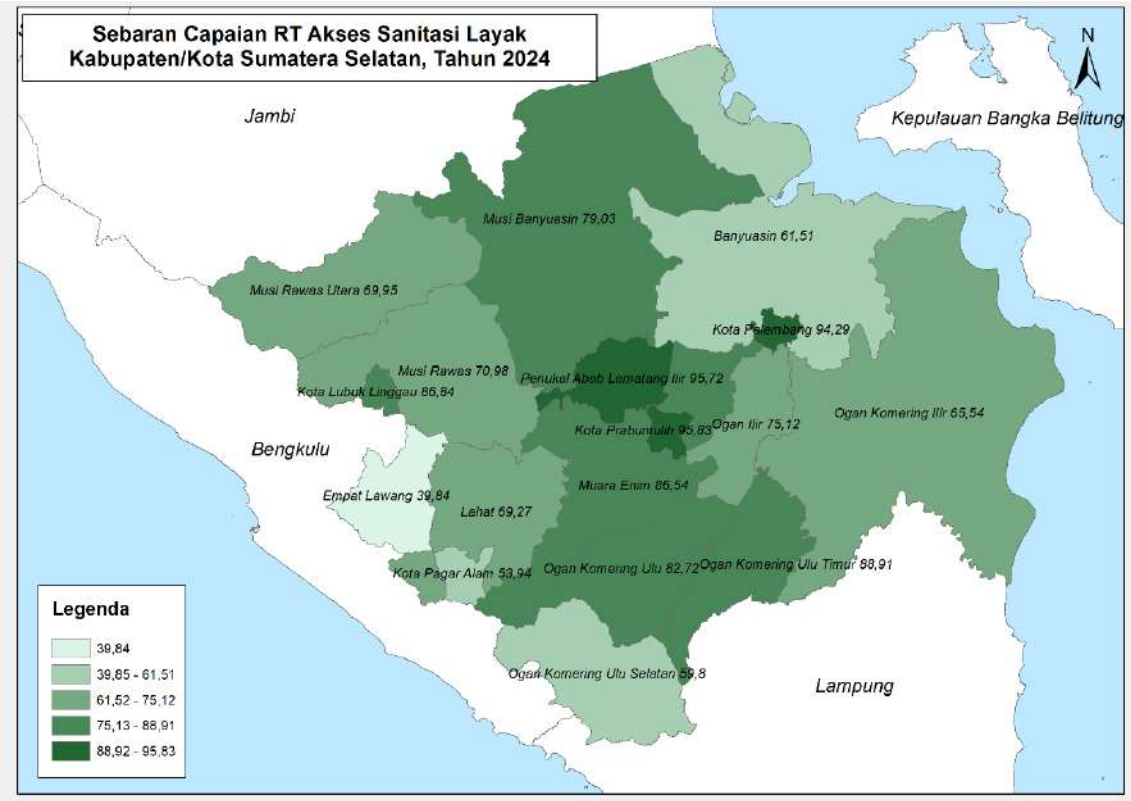
Tabel 2. 34 Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2020 – 2024

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ogan Komering Ulu	80,15	82,94	84,39	80,78	82,72
2	Ogan Komering Ilir	74,72	68,93	63,95	69,73	65,54
3	Muara Enim	84,99	84,80	84,16	85,58	86,54
4	Lahat	69,34	70,52	70,35	70,19	69,27
5	Musi Rawas	71,78	69,34	73,69	74,50	70,98
6	Musi Banyuasin	74,85	71,81	80,71	83,52	79,03
7	Banyu Asin	73,06	72,12	72,80	74,53	61,51
8	OKU Selatan	53,86	57,68	57,54	63,20	59,80
9	OKU Timur	78,80	84,63	87,48	88,25	88,91
10	Ogan Ilir	73,28	68,52	71,55	76,17	75,12
11	Empat Lawang	57,60	53,52	66,93	67,81	39,84
12	PALI	90,49	94,38	89,40	95,22	95,72
13	Musi Rawas Utara	58,13	66,05	65,73	68,57	69,95
14	Kota Palembang	89,63	94,48	92,66	95,16	94,29
15	Kota Prabumulih	91,23	95,20	97,61	96,44	95,83
16	Kota Pagar Alam	52,71	58,20	62,11	61,28	53,94
17	Kota Lubuklinggau	85,87	85,85	87,64	86,05	86,84
Sumatera Selatan		76,94	78,08	78,62	80,54	77,34
Nasional		79,53	80,29	80,92	82,36	83,60

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Daerah yang memiliki persentase sanitasi layak terbesar adalah Kota Prabumulih sebesar 96,44%, sedangkan akses sanitasi layak paling terdapat di

Kota Pagar Alam sebesar 61,28%. Selain itu, pada tahun 2023 Rumah Tangga Akses Sanitasi Aman di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 4,54% masih jauh di bawah nilai sanitasi aman nasional yaitu sebesar 10,21% dan pada tahun 2024 ada peningkatan capaian akses sanitasi aman menjadi 4,79%.



Gambar 2. 53 Peta Sebaran Capaian RT Akses Sanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
 Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2025 (diolah)

C. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Untuk kondisi sarana persampahan Provinsi Sumatera Selatan memiliki 28 unit TPS3R dengan jumlah TPS3R terbanyak terdapat di Kabupaten Muara Enim sebanyak 4 TPS3R. Beberapa TPS3R telah menggunakan opsi teknologi pemilahan, pengkomposan dan pencacahan plastik dalam operasional TPS3R. Pengelolaan sampah di Provinsi Sumatera selatan pada tahun 2023.

Tabel 2. 35 Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	Kabupaten/ Kota	Timbulan (ton)	Pengurangan Sampah (ton)	Jumlah Timbulan Real di TPA (Ton)	Sampah Tidak Terkelola
1	Ogan Komering Ilir	55.556,50	12.076,37	30,09	43.450,04
2	Ogan Komering Ulu	113.429,59	867,73	55,56	112.506,30
3	Muara Enim	157.811,87	41.253,09	29,53	116.529,25

No	Kabupaten/ Kota	Timbulan (ton)	Pengurangan Sampah (ton)	Jumlah Timbulan Real di TPA (Ton)	Sampah Tidak Terkelola
4	Lahat	98.406,85	8.172,63	67,5	90.166,72
5	Musi Rawas	93.259,27	4.402,73	93,26	88.763,28
6	Banyuasin	211.235,90	10.536,40	30,3	200.669,20
7	Musi Banyuasin	94.145,00	22.583,13	31,8	71.530,07
8	Ogan Ilir	297,52	25,55	40,5	231,47
9	OKU Selatan	59.708,31	206,56	34,22	59.467,53
10	OKU Timur	102.981,68	87.885,06	25,55	15.071,07
11	Empat Lawang	173,10	19,00	19	135,10
12	Palembang	439.815,66	93.169,76	900,28	345.745,62
13	Prabumulih	35.918,19	9.246,94	99,74	26.571,51
14	Pagaralam	96,54	38,23	58,31	-
15	Lubuk Linggau	62.468,47	51,36	87,69	62.329,42
16	PALI	37.316,32	19,50	38,22	37.258,60
17	Musi Rawas Utara	132,93	32,63	49,69	50,61
Sumsel		1.562.753,70	290.586,67	1.691,24	1.270.475,79

Sumber: Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN), 2023

D. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Berdasarkan pelaporan data persampahan melalui Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional tercatat bahwa terdapat 15 Kabupaten/Kota yang baru melapor dan diantaranya 8 Kabupaten/Kota dengan data valid selebihnya belum valid serta 2 Kabupaten yang belum melapor, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Empat Lawang.

Pada tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan mencatat timbulan sampah tahunan yang bervariasi di setiap kabupaten/kota. Beberapa daerah dengan timbulan sampah yang tinggi antara lain Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 102.609,82 ton/tahun dan Kabupaten Lahat sebesar 100.498,31 ton/tahun.

Tabel 2. 36 Sampah Terkelola Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Capaian						
		Timbulan Sampah (Ton)	Pengurangan Sampah (Ton)	%	Penanganan Sampah (Ton)	%	Sampah Terkelola	%
1	Kab. Ogan Komering Ulu	56.552,81	13.226,4	23,39	20.805	36,79	34031,4	60,18
2	Kab. Muara Enim	85.838,07	19.019,5	22,16	30.879	35,97	49.898,5	58,13
3	Kab. Lahat	100.498,31	9084,59	9,04	27.375,3	27,24	36.459,89	36,28
4	Kab. Musi Rawas	61.540,61	2153,08	3,5	13.140	21,35	15.293,08	24,85
5	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	102.609,82	2595,51	2,53	47.033,9	45,84	49.629,41	48,36
6	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	38.730,15	1316,74	3,4	13.687,5	35,34	15.004,24	38,74

No	Kabupaten/Kota	Capaian						
		Timbunan Sampah (Ton)	Pengurangan Sampah (Ton)	%	Penanganan Sampah (Ton)	%	Sampah Terkelola	%
7	Kota Pagar Alam	28.021,42	109,5	0,39	15.260,65	54,46	15.370,15	54,8
8	Kota Prabumulih	37.104,08	8130,66	21,91	23.907,5	64,43	32.038,16	86,34

Sumber: Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN), 2025

Upaya pengurangan sampah telah dilakukan di seluruh daerah, dengan capaian persentase pengurangan berkisar antara 0,39% hingga 23,39%. Misalnya, Kabupaten Ogan Komering Ulu berhasil mengurangi sekitar 13.226,4 ton sampah atau 23,39% dari total timbunan, sementara Kota Pagar Alam baru mencapai pengurangan sekitar 0,39%. Sementara itu, dari sisi penanganan sampah, capaian juga bervariasi. Kota Prabumulih mampu menangani sekitar 64,43% dari total timbunan, sedangkan Kabupaten Musi Rawas baru mencapai 21,35%.

Perbandingan antara pengurangan dan penanganan menunjukkan persentase sampah terkelola menunjukkan capaian maksimal sebesar 86,34% (Kota Prabumulih) dan minimal sekitar 24,85% (Kabupaten Musi Rawas). Ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam pengelolaan sampah secara menyeluruh, terutama dalam memperbesar cakupan layanan dan peningkatan sarana prasarana persampahan.

2.1.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

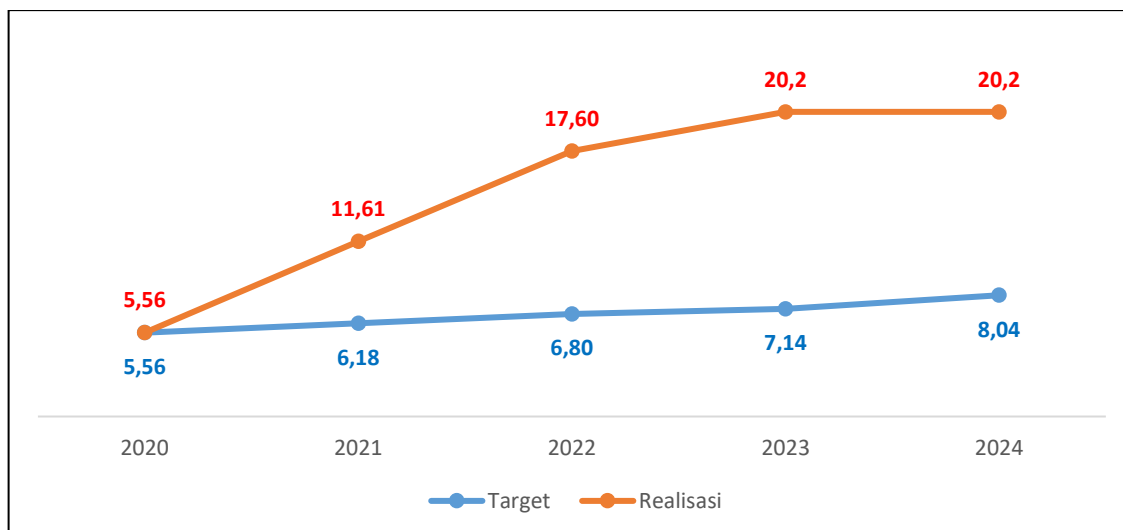
A. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Indonesia berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim sebagaimana tertuang dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk menurunkan target emisi dari 29 persen menjadi 31,89 persen dengan usaha sendiri, dan dari 41 persen menjadi 43,20 persen dengan bantuan internasional pada 2030. Enhanced NDC tersebut diselaraskan dengan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 serta visi untuk mencapai *net zero emissions* pada tahun 2060. Oleh karena itu, untuk mencapai target tersebut diperlukan kolaborasi dan dukungan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah. Dalam mendukung penurunan emisi gas rumah kaca, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkomitmen dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Dalam rangka percepatan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mendukung pembangunan berkelanjutan, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan pengurangan emisi GRK. Kebijakan ini, yang dikenal sebagai Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK), menjadi masukan dalam penyusunan RPJMN 2020–2024 dengan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial (HITS), sekaligus ditetapkan sebagai program prioritas nasional. PPRK merupakan platform baru pembangunan Indonesia yang bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan rendah emisi, penurunan intensitas emisi GRK, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang memberikan manfaat signifikan bagi penurunan emisi dan intensitas emisi GRK diprioritaskan, dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya alam, tutupan lahan, dan ketersediaan air sebagai faktor penentu dalam perumusan kebijakan dan penetapan target pembangunan rendah karbon.

Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon menjadi intervensi kebijakan yang senantiasa diarusutamakan dalam proses pembangunan baik nasional dan daerah, hal ini sebagaimana dituangkan di dalam visi RPJPN 2025-2045 dengan sasaran visi Intensitas Emisi GRK menurun menuju *Net Zero Emission*. Sasaran ini juga dituangkan secara imperatif ke pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen yang kuat antara Pemerintah Indonesia dan daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan melalui perencanaan pembangunan rendah karbon.

Perencanaan pembangunan rendah karbon melalui indikator persentase penurunan intensitas emisi GRK diimplementasikan pada perencanaan menengah dan tahunan baik nasional maupun daerah. Hal ini ditunjukkan dengan ditetapkannya indikator penurunan intensitas emisi GRK menjadi indikator makro pembangunan.



Gambar 2. 54 Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sumatera Selatan 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

Sejak ditetapkannya RAD GRK Sumatera Selatan, capaian penurunan emisi gas rumah kaca Provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020 persentase penurunan emisi gas rumah kaca Sumatera Selatan sebesar 5,56% meningkat sebesar 20,2% di tahun 2024. Sejak transformasi kebijakan penurunan emisi GRK menjadi pembangunan rendah karbon, capaian indikator penurunan intensitas emisi GRK Provinsi Sumatera Selatan baru akan diimplementasikan pada tahun 2025 atau 5 (lima) tahun periode awal RPJPD Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2. 37 Proporsi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Sub Sektor Tahun 2019-2023

Sektor Emisi GRK	Ton Co2-e				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kehutanan dan Lahan Gambut	26.491,90	12.292.662,00	11.400.840,00	14.420.903,00	27.078.092,00
Pertanian	2.034,93	-	-	-	-
Energi	-	-	-	40,50	-
Transportasi	103,03	-	204,14	-	-
Industri	-	-	-	-	-
Pesisir Laut	-	-	2.034,17	1.852,01	-
Persampahan	53,29	16.423,52	11.009,09	48.589,50	427,18
Total	28.683,15	12.309.085,52	11.414.087,40	14.471.385,01	27.078.519,18

Sumber : AKSARA Bappenas, 2025

Pemantauan emisi GRK di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data dari portal AKSARA selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa

kontribusi emisi terbesar secara konsisten berasal dari sektor Kehutanan dan Lahan Gambut. Ini menandakan peran dominan sektor kehutanan dalam emisi regional dan pentingnya penguatan upaya mitigasi di sektor ini.

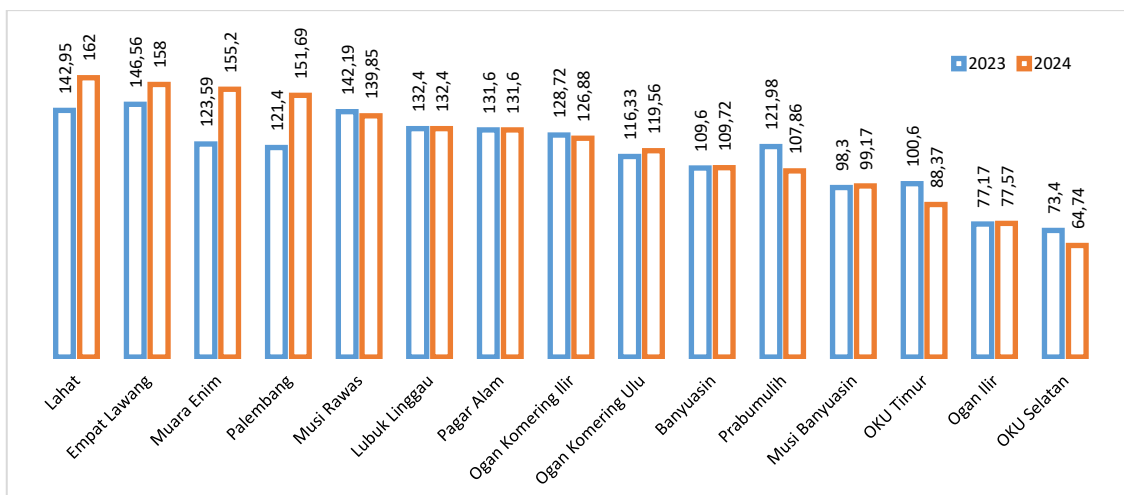
Sektor Persampahan juga menunjukkan adanya pelaporan yang relatif konsisten dan meningkat, terutama pada tahun 2022 yang mencatat 48.589,50 ton CO₂-e, mengindikasikan penguatan sistem pelaporan dan perhatian terhadap subsektor ini.

Namun demikian, masih terdapat sektor-sektor yang pelaporannya belum optimal, antara lain sub sektor energi hanya tercatat pada tahun 2022 sebesar 40,50 ton CO₂-e, sementara pada tahun-tahun lainnya tidak ada data yang dilaporkan. Sub sektor transportasi, data hanya tersedia di tahun 2019 dan 2021. Sub sektor Industri tidak terdapat data pelaporan sama sekali selama lima tahun terakhir. Sub sektor pesisir laut baru mulai tercatat pada tahun 2021 dan 2022. Sub sektor pertanian hanya tercatat pada tahun 2019.

Berdasarkan kondisi di atas, maka sektor yang perlu ditingkatkan dalam pelaporan emisi GRK adalah sektor Energi, Industri, dan Pertanian. Ketiga sektor ini memiliki potensi kontribusi emisi yang signifikan, namun data pelaporannya masih sangat terbatas atau bahkan tidak tersedia. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas teknis instansi pelapor, peningkatan koordinasi lintas sektor dan penyusunan pedoman teknis pelaporan yang lebih spesifik.

B. Indeks Risiko Bencana

Data indeks risiko bencana di Sumatera Selatan tahun 2023–2024 menunjukkan perubahan yang beragam. Beberapa daerah seperti Lahat, Muara Enim, dan Palembang mengalami peningkatan signifikan, menandakan naiknya potensi bahaya atau kerentanan. Sebaliknya, OKU Timur dan OKU Selatan menunjukkan penurunan indeks, yang bisa mencerminkan perbaikan kapasitas penanggulangan bencana. Beberapa wilayah seperti Lubuk Linggau dan Pagar Alam stagnan tanpa perubahan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan perlunya perhatian serius di wilayah dengan peningkatan risiko, serta menjadikan daerah yang menurun risikonya sebagai contoh pengelolaan yang baik.



Gambar 2. 55 Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2023-2024

Sumber: <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi>

C. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana. IKD mencakup berbagai aspek termasuk kemampuan mitigasi, kesiapsiagaan, respons dan pemulihan pasca bencana.

Tabel 2. 38 Nilai IKD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten/Kota	IKD 2024
Ogan Komering Ulu	0,42
Ogan Komering Ilir	0,39
Muara Enim	0,30
Lahat	0,32
Musi Rawas	0,36
Musi Banyuasin	0,43
Banyuasin	0,46
Ogan Komering Ulu Selatan	0,65
Ogan Komering Ulu Timur	0,48
Ogan Ilir	0,55
Empat Lawang	0,29
Penukal Abab Lematang Ilir	0,33
Musi Rawas Utara	0,46
Kota Palembang	0,24
Kota Prabumulih	0,30
Kota Pagar Alam	0,23
Kota Lubuk Linggau	0,26

Sumber: BNPB, Januari 2025

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang tergolong tinggi (0,4-0,8) terdapat di 7 (tujuh) Kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sementara 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota lainnya memiliki nilai IKD rendah ($\leq 0,4$), bahkan 4 (empat) Kabupaten/Kota diantaranya memiliki nilai IKD di bawah 0,3, yaitu Kabupaten Empat Lawang, Kota Lubuk Linggau, Kota Palembang dan Kota Pagar Alam.

2.1.1.7 Demografi

Penduduk menjadi salah satu pusat dari kebijakan dan program dalam perencanaan pembangunan yang akan dilakukan, penduduk menjadi bagian dari subyek maupun obyek dalam pembangunan. Sebagai subyek dari pembangunan penduduk harus diarahkan dan dikembangkan sehingga dapat menjadi penggerak dalam proses pembangunan. Pembangunan juga harus dapat melihat penduduk sebagai obyek yang akan mendapatkan dampak secara langsung ataupun sebagai penerima manfaat dari proses pembangunan tersebut.

Data kependudukan Sumatera Selatan menunjukkan perbedaan mencolok antarwilayah. Kota Palembang memiliki jumlah dan kepadatan penduduk tertinggi (1,8 juta jiwa; 5.109 jiwa/km²), mencerminkan konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan. Sebaliknya, daerah seperti Musi Rawas Utara dan Ogan Komering Ilir memiliki kepadatan paling rendah, meski jumlah penduduknya cukup besar.

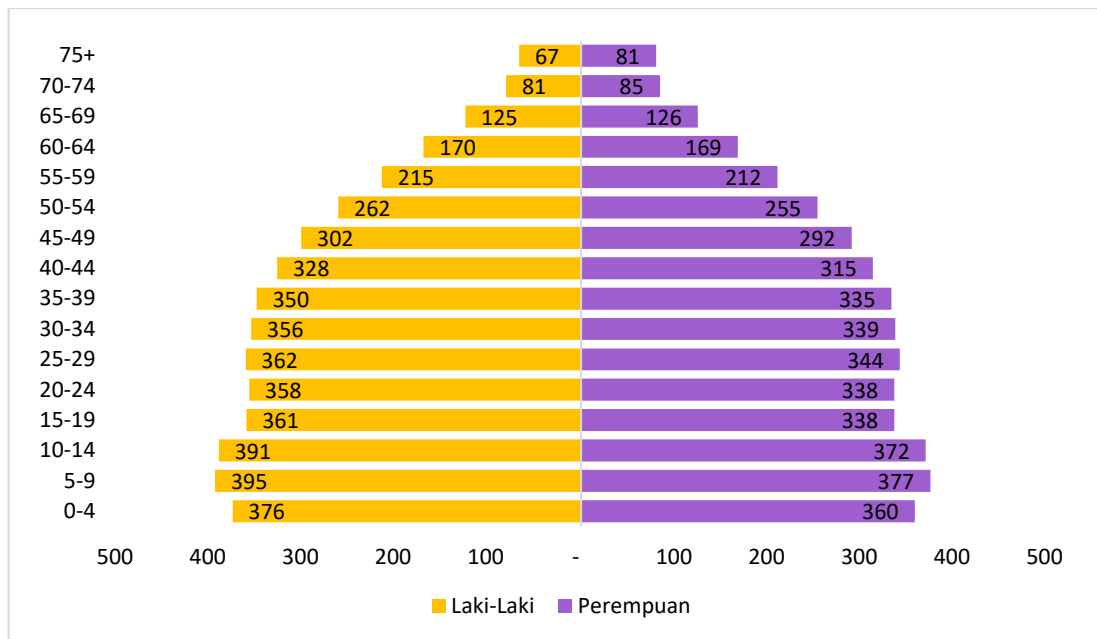
Pertumbuhan penduduk tertinggi tercatat di Banyuasin dan PALI, sementara Palembang dan OKU Timur menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah. Kota-kota seperti Lubuklinggau, Prabumulih, dan Pagar Alam juga memiliki kepadatan tinggi, khas wilayah urban. Dilihat dari rasio jenis kelamin relatif seimbang di seluruh wilayah, dengan sedikit dominasi laki-laki, terutama di OKU Selatan dan Empat Lawang. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan kebutuhan pendekatan pembangunan yang berbeda antara wilayah perkotaan padat dan pedesaan dengan sebaran penduduk rendah (Tabel 2.39).

Tabel 2. 39 Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)*	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (Jiwa/Km ²)*	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Ogan Komering Ulu	390.048	1,05	4,33	103,34	104,8
Ogan Komering Ilir	801.059	1,23	9,13	46,91	105,5
Muara Enim	653.731	1,16	7,25	96,65	104
Lahat	448.141	1,21	5,1	103,42	104,5
Musi Rawas	427.723	1,03	4,66	69,86	104,5
Musi Banyuasin	736.897	1,2	7,38	50,64	105,5
Banyuasin	888.324	1,36	10,02	72,47	104,9
OKU Selatan	406.938	1,28	4,86	93,14	107
OKU Timur	694.832	0,94	7,63	203,60	104,7
Ogan Ilir	446.020	1,2	4,94	193,68	102,8
Empat Lawang	336.783	1,04	3,91	150,75	105,6
Pali	214.795	1,35	2,32	116,57	102
Musi Rawas Utara	203.688	1,27	2,25	34,30	103,8
Kota Palembang	1.801.367	0,73	19,45	5.109,93	100,4
Kota Prabumulih	213.523	1,33	2,3	477,35	101,1
Kota Pagar Alam	153.271	0,94	1,69	244,88	104,8
Kota Lubuklinggau	247.550	1,28	2,78	673,19	101,4
Sumatera Selatan	9.064.690	1,09	100	104,47	103,7

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024; *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, diolah

Penduduk Sumatera Selatan pada 2025 (data termutakhir) berjumlah 9.064.690 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2015-2024 rata-rata sebesar 1,09%, laju pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian juga migrasi. Tingkat migrasi keluar di provinsi Sumatera Selatan kecil dibandingkan tingkat migrasi masuk yaitu sebesar 228.897 jiwa. Hal ini sejalan dengan peningkatan kepadatan penduduk dari 93,36 orang/km² menjadi 104,47 jiwa/km². Berdasarkan kelompok umur menunjukkan adanya bonus demografi yaitu lebih besarnya proporsi penduduk usia kerja (15-64 tahun) terhadap penduduk bukan usia kerja dan mengalami peningkatan sebesar 0,29%.



Gambar 2. 56 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2024

Sumber: Dukcapil Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Perubahan struktur umur penduduk ini diiringi oleh peningkatan jumlah angkatan kerja dari 4,50 juta jiwa pada tahun 2020 menjadi 4,66 juta jiwa pada tahun 2024 sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan kelompok umur, komposisi penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin tidak berubah signifikan dalam tiga tahun tersebut yaitu 104%. Jumlah penduduk sebagai modal dasar yang berkontribusi dalam kegiatan produksi, ditunjukkan dari bagian penduduk yang berstatus angkatan kerja.

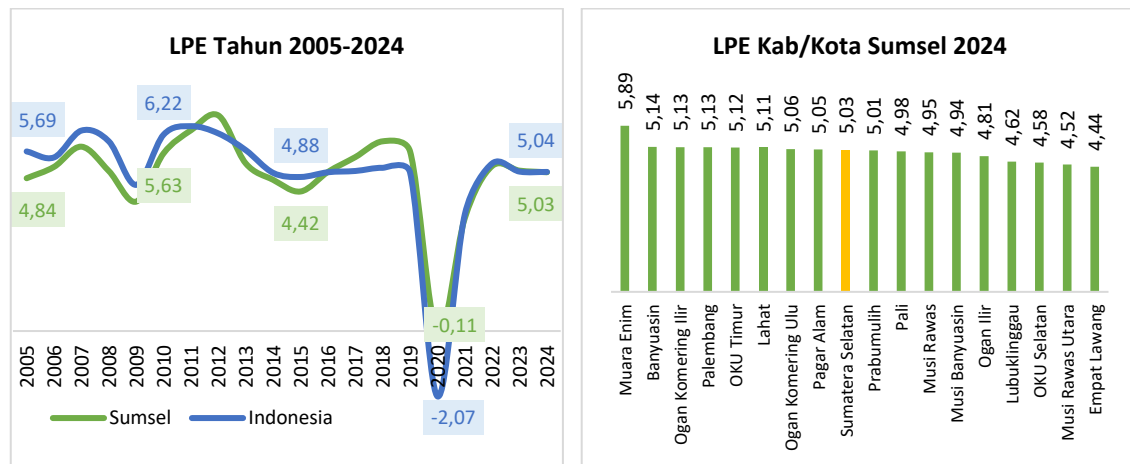
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sumatera Selatan dan nasional menunjukkan perkembangan positif sampai tahun 2024 (data termutakhir). Kinerja pertumbuhan ekonomi cenderung stabil pada interval 4-5% sejak tahun 2005. Namun pada tahun 2020 perekonomian Sumatera Selatan mengalami kontraksi sebesar 0,11% dan nasional terkontraksi sebesar 2,07% akibat adanya pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi kembali menguat sebesar 5,08% pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 mengalami perlambatan

yaitu sebesar 5,03%. Secara nasional juga tumbuh positif sebesar 5,05% tahun 2023 dan 5,04% pada tahun 2024.



Gambar 2. 57 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 menunjukkan terdapat delapan kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan di atas angka provinsi yaitu Kabupaten Muara Enim sebesar 5,89%, Kabupaten Banyuasin sebesar 5,14%, Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 5,13%, Kota Palembang sebesar 5,13%, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 5,12%, Kabupaten Lahat sebesar 5,11%, Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 5,06% dan Kota Pagar Alam sebesar 5,05%, sedangkan kabupaten/kota lainnya memiliki angka pertumbuhan ekonomi di bawah angka provinsi.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang cukup stabil didorong oleh aktivitas sektor unggulan yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Konstruksi. Sektor unggulan tersebut tersebar di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Sektor pertambangan dan penggalian sebagian besar berada di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Musi Banyuasin. Sektor pertanian didominasi oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sementara itu, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang didominasi oleh Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sedangkan sektor konstruksi dan sektor *real estate* didominasi oleh Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam dan Kota Prabumulih.

Secara sektor ekonomi, pada tahun 2024 sektor sekunder menunjukkan pertumbuhan yang pesat, ditopang oleh pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 3,44%, dan sektor penyedia akomodasi dan makan minum sebesar 9,39%, serta sektor informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 8,84%. Tren pertumbuhan sektor sekunder dan tersier yang cukup tinggi dalam 10 tahun terakhir mengindikasikan terjadinya transformasi struktur ekonomi. Namun demikian, tingginya pertumbuhan sektor sekunder dan tersier belum diimbangi oleh peningkatan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB (Tabel 2.40).

Transformasi sektoral pun terlihat pada sektor tersier, dimana sektor tersier utamanya didukung oleh sektor yang berbasis digital seperti *e-sport* (olahraga elektronik). Sejak revolusi industri 4.0 pemanfaatan teknologi sangat tinggi sehingga mendorong terjadinya efisiensi. Internet sebagai salah satu sumber informasi didorong untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia. Kecenderungan generasi Z dalam penggunaan internet telah mendorong peningkatan olahraga elektronik. *Sport Development Index* (SDI) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 sebesar 0,352 menempati urutan ke-24 di Indonesia. Beberapa indeks pembentuk SDI masih perlu ditingkatkan seperti Indeks Tingkat Partisipasi Olahraga, dan Indeks Tingkat Kebugaran.

Tabel 2. 40 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral (%)

Sektor	2015	2020	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,59	1,75	2,59
Pertambangan dan Penggalian	3,94	-4,08	3,33
Industri Pengolahan	5,40	0,72	4,39
Pengadaan Listrik dan Gas	3,66	14,67	8,48
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,67	4,83	2,66
Konstruksi	0,07	-0,01	5,89
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,57	-1,34	7,42
Transportasi dan Pergudangan	9,77	-5,91	3,44
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,87	-7,21	9,39
Informasi dan Komunikasi	8,68	12,79	8,84
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,34	1,64	7,09
Real Estate	7,10	2,24	8,17
Jasa Perusahaan	4,41	-2,08	5,18
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,49	4,17	9,35

Sektor	2015	2020	2024
Jasa Pendidikan	7,90	-1,50	6,76
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,29	10,14	7,34
Jasa lainnya	4,05	5,23	4,12
Produk Domestik Regional Bruto	4,42	-0,11	5,03

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

B. Struktur PDRB

Perbaikan kinerja ekonomi tahun 2024 (data termutakhir) di Provinsi Sumatera Selatan didorong oleh peningkatan sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan. Aktivitas masyarakat yang kembali normal juga mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga, dan mampu menggerakkan sektor riil seperti sektor perdagangan dan eceran. Data menunjukkan PDRB harga berlaku tahun 2010 sebesar Rp194.013 miliar meningkat menjadi sebesar Rp663.961,7 miliar pada tahun 2024. PDRB ADHK 2010 pada tahun yang sama juga meningkat dari yang sebesar Rp194.013 miliar menjadi Rp379.119,6 miliar.

Tabel 2. 41 Perkembangan PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010

Tahun	PDRB (Miliar Rupiah)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan (2010)
2010	194.013,0	194.013,0
2015	331.765,7	254.044,9
2020	454.607,4	315.129,2
2024	663.961,7	379.119,6

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Lapangan usaha utama Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2007-2024 (data termutakhir) yaitu sektor primer, rata-rata sebesar 40,74%, sektor sekunder sebesar 29,83%, dan sektor tersier sebesar 29,43%. Sektor primer didukung oleh sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan; dan sektor pertambangan dan penggalian. Penurunan kontribusi sektor primer disebabkan oleh menurunnya andil sektor pertanian. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena akan mengganggu ketersediaan pangan di masa yang akan datang.

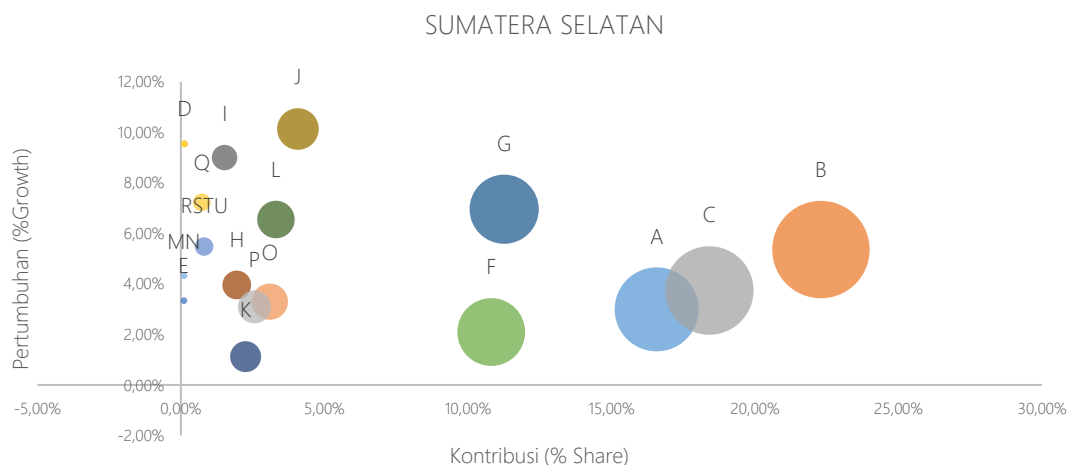
Tabel 2. 42 Lapangan Usaha Utama Sumatera Selatan

Sektor	Tahun				
	2007	2010	2015	2020	2024
Sektor Primer	43,2	42,94	40,79	38,59	38,16
Sektor Sekunder	29,6	29,64	29,91	30,70	29,30
Sektor Tersier	27,2	27,42	29,30	30,71	32,53

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025 (diolah)

Secara sektoral, sektor Pertambangan dan Penggalan, Industri Pengolahan, dan Pertanian memiliki kontribusi yang tinggi terhadap PDRB, akan tetapi dilihat dari pertumbuhan ketiga sektor ini relatif rendah. Struktur PDRB yang masih mengandankan sektor primer memerlukan transformasi ekonomi baik secara vertikal maupun horizontal.

Data struktur PDRB menunjukkan kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan cukup tajam dari sebesar 19,76% tahun 2005 menjadi 13,56% pada tahun 2024. Sektor pertambangan memiliki kontribusi yang cukup stabil dan terjadi sedikit penurunan sebesar 26,86% tahun 2005 menjadi sebesar 24,6% pada tahun 2024. Sektor industri pengolahan mengalami kontribusi yang cukup stabil, terdapat peningkatan dari 17,74% tahun 2005 menjadi 18,27% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya gejala deindustrialisasi di Provinsi Sumatera Selatan. Namun demikian, transformasi ekonomi mulai bergerak ke sektor jasa dan lainnya yang meningkat dari 35,64% menjadi 43,56%. Dengan demikian, struktur ekonomi di masa yang akan datang cenderung berfokus pada sektor jasa.

**Gambar 2. 58 Analisis *Growth* PDRB Sumatera Selatan 2017-2022**

Tabel 2. 43 Struktur Ekonomi Sumatera Selatan

Struktur Ekonomi % PDRB Sumsel			
	2005		2024
Pertanian	19,76	➡	13,56
Pertambangan	26,86	➡	24,60
Industri Pengolahan	17,74	➡	18,27
Jasa dan Lainnya	35,64	➡	43,56

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025 (berbagai edisi diolah)

Di wilayah Sumatera Bagian Selatan, persentase PDRB provinsi terhadap total PDB Indonesia di Sumbagsel sebesar 7,65%, dan Provinsi Sumatera Selatan berkontribusi sebesar 3,02%. Sementara itu Provinsi Lampung sebesar 2,20%, Jambi sebesar 1,47%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,49% dan Bengkulu sebesar 0,47%. Kontribusi sektoral terbesar masing-masing daerah juga berbeda, Provinsi Sumatera Selatan didominasi sektor pertambangan dan penggalian, sedangkan Provinsi Lampung, Jambi dan Bengkulu yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sektor industri pengolahan.

Tabel 2. 44 PDRB ADHK 2010 Sumatera Selatan Tahun 2010-2024

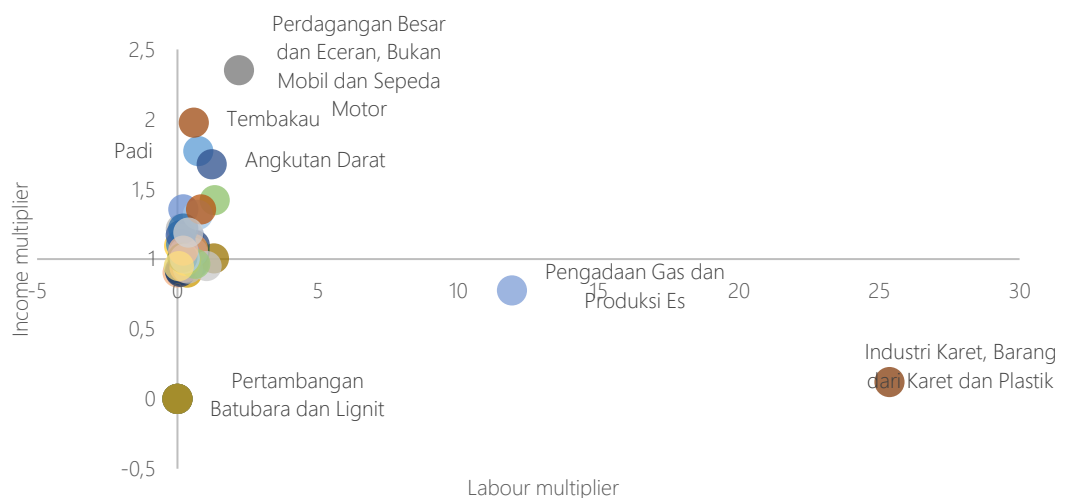
Lapangan Usaha	PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)			
	2010	2015	2020	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38.067,01	48.287,68	53.281,53	59.660,28
B. Pertambangan dan Penggalian	45.242,85	55.330,27	68.330,87	85.386,44
C. Industri Pengolahan	36.600,12	47.066,75	59.276,64	68.667,77
D. Pengadaan Listrik dan Gas	151,28	232,29	395,09	480,12
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah. Limbah. dan Daur Ulang	229,69	296,43	381,08	376,57
F. Konstruksi	20.523,62	28.393,62	36.678,56	40.721,53
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.331,74	24.520,21	33.117,58	44.519,93
H. Transportasi dan Pergudangan	3.268,46	4.813,18	6.106,40	7.412,99
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.126,77	3.024,31	4.363,55	6.467,36
J. Informasi dan Komunikasi	5.536,33	8.021,41	12.214,33	16.209,52

Lapangan Usaha	PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)			
	2010	2015	2020	2024
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.420,20	6.651,74	7.477,61	8.674,33
L. Real Estat	4.915,91	7.360,89	10.214,87	12.829,26
M.N. Jasa Perusahaan	182,10	265,17	358,14	397,88
O. Administrasi Pemerintahan. Pertahanan. dan Jaminan Sosial Wajib	6.777,63	8.576,39	9.877,17	12.068,77
P. Jasa Pendidikan	4.635,62	7.405,48	8.082,90	9.611,46
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.230,40	1.757,35	2.272,24	2.682,72
R, S, T, U. Jasa Lainnya	1.773,22	2.041,70	2.700,64	2.952,69
Produk Domestik Regional Bruto	194.012,97	254.044,88	315.129,22	379.119,63

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

C. Pengganda Tenaga Kerja dan Pendapatan

Sektor yang memiliki nilai pengganda tenaga kerja di Sumatera Selatan berdasarkan analisis I-O adalah 1) industri karet, barang dari karet, dan plastik, 2) pengadaan gas dan produksi es, dan 3) perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor, sedangkan sektor dengan penyerapan tenaga kerja terendah di Sumatera Selatan adalah pertambangan batu bara dan lignit. Sementara itu, sektor dengan nilai pengganda terbesar yaitu Sektor Jasa dan Komunikasi; Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; Tembakau; Angkutan Darat; Padi; dan Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik.



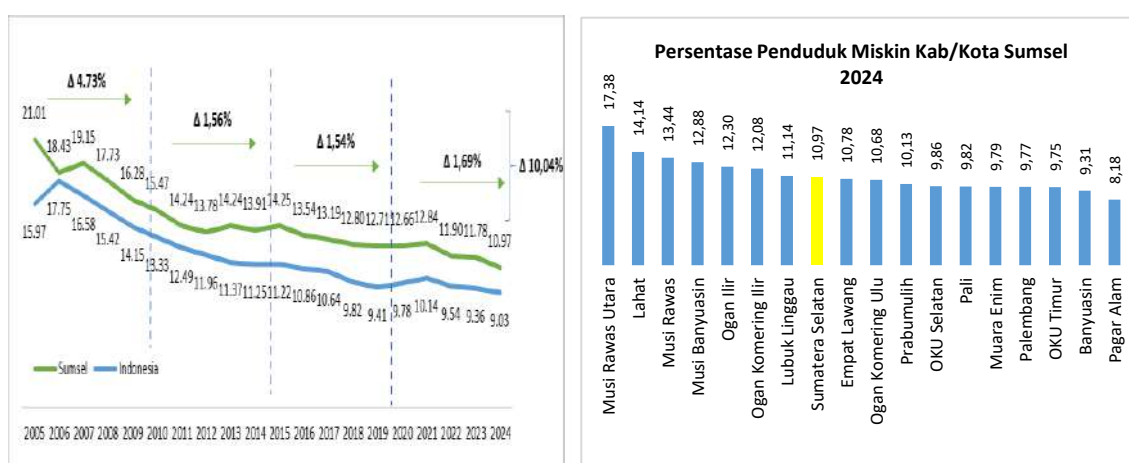
Gambar 2. 59 Income dan Labour Multiplier Sumatera Selatan 2017-2022

Tabel 2. 45 Rekapitulasi *Income* dan *Labour Multiplier* di Sumatera Selatan

	Income Multiplier	Labor Multiplier
1st	Jasa Informasi dan Komunikasi	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
2nd	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	Pengadaan Gas dan Produksi Es
3rd	Tembakau	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
4th	Padi	Jasa Informasi dan Komunikasi
5th	Angkutan Darat	Kehutanan dan Penebangan Kayu

D. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Selama tahun 2005 (data awal) sampai dengan 2024 (data termutakhir) tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan sebesar 10,04%. Namun masih berada di atas nasional, tingkat kemiskinan nasional telah mencapai satu digit, tahun 2024 sebesar 9,03%, sedangkan tingkat kemiskinan Sumatera Selatan sebesar 10,97%. Kabupaten yang memiliki kemiskinan tertinggi di atas angka provinsi pada tahun 2024 yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Lubuklinggau. Adapun kemiskinan terendah berada pada Kota Pagar Alam.



Gambar 2. 60 Perkembangan Kemiskinan Sumatera Selatan

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Persoalan kemiskinan tidak hanya melihat berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, akan tetapi penting pula melihat dimensi lainnya

yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Program yang dilakukan selain mampu mengurangi dan memperkecil jumlah penduduk miskin juga berupaya untuk mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Tabel 2. 46 Indikator Kemiskinan Sumatera Selatan 2010-2024

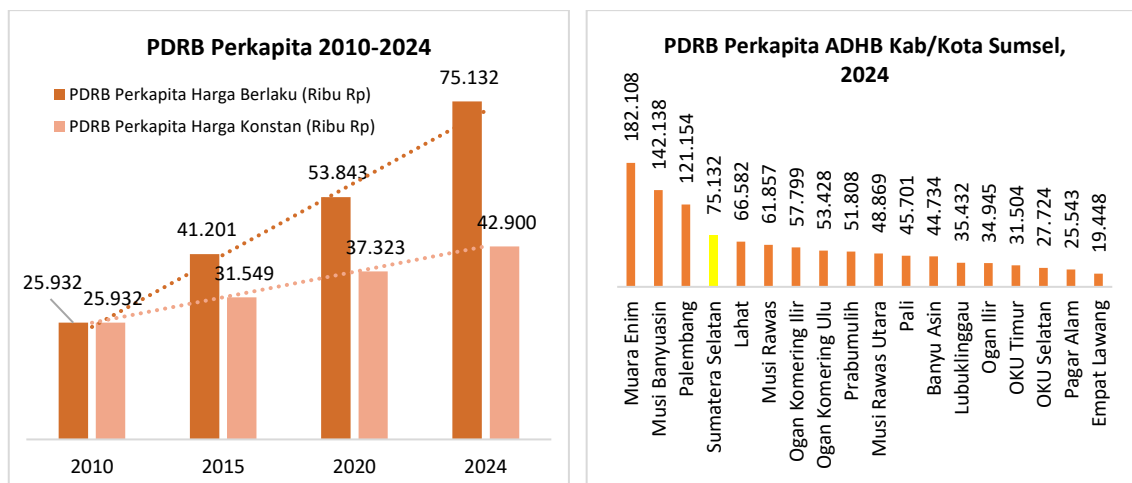
Indikator	Tahun			
	2010	2015	2020	2024
Garis Kemiskinan (Rupiah)	221.687	326.905	439.041	554.197
Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,63	2,46	2,08	1,89
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,71	0,64	0,48	0,46

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Garis kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010 sebesar Rp221.687 meningkat mencapai Rp554.197 pada tahun 2024. Sementara itu, indeks kedalaman kemiskinan (rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan) sudah menunjukkan penurunan, pada tahun 2010 sebesar 2,63 menjadi 1,89 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan tingkat kesejahteraan sudah mulai membaik. Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, ini bermakna semakin kecil nilai indeks keparahan kemiskinan, distribusi pendapatan diantara masyarakat miskin semakin merata. Data menunjukkan indeks keparahan kemiskinan semakin menurun, pada tahun 2010 sebesar 0,71 menjadi 0,46 pada tahun 2024.

E. PDRB Per Kapita

Sumatera Selatan atas dasar harga berlaku dan harga konstan pada tahun 2010-2024 (data termutakhir) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 PDRB per kapita harga berlaku sebesar Rp25.932 ribu meningkat menjadi Rp75.132 ribu tahun 2024. Sama halnya dengan harga konstan tahun 2010 sebesar Rp25.932 ribu meningkat menjadi Rp42.900 ribu. Nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan menunjukkan pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah. Tingginya angka PDRB per kapita menunjukkan bahwa kemampuan Provinsi Sumatera Selatan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi sangat besar. PDRB per kapita berdasarkan kabupaten/kota atas dasar harga berlaku tertinggi yakni berada di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Palembang. Ketiga wilayah ini merupakan penyumbang PDRB terbesar di Sumatera Selatan.



Gambar 2. 61 PDRB Per kapita Harga Berlaku dan Harga Konstan Sumatera Selatan

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

F. Tingkat Pengangguran Terbuka

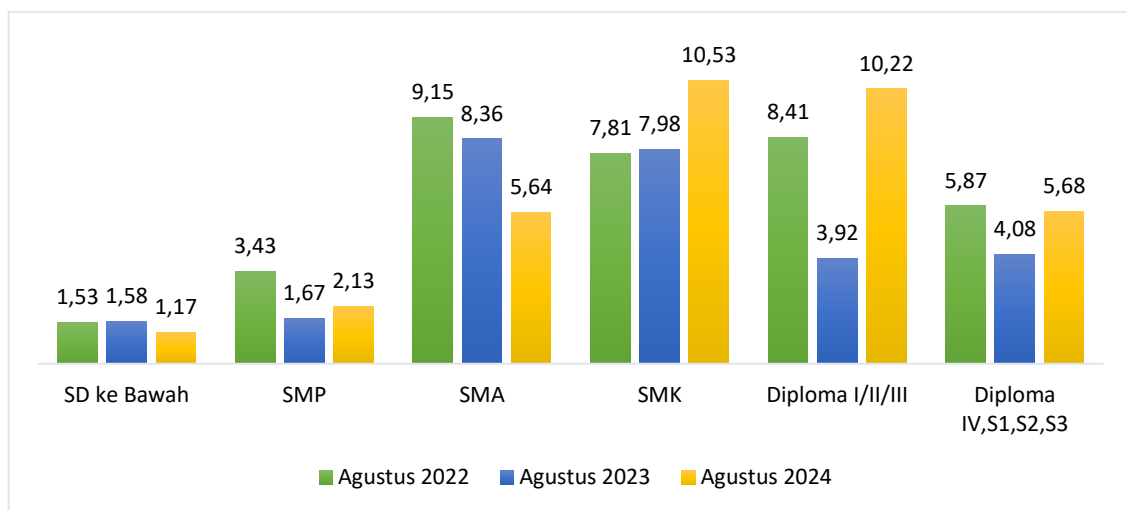
Angka pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Selatan dan nasional pada periode 2005-2025 menunjukkan tren menurun yang signifikan. Perkembangan pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Selatan berhasil diturunkan dari 12,82% tahun 2005 (data awal) menjadi 3,89% tahun 2025 (data termutakhir). Lonjakan tingkat pengangguran sempat terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Namun tingkat pengangguran dapat teratasi pada tahun berikutnya, ditunjukkan oleh tren yang mulai melandai dengan angka pengangguran terbuka sebesar 3,89% tahun 2025. Berdasarkan kabupaten/kota angka pengangguran terbuka 2024 tertinggi berada di Kota Palembang sebesar 6,98%, Kota Lubuklinggau (5,29%), Kota Prabumulih (4,94%), Kabupaten Musi Rawas Utara (4,91%), dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (4,05%). Sementara tingkat pengangguran terendah berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 1,80%.



Gambar 2. 62 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Selatan

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Dilihat dari jenis kelamin, tren tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, tingkat pengangguran perempuan pada Agustus 2024 sebesar 4,02% sedangkan laki-laki sebesar 3,75%. Demikian pula, bila dilihat secara spasial tingkat pengangguran perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan, tingkat pengangguran perkotaan sebesar 5,70% dan perdesaan sebesar 2,75%.



Gambar 2. 63 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Agustus 2022-Agustus 2024 (%)

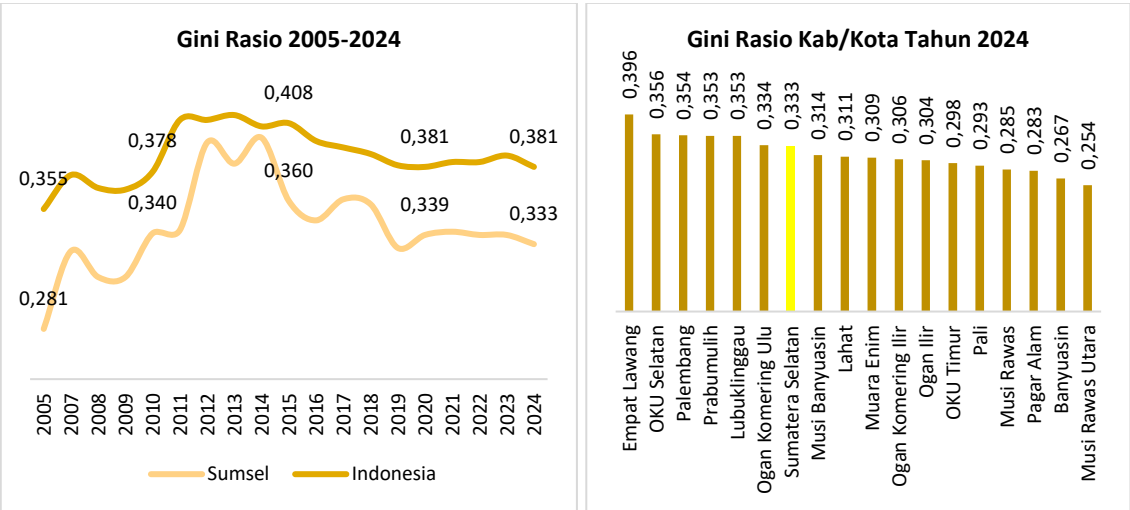
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Sementara itu, tingkat pengangguran menurut tingkat pendidikan tahun 2024 didominasi oleh jenjang pendidikan SMK sebesar 10,53%, Diploma I/II/III sebesar 10,22%, Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 5,68%, sedangkan tingkat pengangguran SD dan SMP masing-masing 1,17% dan 2,13%. Komposisi pengangguran didominasi oleh jenjang pendidikan menengah atas, kejuruan

dan perguruan tinggi perlu menjadi perhatian ke depan terutama muatan pembelajaran yang kurang *link and match* dengan dunia kerja. Beberapa sekolah kejuruan harus mempersiapkan calon siswa yang akan lulus dengan memperhatikan kebutuhan kerja yang cenderung pada penggunaan digitalisasi.

G. Gini Rasio

Ketimpangan pendapatan di Sumatera Selatan selama 2005-2024 terlihat memburuk walaupun masih terkategori ketimpangan rendah. Rata-rata gini rasio Sumatera Selatan selama 2005-2024 selalu lebih rendah dibandingkan gini rasio nasional. Gini rasio Sumatera Selatan tahun 2005 (data awal) sebesar 0,281 meningkat menjadi 0,333 pada tahun 2024 (data termutakhir). Komparasi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat empat kab/kota memiliki nilai gini rasio di atas provinsi yakni Kabupaten Empat Lawang 0,396; Kabupaten OKU Selatan 0,356; Kota Palembang 0,354; Kota Prabumulih 0,353; Kota Lubuklinggau 0,353; dan Kabupaten Ogan Komering Ulu 0,334. Perbedaan tingkat ketimpangan antarwilayah didasari oleh perbedaan perekonomian, seperti belum terjadi pemerataan pembangunan di setiap daerah sehingga hanya sebagian daerah yang memiliki perekonomian yang baik.



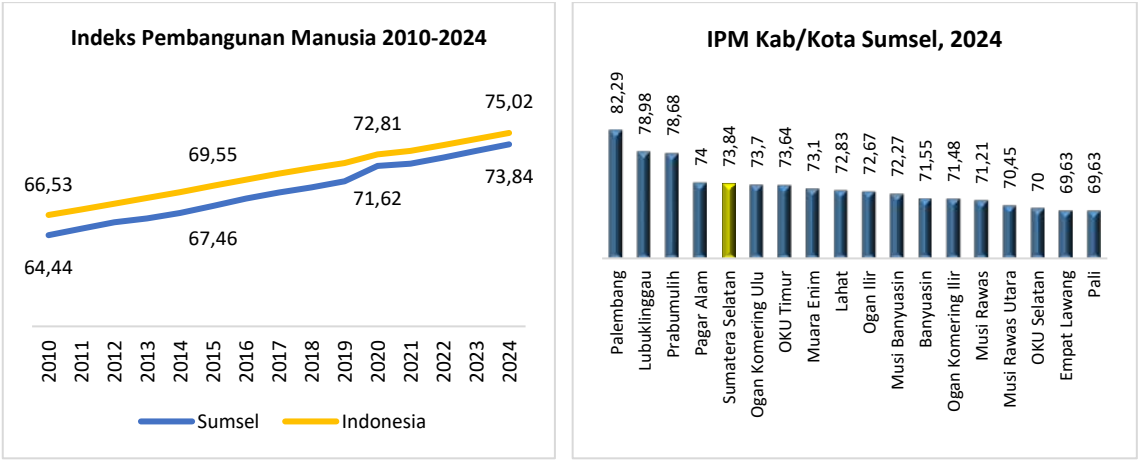
Gambar 2. 64 Gini Rasio Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

H. Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum IPM Sumatera Selatan tahun 2010-2024 berada di bawah nasional. Nilai IPM pada tahun 2010 (data awal) yaitu sebesar 64,44 meningkat

menjadi 73,84 tahun 2024 (data termutakhir), sementara nasional sebesar 66,53 juga mengalami peningkatan menjadi 75,02 pada tahun 2024. Nilai IPM dari tahun 2010-2024 di Sumatera Selatan menunjukkan tren yang meningkat meskipun berada di bawah angka nasional. Oleh karena itu diperlukan upaya keras untuk meningkatkan nilai IPM. Nilai IPM kabupaten/kota yang berada di atas IPM Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Kota Prabumulih, dan Kota Pagar Alam. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.



Gambar 2. 65 Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Selatan
 Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Besaran indikator kesehatan, pendidikan dan pengeluaran meningkat setiap tahunnya. Dimensi kesehatan yaitu angka harapan hidup tahun 2005 (data awal) sebesar 68,3 meningkat menjadi 74,26 pada tahun 2024 (data termutakhir). Sementara dimensi pendidikan yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah pun menunjukkan tren meningkat. Komponen pengeluaran per kapita menunjukkan angka yang relatif signifikan peningkatannya dari Rp. 610,26 per kapita/tahun pada tahun 2005 menjadi Rp. 12.015 per kapita/tahun pada tahun 2024.

Tabel 2. 47 Komponen IPM Sumatera Selatan 2005-2024

Indikator	Tahun				
	2005	2010	2015	2020*	2024*
Angka Harapan Hidup (AHH)	68,3	68,34	69,14	73,39	74,26
Harapan Lama Sekolah (HLS)	-	11,03	12,02	12,45	12,64
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,54	7,34	7,77	8,24	8,57

Indikator	Tahun				
	2005	2010	2015	2020*	2024*
Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)	610,26	8.536	9.474	10.652	12.015
IPM	70,23	64,44	67,46	71,62	73,84

-) tidak tersedia; *) angka 2020-2024 menggunakan metode baru

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

I. Nilai Tukar Petani/Nilai Tukar Nelayan

Perkembangan NTP dalam 20 tahun terakhir dari 133,08 pada 2005 (data awal) menurun menjadi 120,83 pada tahun 2024 (data termutakhir), angka ini di atas NTP nasional yaitu 119,62 Angka tersebut menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan petani cenderung menurun. Subsektor NTP pada tahun 2024 yang bernilai di bawah 100 adalah tanaman pangan, hortikultura dan peternak. Sementara itu, sektor perkebunan memiliki nilai tukar petani paling tinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar 130,35. Nilai tukar petani tidak hanya dipengaruhi oleh harga komoditas, tetapi juga oleh faktor-faktor seperti kondisi pasar, permintaan konsumen, musim tanam, faktor-faktor alam seperti cuaca, produktivitas, biaya produksi, akses ke pasar, dan kebijakan pemerintah.

Tabel 2. 48 Nilai Tukar Petani Menurut Sektor di Sumatera Selatan

Nilai Tukar Petani	Perkembangan NTP menurut Sektor				
	2005	2010	2015	2020	2024
Nilai Tukar Petani Umum	133,08	104,91	96,87	95,37	120,83
Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan	135,67	114,26	98,62	98,28	98,24
Nilai Tukar Petani Tanaman Holtikultura	-	115,76	109,04	91,59	91,42
Nilai Tukar Pekebun	128,08	87,11	91,24	94,25	130,35
Nilai Tukar Peternak	-	106,40	104,26	101,94	92,14
Nilai Tukar Perikanan	-	113,30	98,58	97,47	107,63

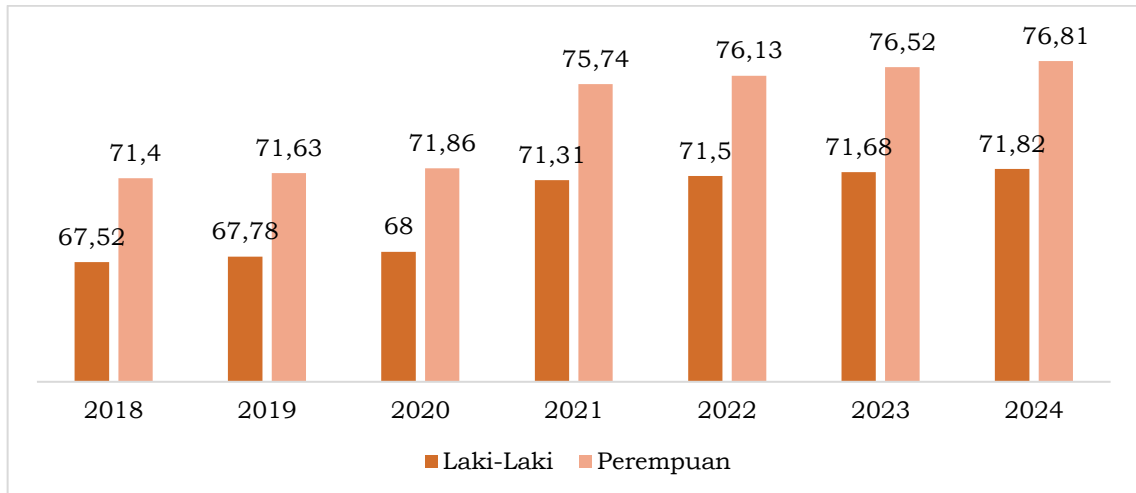
Sumber: BPS Provinsi Sumsel, 2025

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

A. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup yang merupakan salah satu komposit Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Sumatera Selatan selama periode 2018-2024 mengalami kenaikan baik itu perempuan maupun laki-laki, walaupun

peningkatannya mulai mengalami perlambatan pada tiga tahun terakhir. Untuk Umur Harapan Hidup antara perempuan dan laki-laki di Provinsi Sumatera Selatan masih memiliki GAP yang cukup besar dengan keunggulan bagi Umur Harapan Hidup perempuan.



Gambar 2. 66 Umur Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018-2024

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Pada tahun 2018, UHH laki-laki tercatat sebesar 67,52 tahun dan meningkat menjadi 71,82 tahun pada 2024. Sementara itu, UHH perempuan juga naik dari 71,4 tahun menjadi 76,81 tahun pada periode yang sama. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan kualitas hidup dan layanan kesehatan di Sumatera Selatan, termasuk akses terhadap pelayanan medis, gizi, dan lingkungan yang lebih sehat. UHH perempuan secara konsisten lebih tinggi dibanding laki-laki, selisihnya sekitar 5 tahun, yang merupakan tren umum secara global. Lonjakan cukup signifikan terjadi antara 2020 dan 2021, yang kemungkinan berkaitan dengan perbaikan sistem kesehatan atau pengaruh data pemulihan pasca pandemi COVID-19.

B. Indeks Keluarga Sehat

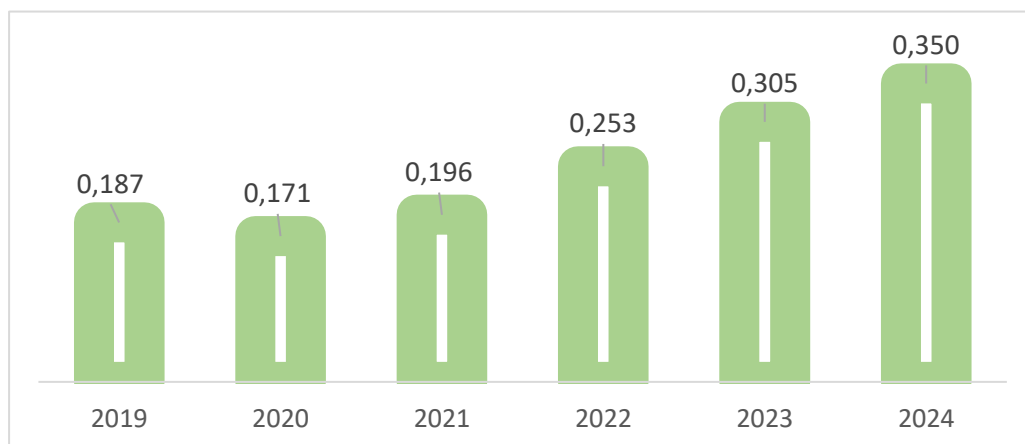
Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah indikator komposit yang mengukur derajat kesehatan keluarga di tingkat rumah tangga. IKS digunakan dalam program Pendekatan Keluarga (PK) yang merupakan bagian dari strategi penguatan pelayanan kesehatan primer (Puskesmas). Berdasarkan Permenkes Nomor 39 Tahun 2016, Indeks Keluarga Sehat dilakukan perhitungan berdasarkan 12 indikator yaitu :

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan
6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok
10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

Nilai IKS dari 12 indikator ini dikategorikan menjadi 3 yaitu :

- IKS Sehat ($> 0,80$)
- IKS Pra-Sehat ($0,50-0,80$)
- IKS Tidak Sehat ($< 0,50$)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) Provinsi Sumatera Selatan menurun dari 0,187 (18,7%) pada tahun 2019 menjadi 0,171 (17,1%) pada tahun 2020, namun kembali meningkat secara konsisten pada 2021–2024, yaitu mencapai 0,196 (19,6%) pada tahun 2021, sebesar 0,253 (25,3%) pada tahun 2022, sebesar 0,305 (30,5%) pada tahun 2023 dan sebesar 0,350 (35%) pada tahun 2024. Meskipun peningkatan ini menunjukkan arah yang positif, posisi IKS Provinsi Sumatera Selatan masih berada dalam kategori "Tidak Sehat" ($< 0,50$).



Gambar 2. 67 Indeks Keluarga Sehat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2025

**Tabel 2. 49 Indeks Keluarga Sehat Provinsi Sumatera Selatan
berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024**

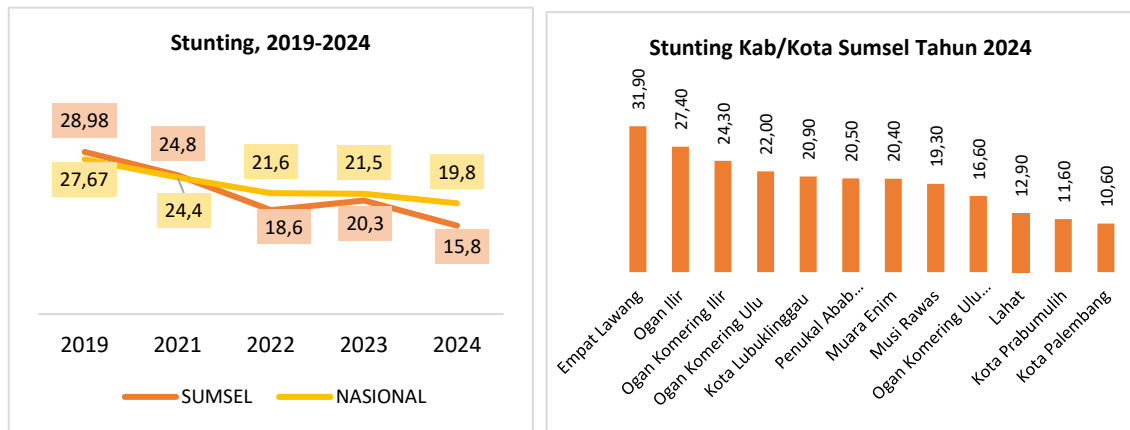
No	Kabupaten/Kota	IKS 2019	IKS 2020	IKS 2021	IKS 2022	IKS 2023	IKS 2024
1	OKU	0,362	0,297	0,285	0,276	0,277	0,277
2	OKI	0,039	0,074	0,090	0,101	0,104	0,119
3	Muara Enim	0,121	0,212	0,261	0,304	0,341	0,377
4	Lahat	0,097	0,136	0,145	0,148	0,162	0,170
5	Musi Rawas	0,08	0,107	0,136	0,177	0,196	0,203
6	Musi Banyuasin	0,094	0,193	0,266	0,299	0,335	0,339
7	Banyuasin	0,065	0,191	0,097	0,124	0,173	0,372
8	OKUS	0,045	0,081	0,112	0,121	0,158	0,162
9	OKUT	0,333	0,118	0,117	0,127	0,125	0,127
10	Ogan Ilir	0,087	0,113	0,128	0,135	0,149	0,152
11	Empat Lawang	0,295	0,087	0,087	0,090	0,092	0,225
12	PALI	0,172	0,182	0,129	0,194	0,229	0,230
13	Muaratara	0,082	0,084	0,092	0,115	0,216	0,216
14	Palembang	0,302	0,285	0,322	0,504	0,694	0,735
15	Prabumulih	0,194	0,175	0,237	0,124	0,551	0,551
16	Pagar Alam	0,186	0,129	0,124	0,271	0,128	0,185
17	Lubuk Linggau	0,196	0,125	0,231	0,444	0,293	0,298
	Provinsi	0,187	0,171	0,187	0,253	0,305	0,342

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Berdasarkan Tabel 2.49, pada tahun 2024 nilai IKS semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan masih dalam kategori “tidak sehat” ($< 0,50$) kecuali Kota Palembang dan Kota Prabumulih yang sudah termasuk dalam kategori IKS “pra sehat” ($0,50 - 0,80$). Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya nilai IKS ini antara lain: 1) masih tingginya praktik merokok dalam rumah tangga; 2) terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi layak; 3) rendahnya kepatuhan pengobatan penyakit kronis (hipertensi, TBC); 4) kesenjangan pemanfaatan layanan kesehatan primer, khususnya di wilayah perdesaan.

C. Prevalensi Stunting

Prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 (data awal) sebesar 28,98% menurun menjadi 15,8% di tahun 2024 (data terakhir). Persentase *stunting* di Sumatera Selatan lebih baik dibandingkan *stunting* nasional yaitu sebesar 19,8% pada tahun 2024. Daerah dengan angka *stunting* tertinggi yaitu Kabupaten Empat Lawang sebesar 31,9% dan terendah di Kota Palembang yaitu sebesar 10,6%. Penurunan *stunting* terkait erat dengan gizi buruk, dan kecukupan gizi bagi ibu hamil, oleh karena itu penting memfokuskan pada fasilitas kesehatan dan pendidikan masyarakat secara merata dan berkeadilan.



*Terdapat Kabupaten/Kota masih dalam proses analisis lebih lanjut dan belum dapat ditampilkan hasil status gizinya karena perubahan prevalensi sangat ekstrem >10% dari tahun sebelumnya

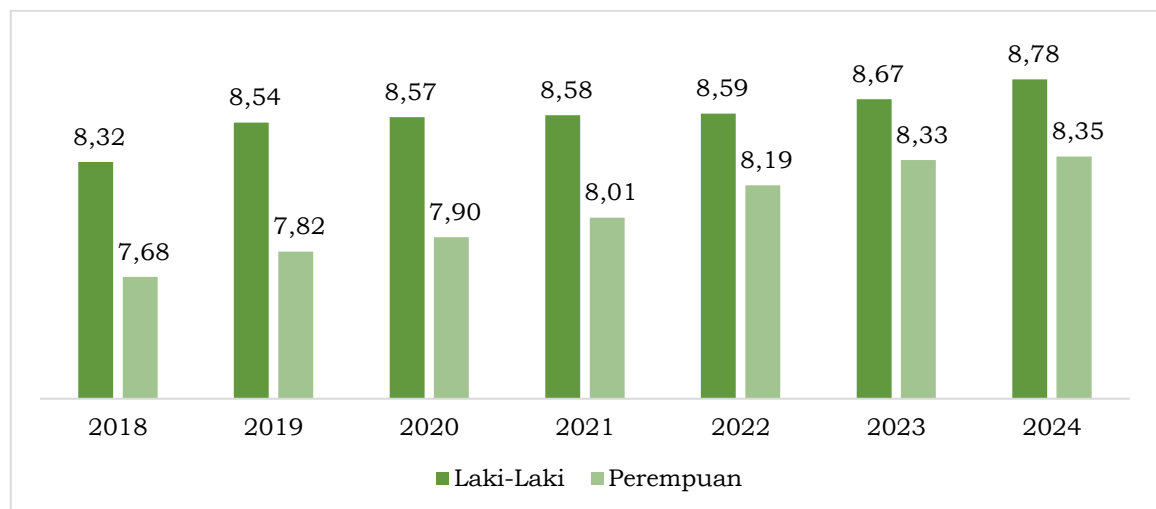
Gambar 2. 68 Stunting di Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

A. Rata-Rata Lama Sekolah

Selama periode 2018–2024, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan, dengan RLS laki-laki naik dari 8,32 tahun menjadi 8,78 tahun dan RLS perempuan dari 7,68 tahun menjadi 8,35 tahun. Meskipun secara umum angka RLS masih berada di bawah 9 tahun atau setara dengan jenjang SMP, tren peningkatan tersebut mencerminkan perbaikan akses dan partisipasi pendidikan, sekaligus mengindikasikan semakin mengecilnya kesenjangan gender dalam pendidikan.

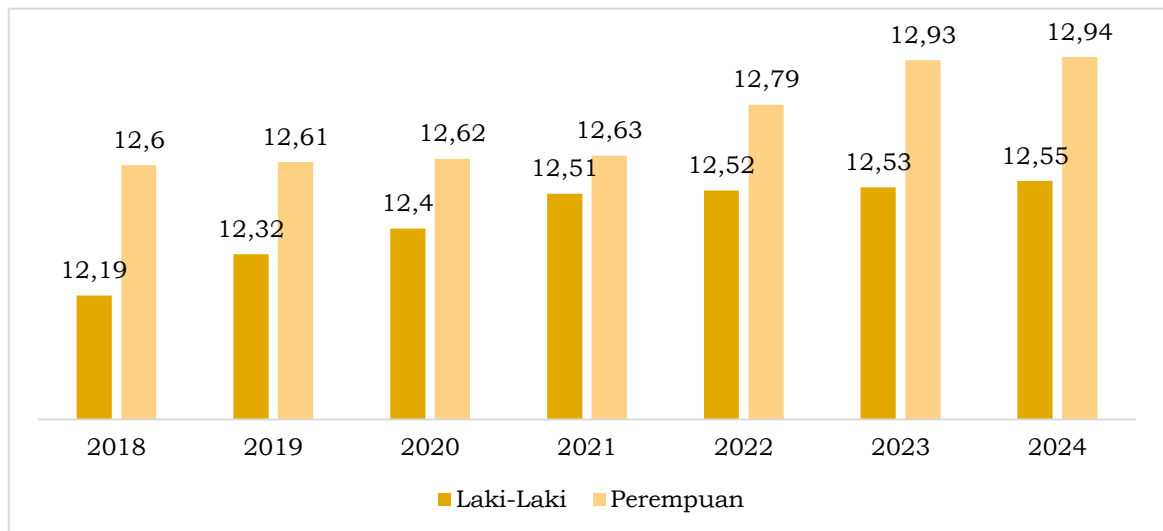


Gambar 2. 69 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Berdasarkan Jenis Kelamin, 2018-2024

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

B. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2018-2024 memiliki GAP yang cukup besar antara HLS perempuan dan laki-laki, dimana HLS perempuan lebih tinggi dibandingkan HLS laki-laki, bahkan selama tiga tahun terakhir, HLS perempuan mengalami peningkatan yang lebih cepat dibandingkan peningkatan HLS laki-laki.



Gambar 2. 70 Harapan Lama Sekolah (HLS) Berdasarkan Jenis Kelamin, 2018-2024

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

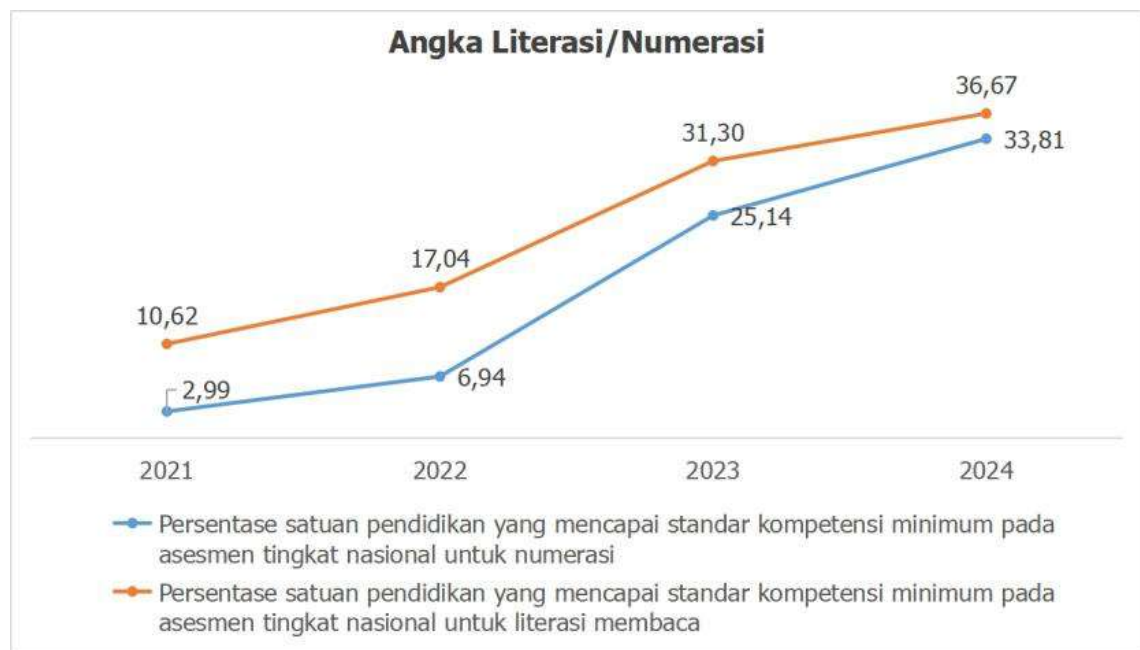
Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan signifikan pada 2018–2024, dari 12,19 menjadi 12,55 tahun pada laki-laki dan dari 12,60 menjadi 12,94 tahun pada perempuan. Ke depan, HLS diproyeksikan terus meningkat hingga setara dengan pendidikan tingkat SMA. HLS perempuan yang konsisten lebih tinggi dibanding laki-laki mencerminkan perbaikan akses dan minat pendidikan di kalangan perempuan.

C. Angka Literasi/Numerasi

Angka literasi merupakan indikator penting untuk menilai kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan teks sebagai dasar pengembangan pengetahuan dan partisipasi sosial. Capaian literasi mencerminkan kualitas pendidikan dasar, sedangkan angka numerasi mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami, menginterpretasi, dan menerapkan konsep matematika dasar dalam

kehidupan sehari-hari. Peningkatan signifikan angka numerasi pada 2022–2023 menunjukkan keberhasilan intervensi pendidikan dasar dalam memperkuat kemampuan berhitung, sementara peningkatan literasi membaca mencerminkan efektivitas strategi penguatan literasi melalui perbaikan pembelajaran, pelatihan guru, dan penyediaan bahan bacaan yang sesuai.

Berdasarkan data grafik, capaian dua indikator utama, yaitu persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional untuk numerasi dan literasi membaca di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021 hingga 2024.



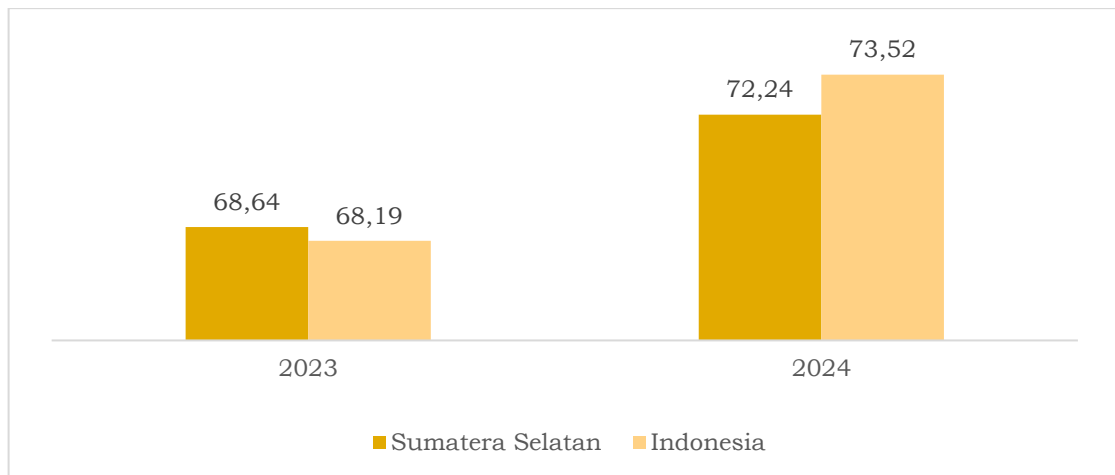
Gambar 2. 71 Angka Literasi/Numerasi Provinsi Sumatera Selatan
Sumber: Rapor Pendidikan-Kemendikdasmen, 2025

D. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menunjukkan peningkatan signifikan di Provinsi Sumatera Selatan dari 68,64 pada tahun 2023 menjadi 72,24 pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam berbagai aspek literasi masyarakat, seperti akses terhadap bahan bacaan, ketersediaan fasilitas perpustakaan, serta aktivitas literasi di tingkat komunitas.

Secara nasional, IPLM meningkat dari 68,19 menjadi 73,52, sedikit lebih tinggi dibanding Sumatera Selatan. Meski pada 2024 capaian Sumatera Selatan masih di bawah rata-rata nasional, selisihnya semakin kecil, menunjukkan adanya upaya intensif dalam membangun budaya literasi. Peningkatan ini

mencerminkan keberhasilan program literasi pemerintah dan komunitas lokal, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi. Untuk mengejar ketertinggalan, Sumatera Selatan terus memperluas akses literasi digital, memperkuat peran perpustakaan daerah, dan meningkatkan minat baca di berbagai kelompok usia.



Gambar 2. 72 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Sumatera Selatan
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

E. Indeks Literasi Digital

Menurut UNESCO (2018), literasi digital yang baik berperan dalam pemberantasan kemiskinan melalui kemudahan akses masyarakat terhadap layanan sosial digital pemerintah, sekaligus memungkinkan pemanfaatan informasi dan peluang dari media digital. Selain itu, keterbatasan akses dan tantangan dalam memperoleh pendidikan berkualitas dapat diatasi melalui kemampuan masyarakat dalam mengakses dan mengelola informasi digital (UN, 2022). Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia Tahun 2022 mengacu pada kerangka kerja Road Map Literasi Digital 2020–2024 (Kominfo, 2020) yang menjadi dasar perancangan program dan kurikulum Gerakan Nasional Literasi Digital Indonesia 2020–2024.

Pada tahun 2020 perhitungan Nilai Indeks Literasi Digital menggunakan empat sub indeks yaitu: sub indeks informasi dan literasi digital, sub indeks komunikasi dan kolaborasi, sub indeks keamanan dan sub indeks kemampuan teknologi. Nilai Indeks Literasi Digital Sumatera Selatan pada tahun 2020 sebesar 3,53 termasuk dalam kategori sedang, lebih baik dari capaian Nasional yang sebesar 3,47.

Tabel 2. 50 Nilai Indeks Literasi Digital Tahun 2020

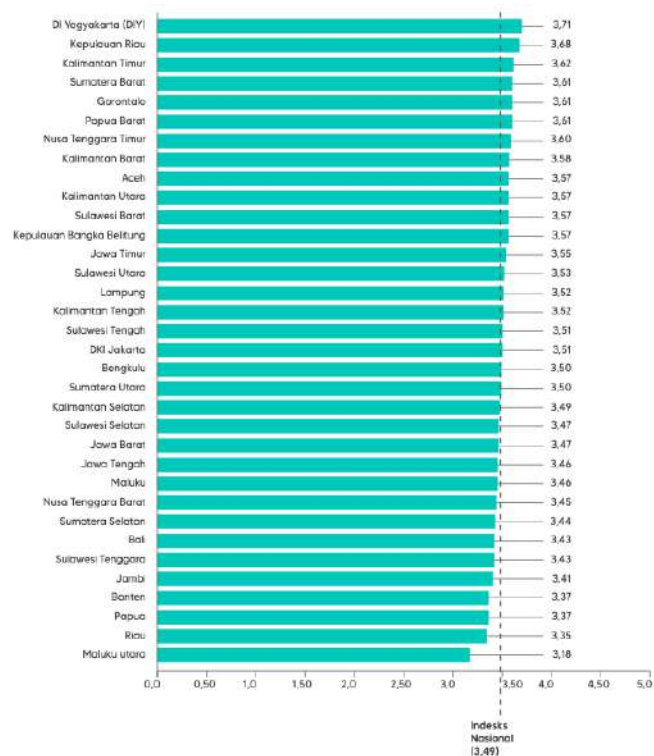
Provinsi	Informasi dan Literasi Digital	Komunikasi dan Kolaborasi	Keamanan	Kemampuan Teknologi	Indeks Literasi Digital
Sumatera Selatan	3,25	3,46	3,67	3,74	3,53

Sumber: Kementerian Kominfo, 2021

Sejak Tahun 2021 ada empat pilar yang digunakan untuk mengukur nilai Indeks Literasi Digital, yaitu *Digital Skill*, *Digital Ethics*, *Digital Safety*, dan *Digital Culture*:

1. *Digital Skill* atau kecakapan digital adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras-piranti lunak TIK serta sistem operasi digital.
2. *Digital Ethics* atau etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (*netiquette*) dalam kehidupan sehari-hari.
3. *Digital Safety* atau keamanan digital adalah kemampuan *user* (pengguna) dalam mengenali, memolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.
4. *Digital Culture* atau budaya digital adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK.

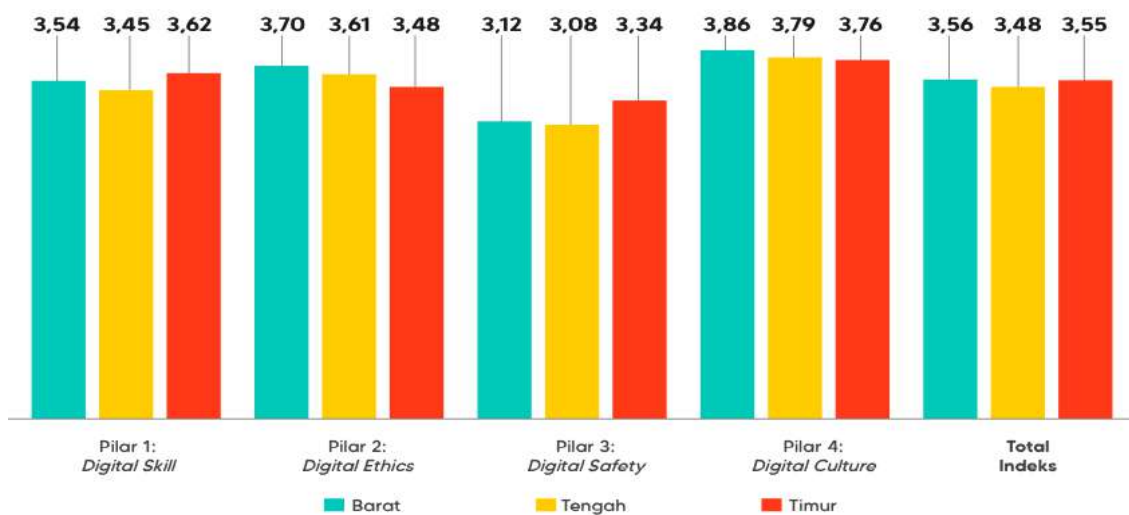
Berdasarkan pendekatan empat pilar di atas dari hasil survey yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo, Nilai Indeks Literasi Digital Sumatera Selatan pada tahun 2021 sebesar 3,44 masih berada di bawah capaian Nasional yang sebesar 3,49.



Gambar 2. 73 Capaian Indeks Literasi Digital Tahun 2021

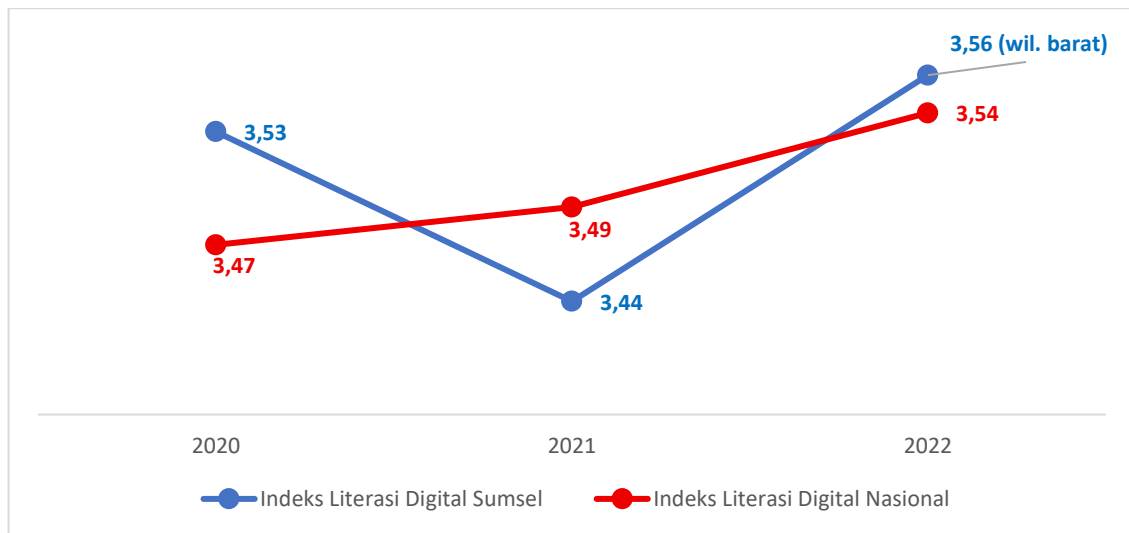
Sumber: Kementerian Kominfo, 2022

Pada tahun 2022 Kementerian Kominfo mengeluarkan data Nilai Indeks Literasi Digital berdasarkan tiga wilayah (barat, tengah dan timur), Sumatera Selatan berada di Wilayah Barat dengan nilai indeks Literasi Digital sebesar 3,56 lebih besar dari capaian Nasional yang sebesar 3,54.



Gambar 2. 74 Nilai Indeks Literasi Digital Tiga Wilayah di Indonesia Tahun 2022

Sumber: Kementerian Kominfo, 2023



Gambar 2. 75 Nilai Indeks Literasi Digital Tahun 2020-2022

Sumber: Kementerian Kominfo, 2023

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Indikator kepesertaan ketenagakerjaan merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah, karena mengukur sejauh mana penduduk usia kerja, khususnya yang bekerja, telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan seperti BPJS Ketenagakerjaan. Program ini terus diperluas untuk melindungi pekerja dari berbagai risiko saat bekerja maupun dalam perjalanan, sekaligus menjadi upaya pemerintah menjaga kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Sampai dengan Maret 2025 total peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 25 Mei 2025 sebesar 29,04 persen atau 810.157 peserta (2.789.917 potensi BPS 2025) sedangkan target yang ingin dicapai tahun 2025 sebesar 49,46 persen (goals 1.379.893 peserta TA 2025) sehingga terjadi GAP 569.736 peserta, sedangkan untuk target tahun 2026 sebesar 56,32 persen atau goals 1.947.979 peserta TA. 2025 (3.458.983 Potensi BPS 2025).

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengapresiasi yang telah berkomitmen untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya. Hal ini karena sinergi dan kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota dan dukungan regulasi misalnya Peraturan Gubernur, Surat Edaran dan NKS (istilah NKS merupakan singkatan dari Nota Kesepakatan

Sinergi) serta mendorong skema pembiayaan melalui forum *Corporate Social Responsibility* (CSR), Alokasi Dana Desa, dan lain-lain.

Tabel 2. 51 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

No	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	29,27	37,02	40,1	39,71

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Provinsi Sumatera Selatan

Penyediaan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang kuat akan mendukung upaya pembangunan manusia, menjaga stabilitas ekonomi, serta menjamin keberlanjutan sistem ketenagakerjaan. Implementasi jaminan sosial juga mendorong pemberi kerja atau perusahaan untuk berkontribusi secara bertanggung jawab dan mematuhi regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

Di Sumatera Selatan, partisipasi aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan (JKK dan JKM) tercatat sebanyak 529.630 orang (BPS, SAKERNAS, dan BPJS Ketenagakerjaan, 2023). Namun, kepesertaan pada program lain masih rendah, misalnya di sektor batubara tingkat partisipasi dalam JKP hanya 27,2% untuk pekerja PKWTT dan 4,15% untuk PKWT. Rendahnya kepesertaan ini membuat tenaga kerja rentan terhadap tekanan finansial akibat pemutusan hubungan kerja, terutama pada masa transisi menuju ekonomi hijau.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

A. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks kerukunan antar umat beragama di Sumatera Selatan selama 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan, pada tahun 2017 sebesar 69,20 menurun menjadi 67,05 pada tahun 2022. Secara umum beberapa indikator yang berpengaruh terhadap indeks kerukunan antarumat beragama menurun yaitu: a) keberatan penganut agama lain membangun rumah ibadat tempat tinggal Anda setelah mendapat izin dari pemerintah setempat, b) keberatan penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa/kelurahan tempat tinggal Anda, c) Keberatan anak-anak Anda bermain/berteman dengan anak-anak penganut agama lain, d) Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati/Kepala Desa), e) bersedia berkunjung ke rumah penganut agama lain (atau rumah

Anda dikunjungi penganut agama lain), f) Bersedia terlibat usaha yang dikelola bersama teman/sahabat berbeda agama, g) bersedia berpartisipasi dalam komunitas/organisasi profesi yang melibatkan penganut agama lain.

B. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) saat ini dirilis oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Capaian IPK dirilis pada tahun $n+1$. Perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) berdasarkan komponen dimensi kebudayaan yang terdiri dari Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Literasi Budaya, dan Gender. Data capaian 2023 menunjukkan bahwa capaian pembangunan kebudayaan di Indonesia masih bervariasi antar provinsi, dengan nilai rata-rata nasional berada di angka 57,13. Indeks Pembangunan Kebudayaan Sumatera Selatan tahun 2018 sebesar 50,86 mengalami fluktuasi dan meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 57,51. Peningkatan ini didorong oleh adanya kemajuan dalam berbagai aspek kebudayaan suatu wilayah, namun masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Capaian terakhir IPK Sumatera Selatan tahun 2023 sebesar 57,51 berada sedikit di atas Nasional sebesar 57,13.



Gambar 2. 76 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional, 2024

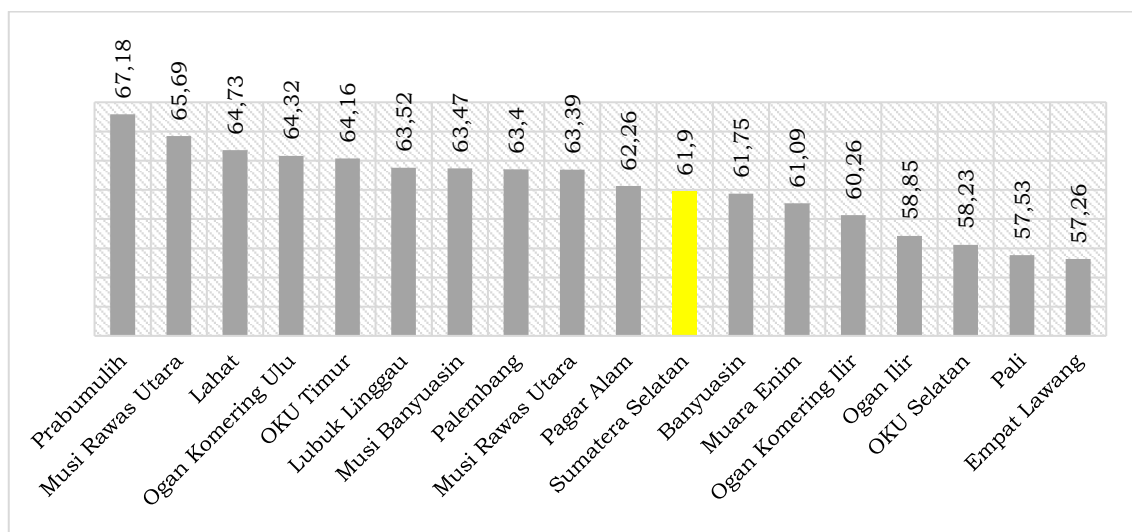
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, 2025

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan gender, dan Masyarakat Inklusif

A. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) 2023 di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan variasi yang signifikan antar kabupaten/kota. Prabumulih mencatatkan angka IPA tertinggi dengan skor 67,18, menandakan adanya upaya yang lebih baik dalam memberikan perlindungan terhadap anak di wilayah tersebut. Diikuti oleh Musi Rawas Utara (65,69) dan Lahat (64,73), yang juga menunjukkan skor yang relatif tinggi, mencerminkan perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak yang cukup baik.

Sementara itu, Kabupaten Empat Lawang mencatatkan IPA terendah di provinsi ini dengan angka 57,26, diikuti oleh Pali (57,53) dan OKU Selatan (58,23), yang menunjukkan perlindungan anak yang masih perlu perhatian lebih. Secara keseluruhan, rata-rata Indeks Perlindungan Anak di Sumatera Selatan berada di angka 61,9, yang masih menunjukkan adanya tantangan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak di beberapa daerah.



Gambar 2. 77 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten/Kota Sumatera Selatan Tahun 2023

Sumber: Kemen PPPA, 2025

B. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks kualitas keluarga (IKK) meningkat sebesar 1,12 poin dari 75,61 persen menjadi 76,73 persen pada tahun 2023 menggunakan metode baru. Pada tahun 2023, nilai IKK Provinsi Sumatera Selatan lebih rendah daripada nilai IKK nasional. Namun demikian, menurut Peraturan Menteri PPPA Nomor

7 Tahun 2022, IKK Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2023 menunjukkan kualitas keluarga dalam kategori **`Responsif Gender dan Hak Anak`**.

IKK terdiri dari 5 dimensi penyusun, pada tahun 2023, nilai empat dimensi yang membentuk IKK meningkat dibandingkan tahun 2022. Namun, nilai satu dimensi yang membentuk IKK lainnya mengalami penurunan yaitu Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF). Peningkatan tertinggi terjadi pada dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE) nilainya naik sebesar 2,71 poin dari 67,95 persen (2022) menjadi 70,66 persen (2023).

Tabel 2. 52 Indeks Kualitas Keluarga Sumatera Selatan Tahun 2022-2023

Komponen	Tahun		Perubahan
	2022	2023	
Indeks Kualitas Keluarga	75,61	76,73	1,12
Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS)	89,58	89,98	0,4
Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF)	78,59	78,23	-0,36
Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE)	67,95	70,66	2,71
Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP)	71,26	73,71	2,45
Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB)	61,27	62,44	1,17

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025 (menggunakan metode baru)

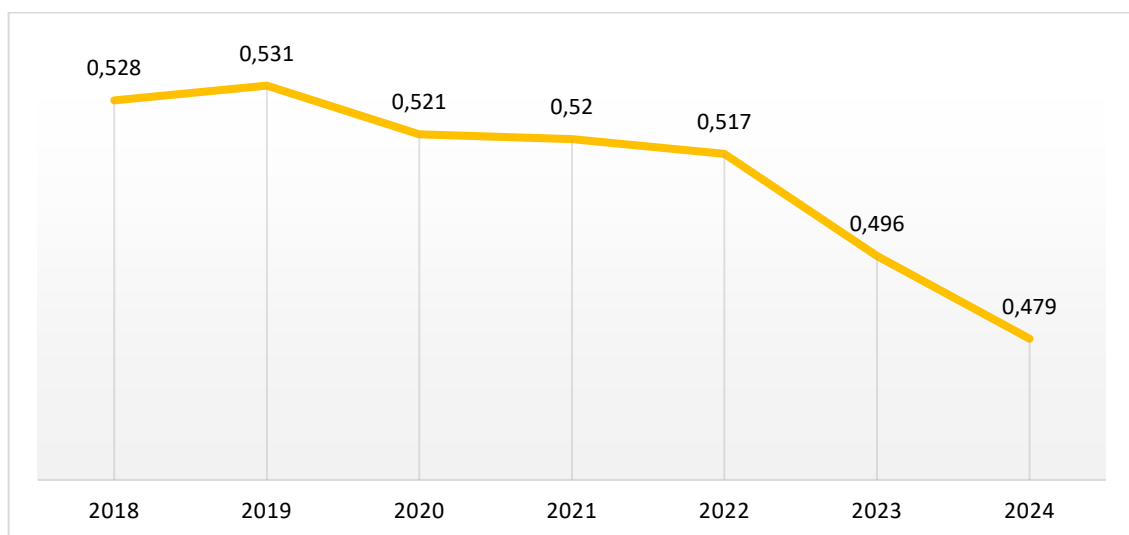
C. Indeks Ketimpangan Gender

Kesetaraan Gender (*gender equity*) dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi dalam segala bidang. Ketimpangan gender di dunia diukur dengan *Gender Inequality Indeks* (GII), sementara di Indonesia diukur dengan menggunakan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

IKG menggambarkan kerugian/kegagalan (*loss*) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan pencapaian pembangunan perempuan dan laki-laki yang diukur dari 1) aspek Kesehatan Reproduksi yang terdiri dari 2 indikator yaitu a) Proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF); b) Proporsi perempuan 15-49 tahun saat melahirkan hidup pertama berusia < 20 tahun (MHPK20); 2) Aspek Pemberdayaan yang terdiri dari 2 indikator yaitu: a) Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA; b) Persentase anggota legislatif; 3)

Akses dalam Pasar Tenaga Kerja dengan 1 indikator yaitu: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Semakin rendah nilai IKG maka semakin baik kesetaraan antara laki-laki dan perempuan begitu juga sebaliknya. Indeks Ketimpangan Gender dibagi menjadi 4 kategori yaitu: 1) Rendah (IKG kurang dari 0,399; 2) Menengah Bawah (IKG pada rentang 0,400-0,449); 3) Menengah Atas (IKG pada rentang 0,450-0,499); 4) Tinggi (IKG di atas atau sama dengan 0,500).

Pengukuran IKG dilakukan untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi capaian pembangunan menurut gender dan memformulasikan kebijakan yang lebih tepat. Indeks Ketimpangan Gender akan optimal apabila kesehatan reproduksi perempuan baik, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja antara perempuan dan laki-laki setara. Perkembangan capaian Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.78.



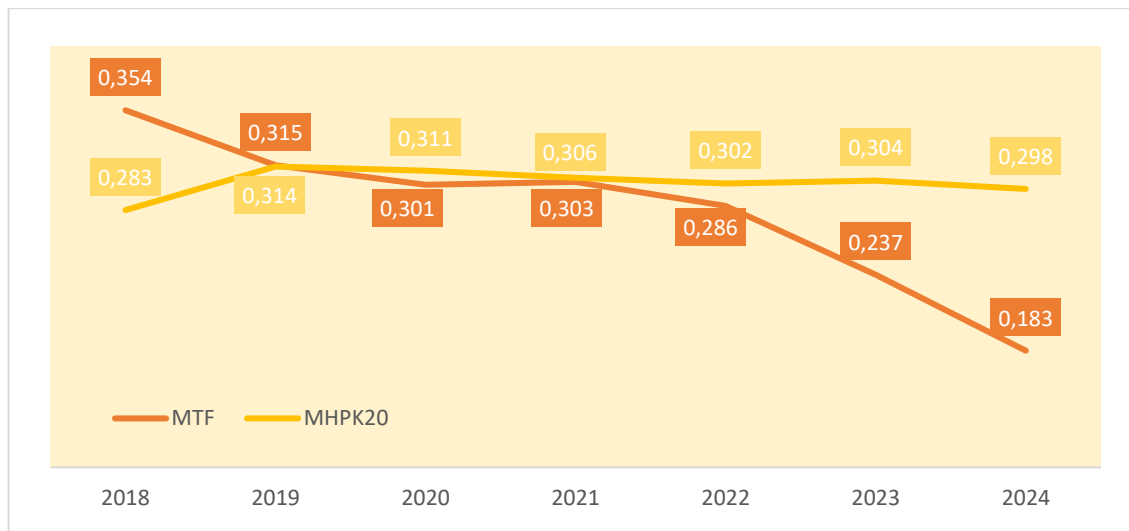
Gambar 2. 78 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2024

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Selama periode 2018-2024, angka IKG Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan sebesar 0,049 poin dengan posisi IKG Provinsi Sumatera Selatan masih berada pada kategori “Tinggi” menjadi kategori “Menengah Atas”. Penurunan angka IKG Sumatera Selatan tersebut disebabkan oleh membaiknya beberapa dimensi IKG.

Dimensi kesehatan reproduksi dengan indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas Kesehatan (MTF) selama periode 2018-2024 menunjukkan kinerja yang membaik atau cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya terutama tahun 2024 (data termutakhir)

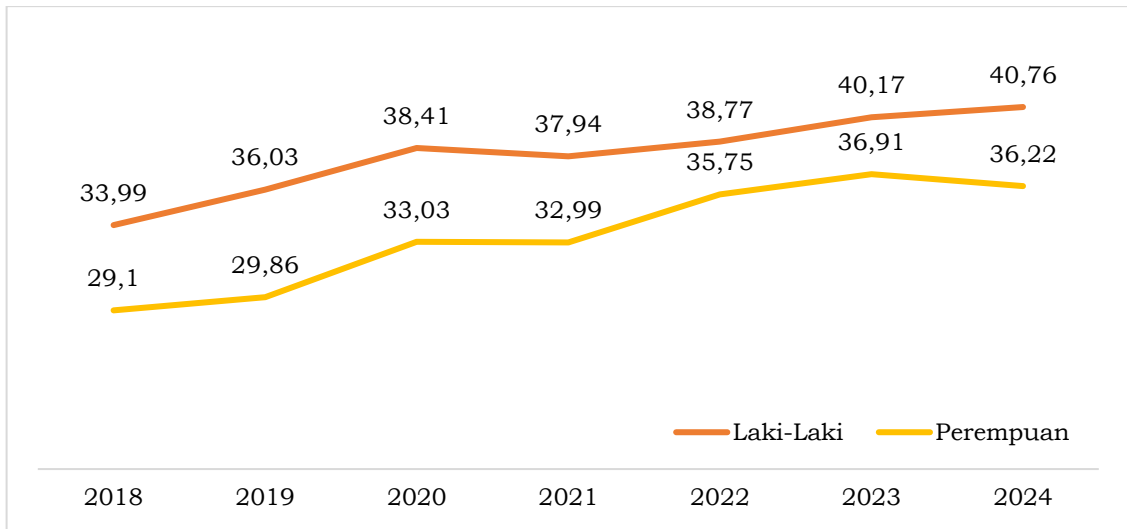
mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 0,183. Sementara untuk indikator proporsi perempuan 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia <20 tahun (MHPK20) selama periode 2018-2024 berfluktuatif namun cenderung mengalami penurunan yang cukup hingga tahun 2024. Hal ini tentu menjadi perhatian ke depan bagi Sumatera Selatan untuk indikator tersebut seperti yang disajikan pada Gambar 2.79.



Gambar 2. 79 Perkembangan Dimensi Kesehatan Reproduksi, 2018-2024

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

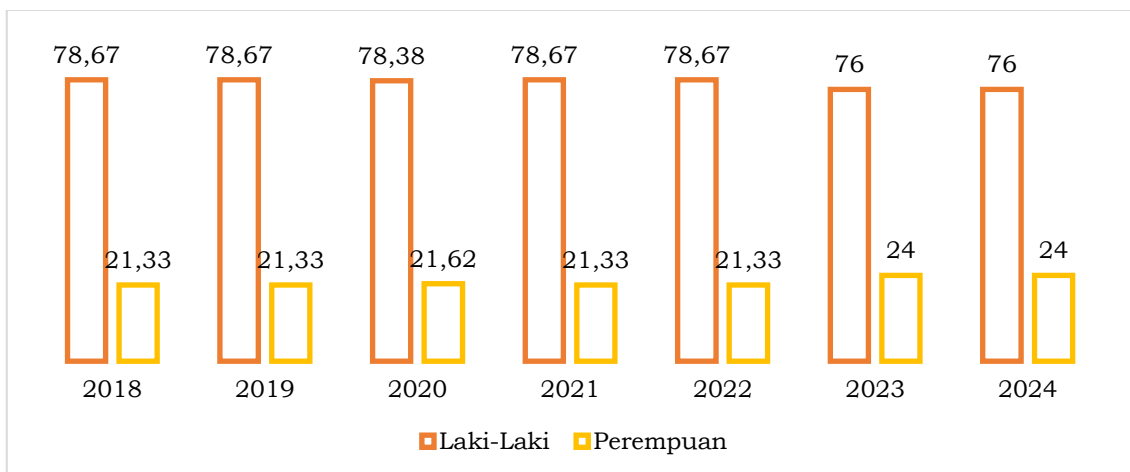
Sementara itu, dimensi pemberdayaan dengan indikator persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA baik laki-laki maupun perempuan selama periode 2018-2023 cenderung mengalami peningkatan, walaupun jika dibandingkan antara capaian laki-laki dan perempuan masih lebih tinggi capaian penduduk laki-laki setiap tahunnya. Hal ini tentunya menjadi tantangan ke depan bagaimana agar penduduk perempuan dengan pendidikan minimal SMA mengalami kesetaraan dengan penduduk laki-laki.



Gambar 2. 80 Perkembangan Indikator Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan dengan Pendidikan Minimal SMA, Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2024

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Capaian indikator dimensi pemberdayaan yang kedua yaitu persentase anggota legislatif selama periode 2018-2024 seperti yang disajikan pada Gambar 2. 81, menunjukkan tingginya GAP antara legislatif perempuan dan laki-laki, walaupun pada tahun 2024 (data termutakhir) legislatif perempuan mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Ke depan perlu upaya untuk mendorong peningkatan keterwakilan legislatif perempuan agar setara dengan legislatif laki-laki.

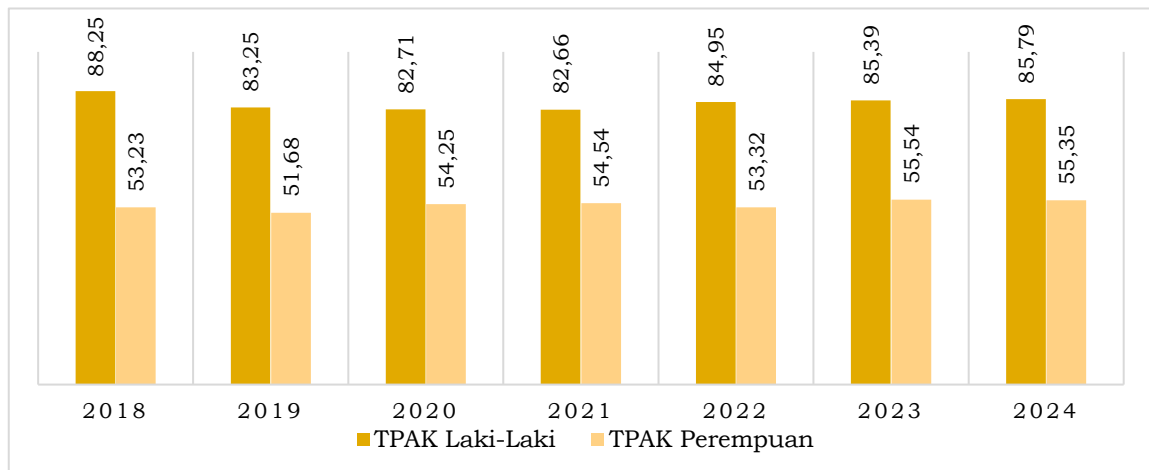


Gambar 2. 81 Perkembangan Indikator Keterwakilan di Legislatif, 2018-2024

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Selama periode 2018-2024 dimensi pasar tenaga kerja yang diukur melalui indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terdapat

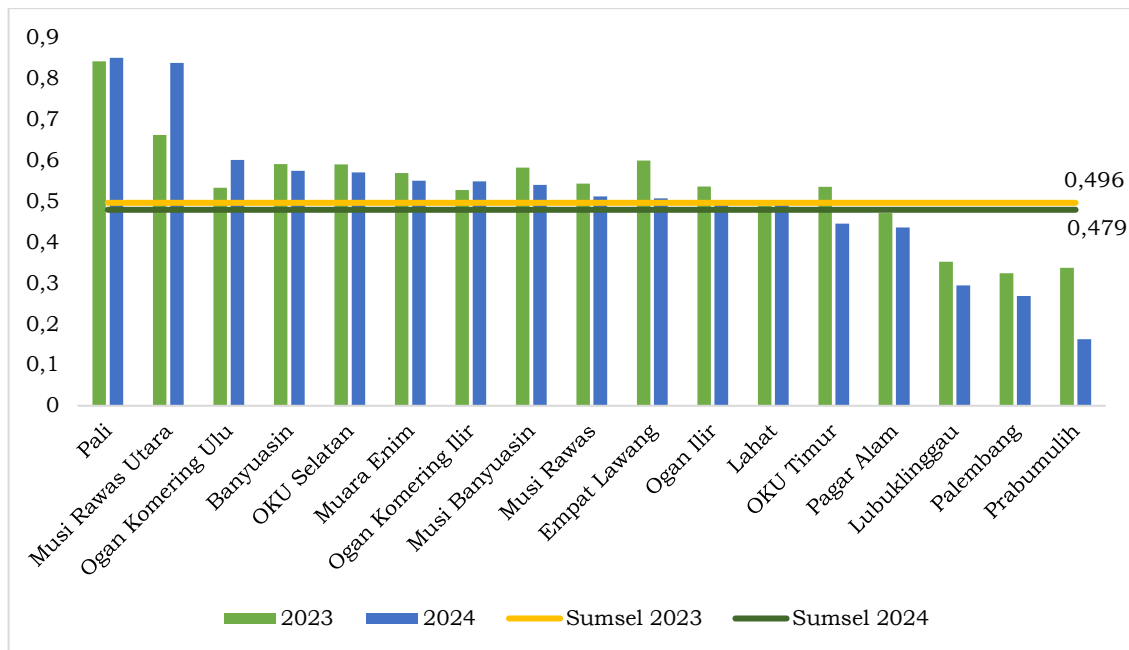
kesenjangan yang cukup besar antara TPAK Perempuan dan TPAK Laki-Laki walaupun di akhir periode yaitu tahun 2023 antara TPAK laki-laki maupun perempuan sama-sama mengalami peningkatan dan kenaikan perempuan pada tahun 2024 lebih besar dibandingkan dengan kenaikan TPAK laki-laki dapat dilihat pada Gambar 2.82.



Gambar 2. 82 Perkembangan Dimensi Pasar Tenaga Kerja, 2018-2024

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Capaian IKG Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan periode 2018-2024 mengindikasikan perkembangan ketimpangan gender yang semakin baik. Pada tahun 2024, ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Kota Prabumulih, diikuti Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, dan Kota Pagar Alam. Dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan, terdapat 5 kabupaten/ kota yang capaian IKG nya lebih baik dibandingkan capaian provinsi yang mencapai 0,479 pada tahun 2024. Sementara 12 kabupaten/kota lainnya masih belum mampu mencapai angka provinsinya. Hal ini menunjukkan masih adanya disparitas ketimpangan gender antar kabupaten/kota di Sumatera Selatan seperti yang disajikan pada Gambar 2.83.



Gambar 2. 83 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota, 2023-2024

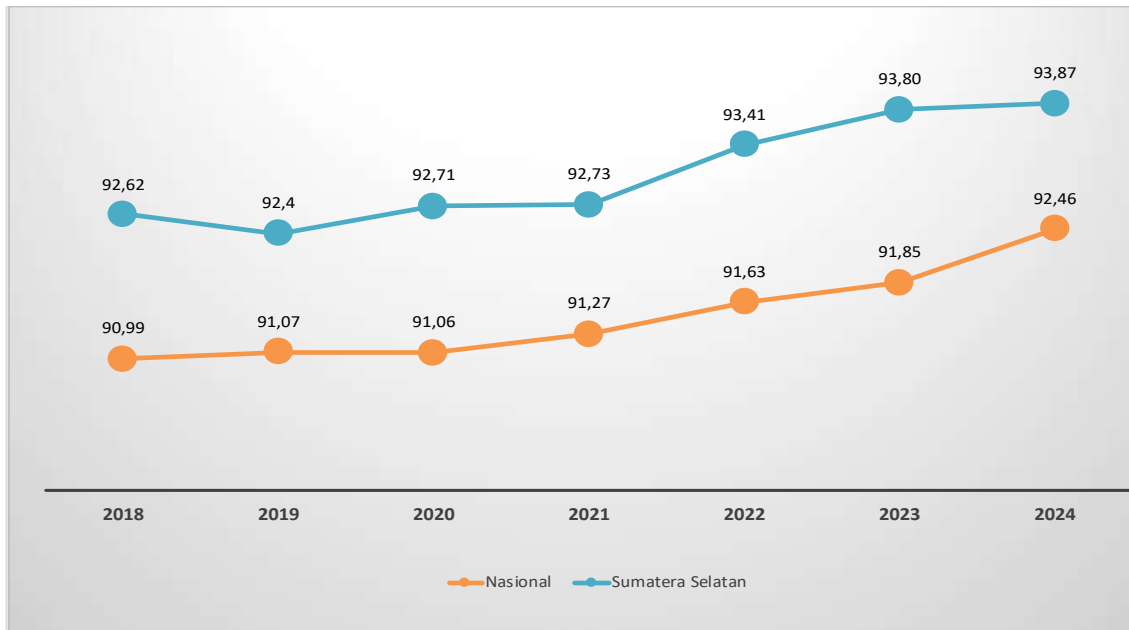
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Secara spasial, kabupaten/kota yang mengalami kenaikan ketimpangan gender pada tahun 2024 adalah Kabupaten Pali, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, dan Lahat.

D. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Selatan meningkat dari 92,62 pada 2018 menjadi 93,87 pada 2024, menunjukkan kemajuan dalam mengurangi kesenjangan gender. Secara nasional, IPG juga naik dari 90,99 menjadi 92,46 pada periode yang sama, dengan perbedaan relatif kecil dibanding Sumatera Selatan. Meski demikian, tantangan masih ada, khususnya dalam partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan pengambilan keputusan. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam pemberdayaan perempuan serta akses yang lebih setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

Beberapa daerah mencatatkan angka yang sangat baik, Ogan Ilir dengan nilai 99,29 pada 2024, yang menunjukkan kesetaraan gender yang sangat baik di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Diikuti oleh Palembang 97,67, Lubuk Linggau 96,21 dan Pagar Alam 95,63, yang menunjukkan tingkat kesetaraan gender yang tinggi di wilayah perkotaan.



Gambar 2. 84 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Namun, terdapat beberapa daerah yang memiliki IPG yang lebih rendah, seperti Musi Banyuasin yang mencatat angka 84,44 pada 2024, dan Musi Rawas yang berada di 87,34 yang menunjukkan bahwa perlindungan dan pemberdayaan perempuan di daerah-daerah tersebut masih perlu peningkatan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya kemajuan yang cukup signifikan dalam pembangunan kesetaraan gender di Sumatera Selatan. Walaupun ada beberapa wilayah yang perlu perhatian lebih dalam memperbaiki kesetaraan gender, secara umum IPG di provinsi ini menunjukkan tren positif yang mencerminkan komitmen untuk mengurangi kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan.

Tabel 2. 53 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

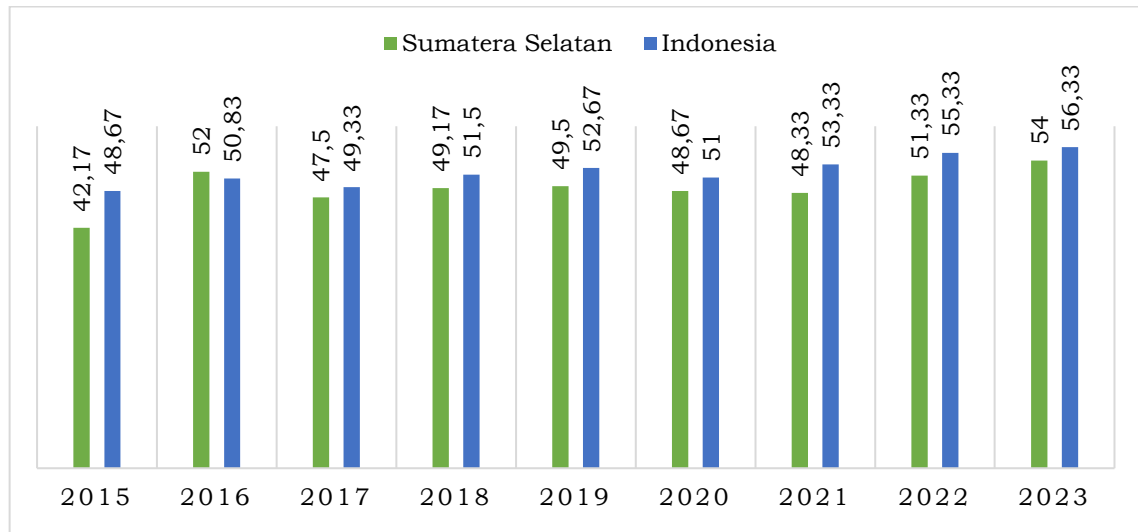
Kab/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sumatera Selatan	92,38	92,35	92,95	93,25	93,87
Ogan Komering Ulu	94	93,94	94,15	94,34	94,80
Ogan Komering Ilir	91,3	91,69	92,26	92,35	93,22
Muara Enim	89,64	89,67	89,87	89,82	90,87
Lahat	94,6	94,74	94,71	94,76	95,42
Musi Rawas	85,45	85,85	86,15	86,55	87,34
Musi Banyuasin	82,9	82,63	83,23	83,48	84,44
Banyuasin	88,93	88,96	89,32	89,54	90,62
OKU Selatan	92,62	92,39	92,4	92,46	92,74
OKU Timur	94	93,82	94,36	94,59	95,60
Ogan Ilir	99,13	99,09	98,92	98,93	99,29
Empat Lawang	93,38	93,32	93,47	93,69	93,90
Pali	93,17	93,13	93,66	93,71	94,18
Musi Rawas Utara	92,82	92,6	93,02	92,96	92,96
Palembang	95,97	96,07	96,24	96,52	97,67
Prabumulih	93,7	93,68	93,99	93,72	94,95
Pagar Alam	94,46	94,64	94,92	95,01	95,63
Lubuklinggau	95,83	95,84	96,01	95,47	96,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

E. Indeks Pembangunan Pemuda

Provinsi Sumatera Selatan memiliki 2,13 juta pemuda pada tahun 2021, dengan komposisi sebanyak 1,08 juta pemuda laki-laki dan 1,05 juta pemuda perempuan. Domain pembentuk IPP yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi. Capaian pemuda Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan, pada tahun 2015 sebesar 42,17 menjadi 54,0 pada tahun 2023 (data termutakhir). Kondisi ini menunjukkan telah terjadi perbaikan dalam indikator pembentuk IPP seperti membaiknya kesehatan dan pendidikan, gender dan berkurangnya tingkat diskriminasi. Namun demikian,

tingginya angka pengangguran yang didominasi pemuda memerlukan peningkatan kesempatan kerja.



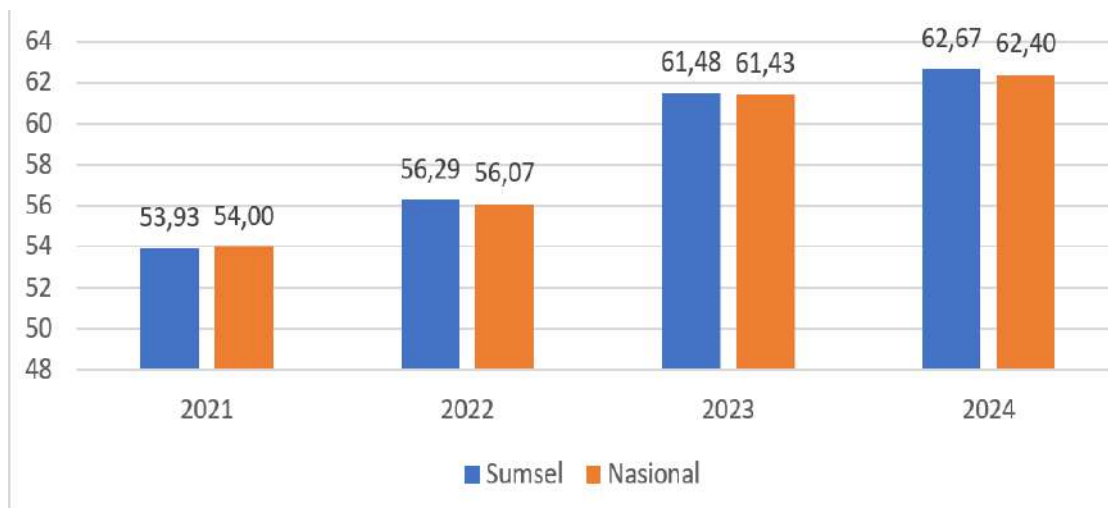
Gambar 2. 85 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Kemenpora, Laporan Indeks Pembangunan Pemuda, 2023

F. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran kualitas keluarga yang mencerminkan ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan, sekaligus menggambarkan peran dan fungsi keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Di Provinsi Sumatera Selatan, capaian iBangga pada periode 2021–2024 menunjukkan tren peningkatan konsisten dan positif. Pada tahun 2021, capaian iBangga tercatat sebesar 53,93, sedikit di bawah rata-rata nasional 54,00. Namun sejak 2022, capaian Sumatera Selatan melampaui angka nasional, yakni 56,29 dibandingkan 56,07. Tren positif ini berlanjut pada 2023 dengan capaian 61,48, lebih tinggi dari nasional 61,43, dan kembali meningkat pada 2024 menjadi 62,67 atau naik 1,19 poin, melampaui rata-rata nasional sebesar 62,40.

Peningkatan capaian iBangga Sumatera Selatan selama empat tahun terakhir mencerminkan adanya perbaikan dalam dimensi ketahanan, kebahagiaan, dan keberdayaan keluarga. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas kebijakan pembangunan keluarga di daerah, serta sinergi antar pemangku kepentingan yang terus meningkat.

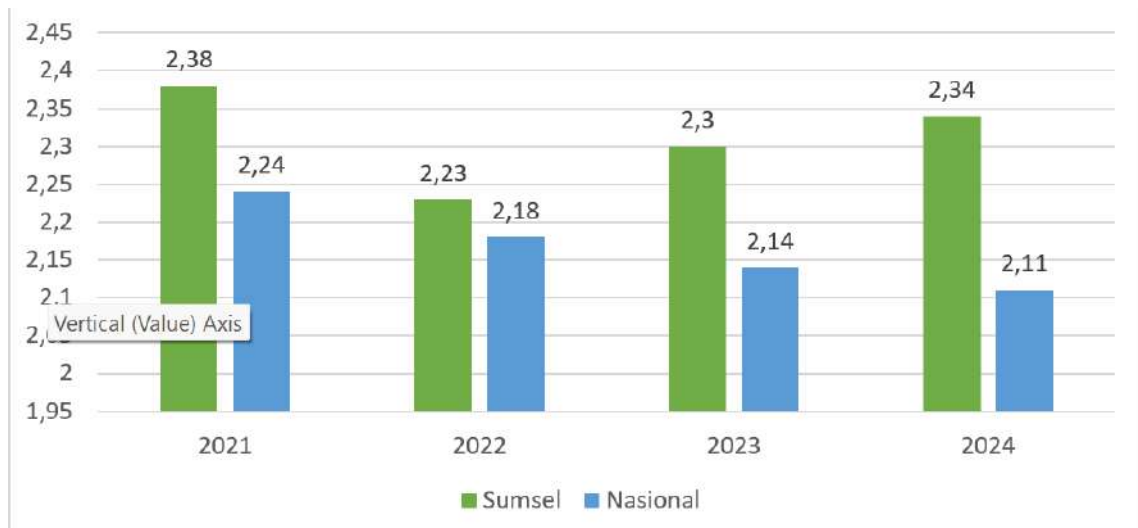


**Gambar 2. 86 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2024**

Sumber: BKKBN <https://siperindu.online> (2025)

G. Angka Kelahiran Total (*Total Fertilly Rate/TFR*) Per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)

Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa reproduksinya (usia 15–49 tahun) dan menjadi indikator penting dalam pengendalian pertumbuhan penduduk serta peningkatan kualitas keluarga. Data 2021–2024 menunjukkan bahwa TFR Provinsi Sumatera Selatan relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dengan tren berfluktuasi namun terkendali: tahun 2021 sebesar 2,38 (nasional 2,24), turun menjadi 2,23 pada 2022, naik menjadi 2,30 pada 2023 (nasional 2,14), dan sedikit menurun ke 2,34 pada 2024 (nasional 2,11). Kondisi ini mengindikasikan bahwa laju kelahiran di Sumatera Selatan masih lebih tinggi dari rata-rata nasional, sehingga program pengendalian kelahiran dan keluarga berencana perlu terus diperkuat, terutama di daerah dengan TFR tinggi. Tantangan utama meliputi edukasi masyarakat tentang pentingnya pengaturan kelahiran dan perencanaan keluarga, serta perlunya pendekatan kultural dan sosial yang lebih intensif agar masyarakat memahami manfaat memiliki jumlah anak yang ideal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kualitas pengasuhan.



Gambar 2. 87 Angka Kelahiran Total (*Total Fertilly Rate/TFR*) Per wanita usia subur (15-49 Tahun) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2024
 Sumber: BKKBN <https://siperindu.online> (2025)

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

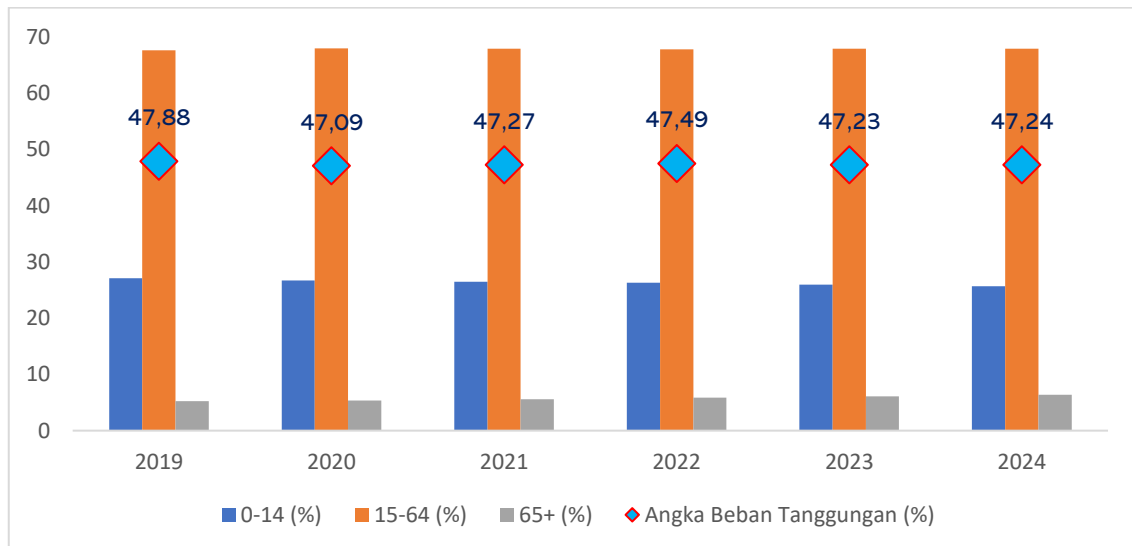
2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Angka Ketergantungan

Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Sumatera Selatan mengalami perubahan struktur demografi yang cukup signifikan. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan, proporsi penduduk usia 0–14 tahun menurun dari 27,10% pada 2019 menjadi 25,7% pada 2024, sementara proporsi penduduk lansia (65 tahun ke atas) meningkat dari 5,27% menjadi 6,38% pada periode yang sama. Proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) relatif stabil di kisaran 67%. Angka Ketergantungan (*dependency ratio*) juga relatif stabil di kisaran 47%. Angka ini menandakan setiap 100 orang usia produktif harus menanggung sekitar 47 orang usia tidak produktif.

Fenomena penurunan proporsi penduduk usia 0-14 tahun, seiring dengan terjadinya penurunan *Total Fertility Rate* (TFR) dari 2,6 pada 2017 menjadi 2,23 pada 2020 (LF SP2020). Kondisi ini tercermin pula dalam data kesehatan yang menunjukkan perbaikan pada angka kematian ibu dan bayi serta peningkatan cakupan program keluarga berencana di Sumatera Selatan. Di sisi lain adanya peningkatan proporsi lansia menandai awal proses penuaan penduduk yang memerlukan

perhatian serius. Implikasinya, dibutuhkan peningkatan terhadap layanan kesehatan lansia dan pengembangan program jaminan sosial yang komprehensif, termasuk pensiun dan layanan kesehatan komunitas yang ramah lansia.



Gambar 2. 88 Angka Ketergantungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

B. Ketenagakerjaan

Salah satu indikator pembentuk daya saing adalah ketenagakerjaan dan SDM. Tingkat daya saing di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Salah satu penyebab utamanya adalah tingkat Pendidikan penduduk yang masih rendah. Hal ini juga berlaku di Sumatera Selatan ditunjukkan dari angka rata-rata lama sekolah pada periode 2010-2024 berkisar 7,34 - 8,37 tahun atau setara SMP. Walaupun terjadi tren positif, namun aspek daya saing ini masih belum mencapai tujuan program wajib belajar 12 tahun atau setara SMA sebagai upaya mewujudkan Generasi Emas tahun 2045. Bahkan diamati dari distribusi pendidikan yang ditamatkan, baik Angkatan Kerja Total (41 persen $\leq$ SD) maupun penduduk yang bekerja (42 persen $\leq$ SD) di Sumatera Selatan masih didominasi oleh kelompok yang berpendidikan SD ke bawah.

Pendidikan berkualitas masih menjadi pekerjaan rumah di Sumatera Selatan. Saat ini, masih banyak anak yang belum menguasai kompetensi minimum literasi dan numerasi. Rata-rata Angka Kompetensi Minimum (AKM) Literasi dan Numerasi pada satuan Pendidikan SD hingga SMA masih di bawah

60 persen. AKM mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan secara nasional yang hasilnya dapat digunakan untuk pemetaan mutu pendidikan di Indonesia.



Gambar 2. 89 Distribusi Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan 2024
 Sumber: BPS, diolah (2025)

Pekerja dituntut memiliki keahlian yang dapat dikembangkan melalui pelatihan dan pendidikan, yang merupakan investasi terbaik untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh, semakin tinggi pula produktivitas dan kemampuan kerja seseorang. Namun, sebagian besar pekerja di sektor pertanian dan industri masih berkeahlian rendah, sedangkan sektor jasa dan lainnya lebih membutuhkan keahlian menengah hingga tinggi. Di Sumatera Selatan, pekerja berpendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian tinggi masih sangat sedikit, yaitu hanya 12,86%, sejalan dengan dominasi tenaga kerja sektor pertanian dan industri yang berpendidikan SD ke bawah.

Struktur tenaga kerja di Sumatera Selatan, didominasi pada sektor pertanian dan jasa masing-masing sebesar 44,7% dan 41,4% pada tahun 2023. Struktur ketenagakerjaan sektor pertanian selama periode 2020-2023 telah turun 1,20%, sementara sektor industri mengalami peningkatan 1,10% dan sektor jasa juga mengalami peningkatan 0,20%.

Tabel 2. 54 Struktur Ketenagakerjaan (% Total Tenaga Kerja)

Sektor	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Pertanian	45,9	45,0	46,4	44,7
Industri	12,8	13,5	13,2	13,9
Jasa	41,2	42,0	40,3	41,4

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

A. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Sebagai upaya memperkuat daya saing daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menempatkan sektor industri pengolahan sebagai prioritas pembangunan ekonomi. Kontribusinya terhadap PDRB atas dasar harga berlaku selama 2020–2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Tahun 2020, sektor ini menyumbang 19,73% dan sedikit menurun menjadi 19,09% pada 2021 akibat dampak pandemi COVID-19. Penurunan berlanjut pada 2022 hingga 17,51%, mencerminkan berbagai tantangan industri. Namun, pada 2023 kontribusi meningkat menjadi 17,91% dan kembali naik menjadi 18,27% pada 2024, menandakan adanya pemulihan melalui kebijakan pemerintah, investasi, dan adaptasi pelaku industri pascapandemi.

Tabel 2. 55 Distribusi Persentase PDRB Industri Pengolahan atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha per Sub Kategori	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahunan Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
C. Industri Pengolahan	19,73	19,09	17,51	17,91	18,27
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	3,81	3,57	3,37	3,56	3,39
2. Industri Makanan dan Minuman	9,86	9,64	8,74	9,08	9,45
3. Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	-	-	-	-	-
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus; dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	0,2	0,19	0,17	0,16	0,16
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	1,4	1,37	1,27	1,29	1,34
8. Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional	1,39	1,37	1,35	1,32	1,38
9. Industri Karet; Barang dari Karet dan Plastik	2,43	2,34	2,08	2	2,05
10. Industri Barang Galian bukan Logam	0,32	0,3	0,26	0,26	0,26
11. Industri Logam Dasar	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0,14	0,13	0,11	0,11	0,1
13. Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-	-	-	-
14. Industri Alat Angkutan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
15. Industri Furnitur	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03

Lapangan Usaha per Sub Kategori	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahunan Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
16. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 2. 56 Realisasi Rasio PDRB Industri Pengolahan (miliar Rupiah) Tahun 2020-2024

Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan	89.705,82	94.212,92	103.317,42	112.694,82	121.330,18
Total PDRB	454.607,40	493.636,85	590.079,43	629.168,67	663.961,72
Rasio (%)	19,73	19,09	17,51	17,91	18,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

B. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Akomodasi dan Makan Minum merupakan indikator persentase yang menunjukkan kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap total PDRB suatu wilayah. Sektor ini mencakup hotel, penginapan, restoran, kafe, warung makan, katering, jasa boga, dan penyediaan makanan lainnya. Perhitungan rasio ini bermanfaat untuk menilai peran sektor pariwisata dan pendukungnya, membandingkan ketergantungan antarwilayah terhadap sektor tersebut, serta menjadi dasar perencanaan pembangunan sektor jasa, khususnya dalam mendukung UMKM, pariwisata, dan penciptaan lapangan kerja.

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, sektor **Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum** di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan cukup signifikan. Data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menunjukkan peningkatan nilai dari **Rp8.519,35 miliar** pada tahun 2020 menjadi **Rp13.370,89 miliar** pada tahun 2024. Ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang kuat pasca-pandemi, khususnya pada sektor jasa yang erat kaitannya dengan pariwisata, perhotelan, dan kuliner.

Jika dirinci berdasarkan subsektor, terlihat bahwa:

- **Subsektor Penyediaan Akomodasi** tumbuh dari **Rp961,54 miliar** (2020) menjadi **Rp1.588,15 miliar** (2024). Pertumbuhan ini mencerminkan mulai pulihnya aktivitas perhotelan, penginapan, dan usaha sejenis seiring

peningkatan mobilitas masyarakat dan frekuensi penyelenggaraan kegiatan wisata maupun MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).

- **Subsektor Penyediaan Makan Minum** mencatat kontribusi yang lebih besar, dengan nilai yang meningkat dari **Rp 7.557,81 miliar** (2020) menjadi **Rp 11.782,74 miliar** (2024). Tren ini menunjukkan bahwa sektor kuliner, rumah makan, dan kafe menjadi tulang punggung utama dalam pertumbuhan keseluruhan sektor ini. Meningkatnya konsumsi masyarakat serta kemunculan berbagai usaha kuliner lokal turut mendorong laju pertumbuhannya.

Peningkatan PDRB sektor ini setiap tahunnya tidak hanya mencerminkan pemulihan, tetapi juga pertumbuhan struktural yang berkelanjutan. Pemerintah daerah yang terus mendorong pengembangan UMKM kuliner, digitalisasi layanan makanan-minuman, dan promosi pariwisata menjadi katalis penting dalam menjaga momentum pertumbuhan tersebut.

Tabel 2. 57 Realisasi Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (Miliar Rupiah), 2020-2024

Sektor	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.519,35	8.933,41	10.470,48	12.044,55	13.370,89
Total PDRB	454.607,40	493.636,85	590.079,43	629.168,67	663.961,72
Rasio (%)	1,87	1,81	1,77	1,91	2,01

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

C. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif adalah sektor ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan intelektual manusia sebagai sumber utama dalam menghasilkan produk dan jasa. Ekonomi kreatif mencakup 17 (tujuh belas) sub sektor, antara lain kuliner, fashion, kriya (kerajinan tangan), musik, seni rupa, desain produk, arsitektur, desain interior, periklanan, film, animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, seni pertunjukan, penerbitan, aplikasi, dan pengembangan permainan. Untuk mengukur ekonomi kreatif di Provinsi Sumatera Selatan digunakan indikator Nilai Tambah Ekonomi Kreatif yang

merupakan turunan dari Indikator Proporsi PDB Ekonomi Kreatif pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Indikator ini merupakan indikator baru yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 sehingga belum ada perhitungan realisasi Rasio PDRB Ekonomi Kreatif untuk 5 (lima) tahun terakhir.

D. Rasio Kewirausahaan

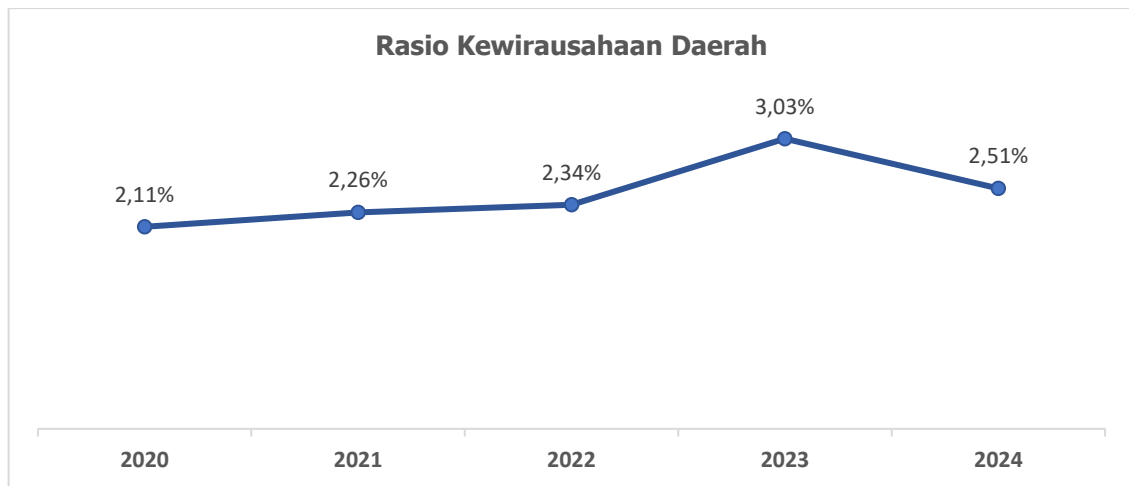
Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. Realisasi rasio kewirausahaan di Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 58 Rasio Kewirausahaan Daerah (Dalam Ribu Orang) per Agustus

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan kerja	4.329,75	4.398,91	4.497,96	4.588,17	4.659,81
Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar	91,47	99,38	105,22	138,92	116,93
Rasio Kewirausahaan	2,11%	2,26%	2,34%	3,03%	2,51%

Sumber: Sakernas, BPS 2025



Gambar 2. 90 Rasio Kewirausahaan Daerah Tahun 2020-2024

Sumber: Sakernas, BPS 2025

Rasio kewirausahaan di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2020 hingga 2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, rasio kewirausahaan daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 2,51% atau menurun 17% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini dikarenakan jumlah angkatan kerja pada tahun 2024 meningkat jika dibandingkan tahun 2023 sedangkan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar menurun.

Masih relatif kecilnya rasio kewirausahaan di Provinsi Sumatera Selatan disebabkan oleh: 1) Kondisi kredit yang ketat: Bank dan lembaga keuangan sering menetapkan persyaratan yang ketat untuk pemberian pinjaman kepada usaha kecil dan *startup*. 2) Stigma sosial: di beberapa budaya, kegagalan bisnis dapat membawa stigma negatif, menghalangi orang untuk mengambil risiko menjadi wirausahawan. 3) Pasar yang jenuh: Persaingan di pasar yang sudah jenuh dapat membuat sulit bagi usaha baru untuk bertahan dan berkembang. 4) Keterampilan manajemen yang kurang: pengusaha baru seringkali kekurangan keterampilan manajemen yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan sukses. 5) Terbatasnya akses pelatihan dan pendampingan usaha bagi calon wirausaha baru, serta keterbatasan jaringan pemasaran bagi pelaku usaha pemula. Oleh karena itu, diperlukan: 1) sosialisasi atau kampanye kewirausahaan kepada kalangan pemuda dan mahasiswa. 2) peningkatan akses permodalan berbasis kredit usaha rakyat (KUR). 3) pembentukan lembaga inkubator bisnis Sumsel: Inkubator Sriwijaya Bisnis Center.

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio antara jumlah angkatan kerja dan penduduk usia kerja yang menggambarkan kecenderungan penduduk untuk bekerja atau mencari kerja guna memperoleh penghasilan. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. TPAK dipengaruhi oleh jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan untuk bekerja, serta faktor sosial, ekonomi, dan demografis.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Selatan pada Agustus 2024 mencapai 70,82 persen, meningkat 0,10 persen poin dibandingkan Agustus 2023 sebesar 70,72 persen. Peningkatan ini menunjukkan adanya pergeseran penduduk usia kerja dari yang semula tidak aktif secara ekonomi menjadi aktif secara ekonomi. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki pada Agustus 2024 tercatat sebesar 85,79 persen, lebih tinggi dibandingkan perempuan sebesar 55,35 persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPAK laki-laki naik 0,40 persen poin, sedangkan TPAK perempuan turun 0,19 persen poin. Secara umum, TPAK terus mengalami peningkatan sejak Agustus 2020 hingga Agustus 2024, yang mencerminkan semakin besarnya proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Sumatera Selatan.

Tabel 2. 59 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 sampai 2024 (%)

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-Laki	82,71	82,66	84,95	85,39	85,79
Perempuan	54,25	54,54	53,32	55,54	55,35
TPAK	68,65	68,77	69,31	70,72	70,82

Sumber : BPS, Agustus,data diolah

Dari aspek gender, TPAK laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan, terutama dalam setahun terakhir. Kondisi ini dipengaruhi budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah, sedangkan perempuan dianggap berperan pada ranah domestik. Secara umum, TPAK laki-laki dan perempuan di Sumatera Selatan sama-sama meningkat, namun kenaikan TPAK laki-laki lebih tinggi.



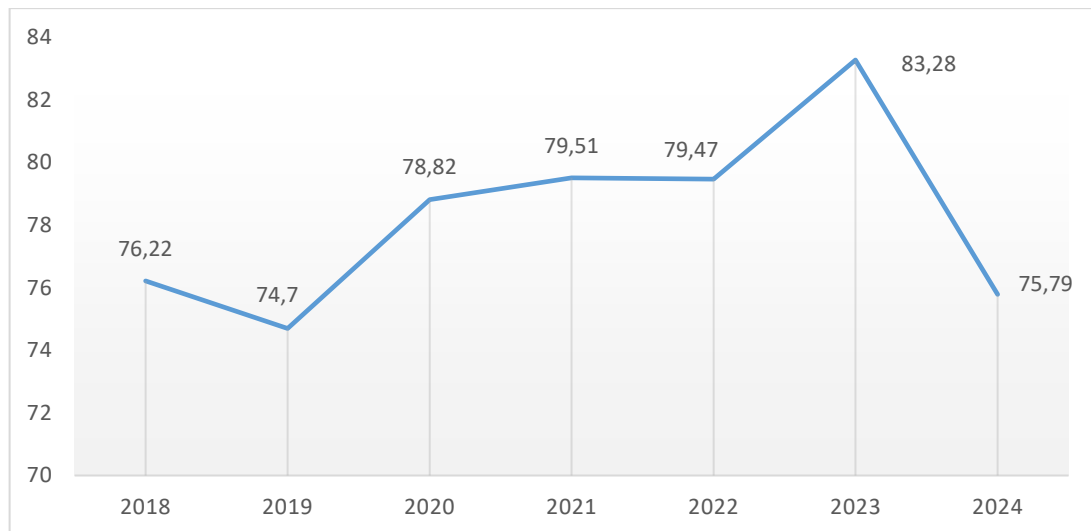
Gambar 2. 91 Perkembangan Angkatan Kerja dan TPAK Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, berbagai edisi

F. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi dari suatu daerah. IID dirancang untuk mengukur tingkat inovasi dalam berbagai bidang, termasuk tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya. IID terdiri dari 3 komponen, yaitu: (i) inovasi tata kelola pemerintahan, yang mengukur tingkat inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (ii) inovasi pelayanan publik, yang mengukur tingkat inovasi dalam penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat; dan (iii) inovasi daerah dalam bentuk lainnya, yang mengukur tingkat inovasi dalam bidang-bidang lainnya, seperti ekonomi, sosial, dan budaya.

Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan Indeks Inovasi Daerah secara konsisten dari tahun ke tahun dan berhasil meraih predikat provinsi sangat inovatif dan berada pada posisi kelima tahun 2024 (data termutakhir) dengan skor 75,79. Peningkatan Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain: (i) komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendorong inovasi daerah; (ii) dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan swasta; dan (iii) peningkatan jumlah dan kualitas inovasi daerah.



Gambar 2. 92 Skor Indeks Inovasi Daerah di Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2024

Sumber: Kementerian Dalam Negeri

Faktor-faktor penghambat peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari: (i) Kurangnya dukungan politik dari pemerintah daerah; (ii) kurangnya anggaran untuk penelitian dan pengembangan; (iii) kurangnya sumber daya manusia yang kompeten; dan (iv) kurangnya budaya inovasi. Sementara itu eksternal terdiri dari: (i) persaingan inovasi dari daerah lain; (ii) kebijakan pemerintah pusat; dan (iii) lingkungan bisnis yang tidak kondusif akan menghambat inovasi.

2.1.3.3 Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan salah satu pilar dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan akselerasi pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam konteks pembangunan jangka menengah 2025–2029, digitalisasi bukan hanya menjadi alat bantu administratif, tetapi fondasi strategis untuk memperluas inklusi layanan publik serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Selaras dengan arah kebijakan nasional (Indonesia Digital 2045) dan Strategi Nasional Transformasi Digital, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menempatkan transformasi digital sebagai pengungkit lintas sektor, dengan penekanan pada aspek literasi digital, keamanan data, serta digitalisasi sektor prioritas seperti pendidikan dan UMKM.

A. Indeks Transformasi Digital Nasional

Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) yang dikembangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengukur kesiapan transformasi digital daerah melalui lima dimensi, yaitu jaringan dan infrastruktur, bisnis, masyarakat, pemerintah, dan ekosistem. Di Provinsi Sumatera Selatan, transformasi digital menunjukkan tren positif dengan peningkatan skor TDN dari 45,28 pada 2018 menjadi 52,18 pada 2022, sehingga masuk dalam Klasifikasi B (Baik). Pencapaian ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dan berbagai pihak dalam memperkuat infrastruktur serta pemanfaatan teknologi digital di seluruh wilayah provinsi.

Kinerja pembangunan digital di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan capaian positif. Pada tahun 2022, pilar jaringan dan infrastruktur memperoleh skor 58,10 dengan klasifikasi B (Baik), meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian ini ditopang oleh pembangunan infrastruktur yang semakin baik, ditunjukkan oleh peningkatan cakupan layanan internet broadband 4G meskipun masih terdapat 1.833 dari 3.278 desa/kelurahan dengan sinyal lemah. Kualitas layanan juga membaik dengan rata-rata kecepatan unduh mencapai 44,94 Mbps dan unggah 21,26 Mbps. Selain itu, berdasarkan data Kemendikdasmen 2024, sebanyak 5.668 dari 7.084 sekolah (80,01%) telah terfasilitasi akses internet, sedangkan data Kemenkes 2024 mencatat 331 dari 348 puskesmas (95,11%) sudah terhubung internet. Pilar pemerintahan juga menunjukkan kontribusi positif dengan skor 56,03 dan klasifikasi B (Baik), meskipun masih diperlukan peningkatan signifikan pada aspek *e-government index* untuk memaksimalkan transformasi digital di sektor pemerintahan.

Meskipun Provinsi Sumatera Selatan secara umum memperoleh skor dengan klasifikasi B (Baik), perhatian tetap perlu diarahkan pada pilar bisnis dan masyarakat untuk memaksimalkan pembangunan digital. Pada pilar bisnis, peningkatan diperlukan terutama pada pertumbuhan startup digital dan kemampuan inovasi. Pertumbuhan ekonomi digital berpotensi besar mendukung perekonomian daerah, sehingga penyediaan ekosistem riset, inovasi, serta akses pendanaan menjadi penting untuk mendorong kreativitas dan kewirausahaan digital. Sementara itu, pada pilar masyarakat, literasi digital telah berkembang cukup baik, namun masih diperlukan peningkatan kemampuan digital, ketersediaan sekolah digital, dan kualitas pendidikan vokasi. Untuk itu, kurikulum vokasi harus mampu mengintegrasikan

keterampilan digital sesuai kebutuhan industri dan bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi.

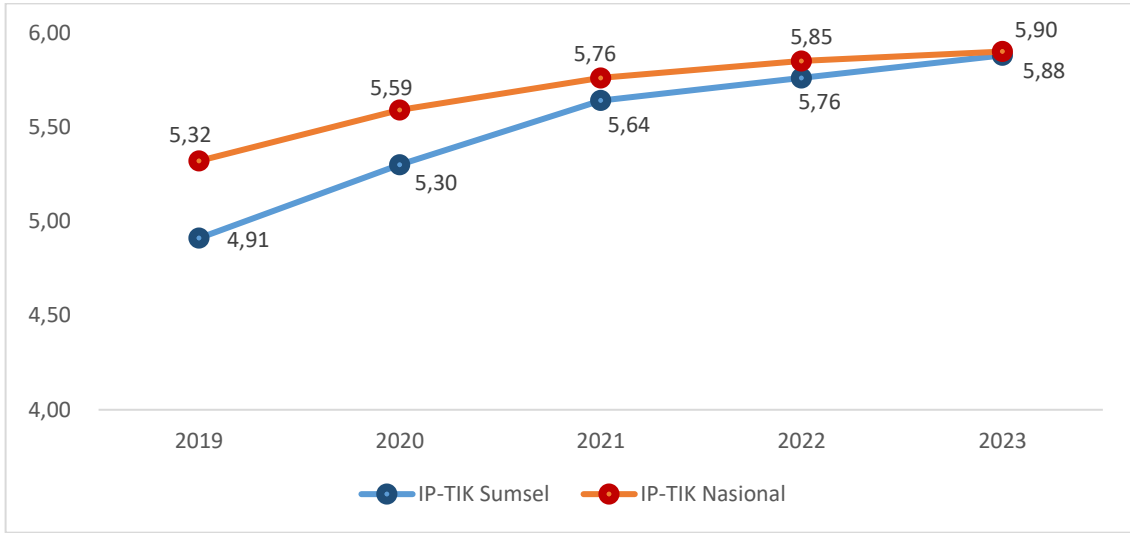
Tabel 2. 60 Indeks TDN Sumatera Selatan Tahun 2018-2022

Dimensi	2018	2019	2020	2021	2022
Pilar Jaringan dan Infrastruktur	48,28	49,20	54,56	56,90	58,10
Pilar Bisnis	40,15	41,61	44,00	41,12	44,00
Pilar Masyarakat	44,41	46,17	46,09	45,99	49,90
Pilar Pemerintah	46,95	50,46	55,76	65,60	56,03
Indeks Transformasi Digital	45,28	46,86	50,57	50,87	52,18

Sumber: Komdigim 2023

B. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Di era digital saat ini, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi pilar utama dalam transformasi berbagai sektor kehidupan. Dengan kemajuan yang pesat dalam perangkat keras, perangkat lunak, serta infrastruktur jaringan, TIK tidak hanya merubah cara berkomunikasi tetapi juga mengubah cara bekerja, belajar, dan berinteraksi. Infrastruktur digital yang semakin canggih memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap informasi, meningkatkan produktivitas, dan memfasilitasi inovasi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Pembangunan TIK juga mendorong integrasi sistem yang lebih baik, yang pada gilirannya mendukung berbagai industri, mulai dari kesehatan hingga pendidikan, serta sektor publik dan swasta.

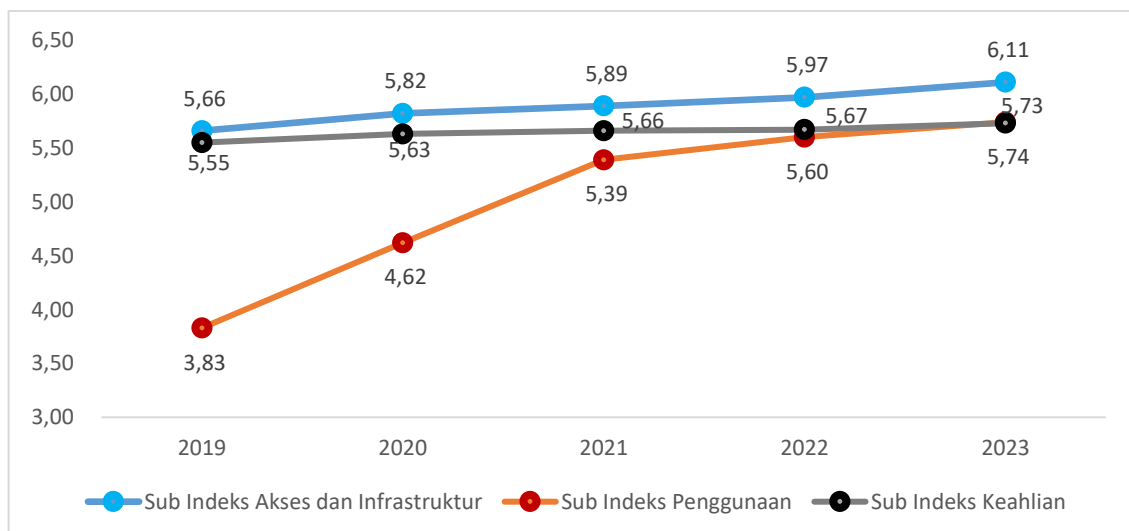


Gambar 2. 93 Capaian Nilai Indeks TIK Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

BPS menyusun **Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK)** berskala 0–10 untuk menggambarkan perkembangan TIK, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan pembangunan TIK yang lebih baik. Indeks ini terdiri atas tiga subindeks, yaitu akses dan infrastruktur, penggunaan, serta keahlian TIK. Nilai IP-TIK Sumatera Selatan pada periode 2019–2023 terus meningkat dan pada 2023 hampir menyamai nilai IP-TIK nasional. Subindeks akses dan infrastruktur, yang mencerminkan kesiapan TIK melalui lima indikator (pelanggan telepon tetap, pelanggan seluler, *bandwidth* internet internasional per pengguna, persentase rumah tangga dengan komputer, dan persentase rumah tangga dengan akses internet), menunjukkan tren peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan.

Subindeks Penggunaan TIK mencerminkan tingkat pemanfaatan TIK oleh masyarakat, yang diukur melalui tiga indikator: persentase individu pengguna internet, jumlah pelanggan *fixed broadband* per 100 penduduk, dan jumlah pelanggan *mobile broadband* aktif per 100 penduduk. Nilai Subindeks Penggunaan TIK Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan signifikan pada periode 2019–2023, menandakan semakin meratanya akses dan pemanfaatan internet di wilayah ini. Sementara itu, Subindeks Keahlian TIK yang disusun dari indikator rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang sekunder, dan APK jenjang tersier, juga mengalami peningkatan pada periode yang sama, meskipun cenderung stagnan pada kisaran 5,5–5,7.



Gambar 2. 94 Capaian Nilai Sub Indeks TIK Provinsi Sumatera Selatan, 2019-2023

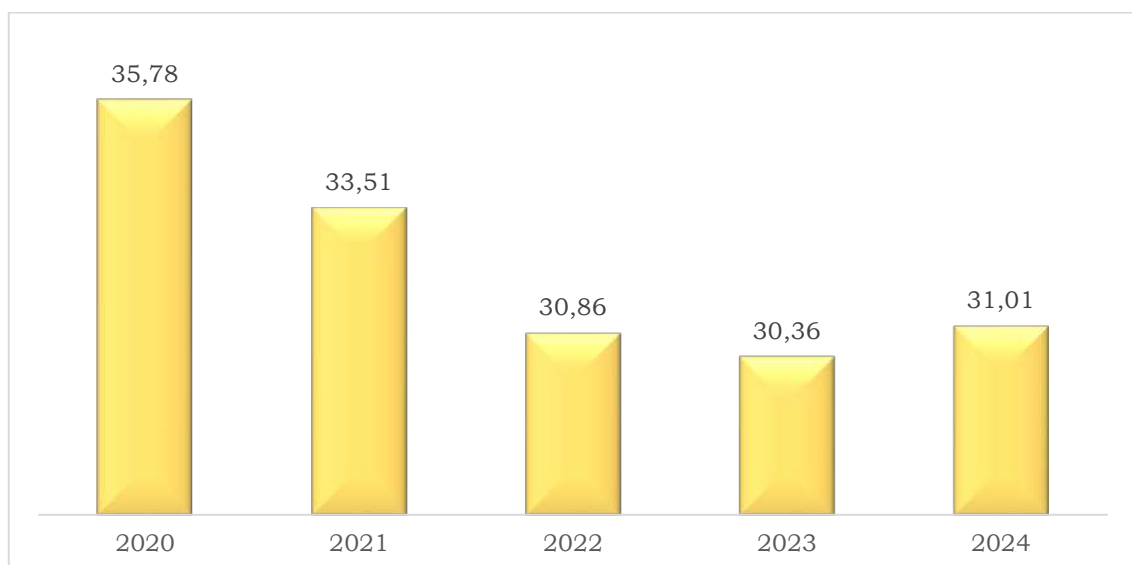
Sumber: Badan Pusat Statistik

2.1.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

A. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan indikator penting yang mencerminkan investasi pada aset tetap seperti infrastruktur, mesin, dan peralatan. Rasio PMTB terhadap PDRB yang tinggi menandakan peningkatan kapasitas ekonomi jangka panjang. Di Sumatera Selatan, persentase PMTB tahun 2020–2023 menunjukkan tren penurunan, meskipun rata-rata masih terjaga di atas 30%. Pada 2020 PMTB tercatat 35,78%, turun menjadi 30,36% pada 2023, lalu kembali meningkat menjadi 31,01% pada 2024. Penurunan tersebut terkait perlambatan investasi, baik pemerintah maupun swasta, akibat dampak pandemi COVID-19 yang menggeser alokasi belanja ke sektor kesehatan dan membatasi ekspansi usaha.

Rasio PMTB berkaitan dengan *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*, yang dihitung dari perbandingan PMTB/PDRB terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan sekitar 5% dan PMTB/PDRB sebesar 30%, nilai ICOR tercatat sekitar 6%, menunjukkan efisiensi investasi yang masih rendah. Oleh karena itu, pemulihan sektor investasi di Sumatera Selatan memerlukan penguatan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, kebijakan fiskal yang mendukung, serta percepatan proyek strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

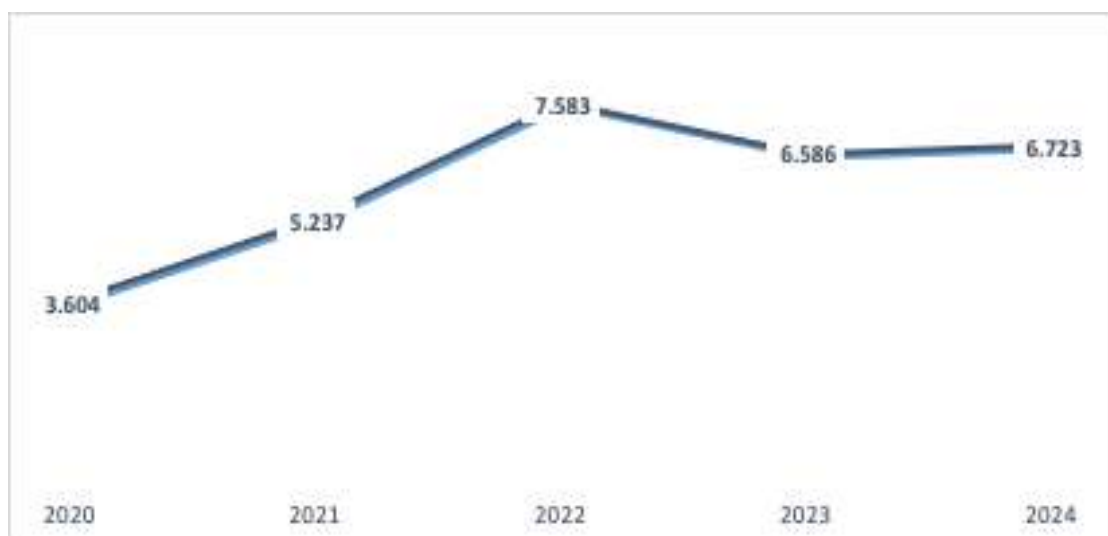


Gambar 2. 95 Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

B. Ekspor Barang dan Jasa

Selama periode 2020–2024, ekspor barang dan jasa Provinsi Sumatera Selatan mengalami dinamika pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada 2022, nilai ekspor melonjak menjadi US\$7,583 juta atau naik 44,8% dibanding 2021, seiring pemulihan ekonomi pascapandemi dan meningkatnya permintaan global terhadap komoditas unggulan seperti batubara, karet, dan CPO. Namun, pada 2023 ekspor turun 13,2% menjadi US\$6,586 juta akibat melemahnya permintaan global, turunnya harga komoditas, serta dampak geopolitik dan inflasi dunia. Tahun 2024 terjadi pemulihan ringan dengan kenaikan 2,1% menjadi US\$6,723 juta, didorong diversifikasi pasar, penguatan nilai tukar rupiah, serta kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pengembangan ekspor.



Gambar 2. 96 Persentase Nilai Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

2.1.3.5 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

A. Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang menyebutkan bahwa infrastruktur disebut dengan prasarana. Prasarana dikenal sebagai kelengkapan dasar fisik suatu kawasan, wilayah atau kota. Dalam hal infrastruktur transportasi Provinsi Sumatera Selatan memiliki multimoda (Jalan, Kereta Api, Sungai, Laut, dan Udara) sebagai pintu gerbang

yang dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas sehingga dapat meningkatkan peran Sumatera Selatan dalam persaingan regional maupun internasional.

1) Infrastruktur Transportasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya mendorong terciptanya transportasi yang aman, nyaman, cepat dan terjangkau melalui penyediaan fasilitas keamanan transportasi, tersedianya moda yang cukup dan ramah lingkungan serta penerapan aturan keselamatan transportasi bagi semua pengguna dan penyedia jasa transportasi dan didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang baik. Perilaku sebagian besar pemakai jalan yang masih kurang memperdulikan keselamatan diri sendiri dan pemakai jalan lainnya harus ditekan, budaya dan disiplin pengguna jalan dari sebagian pengemudi kendaraan belum berjalan baik serta masih adanya sarana dan prasarana transportasi yang belum memenuhi standar keselamatan.

(1). Infrastruktur Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, peruntukan Jalan dibagi atas Jalan Umum dan Jalan Khusus. Berdasarkan statusnya, jalan umum dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu: (1) Jalan Nasional, (2) Jalan Provinsi, (3) Jalan Kabupaten, (4) Jalan Kota, (5) Jalan Desa. Sementara itu, berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan, jalan umum menurut fungsinya terdiri dari: (1) Jalan Arteri, (2) Jalan Kolektor, (3) Jalan Lokal.

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 3 (tiga) ruas jalan utama, dimana 2 (dua) diantaranya memiliki fungsi strategis dan sangat vital sebagai penghubung antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Adapun ketiga ruas jalan utama tersebut adalah:

a). Lintas Timur Sumatera

Membentang dari Batas Lampung–Pematang Panggang–Simpang Penyandingan–Kayu Agung–Simpang Indralaya–Palembang–Betung–Batas Jambi sepanjang 405,32 km dan melewati lima kabupaten/kota

dan pada umumnya terletak pada daerah dataran rendah serta rawa-rawa.

b). Lintas Tengah Sumatera

Membentang dari batas Lampung Martapura–Baturaja–Simpang Sugiwaras–Muara Enim–Lahat–Tebing Tinggi–Lubuk Linggau–Terawas–Batas Jambi sepanjang 472,35 km dan melewati enam kabupaten/kota. Pada umumnya terletak pada daerah dataran tinggi (pegunungan) dan permukaan bergelombang.

c). Penghubung Antar Jalan Lintas

Pada saat ini jalan nasional yang berfungsi sebagai jalan penghubung antar jalan lintas terdiri dari dua jalan penghubung:

(1). Penghubung Timur dan Tengah Simpang Indralaya–Prabumulih–Muara Enim. Jalan ini sepanjang 147,46 km melewati tiga kabupaten/kota. Secara umum ruas jalan ini terletak pada daerah dataran rendah.

(2). Penghubung Timur Tengah (II) Betung–Sekayu–Muara Beliti sepanjang 253,43 km dan melewati dua kabupaten. Secara umum ruas ini terletak pada daerah dataran rendah dan juga berada di pinggiran Sungai Musi.

(3). Penghubung Alternatif Bagian Timur

Jalan penghubung alternatif antar dua jalan lintas utama (Lintas Timur dan Lintas Tengah) di bagian sebelah timur wilayah Provinsi Sumatera Selatan dilayani ruas jalan Simpang Penyandingan–Simpang Kepuh–Kurungan Nyawa–Martapura sepanjang 138,74 km dengan lebar perkerasan jalan rata-rata 4,50 meter.

(4). Penghubung Alternatif Bagian Tengah-Barat

a). Ruas Jalan Martapura–Ujan Mas–Batas Bengkulu

Penanganan jalan ini masih secara terus menerus dilaksanakan peningkatannya. Pada ruas jalan ini kondisi geometriknya belum memenuhi persyaratan, sebagian besar alignment vertikal masih bergelombang karena berada di daerah perbukitan.

b). Ruas Jalan Lahat–Pagar Alam–Tanjung Sakti–Batas Bengkulu

Jalan ini terletak di dataran tinggi yang rawan longsor dan patahan dengan kondisi jalan dari Pagar Alam menuju Tanjung

Sakti– Batas Bengkulu dalam kondisi relatif dengan lebar jalan antara 3,5–4,5 meter.

- c). Ruas Jalan Pagar Alam–Tanjung Raya–Batas Bengkulu
- Panjang ruas jalan ini adalah 52,7 km dengan lebar perkerasan jalan rata-rata 4,5 meter dengan jenis perkerasan lapisan aspal dengan kondisi 60% baik. Trase jalan terletak di daerah perbukitan dan menyusuri sungai. Lokasi rawan longsor dan daerah patahan.

Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan tidak terlepas dari mobilitas orang maupun barang yang cukup tinggi. Mobilitas barang dan jasa ditentukan oleh Infrastruktur, salah satunya adalah infrastruktur jalan. Keberadaan infrastruktur jalan menjadi sangat vital karena fungsinya adalah untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi masyarakat serta menjamin aksesibilitas antar wilayah. Data menunjukkan bahwa total panjang jalan hingga 2024 sebesar 17.876,25 km. Komposisi jalan tersebut terdiri atas jalan nasional sepanjang 1.581,148 km (8,84%), jalan provinsi sepanjang 1.779,27 km (9,95%) dan jalan kabupaten/kota sepanjang 14.515,85 km (81,20%). Adapun kondisi jalan nasional dan kondisi jalan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 – 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 61 Kondisi Jalan Nasional di Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2024

Kondisi Jalan	Satuan	Tahun		
		2022	2023	2024
Panjang Jalan	km	1.600,16	1.581,148	1.581,13
Kondisi Baik	Km	807,22	844,598	785,44
	%	50,45	53,42	49,68
Kondisi Sedang	Km	705,08	690,61	744,22
	%	44,06	43,68	47,07
Kondisi Rusak Ringan	Km	78,45	40,86	47,67
	%	4,90	2,58	3,01
Kondisi Rusak Berat	Km	9,42	5,08	3,80
	%	0,59	0,32	0,24
Kondisi Jalan Mantap	Km	1.512,30	1.535,208	1.529,66
	%	94,51	97,09	96,74

Sumber: <https://data.pu.go.id/>, 2024

**Tabel 2. 62 Kondisi Jalan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
Tahun 2022 – 2024**

Kondisi Jalan	Satuan	Tahun					
		2022		2023		2024	
		Kabupaten	Kota	Kabupaten	Kota	Kabupaten	Kota
Panjang Jalan	km	13.747,64	1.905,93	12.609,92	1.905,93	11.341,88	1.947,45
Kondisi Baik	km	4.663,11	578,83	5.137,19	663,47	5.059,83	654,86
	%	33,92	30,37	40,74	34,81	44,61	33,63
Kondisi Sedang	km	2.191,94	827,22	2.123,45	801,63	1.689,11	720,44
	%	15,94	43,40	16,84	42,06	14,89	36,99
Kondisi Rusak Ringan	km	3.701,19	224,66	2.316,36	143,56	576,72	183,79
	%	26,92	11,79	18,37	7,53	5,08	9,44
Kondisi Rusak Berat	km	3.191,39	275,22	3.032,90	297,27	4.016,22	388,36
	%	23,21	14,44	24,05	15,60	35,41	19,44
Kondisi Jalan Mantap	km	6.855,05	1.406,05	7.260,64	1.465,10	6.748,94	1.375,30
	%	49,86	73,77	57,58	76,87	59,50	70,60

Sumber: <https://data.pu.go.id/>, 2024

Kondisi transportasi darat atau jalan tidak terlepas dari kondisi kinerja jaringan jalan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2019 sampai dengan 2021 realisasi kondisi kemantapan jalan provinsi menggunakan SK Jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 130/KPTS/DIS PU BM/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan primer menurut fungsinya sebagai jalan kolektor-2 dengan panjang 1.513,653 Km, dan untuk tahun 2022 menggunakan SK Jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 902/KPTS/DIS.PUBMTR/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Primer menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi dengan panjang jalan 2.113,747 Km, sedangkan untuk tahun 2023 menggunakan SK Jalan Kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 130/KPTS/DIS.PUBMTR/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan dalam Jaringan Primer menurut Statusnya sebagai jalan provinsi dengan panjang jalan sebesar 1.779,27 km. Adapun kondisi jalan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019–2024, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 63 Kondisi Jalan Provinsi di Sumatera Selatan
Tahun 2019 – 2024**

Kondisi Jalan	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Jalan Provinsi					
Panjang Jalan		1.513,653	1.513,653	1.513,653	2.113,75	1.779,27	1.779,27
Kondisi Baik	km	857,29	938,15	1.322,02	1.609,01	1.121,60	1.142,55
	%	56,64	61,98	87,34	76,12	63,04	64,21
Kondisi Sedang	km	341,02	424,50	99,89	222,78	446,85	474,57
	%	22,53	28,04	6,60	10,54	25,11	29,91
Kondisi Rusak Ringan	km	163,80	64,42	30,74	56,57	140,13	110,87
	%	10,82	4,26	2,03	2,68	7,88	6,7
Kondisi Rusak Berat	km	151,53	86,58	61,00	225,29	70,71	51,30
	%	10,01	5,72	4,03	10,66	3,97	2,54
Kondisi Jalan Mantap	km	1.198,31	1.362,65	1.421,91	1.831,79	1.568,45	1.617,12
	%	79,17	90,02	93,94	86,66	88,15	90,89

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel, 2024

Ruas jalan berdasarkan SK Jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 130/KPTS/DIS.PUBMTR/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan dalam Jaringan Primer menurut Statusnya sebagai Jalan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi dengan panjang jalan sebesar 1.779,27 Km (88 ruas).

Persentase kondisi jalan mantap merupakan hal penting untuk memperlancar arus pergerakan kendaraan dalam mendukung pelayanan transportasi masyarakat. Kemantapan jalan memungkinkan kendaraan untuk mencapai kecepatan yang optimal untuk mempersingkat waktu tempuh. Jalan dikategorikan dalam kondisi mantap jika kondisi jalan tersebut dalam kondisi baik dan sedang, sedangkan kondisi tidak mantap jika keadaan jalan tersebut dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Adapun rasio kemantapan jalan provinsi tahun 2024 yaitu sebesar 90,89%. Tabel 2.64 menunjukkan kondisi jalan mantap provinsi di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024.

Tabel 2. 64 Komposisi Panjang Jalan Menurut Statusnya di Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Kab/Kota	Panjang	Kondisi Jalan Provinsi							
			Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
			(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)
1	Palembang	74,08	50,83	68,61	19,20	25,92	3,45	4,66	0,60	0,81
2	Banyuasin	53,68	28,43	52,96	16,77	31,24	3,35	6,24	5,13	9,56
3	Musi Banyuasin	40,84	12,95	31,7	20,59	50,42	5,90	14,45	1,40	3,43
4	Ogan Ilir	204,68	106,25	51,91	59,05	28,85	23,63	11,54	15,75	7,69
5	Ogan Komering Ilir	102,18	76,82	75,18	18,48	18,09	4,04	3,95	2,84	2,78
6	Ogan Komering Ulu	101,65	68,92	67,8	28,44	27,98	2,85	2,80	1,44	1,42
7	Komering Ulu Timur	269,46	208,6	77,41	45,00	16,70	9,90	3,67	5,96	2,21
8	Komering Ulu Selatan	192,18	136,89	71,23	49,91	25,97	2,63	1,23	3,02	1,57
9	Muara Enim	123,48	92,2	74,67	23,28	18,85	5,92	4,79	2,08	1,68
10	Penukal Abab Lematang Ilir	186,00	129,6	69,68	48,95	26,32	5,45	2,93	2,00	1,08
11	Pagaralam	14,10	9,00	63,83	5,10	36,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Lahat	83,17	44,97	54,07	28,40	34,15	9,20	11,06	0,60	0,72
13	Empat Lawang	146,86	51,38	34,99	57,83	39,38	28,90	19,68	8,75	5,96
14	Musi Rawas	113,45	72,50	63,90	36,27	31,97	3,25	2,86	1,43	1,26
15	Musi Rawas Utara	59,86	48,51	81,04	10,65	17,79	0,40	0,67	0,30	0,50
16	Lubuklinggau	13,62	4,70	34,50	6,65	48,83	2,27	16,67	0,00	0,00
Total		1.779,27	1.143,55	64,21	474,57	29,91	110,87	6,7	51,30	2,54
% Kondisi			90,89 (Kondisi Mantap)				9,1 (Kondisi Rusak)			

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel, 2024

Untuk meningkatkan nilai rasio kemantapan jalan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan fokus dalam penanganan infrastruktur jalan yaitu penanganan jalan dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan. Sementara untuk mempertahankan nilai rasio kemantapan jalan difokuskan pada pemeliharaan jalan dalam kondisi baik dan sedang.

(2) Infrastruktur Kereta Api

Jalan rel atau kereta api sebagai salah satu moda transportasi darat sampai saat ini diandalkan dalam mengangkut barang dan jasa. Jaringan

kereta api di Sumatera Selatan meliputi Kertapati-Lubuklinggau dan Kertapati-Tarahan Lampung.

Pengangkutan barang dalam volume besar dan dengan jarak yang cukup jauh diangkut dengan menggunakan kereta api atau kapal. Provinsi Sumatera Selatan memiliki jalur kereta api rute Palembang-Lampung dan Palembang-Lubuklinggau. Dari 675,95 km jalan kereta api yang ada di Sumatera Bagian Selatan sebagian besar (89%) merupakan *single track* dan sisanya sepanjang 75 km merupakan jalur *double track*. Dari sisi kemampuan beban gandar sebagian besar jalan kereta api di Sumatera Selatan mempunyai kemampuan maksimal 13 ton dan baru sebagian kecil (32%) yang mempunyai beban gandar mencapai 18 ton.

Tabel 2. 65 Rute dan Panjang Rel PT. KA Divre III di Wilayah Sumbagsel

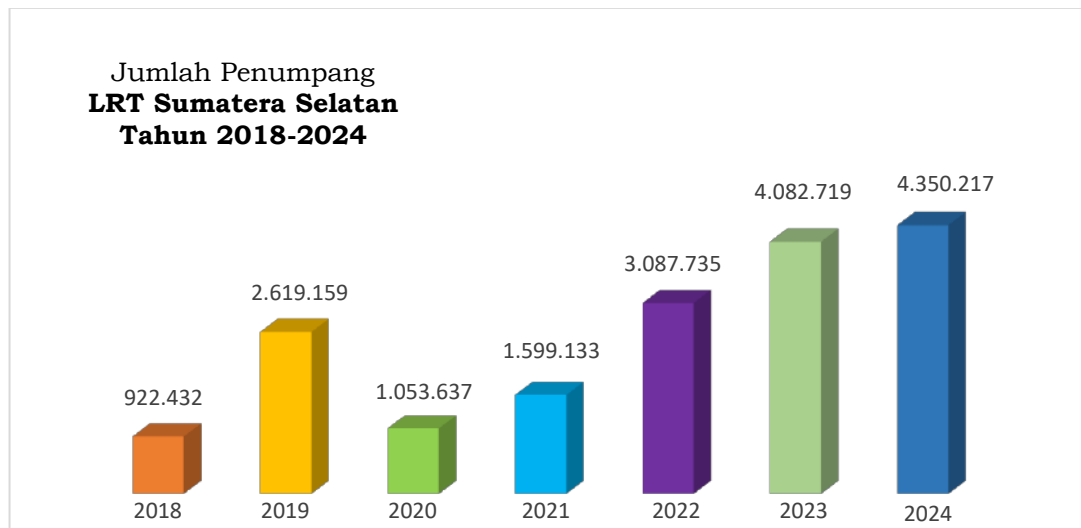
No	Lintasan	Panjang (Km)	Beban Gandar (Ton)
1	Kertapati-Prabumulih	77,8	13
2	Prabumulih-Baturaja	96	13
3	Baturaja-Martapura	32	18
4	Martapura-Kota Bumi	98	18
5	Kota Bumi-Tanjung Karang	86	18
6	Prabumulih-Tanjung Karang	74	13
7	Muara Enim-Lahat	38,3	13
8	Lahat-Tebing Tinggi	66	13
9	Tebing Tinggi-Lubuklinggau	49	13
10	Lintasan Lainnya	58,85	13
Total		675,95	

Sumber: PT. KA Divre III Wilayah Sumbagsel, 2023

Provinsi Sumatera Selatan memiliki moda *Light Rail Transit* (LRT) sepanjang 23,4 km yang dibangun dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin sampai Komplek Olahraga Jakabaring. Terdapat 13 stasiun, yaitu stasiun Bandara SMB II, Asrama Haji, Punti Kayu, RSUD, Garuda Dempo, Demang Lebar Daun, Bumi Sriwijaya, Dishub, Cinde, Ampera, Polresta, Jakabaring, dan DJKA. LRT dioperasikan pada tanggal 23 Juli 2018, di mana pengoperasional LRT dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia.

Pertumbuhan penumpang LRT sangat baik, kondisi ini terlihat dari adanya peningkatan jumlah rata-rata penumpang per bulan. Pada tahun

2018, jumlah penumpang LRT sebanyak 922.432 orang dan meningkat menjadi 4.350.217 orang pada tahun 2024. Peningkatan ini dorong oleh mulai efektifnya angkutan umum *Feeder LRT* sehingga memberikan koneksi penumpang bisa *point to point*.



Gambar 2. 97 Jumlah Penumpang *Light Rail Transit* (LRT) Sumatera Selatan

Sumber: Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

(3) Infrastruktur Transportasi Air

Sumatera Selatan mempunyai banyak aliran sungai yang juga dapat dimanfaatkan untuk moda transportasi. Daerah yang memiliki akses ke alur sungai terdapat 8 kabupaten, 62 kecamatan, dan 356 desa/kelurahan atau 11,59 persen dari 3.079 desa di Sumatera Selatan.



Gambar 2. 98 Angkutan Sungai di Sungai Musi

Tabel 2. 66 Jumlah Wilayah di Sekitar Sungai

No.	Sungai	Wilayah dengan Akses ke Sungai Baik			
		Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
1	Banyuasin	Banyuasin	Tanjung Lago	1	4
2	Batanghari	Musi Banyuasin	Batanghari Leko	1	10

No.	Sungai	Wilayah dengan Akses ke Sungai Baik			
		Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
3	Calik	Banyuasin	Pulau Rimau	1	10
4	Kelingi	Musi Rawas	Bulan Tengah Suku Ulu, Muara Kelingi, Muara Lakitan	3	5
5	Komerling	OKI	Kota Kayu Agung, Sirah Pulau Padang, Jejawi, Lempuing Jaya	4	29
		OKU Timur	Buay Pemuka Bangsa Raja, Buay Pemuka Peliung, Cempaka, Madang, Suku II, Semendawai Barat	5	11
6	Lalan	Musi Banyuasin	Bayung Lencir, Lalan	2	16
7	Lematang	Muara Enim	Rambang Dangku, Sungai Rotan, Muara Belida	3	23
		PALI	Penukal, Penukal Utara	2	6
8	Dawas	Banyuasin	Tungkal Ilir	1	2
		Musi Banyuasin	Sungai Lilin, Sanga Desa	2	3
9	Lumpur	OKI	Cengal, Pampangan, Tulung Selapan	3	23
10	Pedada	OKI	Tulung Selapan	1	1
11	Jeruju	OKI	Cengal	1	1
12	Menang	OKI	Sungai Menang	1	4
13	Mesuji	OKI	Pedamaran Timur, Sungai Menang, Cengal	3	9
14	Musi	Banyuasin	Banyuasin I, Rantau Bayur	2	24
		PALI Musi Banyuasin Palembang	Abad	1	1
			Sanga Desa	1	3
			Gandus, Ilir Timur II, Kertapati, Seberang Ulu I	4	10
15	Ogan	Ogan Ilir	Lubuk keliat, Muara Kuang, Rantau Alai, Indralaya Utara, Kandis, Pemulutan, Pemulutan Barat, Pemulutan Selatan, Tanjung Batu, Tanjung Raja	12	65

No.	Sungai	Wilayah dengan Akses ke Sungai Baik			
		Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
16	Rawas	Musi Rawas	Karang Dapo, Rawas Ilir, Rawas Ulu, Rupit, Ulu Rawas	5	34
17	Saleh	Banyuasin	Air Saleh, Rambutan, Muara Sugihan	3	30
18	Sugihan	Banyuasin	Muara Sugihan	1	18
19	Telang	Banyuasin	Banyuasin II, Makarti Jaya, Muara Telang	3	27
	Total			62	355

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2024 (data mutakhir)

Jumlah Dermaga Sungai di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 89 unit yang tersebar di 10 Kabupaten di Sumatera Selatan. Sebagian besar yaitu 87 persen, dermaga-dermaga sungai tersebut dalam kondisi baik.

Tabel 2. 67 Daftar Dermaga Sungai dan Danau di Sumatera Selatan

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan	Kepemilikan
1	Gandus	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2006-2008	Pemprov
2	Tangga Buntung (35 Ilir)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	1992/1993	Pemkot
3	Sekanak	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2006	Pemkot
4	Benteng Kuto Besak (BKB)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	1995	Pemkot
5	Bawah Ampera (7 ulu)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2014	Pemkot
6	16 Ilir	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2002	Pemkot
7	16 Ilir (Bawah Ampera)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2004	Pemkot
8	Kertapati	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2002	Pemkot
9	Kertapati (Samping Stasiun KA)	S. Ogan, Palembang	Beton	Baik	2011	Pemkot
10	10 Ulu	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	1998	Pemkot
11	Rumah Buruk	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot
12	Pasar Kuto	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2010	Pemkot
13	1 Ilir	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot
14	Tangga Takat	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot
15	13 Ulu	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan	Kepemilikan
16	Padatuan	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot
17	Padatuan 7 Ulu (a)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2009	Pemkot
18	Padatuan 7 Ulu (b)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2011	Pemkot
19	5 Ulu	S. Musi, Palembang	Beton	Baik	2012	Pemkot
20	4 Ulu	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2010	Pemkot
21	Sei Buaya	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2008	Pemkot
22	Pegayut	S. Ogan, Palembang	Ponton	Baik	2008	Pemkot
23	Ki Merogan	S. Ogan, Palembang	Ponton	Baik	2008	Pemkot
24	Tangga Batu	S. Musi, Palembang	Ponton	Rusak	2000	Pemkot
25	Pasar Induk Jakabaring	S. Ogan, Palembang	Ponton	Baik	2003/2005	Pemkot
26	Sei Lais	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2002	Pemkot
27	Bek Ang DAM (TNI)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2010	Pemkot
28	Kampung Kapiten	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2008	Pemkot
29	Lawang Kidul	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2008	Pemkot
30	3/4 Ulu	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2010	Pemkot
31	Masjid Jamik	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2010	Pemkot
32	Solok Betutu	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2009	Pemkot
33	Pemulutan(Pos Peng)	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	1990	Pemkot
34	Tanjung Raja	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	1994	Pemkab
35	Muara Kuang	S. Ogan, Ogan Ilir	Kayu	Sedang	1990	Pemkab
36	Kuala Sugihan	S. Sugihan, OKI	Ponton	Baik	1990	Pemkab
37	Lebong Hitam	S. Lebong Hitam, OKI	Ponton	Baik	1990	Pemkab
38	Pelabuhan Laut Sungai Lumpur	S. Lumpur, OKI	Kayu	Baik	1990	Pemkab
39	Sungai Batang	S. Batang, OKI	Ponton	Baik	1990	Pemkab
40	Tulung Selapan	S. Tulung Selapan, OKI	Beton	Baik	2000	Pemkab
41	Sugihan Kanan	Jalur 27, OKI	Kayu	Baik	2003	Pemkab
42	Kuala XII	S. Kuala, OKI	Ponton	Baik	1990	Pemkab
43	Cengal	Cengal, OKI	Beton	Baik	2007	Pemkab
44	Pulau Padang	S. Lumpur, OKI	Beton	Baik	2006	Pemkab
45	Pampangan	S. Lumpur, OKI	Beton	Baik	2006	Pemkab
46	Sukodarmo (Jejawi)	S. Komering, OKI	Beton	Baik	2007	Pemkab
47	Muara Kumbang	S. Musi, Banyuasin	Kayu	Baik	2003	Pemkab

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan	Kepemilikan
48	Upang	S. Sugihan, Banyuasin	Kayu	Baik	2003	Pemkab
49	Sungsang	S. Lilin, Banyuasin	Ponton	Baik	2004/2006	Pemkab
50	Makarti Jaya	S. Sebalik Jalur 9 (P9), Banyuasin	Ponton	Rusak	1983	Pemkab
51	Sugihan (Ma. Padang)	Jalur 20, Banyuasin	Ponton	Baik	1998	Pemkab
52	Sugihan Kiri (cendana)	Jalur 14, Banyuasin	Kayu	Baik	2003	Pemkab
53	Sugihan Kiri (Timbul Jaya)	Jalur 13, Banyuasin	Kayu	Baik	2003	Pemkab
54	Gasing	Gasing	Beton, Ponton	Baik	2003/2004	Pemkab
55	Muara Telang	Jalur 8, Banyuasin	Ponton	Baik	2003	Pemkab
56	Telang Jaya	Jalur 8, Banyuasin	Besi/Kayu	Baik	1992	Pemkab
57	Simpang PU	S. Telang, Banyuasin	Ponton	Baik	1997	Pemkab
58	Muara Telang	Jalur 4, 5 Telang, Banyuasin	Ponton	Baik	2005	Pemkab
59	Sembilang	S. Sembilang, Banyuasin	Ponton	Baik	2003/2004	Pemkab
60	Pengumbuk	S. Musi Banyuasin	Besi/Kayu	Baik	2001	Pemkab
61	Teluk Betung	P. Rimau, Banyuasin	Ponton	Baik	1998	Pemkab
62	Muara Padang	S. Sebalik, Banyuasin	Beton	Baik	1998	Pemkab
63	Penuguan	S. Lilin, Banyuasin	Beton	Baik	1990	Pemkab
64	Karang Agung	S. Lalan, Muba	Beton	Baik	1985	Pemkab
65	Sungai Lilin	S. Lilin, Muba	Ponton	Baik	2004	Pemprov
66	Sekayu	S. Musi, Muba	Beton	Baik	1993	Pemkab
67	Muara Lematang	S. Lematang, Muba	Ponton	Baik	1990	Pemkab
68	Bayung Lincir	S. Lalan, Muba	Ponton	Baik	2009	Pemkab
69	Babat	S. Musi, Muba	Ponton	Baik	2004	Pemkab
70	Telang	S. Lalan, Muba	Ponton	Baik	2004	Pemkab
71	Pangkalan Bulian	S. Batang Hari Leko, Muba	Ponton	Baik	2000	Pemkab
72	Muara Rawas	S. Kelingi, Muba	Ponton	Baik	2001	Pemkab
73	Teluk Kijing	S. Batang Hari Leko,	Ponton	Baik	1995	Pemkab
74	Muara Teladan	S. Batang Hari Leko,	Ponton	Baik	1995	Pemkab
75	Simpang	S. Komering, OKU	Ponton	Baik	2000	Pemkab
76	Banding Agung	Danau Ranau, OKU Selatan	Baja	Baik	1993	Pemkab
77	Kota Batu	Danau Ranau, OKU Selatan	Baja, Lantai Kayu	Rusak	1994	Pemkab
78	Talang Pangeran (Pemulutan)	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	2006	Pemkab

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan	Kepemilikan
79	Muara Rupit	S. Rawas, Musi Rawas	Beton	Baik	2005	Pemprov
80	Muara Kelinci	S. Kelinci, Musi Rawas	Beton	Baik	2008	Pemkab
81	Muara Lakitan	S. Kelinci, Musi Rawas	Beton	Baik	2011	Pemkab
82	Beringin Teluk	S. Rawas, Musi Rawas	Beton	Baik	2005	Pemkab
83	Pauh	S. Rawas, Musi Rawas	Beton	Baik	2000	Pemkab
84	Padang Tepung	S. Kelinci, Lahat	Beton	Baik	2000	Pemkab
85	Kota Agung	S. Lematang, Lahat	Beton	Baik	1998	Pemkab
86	Muara Enim	S. Lematang, Muara Enim	Beton	Baik	2000	Pemkab
87	Beringin	S. Ogan, Muara Enim	Beton	Baik	2000	Pemkab
88	Gunung Megang	S. Lematang, Muara Enim	Beton	Baik	2008	Pemkab
89	Muara Lematang	S. Musi, Muara Enim	Beton	Baik	2011	Pemkab

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel, 2024 (data mutakhir)

Selain Dermaga Sungai, terdapat juga tambatan perahu sebanyak 77 Unit yang dibangun melalui alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus untuk Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Pada tahun 2020 jumlah tambatan perahu yang dibangun sebanyak 22 unit, tahun 2021 sebanyak 25 Unit dan tahun 2022 sebanyak 25 unit dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 68 Daftar Tambatan Perahu Bantuan Bersifat Khusus Untuk Pemerintah Kabupaten Banyuasin

No	Tahun	Kecamatan	Desa	Konstruksi
I	2020			
1	2020	Air Salek	Saleh Mukti	Beton
2	2020	Air Salek	Saleh Mulya	Beton
3	2020	Air Salek	Bintaran	Beton
4	2020	Air Salek	Air Solok Batu	Beton
5	2020	Muara Sugihan	Kuala Sugihan	Beton
6	2020	Muara Sugihan	Gilirang	Beton
7	2020	Muara Sugihan	Rejosari	Beton
8	2020	Muara Padang	Air Gading	Beton
9	2020	Muara Padang	Purwodadi	Beton
10	2020	Muara Padang	Karang Anyar	Beton
11	2020	Muara Telang	Telang Jaya	Beton
12	2020	Banyuasin II	Sungsang III	Beton
13	2020	Banyuasin II	Sungsang IV	Beton
14	2020	Selat Penuguan	Mekarsari	Beton
15	2020	Karang Agung Ilir	Tabala Jaya	Beton
16	2020	Karang Agung Ilir	Sumber Rejeki	Beton

No	Tahun	Kecamatan	Desa	Konstruksi
17	2020	Sumber Muara Telang	Muara Telang	Beton
18	2020	Air Kumbang	Teluk Tenggirik	Beton
19	2020	Makarti Jaya	Makarti Jaya	Beton
20	2020	Makarti Jaya	Muara Baru	Beton
21	2020	Makarti Jaya	Pendowo Harjo	Beton
22	2020	Pulau Rimau	Dana Mulya	Beton
II	2021			
1	2021	Air Salek	Enggal Rejo	Beton
2	2021	Air Salek	Upang	Beton
3	2021	Air Salek	Salek Agung	Beton
4	2021	Banyuasin I	Pulau Borang	Beton
5	2021	Muara Padang	Tirta Jaya	Beton
6	2021	Muara Padang	Tirto Raharjo	Beton
7	2021	Muara Padang	Air Gading	Beton
8	2021	Muara Padang	Sumber Makmur	Beton
9	2021	Muara Padang	Daya Utama	Beton
10	2021	Muara Padang	Daya Makmur	Beton
11	2021	Muara Sugihan	Daya Bangun Harjo	Beton
12	2021	Muara Sugihan	Mekar Jaya	Beton
13	2021	Muara Sugihan	Cendana	Beton
14	2021	Muara Sugihan	Daya Murni	Beton
15	2021	Tanjung Lago	Bangun Sari	Beton
16	2021	Selat Penuguan	Karang Manunggal	Beton
17	2021	Selat Penuguan	Purwodadi	Beton
18	2021	Selat Penuguan	Ringin Harjo	Beton
19	2021	Muara Telang	Sumber Mulya	Beton
20	2021	Muara Telang	Upang Cemara	Beton
21	2021	Makarti Jaya	Upang Mulya	Beton
22	2021	Pulau Rimau	Rukun Makmur	Beton
23	2021	Banyuasin II	Sungsang	Beton
24	2021	Tanjung Lago	Gasing	Beton
25	2021	Sumber Marga Telang	Karang Baru	Beton
III	2022			
1	2022	Makarti Jaya	Tanjung Mas	Beton
2	2022	Makarti Jaya	Tirta Kencana	Beton
3	2022	Air Saleh	Saleh Agung	Beton
4	2022	Air Saleh	Srikaton	Beton
5	2022	Air Saleh	Air Solok Batu	Beton
6	2022	Air Saleh	Enggal Rejo	Beton
7	2022	Muara Padang	Tanjung Baru	Beton
8	2022	Karang Agung Ilir	Karang Sari Primer 10	Beton
9	2022	Karang Agung Ilir	Mekar Sari	Beton
10	2022	Muara Telang	Telaga Makmur	Beton
11	2022	Muara Telang	Upang Karya	Beton
12	2022	Sumber Marga Telang	Talang Lubuk	Beton

No	Tahun	Kecamatan	Desa	Konstruksi
13	2022	Sumber Marga Telang	Terusan Dalam	Beton
14	2022	Sumber Marga Telang	Muara Telang Marga	Beton
15	2022	Sumber Marga Telang	Karang Anyar	Beton
16	2022	Rantau Bayur	Rantau Harapan	Beton
17	2022	Banyuasin III	Ujung Tanjung	Beton
18	2022	Muara Sugihan	Margo Mulyo 16	Beton
19	2022	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	Beton
20	2022	Banyuasin II	Teluk Payo	Beton
21	2022	Banyuasin II	Rimau Sungsang	Beton
22	2022	Selat Penuguan	Mekar Sari	Beton
23	2022	Tanjung Lago	Manggar Raya	Beton
24	2022	Talang Kelapa	Kenten Laut	Beton
25	2022	Air Kumbang	Sebubus	Beton

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Jumlah angkutan sungai (kapal) menurun akibat pembukaan jalan baru dan pendangkalan alur pelayaran akibat sedimentasi. Pelabuhan Boom Baru Palembang sebagai outlet utama pengangkutan barang juga menghadapi kendala, antara lain keterbatasan pengembangan karena berada di tengah permukiman, kedalaman alur pelayaran yang dangkal sehingga hanya dapat dilayari sekitar enam jam per hari sesuai pasang surut, serta panjang alur pelayaran yang cukup jauh, meliputi Sungai Musi (Kelas II dan III) sepanjang 221 *nautical mile*, Sungai Banyuasin (Kelas II) sepanjang 11 *nautical mile*, dan Sungai Lematang sepanjang 115 *nautical mile*.

Sumatera Selatan mempunyai banyak aliran sungai yang dimanfaatkan untuk moda transportasi. Daerah yang memiliki akses ke Alur Sungai terdapat 8 kabupaten, 62 kecamatan dan 356 desa/kelurahan atau 11,59% dari 3.079 desa di Sumatera Selatan. Angkutan sungai yang beroperasi di Perairan Sumatera Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami kenaikan sebesar 17% dengan jenis kapal antara lain: *speedboat*, *tugboat*, kapal gandeng/tunda, tongkang, jukung dan ponton. Jumlah Dermaga Sungai di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 89 unit yang tersebar di 10 Kabupaten di Sumatera Selatan. Sebagian besar (87%) dermaga-dermaga Sungai tersebut dalam kondisi baik. Dermaga Penyeberangan TAA menuju Bangka sudah beroperasi sejak tahun 2017 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan jumlah penumpang dimana hal itu disebabkan oleh wabah Covid-19 dimana jumlah penumpang

sebanyak 99.189 orang penumpang dan kendaraan yang diangkut 127.785 unit.

Tabel 2. 69 Produktivitas Angkutan Penyeberangan Tanjung Api - Api

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Trip	4.543	5.171	3.074	3.160	3.204
2	Jumlah Penumpang	287.969	67.525	65.096	66.263	52.546
3	Jumlah Kendaraan	108.006	136.071	105.503	99.773	94.664

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Tabel 2. 70 Intensitas Angkutan Kendaraan Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Gol I (Sepeda)	11	13	13	25	11
2	Gol II (Sepeda Motor)	17.881	14.849	17.934	19.695	20.292
3	Gol III (Bemo)	113	54	154	76	120
4	Gol IV (M.bus, Jeep dan sejenisnya)	36.605	45.781	43.181	37.891	35.943
5	Gol V (truck, bus dan sejenisnya)	53.311	64.060	36.788	34.779	31.761
6	Gol VI (truck Fuso)	5.889	5.725	9.401	6.557	5.935
7	Gol VII (truck tronton)	1.024	706	1.437	876	602

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024 (data mutakhir)

Sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional Darmaga Laut Regional Tanjung Api-Api ditetapkan sebagai Pelabuhan Pengumpul. Pada tahun 2019 dermaga tersebut sudah diresmikan dan mulai beroperasi sebagai pelabuhan Pengumpul, Kementerian Perhubungan menunjuk PT. Pelindo dan KSOP untuk mengelolanya.



Gambar 2. 99 Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

(4). Infrastruktur Transportasi Udara

Pelabuhan udara komersial pada tahun 2022 di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 3 buah, yaitu Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) di Kota Palembang, Bandar Udara Silampari di Kota Lubuklinggau dan Bandar Udara Atung Bungsu yang terletak di Kota Pagar Alam. Jumlah penerbangan komersial terjadwal yang datang untuk domestik dan internasional di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang di tahun 2022 tercatat sebanyak 8.629 unit pesawat atau naik 30,66% dan sebanyak 43 unit pesawat yang naik sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2021. Jumlah penerbangan komersial terjadwal yang berangkat untuk domestik dan internasional di tahun 2022 tercatat sebanyak 8.628 unit pesawat atau naik 30,12% dan sebanyak 47 unit pesawat yang juga naik sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2021.

Transportasi Udara

Angkutan udara di Sumatera Selatan terus dikembangkan dan direvitalisasi. Jumlah bandara yang ada di Sumatera Selatan yang beroperasi ada 3 yaitu SMB II Palembang, Silampari Lubuk Linggau dan Atung Bungsu Pagar Alam. Satu-satunya bandara terbesar di Sumatera Selatan adalah Bandara SMB II. Sepanjang tahun 2019 lalu Bandara SMB II Palembang telah berhasil memfasilitasi 3,966,122 orang penumpang datang atau berangkat menggunakan pesawat udara, baik rute domestik maupun internasional. Tren menurun keberangkatan penumpang domestik dan internasional menggunakan fasilitas Bandara SMB II tahun 2020 s.d.

2021 rata-rata di bawah 100%/tahun yang disebabkan wabah Covid-19, dan perlahan meningkat di tahun 2022 sampai dengan 2024.

Tabel 2. 71 Lalu Lintas Angkutan Udara Penumpang Melalui Bandara SMB II Palembang

Datang/ berangkat	Trayek angkutan	Kondisi yang ada	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
BERANGKAT	Domestik	Pesawat	8.895	6.664	8.607	9.345	9.395
		Penumpang	697.787	530.551	977.362	1.322.376	1.378.293
	Internasional	Pesawat	0	0	0	73	125
		Penumpang	0	0	0	11.304	34.577
DATANG	Domestik	Pesawat	8.775	6.634	8.540	9.349	9.400
		Penumpang	735.522	521.074	965.579	1.313.711	1.370.741
	Internasional	Pesawat	0	0	0	92	129
		Penumpang	0	0	0	15.169	34.665
Total		Pesawat	37.265	17.670	13.298	17.147	19.049
		Penumpang	3.966.122	1.433.309	1.051.625	1.942.941	2.749.034

Sumber: PT. Angkasa Pura II Palembang, 2024

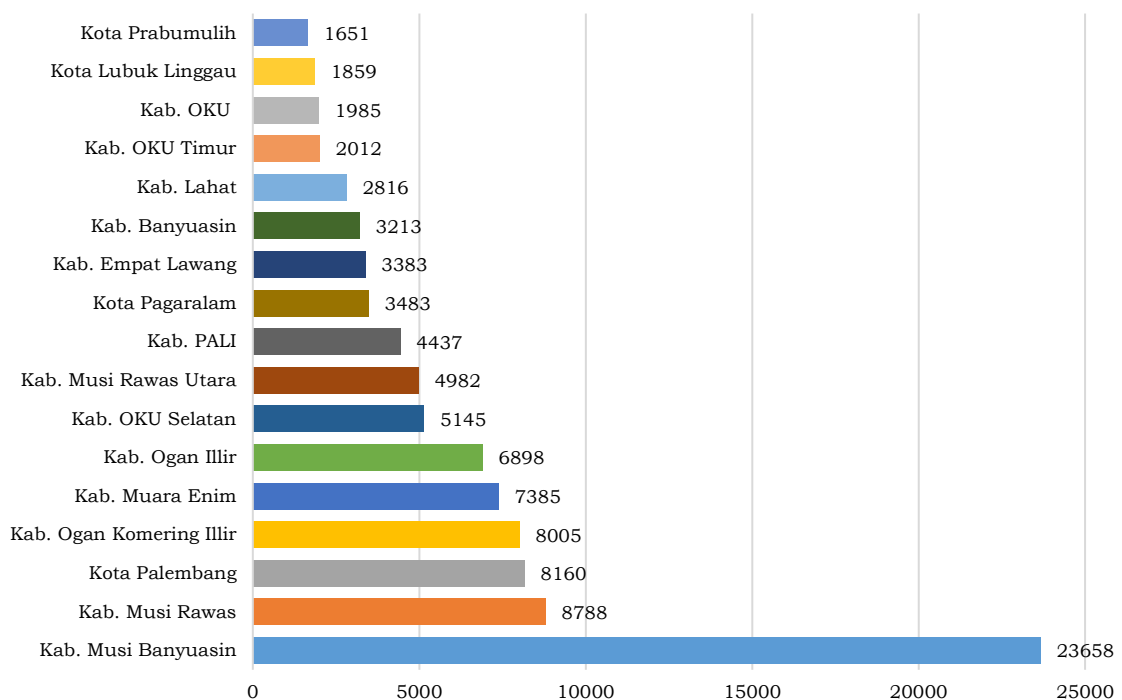
Tabel 2. 72 Lalu Lintas Angkutan Udara Penumpang Melalui Bandara Silampari Lubuk Linggau

Tahun	Jenis Pesawat	Pesawat		Penumpang (Org)		Bagasi (Kg)		Cargo (Kg)	
		Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
2019	ATR72	337	337	14.755	17.140	15.602	23.649	6.781	998
	B737-500	355	355	33.465	29.756	251.284	211.368	38.527	39.166
	A320	365	365	40.152	40.601	288.066	266.246	23.074	17.340
2020	ATR72	129	129	5.067	6.240	7.638	9.953	4.561	2.459
	B737-500	69	69	4.896	3.972	37.435	28.505	14.094	5.505
	A320	124	124	14.372	133.349	108.490	116.898	14.794	11.296
2021	ATR72	24	24	724	792	2.568	2.289	53	5
	B737-500	1	1	64	147	481	1.378	13	29
	A320	79	78	7.606	8.571	58.869	72.593	2.984	4.860
2022	A320	168	168	21.058	21.388	178.351	178.259	1.021	-
2023	A320	317	317	42.673	41.847	347.433	346.401	5.891	26
2024	A320	376	376	51.489	49.723	410.888	372.947	8.239	0

Sumber: Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Silampari, 2024

2) Infrastruktur Permukiman dan Perumahan

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 97.680 unit, paling sedikit berada di Kota Prabumulih sebesar 1.651 unit dan paling tinggi ada di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 23.658 unit. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2018 – 2023 tersebar di Kabupaten/Kota sebanyak 36.131 unit sehingga masih terdapat GAP sebesar 61.729 unit. Dilihat dari *Backlog* kepemilikan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pembangunan perumahan berbasis komunitas. Perumahan Berbasis Komunitas merupakan program pemerintah yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam hal ini adalah komunitas masyarakat yang memiliki pekerjaan tertentu. MBR yang tergabung dalam komunitas ini akan membeli lahan perumahan yang telah disediakan dan difasilitasi oleh komunitasnya, sedangkan untuk bahan bangunan rumah dan upah dibantu oleh pemerintah.



Gambar 2. 100 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

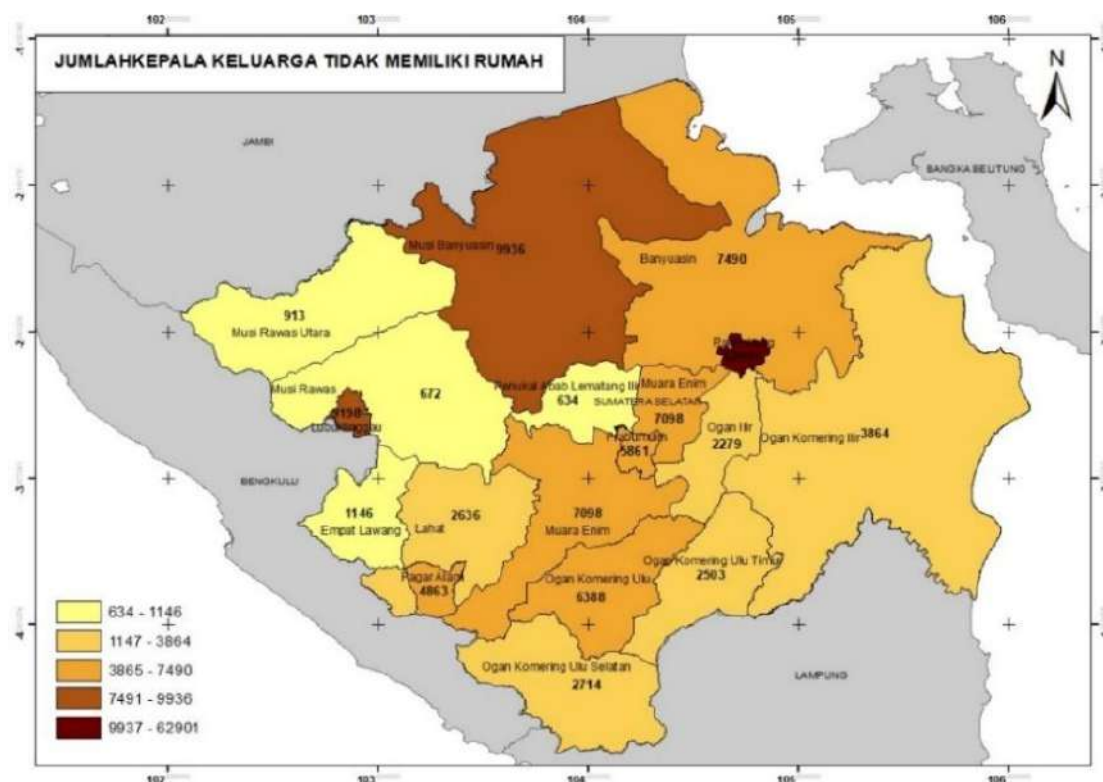
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Tabel 2. 73 Jumlah Kepala Keluarga Kekurangan Rumah (*Backlog*) di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

NO	WILAYAH	JML PENDUDUK TAHUN 2023	JUMLAH KK	Status Kepemilikan Rumah (unit)				Backlog (4-5) Unit
				Milik sendiri	Kontrak/ sewa	Bebas Sewa	Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ogan Komering Ulu	383,039	116,687	94,703	5,683	15,624	677	21,759
2	Ogan Komering Ilir	807,085	263,200	235,827	2,290	25,083	-	27,373
3	Muara Enim	640,962	200,314	173,973	3,946	20,833	1,562	26,341
4	Lahat	450,281	137,318	116,226	4,477	15,874	742	21,092
5	Musi Rawas	411,787	135,040	122,765	486	11,924	-	12,275
6	Musi Banyuasin	651,950	222,445	196,308	5,650	19,775	734	26,137
7	Banyuasin	885,902	277,476	251,310	7,686	13,985	4,467	26,166
8	OKU Selatan	429,535	124,857	106,828	5,693	12,323	-	18,029
9	OKU Timur	674,184	218,197	212,698	-	5,499	-	5,499
10	Ogan Ilir	436,141	136,952	123,078	1,383	12,024	466	13,873
11	Empat Lawang	345,641	102,374	83,650	2,600	16,124	-	18,724
12	Pali	205,384	63,199	56,273	575	6,137	215	6,927
13	Murata	198,413	62,961	54,178	1,259	6,498	1,026	8,783
14	Kota Palembang	1,718,440	530,007	369,150	48,920	106,266	5,724	160,857
15	Kota Prabumulih	203,312	62,573	52,786	5,300	4,480	-	9,786
16	Kota Pagar Alam	149,199	45,797	34,733	3,183	6,709	1,172	11,065
17	Kota Lubuk Linggau	246,046	74,320	60,935	5,529	7,856	-	13,385
Sumatera Selatan		8,837,301	2,773,719	2,345,422	104,661	307,014	16,785	428,073

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Berdasarkan Data Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2023 BPS, Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang tidak memiliki rumah pada tahun 2023 sebanyak 2.773.719 KK dan jumlah KK yang memiliki rumah sendiri pada tahun 2023 sebanyak 2.345.422 KK.



Gambar 2. 101 Jumlah Kepala Keluarga MBR yang Tidak Memiliki Rumah di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2023 (diolah)

3) Infrastruktur Air Minum

Air bersih merupakan kebutuhan pokok yang memengaruhi aktivitas masyarakat, dan seiring pertumbuhan penduduk, kebutuhan ini terus meningkat. Di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 18 perusahaan penyedia air bersih, terdiri atas 16 perusahaan pemerintah dan 2 perusahaan swasta di 17 kabupaten/kota. Pada tahun 2020 kapasitas produksi potensial mencapai 10.181 liter per detik, dengan kapasitas efektif 9.102 liter per detik. Berdasarkan Data Susenas BPS 2023, cakupan pelayanan air minum layak sebesar 87,19%, terdiri dari 28,62% akses perpipaan dan 7,59% akses air minum aman.

Data RPJMN 2020-2024 menunjukkan bahwa akses rumah tangga terhadap fasilitas air bersih layak di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2019 sebesar 64,75% menjadi 87,19% pada tahun 2023. Pada tahun 2023, akses capaian tertinggi dicapai Kota Lubuklinggau sebesar 97,52% dan terendah di Kabupaten Empat Lawang sebesar 65,94%. Untuk meningkatkan capaian tersebut pemerintah pusat telah menentukan kegiatan prioritas strategis berupa Akses Air Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) di mana pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha.

4) Listrik

Produksi listrik di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 (data termutakhir) sebesar 8.011.695.824 kWh dan listrik terjual sebesar 6.278.498.208 kWh. Jumlah pelanggan listrik di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 sebanyak 2.484.605 pelanggan yang didominasi oleh jumlah pelanggan untuk rumah tangga. Sementara itu, persentase rumah tangga menggunakan sumber penerangan utama dari listrik sebesar 99,61% pada tahun 2024. Tingkat elektrifikasi listrik tahun 2021 sebesar 99,37% dan pertumbuhan listrik rata-rata 6,66%, pertumbuhan listrik ini mengindikasikan perekonomian daerah mengalami peningkatan karena peningkatan konsumsi listrik diiringi peningkatan aktivitas industri, retail, dan pariwisata. Energi listrik di Sumatera Selatan masih mengandalkan PLTU dan PLTG yang bersumber dari energi fosil batubara. Porsi kapasitas pembangkit listrik terbarukan mencapai 7,68% dan masih di bawah porsi kapasitas nasional yaitu sebesar 15,47%. Provinsi Sumatera Selatan juga memanfaatkan jaringan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan perusahaan. Adanya

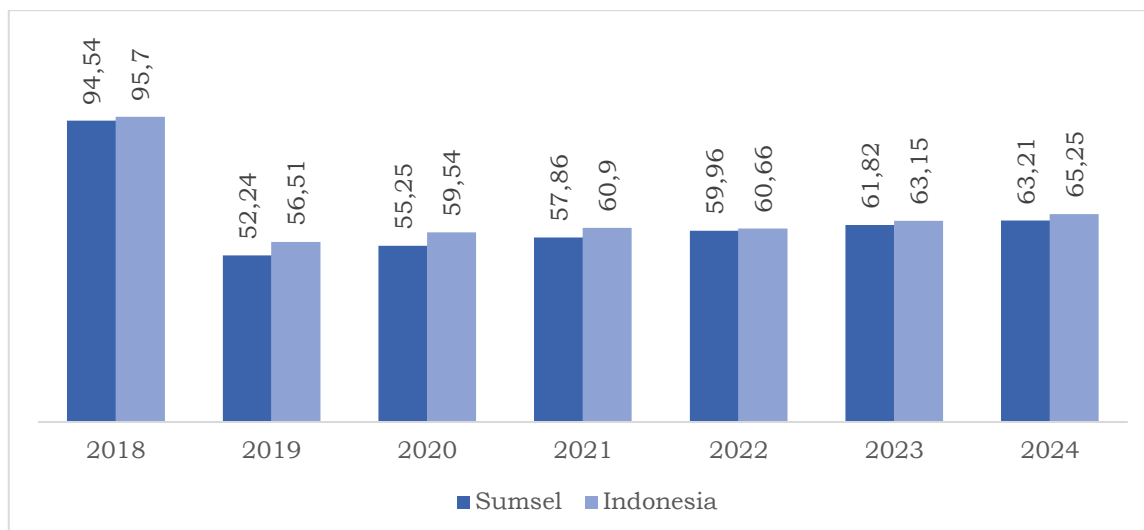
konversi dari BBM ke bahan bakar gas memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan jaringan gas.

5) Telekomunikasi

Semakin luas wilayah jangkauan jaringan telekomunikasi digital akan memberikan dampak yang signifikan terhadap percepatan pembangunan daerah dari ekonomi, bisnis, pariwisata dan pendidikan. Jangkauan jaringan telekomunikasi sangat dibutuhkan dalam mendorong digitalisasi ekonomi. Jangkauan 4G di permukiman Sumatera Selatan tahun 2022 (data termutakhir) sebesar 98,22%. Masih terdapat 38 desa yang belum sama sekali terjangkau jaringan komunikasi dan sebanyak 145 desa belum terjangkau jaringan internet. Desa-desa yang paling banyak belum terjangkau jaringan internet yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir dan Ogan Komering Ilir. Daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan komunikasi karena berlokasi di kawasan terpencil dengan topografi perbukitan dan perairan yang sulit di akses.

B. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Pada 2018, rumah tangga dengan akses hunian layak di Sumatera Selatan mencapai 94,54%, namun turun drastis menjadi 52,24% pada 2019 akibat perubahan metode pengukuran. Setelah itu, terjadi peningkatan bertahap hingga 63,21% pada 2024. Jika dibandingkan rata-rata nasional, Sumsel sempat berada di bawah capaian Indonesia, yang meningkat dari 56,51% (2019) menjadi 65,25% (2024). Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan, laju peningkatan akses hunian layak di Sumatera Selatan masih lebih lambat daripada nasional, menunjukkan perlunya perhatian lebih pada perumahan, infrastruktur dasar, serta program bantuan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.



Gambar 2. 102 Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Hunian Layak Sumatera Selatan
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

C. Persentase Desa Mandiri

IDM merupakan indeks komposit yang terbentuk dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa, yang masing-masing terdiri dari beberapa dimensi dan indikator. Berdasarkan IDM, desa diklasifikasikan menjadi lima status: Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal. Berdasarkan Permendes dan PDT Nomor 2 Tahun 2016, terdapat 865 desa tertinggal dan 30 desa sangat tertinggal. Saat ini, di Sumatera Selatan hanya terdapat desa dengan kategori tertinggal. Kategori dan jumlah desa ditetapkan oleh Kemendes PDT melalui Indeks Desa Membangun (IDM), yang juga menjadi dasar Kementerian Keuangan dalam pengalokasian Dana Desa. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021, Alokasi Afirmasi untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tertinggi adalah 1%, sedangkan Alokasi Kinerja untuk desa berkembang, maju, dan mandiri serta indikator lainnya sebesar 4% dari total Dana Desa.

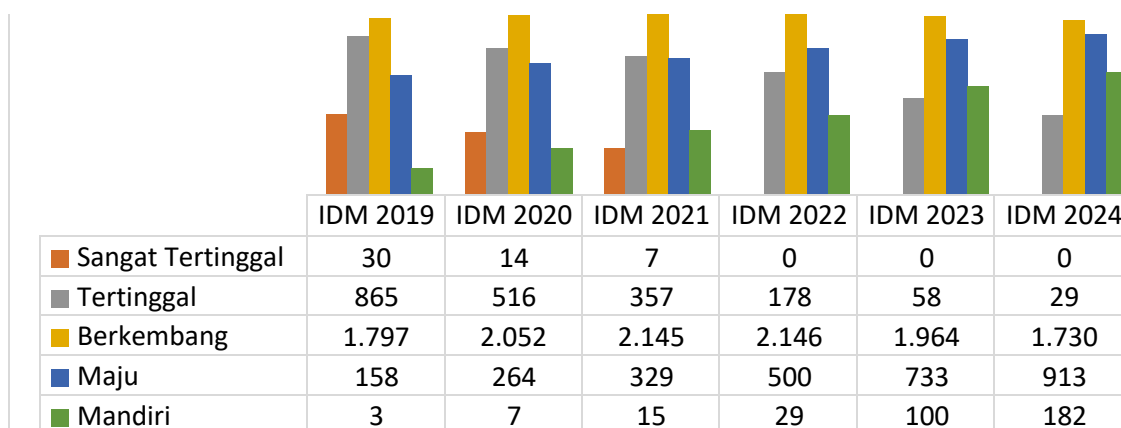
Tabel 2. 74 Kategori Desa di Sumatera Selatan berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Kategori				
				Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
1	Ogan Komering Ulu	13	143	0	4	82	44	13
2	Ogan Komering Ilir	18	314	0	0	252	59	3
3	Muara Enim	22	245	0	0	128	99	18

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Kategori				
				Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
4	Lahat	24	360	0	2	199	146	15
5	Musi Rawas	14	186	0	0	99	82	5
6	Musi Banyuasin	15	229	0	1	34	91	102
7	Banyuasin	21	288	0	0	171	106	11
8	OKU Selatan	19	252	0	24	189	39	0
9	OKU Timur	20	305	0	0	156	145	4
10	Ogan Ilir	16	227	0	0	181	44	2
11	Empat Lawang	10	147	0	0	127	17	3
12	Pali	5	65	0	0	37	22	6
13	Muratara	7	82	0	0	69	13	0
15	Kota Prabumulih	4	12	0	0	6	6	0
Total		208	2.855	0	29	1.730	913	182

Sumber: Indeks Desa Membangun Kemendesa Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dari total jumlah desa di Sumatera Selatan sebanyak 2.855 desa. Sejak tahun 2022 sudah tidak terdapat kategori desa dengan status desa sangat tertinggal, namun dari 2.855 desa sekitar 1.01% atau 29 desa masih merupakan desa tertinggal. Jumlah tersebut sudah sangat berkurang dibandingkan dengan Indeks Desa Membangun tahun 2023, meskipun demikian tetap diharapkan ada intervensi dari Pemerintah Daerah berupa Program/Kegiatan yang diharapkan dapat terus mengurangi jumlah desa tertinggal atau meningkatkan statusnya menjadi desa maju dan mandiri.



Gambar 2. 103 Perkembangan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2019-2024 di Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Indeks Desa Membangun-Kemendesa, 2024

Tren capaian Indeks Desa Membangun tahun 2019–2024 menunjukkan perkembangan positif. Desa tertinggal menurun dari 58 menjadi 29 desa pada 2024, sementara desa berkembang berkurang dari 1.964 menjadi 1.730 desa karena statusnya meningkat menjadi desa maju. Desa maju bertambah dari

733 menjadi 913 desa, dan desa mandiri meningkat dari 100 menjadi 182 desa. Berdasarkan Indeks Desa Membangun tahun 2024 dari 2.855 desa di Sumatera Selatan, komposisi paling banyak adalah desa berkembang yaitu 60,60% atau 1.730 desa, yang kedua adalah desa maju yaitu 31,98% atau 913 desa.

Tabel 2. 75 Persentase Desa Mandiri Tahun 2019-2024 di Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Jumlah Desa di Sumsel	Jumlah Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri
2019	2853	3	0,11
2020	2853	7	0,25
2021	2853	15	0,53
2022	2843	29	1,02
2023	2855	100	3,50
2024	2855	182	6,37

Sumber: Indeks Desa Membangun Kemendesa Tahun 2024

Tren persentase desa mandiri di Sumatera Selatan menunjukkan perkembangan yang cepat dan berkelanjutan dalam enam tahun terakhir, terutama sejak tahun 2022. Persentase desa mandiri mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari 0,11% (2019) menjadi 6,41% (2024). Kenaikan yang paling terlihat terjadi di tahun 2022-2023 sebesar 2,48%. Dan tahun 2023-2024 sebesar 2,87%. Keberhasilan program infrastruktur dan tata kelola desa menjadi kunci dalam peningkatan status desa yang ada, seperti adanya Afirmasi Dana Desa bagi desa-desa yang kurang berkembang, Penguatan kemampuan perangkat desa, Program digitalisasi dan ekonomi desa yang berfokus pada potensi lokal dan Evaluasi dan klasifikasi IDM lebih disiplin dan terfokus.

Kecenderungan peningkatan status desa mandiri perlu dilakukan, oleh karena itu perlu peningkatan kerjasama antar sektor supaya lebih banyak desa yang berkembang dan maju dapat mencapai status mandiri. Adapun tantangan yang harus dihadapi antara lain Kesenjangan antar daerah seperti Kabupaten Muratara, OKUS dan Kota Prabumulih yang masih belum memiliki desa mandiri, kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa masih tidak merata serta keterbatasan akses pasar dan teknologi untuk desa yang bergantung pada pertanian dan perikanan.

2.1.3.6 Stabilitas Ekonomi Makro

A. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan adalah Indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Selatan. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah provinsi. Besaran Penerimaan Pajak Daerah diperoleh dari pendapatan pajak yang bersumber dari kewenangan pemungutan pajak oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komponen utama Pajak Daerah mencakup Jenis Pajak Daerah (berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah). Jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok

Realisasi Pendapatan Pajak di Provinsi Sumatera Selatan cenderung meningkat dari tahun ke tahun begitupun dari setiap komponen pembentuknya. Peningkatan ini juga terjadi pada Pajak Daerah yang bersumber dari 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun capaian pendapatan pajak dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 76 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi dan 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2020 sampai dengan 2024 (Miliar Rupiah)

	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Pajak Daerah Provinsi	3.081	3.523	4.461	4.649	4.744
Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten/Kota	1.531	1.575	2.192	2.378	2.477
Total Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Selatan	4.613	5.100	6.653	7.027	7.222

Sumber: Bapenda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025

Berdasarkan data Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 sampai dengan 2024 dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), maka dapat dihitung Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut.

Tabel 2. 77 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024

Tahun	Pajak Daerah (miliar Rp)	PDRB (miliar Rp)	Rasio Pajak terhadap PDRB (%)
2020	4.613	454.607	$(4.613 / 454.607) * 100 \approx 1,0148$
2021	5.100	493.637	$(5.099 / 493.637) * 100 \approx 1,0331$
2022	6.653	590.079	$(7.122 / 590.079) * 100 \approx 1,1276$
2023	7.027	629.169	$(7.027 / 629.169) * 100 \approx 1,1170$
2024	7.122	663.962	$(7.122 / 663.962) * 100 \approx 1,0878$

Sumber : Bapenda dan BPS tahun 2025 (data diolah)

Semakin besar persentase rasio pajak terhadap PDRB, maka kontribusi penerimaan pajak terhadap perekonomian daerah semakin tinggi yang artinya kinerja fiskal yang baik yang mana pemerintah daerah memiliki ruang fiskal lebih besar untuk pembangunan. Hal Ini juga bisa menunjukkan efisiensi pemungutan dan kepatuhan pajak serta dapat mengindikasikan bahwa basis pajak (jumlah objek pajak dan subjek pajak) meningkat, artinya lebih banyak pelaku ekonomi yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak.

Adapun kriteria penilaian rasio pajak terhadap PDRB berdasarkan hasil kajian dengan judul “Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan daerah” tahun 2019 oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI mengkategorikan penilaian rasio ini menjadi 5 bagian yaitu kategori sangat rendah dengan nilai rasio $< 1\%$, kategori rendah dengan nilai rasio $1\% - < 2\%$, kategori sedang dengan nilai rasio $2\% - < 3\%$, kategori tinggi dengan nilai rasio $3\% - < 4\%$, dan kategori Sangat Tinggi/Optimal dengan nilai ratio $\geq 4\%$.

Kriteria Penilaian Rasio Pajak terhadap PDRB

Rasio Pajak terhadap PDRB	Kategori	Interpretasi Umum
< 1%	Sangat Rendah	Pemungutan pajak sangat tidak optimal. Potensi pajak belum tergali.
1% – < 2%	Rendah	Kinerja pajak belum maksimal. Masih banyak ruang untuk peningkatan.
2% – < 3%	Sedang	Kinerja pajak cukup baik, tetapi masih bisa ditingkatkan.
3% – < 4%	Tinggi	Kinerja pemungutan pajak tergolong baik. Potensi sudah mulai tergarap.
≥ 4%	Sangat Tinggi/Optimal	Pemungutan pajak sangat optimal. Potensi pajak tergarap maksimal. Perlu dijaga keseimbangannya.

Sumber : Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah (2019).

Berdasarkan tabel hasil perhitungan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 sampai dengan 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 s.d 2024 berkisar di angka 1% – < 2%.

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 berturut turut 1,0148%, 1,0331%, 1,1276%, 1,1170%, dan 1,0878 %, yang artinya berkisar di angka 1% – < 2% dan memiliki kategori rendah yang artinya menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap total aktivitas ekonomi (PDRB) masih kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa pemungutan pajak sangat tidak optimal dan masih banyak potensi pajak yang belum tergali. Pendapatan daerah dari pajak masih belum optimal dalam menangkap potensi ekonomi riil. Hal ini bisa berarti struktur ekonomi yang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem perpajakan daerah, atau masih banyak sektor informal yang belum tergarap.

2. Pertumbuhan PDRB dan Pajak Daerah Terus Meningkat akan tetapi rasionya menurun.

Meskipun nominal PDRB dan Pajak Daerah provinsi Sumatera Selatan dari tahun ke tahun terus meningkat, akan tetapi rasio terhadap PDRB justru menurun. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pajak daerah, dan pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung mengerek pertumbuhan pajak yang artinya pertumbuhan

terjadi di sektor yang tidak dikenai pajak daerah secara langsung (misalnya ekspor, migas) dan kepatuhan pajak masih rendah, atau efisiensi pemungutan pajak menurun termasuk dikarenakan kewenangan pemungutan pajak terbagi antara kewenangan kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat.

3. Implikasi Fiskal

Penurunan rasio ini menunjukkan potensi pendapatan pajak daerah belum optimal, hal ini terjadi karena kurangnya efisiensi dalam hal pemungutan pajak dan kurangnya kepatuhan pajak dari basis pajak (jumlah objek pajak dan subjek pajak) yang kurang berkontribusi terhadap penerimaan pajak serta belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya alam yang dimiliki seperti peningkatan produktifitas dan hilirisasi.

Hal ini tentunya dapat mempengaruhi kapasitas fiskal daerah dalam mendanai pembangunan dan pelayanan publik. Semakin besar persentase rasio pajak terhadap PDRB, maka kontribusi penerimaan pajak terhadap perekonomian daerah semakin tinggi yang artinya kinerja fiskal yang baik yang mana pemerintah daerah memiliki ruang fiskal lebih besar untuk pembangunan. Ketergantungan Tinggi pada Transfer Pusat, dengan rasio pajak yang rendah, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cenderung masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (seperti DAU, DAK, DBH). Ketergantungan ini bisa mengurangi otonomi fiskal daerah dan menghambat fleksibilitas dalam merancang kebijakan pembangunan lokal.

4. Perlunya Intervensi Kebijakan

Rasio pajak daerah terhadap PDRB yang rendah dan menurun menunjukkan bahwa daerah belum sepenuhnya mampu menarik penerimaan sebanding dengan pertumbuhan ekonominya. Diperlukan reformasi kebijakan fiskal daerah dan strategi peningkatan kapasitas pemungutan pajak. Agar rasio pajak tidak menurun, diperlukan kebijakan untuk memperbaiki sistem perpajakan daerah, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) perlu melakukan pembinaan untuk mendorong perangkat daerah pemungut pajak melakukan upaya dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah, sesuai sektor potensi yang dimiliki perangkat daerah.

5. Peluang dalam Optimalisasi Pajak Daerah

Optimalisasi pajak daerah harus dilakukan terutama terkait pengelolaan potensi sumber daya alam yang dimiliki melalui eksploitasi yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan hilirisasi termasuk peningkatan SDM bagi pengelolaan dan digitalisasi serta strategi perpajakan yang tepat, potensi peningkatan penerimaan pajak daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga rasio pajak dapat meningkat atau minimal stabil. Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang tepat perlu digunakan, serta digitalisasi sistem pemungutan untuk kemudahan pelayanan perpajakan dan menutup celah kebocoran.

6. Evaluasi Terhadap Struktur Ekonomi Lokal

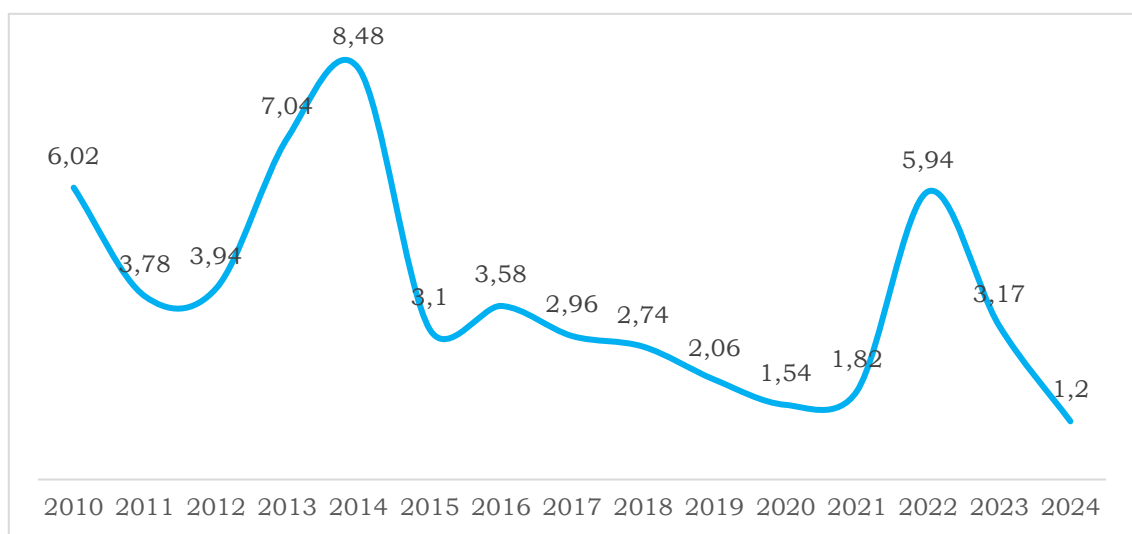
Jika sebagian besar PDRB berasal dari sektor yang tidak menghasilkan penerimaan pajak daerah (misalnya industri pertambangan migas, perdagangan besar nasional), maka rasio akan tetap rendah meskipun PDRB tinggi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang berbasis lokal/kewilayahan sesuai dengan potensi yang ada di kabupaten/kota, sehingga memberikan kontribusi langsung ke peningkatan pajak daerah, seperti:

- a) UMKM
- b) Pariwisata
- c) Jasa lokal
- d) Properti dan konstruksi
- e) Perhotelan
- f) Kuliner
- g) dll

B. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi yang merefleksikan daya beli masyarakat. Data inflasi di Sumatera Selatan dari tahun 2010-2024 menunjukkan pola yang fluktuatif seiring dengan dinamika ekonomi nasional dan global. Pada awal periode, inflasi cukup tinggi, bahkan mencapai puncaknya pada tahun 2014 sebesar 8,48%, yang besar dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM dan tekanan biaya produksi. Setelah itu, mulai tahun 2015-2019, inflasi cenderung stabil dan lebih terkendali di kisaran 2-3%, mencerminkan kondisi ekonomi yang kondusif dan kebijakan pengendalian harga yang efektif.

Memasuki tahun 2020, saat pandemi COVID-19 melanda, inflasi turun drastis menjadi 1,54% karena menurunnya daya beli akibat adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar sehingga permintaan masyarakat pun menurun. Pada 2022, inflasi kembali melonjak ke 5,94% akibat tekanan global seperti konflik Rusia-Ukraina dan gangguan pasokan pangan dan energi. Namun, kondisi ini mulai membaik di tahun-tahun berikutnya, dengan inflasi turun menjadi 3,17% pada 2023 dan kembali rendah di angka 1,2% pada 2024. Penurunan ini menunjukkan stabilitas harga yang semakin baik, meskipun inflasi yang terlalu rendah juga perlu diwaspadai karena bisa menandakan lemahnya daya beli atau permintaan dalam negeri.



Gambar 2. 104 Inflasi Sumatera Selatan
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

A. Indeks Reformasi Hukum

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Reformasi Birokrasi perlu dilaksanakan di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Reformasi ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025, yang menjadi acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Salah satu pilar pentingnya adalah reformasi hukum, yang bertujuan menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Efektivitas Reformasi Hukum diukur melalui Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebagai indikator kinerja utama.

Indeks Reformasi Hukum (IRH) digunakan untuk mengukur kinerja reformasi hukum di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, memberikan gambaran kemajuan serta tantangan pelaksanaannya. IRH berfokus pada identifikasi dan pemetaan regulasi, termasuk regulasi baru, perubahan regulasi (re-regulasi), penghapusan regulasi (deregulasi), serta penguatan sistem regulasi nasional. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem hukum, menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, serta mendorong tata kelola hukum yang lebih merata di seluruh daerah di Indonesia.

Pada tahun 2024, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah melakukan penilaian terhadap Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan Reformasi Hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 adalah mencapai angka 87,92 dengan kategori A (SANGAT BAIK). Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 78 Indikator Indeks Reformasi Hukum

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	25
1	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: a.UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b.Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang- Undangan; c.Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.	18	18
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah	6	6
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6	6
c	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah	6	6
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau <i>online</i>	7	7
II	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (<i>legal drafter</i>) yang berkualitas	25	22,5
1	Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang- undangan	7	6,3
2	Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang- undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	6	5,4
3	Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang- undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	12	10,8
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	30	17,1

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
1	Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (<i>existing</i>) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi	8	4
2	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	10	5
3	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah	6	5,1
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksiting/yang sudah berlaku di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	6	3
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-Undangan	20	15
1	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	20	15
NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM		100	79,6

B. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Perkembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektifitas, pelayanan prima. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi penting dalam keberlangsungan penyelenggaraan yang berkelanjutan dan berkeadilan di masa yang akan datang. Kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan dengan baik, dengan dibentuknya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 63 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam pelaksanaan penilaian SPBE yang didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mendapat nilai indeks SPBE : 3,00 dengan Predikat Baik pada tahun 2024 dan diharapkan menjadi lebih baik lagi di tahun berikutnya. Berikut nilai Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2020-2024.

Tabel 2. 79 Nilai Indeks SPBE Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2020-2024

Nama Instansi	2020		2021		2022		2023		2024	
	Indeks	Predikat	Indeks	Predikat	Indeks	Predikat	Indeks	Predikat	Indeks	Predikat
Provinsi Sumatera Selatan	2,83*	Baik	2,62	Baik	2,62*	Baik	2,62	Baik	3,00	Baik
Musi Banyuasin	2,11**	Cukup	2,82	Baik	2,83	Baik	2,85	Baik	3,62	Sangat Baik
Ogan Komering Ulu	2,94	Baik	2,39	Cukup	2,67	Baik	2,67	Baik	2,62	Baik
Muara Enim	3,14**	Baik	2,73	Baik	2,91	Baik	3,00	Baik	3,29	Baik
Lahat	2,03**	Cukup	2,03	Cukup	2,14	Cukup	2,23	Cukup	2,33	Cukup
Musi Rawas	2,79	Baik	2,00	Cukup	1,92	Cukup	2,64	Baik	3,09	Baik
Ogan Komering Ilir	3,12	Baik	2,49	Cukup	2,39	Cukup	3,04	Baik	3,55	Sangat Baik
Banyuasin	2,03	Cukup	2,00	Cukup	1,86	Cukup	2,13	Cukup	2,71	Baik
Ogan Komering Ulu Timur	1,16*	Kurang	1,16*	Kurang	2,27	Cukup	2,96	Baik	2,61	Baik
Ogan Komering Ulu Selatan	2,07**	Cukup	2,19	Cukup	1,93	Cukup	2,31	Cukup	2,40	Cukup
Ogan Ilir	1,21**	Kurang	1,29	Kurang	2,52	Cukup	2,91	Baik	2,94	Baik
Empat Lawang	1,60**	Kurang	2,23	Cukup	2,23***	Cukup	1,97	Cukup	2,34	Cukup
Musi Rawas Utara	1,30*	Kurang	1,09	Kurang	1,09***	Kurang	2,35	Cukup	2,38	Cukup
Palembang	3,02	Baik	2,66	Baik	2,66***	Baik	2,66	Baik	3,51	Sangat Baik
Pagar Alam	1,76**	Kurang	1,06	Kurang	1,06***	Kurang	2,14	Cukup	2,54	Cukup
Lubuklinggau	1,97**	Cukup	1,71	Kurang	1,71***	Kurang	2,86	Baik	2,64	Baik
Prabumulih	1,72**	Kurang	2,56	Cukup	2,56***	Cukup	3,35	Baik	3,37	Baik
Penulak Abab Lematang Ilir	1,20*	Kurang	1,99	Cukup	1,99***	Cukup	2,45	Cukup	2,66	Baik

Sumber: KepmenPAN RB tentang Hasil Evaluasi SPBE Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024

*) Indeks SPBE 2018; *) Indeks SPBE 2019; ***) Indeks SPBE 2021

Dilihat dari nilai setiap pemerintah kabupaten/kota, pada tahun 2020 hingga 2024, secara umum seluruh pemerintah daerah mengalami perbaikan Indeks SPBE. Pada tahun 2024, sebagian besar pemerintah kabupaten/kota mendapatkan predikat Baik, bahkan terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota yang mendapat predikat Sangat Baik, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Namun, masih terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang mendapat predikat Cukup.

C. Indeks Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan kualitas birokrasi. Implementasi reformasi birokrasi di Provinsi Sumatera Selatan terlihat dari hasil evaluasi reformasi yang memiliki Indeks RB Sangat Baik (predikat BB). Akan tetapi, keberhasilan reformasi birokrasi di pemerintah

provinsi belum sepenuhnya diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota, hal ini terlihat dari sebagian kabupaten/kota yang mendapat predikat RB dengan kategori Baik (predikat B). Oleh karena itu ke depan perlu didorong penguatan tata laksana, penguatan akuntabilitas, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2. 80 Indeks Reformasi Birokrasi, SAKIP, dan Indeks Pelayanan Publik Sumatera Selatan 2024

No	Kabupaten & Kota	RB	SAKIP	IPP
1	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BB	B	A (4,57)
2	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	B	B	A (4,52)
3	Pemerintah Kab. Muara Enim	A	BB	A (4,56)
4	Pemerintah Kab. Lahat	B	B	B (3,89)
5	Pemerintah Kab. Musi Rawas	BB	BB	A (4,51)
6	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	BB	B	A (4,51)
7	Pemerintah Kab. Banyuasin	BB	B	A-(4,46)
8	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	BB	B	A (4,58)
9	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	B	B	A-(4,14)
10	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	BB	B	A-(4,40)
11	Pemerintah Kab. Empat Lawang	B	B	A-(4,07)
12	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	B	B	A-(4,34)
13	Pemerintah Kota Palembang	A	BB	A (4,66)
14	Pemerintah Kota Pagar Alam	BB	B	B (3,99)
15	Pemerintah Kota Lubuklinggau	B	BB	A-(4,44)
16	Pemerintah Kota Prabumulih	BB	B	A-(4,46)
17	Pemerintah Kab. Penukal Abab Pematang Ilir	B	B	A-(4,44)

Sumber: <https://1data.menpan.go.id/> 2024

Dalam nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 terkategori pelayanan prima. Secara umum Indeks Pelayanan Publik pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan tergolong sangat baik dan pelayanan prima, walaupun masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang terkategori B, yaitu Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam. Beberapa faktor yang menyebabkan IPP kurang optimal yaitu belum optimalnya profesionalisme SDM aparatur, sistem informasi pelayanan publik yang masih minim terutama pada saat pemutakhiran data, dan belum tumbuh kembangnya inovasi pelayanan. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) daerah kabupaten/kota rata-rata sudah baik dan sangat baik.

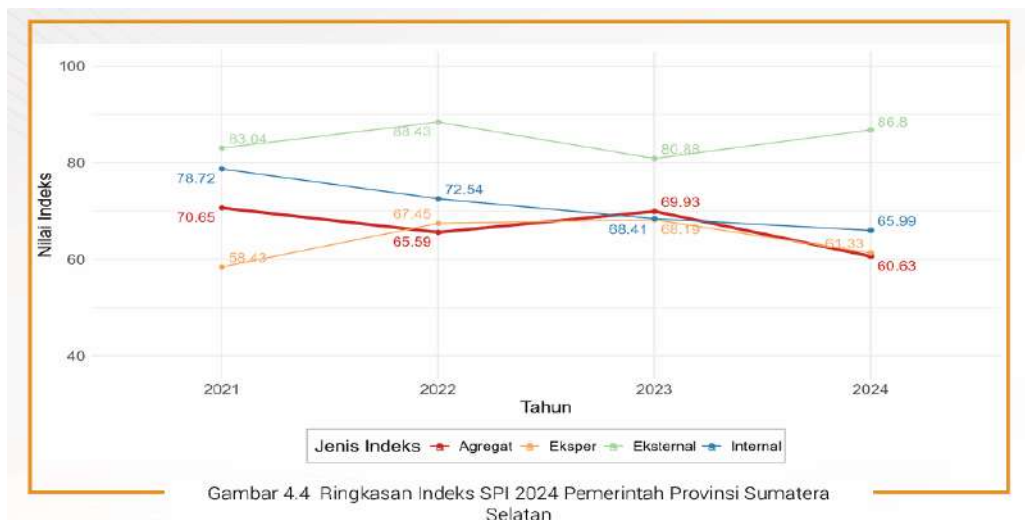
D. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Daerah (SPI) adalah pengukuran yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menilai tingkat integritas instansi pemerintah, baik di tingkat kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. SPI digunakan untuk memetakan risiko korupsi, mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi, dan memberikan rekomendasi perbaikan atas hal-hal pokok yang mesti dilakukan guna meningkatkan integritas organisasi.

Tabel 2. 81 Capaian Indeks Integritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 - 2024

No	Uraian		Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1.	SPI	Indeks/Kategori	70,65	65,59	69,93	60,63

Indeks Integritas Daerah atau SPI Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cenderung berfluktuasi, pada tahun 2021 berada pada angka 70,65, kemudian terjadi penurunan yang signifikan di tahun 2022 menjadi 65,59. Memasuki tahun 2023, indeks SPI meningkat menjadi 69,93, kemudian terjadi penurunan yang signifikan di tahun 2024 menjadi 60,63. Sementara itu, nilai indeks SPI internal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2021 sebesar 78,72, dan menurun cukup tajam tahun 2022 menjadi 72,54, dan pola yang sama juga terjadi pada tahun 2024 menjadi 65,99.



Gambar 2. 105 Hasil SPI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2024

Dalam upaya untuk meningkatkan Indeks Integritas Daerah beberapa hal perlu dilakukan yaitu 1) meminimalkan risiko pemberian berupa

gratifikasi/suap/pemerasan, 2) risiko korupsi, melalui pembatasan penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, 3) meminimalkan risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran seperti mengawasi anggaran perjalanan dinas yang berpotensi manipulatif, penerimaan honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat, 4) melakukan transparansi untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa, melalui transparansi dalam pengadaan barang/jasa agar tidak terjadi pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, adanya kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), adanya risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat, 5) melakukan meritokrasi dalam pengelolaan SDM pada saat promosi/mutasi berada pada level sangat tinggi, 6) memaksimalkan sistem pengawasan internal untuk meminimalkan risiko perdagangan pengaruh (*trading in influence*), 7) melakukan sosialisasi antikorupsi telah dilakukan di instansi ini dan termasuk di atas rata-rata nasional yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan yang dilakukan dalam memberikan layanan/melaksanakan tugas.

Tabel 2. 82 Indeks Internal SPI Berdasarkan Unit Kerja

Unit Kerja/Eselon I	Nilai SPI 2024	Kategori
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29,7	Rentan
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	42,1	Rentan
Badan Penghubung	47,0	Rentan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	51,3	Rentan
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	54,2	Rentan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	56,8	Rentan
Satuan Polisi Pamong Praja	59,1	Rentan
Dinas Sosial	59,2	Rentan
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	59,2	Rentan
Dinas Perkebunan	59,5	Rentan
Dinas Kearsipan	59,8	Rentan
Dinas Pemuda dan Olahraga	59,8	Rentan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	60,3	Rentan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	61,0	Rentan
Dinas Kehutanan	61,0	Rentan
Badan Kepegawaian Daerah	62,5	Rentan
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	62,9	Rentan
Dinas Perdagangan	63,2	Rentan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	63,5	Rentan
Bada Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	63,5	Rentan

Unit Kerja/Eselon I	Nilai SPI 2024	Kategori
Dinas Komunikasi dan Informatika	63,8	Rentan
Dinas Perpustakaan	64,0	Rentan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	64,1	Rentan
Dina Energi Sumber Daya Mineral	64,2	Rentan
Dinas Kelautan dan Perikanan	64,5	Rentan
Dinas Kesehatan	64,6	Rentan
Sekretariat Daerah	65,2	Rentan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	65,5	Rentan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	65,6	Rentan
Dinas Perhubungan	65,6	Rentan
Dinas Pendidikan	65,7	Rentan
Dinas Perindustrian	66,3	Rentan
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	66,6	Rentan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	67,1	Rentan
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	68,6	Rentan
Badan Pendapatan Daerah	68,6	Rentan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	73,1	Waspada

Sumber: Laporan SPI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Tabel 2. 83 Indeks Eksternal SPI Berdasarkan Unit Kerja

Unit Kerja/Eselon I	Nilai SPI 2024	Kategori
Dinas Perkebunan	41,6	Rentan
Dinas Pemuda dan Olahraga	55,3	Rentan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79,4	Terjaga
Dinas Kesehatan	80,9	Terjaga
Satuan Polisi Pamong Praja	81,2	Terjaga
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	81,2	Terjaga
Badan Kepegawaian Daerah	83,1	Terjaga
Dinas Perpustakaan	83,5	Terjaga
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	83,6	Terjaga
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	86,2	Terjaga
Dinas Kelautan dan Perikanan	87,8	Terjaga
Sekretariat DPRD	87,8	Terjaga
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	87,8	Terjaga
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	88,2	Terjaga
Dinas Sosial	88,3	Terjaga
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	88,3	Terjaga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	89,1	Terjaga
Inspektorat Daerah	90,1	Terjaga
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	90,2	Terjaga
Bada Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	90,3	Terjaga
Dinas Kehutanan	90,9	Terjaga
Sekretariat Daerah	91,2	Terjaga

Unit Kerja/Eselon I	Nilai SPI 2024	Kategori
Dinas Komunikasi dan Informatika	91,3	Terjaga
Dinas Pendidikan	92,6	Terjaga
Dinas Perindustrian	92,7	Terjaga
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	93,0	Terjaga
Dinas Perdagangan	93,7	Terjaga
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	96,2	Terjaga
Dina Perhubungan	99,6	Terjaga

Sumber : Laporan SPI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

A. Persentase Penegakan Perda

Peraturan Daerah memiliki beberapa fungsi dan tujuan, diantaranya sebagai berikut: sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, 2) merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 3) sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia, 4) sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Dalam konteks otonomi daerah, Perda berfungsi tidak hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai alat kebijakan yang memungkinkan daerah untuk menjalankan kewenangannya. Penegakan Peraturan Daerah merupakan salah pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang terarah, tertib, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pada tahun 2023 dilaksanakan kegiatan penegakan atas 18 Perda dan 2 Peraturan Gubernur dengan 154 pelanggaran dan berhasil diselesaikan 100%. Berikut kegiatan penegakan Perda yang dilakukan pada tahun 2023.

Tabel 2. 84 Kegiatan Penegakan Perda pada Tahun 2023

No	Perda Dan Perkada yang Ditegakkan	Jumlah Pelanggar	Keterangan
1.	Perda Provinsi Sumatera Selatan 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat di Provinsi Sumatera Selatan	10	Terselesaikan
2.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengolahan Air Bawah Tanah	5	Terselesaikan

No	Perda Dan Perkada yang Ditegakkan	Jumlah Pelanggar	Keterangan
3.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penggunaan Bahan Tambahan yang Dilarang di Gunakan Dalam Pangan	5	Terselesaikan
4.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2	Terselesaikan
5.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	40	Terselesaikan
6.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan	1	Terselesaikan
7.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok	0	Tidak ditemukan pelanggaran
8.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenagalistrikan	13	Terselesaikan
9.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata	8	Terselesaikan
10.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 tahun 2016 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	0	Tidak ditemukan pelanggaran
11.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor. 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	40	Terselesaikan
12.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pegelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	3	Terselesaikan
13.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	4	Terselesaikan
14.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Perda 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	20	Terselesaikan
15.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja	0	Tidak ditemukan pelanggaran
16.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol	1	Terselesaikan
17.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	1	Terselesaikan
18.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	0	Tidak ditemukan pelanggaran
19.	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi	0	Tidak ditemukan pelanggaran

No	Perda Dan Perkada yang Ditegakkan	Jumlah Pelanggar	Keterangan
20.	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	1	Terselesaikan

Sumber: <https://1data.menpan.go.id/>, 2023

Pada tahun 2024 Satpol PP melakukan penegakan atas 9 Perda dan 3 Peraturan Gubernur dengan 26 pelanggaran dan berhasil diselesaikan 100%. Berikut kegiatan penegakan Perda dan Peraturan Gubernur yang dilakukan pada tahun 2024.

Tabel 2. 85 Kegiatan Penegakan Perda pada Tahun 2024

No	Perda Dan Perkada yang Ditegakkan	Jumlah Pelanggar	Keterangan
1.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penggunaan Bahan Tambahan yang Dilarang Digunakan Dalam Pangan	2	Terselesaikan
2.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak dan Perempuan	1	Terselesaikan
3.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Roko	0	Sosialisasi dan pembinaan
4.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenagalistrikan	4	Terselesaikan
5.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata	0	Sosialisasi dan pembinaan
6.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3	Terselesaikan
7.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	1	Terselesaikan
8.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	1	Terselesaikan
9.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	7	Terselesaikan
10.	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi	1	Terselesaikan
11.	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman	4	Terselesaikan

No	Perda Dan Perkada yang Ditegakkan	Jumlah Pelanggar	Keterangan
	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan		
12.	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2	Terselesaikan

Sumber: <https://1data.menpan.go.id/>, 2023

B. Persentase Capaian Aksi HAM

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah dokumen strategis yang memuat rencana aksi untuk melaksanakan dan meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021–2025, RANHAM menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan tugas terkait HAM.

Tujuan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) adalah memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia, serta meningkatkan penegakan dan pemajuan HAM di berbagai sektor. RANHAM menjadi pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan dan program HAM, sekaligus melibatkan masyarakat melalui sosialisasi dan partisipasi, termasuk bagi kelompok sasaran seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Untuk mendukung pelaksanaan RANHAM secara nasional, dibentuk Panitia Nasional RANHAM. Selanjutnya, RANHAM dijabarkan melalui Aksi HAM yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap HAM serta kapasitas pemerintah daerah, salah satunya melalui pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM.

Pelaporan Aksi HAM merupakan proses pengumpulan, penyusunan, dan penyampaian informasi mengenai program, kegiatan, dan capaian pemajuan hak asasi manusia. Pelaporan ini menjadi alat penting untuk mengukur kinerja pemerintah dalam melindungi HAM dan memastikan akuntabilitas negara. Laporan capaian disampaikan secara berkala oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat setiap empat bulan (periode B04, B08, dan B12). Pada tahun

2024, terdapat enam aksi yang dilaporkan, yaitu: (1) pemberian bantuan usaha dan pembangunan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di UMKM; (2) optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum; (3) penyediaan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai PP Nomor 13 Tahun 2020; (4) penyediaan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat kesehatan tingkat pertama; (5) implementasi bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas; serta (6) pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Permenhub Nomor 98 Tahun 2017.

**Tabel 2. 86 Hasil Capaian Pelaporan Aksi HAM
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024**

Tahun	Periode			Rata-rata Nilai Capaian
	B04	B08	B12	
2020	100	100	100	100
2021	88,89	75	89,14	84,34
2022	86	100	100	95,33
2023	96,88	100	100	98,96
2024	100	86,4	100	95,47

Sumber : Data Direktorat Jenderal Instrumen dan Pengatan HAM - Kementerian HAM RI, diolah

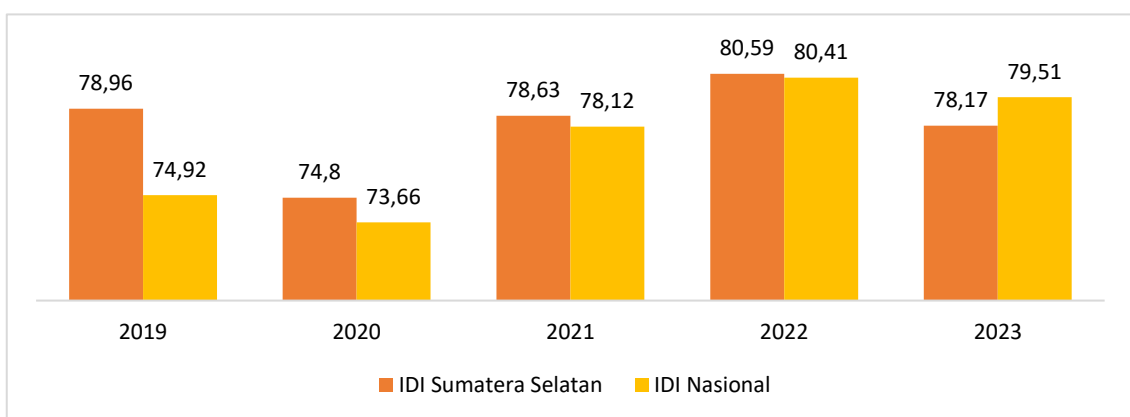
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata Capaian Pelaporan Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir 2020-2024, mencapai angka di atas 75,01% yang mengartikan bahwa rata-rata nilai capaian Provinsi Sumatera Selatan tiap tahun berada dalam kategori “mencapai target” seperti yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Kategori Capaian Kinerja tersebut dicerminkan dengan indikator warna dengan kriteria sebagai berikut:

	(Sangat memuaskan): Capaian > 100% ► Data dukung yang disampaikan melebihi target yang telah disepakati;
	(Memuaskan): Capaian 75,01–100% ► Data dukung yang disampaikan sesuai/kurang sedikit dari target yang telah disepakati;
	(Perlu perhatian): Capaian 50,01–75% ► Data dukung yang disampaikan belum sempurna/belum sesuai dengan target yang telah disepakati;
	(Mengecewakan): Capaian 0–50% ► Data dukung yang disampaikan tidak sesuai dengan target yang telah disepakati atau tidak melaporkan ke dalam system monitoring;

○	K/L tidak memasukan target pada triwulan bersangkutan, karena aksi telah selesai dilaksanakan/baru akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya. Namun tetap harus dihitung untuk menggambarkan capaian aksi secara keseluruhan.

C. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah sebuah indikator komposit yang mengukur tingkat perkembangan demokrasi di suatu wilayah atau negara. Sejak tahun 2021 BPS telah menggunakan metode baru dalam penyusunan angka Indeks Demokrasi Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia terdiri dari 3 aspek yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan dan aspek kapasitas Lembaga demokrasi dengan 30 indikator.



Gambar 2. 106 Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Selatan, 2019-2023

Sumber: BPS Sumatera Selatan

Tabel 2. 87 Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (Metode Baru) 2021 - 2023

Indeks Demokrasi Indonesia	Aspek Kebebasan			Aspek Kesetaraan			Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Nasional*	79,72	82,8	77,48	78,86	80,28	83,74	75,67	78,22	76,46
Pusat	77,59	86,59	74,32	81,51	81,47	90,12	84,8	85,39	83,48
Provinsi**	81,08	80,39	79,50	77,17	79,52	79,67	69,86	73,66	72,00
Sumatera Selatan	85,08	86,78	80,94	78,51	80,86	82,14	72,41	74,15	70,68

Keterangan Data:

* IDI Nasional merupakan agregasi dari nilai Provinsi dan Pusat

** IDI Provinsi merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi

Sumber : BPS Sumatera Selatan

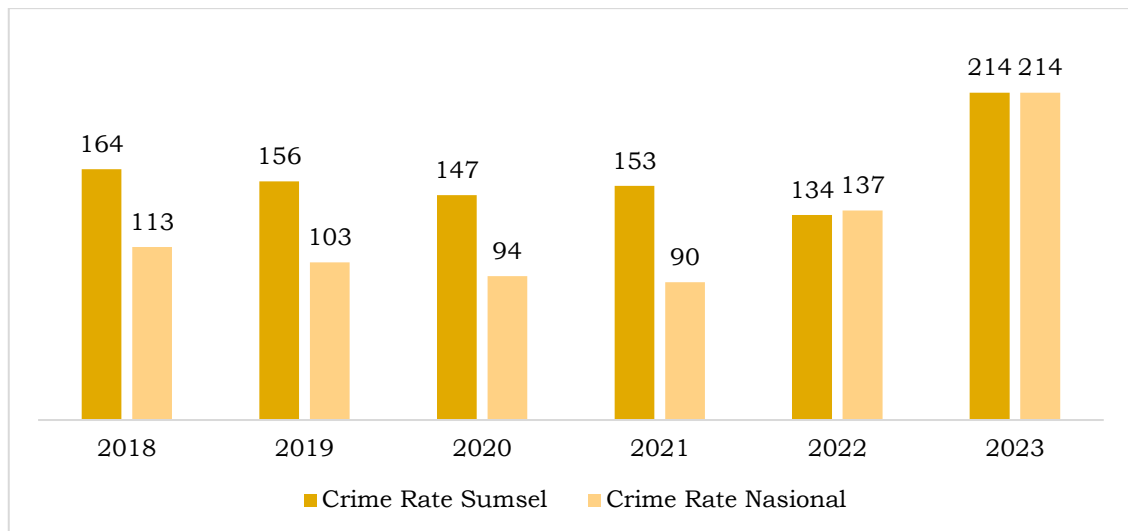
Nilai Indeks Demokrasi Indonesia untuk Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 (data termutakhir) yaitu sebesar 78,17, angka tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan nilai agregasi IDI dari 34 provinsi yang mencapai 77,21. Akan tetapi meskipun secara keseluruhan Nilai Indeks Demokrasi Indonesia lebih tinggi, namun untuk aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi nilai Provinsi Sumatera Selatan sebesar 70,68 masih di bawah nilai agregasi 34 provinsi sebesar 72,00.

Meskipun tingkat demokrasi di Indonesia terus meningkat, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas. Secara umum pada tingkat provinsi termasuk pada Provinsi Sumatera Selatan tantangan tersebut antara lain pada indikator: (i) pemenuhan hak-hak pekerja; (ii) anti monopoli sumber daya ekonomi; (iii) kesetaraan dalam pelayanan dasar; (iv) kinerja lembaga legislatif; (v) kinerja birokrasi dalam pelayanan publik; dan (vi) netralitas penyelenggara pemilu serta (vii) pendidikan politik pada kader partai politik.

D. Indeks Rasa Aman

Indeks kriminalitas adalah ukuran atau metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat kejahatan atau tindakan kriminal dalam suatu wilayah. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah tingkat risiko penduduk mengalami tindak kejahatan (*crime rate*) merupakan statistik yang mengindikasikan peluang penduduk berisiko mengalami tindak pidana. Semakin kecil nilai *crime rate* menunjukkan indikasi yang baik sebab semakin kecil risiko penduduk mengalami tindak pidana.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 risiko tindak pidana di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 214 per 100.000 penduduk, artinya terdapat 214 kasus per 100.000 orang. Pada 2024, risiko ini sama dengan tingkat nasional, yaitu 214 per 100.000 penduduk, namun tetap menunjukkan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi. Jenis tindak pidana terbanyak adalah pencurian (46,2%), diikuti kekerasan dalam rumah tangga (12,1%) dan narkoba (10,4%). Risiko tindak pidana lebih tinggi di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk besar, seperti Palembang, Prabumulih, dan Lubuklinggau, yang dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, kemiskinan, dan pengangguran.

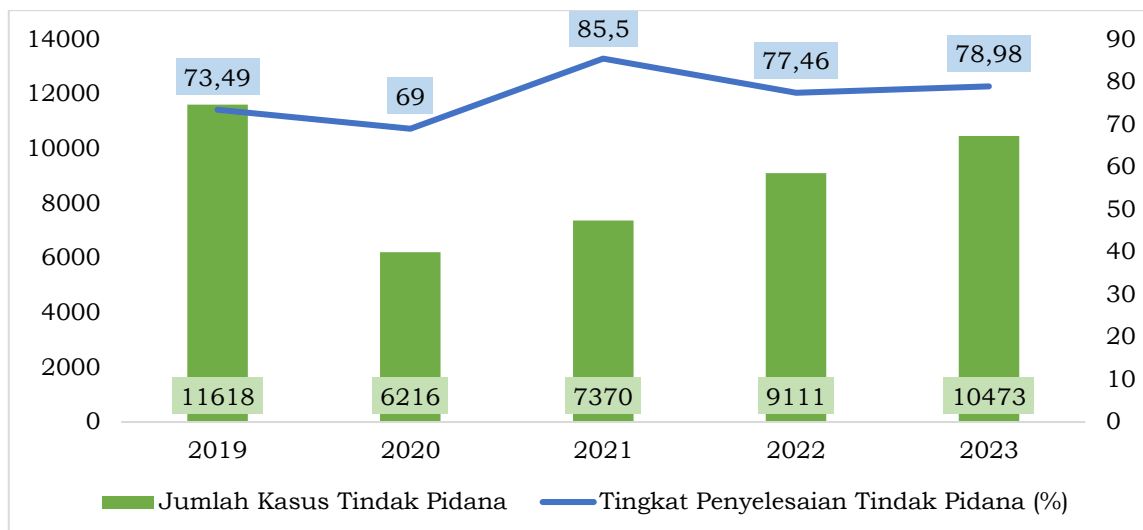


Gambar 2. 107 Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime Rate) (Per 100.000 Penduduk) di Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2023

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2025

Selain itu, indikator persentase tindak kejahatan yang diselesaikan juga dapat menjadi ukuran untuk melihat kinerja penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana. Persentase tindak kejahatan yang diselesaikan (*clearance rate*) ini merupakan statistik yang menyatakan persentase penyelesaian tindak pidana oleh polisi. Semakin besar persentase penyelesaian tindak pidana menunjukkan semakin besar tindak pidana yang berhasil diselesaikan oleh polisi.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa persentase penyelesaian tindak pidana di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 (data termutakhir) yaitu sebesar 78,98% dengan jumlah kasus tindak pidana sebanyak 10.473, persentase ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 77,46% pada 2022. Peningkatan/penurunan persentase ini bergantung dari beberapa faktor, antara lain: (i) kualitas penyidikan dan penuntutan oleh Polri dan Kejaksaan Agung; (ii) koordinasi dan kerja sama antar instansi penegak hukum; dan (iii) kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana.



Gambar 2. 108 Jumlah Kasus dan Penyelesaian Tindak Pidana di Provinsi Sumatera Selatan (%), 2019-2023

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2024

E. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar memiliki 3 sub urusan yaitu: sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Pelaksanaan masing-masing sub urusan tersebut di daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas merupakan alat ukur capaian penyelenggaraan urusan trantibumlinmas dalam bentuk nilai komposit, yang mencakup: (1) sub-urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dinilai dari strategi pencapaian kinerja Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan Tibumtranmas; (2) manajemen Satlinmas, meliputi pelaksanaan fungsi, kebijakan, inovasi peningkatan kapasitas, pemberdayaan, serta sarana-prasarana; (3) sub-urusan kebakaran, mencakup kelembagaan, perencanaan anggaran, pemenuhan SPM, sarana-prasarana, SDM terverifikasi, dan pemberdayaan masyarakat; serta (4) sub-urusan bencana, yang dinilai berdasarkan kelembagaan, SDM, kebijakan, pendanaan teknis operasional, dan kepemimpinan.

Salah satu pilar yang digunakan untuk mengukur adalah dimensi kelembagaan dan sumber daya manusia. Personil Satpol PP Provinsi Sumsel berjumlah 366 orang yang terdiri dari ASN berjumlah 148 orang, Tenaga Kerja Sukarela berjumlah 55 Orang, dan Tenaga Kerja Perangkat Daerah berjumlah 163 Orang.

Tabel 2. 88 Rekapitulasi Jumlah PNS Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2024 (data per Desember 2024)

NO	Unit Kerja	Jumlah Personil
1.	Kepala	1
2.	Sekretariat	20
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	16
4.	Bidang Tibum Tranmas	58
5.	Bidang Penegak Perda dan Pergub	7
6.	Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat	9
7.	Bidang Pemetaan Kebakaran	13
8.	Penegak Tindak Internal (PTI)	16

Sumber: <https://1data.menpan.go.id/>, 2023

Tabel 2. 89 Rekapitulasi Jumlah Fungsional Berdasarkan Evaluasi Jabatan Tahun 2024 (data per Desember 2024)

NO	Unit Kerja	SDM Ideal	SDM Tersedia	SDM Dibutuhkan
1	JF Polisi Pamong Praja Ahli Madya	6	6	0
2	JF Polisi Pamong Praja Ahli Muda	54	41	13
3	JF Analis Kebakaran Ahli Madya	2	0	2
4	JF Analis Kebakaran Ahli Muda	6	0	6
5	JF Pranata Komputer Ahli Muda	1	0	1
6	JF Arsiparis Ahli Muda	1	0	1
7	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	0
8	JF Arsiparis Ahli Pertama	1	1	0
9	JF Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	60	27	34
10	JF Polisi Pamong Praja Penyelia	38	0	38
11	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	54	9	45
12	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana	40	19	21
13	JF Polisi Pamong Praja Pemula	45	0	45
14	JF Analis Kebakaran Ahli Pertama	14	0	14
15	JF Pemadam Kebakaran Penyelia	4	0	4
16	JF Pemadam Kebakaran Mahir	12	0	12
17	JF Pemadam Kebakaran Terampil	42	0	42
18	JF Pemadam Kebakaran Pemula	36	0	36
Jumlah		373	100	274

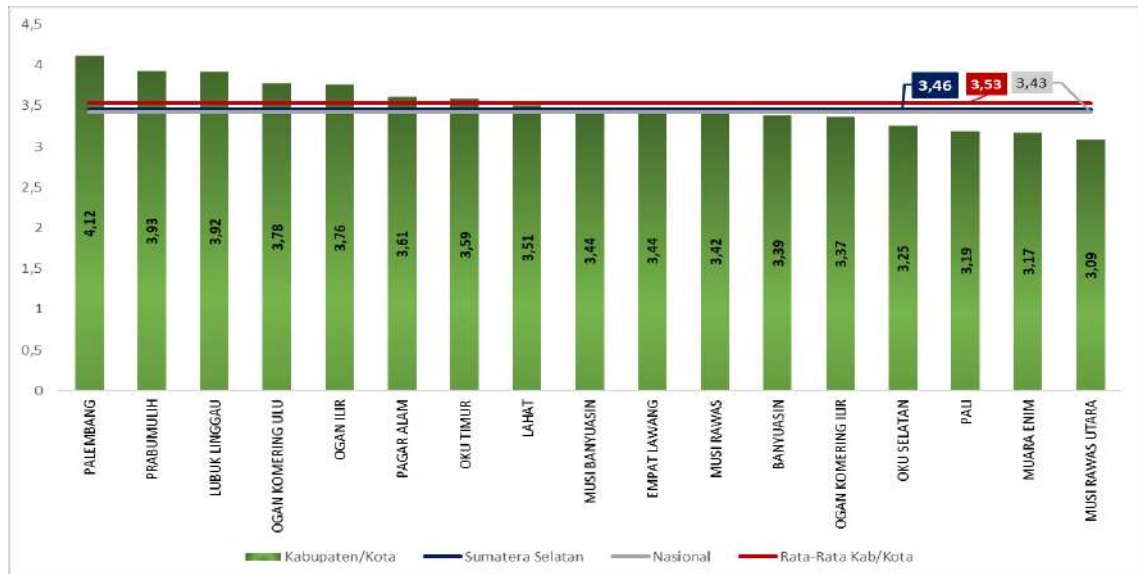
Sumber: <https://1data.menpan.go.id/>, 2023

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

A. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif sehingga dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

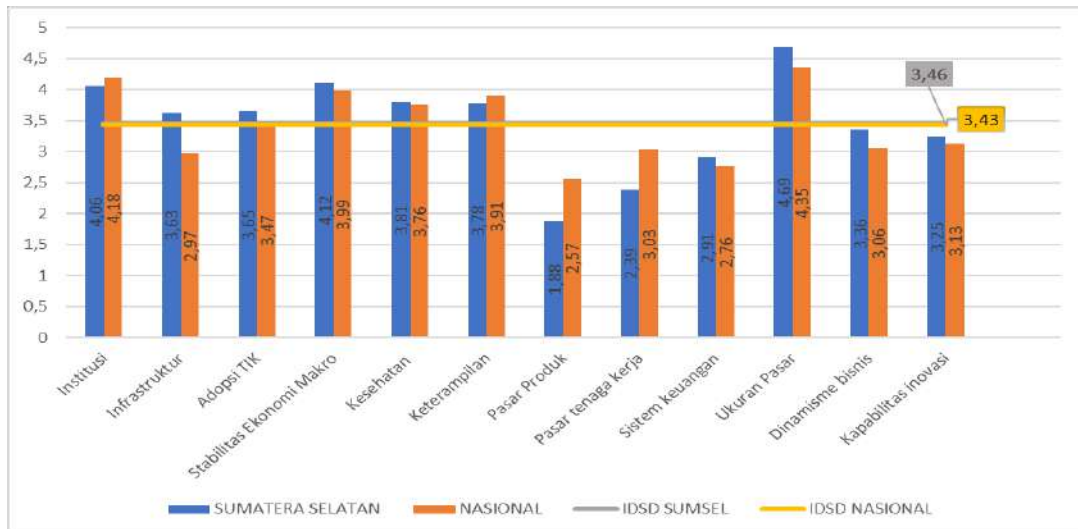


Gambar 2. 109 Skor Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 (data termutakhir) yaitu sebesar 3,46, skor ini relatif lebih tinggi dibandingkan skor IDSD Nasional yang mencapai 3,43 pada tahun 2024 (data termutakhir). Skor IDSD kabupaten/kota tahun 2024 yang tertinggi adalah Kota Palembang yaitu sebesar 4,12, kemudian diikuti oleh Kota Prabumulih yaitu sebesar 3,93, skor kedua kota ini berada di atas skor Provinsi Sumatera Selatan dan nasional. Sementara kabupaten/kota yang memiliki skor terendah dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan adalah Musi Rawas Utara yaitu sebesar 3,09 pada tahun 2024.

Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan nilai pada komponen lingkungan pendukung dan sumber daya manusia. Skor IDSD ini bergantung pada (i) kualitas infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan; (ii) kualitas pendidikan dan kesehatan; (iii) keterampilan dan produktivitas tenaga kerja; (iv) daya saing produk dan jasa; dan (v) iklim inovasi.



Gambar 2. 110 Skor Indeks Daya Saing Daerah Menurut Pilar di Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Kerangka pengukuran skor Indeks Daya Saing Daerah 2024 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Skor komponen tertinggi di Sumatera Selatan pada pilar ukuran pasar yaitu sebesar 4,69 relatif lebih tinggi dibandingkan skor nasional yaitu 4,35 pada 2024, sementara skor yang relatif lebih tinggi dibandingkan skor nasional yaitu pada pilar stabilitas ekonomi makro yaitu sebesar 4,12, dinamisme bisnis (3,36), kapabilitas inovasi (3,25), dan Infrastruktur (3,63).

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

A. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2. 90 Indikator Kinerja Utama Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6-5,9	5,69	5,5-6,0	-0,11	4,6-6,2	3,58	5,6-6,3	5,23	5,8-6,5	5,08
2	Inflasi	%	2 - 4	2,06	2 - 4	1,55	2 - 4	1,82	2 - 4	5,94	2 - 4	3,17
3	Rasio Gini	Rasio	0,355	0,339	0,354	0,338	0,353	0,340	0,352	0,339	0,350	0,330
4	Angka Kemiskinan	%	12,52	12,56	10,00-11,65	12,98	12,28-12,87	12,79	11,94-12,77	11,95	11,59-12,66	11,78
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,12	4,48	4,01	5,51	3,87	4,98	3,45-4,47	4,63	3,06-4,22	4,11
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,07	70,02	71,08	70,01	71,75	71,83	72,42	72,48	73,09	73,18
7	Pengeluaran Per Kapita	Rp. Ribu	10.552	10.937	11.268	10.652	11.831	10.662	12.422	11.109	13.044	11.472
8	PDRB per Kapita (ADHB)	Rp. Ribu	50.490	53550	54.199	53510	57,077	57490	59,087	68340	62.067	71950
9	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5,6	4,82	5,65	0,72	5,72	2,18	5,72	4,39	5,83	3,69
10	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	%	9,4 - 9,6	8,22	9,6 - 9,8	-1,34	9,8-10	5,79	10-10,2	10,37	10,2-10,4	7,60
11	Realisasi PMA	Rp. Triliun	16,71	11,05	17,88	22,53	19,13	18,39	20,47	17,77	21,9	21,88
12	Realisasi PMDN	Rp. Triliun	7,99	16,92	8,55	15,82	9,14	16,27	9,79	23,17	10,47	25,6
13	Neraca Perdagangan	US\$ juta	2.894	3.554	2.909	2.666	2.923	4.335	2.938	6.085	2.953	4.985,78

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	%	4,27	2,38	4,77	1,56	4,26-5,73	3,16	4,92-5,56	5,01	4,99-5,62	2,86
15	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	95,55	90,52	96,05	95,37	99,8	107,78	100,45	107,80	100,2	105,05
16	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	102,3	102,8	102,5	100,4	104,44	104,52	104,5	110,9	104,5	119,4
17	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	%	99,96	99,96	100,46	93,58	94,35	94,32	94,35	96,33	94,35	97,29
18	Persentase Desa yang Teraliri Listrik	%	98,48	98,12	99,21	98,64	99,95	98,98	99,44	99,01	100	99,26
19	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,524	69,65	69,638	73,39	69,752	73,47	69,886	73,76	69,98	74,04
20	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,22	8	8,47	8,24	8,63	8,3	8,79	8,37	8,95	8,37
21	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,8	12,36	12,87	12,45	12,98	12,54	13,19	12,55	13,4	12,55
22	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,7	92,62	93	92,4	93,3	92,38	93,6	92,35	93,9	92,95
23	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,7	74,37	73,9	74,45	74,1	74,64	74,9	73,88	75	74,89
24	Persentase Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	%	23,53	35,29	35,29	35,29	47,05	52,94	58,82	82,35	70,58	88,24
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	n/a	64,04	n/a	63,74	n/a	58,71	68	62,01	70	61,90
25	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB	BB	BB	B (60,50)	BB	B (61,13)	A	B (65,04)	A	B (69,14)
26	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Nilai	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A (109%)

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Nilai SAKIP	Nilai	A (81-82)	BB (78,84)	A (82-83)	BB (78,98)	A (83-84)	BB (79,76)	A (84-85)	BB (78,06)	A (85-86)	BB (78,25)
28	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29	Indeks Integritas Daerah	Indeks	60	67,39	65	n/a	68	70,65	68,8	65,59	69	69,93
30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,35	67,59	67,4	68,53	70,79	69,70	71,17	72,12	71,55	70,2
31	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	%	72,97	80,37	75,08	81,98	84,7	83,36	84,9	87,7	86,91	87,19
32	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	81	83,02	84,75	83,2	87,63	86,23	90,26	85,11	92,96	80,54
33	Rasio kemantapan jalan	%	70	79,17	72	90,02	90	93,94	80	86,66	85	88,15
34	Persentase Akses Internet	%	90	90	90	83	85	85	87	87	90	91
35	Persentase penurunan konflik sosial	%	50	50	60	60	70	70	80	80	80	80
	Persentase Kabupaten/Kota Tanpa Konflik (Zero Conflict)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
36	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	74.463	78.186	78.186	8.075	82.095	2015	8.479	1038	8.903	385
37	Jumlah Wisatawan Nusantara	Orang	8.632.957	9.064.606	9.064.605	820.410	9.517.835	2.810.342,00	861.431	1.542.485,00	904.503	3697666
38	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan	Sertifikat	28	32	32	34	36	45,00	40	46,00	44	51
39	Peringkat Sumsel pada Pekan Olahraga Nasional (PON)	Peringkat	10	Peringkat 21 (PON Tahun 2016)	10 (Tidak ada pelaksanaan)	Peringkat 21 (PON Tahun 2016)	10	Peringkat 18 (PON Tahun 2021)	10	Peringkat 18 (PON Tahun 2021)	10	Peringkat 18 (PON)

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					PON karena COVID)							Tahun 2021)
	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	n/a	75	n/a	0	87	87,00	80	65,00	85	200
40	Jumlah Pemuda Berprestasi (Akademis, Seni, Budaya dan Olahraga)	Orang	31	34	31	26	31	53,00	31	31,00	31	38

B. Indikator Kinerja Daerah

Tabel 2. 91 Indikator Kinerja Daerah Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Aspek Kesejahteraan Masyarakat											
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6 -5,9	5,69	5,5 -6,0	-0,11	4,6-6,2	3,58	5,6-6,3	5,23	5,8-6,5	5,08
2	Inflasi	%	2 - 4	2,06	2 - 4	1,55	2 - 4	1,82	2 - 4	5,94	2 - 4	3,17
3	PDRB per Kapita (ADHB)	Rp. Ribu	50.490	53.550	54.199	53.510	57.077	57.490	59.087	68.340	62.067	71.950
4	Rasio Gini	Rasio	0,355	0,339	0,354	0,338	0,353	0,340	0,352	0,339	0,350	0,330
5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,07	70,02	71,08	70,01	71,75	71,83	72,42	72,48	73,09	73,18
6	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,8	12,36	12,87	12,45	12,98	12,54	13,19	12,55	13,4	12,55
7	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,22	8	8,47	8,24	8,63	8,3	8,79	8,37	8,95	8,37
8	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,524	69,65	69,638	69,88	69,752	73,47	69,866	73,76	69,98	74,04
10	Angka setengah menganggur	%	8,66	9,22	8,61	12,98	8,56	10,93	10,36	7,08	10	8,46
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,12	4,53	4,01	5,51	4,99	4,98	3,45-4,47	4,63	3,06-4,22	4,11
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,95	67,67	69,15	68,65	69,41	68,77	68,8	69,31	68,85	70,72
12	Persentase penurunan konflik sosial	%	50	50	60	60	70	70	80	80	80	80
	Persentase Kabupaten/Kota Tanpa Konflik (Zero Conflict)	%	100	50	100	60	70	100	80	100	100	100
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A (109%)
14	Nilai SAKIP	Nilai	A (81-82)	BB (78,84)	A (82-83)	BB (78,98)	A (83-84)	BB (79,76)	A (84-85)	BB (78,06)	A (85-86)	BB (78,25)
15	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Meningkatnya Peringkat MTQ	Peringkat	n/a	n/a	20 Besar	20 Besar	n/a	n/a	20 besar	8 besar	n/a	n/a
17	Meningkatnya Peringkat STQ	Peringkat	20 besar	8 besar	n/a	n/a	10 besar	9 besar	n/a	n/a	15 Besar	Peringkat 3
18	Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	94,5	93,5	95,6	86,2	87,9	91,35	89,7	89,73	91,5	94,2
20	Produksi peternakan											
	- Daging	Ton	86.431	72.068	90.755	116.888	95.290	125.124	100.054	129.865	105.057	126.244
	- Susu	Liter	133.569	84.212	140.247	68.906	147.259	0	72.817	0	80.098	7.268
	- Telur	Ton	94.832	122.347	99.573	149.200	104.552	169.804	109.780	172.889	115.269	168.638
21	Jumlah KK Rawan Pangan yang dibantu	KK	100	100	1.200	265	100	100	175	100	225	140
22	Jumlah KK Miskin yang dibantu	KK	100	77	500	100	300	100	425	80	475	494
23	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalan terhadap PDRB	%	n/a	20,33	n/a	18,32	n/a	21,03	n/a	27,71	n/a	26,6
24	Kontribusi sektor Perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB	%	12,75-13,00	13,55	13,00-13,25	13,72	13,25-13,50	13,73	13,50-13,75	12,95	13,75-14,00	13,45
25	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	19,58	20,55	19,78	19,72	20,73	5,79	21,29	10,41	29,95	17,34
26	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5,6	4,85	5,65	-0,8	5,72	2,18	5,72	4,52	5,83	4,14
27	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	%	9,4 – 9,6	8,22	9,6 – 9,8	-1,32	9,8 - 10	5,79	10 – 10,2	10,41	10,2-10,4	7,6
28	Pertumbuhan PDRB sektor Pertambangan dan Penggalan	%	n/a	8,11	n/a	-4,08	n/a	5,47	n/a	6,28	n/a	7,89

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II	Aspek Daya Saing Daerah											
1	Pengeluaran Per Kapita	Rp. Ribu	10.552	10.937	11.268	10.652	11.831	10.662	12.422	11.109	13.044	11472
III	Aspek Pelayanan Umum											
III.1	Layanan Urusan Wajib Dasar											
1	Urusan Pendidikan											
1.1	APK Sekolah Menengah	%	86,46	87,11	87,36	90,42	89,12	93,24	90	93,45	90,88	93,45
1.2	APM Sekolah Menengah	%	60,06	61,2	61,04	70,49	62,02	62,42	63	59,83	63,98	59,83
1.3	APS Sekolah Menengah	%	73,09	74,39	75,11	74,39	77,13	70,92	79,15	70,93	81,17	71,71
1.4	APTS Sekolah Menengah	%	2,31	0,38	1,81	0,35	1,31	2,37	0,81	0,2	0,31	0,019
1.5	Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi	Sekolah	93	93	94	94	95	94	96	94	97	94
1.6	Persentase Sekolah SLB yang terakreditasi:											
	A	%	12,9	12,12	12,9	12,12	12,9	12,0	12,9	10,53	12,9	10,53
	B	%	48,39	72,73	51,61	72,73	54,84	50,0	58,1	39,47	61,29	39,47
	C	%	6,45	9,09	9,68	9,09	12,9	24,0	16,1	23,68	25,81	23,68
	D	%	32,26	6,06	28,81	9,06	19,35	15,0	12,9	26,32	0	26,32
1.7	Persentase Pendidik Tenaga Kependidikan minimal Berkualifikasi S1	%	96,5	95,99	97,37	98,85	98,24	98,0	99,11		100	96,46
1.8	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah											
	SMA	Rasio	01:35	01:35	01:33	01:32	01:30	01:30	01:28	01:14	01:26	01:14
	SMK	Rasio	01:55	01:06	01:53	01:56	01:54	01:54	01:52	01:62	01:50	01:12

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.9	Persentase sekolah menengah terakreditasi:											
	A	%	23,76	30,32	23,76	37	23,76	39	23,76	39	23,76	31,9
	B	%	28,82	33,95	30,54	42,65	33,01	34	35,48	34	37,42	39,5
	C	%	12,26	8,95	13,23	17,85	14,19	19	15,27	19	16,13	22,4
	D	%	35,15	26,85	32,47	2,5	29,03	8	25,48	8	22,69	6,32
1.10	Lulusan SMK yang terserap kerja	%	55,78	89,31	57,96	89,31	60,14	58,7	62,32	75	64,5	75
1.11	Persentase Kelulusan Sekolah Menengah	%	100	96,46	100	100	100	100	100	100	100	100
1.12	Persentase Capaian SPM Pendidikan Menengah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	Na	100	95,33	100	92,44
1.13	Persentase Capaian SPM Pendidikan Khusus	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	na	100	25,7	100	35,43
	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah		n/a	n/a	n/a	n/a	89,12	62,42	90	95,33	90,88	94,75
	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8	25,33	10	29,45
	Jumlah LSP yang terbentuk	LSP	n/a	n/a	n/a	n/a	36	36	37	47	38	47
	Jumlah SMK yang Terevitalisasi	Sekolah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Jumlah SMK yang memiliki kurikulum link and match dengan IDUKA	Sekolah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50	50	70	50

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Urusan Kesehatan											
2.1	Persentase balita stunting	%	30	28,98	29	29,8	28	24,8	22,5 - 24,5	18,6	20,5 - 22,5	1,8
2.8	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	%	60	66,18	65	65,32	70	66,75	75	68,29	80	75,29
2.9	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	%	80	76,3	85	80	90	85,2	93	89,47	95	97,23
2.13	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	%	60	94,41	70	91,28	80	86,83	85	95,04	90	106,6
2.14	Jumlah Kematian Bayi	Orang	477	509	458	536	438	502	495	497	475	596
2.16	Jumlah Kematian Ibu Maternal	Orang	118	105	116	128	114	131	118	97	110	102
2.24	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.25	Persentase penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
3.1	Persentase Kondisi Jalan Mantap	%	70	79,17	72	90,02	90	93,94	80	86,66	85	90,89
	Rasio kemantapan jalan	%	70	79,17	72	90,02	90	93,94	80	86,66	85	88,15
3.2	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang	%	80	80	85	56,81	85	56	75	56	80	56
	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	80	80	85	56,81	85	56	75	56	80	56

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.3	Luas Daerah Irigasi permukaan yang terairi	Ha	28.795	28.115	30.595	29.214	29.819	30.398	31.355	32.855	32.855	37.092
3.4	Luas Daerah Irigasi Rawa yang terairi	Ha	5.700	2.878	8.700	3.902	7.768	11.714	10.500	11.714	13.000	13.289
3.5	Luas daerah irigasi secara partisipatif yang terairi	Ha	2.009	1.928	4.209	3.989	5.000	n/a	5.100	n/a	5.200	5.447
3.6	Jumlah pemenuhan kebutuhan tampungan air dan penyediaan air baku	Wilayah Sungai	30	30	32	32	34	n/a	-	n/a	-	10.855
	Volume Ketersediaan air baku	M3	15.000	24.000	25.000	35.700	45.000	35.700	55.000	311.500	65.000	430.942
3.7	Jumlah kawasan bebas bencana banjir	Kawasan	30	31	32	36	42	n/a	-	n/a	-	n/a
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	35,56	39,17	40,74	47,89	58,21	71,74	79,11	78,26	100	101,02
3.8	Jumlah kawasan bebas bencana longsor	Kawasan	11	0	13	16	19	n/a	-	n/a	-	n/a
	Luas Kawasan Bebas Bencana Longsor	Ha	1.200	0	2.200	6.655	8.995	8.995	9.500	8.995	11.000	11.103
	Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	%	Provinsi Sumsel tidak melaksanakan indikator ini									
	Persentase luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	40,09	36,16	47,78	40,75	46,77	51,91	51,57	54,66	56,07	56,44

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	0	1,5	1,5
	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	0	1,5	1,5
	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0,44	1,09	0,45	0,76
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
4.1	Persentase penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	6,43	6,35	5,83	5,45	5,17	2,85	n/a	n/a	n/a	n/a
4.2	Luas Kawasan kumuh dengan sarana dan prasarana yang baik	Ha	1.147,78	1.059,28	1.247,78	1.074,78	27,1	1121,28	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8,5	8,99	11	11,18
4.3	Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum layak	%	72,97	80,37	75,08	81,98	84,7	83,36	84,9	87,7	86,91	87,19
4.4	Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak	%	81	83,02	84,75	83,2	87,63	86,23	90,26	85,11	92,96	80,54

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.5	Persentase Bangunan Publik dan lingkungan ruang publik yang telah memenuhi NSPK	%	53,1	63,27	58,41	66,89	64,25	70,506	n/a	n/a	n/a	n/a
4.6	Persentase Kepala Keluarga yang Memiliki Rumah	%	88,72	91,35	90,15	91,48	91,58	81,42	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50	100	80	100
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50	100	80	100
4.7	Jumlah kawasan permukiman yang tertata prasarana utilitas	Kawasan	11	11	14	21	17	22	n/a	n/a	n/a	n/a
4.8	Jumlah lingkungan ruang publik yang dilengkapi sarana dan prasarana utilitas yang baik	Kawasan	1	1	6	6	7	14	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase satuan permukiman yang sudah dilengkapi PSU	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	29	31,95	31	35,68
4.9	Luas kawasan perumahan dan permukiman bagi keluarga miskin yang tertata	Ha	n/a	n/a	396,7	396,7	423,14	396,7	n/a	n/a	n/a	n/a
4.10	Persentase rumah tangga miskin dengan akses air minum layak	%	n/a	n/a	2,43	1,08	4,22	1,08	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.11	Persentase rumah tangga miskin dengan akses sanitasi layak	%	n/a	n/a	18,77	17,85	19,71	17,85	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase Pengembang Perumahan dengan kualifikasi menengah di wilayah provinsi yang tersertifikasi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	2	2
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									-		
5.1	Persentase penegakan Perda	%	95	98	95	98	95	100	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	95	100	95	100
5.2	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Prov. Sumsel	%	7	9	9	5,94	11	15%	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100%	100	100
5.3	Persentase Satlinmas dan Pos Kamling yang Aktif	%	65	97	75	98	85	100%	n/a	-	n/a	
	Persentase Satlinmas yang Aktif	%	-	-	-	95	-	-	96	100%	97	100
5.4	Persentase Penurunan Daerah Rawan Kebakaran	%	50	5,88	65	65	75	76%	-	-	-	
	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25	41,17%	50	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.5	Indeks risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks	133,67	137,54	125,65	137,11	137,05	137,31	137	132,99	136,95	131,24
5.7	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana daerah rawan bencana	%	100	94,11	100	100	100	100	100	100	100	100
5.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi saat tanggap darurat	%	100	14,3	100	93,74	100	100	100	100	100	100
6	Urusan Sosial											
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	48,87	71,22	50,8	91,32	52,73	83,3	54,67	88,8	56,6	110,5
6.2	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	11,9	100	17,86	100	100	100	100	100	100	100
6.3	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	9,56	8,5	9,56	8,5	8,5	10,44	8,5	11,6	8,5	13,3
	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
III.2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar											
1	Urusan Tenaga Kerja											
1.2	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	38	40	40	19,01	45	44,61	30	58,39	35	69,11
1.3	Persentase pekerja yang mendapat perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	58	30,34	61	44,58	64	14,47	50	15,77	55	20,04
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
2.3	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,48	0,478	0,47	0,521	0,47	0,520	0,47	0,517	0,47	0,496
2.4	Persentase Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	%	23,53	35,29	35,29	35,29	47,05	52,94	58,82	82,35	70,58	88,24
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	n/a (IPA baru disosialisasi sikan pada tahun 2021)	64,04	n/a (IPA baru disosialisasi sikan pada tahun 2021)	63,74	n/a (IPA baru disosialisasi sikan pada tahun 2021)	58,71	68	62,01	70	61,90

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.5	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Nilai	1,3	0,71	1,3	0,84	1,2	0,91	1,15	1,06	1,1	1,47
2.6	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Nilai	12,00	7,11	12,00	6,74	11,5	4,85	11,25	4,37	11	6,19
2.7	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	5,00	4,77	5,00	4,49	5,10	4,08	5,10	n/a tahun 2022 sudah tidak ada perhitungan	5,20	n/a sudah tidak ada perhitungan
2.8	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	53,7	51,94	53,8	54,25	53,8	54,54	53,9	53,32	54,0	55,35
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	10,00	10,05	10,50	58,3	89	60,67	2,5	18,01	7,5	18,49
3	Urusan Pangan											
3.1	Ketersediaan Energi untuk dikonsumsi	Kkal/Kap /hari	2.400	2.197,42	2.400	2.065,12	2.167	2.217,40	2.200	2.090,24	2.260	2125,25
3.2	Ketersediaan Protein untuk dikonsumsi	Gram/kap / hari	63	73	63	65,14	78,36	79,36	79	76,61	80	78,74
3.3	Koefisien Varian (CV) Harga Pangan Strategis	%	≤ 15	10,63	≤ 15	11,6	≤ 15	8,8	≤ 15	12,4	≤ 15	8.62
	Persentase Cadangan Pangan	%	18,43	15,68	21,24	22,71	21,03	21,03	22,06	19,26	22,72	19,07
4	Urusan Pertanahan											

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1	Persentase konflik lahan yang terselesaikan (tidak ada di renstra TC 27, terdapat di renstra rpd 2024-2026)	%	11	23,68	11,66	12,19	12	17,53	12,45	19,1	13	13
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan. (tidak ada di renstra tc 27, terdapat di renstra rpd 2024-2026)	%	0	0	0	0	0	100	50	85	90	90
5	Urusan Lingkungan Hidup											
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,35	67,59	67,4	68,53	70,79	69,70	71,18	72,12	71,55	70,2
5.2	Indeks Kualitas Air	Indeks	62,74	64,45	62,82	64,62	67,05	58,25	67,15	59,85	67,25	58,16
5.3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	96,19	96,3	96,23	96,86	84,55	86,28	84,65	89,1	84,75	87,76
5.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	49,189	48,41	49,206	50,21	38,02	41,25	39,86	42,16	41,71	44,38
5.5	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	0	0	0	0	68,24	75,53	68,82	81,03	69,40	70,37
5.6	Persentase penurunan emisi GRK	%	4,95	4,39	5,56	5,56	6,18	11,61	6,8	17,6	7,14	20,2
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. (terdapat di renstra RPD dan Renstra tc 27 2024-2026, kegiatan 2024)	%	0	7,5	0	10	12	23,33	13	27	15	44

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	98,15	99,84	98,46	99,03	98,15	98,15	99	99	100	96,42
6.2	Rasio bayi ber akta kelahiran	Rasio	85	91,26	87,5	95	85	85	90	90	100	97,8
6.3	Rasio pasangan ber akta Nikah	Rasio	75	40,16	77,5	77,06	75	75	85	85	95	47,88
6.4	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	85	91,26	87,5	95	85	85	95	95	100	97,8
	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pemanfaatan data kependudukan	%	n/a	4	n/a	16	11,54	16	19,23	19,23	19,23	3,92
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
7.3	Indeks Pembangunan Desa Sumatera Selatan	Indeks	59,93	1,3	60,67	36,25	61,42	43,48	62,16	40	62,91	43
7.4	Indeks Desa Membangun Sumatera Selatan	Indeks	0,5877	0,6200	0,6402	0,5907	0,65	0,5937	0,669	0,5967	0,5997	0,5997
	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	18,09	18,09	65	54,86	70	69,46	75	49,85	80	32,58
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	0,24	0,25	20	14,19	25	4,53	30	8,48	35	14,2
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
8.1	Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif	%	72	74,9	74	79,17	76	-	-	-	80	81,4
	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka		2,31		2,45		2,24		2,23		2,30

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Angka	n/a	78,64	n/a	57,9	n/a	57,01	n/a	64,3	n/a	62,8
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	-	11,18	-	13,4	-	18,0	-	13,98	-	10,23
9	Urusan Perhubungan											
9.1	Jumlah arus penumpang Kereta Api	Orang	2.126.341	3.537.588	2.232.658	1.053.637	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Load Faktor Penumpang Kereta Api	%	n/a	n/a	n/a	n/a	48	42	45	44	48	65
9.2	Jumlah arus penumpang Kapal Laut	Orang	65.379	81.196	68.648	19.558	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Load Faktor Penumpang Kapal Laut	%	n/a	n/a	n/a	n/a	42	42	43	44	45	42
9.3	Jumlah arus penumpang Bus AKDP	Orang	1.691.528	1.023.145	1.776.105	884.236	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Load Faktor Penumpang Bus AKDP	%	n/a	n/a	n/a	n/a	65	62	67	66	69	50,6
9.6	Load faktor angkutan darat	%	58	51	60	51	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Load Faktor Angkutan Barang Darat	%	n/a	n/a	n/a	n/a	62	65	66	65	68	62,05
9.7	Load faktor angkutan laut	%	48	43	49	39	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Load Faktor Angkutan Barang Laut	%	n/a	n/a	n/a	n/a	51	57	52	52	54	54
9.8	Load faktor angkutan kereta api	%	43	39	45	10	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Load Faktor Angkutan Barang Kereta Api	%	n/a	n/a	n/a	n/a	47	81	49	49	53	106
9.9	Jumlah trip pelayanan Kapal	Trip	3.672	5.059	3.702	4.543	3778	n/a	3815	n/a	3856	n/a
9.11	Persentase Tingkat Fatalitas	%	6	7	5	6	4	n/a	3	n/a	2	n/a

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio	0,572	n/a	0,588	n/a	0,601	0,601	0,62	0,51	0,681	0,608
	V/C Ratio Jalan Provinsi	Rasio	0,391	n/a	0,378	n/a	0,318	0,31	0,304	0,26	0,301	0,32
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	n/a	n/a	n/a	n/a	63	63	52,75	51,79	68,92	85,81
10	Urusan Komunikasi dan Informatika											
10.1	Persentase layanan pengguna e-government	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10.2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Informasi dan Komunikasi Masyarakat/Publik	Kab/Kota	2	2	4	4	4	4	5	5	2	1
10.3	Presentase Akses Internet	%	90	90	90	83	85	85	87	87	90	91
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	40	n/a	50	n/a	70	70
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	n/a	n/a	n/a	n/a	80	n/a	80	n/a	100	80
11	Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah											
11.1	Jumlah UMKM Naik Kelas	UMK	500	585	500	676	500	713	500	575	500	526
11.2	Jumlah Kenaikan Wirausaha Baru	UKM	240	440	350	150	350	210	350	328	350	201

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.3	Prosentase Pertumbuhan Modal Koperasi	%	2	5	2	5	2	196	2	5,2	2	25,3
11.4	Prosentase Kenaikan Volume Usaha Koperasi	%	2	8,3	2	8,3	2	47.7	2	0,68%	2	119,26%
11.5	Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	100	0	100	130	100	101	20	22	20	20
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1,1	1	8,56	1	1
	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1,2	1	2,8	1	10,4
12	Urusan Penanaman Modal											
12.1	Realisasi PMA	Rp. Triliun	16,71	11,05	17,88	22,53	19,13	18,39	20,47	17,77	21,9	21,88
12.2	Realisasi PMDN	Rp. Triliun	7,99	16,92	8,55	15,82	9,14	16,27	9,79	23,17	10,47	25,6
12.3	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di selesaikan tepat waktu sesuai SOP	Unit	940	868	974	601	625	573	650	1673	675	1818
12.4	Indeks Kepuasan Investor	Indeks	89,5	91	89,55	91,11	89,6	90,27	89,65	89,89	89,7	88,8
12.5	Jumlah investor	Perusahaan/ UU	345	430	357	629	369	884	381	1203	393	3505
12.6	Persentase pertumbuhan nilai investasi	%	7	21,19	7	37,13	7	-9,63%	7	18,96	7	15,97
13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga											
13.1	Jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan	Orang	673	568	2	310	4	2	3	2	4	15902
13.2	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	OKP	19	17	21	0	23	22	25	45	27	45
13.3	Jumlah wirausaha muda	Orang	40	40	40	0	40	52	40	211	40	120
13.4	Jumlah pelatih yang Bersertifikat	Orang	25	25	25	0	25	135	25	41	25	50

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.5	Jumlah pembinaan cabang olahraga	Orang	42	19	42	54	42	42	42	53	42	44
13.6	Jumlah pembinaan atlet muda	Orang	244	232	251	260	255	250	262	274	267	223
13.7	Jumlah atlet berprestasi	Orang	35	22	40	0	45	0	50	35	55	129
13.8	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	12	15	13	0	16	12	16	10	20	34
13.9	Jumlah medali atlet muda Sumsel	Medali emas	30	25	33	0	35	54	37	65	40	49
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Nilai Indeks	n/a	40	n/a	45	47	40	48,5	40,00	50	0
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Nilai Indeks	n/a	46,67	n/a	46,67	46,75	46,67	46,85	36,67	47	0
	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	n/a	75	n/a	0	87	n/a	80	n/a	85	154
14	Urusan Statistik											
14.1	Tersedianya persentase data sektoral	%	19	100	50	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
14.2	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	%	18,75		50	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
15	Urusan Persandian											
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan pelayanan persandian	%	2	n/a	6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	80	80	100	100	100	100
16	Urusan Kebudayaan											
16.1	Angka Kumulatif Jumlah cagar budaya yang terlindungi, termanfaatkan dan dikembangkan	Cagar Budaya	450	435	550	550	650	559	750	779	850	559
16.2	Angka komulatif jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang terlindungi, termanfaatkan dan dikembangkan	OPK	500	550	550	600	600	924	650	924	700	907
16.3	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan	Sertifikat	28	32	32	34	36	43	40	44	44	49
16.4	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Sertifikat	4	8	6	8	8	7	10	26	12	29
16.5	Jumlah Pergelaran Seni	Kali	9	46	10	5	11	0	12	40	13	35
16.6	Jumlah Kunjungan Museum	Orang	49.620	112.380	59.544	30.366	71.452	35.294	85.743	78.341	102.892	105.118
	Terlestarikannya Cagar Budaya	Cagar Budaya	450	435	550	550	650	559	750	779	850	559

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Urusan Perpustakaan											
17.1	Persentase peningkatan minat dan budaya baca masyarakat	%	63,1	n/a	65,25	n/a (Perubahan Indikator)	n/a (Perubahan Indikator)	n/a (Perubahan Indikator)	n/a (Perubahan Indikator)	n/a (Perubahan Indikator)	n/a (Perubahan Indikator)	n/a (Perubahan Indikator)
17.2	Nilai tingkat budaya baca masyarakat	Nilai	50,1	44,35	51,98	n/a (Perubahan Indikator)	n/a (Perubahan Indikator)	n/a (Perubahan Indikator)	n/a (Perubahan Indikator)	n/a (Perubahan Indikator)	n/a (Perubahan Indikator)	n/a (Perubahan Indikator)
	Nilai kegemaran membaca masyarakat	Nilai	50,1	44,35	51,98	52,38	53,16	55,84	63,3	61,52	63,5	64,15
	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	n/a (Indikator baru)	n/a (Indikator baru)	12,3	12,43	13	14,57	13,3	15,62	13,5	14,42
18	Urusan Kearsipan											
18.1	Persentase Perangkat Daerah provinsi dan kab/kota yang mengelola arsip secara baku	%	60	60	60	75	75	75	85	85	90	80
18.2	Jumlah SDM pengelola kearsipan yang bersertifikat	Orang	22	10	22	22	60	60	70	70	80	80
III.3	Layanan Urusan Pilihan											
1	Urusan Pariwisata											
1.1	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	74.463	78.186	78.186	8.075	8.075	2.015	8.479	1.130	8.903	385
1.2	Jumlah Wisatawan Nusantara	Orang	8.632.957	9.064.605	9.064.605	820.410	820.410	2.810.342	861.431	1.542.485	904.503	3.697.666
1.3	Jumlah Paket Destinasi	Paket Destinasi	2	2	5	1	8	6	11	13	14	16

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Desa Wisata yang difasilitasi/ ditetapkan	Desa	n/a	n/a	n/a	n/a	20	11	30	32	40	32
	Jumlah Tenaga Usaha Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi	Subsektor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	4	60	8	110
	Jumlah Asesor Kompetensi Bidang Pariwisata yang terlatih	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	5	0	6	0	7	0
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	0,00%	40,00%	5,00%	-45,00%	5,00%	139,72%
	Tingkat hunian akomodasi	%	55	53,99	55	36,45	60	59,25	75	60,19	85	0,11
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Milyar	4.702,70	4.702,70	4.363,55	4.363,55	4.638,55	3.855,00	4.930,91	4.029,00	5.241,72	4.610,88
2	Urusan Pertanian											
2.1	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	%	4,27	2,38	4,77	1,56	4,26-5,73	3,16	4,92-5,56	5,01	4,99-5,62	2,86
2.2	Produksi Tanaman Pangan											
	- Padi	Ton	5.175.825	2.603.396,24	5.325.825	2.743.059,68	5.450.825	2.552.443,19	3.543.061	2.775.069,26	3.943.061	2.832.773,92
	- Jagung	Ton	1.108.317	859.846	1.136.025	927.757	1.164.426	954.025	943.537	1.012.791	963.375	826.836
	- Kedelai	Ton	14.936	14.958	15.084	1.006	15.234	402	2.861	39	2.909	48,79
2.3	Produksi Hortikultura											
	- Cabai	Ton	45.884	40.479	47.319	28.497	48.986	23.556	23.419	25.497	24.303	15.270
	- Bawang	Ton	2.056	1.390	2.072	934	2.321	1.125	571	1.130	710	1.197

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- Jeruk	Ton	41.153	30.376	42.414	56.110	43.822	71.678	48.427	44.468	53.517	42.958
	- Duku	Ton	49.810	42.791	49.828	53.399	49.845	310.741	49.863	17.573	49.880	15.326
	- Durian	Ton	56.859	42.048	56.876	30.334	56.892	46.309	30.364	40.615	30.395	39.671
	- Nanas	Ton	135.246	179.845	136.599	137.363	137.965	476.074	138.188	567.120	138.412	477.430
	- Tanaman Obat	Ton	2.885	4.885	2.942	7.860	3.001	4.793	3.061	4.895	3.122	6.358
2.4	Produktivitas Tanaman Pangan											
	- Padi	Ku/Ha	50,56	48,27	50,61	49,75	50,66	51,44	50,71	54,06	50,76	56,19
	- Jagung	Ku/Ha	65,03	61,91	65,05	67,60	65,07	64,17	65,09	71,05	65,11	62,36
	- Kedelai	Ku/Ha	12,32	14,91	12,33	15,80	12,34	15,81	12,36	13,28	12,38	14,65
2.5	Produktivitas Hortikultura											
	- Cabai	Ku/Ha	73,00	78,07	74,46	67,80	76,18	48,70	50,4	108,79	50,79	36,40
	- Bawang	Ku/Ha	80,00	79,89	80,26	66,84	80,58	58,04	53,51	62,81	56,44	72,76
	- Jeruk	Ku/Ha	498,8	324	504,9	504,00	511,1	440,00	521,4	361,73	531,8	372,72
	- Duku	Ku/Ha	123,9	98,00	124,1	155,00	124,2	133,00	124,3	90,27	124,4	67,85
	- Durian	Ku/Ha	113	88,00	113,1	68,00	113,2	75,00	67,67	109,40	67,74	97,02
	- Nanas	Ku/Ha	677,9	500,00	684,7	750,00	691,6	2.750,00	692,7	3.218,45	693,8	2.587,53
2.6	Nilai Tukar Petani Perkebunan	%	96,65	90,52	98,7	95,37	95	107,78	96	107,8	98	105,06
2.7	Produktivitas sektor perkebunan											
	- Karet	Ton/Ha/Tahun	1,33	1,35	1,34	1,44	1,35	1,40	1,35	1,46	1,36	1,18
	- Kelapa Sawit	Ton/Ha/Tahun	3,45	3,43	3,46	3,79	3,47	3,42	3,48	3,53	3,50	3,42

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- Kopi	Ton/Ha/Tahun	0,89	0,90	0,9	0,94	0,78	0,77	0,92	0,91	0,93	0,86
	- Kelapa	Ton/Ha/Tahun	1,12	1,15	1,14	1,2	1,15	1,13	1,16	1,16	1,17	1,15
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	n/a	460	n/a	392	318	176	248	271	178	367,16
3	Urusan Kehutanan											
3.1	Produksi Kayu Sub Sektor kehutanan	M3	5.500.000	7.876.404,06	5.600.000	10.971.623,42	5.800.000	9.380.135,96	5.900.000.000	9.614.736,06	6.000.000	11.203.220,45
3.2	Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	0,18	0,99	0,19	0,05	0	0	0	0	0	0
	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	%	0	0	0	0	0,14	0,56	0,16	0,12	0,17	0,27
3.3	Persentase Kerusakan kawasan hutan	%	0,27	6,46	0,24	0,04	0	0	0	0	0	0
	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi)	%	0	0	0	0	0,22	0,06	0,19	0,04	0,17	0,05
3.4	Rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan hutan	Rasio	0,44	0,44	0,44	0,61	0,44	0,44	0,44	0,46	0,44	0,47
3.5	Luasan penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan	Ha	18.500	100.322	18.500	13.482	18.500	13.250	12.350	21.755	12.350	21593,22
3.6	Penurunan luas kebakaran hutan	Ha	9.121,50	219.546	8.209,35	145,96	7.388,42	2.108,00	6.649,60	1.253,72	5.984,60	1678,02

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	2,5	11	5	5	5	3,5	5	66,14	5	83,33
4	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral											
4.1	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	98,48	98,12	99,21	98,64	99,95	98,98	100	99,01	100	99,26
4.2	Rasio Bauran EBT	%	10,22	19,46	7	20,82	10	20,82	12	23,14	20	23,15
4.3	Jumlah Sambungan Gas Rumah Tangga	SR	10.000	6.034	10.000	40.932	10.000	6.889	10.000	8.498	10.000	0
4.4	Jumlah IUP OP yang berproduksi	IUP	3	3	5	2	5	3	5	3	5	4
4.5	Minimnya Jumlah Kecelakaan Tambang yang mati	Orang	0	3	0	0	0	1	0	2	0	2
4.6	Jumlah PNBPN Sektor ESDM	Rp (Milyar)	496,43	849,49	488,48	928,41	480,81	504,44	473,43	930,03	466,32	1.455,41
4.7	Jumlah Retribusi Sektor ESDM	(Rp Juta)	550	812,56	1000	593,95	1000	145,75	1000	1050	1000	898,648
4.8	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	n/a	100	n/a	100	n/a	100	100	100	100	100
5	Urusan Perdagangan											
5.1	Neraca Perdagangan	US\$ juta	2.894	3.553	2.909	2.663,7	2.923	4.334,7	2.938	6.670,1	2.953	5.421,12
5.2	Persentase pertumbuhan ekspor	%	2	-7,21	2	-11,21	2,3	45,41%	2,4	43,42%	2,5	-13,16
	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	n/a	-5,53	n/a	-9,49	2,3	50,38%	2,4 - 5	37,66%	2,4 - 5	-14,34
	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	90	90	90	98	90	91,26%	90	97,06%	90	94,9

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	%	n/a	n/a	8,70	9,56	30	59,13%	30	56,58%	30	42,05
	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	≤10	6	≤10	4,4	≤10	4,7	≤5	7,5	≤5	4,7
6	Urusan Perindustrian											
6.1	Jumlah Industri Kecil Menengah	IKM	13.215	14.220	13.611	13.728	14.020	14.253	14.440	16.345	14.873	17914
6.2	Jumlah Industri Menengah Besar	IMB	503	507	513	543	523	579	534	613	544	613
6.3	Jumlah Industri Kreatif	IK	6.508	6.606	6.606	7.053	6.705	7.846	6.801	9.192	6.908	5317
6.4	Jumlah Sentra Industri Kreatif	SIK	36	36	37	37	39	39	40	40	41	49
	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	25,8	n/a	26,76	n/a	27,58	19,46	29,58	17,50	30,22	48,84
	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Ribu orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	264,71	206,8	267,855	220,6	267,85
	Persentase tenaga kerja di Sektor Industri terhadap total pekerja	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4,97	n/a	5,2	-
	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	37,1	n/a	37,15	48,54
	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Miliar)	Rp. Miliar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3,86 (Triliyun)	636,37	3,70 (Triliyun)	657,43	2,3 Triliyun

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nilai ekspor Produk Industri Pengolahan nonmigas (USD Juta)	USD Juta	n/a	n/a	n/a	375,65	n/a	493,15	301,36	600,84	341,27	239,49
	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	Industri	100	20	120	134	230	208	230	252	230	240
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	3	3	3	3	3	3	3,1	3	3,2	100
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	3	3	3	3	3	3	3,1	3	3,2	100
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	3	3	3	3	3	3	3,1	3	3,2	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	3	3	3	3	3	3	3,1	3	3,2	100
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	data industri	100	20	120	134	230	208	230	252	230	473
7	Urusan Transmigrasi											-
	Jumlah Penghasilan Kepala Keluarga Transmigran yang setara 3000 Kg beras per tahun	kg	3800	3800	3800	3800	3800	5718	3800	5352	3800	5352
8	Urusan Kelautan dan Perikanan											
8.1	Produksi perikanan tangkap	Ton	197.000	197.078	204.000	125.336	212.000	144.136,7 5	220.000	151.343, 6	228.000	162.105
8.2	Produksi perikanan budidaya	Ton	460.000	465.000	480.000	357.137, 75	500.000	410.708,4 1	525.000	431.243, 8	545.000	358.652
8.3	Volume ekspor produk kelautan dan perikanan	Ton	1.850,00	1.850,00	2.000,00	946.678	2.250,0 0	828,99	2.400,00	793,67	2.500,00	0
8.4	Konsumsi ikan	Kg/kap/Tahun	42	42,66	42,5	42,71	43	42,84	43,5	43,02	44	44
8.5	Produksi benur dan nener	Juta ekor	8	4	17	2	16	26	18	na	18	0
8.6	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	102,3	102,8	102,5	100,4	104,44	104,52	104,5	110,9	104,5	119,4

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.7	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	%	99,96	99,96	100,46	93,58	94,35	94,32	94,35	96,33	94,35	97,29
	Luas Kawasan Konservasi (Ha)	Ha	n/a	n/a	1.100.000	976.000	1.200	1.349	1.500	1.349	1.617	976
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	657.000	662.078	684.000	482.473	712.000	554845,16	745.000	582587,4	773.000	520.757
	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persen	10	5	15	7	10	7	20	7	20	7
III.4	Penunjang Urusan											
1	Perencanaan Pembangunan											
1.1	Persentase Program RKPD yang memenuhi THIS	%	82	82	84	84	n/a		n/a		n/a	
	Persentase Kesesuaian Sasaran Antar Dokumen	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		88	90	90	91
1.2	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	n/a		n/a		n/a	
	Ketepatan Penyampaian Draf Final PERKADA RKPD ke Biro Hukum	Tepat waktu	n/a	Tidak Tepat Waktu	n/a	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
1.3	Persentase Capaian Realisasi Target Sasaran RPJMD	%	81	60	82	50	n/a		n/a		n/a	
	Persentase Indikator Sasaran RKPD yang Diakomodir Dalam APBD	%	n/a	n/a	n/a	n/a	83	100	80	100	83	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Keuangan											
2.1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Audit BPK	WTP	WTP
2.2	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.3	Pertumbuhan PAD	%	2,5-3,5	-0,9	2,5-3,5	-3,2			n/a		n/a	
	Persentase pencapaian penerimaan PAD	%	n/a	94,22	n/a	93,49	100	81,44	100	91,56	100	93,90
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan											
3.1	Persentase jabatan pimpinan tinggi yang terisi melalui seleksi terbuka	%	100	45,00	100	76,36	100	89,28	n/a	n/a	n/a	n/a
3.2	Persentase jabatan administrator & Pengawas pada instansi pemerintah yang terisi	%	100	113,12	100	89,1	100	94,81	n/a	n/a	n/a	n/a
3.3	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu yang terisi pada instansi pemerintah	Jabatan	9.796	9.874	10.311	10.886	10.796	11.319	n/a	n/a	n/a	n/a
3.4	Persentase disiplin pegawai	%	98,3	96,35	98,4	98,4	98,5	98,52	n/a	n/a	n/a	n/a
	Nilai IPA (Indeks Profesionalitas ASN)	Angka	76	51,02	76	58,95	71	56,61	73	52,8	75	67,14
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	n/a	308,92	n/a	432,92	100	555,34	100	600,35	100	619,73

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	n/a	9,46	n/a	8,26	8	11,69	9	14,86	10	14,81
	Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	n/a	100	n/a	100	100	100	100	100	100	100
3.5	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial	%	80	80,45	85	83,6	87	90	88	96	90	91
3.6	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio kultural dan kompetensi pemerintahan	%	35	42,61	45	48,18	55	55	65	65	75	77
4	Penelitian dan Pengembangan											
4.2	Jumlah Inovasi yang diterapkan	Inovasi	55	55	62	63	69	69	76	76	83	83
4.3	Jumlah jenis tanaman yang didokumentasikan di kebun raya	Jenis	540	387	567	569	n/a	-	n/a	-	n/a	-
	Nilai Ekosistem Inovasi	Skor	0	2,20	3,0	4,08	4,0	3,88	4,2	2,76	4,5	3,34
4.4	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	8,4	7.470	8,5	24.064	24.100	79,51	24.200	79,51	24.500	83,28
5	Pengawasan											
5.1	Indeks Integritas Daerah	Indeks	60	67,39	65	NA	68	70,65	68,8	65,59	69	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	%	95	84,25	97	95	84	100	85	91,67	86	91,67
5.3	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	%	73	67,6	75	66,9	67	77,02	67,5	79,87	68	79,4
5.4	Level Maturitas SPIP	Skor	3,2	3,08	3,4	3,08	n/a		n/a		n/a	
6	Sekretariat Dewan											
6.1	Persentase anggota Dewan yang meningkat kapasitasnya	%	85	100	86	100	100	100	100	100	100	100

2.2. Gambaran Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Keuangan daerah merupakan kewenangan dan kewajiban yang esensial bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Kewenangan dan kewajiban ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Keuangan daerah memainkan peran penting dalam membentuk efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah. Hal ini berfungsi sebagai tulang punggung berbagai inisiatif pemerintah, memungkinkan penyediaan layanan publik yang penting, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam upaya mewujudkan keuangan daerah yang efektif dan efisien serta transparan, partisipatif dan akuntabel, dibutuhkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi: (i) perencanaan; (ii) penganggaran; (iii) pelaksanaan; (iv) penatausahaan; (v) pelaporan; (vi) pertanggungjawaban; dan (vii) pengawasan keuangan daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan termasuk kegiatan pembangunan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah memang memiliki hubungan yang erat dengan berbagai aspek penting, termasuk sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Hal ini merupakan siklus yang berkelanjutan dan saling berkaitan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Ruang lingkup meliputi kebijakan keuangan daerah pada pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah dan

pengelolaan pembiayaan daerah sehingga dapat membiayai kebutuhan pembangunan melalui program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Ruang lingkup keuangan daerah dapat dijabarkan secara lebih terperinci sebagai berikut:

- (1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- (2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- (3) Penerimaan daerah;
- (4) Pengeluaran daerah;
- (5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- (6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah mengacu kepada peraturan-peraturan pengelolaan keuangan yang terkait, maka pelaksanaannya harus mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain yaitu: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

2.2.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD); (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat dicermati pada kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi Neraca Daerah. Adapun kinerja pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari kapasitas keuangan daerah yang tercermin dalam Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sementara itu, Neraca Daerah dapat menggambarkan perkembangan aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah, serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Kinerja pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Sebelum penyusunan dan pelaksanaan anggaran, terlebih dahulu ditetapkan kebijakan umum anggaran yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, proses penyusunan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada, terutama peraturan yang berkaitan dengan reformasi di bidang keuangan daerah. Adapun struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

2.2.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun terakhir (2020-2024), mengalami peningkatan, pada tahun 2020 realisasi Pendapatan Daerah yaitu sebesar Rp9.278.520.060.062 meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp10.965.288.224.935 atau secara rata-rata meningkat sebesar 4,36 persen (Tabel 2.92).

Peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan relatif melambat selama 2020–2023 akibat faktor ekonomi dan non-ekonomi. Dari sisi ekonomi, perlambatan disebabkan oleh: (i) harga komoditas utama seperti batubara, karet, sawit, dan kopi yang tidak stabil; (ii) pelemahan ekonomi global akibat pandemi COVID-19 dan situasi geopolitik yang memengaruhi permintaan ekspor daerah; serta (iii) gangguan pasokan dan meningkatnya biaya logistik selama pandemi yang berdampak pada sektor perdagangan dan industri. Sementara itu, faktor non-ekonomi meliputi keterbatasan kapasitas administrasi pemerintah, perubahan regulasi, bencana alam dan lainnya. Akibatnya, untuk menutupi defisit pendapatan pada 2022–2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagian besar memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

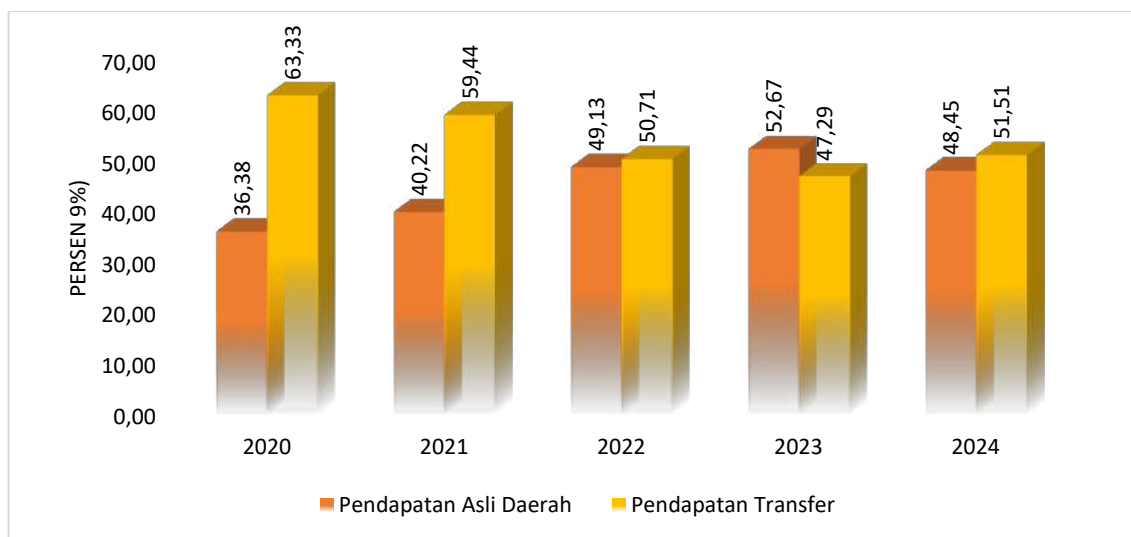
Tabel 2. 92 Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2024

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024
	2020	2021	2022	2023	2024	
I. PENDAPATAN DAERAH	9.278.520.060.063	9.611.291.244.667	10.036.955.961.132	9.871.670.562.799	10.965.288.224.935	4,36
1. Pendapatan Asli Daerah	3.375.100.984.843	3.865.463.033.085	4.930.954.855.677	5.199.841.748.586	5.312.548.123.255,90	12,43
1.1. Pendapatan Pajak Daerah	3.081.800.984.700	3.523.785.342.246	4.461.152.465.008	4.649.349.674.256	4.744.701.180.376,87	11,80
1.2. Pendapatan Retribusi Daerah	8.234.552.913	9.313.749.306	12.185.155.716	13.182.254.856	8.225.836.940,00	3,63
1.3. Hasil Kekayaan Daerah Dipisahkan	82.836.132.370	65.714.183.659	153.032.882.582	223.885.947.856	138.824.929.544,35	30,13
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	202.229.314.860	266.649.757.874	304.584.352.371	313.423.871.618	420.796.176.394,68	20,81
2. Pendapatan Transfer	5.875.896.342.538	5.712.683.072.712	5.090.093.999.526	4.667.946.127.537	5.648.721.133.679,00	-0,24
2.1. Transfer Pemerintah Pusat	5.835.674.693.538	5.712.683.072.712	5.029.223.442.526	4.667.946.127.537	5.642.095.592.679,00	-0,24
a. DBH-Pajak dan Bukan Pajak	1.933.269.369.100	1.891.734.449.581	2.442.737.296.896	1.854.967.347.879	2.645.802.349.840,00	-0,10
b. DAU	1.568.602.615.000	1.563.041.287.000	1.563.041.287.000	1.653.766.188.000	1.806.673.215.634,00	
c. DAK	203.718.863.552	220.514.359.267	188.860.939.022	261.641.344.656	236.102.516.086,00	
d. DAK Non Fisik	2.130.083.845.886	2.037.392.976.864	834.583.919.608	897.571.247.002	953.517.511.119,00	
2.2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	40.221.649,000	0,00	60.870.557.000	0,00	6.625.541.000,00	
a. Dana Penyesuaian	40.221.649.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	60.870.557.000	0,00	6.625.541.000,00	0,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	27.522.732.682	33.145.138.870	15.907.105.929	3.882.686.676	4.018.968.000,00	-25,92
3.1. Pendapatan Hibah	26.967.232.682	33.145.138.870	15.907.105.929	3.882.686.676	4.018.968.000,00	-27,75
3.2. Pendapatan Lainnya	555.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. BELANJA	9.517.763.493.966	10.060.730.260.979	9.663.575.726.751	9.653.373.230.507	10.908.424.497.431,90	3,47
1. Belanja Operasi	5.038.670.309.776	5.365.031.503.749	4.499.276.793.174	4.913.125.539.886	5.308.864.484.748,94	1,31
1.1. Belanja Pegawai	1.771.524.397.218	1.923.290.549.742	2.092.571.068.579	2.158.618.753.463	2.529.375.704.900,00	9,31
1.2. Belanja Barang dan Jasa	1.392.760.537.519	1.811.885.209.417	2.042.275.862.382	2.297.732.037.188	2.205.615.578.219,94	12,18
1.3. Belanja Bunga	0,00	382.096.916	13.227.699.524	8.817.133.280	2.786.684.555,00	0,00
1.4. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Belanja Hibah	1.873.445.636.521	1.629.473.647.674	351.202.162.689	447.957.615.955	561.105.467.074,00	-26,02

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024
	2020	2021	2022	2023	2024	
1.6. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	9.981.050.000,00	0,00
1.7. Belanja Biaya Provisi	939.738.518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Belanja Modal	1.664.700.767.364	1.836.834.114.022	1.536.370.414.095	1.239.943.154.569	1.303.072.011.451,71	-5,94
2.1. Belanja Tanah	14.597.408.000	70.853.405.527	8.708.743.955	1.743.753.503	701.091.453,00	-53,19
2.2. Belanja Peralatan/Mesin	181.062.816.387	288.834.883.969	342.811.302.542	363.526.584.860	272.576.659.179,00	10,77
2.3. Belanja Bangunan/Gedung	201.564.960.985	289.050.835.757	361.568.165.910	266.557.790.089	260.181.034.813,71	6,59
2.4. Belanja Jalan. Irigasi. Jaringan	904.310.171.568	1.107.398.086.860	747.812.255.898	541.178.479.004	699.678.969.706,00	-6,21
2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya	53.768.783.085	80.696.901.908	75.469.945.790	65.940.480.613	66.149.063.496,00	5,32
2.6. Belanja Modal Aset Lainnya	215.967.588.497	0,00	0,00	996.066.500	3.785.192.804,00	-63,61
2.7. Belanja Modal BLUD	12.330.403.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8. Belanja Modal BOS	81.098.635.795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Belanja Tak Terduga	197.104.066.605	14.055.098.162	19.553.804.801	0,00	82.301.295,00	-85,71
3.1. Belanja Tak Terduga	197.104.066.605	14.055.098.162	19.553.804.801	0,00	82.301.295,00	-85,71
4. Belanja Transfer Bantuan Keuangan	2.617.288.350.222	2.844.809.545.046	3.608.374.714.680	3.500.304.536.052	4.296.405.699.936,25	13,19
4.1. Belanja BH-Pajak ke Pem. Kab/Kota/Desa	1.455.636.933.603	1.579.375.912.864	1.914.984.234.446	2.179.118.758.571	2.399.428.901.098,00	13,31
4.2. Belanja Bantuan Keuangan ke Kab/Kota/Desa	1.161.651.416.619	1.265.433.632.182	1.693.390.480.234	1.321.185.777.481	1.896.976.798.838,25	13,04
III. PEMBIAYAAN	589.092.782.358	701.159.551.423	354.251.259.039	708.750.674.543	257.986.334.117,46	-18,65
1. Penerimaan Pembiayaan	474.977.880.806	615.159.551.423	151.894.033.565	322.795.834.055	154.808.628.910,91	-24,44
1.1. Penggunaan SiLPA	349.234.370.470	121.593.374.660	79.713.949.496	322.795.834.055	154.808.628.910,91	-18,40
1.2. Penerimaan Pinjaman Daerah	125.743.510.336	493.566.176.763	72.180.084.070	0,00	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	114.114.901.552	86.000.000.000	202.357.225.474	385.954.840.488	103.177.705.206,55	-2,49
2.1. Penyertaan Modal Daerah	114.114.901.552	86.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang	0,00	0,00	202.357.225.474	385.954.840.488	103.177.705.206,55	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	360.862.979.254	529.159.551.423	- 50.463.191.909	-63.159.006.433	51.630.923.704,36	-38,50
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN	121.619.545.351	79.720.535.111	322.917.042.473	154.808.667.410	108.494.651.207,36	-2,81

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Prov. Sumatera Selatan 2020-2024

Pendapatan Daerah yang terdiri dari tiga komponen yaitu (1) Pendapatan Asli Daerah; (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat menggambarkan tingkat kemampuan fiskal suatu daerah. Proporsi realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2020-2024 masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dengan rata-rata sebesar 53,73 persen. Kemudian diikuti proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah secara rata-rata sebesar 46,10 persen. Terakhir proporsi realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rata-rata sebesar 0,17 persen.



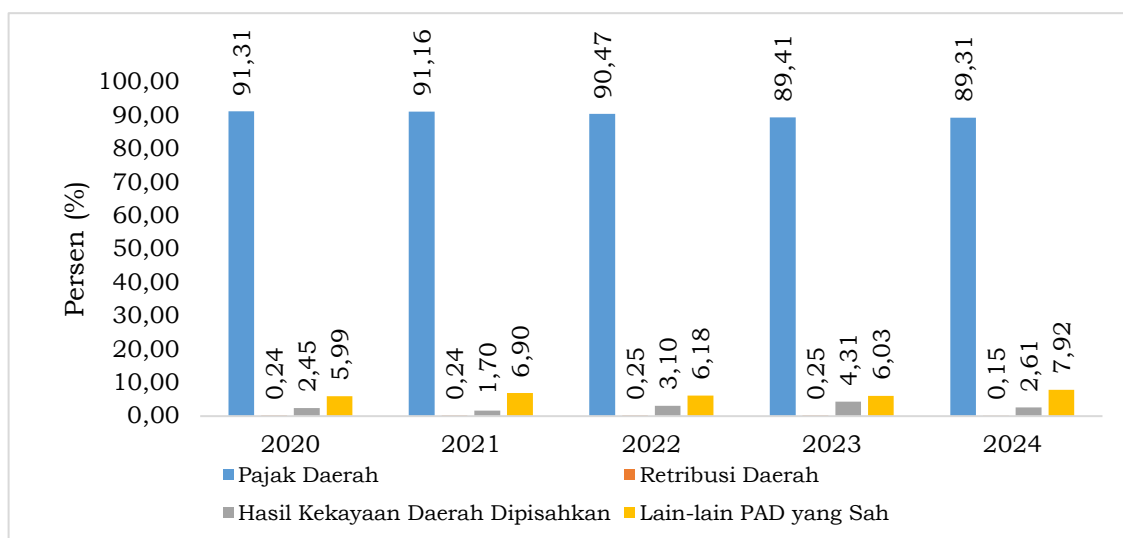
Gambar 2. 111 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2024

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Prov, Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 (diolah)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan masih relatif rendah dibandingkan Pendapatan Transfer, hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih mengandalkan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat seperti (a) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak; (b) Dana Alokasi Umum (DAU); (c) Dana Alokasi Khusus (DAK); dan (d) Dana Insentif Daerah (DID). Hal ini menjadi salah satu tantangan bagi Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan terpilih untuk meningkatkan PAD dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah baru agar dapat meningkatkan pembangunan daerah yang lebih optimal.

A. Pendapatan Asli Daerah

Komponen dari realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tumbuh signifikan selama periode 2020-2024. Tabel 2.92 menunjukkan selama periode 2020-2024 Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara rata-rata tumbuh positif sebesar 12,43 persen, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang secara rata-rata tumbuh sebesar 30,13 persen, kemudian diikuti oleh Retribusi Daerah secara rata-rata 3,63 persen, Lain-lain PAD yang Sah rata-rata tumbuh sebesar 20,81 persen, dan Pajak Daerah rata-rata tumbuh sebesar 11,80 persen.



Gambar 2. 112 Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2024

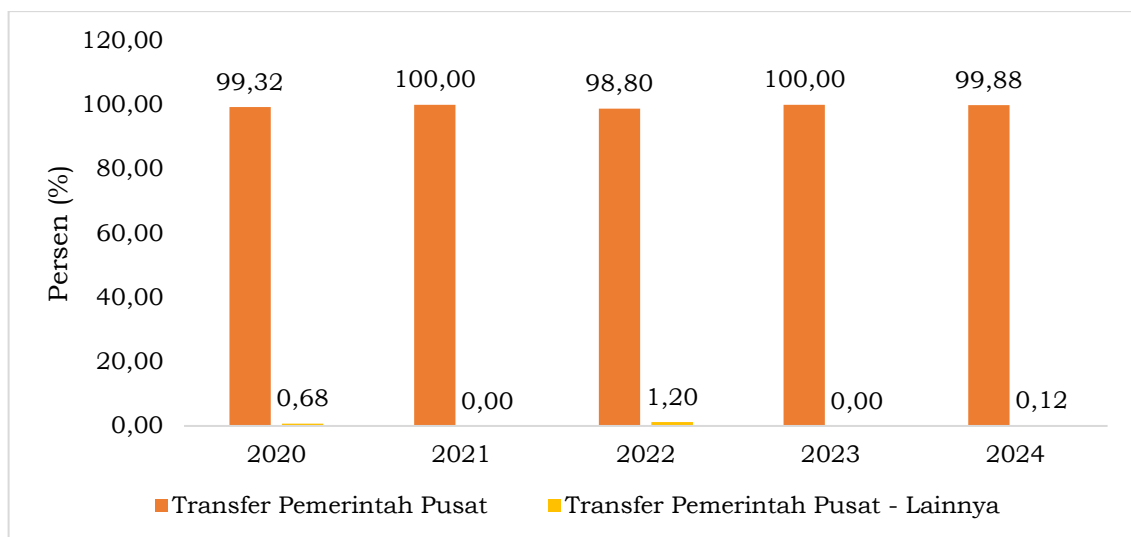
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Prov, Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 (diolah)

Tren proporsi realisasi PAD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama 2020 sampai 2024 didominasi oleh Pajak Daerah dengan proporsi rata-rata sebesar 90,33 persen. Kemudian diikuti oleh proporsi Lain-lain PAD yang Sah dengan rata-rata sebesar 6,60 persen, proporsi rata-rata Hasil Kekayaan yang Dipisahkan sebesar 2,83 persen, dan terakhir yaitu proporsi Retribusi Daerah sebesar 0,23 persen selama tahun 2020 sampai 2024.

B. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi Sumatera Selatan secara rata-rata tumbuh negatif yaitu sebesar -0,98 persen selama 2020-2024. Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan rata-rata mengalami penurunan yaitu sebesar -0,84 persen selama 2020-2024. Sementara itu, selama periode yang sama Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

yang diperoleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hanya pada tahun 2020 berupa Dana Penyesuaian sebesar Rp40.221.649.000 dan pada tahun 2024 berupa Dana Insentif Daerah sebesar Rp60.625.541.000. Pendapatan Transfer diperoleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama 2020-2023 terus mengalami penurunan yang sejalan dengan beberapa kebijakan selama masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan pelemahan ekonomi mengakibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 dan 2023 tidak memperoleh pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-lainnya berupa Dana Penyesuaian maupun Dana Insentif Daerah (Tabel 2.92).



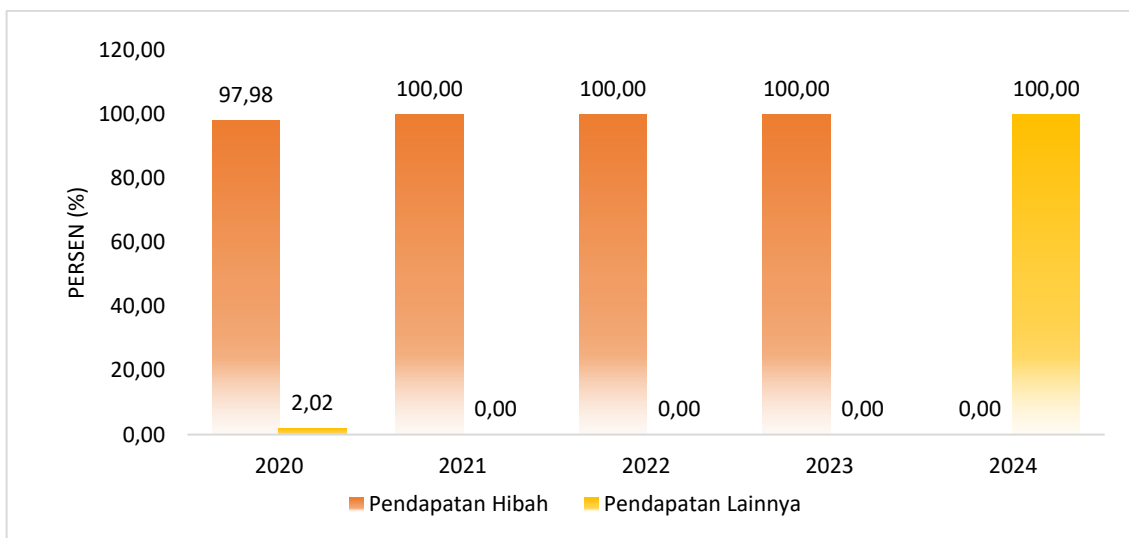
Gambar 2. 113 Proporsi Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2024

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Prov, Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 (diolah)

Proporsi realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama 2020 sampai 2024 menunjukkan tren yang positif. Penyumbang terbesar Pendapatan Transfer selama periode tersebut adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari (i) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak; (ii) Dana Alokasi Umum (DAU); (iii) Dana Alokasi Khusus (DAK); dan (iv) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dengan proporsi rata-rata sebesar 99,60 persen. Sementara itu proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya terhadap Total Pendapatan Transfer yang terdiri dari Dana Penyesuaian dan Dana Insentif Daerah yang tercatat masih sangat kecil yaitu dengan proporsi rata-rata hanya sebesar 0,40 persen selama tahun 2020 sampai 2024.

C. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Selain itu, penyebab tumbuh melambatnya realisasi total Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun terakhir juga disebabkan komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang secara rata-rata turun secara signifikan yaitu sebesar -38,18 persen selama 2020-2024. Penyebab utama penurunan ini masih dari dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi daerah yang berdampak pada penurunan Lain-lain PAD yang Sah berupa Pendapatan Hibah yang terus mengalami penurunan signifikan selama pandemi COVID-19 dan masa pemulihan ekonomi (Tabel 2.92).



Gambar 2. 114 Proporsi Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2024

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Prov, Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 (diolah)

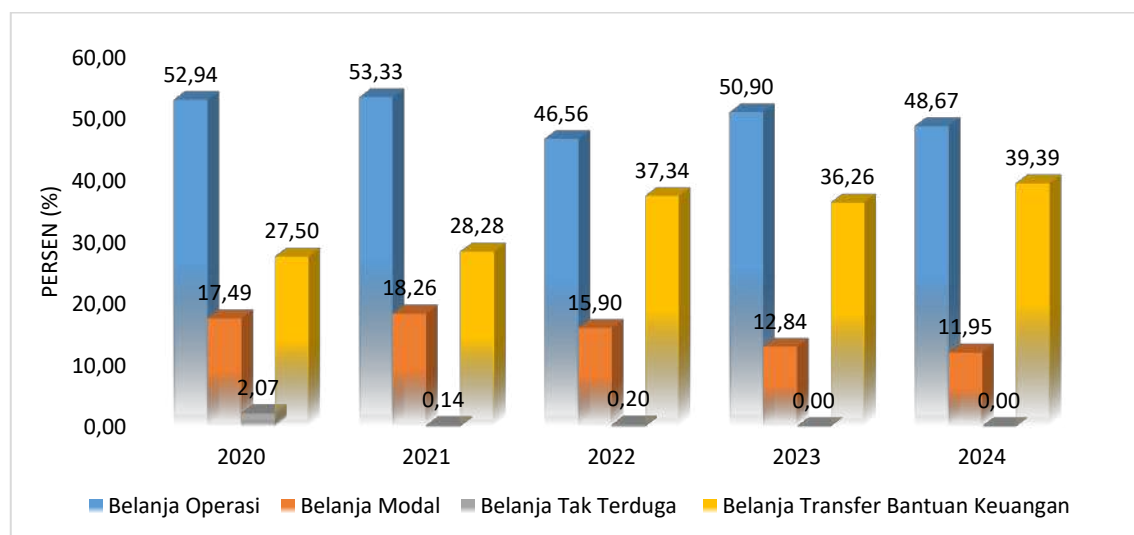
Realisasi rata-rata proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 0,30 persen selama periode 2020 sampai 2024. Penyumbang Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terbesar adalah proporsi realisasi Pendapatan Hibah terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rata-rata sebesar 79,60 persen. Kemudian diikuti oleh proporsi Pendapatan Hibah Lainnya dengan rata-rata sebesar 20,40 persen selama periode 2020 sampai 2024.

2.2.1.2 Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan salah satunya juga tercermin pada kebijakan pemerintah berupa

belanja daerah yang seimbang antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Kinerja belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kinerja pertumbuhan realisasi Belanja Daerah yang secara rata-rata tumbuh melambat yaitu sebesar 3,47 persen selama periode 2020-2024 (Tabel 2.92). Belanja Daerah yang terdiri dari (i) Belanja Operasi; (ii) Belanja Modal; (iii) Belanja Tak Terduga; dan (iv) Belanja Transfer Bantuan Keuangan. Penyumbang terbesar pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah Belanja Transfer Bantuan Keuangan yang secara rata-rata tumbuh sebesar 13,19 persen selama lima tahun terakhir. Belanja Operasi juga rata-rata tumbuh sebesar 1,31 persen. Sementara itu, Belanja Modal turun secara signifikan selama 2020-2024, yang tumbuh negatif sebesar -5,94 persen, dan terakhir yaitu Belanja Tak Terduga yang terealisasi pada tahun 2020-2024 juga tumbuh negatif dengan rata-rata sebesar -85,71 persen.



Gambar 2. 115 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2024

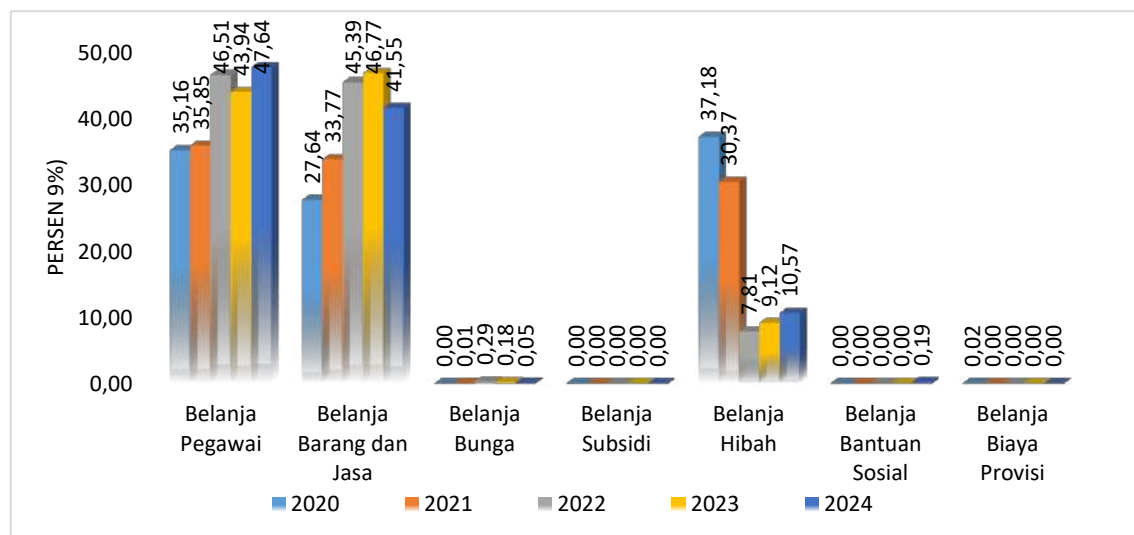
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Prov, Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 (diolah)

Proporsi realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama 2020 sampai 2024 yang terdiri dari (i) Belanja Operasi; (ii) Belanja

Modal; (iii) Belanja Tak Terduga; dan (iv) Belanja Transfer Bantuan Keuangan, dari data tersebut tercatat bahwa penyumbang realisasi total Belanja Daerah terbesar adalah proporsi Belanja Operasi yang secara rata-rata menyumbang sebesar 50,48 persen. Kemudian diikuti oleh Belanja Transfer Bantuan Keuangan dengan proporsi rata-rata sebesar 33,75 persen, proporsi Belanja Modal dengan rata-rata sebesar 15,29 persen, dan terakhir Belanja Tak Terduga rata-rata sebesar 0,48 persen selama 2020 sampai 2024.

A. Belanja Operasi

Kinerja realisasi Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang rata-rata tumbuh sebesar 1,31 persen selama periode 2020-2024. Penyumbang pertumbuhan Belanja Operasi terbesar adalah Belanja Barang dan Jasa yang secara rata-rata tumbuh positif yaitu sebesar 12,18 persen selama periode 2020-2024, kemudian diikuti oleh Belanja Pegawai yang rata-rata tumbuh sebesar 9,31 persen. Sementara itu, Belanja yang turun signifikan adalah Belanja Hibah yang rata-rata tumbuh negatif yaitu sebesar -26,02 persen. Belanja Bunga meningkat signifikan, tahun 2021-2024 secara rata-rata tumbuh sebesar 93,93 persen. Selain itu, Belanja Subsidi selama periode 2020-2024 tidak dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 2. 116 Proporsi Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2024

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Prov, Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 (diolah)

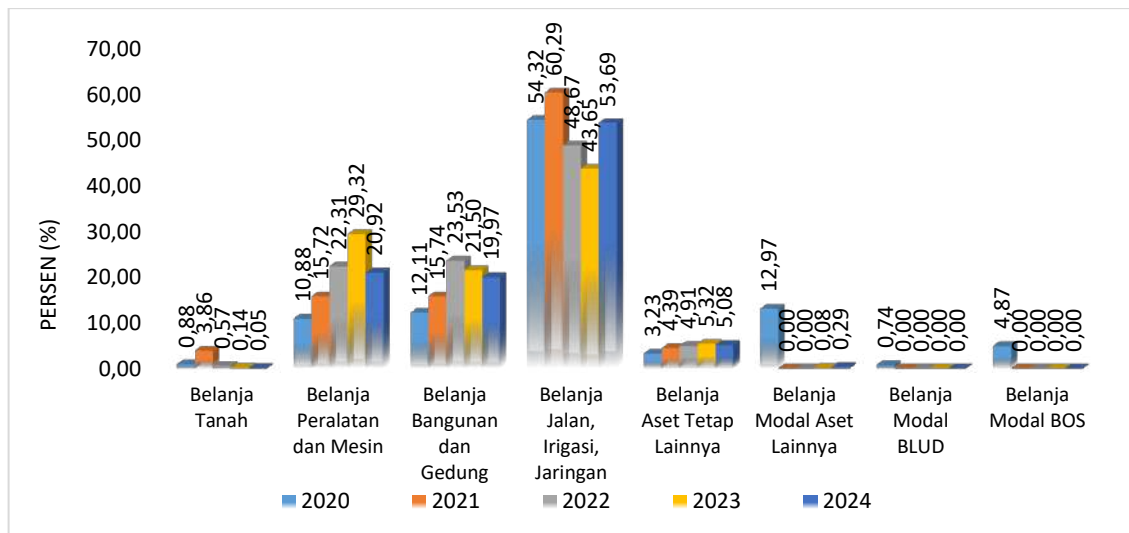
Demikian juga untuk Belanja Bantuan Sosial yang baru dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp9.981.050.000. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga hanya

mengalokasikan Belanja Biaya Provisi tahun 2020 yaitu sebesar Rp939.738.518. Pertumbuhan dan penurunan realisasi Belanja Operasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut tergantung dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme kebijakan daerah terkait penyesuaian anggaran yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan yang akan membantu target capaian realisasi Belanja Operasi menjadi optimal.

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama 2020 sampai dengan 2024 berasal dari Belanja Operasi dengan proporsi terbesar adalah Belanja Pegawai dengan proporsi rata-rata sebesar 41,82 persen. Kemudian diikuti oleh Belanja Barang dan Jasa dengan proporsi rata-rata sebesar 39,02 persen, Belanja Hibah dengan proporsi rata-rata sebesar 19,01 persen, Belanja Bunga dengan proporsi rata-rata sebesar 0,11 persen, Belanja Bantuan Sosial dengan proporsi rata-rata sebesar 0,04 persen, Belanja Subsidi dan Belanja Biaya Provisi dengan proporsi rata-rata masing-masing sebesar 0,00 persen selama tahun 2020 sampai 2024.

B. Belanja Modal

Kinerja realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang rata-rata mengalami penurunan yaitu sebesar -5,94 persen selama periode 2020 sampai 2024. Penyumbang pertumbuhan Belanja Modal terbesar adalah Belanja Peralatan dan Mesin secara rata-rata tumbuh sebesar 10,77 persen. Kemudian diikuti oleh Belanja Bangunan dan Gedung secara rata-rata tumbuh sebesar 6,59 persen, Belanja Aset Tetap Lainnya secara rata-rata tumbuh sebesar 5,32 persen. Sementara itu, komponen Belanja Modal yang mengalami penurunan signifikan adalah Belanja Modal Aset Lainnya yang secara rata-rata turun sebesar -63,61 persen, kemudian diikuti oleh Belanja Tanah rata-rata turun sebesar -53,19 persen, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan rata-rata turun sebesar -6,21 persen. Selain itu, untuk Belanja Modal BLUD, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hanya mengalokasikan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp12.330.403.046 dan Belanja Modal BOS yaitu sebesar Rp81.098.635.795.



Gambar 2. 117 Proporsi Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2024

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Prov, Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 (diolah)

Proporsi realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama 2020 sampai dengan 2024. Tercatat bahwa penyumbang terbesar realisasi Belanja Modal adalah komponen Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan proporsi rata-rata sebesar 52,13 persen. Kemudian diikuti oleh Belanja Peralatan dan Mesin dengan proporsi rata-rata sebesar 19,83 persen, Belanja Bangunan dan Gedung dengan proporsi rata-rata sebesar 18,57 persen, Belanja Aset Tetap Lainnya dengan proporsi rata-rata sebesar 4,59 persen, Belanja Modal Aset Lainnya dengan proporsi rata-rata sebesar 2,67 persen, Belanja Tanah dengan proporsi rata-rata sebesar 1,10 persen, Belanja Modal BOS dengan proporsi rata-rata sebesar 0,97 persen, dan terakhir adalah Belanja Modal BLUD dengan proporsi rata-rata sebesar 0,15 persen selama tahun 2020 sampai 2024.

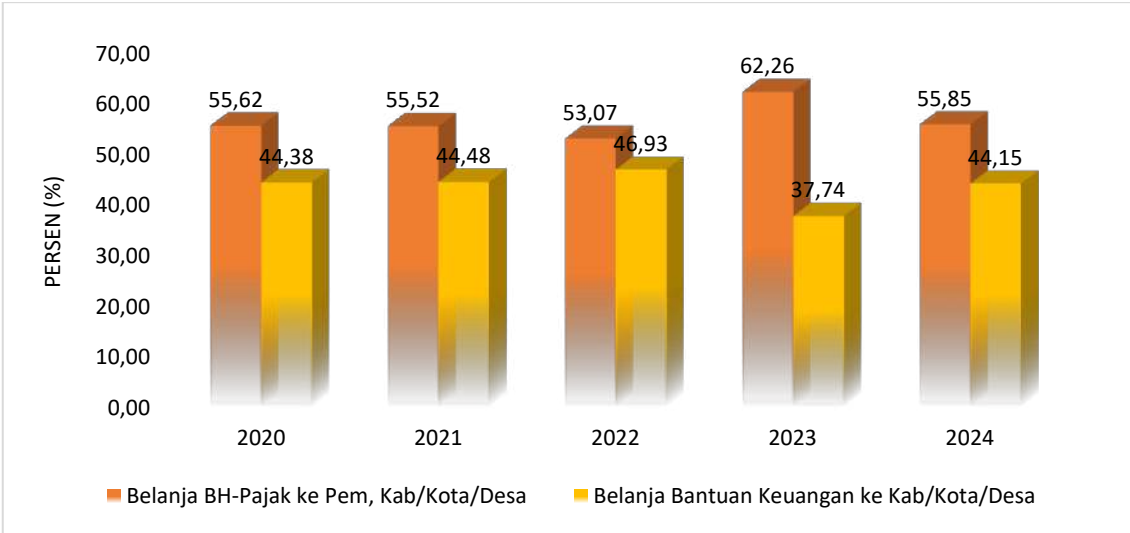
C. Belanja Tak Terduga

Kinerja realisasi Belanja Tak Terduga yang terealisasi pada tahun 2020-2024 juga tumbuh negatif dengan rata-rata sebesar -86,71 persen. Sementara itu, pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak mengalokasikan Belanja Tak Terduga. Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan Belanja tak Terduga sebesar Rp82.301.295. Kondisi seperti ini tergantung dari mekanisme kebijakan daerah dalam proses perencanaan dan penyesuaian anggaran belanja daerah dengan memperhatikan pelaksanaan anggaran yang efisien dan efektif dengan

meminimalisir pemborosan dan penyalahgunaan dana akan memaksimalkan realisasi Belanja Daerah.

D. Belanja Transfer Bantuan Keuangan

Kinerja realisasi pertumbuhan Belanja Transfer Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan signifikan yang secara rata-rata tumbuh sebesar 13,19 persen selama lima tahun terakhir (2020-2024). Proporsi Belanja Transfer Bantuan Keuangan terhadap Belanja Daerah juga cukup besar dengan proporsi rata-rata yaitu sebesar 33,75 persen, hal ini tergantung dengan kemampuan daerah karena selama periode tersebut seluruh kondisi ekonomi daerah sedang melemah termasuk Provinsi Sumatera Selatan, serta pemerintah yang terus berupaya mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.



Gambar 2. 118 Proporsi Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2024

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Prov, Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 (diolah)

Belanja Transfer Bantuan Keuangan yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa dan Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa, tercatat bahwa terdapat penyumbang realisasi total Belanja Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terbesar adalah Belanja Bagi Hasil Pajak ke Pemerintah Kabupaten/Kota dengan proporsi rata-rata sebesar 56,46 persen, sementara Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa dengan proporsi rata-rata sebesar 43,54 persen selama periode 2020-2024. Peningkatan ini menandakan pemulihan ekonomi daerah terutama di Kabupaten, Kota, dan Desa sudah mulai membaik, serta meningkatkan

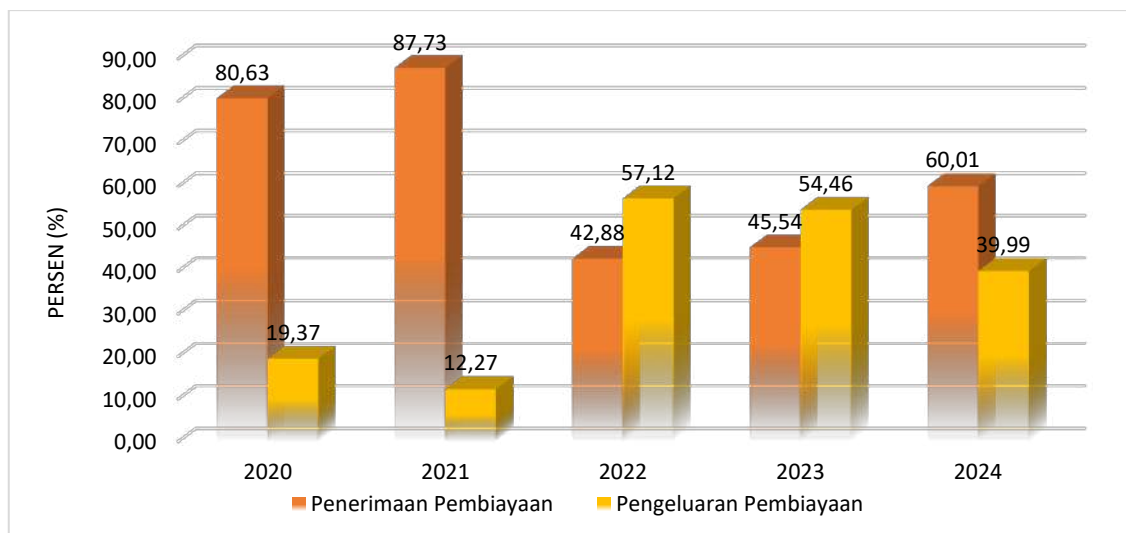
kesadaran dan kepatuhan para pelaku ekonomi untuk membayar pajak daerah.

2.2.1.3 Pembiayaan Daerah

Terkait Pembiayaan Daerah dalam struktur APBD, ditegaskan bahwa pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan, komponen yang dimasukkan dalam penerimaan daerah terdiri dari komponen pos sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Adapun Pengeluaran Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi penerimaan daerah), pembiayaan pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 apabila *performance budgeting* memperlihatkan defisit, maka ada beberapa alternatif dari komponen penerimaan pembiayaan daerah yang dapat menutupi defisit tersebut, antara lain yaitu: (i) Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA); (ii) Pencairan Dana Cadangan; (iii) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; (iv) Penerimaan Pinjaman Daerah; (v) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan (vi) Penerimaan Piutang Daerah. Apabila terjadi surplus anggaran daerah maka akan dimanfaatkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah, berupa: (i) Pembentukan dana cadangan; (ii) Penyertaan modal pemerintah daerah; (iii) Pembayaran pokok utang; dan (iv) Pemberian pinjaman daerah.

Kinerja pertumbuhan realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan nilai yang negatif yaitu sebesar -38,50 persen dalam kurun waktu 2020-2024. Penggunaan SiLPA mengalami kontraksi sebesar -18,40, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan secara rata-rata menurun yaitu sebesar -2,49 persen selama periode tersebut, sementara pertumbuhan realisasi Penerimaan Pembiayaan secara rata-rata mengalami penurunan yaitu sebesar -24,44 persen (Tabel 2.92).



Gambar 2. 119 Proporsi Realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2024

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Prov, Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 (diolah)

Proporsi realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama 2020-2024, sumber Pembiayaan Daerah terbesar diperoleh dari Penerimaan Pembiayaan dengan proporsi rata-rata sebesar 63,36 persen. Sementara proporsi rata-rata Pengeluaran Pembiayaan sebesar 36,64 persen selama periode 2020-2024, Pengeluaran Pembiayaan ini diperuntukan membiayai Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo. Selain itu, sumber Penerimaan Pembiayaan yang terbesar diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya (SiLPA) dengan proporsi rata-rata sebesar 69,15 persen, sedangkan dari Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar 30,85 persen selama periode 2020-2024.

2.2.1.4 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala Dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Untuk Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tergambar dari Tabel 2.93 Pertumbuhan Neraca Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Aset

Aset lancar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan befluktuatif dimana sebesar Rp263.889.725.861,12 di tahun 2020 mengalami kenaikan hingga menjadi Rp1.108.923.034.463,81 pada tahun 2023 kemudian di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp285.775.285.334,01. Komponen penyumbang peningkatan aset lancar adalah dari sisi kas yang mengalami peningkatan terutama di tahun 2022 dan di tahun 2023 adanya Investasi Jangka Pendek sebesar Rp745.606.605.000,00.

Sementara investasi jangka panjang disumbang dari investasi permanen, dimana mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,01 persen. Peningkatan juga terjadi pada aset tetap, yaitu rata-rata tumbuh sebesar 0,04 persen. Penyumbang pertumbuhan terbesar pada Aset Tetap adalah Jalan Irigasi, dan Jaringan, diikuti oleh Tanah serta Gedung dan Bangunan. Selama kurun waktu 2020-2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak mengalokasikan dana cadangan. Sedangkan Aset Lainnya dalam neraca keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersifat fluktuatif selama kurun waktu 2020 – 2024.

Tabel 2. 93 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
ASET							
A	ASET LANCAR	263.889.725.861,12	206.852.240.873,52	449.200.563.709,10	1.108.923.034.463,81	285.775.285.334,01	0,42
	1. Kas	124.537.952.473,58	79.801.398.000,59	323.265.976.194,19	156.437.177.080,91	108.493.637.565,36	0,47
	- Kas di Kas Daerah	61.752.769.102,86	23.462.357.600,53	274.006.730.562,58	74.596.229.326,20	52.777.368.467,42	2,26
	- Kas di Bendahara Penerimaan	24.959.467,00	13.231.924,00	30.928.275,00	59.221.418,00	1.598.870,00	0,20
	- Kas di Bendahara Pengeluaran	76.450.634,00	-	806.333,00	80.827.868,00	5.400.859,00	
	- Setara Kas						
	- Kas di BLUD	41.259.937.445,85	45.734.763.013,06	48.049.228.689,61	47.716.403.161,71	54.431.184.933,94	0,07
	- Kas di Bendahara BOS	11.917.590.919,58	1.112.967.254,00	937.548.379,00	33.896.014.595,00	167.276.450,00	8,27
	- Kas Lainnya	9.506.244.904,29	9.478.078.209,00	240.733.955,00	88.480.712,00	-	(0,65)
	Kas Dana BOSP					1.110.807.985	
	2. Investasi Jangka Pendek				745.606.605.000,00	76.377.561.000,00	
	3. Piutang	45.492.130.594,97	27.475.892.332,94	25.323.502.334,41	118.635.084.376,51	25.335.787.646,47	0,61
	- Piutang Pajak Daerah	11.483.626.887,25	1.027.224.000,00	708.935.200,00	704.995.200,00	704.995.200,00	(0,31)
	Beban Dibayar Dimuka	2.600.265.276,57	3.718.075.722,06	3.865.882.104,87	4.352.125.768,81	5.407.446.294,51	0,21
	- Penyisihan Piutang	- 3.803.231.913,37	- 4.441.184.050,08	- 5.552.879.460,44	- 5.954.998.891,10	- 7.250.457.280,37	0,18
	Piutang Lain-lain PAD yang sah				27.848.190.080,02	21.953.630.355,90	
	- Piutang Lain-lain	35.211.470.344,52	24.295.442.503,96	23.262.752.336,23	1.779.444.921,43	1.063.936.576,43	(0,42)
	- Piutang Retribusi Daerah		2.876.334.157,00	3.038.812.153,75	2.667.451.500,00	3.456.236.500,00	
	- Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				85.401.052.797,35		
	- Piutang Transfer Pemerintah Pusat				1.836.823.000,00	-	
	4. Persediaan	93.859.642.792,57	99.574.950.539,99	100.611.085.180,50	88.244.168.006,39	75.568.299.122,18	(0,05)
B	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.267.323.138.467,60	7.442.535.027.852,15	7.464.748.909.687,83	7.564.559.786.607,54	7.605.470.797.587,84	0,01
	1. Investasi Non Permanen						
	- Investasi Non Permanen Lainnya						
	- Investasi Bergulir						
	2. Investasi Permanen	7.267.323.138.467,60	7.442.535.027.852,15	7.464.748.909.687,83	7.564.559.786.607,54	-	(0,24)
	- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.267.323.138.467,60	7.442.535.027.852,15	7.464.748.909.687,83	7.564.559.786.607,54		(0,24)
	- Investasi Permanen Lainnya	-					
C	ASET TETAP	21.371.820.120.036,50	22.563.173.385.495,50	24.016.551.323.097,40	24.167.251.484.137,30	24.248.552.843.528,70	0,03
	1. Tanah	10.573.586.020.615,60	11.329.490.821.739,50	12.296.049.749.427,70	12.289.958.443.437	12.473.958.399.005	0,04
	2. Peralatan dan Mesin	2.460.507.732.869,82	2.768.373.058.986,04	3.225.357.196.046,15	3.635.251.294.429	3.895.148.948.864	0,12
	3. Gedung dan Bangunan	4.215.821.795.215,60	4.462.812.938.458,99	4.907.444.174.181,42	5.203.730.797.305	5.389.821.510.653	0,06
	4. Jalan, Jangkar, dan Jaringan	12.175.895.778.611,60	12.991.502.065.603,30	13.723.350.167.230,60	14.357.391.556.473	15.023.391.175.273	0,05
	5. Aset Tetap Lainnya	793.406.131.269,25	671.272.671.147,30	747.614.026.026,74	768.736.313.192	743.176.859.155	(0,01)
	6. Konstruksi dalam pengerjaan	100.163.923.630,28	323.103.432.987,30	147.555.360.560,20	96.982.980.328	144.480.144.834	0,46
	7. Akumulasi Penyusutan	- 8.947.561.262.175,54	- 9.983.381.603.426,95	- 11.030.819.350.375,40	- 12.184.799.901.027	- 13.421.424.194.254	0,11
C	DANA CADANGAN						
D	ASET LAINNYA	3.092.158.862.248,83	3.095.520.167.809,64	3.314.452.507.791,37	3.117.054.088.111,00	1.604.651.605.006,34	(0,12)
	1. Tagihan piutang penjualan angsuran	17.750.000,00	17.750.000,00	17.750.000,00	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00
	2. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-					
	3. Kemitraan dengan pihak ketiga	1.669.475.073.000,00	1.668.304.573.000,00	1.503.156.493.000,00	1.503.156.493.000,00	-	(0,27)
	4. Aset tidak berwujud	109.283.355.264,00	130.386.962.349,00	142.500.347.757,00	147.184.578.134,00	155.342.972.722,00	0,09
	5. Aset Lain-lain	2.526.741.647.765,70	2.401.307.817.956,64	2.779.007.144.165,37	2.584.857.640.542,00	2.578.832.144.539,34	0,01
	6. Akumulasi Amortisasi	- 1.213.358.963.780,87	- 1.104.496.935.496,00	- 1.110.229.227.131,00	- 113.635.464.370,00	- 124.769.806.238,00	(0,22)
	7. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				- 1.004.526.909.195,00	- 1.004.771.456.017,00	
E	PROPERTI INVESTASI					1.542.707.866.587,00	
	1. Properti Investasi Tanah					1.536.451.493.000,00	
	2. Properti Investasi Gedung dan Bangunan					9.235.986.000,00	
	3. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi					- 2.979.612.413,00	
JUMLAH ASET DAERAH		31.995.191.846.614,10	33.308.080.822.030,80	35.244.953.304.285,70	35.957.788.393.319,70	35.287.158.398.043,80	0,03

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
KEWAJIBAN							
A	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	726.957.586.260,92	1.045.531.709.076,97	1.318.710.997.409,26	1.917.955.896.459,09	1.257.454.634.685,99	0,20
	1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PRK)	2.917.561.164,02	59.890.739.802,00	348.087.756,00	3.013.982.401,91	197.707.674,25	6,31
	2. Utang Bunga		184.805.354,47	190.566.067,82	91.140.306,00		
	3. Utang Pajak						
	4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Bank		215.272.103.903,49	489.132.545.694,26	103.177.705.206,26		
	5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Obligasi						
	6. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Pusat						
	7. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Provinsi						
	8. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Kabupaten/Kota						
	9. Pendapatan Diterima Dimuka	1.185.425.170,83	1.203.651.638,07	3.112.364.236,34	3.946.164.576,92	2.566.603.990,04	0,38
	10. Utang Jangka Pendek Lainnya	496.327.918.994,52	267.342.933.050,26	67.800.415.576,99	180.525.449.554,27		(0,14)
	11. Utang Bagi Hasil Pajak	100.570.243.223,00					
	12. Utang Kepada PT, Bukit Asem						
	# Utang Beban	125.956.437.708,55					
	13. Utang Belanja/Belanja yang masih harus dibayar		501.637.475.328,69	758.127.018.077,85	1.627.201.454.413,73	1.254.690.323.021,70	
B	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	125.743.510.336,00	404.037.583.195,22	-	-		
	1. Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	125.743.510.336,00					
	2. Utang Dalam Negeri Obligasi						
	3. Utang Pemerintah Pusat						
	4. Utang Pemerintah Provinsi						
	5. Utang Pemerintah Kabupaten/Kota						
	6. Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan						
	7. Utang Obligasi						
	8. Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		404.037.583.195,22				
JUMLAH KEWAJIBAN		852.701.096.596,92	1.449.569.292.272,20	1.318.710.997.409,26	1.917.955.896.459,09	1.257.454.634.685,99	0,18
EKUITAS DANA							
A	EKUITAS DANA LANCAR	31.142.490.750.017,20	31.858.511.529.758,70	33.926.242.306.876,40	34.039.832.496.861,20	34.029.703.763.358,50	0,02
B	EKUITAS DANA INVESTASI						
C	EKUITAS DANA CADANGAN						
JUMLAH EKUITAS DANA		31.142.490.750.017,20	31.858.511.529.758,70	33.926.242.306.876,40	34.039.832.496.861,20	34.029.703.763.358,50	0,02
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		31.995.191.846.614,10	33.308.080.822.030,90	35.244.953.304.285,70	35.957.788.393.320,30	35.287.158.398.044,50	0,03

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2024

B. Kewajiban

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 2020-2023 terjadi pertumbuhan yang fluktuatif pada tiap tahunnya. Pada tahun 2020 kewajiban jangka pendek berjumlah Rp726.957.586.260,92 kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp1.045.531.709.076,97, dan di tahun 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar Rp1.917.955.896.469,09. Faktor utama penyebab pertumbuhan kewajiban jangka pendek ini adalah pertumbuhan utang kepada pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota meliputi diantaranya kekurangan pembayaran bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota. Untuk itu, ke depan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus meningkatkan pengelolaan keuangan untuk mengurangi kewajiban jangka pendek tersebut. Sementara dari kewajiban jangka panjang hanya ada

pada kurun waktu 2020 dan 2021, secara keseluruhan bahwa jumlah kewajiban periode 2020-2023 adalah mengalami pertumbuhan yang mencapai 0,35%.

C. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan, masing-masing terbentuk dari pos-pos yang memengaruhi pertumbuhannya. Ekuitas Dana Lancar, yang mencakup SILPA, pendapatan yang ditangguhkan, cadangan piutang, cadangan persediaan, serta dana untuk pembayaran utang jangka pendek, mengalami penurunan terutama karena berkurangnya dana untuk pembayaran utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi, yang meliputi dana pada investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, serta pembayaran utang jangka panjang, menunjukkan peningkatan setiap tahun pada periode 2020–2023. Sementara itu, Ekuitas Dana Cadangan tidak dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Analisis lebih lanjut terhadap neraca daerah untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan berdasarkan analisis rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, sebagai berikut:

D. Rasio Likuiditas

Dalam mencermati neraca keuangan Pemerintah Daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar dan rasio quick. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Untuk memperoleh rasio lancar, rumusan yang digunakan adalah dengan membagi aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Untuk Sumatera Selatan rasio likuiditas adalah sebagaimana Tabel 2.94.

Tabel 2. 94 Rasio Likuiditas Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Rasio Likuiditas	2020	2021	2022	2023
Rasio Lancar	0,36	0,20	0,34	0,58
Rasio quick	0,20	0,06	0,25	0,08

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2024 (diolah)

a). Rasio Lancar

Rasio Lancar adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dengan aset lancarnya dapat

menjamin pembayaran hutang. Semakin tinggi rasio berarti hutang–hutang yang ada semakin terjamin, sementara untuk Sumatera Selatan rasionya cukup rendah sehingga diindikasikan perlu diperbaiki pengelolaan keuangan agar tidak mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya.

b). Rasio Quick

Rasio quick adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah daerah membayar hutangnya dengan cepat. Rasio ini dinilai lebih baik dari rasio lancar karena aset lancar yang nantinya akan dicairkan untuk menutup tagihan jangka pendek sudah dikurangkan dengan jumlah persediaan, yang dinilai kurang liquid untuk membayar hutang. Nilai rasio yang dihasilkan menunjukkan hasil bahwa kemampuan aset lancar setelah dikurangi persediaan yang dimiliki cukup sulit untuk menutup semua tagihan jangka pendek yang dimiliki.

E. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

Tabel 2. 95 Rasio Solvabilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Rasio Solvabilitas	2020	2021	2022	2023
Rasio total hutang terhadap aset	0,03	0,05	0,04	0,06
Rasio hutang terhadap modal	0,02	0,03	0,04	0,05

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2024 (diolah)

Rasio solvabilitas juga merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang ditanggung Pemerintah Daerah dibandingkan dengan aset yang dimiliki atau untuk mengetahui sejauh mana aset Pemerintah Daerah dibiayai dari hutang, Rasio ini diukur dengan:

a) Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio ini menunjukkan besarnya bagian dari seluruh aset yang dibiayai dari hutang. Semakin kecil nilai yang didapat dari perhitungan berarti semakin baik rasio hutang terhadap total aset, Rasio ini juga dapat mengukur besarnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayarkan hutangnya kepada kreditur. Dari hasil perhitungan didapat rasio total

hutang terhadap total aset adalah sebesar 0,03 dan meningkat menjadi 0,06 di Tahun 2023.

b) Rasio Total Hutang Terhadap Modal

Rasio ini perbandingan antara hutang dan ekuitas dalam pendanaan Pemda dan menunjukkan kemampuan modal Pemda untuk memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki. Hasil perhitungan menunjukkan rasio ini pada angka 0,02 di tahun 2020 dan meningkat menjadi 0,05 di tahun 2023.

2.2.1.5 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

A. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- (1) Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- (2) Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama,

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan, baik berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran menunjukkan tren fluktuatif namun meningkat dengan rasio rata-rata sebesar 21,12% per tahun. Rasio Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di tahun 2020 sebesar 18,39% dari total pengeluaran daerah dengan fluktuasi rasio hingga mencapai 22,97% di tahun 2024. Rasio belanja pegawai masih perlu ditekankan untuk meningkatkan ruang fiskal belanja publik. Berikut adalah rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2. 96 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase (%)
1	2020	1.771.524.397.218,00	9.631.878.395.517,89	18,39

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase (%)
2	2021	1.923.290.549.742,00	10.146.730.260.979,40	18,95
3	2022	2.092.571.068.579,00	9.865.932.952.224,69	21,21
4	2023	2.158.618.753.463,00	10.039.328.070.995,10	21,50
5	2024	2.529.375.704.900,00	11.011.602.202.638,40	22,97
Rata-Rata		2.095.076.094.780,40	9.920.967.419.929,26	21,12

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2024 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama. Analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama selama tahun 2020-2023 cenderung fluktuatif rata-rata pertumbuhan sebesar -0,37% per tahun dari Rp6.573.477.352.117,00 di tahun 2020 menjadi Rp6.492.835.745.958,00 di tahun 2023. Fluktuasi tersebut sangat dipengaruhi oleh meningkatnya belanja pegawai dan belanja transfer bagi hasil khususnya di tahun 2021 dan tahun 2023. Belanja pegawai dalam kurun waktu 2020-2023 rata-rata naik 6,84% pertahun dari tahun 2020 sebesar Rp1.771.524.397.218,00 menjadi Rp2.158.618.753.463,00 pada tahun 2023. Belanja transfer bagi hasil rata-rata meningkat dari Rp2.617.288.350.222,00 di tahun 2020 menjadi Rp3.500.304.536.052,00 di tahun 2023.

Tabel 2. 97 Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2024

Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat	6.573.477.352.117	6.497.628.840.624	6.274.058.976.223	6.492.835.745.958	7.490.146.878.412	3,56%
Belanja Operasi	3.644.970.033.739	3.552.764.197.416	2.443.773.231.268	2.606.576.369.418	3.090.481.171.974	-2,13%
Belanja Pegawai	1.771.524.397.218,00	1.923.290.549.742,00	2.092.571.068.579,00	2.158.618.753.463,00	2.529.375.704.900,00	9,43%
Belanja Hibah	1.873.445.636.520,56	1.629.473.647.674,00	351.202.162.689,00	447.957.615.955,00	561.105.467.074,00	-9,67%
Belanja Tak Terduga	197.104.066.604,97	14.055.098.162,00	19.553.804.801,00	-	82.301.295,00	
Belanja Tak Terduga	197.104.066.604,97	14.055.098.162,00	19.553.804.801,00	-	82.301.295,00	
Belanja Transfer	2.617.288.350.222	2.844.809.545.046	3.608.374.714.680	3.500.304.536.052	4.296.405.699.936	13,82%
Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota	1.455.636.933.603,00	1.579.375.912.863,60	1.914.984.234.446,00	2.179.118.758.571,00	2.399.428.901.098,00	13,41%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	1.161.651.416.618,73	1.265.433.632.182,36	1.693.390.480.234,34	1.321.185.777.481,22	1.896.976.798.838,25	16,09%
Pengeluaran Pembiayaan	114.114.901.552,00	86.000.000.000,00	202.357.225.474,00	385.954.840.488,00	103.177.705.206,55	
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	114.114.901.552,00	86.000.000.000,00				
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri			202.357.225.474,00	385.954.840.488,00	103.177.705.206,55	

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2024 (diolah)

Peningkatan Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas perlu disikapi mengingat peningkatan tersebut dapat mempersempit ruang fiskal untuk belanja publik. Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dapat dilihat pada Tabel 2.97.

B. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam periode tahun 2020-2023 perkembangan surplus/defisit riil anggaran relatif berkurang dan mempunyai tren fluktuatif. Defisit riil anggaran terjadi pada tahun 2020 dan 2021 dimana defisit tahun 2020 sebesar Rp239.243.433.903,86 dan defisit tahun 2021 sebesar Rp449.439.016.312,22.

Adapun tahun 2022 terjadi surplus riil anggaran dengan nilai sebesar Rp373.380.234.382,05 dan Rp218.297.332.292,72 pada tahun 2023.

Tabel 2. 98 Surplus/Defisit Riil Anggaran

Uraian	Realisasi			
	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN DAERAH	9.278.520.060.062,03	9.611.291.244.667,17	10.036.955.961.132,70	9.871.670.562.799,80
BELANJA DAERAH	9.517.763.493.965,89	10.060.730.260.979,40	9.663.575.726.750,69	9.653.373.230.507,08
(Surplus/Defisit Riil)	(239.243.433.903,86)	(449.439.016.312,22)	373.380.234.382,05	218.297.332.292,72

Jika dibandingkan antara defisit riil anggaran daerah dengan komponen penutupnya diketahui bahwa defisit riil anggaran yang terjadi ditahun 2020 dan 2021 dapat ditutup dengan SiLPA yang dapat dimanfaatkan di tahun berkenaan, sebagaimana terlihat pada Tabel 2. 99.

Tabel 2. 99 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	121.619.545.351	79.720.535.111	322.917.042.473	154.808.667.410	372.776.341.252

Besarnya SiLPA pada akhir tahun menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio SiLPA terhadap total belanja daerah diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SiLPA yang terjadi bisa menunjukkan rendahnya penyerapan belanja daerah. Namun demikian, besarnya SiLPA juga disebabkan adanya dana dari pusat yang bersifat *earmark* dan tidak dapat terserap pada akhir tahun anggaran dan sisa saldo kas pada BLUD. Rasio SiLPA terhadap total belanja di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 mencapai rasio tertinggi pada tahun 2022, dengan kontribusi sebesar 3,34%. Secara umum rasio dan kontribusi SiLPA terhadap Total Belanja Daerah trendnya fluktuatif. Rasio/Kontribusi SiLPA terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.100.

Tabel 2. 100 Rasio SiLPA terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2024

Tahun	SILPA (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Rasio
2020	121.619.545.351	9.517.763.493.966	1,28
2021	79.720.535.111	10.060.730.260.979	0,79
2022	322.917.042.473	9.663.575.726.751	3,34

Tahun	SILPA (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Rasio
2023	154.808.667.410	9.653.373.230.507	1,60
2024	372.776.341.252	12.521.993.152.832	2,98

Penurunan terhadap penggunaan SILPA ini tentu dipengaruhi oleh SILPA yang terus berkurang juga setiap tahunnya. Gejala ini tentu mengarah pada potensi adanya kondisi *fiscal distress* (tekanan anggaran). Meskipun terjadi defisit riil, saldo penggunaan SILPA pada penerimaan pembiayaan relatif cukup besar sehingga masih menghasilkan realisasi SILPA dan dapat digunakan untuk menutup defisit riil pada tahun selanjutnya.

2.2.2 Kerangka Pendanaan

A. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Setelah mendeskripsikan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu tahun 2020-2024, sebagai kerangka keuangan yang telah dimasukkan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya dilakukan proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan sebagai kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Analisis kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dalam memproyeksikan kemampuan riil keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 mendatang.

B. Pendapatan Daerah

Adanya kebijakan penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mulai berlaku di tahun 2025, dimana ada 7 jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, yaitu:

a) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c) Pajak Alat Berat

Pajak Alat Berat (PAB) adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat.

e) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan (PAP) adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

f) Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

g) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu, Opsen dikenakan atas pajak terutang dari Pajak MBLB. Wajib Pajak untuk Opsen merupakan Wajib Pajak atas jenis pajak MBLB, Tarif Opsen, yang dihitung dari besaran pajak terutang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di masa yang akan datang (2025-2029), maka ditetapkan arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- (2) Penataan kelembagaan, kebijakan, dan regulasi sebagai dasar hukum pemungutan diantaranya dengan melakukan penyesuaian terhadap tarif pemungutan;
- (3) Penguatan peraturan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- (4) Sosialisasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai dampak penerapan Opsen PKB dan BBN-KB terhadap penerimaan yang dihitung berdasarkan jumlah kendaraan pada wilayah Kabupaten/Kota tersebut;
- (5) Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- (6) Penguatan kapasitas kelembagaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan;
- (7) Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan penerimaan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- (8) Pengembangan kualitas aparatur melalui diklat teknis maupun diklat profesi lainnya di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- (9) Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) agar terwujudnya pelayanan yang baik kepada masyarakat;
- (10) Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
- (11) Peningkatan sarana dan prasarana untuk mempercepat pelayanan dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial;
- (12) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan instansi pemungut;
- (13) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima.

Selain hal tersebut, arah kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan difokuskan pada:

- (1) Penyusunan regulasi dan revidi terhadap regulasi yang telah tersedia guna mendukung peningkatan pendapatan daerah;
- (2) Menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- (3) Melakukan pemutakhiran dan akurasi data potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- (4) Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang pendapatan daerah;
- (5) Mengintensifkan kegiatan pengawasan internal dan melakukan monitoring dan evaluasi untuk seluruh program yang akan diimplementasikan;
- (6) Melakukan monitoring dan evaluasi secara kontinyu terhadap program dan atau kegiatan yang telah dilaksanakan;
- (7) Melakukan sosialisasi pemahaman kepada seluruh masyarakat terhadap pendapatan daerah;
- (8) Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah dengan meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan instansi terkait;
- (9) Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
- (10) Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah maupun optimalisasi potensi KPBU, Obligasi, CSR, Filantropi dan Swasta.

Pada awalnya proyeksi pendapatan daerah terdapat beberapa asumsi yang menjadi dasar proyeksi, diantaranya asumsi proyeksi pajak, seperti telah diuraikan di atas bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan pada kurun waktu tahun 2020–2024 tercapai rata-rata sebesar 9,45 persen, dan berkontribusi sebesar 79,56 persen terhadap keseluruhan pendapatan daerah dari PAD, hal ini mengindikasikan bahwa dalam tahun-tahun mendatang komponen Pajak Daerah tetap menjadi tumpuan dan andalan di dalam peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Lebih lanjut, penetapan proyeksi pendapatan retribusi relatif stagnan dan tidak menggambarkan kenaikan penerimaan.

Struktur pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah diperoleh dari Pendapatan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Atas Penempatan Deposito,

Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Atas Pengelolaan Sampah Regional, dan Pemanfaatan Aset oleh pihak ketiga. Pendapatan denda pajak daerah diharapkan diperoleh dari dampak gencarnya pemerintah daerah provinsi melakukan penelusuran kendaraan yang tidak mendaftarkan ulang.

Terkait proyeksi Dana Transfer, penyusunan target dana bagi hasil pajak/bukan pajak pada tahun-tahun mendatang secara umum terdapat kenaikan per tahun. Kenaikan tersebut mempertimbangkan rerata realisasi dana bagi hasil pajak per tahun dan penurunan dana bagi hasil bukan pajak. Penyusunan target DAK bersifat flat dengan *baseline* tahun 2024, mempertimbangkan tidak ada perubahan yang fundamental terkait perhitungan alokasi, nilai tahun-tahun sebelumnya yang dianggap masih relevan sebagai perkiraan target.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- (1) Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- (2) Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- (3) Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
- (4) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penerimaan Pendapatan Asli Daerah guna peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan melalui pembenahan tata kelola administrasi dan pengawasan di lapangan secara berkala;
- (5) Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah, menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan pajak kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Provinsi Sumatera Selatan;
- (6) Memperkuat proses pemungutan pajak daerah melalui penyusunan produk hukum, penyesuaian tarif pajak serta peningkatan sumberdaya aparatur;
- (7) Pemanfaatan teknologi dalam sosialisasi pajak, penerapan sistem pelayanan dan pelaporan secara online dan pengembangan/upgrade

aplikasi samsat dan non samsat;

- (8) Terus melanjutkan dan mengembangkan kerjasama dengan institusi lain dalam upaya mengoptimalkan pendapatan seperti: (1) Pendampingan korusupgah/deputi pencegahan KPK bidang Optimalisasi Pendapatan daerah; (2) Kerjasama dengan instansi lain seperti disdukcapil dalam penerapan pembayaran pajak berbasis KTP-elektronik; (3) BPH-Migas, Kerjasama pertukaran data konsumsi/pendistribusian bahan bakar; (4) Pembentukan Tim OPAD (Pol PP, Biro Hukum, PU PSDA dan PTSP);
- (9) Pengembangan sistem pelayanan baru yang memudahkan dan menjangkau proses pembayaran pajak secara lebih luas;
- (10) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah seperti gedung, asrama, aula dan aset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan aset tersebut;
- (11) Meningkatkan koordinasi dan evaluasi dengan OPD pemungut retribusi daerah;
- (12) Sosialisasi terhadap peraturan yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi;
- (13) Menggali objek pemungutan retribusi baru dan memperbaiki sistem tarif retribusi;
- (14) Mengevaluasi besaran penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada perusahaan-perusahaan milik daerah, Perusahaan Milik Negara, Perusahaan Milik Swasta, dengan mempertimbangkan realisasi PAD dari kontribusi serta mengevaluasi Business Plan dari masing-masing perusahaan-perusahaan tersebut;
- (15) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah;
- (16) Meningkatkan pemanfaatan sumber pendanaan inovatif, seperti insentif jasa lingkungan dan skema nilai ekonomi karbon;
- (17) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah dengan melalui:
 - Melakukan penyehatan internal perusahaan baik dengan cara perampingan jumlah tenaga kerja dan peningkatan kapasitas dan

kapabilitas sumber daya manusia perusahaan, serta melakukan efisiensi pengeluaran rutin perusahaan;

- Memperluas cakupan pelayanan perusahaan dengan membuka kantor cabang di Kabupaten/Kota yang potensial;
- Memperluas cakupan bidang usaha dari perusahaan, antara lain BPR Sriwijaya juga berpotensi untuk melakukan pembiayaan di sektor pertanian atau agribisnis dan PDPDE berpotensi untuk memperluas usaha di sektor hulu migas;
- Menyusun Rencana Pengembangan Usaha (Business Plan) perusahaan untuk jangka menengah;
- Memperkuat pengawasan dan pembinaan BUMD oleh Pemerintah Provinsi melalui Biro Perekonomian;
- Menambah stimulan pembiayaan untuk perusahaan yang baru berdiri atau stimulan untuk perusahaan yang memiliki rencana pengembangan usaha yang layak secara ekonomi dan finansial;
- Mendorong BUMD untuk melakukan kerjasama usaha dengan investor baik dalam maupun luar negeri.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana transfer terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

- (1) Melakukan rekonsiliasi antara pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota penghasil sebagai dasar penyaluran dana transfer termasuk juga melakukan upaya untuk mengusulkan revisi Regulasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) sehingga dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar wilayah eksplorasi Sumber Daya Alam (SDA);
- (2) Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana transfer;
- (3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pengalokasian dan pengelolaan dana transfer;
- (4) Mengupayakan peningkatan Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan hasil evaluasi keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2024, maka dapat disiapkan asumsi penghitungan perkiraan pendapatan daerah tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- (1) Rata-rata Pertumbuhan PAD selama tahun 2025-2029 adalah sebesar 1,40% per tahun dengan rincian: (a) rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah sebesar 1,64%, (b) rata-rata pertumbuhan Retribusi Daerah sebesar 0 persen, (c) rata-rata pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 0%.
- (2) Rata-rata Pertumbuhan Dana Transfer selama tahun 2025-2029 adalah sebesar 0 persen per tahun.
- (3) Rata-rata Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan yang Sah selama tahun 2025-2029 adalah sebesar 0% per tahun.

Pertimbangan lain yang mendasari penetapan proyeksi 5 tahun ke depan juga memperhatikan tingkat capaian 5 tahun terakhir, untuk capaian PAD 5 tahun terakhir dengan pertumbuhan sebesar 6,32% didukung oleh tingginya pertumbuhan pajak daerah sebesar 9,45%. Akan tetapi pada proyeksi 5 tahun kedepan penetapan target dilakukan dengan tingkat rasionalitas yang cukup dengan memperhatikan realisasi tahun terakhir.

Begitu pun dengan penetapan target Dana Transfer telah dilakukan dengan hati-hati mengingat fluktuasi pertumbuhan 5 tahun terakhir serta mempertimbangkan juga realisasi transfer pemerintah pusat dalam 5 tahun terakhir tidak pernah ditransfer penuh atau tidak pernah tercapai 100%. Kehati-hatian dalam penetapan target perlu dilakukan mengingat penerimaan daerah yang tidak tercapai akan mengganggu pembiayaan pembangunan yang akan dilakukan sebagaimana yang terjadi dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2020-2024, target pendapatan Provinsi Sumatera Selatan tidak pernah tercapai 100%.

Tabel 2. 101 Proyeksi Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan 2025-2030

Uraian	Proyeksi					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN	11.129.125.002.891,00	11.175.807.580.572,80	11.626.018.318.742,40	12.096.876.679.740,10	12.731.101.473.657,10	13.549.281.593.204,80
PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.838.287.154.591,00	4.819.449.619.379,62	5.401.933.993.200,13	5.790.939.729.694,31	6.342.082.170.079,90	7.075.931.702.943,23
Pendapatan Pajak Daerah	3.833.367.486.607,00	4.012.860.825.379,62	4.427.642.189.398,79	4.908.793.214.686,55	5.426.240.815.042,24	5.982.631.111.706,23
Pendapatan Retribusi Daerah	5.110.991.800,00	5.536.107.400,00	11.699.961.800,00	12.739.167.350,00	13.836.713.588,00	14.947.302.497,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	173.213.785.434,00	148.107.513.275,00	295.735.800.634,49	187.956.286.215,92	203.146.797.366,12	358.288.994.025,32
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	826.594.890.750,00	652.945.173.325,00	666.856.041.366,85	681.451.061.441,84	698.857.844.083,54	720.064.294.714,68
PENDAPATAN TRANSFER	6.286.774.924.300,00	6.352.173.149.473,18	6.219.773.969.470,65	6.301.497.283.292,09	6.384.446.446.820,86	6.468.639.847.802,56
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	6.286.774.924.300,00	6.352.173.149.473,18	6.219.773.969.470,65	6.301.497.283.292,09	6.384.446.446.820,86	6.468.639.847.802,56
Dana Perimbangan	6.280.285.631.300,00	6.345.586.517.078,18	6.213.088.537.589,72	6.294.711.569.932,96	6.377.558.947.761,33	6.461.649.036.257,14
Bagi Hasil Pajak	882.079.548.000,00	895.310.741.220,00	908.740.402.338,30	922.371.508.373,38	936.207.080.998,98	950.250.187.213,96
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.286.525.020.000,00	1.305.822.895.300,00	1.325.410.238.729,50	1.345.291.392.310,44	1.365.470.763.195,10	1.385.952.824.643,03
Dana Alokasi Umum	1.765.321.372.000,00	1.791.801.192.580,00	1.818.678.210.468,70	1.845.958.383.625,73	1.873.647.759.380,12	1.901.752.475.770,82
Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.185.053.612.000,00	1.368.183.879.815,00	1.388.706.638.012,23	1.409.537.237.582,41	1.430.680.296.146,14	1.452.140.500.588,34
Kurang Salur DBH Tahun 2023/Tahun 2027-2030	751.604.197.000,00	212.914.760.122,18	771.553.048.041,00	771.553.048.041,00	771.553.048.041,00	771.553.048.041,00
Kurang Salur DBH Tahun 2024	409.701.882.300,00	771.553.048.041,00				
Dana Insentif Daerah	6.489.293.000,00	6.586.632.395,00	6.685.431.880,93	6.785.713.359,14	6.887.499.059,53	6.990.811.545,42

Uraian	Proyeksi					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.062.924.000,00	4.184.811.720,00	4.310.356.071,60	4.439.666.753,75	4.572.856.756,36	4.710.042.459,05
Pendapatan Hibah	4.062.924.000,00	4.184.811.720,00	4.310.356.071,60	4.439.666.753,75	4.572.856.756,36	4.710.042.459,05
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus						
Pendapatan Lainnya						

Dengan berbagai kebijakan dan asumsi tersebut, pendapatan daerah diperkirakan akan meningkat dari Rp11.129.125.002.891 pada tahun 2025 menjadi Rp13.549.281.593.204,80 pada tahun 2030 (lihat Tabel 2.101).

C. Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat menjadi stimulus bagi perkembangan ekonomi daerah yang dapat memberikan daya ungkit bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, alokasi anggaran perlu dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Untuk itu, Belanja Daerah tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung dan memperkuat pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Untuk itu, kebijakan Belanja Daerah tahun anggaran 2025-2029 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif yaitu:

- (1) Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas baik pemenuhan pelayanan dasar maupun pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- (2) Belanja daerah dimanfaatkan seoptimal mungkin rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi;
- (3) Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan;
- (4) Belanja daerah dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan peningkatan pelayanan publik;
- (5) Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian tolok ukur dan target kinerja tersebut dapat meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran;

- (6) Setiap alokasi belanja dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama diprioritaskan penerapan pengelolaan keuangan berbasis Akrua. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya;
- (7) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Wajib, Urusan Pilihan, dan Urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan;
- (8) Belanja daerah dialokasikan secara proporsional dan sesuai kemampuan dan kebutuhan, yang dialokasikan untuk Belanja Operasi, (meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan); Belanja Modal; Belanja Tak Terduga; dan Belanja Transfer;
- (9) Belanja daerah dioptimalkan untuk meningkatkan sinergitas pembangunan (Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten serta Pembangunan Desa);
- (10) Belanja daerah diperuntukkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah (RPJMD);
- (11) Belanja daerah difokuskan pada upaya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Daerah;
- (12) Belanja daerah diorientasikan dalam upaya mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- (13) Belanja daerah diprioritaskan dengan meningkatkan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- (14) Belanja daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menumbuhkan iklim investasi yang kondusif, perluasan penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan tingkat kemiskinan.

Belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain hal tersebut, belanja daerah dialokasikan untuk penuntasan program/kegiatan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:

- (1) Dialokasikan untuk membiayai belanja operasi yang bersifat wajib dan rutin. Komponen belanja tersebut meliputi: Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet; Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
- (2) Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
 - a. Prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
 - b. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
 - c. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kewenangan provinsi, meliputi 19 (sembilan belas) jenis pelayanan dasar yaitu: pendidikan menengah; pendidikan khusus; pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi; pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi; pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi; rehabilitasi sosial dasar penyandang

disabilitas terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

- (3) Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs);
- (4) Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- (5) Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
- (6) Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2029 serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran;
- (7) Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur.

Belanja daerah dari tahun ke tahun relatif mengalami kenaikan. Alokasi belanja daerah sudah mencakup pembayaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil untuk 13 (tiga belas) bulan dan Tunjangan Hari Raya (Gaji ke-14) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan kenaikan gaji pokok. Selain itu dianggarkan pula untuk pemberian tambahan penghasilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai, disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Tabel 2. 102 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2030

Uraian	Proyeksi					
	2025*	2026**	2027	2028	2029	2030
Belanja	11.237.619.654.098,00	11.284.302.231.780,00	11.626.018.318.742,00	12.096.876.679.740,00	12.731.101.473.657,00	13.549.281.906.663,50
Belanja Operasi	5.872.607.277.934,00	6.144.844.195.355,00	6.574.174.282.624,22	6.874.357.755.934,00	7.476.635.255.124,56	7.860.150.131.280,08
Belanja Pegawai	3.041.734.426.438,00	3.333.057.936.012,00	3.435.828.061.292,48	3.586.112.915.350,63	3.692.541.765.169,14	3.945.356.387.169,87
Belanja Barang dan Jasa	2.427.062.474.606,00	2.363.919.482.520,00	2.771.277.693.321,29	2.896.104.922.507,38	3.092.599.781.364,50	3.490.776.598.815,25
Belanja Bunga		-				
Belanja Subsidi	1.300.000.000,00	3.350.000.000,00	4.350.000.000,00	4.350.000.000,00	4.350.000.000,00	4.350.000.000,00
Belanja Hibah	402.510.376.890,00	444.516.776.823,00	362.718.528.010,46	387.789.918.075,99	687.143.708.590,92	419.667.145.294,96
Belanja Bantuan Sosial	-	-				
Belanja Modal	1.565.694.127.152,00	1.271.633.562.637,00	1.998.098.646.965,16	2.133.360.513.092,15	2.140.878.291.685,56	2.321.435.034.104,75
Belanja Modal Tanah	3.819.000.000,00	2.910.000.000,00	235.850.000.000,00	286.350.000.000,00	206.400.000.000,00	225.850.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	350.900.047.746,00	355.212.329.396,00	449.867.139.337,94	491.407.335.742,59	474.266.099.893,70	504.662.660.840,78
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	279.426.525.609,00	322.077.058.402,00	307.402.916.067,60	317.012.499.616,82	337.287.521.795,07	383.565.226.129,97
Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	851.792.111.432,00	545.483.550.245,00	953.278.283.470,00	985.656.546.838,00	1.069.713.798.665,00	1.149.915.797.253,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	73.731.188.000,00	39.272.483.100,00	49.275.308.089,62	50.717.130.894,75	52.682.671.331,80	56.601.729.881,00
Belanja Modal Aset Lainnya	6.025.254.365,00	6.678.141.494,00	2.425.000.000,00	2.217.000.000,00	528.200.000,00	839.620.000,00
Belanja Tak Terduga	25.698.652.000,00	270.421.980.137,00	50.000.000.000,00	55.000.000.000,00	60.500.000.000,00	66.550.000.000,00
Belanja Tak Terduga	25.698.652.000,00	270.421.980.137,00	50.000.000.000,00	55.000.000.000,00	60.500.000.000,00	66.550.000.000,00
Belanja Transfer	3.773.619.597.012,00	3.597.402.493.651	3.003.745.389.153	3.034.158.410.714	3.053.087.926.847	3.301.146.427.820

Uraian	Proyeksi					
	2025*	2026**	2027	2028	2029	2030
Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota	1.698.080.940.377,00	1.982.610.588.683,00	2.190.344.826.794,00	2.201.296.552.938,00	2.212.303.035.703,00	2.223.364.550.881,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	2.075.538.656.635,00	1.614.791.904.968,00	813.400.562.359,00	832.861.857.776,00	840.784.891.144,00	1.077.781.876.939,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota dan Pemerintah Desa			813.400.562.359,00	832.861.857.776,00	840.784.891.144,00	1.077.781.876.939,00
Belanja Kurang Salur kepada Kab/Kota						
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa						

Keterangan Data :

* RAPBD Perubahan Evaluasi Kemendagri

** RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

Untuk kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025-2029, dari aspek Penerimaan Pembiayaan Daerah beberapa upaya yang akan ditempuh antara lain yaitu:

- (1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SiLPA) sebagai sumber penerimaan pada APBD;
- (2) Penggunaan pinjaman, melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik dan proyek-proyek besar lainnya;
- (3) Menyisihkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) untuk menambah Dana Cadangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020;
- (4) Memperluas dan meningkatkan kerjasama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan;
- (5) Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terutama dari sisi Pengeluaran Pembiayaan Daerah ditempuh dengan upaya melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada BUMD untuk perbaikan/peningkatan kinerjanya.

Selain pendapatan dan belanja daerah yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, pada bagian ini dibahas mengenai pembiayaan. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran cicilan utang dalam rangka pinjaman daerah dan provinsi.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dapat melakukan percepatan pembangunan dalam rangka Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh alternatif pembiayaan lainnya;
2. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi pemerintah daerah;
3. Pemerintah daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan, dan lain-lain (untuk konteks obligasi daerah);
4. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian.

Tabel 2. 103 Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2030

Uraian	Proyeksi					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pembiayaan	108.494.651.207	108.494.651.207	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
Penerimaan Pembiayaan	108.494.651.207	108.494.651.207	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Penggunaan SILPA	108.494.651.207	108.494.651.207	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
Penerimaan kembali Piutang	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-

D. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan yang berakhir tahun 2029, serta alokasi untuk belanja daerah

dan pengeluaran daerah lainnya. Berikut perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029.

Tabel 2. 104 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2030

Uraian	Proyeksi					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan (1)	11.129.125.002.891,00	11.175.807.580.572,80	11.626.018.318.742,40	12.096.876.679.740,10	12.731.101.473.657,10	13.549.281.593.204,80
Penerimaan Pembiayaan (2)	108.494.651.207,00	108.494.651.207,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
Total Penerimaan (1+2)	11.237.619.654.098,00	11.284.302.231.779,80	11.676.018.318.742,40	12.146.876.679.740,10	12.781.101.473.657,10	13.599.281.593.204,80
Dikurangi :						
Total Belanja Pegawai	3.041.734.426.438,00	3.336.033.311.612,00	3.435.828.061.292,48	3.586.112.915.350,63	3.692.541.765.169,14	3.945.356.387.169,87
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	8.195.885.227.660,00	7.948.268.920.167,80	8.240.190.257.449,90	8.560.763.764.389,52	9.088.559.708.487,98	9.653.925.206.034,97

Tabel 2.104 menginformasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan terus membaik secara perlahan dari tahun ke tahun. Hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan di atas akan menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan program-program yang akan direncanakan dalam 5 tahun mendatang yang akan dirumuskan dalam RPJMD. Sedangkan untuk memandu alokasi pendanaan, dibagi menjadi 3 prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- Prioritas I adalah dialokasikan untuk pengeluaran untuk program-program pelayanan dasar;
- Prioritas II adalah dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Gubernur (Janji Gubernur) di luar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar;
- Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Pembangunan yang telah dilakukan pada dua dekade lalu tidak sepenuhnya dapat dicapai dan sesuai dengan keinginan semua masyarakat, dan bahkan menjadi permasalahan pembangunan di masa yang akan datang. Permasalahan pembangunan tidak saja bersumber dari internal akan tetapi juga berasal dari eksternal. Sementara itu, isu strategis merupakan tantangan dan peluang bagi daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan ke

depan. Analisis terhadap permasalahan dan isu strategis akan menghasilkan kebijakan yang antisipatif dan solutif bagi keberlangsungan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan jangka panjang sangat penting untuk memastikan bahwa upaya-upaya pembangunan disusun dengan baik, dilaksanakan secara efektif, serta dapat menyesuaikan dengan perubahan keadaan. Hal ini akan membantu untuk menyelaraskan tujuan, sekaligus mengelola risiko, dan pada akhirnya dapat membantu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yaitu kerentanan dan risiko kondisi geografi, pengelolaan sumberdaya air belum berkelanjutan, tingginya alih fungsi lahan dan gambut, pengembangan potensi ekonomi daerah belum optimal, kerentanan ketahanan pangan, kesenjangan infrastruktur antarwilayah masih tinggi, kualitas sumber daya manusia masih rendah, transformasi ekonomi belum optimal, ancaman stabilitas daerah masih tinggi, dan reformasi birokrasi yang belum optimal.

2.3.1.1 Kerentanan dan Risiko Kondisi Geografi

A. Kondisi Geografi Sumatera Selatan Rentan terhadap Risiko Bencana Alam

Sebagian besar wilayah merupakan dataran aluvial dengan total luas 4.976.818 hektar atau sekitar 57% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Tanah *aluvial* umumnya subur karena memiliki kandungan air yang cukup. Selanjutnya ada jenis tanah *histosol* 1.802.458 hektar atau 21% yang lebih populer dikenal sebagai tanah gambut. Tanah gambut cenderung kurang subur karena memiliki kandungan unsur hara yang rendah. Terdapat 11 jenis potensi bahaya bencana di berbagai wilayah Provinsi Sumatera Selatan, meliputi: Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan, Gempa Bumi, Cuaca Ekstrem, Kekeringan, Letusan Gunung Api, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Kegagalan Teknologi, dan Epidemi dan Wabah Penyakit. Adapun kerentanan dan risiko bencana alam karena kondisi geografis termasuk kelas Tinggi adalah bahaya banjir, secara total potensi luas keseluruhan adalah 6.476.932,00 Ha; potensi luas bahaya tanah longsor adalah seluas 906.740,00 Ha; potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah sebesar

8.851.703,00 Ha; dan bahaya cuaca ekstrem luas secara keseluruhan adalah 6.339.456,00 Ha.

Selain itu, permasalahan geografi lain terkait adalah perubahan iklim, seperti musim kemarau yang terjadi setiap tahun meningkatnya ancaman bencana kebakaran terutama di lahan Gambut, bahkan kebakaran lahan Gambut yang besar ini terjadi setiap 4 tahunan. Adanya potensi peningkatan kejadian kebakaran gambut dapat berdampak pada meningkatnya emisi GRK yang dihasilkan, sehingga berdampak pada semakin buruknya perubahan iklim. Hal ini mengingat Sumatera Selatan merupakan rumah bagi ekosistem gambut terluas di Pulau Sumatera setelah Provinsi Riau. Lahan gambut di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 2,09 juta hektare dengan 36 KHG yang berlokasi di 7 kabupaten, atau sekitar 24,07% dari total wilayah provinsi.

B. Mitigasi Risiko Kebencanaan Belum Optimal

Data Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 sebesar 131,3, angka ini relatif menurun jika dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 149,9 dengan kategori sedang. Dengan penurunan Indeks Risiko Bencana tersebut, pencapaian tersebut masih perlu dioptimalkan dari aspek kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta pengembangan sistem pemulihan bencana. Tantangan kebencanaan akan semakin tinggi sebagai akibat semakin meningkatnya tekanan perubahan iklim yang berdampak pada kerentanan penghidupan masyarakat, terutama masyarakat rentan.

Daerah dengan Indeks Risiko Bencana tertinggi di tahun 2024 adalah Lahat, Empat Lawang, Muara Enim dan Palembang. Meskipun data Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumatera Selatan tersebut relatif turun selama 7 tahun terakhir, namun potensi risiko bencana alam di Sumatera Selatan masih sangat tinggi, terutama adalah bencana banjir yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: (1) Faktor alam, seperti curah hujan yang tinggi dan letak geografis yang berada di daerah aliran Sungai; (2) Faktor manusia, seperti alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan industri, serta pembuangan sampah sembarangan.

2.3.1.2 Pengelolaan Sumberdaya Air Belum Berkelanjutan

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 mencapai 87,23%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 87,19 persen pada 2023, angka tersebut relatif masih lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 92,64 persen pada 2024. Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak terendah adalah Kabupaten Empat Lawang (65,94%). Jumlah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Provinsi Sumatera Selatan masih belum memenuhi standar Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 91,32% pada 11 dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Keterbatasan ketersediaan air bersih yang aman untuk diminum yaitu: (a) kurangnya kuantitas air, disebabkan oleh keterbatasan kapasitas infrastruktur dan sistem pengelolaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; keterbatasan dalam ketersediaan air bersih yang aman untuk diminum seiring dengan peningkatan kebutuhan air di berbagai sektor dan rumah tangga; degradasi lahan, seperti erosi dan sedimentasi, dapat menyebabkan berkurangnya kapasitas tampungan air di sungai dan danau; Perubahan iklim menyebabkan pola curah hujan menjadi tidak menentu yang dapat menyebabkan kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan. (b) rendahnya kualitas air, disebabkan adanya pencemaran air oleh berbagai faktor, seperti limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian; kerusakan lingkungan, seperti penebangan hutan dan pembakaran lahan, dapat menyebabkan berkurangnya cadangan air tanah dan pencemaran air permukaan, sehingga ada keterbatasan dalam ketersediaan air bersih yang aman untuk diminum.

2.3.1.3 Tingginya Alih Fungsi Lahan dan Gambut

Pertumbuhan penduduk meningkat dari tahun ke tahun sementara lahan terbatas dan terbagi habis sesuai peruntukan. Kecepatan pertumbuhan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pemanfaatan ruang untuk perumahan dan perkantoran. Perkembangan wilayah terutama perkotaan memerlukan lahan yang luas untuk penyediaan sarana dan prasarana, pembangunan industri, akibatnya lahan semakin menyempit. Selain itu, berkurangnya tutupan lahan akibat dari alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan seperti sawit baik skala kecil maupun besar. Pemanfaatan

lahan gambut tidak sesuai fungsinya (fungsi budidaya dan fungsi lindung ekosistem) akan berdampak pada meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, meningkatnya biaya hidup dan kerentanan penghidupan masyarakat. Ketidaktepatan dalam pemanfaatan lahan gambut sesuai fungsinya (fungsi budidaya dan fungsi lindung ekosistem) akan berdampak pada seringnya bencana alam seperti banjir, kekeringan, meningkatnya biaya hidup masyarakat sehingga merugikan pembangunan, banjir, dan kemacetan. Permasalahan alih fungsi lahan sering menimbulkan konflik aturan seperti tumpang tindih peraturan perundang-undangan, dan tumpang tindih perizinan.

2.3.1.4 Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah belum Optimal

A. Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Didominasi Sektor Primer

Sumatera Selatan merupakan daerah terkaya ke-5 di era otonomi daerah dengan sektor unggulan yaitu sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor pertambangan, industri manufaktur dan perdagangan. Pemanfaatan potensi sumber daya yang potensial masih didominasi oleh sektor primer yaitu sebesar 40%. Sektor primer sebagai komoditas ekspor belum optimal, ini terlihat dari pertumbuhan sektor primer stagnan pada interval 2-3%. Dilihat dari Indeks Ketergantungan Sumber Daya Alam (NRDI) Sumatera Selatan sebesar 9,52, menempati posisi ke-8, angka ini relatif cukup tinggi. Semakin tinggi nilai NRDI berarti semakin tinggi juga tingkat ketergantungan terhadap SDA. Umumnya wilayah yang memiliki NRDI tinggi tidak cukup mampu menciptakan kinerja pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang sebanding dengan kekayaan SDA tambang yang selama ini sudah ada dieksploitasi. Selain itu, *Indeks Natural Resource Curse* (NRC) Sumatera Selatan sebesar 9,50 (peringkat 8 tertinggi). Semakin tinggi nilai indeks NRC di suatu wilayah, artinya memiliki ketergantungan tinggi pula terhadap SDA tambang, terutama wilayah penghasil utama minyak bumi, gas bumi, mineral dan batu bara.

B. Pengembangan Potensi Daerah Belum Optimal

Pengembangan potensi daerah belum optimal yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pengembangan potensi ekonomi daerah masih cenderung bersifat *business as usual*, kondisi ini terlihat masih terfokusnya kegiatan di sektor primer sehingga transformasi sektoral relatif lambat, dan hilirisasi produk untuk menciptakan nilai tambah masih terbatas. Potensi perkebunan di Sumatera Selatan cukup beragam mulai dari karet, kelapa,

kelapa sawit, kopi, dan kakao. Potensi perkebunan khususnya produksi komoditi karet terbesar untuk produksi karet alam di Indonesia. Sumatera Selatan menyumbang 34% produksi karet alam nasional pada 2016. Perkembangan produksi karet pada tahun 2024 mencapai 1.008.362 ton, Secara riil pertumbuhan produksi karet selama 2020-2024 turun yaitu sebesar -1,99%. Permasalahan menurunnya produksi karet karena adanya serangan penyakit akar putih, penyakit gugur daun yang disebabkan jamur yang menyerang daun berakibat kurangnya jumlah produksi dan kualitas latex atau getah. Selain itu, harga komoditas karet yang tidak stabil bahkan cenderung turun disebabkan kualitas karet yang rendah atau kurang baik, adanya praktek alih fungsi dan konversi lahan menjadi penyebab luas lahan berkurang. Demikian juga produksi tanaman lainnya selama 2020-2024 mengalami penurunan. Secara Riil tumbuh negatif sebesar -12,37%. Penyebabnya adalah cuaca ekstrem, serangan hama, penyakit tanaman, dan usia tanaman semakin tua. Selain itu, praktik budidaya yang kurang tepat juga dapat menyebabkan penurunan produktivitas, konflik lahan, serta harga jual yang rendah juga dapat mempengaruhi keputusan petani dalam melakukan produksi.

Tanaman perkebunan yang tumbuh positif adalah tanaman kelapa sawit yang secara riil tumbuh sebesar 85,53 persen selama periode 2020-2024, demikian juga tanaman kakao yang tumbuh sebesar 3,86 persen dalam periode yang sama. Tanaman kopi dan kelapa yang secara riil masing-masing tumbuh sebesar 3,73 dan 1,47 persen pada periode 2020-2024. Sementara untuk tanaman perkebunan Lada di Sumatera Selatan masih cukup jarang dikembangkan hanya beberapa wilayah di Sumatera Selatan yang cocok untuk budidaya lada.

Permasalahan pengembangan sektor unggulan seperti perkebunan yaitu: (a) belum optimalnya pertumbuhan produksi tanaman perkebunan yang disebabkan oleh tingginya alih fungsi lahan menjadi lahan peruntukkan lainnya; (b) nilai tambah tanaman perkebunan relatif masih kecil dibandingkan sektor lainnya disebabkan oleh pengelolaan inefisien, oleh karena itu, hasil produksi tanaman perkebunan diarahkan pada kegiatan hilirisasi (*on farm*), artinya industrialisasi produk pertanian terutama tanaman perkebunan akan mendorong produktivitas sektor pertanian secara menyeluruh, dan (c) belum optimalnya penerapan ekonomi hijau, termasuk penyelarasan tataguna lahan yang adil dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan lahan,

peningkatan akses masyarakat terhadap modal penghidupan, peningkatan produktivitas dan diversifikasi, perbaikan rantai nilai dengan pembagian manfaat yang adil, peningkatan konektivitas dan skala ekonomi, restorasi lahan dan hutan terdegradasi, dan pemanfaatan insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan.

2.3.1.5 Kerentanan Ketahanan Pangan

A. Distribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Menurun Setiap Tahun

Share sektor pertanian terhadap PDRB terus mengalami penurunan, sementara disisi lain, sektor jasa menunjukkan tren yang meningkat. Data tahun 2024 menunjukkan pangsa sektor jasa sudah melampaui sektor pertanian yaitu 43,56% sedangkan sektor pertanian sebesar 13,56%. Isu pangan global semakin menguat seiring perubahan iklim yang ekstrem sehingga berdampak produksi sektor pertanian. Sektor pertanian sebagai sektor andalan dalam menopang ketahanan pangan cenderung mengalami penurunan kontribusinya terhadap PDRB. Dalam dua dekade kontribusi sektor pertanian menurun sebesar 6 persen. Sektor perkebunan sebagai *leading* sektor pertanian menghadapi kendala volatilitas harga komoditas. Harga komoditas unggulan seperti Kelapa Sawit, Karet dan Kopi sangat ditentukan oleh permintaan dari luar luar negeri. Dilihat dari tingkat produktivitas, sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki produktivitas terendah di antara sektor lainnya dan cenderung menurun. Output yang dihasilkan sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang melambat.

B. Produktivitas Padi di Sumatera Selatan Meningkat Pesat

Produktivitas tanaman padi menunjukkan tren peningkatan baik di tingkat Sumatera Selatan maupun nasional selama periode 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, produktivitas padi di Sumatera Selatan berada di angka 48,27 kuintal/hektar, masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 51,14 kuintal/hektar. Namun, produktivitas di Sumatera Selatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, Sumatera Selatan mencatatkan angka 51,44 kuintal/hektar dan untuk pertama kalinya melampaui angka nasional yang saat itu berada di 52,26 kuintal/hektar. Peningkatan yang paling mencolok terjadi antara tahun 2021 dan 2022, di mana Sumatera Selatan melonjak dari 51,44 menjadi 54,06 kuintal/hektar. Peningkatan ini berlanjut hingga mencapai puncaknya pada

tahun 2023 sebesar 56,19 kuintal/hektar, sebelum sedikit menurun menjadi 55,83 kuintal/hektar di tahun 2024. Sementara itu, angka produktivitas nasional juga mengalami kenaikan, namun dengan laju yang lebih lambat. Dari 51,14 kuintal/hektar pada 2019, angka tersebut naik menjadi 52,90 kuintal/hektar pada tahun 2024. Dari uraian ini menunjukkan bahwa Sumatera Selatan tidak hanya berhasil meningkatkan produktivitas padi secara konsisten, tetapi juga berhasil melampaui angka produktivitas nasional sejak tahun 2022. Hal ini mengindikasikan keberhasilan berbagai upaya peningkatan pertanian yang dilakukan di wilayah tersebut.

Sementara itu, pertumbuhan produktivitas tanaman palawija pada tahun 2024 seperti komoditi Jagung juga mengalami peningkatan dari 62,36 kuintal/hektar pada tahun 2023 menjadi 65,89 kuintal/hektar pada tahun 2024, meningkat 5,67%; Kedelai meningkat 2,30%; Kacang Tanah mengalami penurunan 9,72%; Kacang Hijau turun 15,88%; Ubi Kayu turun 1,52%; dan Ubi Jalar turun 1,77% jika dibandingkan tahun sebelumnya pada 2023. Sebaran komoditas pangan seperti padi, dan jagung masih terkonsentrasi di beberapa wilayah yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Komering Ulu Timur. Selain itu, adanya perubahan iklim memberikan ancaman pada potensi gagal panen dengan adanya perubahan curah hujan dan potensi cuaca ekstrem. Oleh karena itu perlu dilakukan diversifikasi sektor pertanian untuk menjaga ketahanan pangan.

C. Produktivitas Perikanan Budidaya Belum Optimal

Sumatera Selatan memiliki potensi sumber daya perairan sungai dan laut yang cukup besar, namun produksi perikanan budidaya di Provinsi Sumatera Selatan masih belum dikembangkan secara optimal. Tercatat dari Tabel 2.25 yang disajikan menunjukkan bahwa pertumbuhan riil produksi perikanan budidaya mengalami penurunan yaitu sebesar -4,90 persen selama periode 2020-2024. Produksi perikanan budidaya di beberapa wilayah di Sumatera Selatan juga mengalami penurunan cukup besar, seperti Kabupaten Musi Rawas yang turun sebesar -38,77 persen, diikuti oleh Kota Prabumulih (-23,20%), Lubuklinggau (-20,24%), Musi Banyuasin (-15,76 %), Lahat (-38,77%).

Sementara wilayah yang produksi perikanan budidayanya tumbuh signifikan yaitu OKU Selatan yang tumbuh sebesar 18,79 persen, diikuti oleh Kabupaten Empat Lawang (9,28%), PALI (9,10%), Ogan Ilir (9,06%), Kota Pagar

Alam (5,87%), OKU Timur (3,86%) dan Banyuasin (2,46%). Peningkatan dan penurunan produksi perikanan budidaya dipengaruhi faktor yang beragam, seperti kondisi geografis, teknologi dan informasi pendukung, kualitas air, bibit, lahan, cuaca, dan peralihan tambak menjadi lahan pertanian atau pemukiman serta pengetahuan Pembudidaya tentang cara budidaya ikan yang baik.

D. Ancaman Ketahanan Pangan

Tingkat aksesibilitas (keterjangkauan) pangan dan pemanfaatan tahun 2022 masih cukup rendah yaitu sebesar 74,11 dan 61,29, kedua indeks ini menjadi yang terendah di Pulau Sumatera. Secara regional IKP Sumatera Selatan tahun 2024 masih jauh di bawah Provinsi Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Utara, dan Jambi.

Menurunnya produktivitas ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan disebabkan oleh: (1) Produktivitas lahan yang mengalami *leveling off* sebagai akibat akumulasi pemupukan secara terus menerus sehingga untuk memperoleh tingkat produktivitas yang sama diperlukan input yang lebih. Ini terlihat dari nilai NTP yang cenderung tetap; (2) Ketersediaan lahan pertanian yang semakin terbatas mendorong peningkatan jumlah rumah tangga petani gurem; (3) Konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian akibat persaingan penggunaan lahan terutama dengan sektor perumahan dan industri, perkebunan, dan pertambangan; (4) Ketersediaan air yang tidak merata di masing-masing wilayah; (5) Tingginya *food loss* dan *food waste* (kehilangan pangan dan sisa makanan) akibat belum maksimalnya teknologi pascapanen; (6) Perubahan iklim (kekeringan, banjir, dan perubahan pola tanam); (7) Serangan hama, penyakit tanaman, dan gulma; (8) Investasi dalam pengembangan penelitian di sektor pertanian masih rendah; (9) Gejolak pangan global menyebabkan terganggunya mata rantai pangan dan pupuk berdampak pada terbatasnya akses pangan sehingga mendorong tingginya Inflasi pangan; (10) Harga pakan ikan yang tinggi dan tidak berkualitas, harga ikan yang relatif rendah dan penggunaan teknologi perikanan budidaya yang tidak tepat, serta penyakit ikan menyebabkan produksi perikanan budidaya turun; dan 11) masih tingginya tingkat kemiskinan, dan masih tingginya balita *stunting*.

2.3.1.6 Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah masih Tinggi

Disparitas infrastruktur antar wilayah berdampak pada kesenjangan ekonomi. Infrastruktur yang buruk menyebabkan ketidakefisienan dalam ekonomi. Ketidak efisienan tersebut menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high*

cost economy). Perkembangan yang baik pada infrastruktur di Sumatera Selatan terutama jalan, seperti jalan tol lintas Sumatera, dan infrastruktur lainnya seperti Bandara, Pelabuhan dan *light rail transit* (LRT) namun secara spasial masih terdapat kesenjangan infrastruktur antarwilayah.

A. Masih Terdapatnya Jalan yang Berkualitas Kurang Mantap

Panjang jalan di Provinsi Sumatera Selatan dengan kategori jalan negara, provinsi dan kabupaten pada setiap kabupaten/kota, pada umumnya tidak mengalami pertambahan sejak tahun 2019. Jalan pada Provinsi Sumatera Selatan, terdapat dua jenis permukaan jalan yang belum permanen dengan kategori tidak diaspal dan lainnya dengan angka yang relatif besar dari total panjang jalan yang ada; permukaan jalan tidak diaspal sepanjang 14,46 km dengan lokasi pada Kabupaten Banyuasin, OKU Selatan dan Ogan Ilir, dan permukaan jalan dengan kategori lainnya sepanjang 58,06 km dengan sebagian besar berada di Kabupaten Muara Enim dan 0,06 km di Kabupaten Banyuasin. Jumlah panjang jalan dan jenis permukaan jalan menunjukkan terhadap upaya peningkatan aksesibilitas yang lebih besar pada wilayah di Provinsi Sumatera Selatan.

Jalan di Provinsi Sumatera Selatan masih terdiri dari komposisi jalan dengan kondisi belum maksimal. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Selatan (2023), pada tahun 2022, jalan di Provinsi Sumatera Selatan dalam kondisi baik 76,12%, dalam kondisi sedang 10,54%, kondisi rusak 2,68% dan 10,66% dalam kondisi rusak berat. Kondisi ini juga memberikan tantangan terkait dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan yang terus meningkat setiap tahunnya dengan rincian sebagai berikut 277,24 ribu mobil penumpang, 1,68 ribu bus, 42,42 ribu truk, dan 898,92 ribu sepeda motor. Kondisi jalan dan jumlah kendaraan memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat keamanan dalam berlalu lintas dan kemudahan aksesibilitas.

B. Konektivitas dan Aksesibilitas yang belum Merata

Sumatera Selatan memiliki beberapa wilayah yang masih sulit dijangkau moda transportasi dan memiliki indeks aksesibilitas yang masih rendah. Konektivitas di beberapa kawasan terutama kawasan Timur Sumatera Selatan/pesisir belum sepenuhnya memiliki jaringan jalan yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer II. Ketersediaan sarana jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk memperlancar akses ke wilayah-wilayah yang terisolir.

Sementara itu, wilayah Koridor Timur masih perlu peningkatan jaringan Pelayanan Angkutan Umum. Permasalahan konektivitas lainnya belum tersedianya terminal multimoda untuk angkutan barang dan penumpang kawasan metropolitan Patungraja Agung.

Selain itu, pelayanan dari jaringan Kereta Api masih terbatas pada wilayah Lampung dan Sumatera Selatan. Penambahan jalur Kereta Api yang diintegrasikan dengan ruas Lubuklinggau-Bengkulu, dan Muara Enim-Tanjung Api-Api sebagai *outlet* memasarkan produk hasil pertanian, pertambangan, batubara, minyak bumi perlu segera direalisasikan sebagai upaya untuk mendorong perkembangan wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan. Angkutan Kereta Api diharapkan mampu menarik gerbong kemakmuran bagi masyarakat Sumatera Selatan, namun menghadapi beberapa kendala seperti daya dukung rel yang masih terbatas dimana jaringan rel rawan anjlok, dan belum terealisasinya pembangunan konektivitas rencana Kereta Api trans Sumatera (Palembang-Jambi dan Palembang-Lampung).

Sumatera Selatan juga memiliki LRT yang mampu mengatasi kemacetan di Kota Palembang, akan tetapi masih menghadapi kendala yaitu: (1) Jaringan pelayanan (*trunk/feeder*) dan fasilitas fisik (stasiun/halte) belum sepenuhnya terintegrasi. (2) Tarif angkutan umum belum terintegrasi sehingga perjalanan (asal-tujuan) dengan angkutan umum dirasakan mahal. (3) Fasilitas pelayanan angkutan umum belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penumpang (barang bawaan, sepeda, dan lain-lain) belum terakomodasi dengan baik.

C. Fasilitas Transportasi Air Belum Kondusif

Transportasi sungai dan laut belum optimal dalam pengelolaan jalur sungai untuk angkutan barang, penumpang dan wisata. Hal ini karena belum tersedianya pelabuhan internasional yang berfungsi sebagai outlet dan inlet angkutan barang dan hasil hilirisasi menjadi faktor penghambat dalam pengembangan moda transportasi laut.

D. Fasilitas Angkutan Udara Masih Relatif belum Merata

Saat ini Sumatera Selatan memiliki 4 (empat) bandara yaitu: Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) di Kota Palembang, Bandar Udara Silampari di Kota Lubuklinggau, Bandar Udara Atung Bungsu yang terletak di Kota Pagar Alam, dan Bandar Udara Pangeran Abdul Hamid di Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Namun, belum tersedianya fasilitas

angkutan udara untuk pergerakan penumpang di Kawasan Selatan pada Provinsi Sumatera Selatan. Pergerakan penumpang hanya dilakukan melalui akses darat sehingga mobilitas penumpang dari wilayah Selatan relatif terbatas. Sebagian besar mobilitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dilakukan di luar Wilayah Sumatera Selatan seperti Provinsi Lampung. Fenomena ini menyebabkan terjadinya kebocoran wilayah. Transaksi komoditas unggulan Wilayah Selatan seperti Kopi dilakukan di kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Sumatera Selatan.

E. Belum Optimalnya Sarana Energi Kelistrikan dan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi seluler di wilayah Provinsi Sumatera Selatan masih dengan kualitas dan jangkauan yang belum merata sehingga masih terdapat wilayah yang belum terlayani jaringan listrik dan tidak terdapat jangkauan sinyal Telepon. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Selatan (2023), pada 11 dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan masih terdapat desa yang tidak terjangkau dengan jaringan sinyal internet seluler. Masih terdapat 38 desa yang belum sama sekali terjangkau jaringan komunikasi dan sebanyak 145 desa belum terjangkau jaringan internet. Desa-desa yang paling banyak belum terjangkau jaringan internet yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir.

F. Kondisi Lingkungan Belum Mendukung Derajat Kesehatan

Sanitasi yang baik akan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup, demikian pula tersedianya sarana pengelolaan limbah dan pembuangan sampah. Sumatera Selatan telah berupaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pada wilayah Provinsi Sumatera Selatan, prasarana pembuangan tinja pada lingkungan belum seluruhnya pada fasilitas tempat akhir pembuangan tinja yang sesuai dengan standar kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2022, sebagian besar pemakaian tempat akhir pembuangan tinja menggunakan tangki septik tank/IPAL *Sewage System* sebanyak 82,68%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 84,39%. Selain itu, yang masih menggunakan kolam/sawah/sungai/danau/laut sebanyak 4,35%, bahkan masih dijumpai pembuangan tinja di lubang tanah sebesar 11,66%, serta di pantai/tanah lapang/kebun/lainnya sebanyak 1,04%. Permasalahan dalam sanitasi, limbah dan persampahan di Sumatera Selatan yaitu:

Lemahnya penegakan Perda Kebersihan, beberapa SPAL-T skala kawasan telah terbangun namun kondisinya kurang baik, beberapa kabupaten/kota belum memiliki SPALD-S skala kawasan atau IPLT, dan yang sudah memiliki tetapi kondisinya kurang baik, masih terdapat daerah yang belum memiliki TPA yaitu Kabupaten PALI dan Musi Rawas.

2.3.1.7 Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Rendah

A. Tenaga Kerja Terampil di Sumatera Selatan Masih Rendah

Sektor tenaga kerja di Sumatera Selatan di bidang keterampilan tinggi masih rendah. Ini disebabkan oleh kualitas SDM masih rendah dilihat dari angkatan kerja didominasi lulusan SD dan SMP. Degradasi pendidikan dalam dunia kerja terus terjadi, beberapa jenis pekerjaan mengharuskan lulusan perguruan tinggi sehingga pekerjaan yang semestinya dapat dilakukan oleh pekerja lulusan sekolah menengah beralih ke jenjang yang lebih tinggi. Adaptasi terhadap perubahan yang cepat akan berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran pada jenjang sekolah menengah dan perguruan tinggi.

B. Capaian IPM Sumatera Selatan Masih Relatif Rendah

IPM Sumatera Selatan tahun 2024 sebesar 73,84 masih berada di bawah capaian IPM nasional sebesar 75,02. Komponen yang menyebabkan IPM masih relatif rendah yaitu angka harapan hidup sebesar 74,26, dan rata-rata lama sekolah sebesar 8,57. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya pemerataan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum optimal. Pemerataan kualitas pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh tersedianya fasilitas kesehatan di desa-desa. Jarak antar desa dan permukiman yang masih jarang penduduk menyebabkan pelayanan kesehatan dan pendidikan kurang terlayani dengan baik.

C. Sumber Daya Manusia yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Masih Terbatas

Penyerapan tenaga kerja dilihat dari kualifikasi pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah. Pada tahun 2024 penduduk bekerja berdasarkan kualifikasi pendidikan, masih didominasi tenaga kerja yang berpendidikan SLTA sederajat yaitu sebanyak 31,26 persen. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III dan Universitas sebanyak 8,4 persen. Selain disebabkan oleh rata-rata tingkat pendidikan masih rendah,

SDM yang kompeten dalam jumlah minim juga disebabkan oleh terbatasnya keberadaan sarana prasarana maupun tenaga pelatih BLK yang tersertifikasi.

D. Persentase Standar Kompetensi Minimum Satuan Pendidikan Belum Tercapai

Rendahnya persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk rerata kompetensi Literasi dan Numerasi. Masing-masing rerata tersebut adalah 58,41% dan 50,37% (pada satuan Pendidikan SMA); 56,59 dan 49,16 (pada satuan Pendidikan SMK); 51,87% dan 48,48% (pada satuan Pendidikan SMALB); 56,30% dan 52,17% (pada satuan Pendidikan SMPLB); 56,88% dan 44,78% (pada satuan Pendidikan SDLB). Penilaian AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) ini dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif yaitu Literasi dan Numerasi. Kemampuan Literasi dan Numerasi dapat membantu siswa mempelajari bidang ilmu lainnya dengan membentuk cara berpikir dan melatih siswa mencerna informasi baik dalam bentuk tertulis atau angka-angka. Sistem Pendidikan sebagai sumber masalahnya sehingga sudah menjadi hal yang umum istilah seperti: kesenjangan keterampilan di kalangan dunia usaha dan industri.

E. Keterkaitan antara Lulusan Pendidikan dan Dunia Kerja Masih Rendah

Keterkaitan (*link and match*) yang lemah antara lulusan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan dunia kerja diindikasikan oleh tingginya tingkat pengangguran terbuka yang disumbang oleh lulusan SMK yaitu sebesar 16,64 persen. Belum adaptifnya kurikulum SMK dengan kebutuhan pasar kerja dan rendahnya potensi kemandirian wirausaha menjadi beberapa faktor penyebab hal ini.

F. Pekerja Berpendidikan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Masih Rendah

Rendahnya jumlah pekerja berpendidikan tinggi dan bekerja di bidang keahlian menengah tinggi. Hanya terdapat 12,86 persen pekerja berpendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi. Kondisi tersebut menjadi permasalahan serius, karena lulusan pendidikan menengah dan tinggi pada beberapa bidang memiliki *supply* semakin banyak. Pekerjaan di bidang keahlian menengah tinggi yang tidak secara langsung berhubungan dengan bidang pendidikan yang diikuti tersebut terpaksa menjadi pilihan bagi

para lulusan yang kesulitan untuk memanfaatkan pengetahuan dan keahlian yang dipelajarinya.

G. Kualitas Keluarga Masih Rendah

Kualitas keluarga berperan penting dalam pembangunan manusia. Capaian indeks kualitas keluarga di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 yaitu sebesar 76,73 masih di bawah rata-rata nasional yang sebesar 77,64. Permasalahan kualitas keluarga Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari beberapa indikator capaian yang rendah diantaranya kepemilikan Buku Nikah mengalami penurunan sebesar -1,25. Kemudian terjadi peningkatan pada persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok mengalami peningkatan sebesar 0,39. Sementara itu, persentase rumah tangga tidak miskin di kabupaten/kota dan provinsi mengalami penurunan sebesar -0,18. Persentase rumah tangga yang ada ART yang melakukan kegiatan sosial mengalami penurunan -0,28.

H. Tingginya Ketimpangan Gender

Nilai Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2018-2024 memiliki posisi IKG Provinsi Sumatera Selatan masih berada pada kategori “Tinggi” menjadi kategori “Menengah Atas”. Namun bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, Sumatera Selatan berada pada posisi nomor dua tertinggi ketimpangan gendernya setelah Provinsi Jambi.

Penyebab tingginya ketimpangan gender di Sumatera Selatan adalah sebagian besar akibat kontribusi dari Dimensi Pemberdayaan dengan indikator Persentase Penduduk Perempuan dengan Pendidikan Minimal SMA yang masih rendah dan memiliki GAP yang cukup besar dari laki-laki serta Persentase Anggota Legislatif Perempuan yang persentasenya masih sangat kecil dan GAP nya sangat besar jika dibandingkan dengan laki-laki. Penyebab lainnya adalah dari Dimensi Pasar Tenaga Kerja dengan indikator TPAK perempuan yang capaiannya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki.

Selain itu yang berkontribusi terhadap ketimpangan gender di Sumatera Selatan adalah akibat kontribusi komponen Indeks Pembangunan Gender bidang Pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah Perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dan Harapan Lama Sekolah Perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Untuk Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Selatan juga mengalami ketimpangan gender, dimana AHH perempuan lebih

tinggi dari AHH Laki-laki. Begitu juga dengan Pengeluaran Perkapita perempuan lebih rendah dan GAP nya sangat besar dibandingkan dengan laki-laki.

Dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan, terdapat 5 kabupaten/kota yang capaian IKG nya lebih baik dibandingkan capaian provinsi yang mencapai 0,479 pada tahun 2024. Sementara 12 kabupaten/kota lainnya masih kesulitan untuk mencapai angka provinsinya. Hal ini menunjukkan masih adanya disparitas ketimpangan gender antar kabupaten/kota.

2.3.1.8 Transformasi Ekonomi Belum Optimal

Sumatera Selatan masih **mengandalkan sektor primer dalam pembangunan terutama sektor pertambangan batubara** dengan kontribusi yang cenderung meningkat. Sementara itu, kontribusi sektor industri pengolahan/manufaktur cenderung stagnan dalam dua dekade yaitu berkisar 17%. Kontribusi terbesar dalam industri pengolahan adalah industri pulp dan kertas sedangkan kontribusi UMKM masih relatif terbatas. Terhambatnya sektor manufaktur terutama industri pengolahan pada UMKM mengindikasikan terjadinya proses “deindustrialisasi” di Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: (1) terbatasnya kemampuan mengadopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, (2) keterbatasan dukungan ekosistem industri dari luar Jawa, (3) terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat peningkatan biaya, seperti biaya tenaga kerja, bahan baku, energi, logistik dan tingkat bunga, dan (4) adanya penurunan daya beli masyarakat yang menyebabkan pergeseran permintaan terhadap barang impor yang lebih murah.

Mega tren dunia menunjukkan telah terjadinya transformasi ekonomi dari ekonomi coklat menuju ekonomi hijau. Paradigma pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan ketergantungan pada sumber energi dengan emisi karbon tinggi, bergeser menjadi pendekatan berkelanjutan, yaitu menuju sumber energi terbarukan dan rendah karbon. Melalui Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan, diharapkan ekonomi Sumatera Selatan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, mencapai ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan, mewujudkan ekosistem sehat dan produktif dalam menyediakan jasa lingkungan dan menurunkan emisi GRK. Transformasi ekonomi yang mengarah ke ekonomi hijau memerlukan hilirisasi SDA unggulan

untuk meningkatkan produktivitas dan melakukan inovasi-inovasi di sektor prioritas terutama sektor berbasis lahan untuk mendukung upaya mencapai *net zero emission*.

2.3.1.9 Ancaman Stabilitas Daerah Masih Tinggi

a) Tingkat Demokrasi Daerah

Terdapat potensi permasalahan stabilitas demokrasi daerah. Walaupun nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 yaitu sebesar 78,17, berada pada kategori tinggi, namun relatif masih belum maksimal. IDI Sumatera Selatan tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan IDI nasional yang mencapai 79,51. Tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas, antara lain: (1) Kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya konflik sosial dan politik. Hal ini karena masyarakat yang miskin dan tertinggal secara ekonomi cenderung lebih rentan terhadap provokasi dan propaganda dari pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas daerah. (2) Rendahnya ruang demokrasi terbuka dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga dapat memicu terjadinya protes dan demonstrasi yang dapat berujung pada konflik sosial.

b) Tingkat Kriminalitas

Risiko penduduk terkena tindak pidana di Sumatera Selatan sama dengan nasional yang sebesar 137,00 pada tahun 2023. Berdasarkan data BPS, risiko penduduk terkena tindak pidana (*crime rate*) per 100.000 penduduk di Sumatera Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar 214,00. Angka ini berarti bahwa setiap 100.000 penduduk di Sumatera Selatan, terdapat 10,473 kasus tindak pidana yang terjadi. Adapun potensi permasalahan stabilitas daerah dari aspek tingkat kriminalitas antara lain: (1) Potensi rawan terhadap tindak pidana terorisme karena memiliki perbatasan dengan negara Malaysia, yang merupakan salah satu negara asal jaringan terorisme internasional, (2) Potensi rawan terhadap tindak pidana narkoba, karena Sumatera Selatan merupakan daerah transit dan tujuan peredaran narkoba dari berbagai wilayah di Indonesia, (3) Potensi rawan terhadap tindak pidana premanisme didorong oleh tingkat urbanisasi yang tinggi, yang dapat memicu terjadinya kriminalitas akibat persaingan antar kelompok masyarakat.

2.3.1.10 Inovasi Daerah Masih Belum Optimal

Provinsi Sumatera Selatan berhasil menjadi salah satu provinsi dengan predikat Provinsi Sangat Inovatif dalam ajang *Innovative Government Award* (IGA) pada tahun 2020-2024. Tetapi pelaksanaan Inovasi Daerah belum optimal karena : (1) Kurang tersedianya sumber daya manusia yang kompeten seperti kurangnya jumlah peneliti, perekayasa, analis kebijakan, (2) Kurang tersedianya dana yang memadai dalam mendorong inovasi dan riset, serta insentif bagi pelaku inovasi, (3) Terbatasnya jumlah pengembangan inovasi dan teknologi, (4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendorong inovasi dan apresiasi terhadap hasil-hasil inovasi, (5) Persaingan global dan antar wilayah yang semakin ketat menuntut daerah untuk terus berinovasi agar dapat bersaing dengan daerah lain, (6) Perubahan teknologi yang semakin cepat menuntut daerah untuk terus mengikuti perkembangan teknologi agar dapat memanfaatkannya secara optimal, (7) Ketidakpastian ekonomi global dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga dapat berdampak negatif terhadap inovasi.

2.3.1.11 Reformasi Birokrasi yang Belum Optimal

Kebijakan reformasi birokrasi akan mendukung capaian pembangunan daerah melalui perbaikan indikator pembangunan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan dapat diprediksi (*predictability*). Reformasi birokrasi Provinsi Sumatera Selatan belum optimal terlihat dari Indeks Keterbukaan Informasi dan Integritas di bawah nasional. Dari 17 kabupaten/kota hanya Kabupaten Muara Enim yang terkategori B sedangkan kabupaten/kota lainnya masih terkategori C atau CC. Sementara itu, indeks pelayanan publik masih belum merata di pemerintah kabupaten/kota. Permasalahan dalam meningkatkan tata kelola yang baik yaitu: (1) kebijakan tata kelola pada tingkat pemerintah pusat masih terkesan belum terintegrasi (*fragmented*), tumpang tindih dan cenderung cepat berubah seperti aturan SKP. Fungsional dan aturan rentang kendali antara pejabat struktural dan pejabat fungsional sehingga berdampak pada kebijakan yang inkonsisten di pemerintah daerah. (2) Kualitas sumberdaya ASN yang belum merata, dan fungsional di setiap daerah.

2.3.2 Isu Strategis Daerah

2.3.2.1 Isu Strategis Global

Pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029 merupakan fondasi awal yang penting untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Pencapaiannya akan dihadapkan pada isu dan tantangan yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global. Tantangan Global perlu dimitigasi sekaligus diubah menjadi peluang untuk memastikan tercapainya sasaran jangka menengah serta mengarahkan trajektori pembangunan jangka panjang.

Perekonomian global dalam beberapa tahun terakhir mengalami berbagai ketidakpastian. Strategi ekonomi global adalah rencana jangka panjang yang dirancang oleh negara atau kelompok negara untuk mengelola dan mempengaruhi perkembangan ekonomi dunia. Tujuan strategi ini biasanya termasuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas keuangan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai tantangan peristiwa ekonomi global terjadi seperti ketegangan hubungan perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok yang kemudian menyebabkan gejolak pasar keuangan global dan membuat volume perdagangan dunia merosot, dampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia tahun 2020 menyebabkan krisis multidimensi, serta ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina berdampak pada pelemahan transaksi perdagangan, kenaikan harga komoditas, ketidakpastian pasar keuangan global. Konflik antara Israel dan Palestina telah memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah, hubungan internasional, harga komoditas di pasar global, terutama minyak mentah, Serta menimbulkan investasi di Indonesia yang dapat bersifat dua arah.

Isu strategis global yang mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, teknologi, lingkungan hidup, politik, kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya hingga tahun 2045 melibatkan proyeksi dan perkiraan yang sulit untuk dipastikan dengan akurasi mutlak. Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian dalam konteks global serta dapat menjadi risiko global Jangka menengah yaitu:

A. Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem, yang semakin sering dan intens terjadi akibat perubahan iklim, telah menjadi salah satu isu strategis paling mendesak di dunia. Dampaknya yang luas dan kompleks mengancam berbagai aspek

kehidupan, dari ekonomi hingga keamanan. Tantangan pemanasan global akibat perubahan iklim menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan yang menyebabkan berbagai potensi penyakit, seperti penyakit pernapasan, penyakit kardiovaskular, dan penyakit menular.

B. Perubahan Kritis terhadap Ekosistem

Perubahan kritis terhadap ekosistem merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan hidup manusia dan planet Bumi. Perubahan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan polusi. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberlanjutan ekonomi. Persediaan sumber daya alam yang semakin menipis, seperti air, energi, dan pangan, dapat menimbulkan konflik antar negara dan antar kelompok masyarakat. Kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi dapat menyebabkan masyarakat tidak mampu mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk melindungi lingkungan.

C. Biodiversity Loss dan Gangguan Ekosistem

Hilangnya keanekaragaman hayati dan gangguan ekosistem merupakan dua sisi mata uang yang sama. Keduanya saling terkait dan menimbulkan dampak yang sangat luas, baik secara ekologis, sosial, maupun ekonomi. Hilangnya keanekaragaman hayati dan gangguan ekosistem merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan hidup manusia dan planet Bumi. Penguatan mitigasi diperlukan mengurangi adanya perubahan iklim yang memberikan dampak negatif pada berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, perikanan, pariwisata, dan kesehatan. Selain itu juga adanya transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan dan rendah emisi karbon.

D. Krisis Sumber Daya Alam

Krisis sumber daya alam menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Peningkatan populasi, industrialisasi, dan konsumsi yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan tekanan yang semakin besar pada sumber daya alam seperti air, tanah, hutan, dan mineral. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberlanjutan ekonomi. Persediaan sumber daya alam yang semakin menipis, seperti air,

energi, dan pangan, dapat menimbulkan konflik antar negara dan antar kelompok masyarakat. Kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi dapat menyebabkan masyarakat tidak mampu mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk melindungi lingkungan.

E. Misinformasi dan Disinformasi

Misinformasi dan disinformasi telah menjadi tantangan serius dalam era digital saat ini. Penyebaran informasi yang salah atau sengaja menyesatkan dapat memicu berbagai masalah, mulai dari polarisasi sosial hingga krisis kepercayaan terhadap institusi. Misinformasi dan disinformasi merupakan ancaman serius bagi masyarakat global. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan platform media sosial. Dengan meningkatkan literasi digital, memperkuat regulasi, dan membangun kerjasama internasional, kita dapat menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat dan aman.

F. Dampak Buruk Teknologi AI

Kecerdasan Buatan (AI) telah merevolusi banyak aspek kehidupan, namun juga membawa sejumlah tantangan dan risiko yang signifikan. Teknologi AI memiliki potensi yang sangat besar untuk membawa manfaat bagi umat manusia, namun juga membawa dampak buruk atau risiko yang signifikan. Untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif.

G. *Involuntary Migration*

Migrasi tak terencana atau *involuntary migration* merujuk pada perpindahan penduduk yang dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka akibat berbagai faktor seperti bencana alam, konflik bersenjata, penganiayaan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Migrasi tak terencana menjadi salah satu isu kompleks yang membutuhkan perhatian serius dari komunitas internasional. Solusi jangka panjang untuk masalah ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai aktor, dan berfokus pada akar penyebab masalah.

H. *Cyber Insecurity*

Keamanan siber telah menjadi isu strategis yang sangat krusial dalam era digital saat ini. Seiring dengan semakin terintegrasinya teknologi dalam

kehidupan sehari-hari, ancaman siber juga semakin kompleks dan canggih. Keamanan siber juga menjadi salah satu isu strategis dalam jangka menengah yang sangat kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Dengan bekerja sama, kita dapat membangun dunia digital yang lebih aman dan terpercaya.

I. Polarisasi Sosial

Polarisasi sosial, yaitu perpecahan masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang semakin terpolarisasi berdasarkan identitas, ideologi, atau kepentingan, telah menjadi tantangan global yang serius. Isu ini memiliki implikasi yang luas terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan sosial suatu negara, bahkan dunia. Polarisasi sosial menjadi salah satu tantangan kompleks yang membutuhkan solusi multi-dimensi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

J. Polusi

Masalah lingkungan yang serius di banyak negara yang menimbulkan berbagai dampak kesehatan, ekonomi, dan lingkungan akibat adanya polusi tersebut. Hal ini juga memberikan dampak degradasi lingkungan, seperti deforestasi, degradasi lahan, dan erosi, menyebabkan hilangnya sumber daya alam dan habitat. Dampak polusi terhadap kesehatan yang menyebabkan berbagai potensi penyakit, seperti kanker, penyakit pernapasan, dan penyakit jantung.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029 berperan penting sebagai fondasi awal untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah akan menghadapi isu dan tantangan yang dinamis. Isu dan tantangan pembangunan perlu dimitigasi dan dioptimalisasi menjadi peluang untuk mencapai sasaran jangka menengah serta trajektori pembangunan jangka panjang. Isu strategis lingkungan nasional yang mencakup ekonomi, teknologi, lingkungan hidup, politik, kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya seperti tercantum dalam RPJMN 2025-2029 adalah sebagai berikut:

A. Rendahnya Produktivitas

Produktivitas Indonesia masih rendah dan tertinggal dibanding negara lain seperti Korea Selatan dan Tiongkok. Selama 2015–2022, pertumbuhan produktivitas hanya naik 60 basis poin, jauh di bawah capaian negara tersebut saat berada pada tahap serupa. Rendahnya produktivitas dipengaruhi kualitas SDM, terutama perempuan, rendahnya produktivitas sektor ekonomi, keterbatasan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, serta kelembagaan yang lemah. Produktivitas tenaga kerja perempuan terhambat oleh norma sosial, jam kerja yang tidak fleksibel, dan minimnya layanan *daycare* terjangkau. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat, dari rata-rata 5,7 persen (2005–2010) turun menjadi 4,7 persen (2010–2015), lalu hanya berkisar sekitar 5 persen hingga 2023. Kondisi ini juga menekan pertumbuhan ekonomi potensial, sehingga ekonomi sulit tumbuh lebih cepat dan cenderung stagnan di kisaran 5 persen.

B. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Produktivitas tenaga kerja Indonesia pada 2022 masih rendah, yaitu US\$28.600 per pekerja, tertinggal dari rata-rata ASEAN (US\$30.200) dan jauh di bawah Amerika Serikat (US\$149.100). Rendahnya produktivitas dipengaruhi kualitas SDM yang tercermin dari skor PISA 2022 hanya 369,3, turun dari 382 (2018) dan tertinggal dari rata-rata OECD (488,33). Tantangan lain adalah rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja: 52,32% lulusan pendidikan rendah, 34,82% menengah, dan hanya 12,86% tinggi. Dampaknya, hanya 41,23% pekerja terserap di bidang keahlian menengah dan tinggi. Untuk mencapai pembangunan optimal, Indonesia perlu meningkatkan kualitas SDM melalui investasi pendidikan dan peningkatan daya saing tenaga kerja.

C. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Jumlah calon kelas menengah Indonesia terus meningkat, mencapai 137,5 juta orang (49,2% populasi) pada 2024, sementara warga rentan miskin juga naik menjadi 67,69 juta orang (24,33%). Namun, populasi kelas menengah justru menurun akibat risiko pergeseran status yang dipicu tingginya pemutusan hubungan kerja (46.420 kasus pada Agustus 2024 dan berpotensi naik). Salah satu penyebab PHK adalah rendahnya daya beli masyarakat, tercermin dari deflasi pada harga yang diatur pemerintah (turun dari 1,68% ke 1,40%) dan harga bergejolak (turun dari 3,04% ke 1,43%). Lemahnya daya beli

menurunkan permintaan industri, sehingga banyak perusahaan terpaksa mengurangi karyawan atau menutup usaha.

D. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

E. Krisis Lingkungan

Dunia menghadapi *triple planetary crisis*: perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi/kerusakan lingkungan. Sekitar 50–75% populasi global berisiko terdampak kondisi iklim ekstrem pada 2100, dengan kerugian ekonomi Rp22,8 triliun per tahun dan 9.176 korban jiwa di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Sekitar satu juta spesies terancam punah, polusi udara menyebabkan 4,2 juta kematian tiap tahun, dan Indonesia tercatat sebagai negara dengan polusi tertinggi di Asia Tenggara. Air minum rumah tangga 70% tercemar, sampah makanan mencapai 40,3% dari total timbunan dan diproyeksikan 344 kg/kapita/tahun pada 2045.

Ekstraksi sumber daya alam global meningkat tiga kali lipat dalam 50 tahun terakhir, dengan Indonesia sebagai produsen tambang ke-8 terbesar dunia dan masih memiliki ribuan tambang ilegal. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi menambah tekanan serta risiko konflik geopolitik terkait energi, air, dan pangan.

Triple planetary crisis mengancam pencapaian target pembangunan, sehingga diperlukan transisi ke ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan di sektor energi, industri, lahan, kelautan, pertanian, pangan, limbah, serta penerapan ekonomi sirkuler.

F. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global menjadi tantangan serius bagi Indonesia, terutama akibat eskalasi persaingan antarnegara adidaya dan munculnya kekuatan baru. Konflik Rusia–Ukraina memperlihatkan dampak luas berupa

inflasi global, krisis energi dan pangan, serta meningkatnya ketegangan militer yang dapat memicu konflik di kawasan lain, termasuk Indo-Pasifik yang strategis dan berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

Ketidakstabilan geopolitik mendorong krisis energi dan pangan, menambah ketidakpastian geoekonomi, serta berdampak pada perekonomian Indonesia melalui jalur perdagangan dan keuangan. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 3,2% (2024–2025) dengan inflasi menurun, namun suku bunga global yang tinggi tetap menekan prospek pertumbuhan dan meningkatkan risiko resesi.

Selain faktor geopolitik, perlambatan perdagangan global juga dipengaruhi oleh inflasi, suku bunga tinggi, penguatan dolar AS, perubahan pola konsumsi, penurunan harga komoditas, tekanan harga pangan, pertumbuhan penduduk, dan perubahan iklim.

G. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang penting untuk percepatan pembangunan, pengurangan ketimpangan dan kemiskinan, serta peningkatan investasi. Namun, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menurun dari 40 (2019) menjadi 34 (2022–2023, peringkat 115/180), sementara Indeks Perilaku Anti Korupsi sempat membaik namun kembali menghadapi tantangan. Kondisi ini menunjukkan risiko dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, tata kelola data juga krusial untuk mendukung pembangunan, tetapi Indonesia masih menghadapi risiko terkait keamanan siber, privasi, dan pengelolaan data skala besar.

2.3.2.3 Isu Strategis Regional

A. Ketergantungan Komoditas Primer dan Rendahnya Nilai Tambah

Ekonomi regional Sumatera masih menghadapi tantangan fundamental akibat ketergantungan yang sangat tinggi pada sektor komoditas primer. Pada tahun 2023, kontribusi dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan hampir mencapai 50 persen dari total PDRB wilayah. Dominasi ini menciptakan kerentanan struktural yang signifikan, karena harga komoditas primer sangat rentan terhadap fluktuasi di pasar global. Sektor ekonomi unggulan di berbagai wilayah Sumatera juga belum bernilai tambah tinggi. Seringkali, perekonomian wilayah ini masih sangat bergantung pada komoditas primer yang dijual mentah atau minim pengolahan. Hal ini

menyebabkan pendapatan masyarakat tidak optimal dan kerentanan terhadap fluktuasi harga pasar global.

Gejolak harga minyak, batu bara, dan produk hasil pertanian di tingkat internasional dapat secara langsung mempengaruhi pendapatan daerah, stabilitas fiskal, dan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Sumatera, tanpa adanya bantalan ekonomi yang memadai dari sektor lain. Permasalahan mendasar dari ketergantungan pada komoditas primer adalah nilai tambah yang masih relatif rendah. Banyak produk dari sektor ini diekspor atau dijual dalam bentuk mentah atau minim olahan, seperti, kelapa sawit yang diekspor berupa *Crude Palm Oil* (CPO) tanpa diolah menjadi produk turunan yang lebih bernilai seperti kosmetik, makanan olahan, atau *biofuel*. Demikian pula dengan hasil tambang, yang seringkali dijual sebagai bahan baku mentah. Situasi ini mengakibatkan hilangnya potensi penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan akumulasi modal yang lebih besar di dalam wilayah.

Untuk mengatasi kerentanan dan meningkatkan potensi ekonomi Sumatera, strategi hilirisasi industri menjadi sangat krusial. Hilirisasi bertujuan untuk mengolah komoditas primer menjadi produk jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi, seperti dari produk dari karet dan kelapa sawit menjadi beragam produk olahan, serta dari hasil tambang menjadi komponen industri. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan dari setiap unit komoditas yang dihasilkan, tetapi juga akan mendorong investasi di sektor manufaktur, menciptakan ekosistem industri yang lebih kompleks, dan menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal. Bersamaan dengan hilirisasi, diversifikasi ekonomi juga menjadi imperatif. Ini berarti mengembangkan sektor-sektor ekonomi di luar komoditas primer, seperti industri pengolahan yang berbasis non-sumber daya alam, pariwisata, ekonomi kreatif, atau sektor jasa dan teknologi. Diversifikasi akan mengurangi ketergantungan ekonomi pada satu atau beberapa sektor saja, menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru, dan membangun struktur ekonomi yang lebih tangguh dan resilient terhadap guncangan eksternal. Dengan demikian, Sumatera dapat bertransformasi menjadi wilayah dengan perekonomian yang lebih seimbang, inovatif, dan berkelanjutan.

B. Diversifikasi dan Hilirisasi Industri belum Optimal

Diversifikasi dan hilirisasi industri di Sumatera masih belum optimal, dengan kontribusi hanya sekitar 20 persen terhadap PDRB pada tahun 2023.

Angka ini jauh di bawah potensi sesungguhnya, mengingat melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki. Minimnya diversifikasi dan hilirisasi industri di daerah-daerah ini berarti peluang untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan per kapita sangat terbatas, menjebak masyarakat dalam lingkaran kemiskinan. Ketergantungan pada sektor primer dan minimnya pengolahan lebih lanjut menyebabkan berbagai wilayah di pulau Sumatera kehilangan peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas, dan membangun ekonomi yang lebih tangguh. Salah satu akar masalah utama adalah kecenderungan investasi yang masih dominan mengalir ke sektor ekstraktif dan industri hulu. Investor lebih memilih untuk menanamkan modal pada penambangan bahan mentah atau perkebunan skala besar, ketimbang pada industri pengolahan yang memerlukan investasi lebih besar dalam teknologi, sumber daya manusia, dan riset pengembangan. Akibatnya, potensi pengembangan industri hilir, seperti pengolahan kelapa sawit menjadi oleokimia, karet menjadi produk manufaktur, atau hasil tambang menjadi komponen industri, belum termanfaatkan secara optimal.

Situasi ini menciptakan sebuah paradoks Sumatera kaya akan sumber daya alam, namun belum mampu memaksimalkan potensi tersebut menjadi keuntungan ekonomi yang berkelanjutan melalui industri pengolahan. Minimnya investasi pada sektor hilir juga berdampak pada rendahnya inovasi dan pengembangan produk baru pada wilayah Sumatera di Indonesia. Padahal, dengan pengolahan yang lebih mendalam, produk-produk dari Sumatera dapat memiliki daya saing lebih tinggi di pasar nasional maupun internasional, serta membuka peluang pasar baru yang lebih luas. Untuk mengatasi isu strategis ini, diperlukan strategi komprehensif untuk mendorong investasi dan kebijakan yang berpihak pada hilirisasi dan diversifikasi industri. Pemerintah daerah pada wilayah Sumatera perlu menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi industri pengolahan, misalnya melalui insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan penyediaan infrastruktur pendukung. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha juga krusial untuk mengembangkan teknologi pengolahan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan menciptakan ekosistem industri yang kondusif. Dengan demikian, wilayah Sumatera dapat bertransformasi dari pengeksport bahan mentah menjadi pusat produksi barang bernilai tinggi.

C. Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah

Wilayah Sumatera masih bergulat dengan keterbatasan stok infrastruktur. Sebagian besar wilayah di pulau ini menghadapi kesenjangan infrastruktur yang nyata, terutama dalam hal kualitas dan kuantitas jalan, pelabuhan, bandara, serta jaringan energi dan telekomunikasi. Kondisi ini secara langsung menghambat laju pertumbuhan ekonomi regional. Tanpa infrastruktur yang memadai, biaya logistik menjadi tinggi, akses pasar terbatas, dan daya saing investasi menurun, menjauhkan potensi investasi dan pengembangan sektor-sektor produktif. Infrastruktur yang belum memadai berdampak pada aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah di Sumatera, bahkan untuk menghubungkan daerah sentra produksi dengan pusat-pusat konsumsi atau pelabuhan ekspor. Banyak daerah pedalaman yang kaya akan sumber daya alam, seperti hasil pertanian atau pertambangan, kesulitan untuk mendistribusikan produknya secara efisien. Jalan-jalan yang rusak, fasilitas pelabuhan yang terbatas, atau kurangnya ketersediaan energi, misalnya, memperlambat arus barang dan jasa, sehingga mengurangi efisiensi ekonomi dan menghambat penciptaan nilai tambah.

Kesenjangan infrastruktur juga menjadi hambatan serius bagi investasi dan pengembangan industri. Investor cenderung enggan menanamkan modal di lokasi yang infrastrukturnya belum siap, karena hal itu akan menambah biaya operasional dan memperpanjang waktu pengembalian modal. Padahal, pengembangan industri hilir dan diversifikasi ekonomi yang sangat dibutuhkan di berbagai wilayah Sumatera, sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang kuat. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, rencana besar untuk hilirisasi komoditas dan pengembangan sektor non-primer akan sulit terealisasi. Oleh karena itu, peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Sumatera menjadi isu strategis yang mendesak. Investasi pada pembangunan dan pemeliharaan jalan, pelabuhan, bandara, serta perluasan jaringan listrik dan internet, harus menjadi prioritas utama. Dengan infrastruktur yang lebih baik, Sumatera akan dapat meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, menarik lebih banyak investasi, dan pada akhirnya, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan Masyarakat.

D. Kerentanan dan Potensi Bencana

Isu strategis yang dihadapi wilayah Sumatera berupa tingginya kerentanan dan potensi bencana, khususnya di sepanjang pesisir barat yang merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Jalur ini dikenal sebagai zona subduksi aktif, tempat lempeng Indo-Australia menunjam di bawah lempeng Eurasia. Akibatnya, wilayah ini sangat rentan terhadap gempa bumi dan tsunami, seperti yang pernah terjadi di Aceh pada tahun 2004. Selain itu, kondisi geologis pegunungan Bukit Barisan juga meningkatkan risiko tanah longsor dan banjir bandang, terutama saat musim hujan ekstrem, mengancam keselamatan jiwa, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kerentanan bencana ini memiliki dampak serius terhadap upaya pembangunan dan keberlanjutan di Sumatera. Ancaman bencana yang konstan membuat perencanaan tata ruang menjadi lebih kompleks dan investasi infrastruktur menjadi berisiko tinggi. Sektor-sektor vital seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian yang banyak terkonsentrasi di wilayah pesisir barat, sangat rentan terhadap gangguan akibat bencana. Kerugian ekonomi yang besar pascabencana juga dapat menghambat pertumbuhan dan menghabiskan anggaran daerah yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan.

Untuk mengatasi isu ini, diperlukan strategi komprehensif dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Ini mencakup pembangunan infrastruktur yang tahan gempa dan tsunami, seperti bangunan dengan standar konstruksi yang lebih baik, sistem peringatan dini yang efektif, serta jalur evakuasi yang jelas. Selain itu, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana dan langkah-langkah penyelamatan diri juga menjadi krusial. Program-program simulasi bencana secara berkala perlu dilaksanakan untuk memastikan masyarakat dan aparat siap menghadapi situasi darurat. Pengelolaan tata ruang yang berbasis risiko bencana juga menjadi sangat penting. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan peta rawan bencana dalam rencana pembangunan wilayah, membatasi pembangunan di zona-zona risiko tinggi, dan mendorong relokasi permukiman di area yang sangat rentan. Terakhir, kolaborasi multipihak antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga penelitian, komunitas lokal, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang terpadu dan efektif. Dengan demikian, Sumatera dapat membangun ketahanan

terhadap bencana dan memastikan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.

E. Ancaman Degradasi Lingkungan

Isu strategis yang serius yang dihadapi berbagai wilayah Sumatera adalah degradasi lingkungan, sebuah ancaman multidimensional yang merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan pembangunan. Fenomena seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terus menjadi momok tahunan, melepaskan emisi gas rumah kaca yang besar, menyebabkan kabut asap lintas batas, serta merusak keanekaragaman hayati. Bersamaan dengan itu, abrasi pantai mengikis garis pantai dan mengancam permukiman serta infrastruktur pesisir, khususnya di sepanjang pesisir timur yang rentan. Selain itu, isu lain yang mendesak adalah penurunan drastis luas lahan pertanian pangan akibat alih fungsi lahan. Lahan-lahan subur yang seharusnya digunakan untuk produksi pangan seringkali dikonversi menjadi perkebunan monokultur skala besar, kawasan industri, atau permukiman. Tren ini tidak hanya mengancam ketahanan pangan regional, tetapi juga mengurangi kapasitas penyerapan air dan meningkatkan risiko banjir. Konflik pemanfaatan lahan antara masyarakat adat, petani, dan korporasi juga semakin memperparah kondisi ini.

Sektor pertambangan, baik legal maupun ilegal, turut berkontribusi signifikan terhadap degradasi lingkungan di Sumatera. Aktivitas pertambangan seringkali meninggalkan bekas berupa lubang-lubang bekas galian yang tidak direklamasi, pencemaran air dan tanah akibat limbah tambang, serta kerusakan hutan dan ekosistem di sekitarnya. Hal ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, hilangnya sumber mata pencaharian tradisional, serta punahnya flora dan fauna endemik yang ada di wilayah tersebut. Untuk mengatasi berbagai bentuk degradasi lingkungan ini, dibutuhkan strategi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kerusakan lingkungan, restorasi ekosistem yang rusak, serta implementasi kebijakan tata ruang yang ketat untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi krusial. Selain itu, pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, promosi energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada tambang batubara, serta pemberdayaan masyarakat lokal dalam menjaga lingkungan juga harus menjadi prioritas utama. Dengan demikian, Sumatera dapat mewujudkan

pembangunan yang selaras dengan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

F. Disparitas Kualitas Sumber Daya Manusia

Isu strategis yang krusial terkait disparitas kualitas sumber daya manusia (SDM) dan fenomena *brain/talent drain*. Data menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah pada jenjang menengah atas/kejuruan di Sumatera masih relatif senjang, berada di angka 70 persen, dan bahkan lebih rendah lagi untuk pendidikan tinggi, yakni sekitar 25 persen pada tahun 2023. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar generasi muda Sumatera belum memiliki akses penuh atau motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang pada gilirannya membatasi potensi mereka dalam berkontribusi pada pembangunan regional. Rendahnya angka partisipasi pada pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi ini secara langsung berdampak pada ketersediaan tenaga kerja berkualitas di Sumatera. Dengan tingkat pendidikan yang belum merata, daya saing SDM Sumatera di pasar kerja menjadi terbatas, terutama untuk sektor-sektor yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan spesifik. Hal ini juga memperlambat proses transfer teknologi dan inovasi, yang sangat dibutuhkan untuk mendorong hilirisasi industri dan diversifikasi ekonomi seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Lebih lanjut, Sumatera juga dihadapkan pada fenomena *brain/talent drain*, di mana sekitar 30 persen tenaga kerja ahli dan terampil dilaporkan meninggalkan wilayah ini pada tahun 2023. Para profesional dan talenta terbaik seringkali mencari peluang yang lebih baik di luar Sumatera, baik di kota-kota besar lainnya di Indonesia maupun di luar negeri. Hal ini terjadi karena kurangnya kesempatan kerja yang sesuai dengan kualifikasi mereka, gaji yang kurang kompetitif, atau minimnya fasilitas pengembangan karir. *Brain/talent drain* ini menyebabkan Sumatera kehilangan potensi SDM unggul yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan roda ekonomi dan inovasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM dan penciptaan peluang kerja yang menarik di Sumatera menjadi sangat mendesak. Strategi yang diperlukan mencakup peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah dan tinggi, penyelarasan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri lokal, serta pengembangan program vokasi yang relevan. Selain itu, pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi

tenaga ahli dan terampil, melalui insentif karir, pengembangan ekosistem inovasi, dan peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian, Sumatera dapat mempertahankan talenta terbaiknya dan menarik talenta dari luar untuk berkontribusi pada kemajuan wilayah.

G. Prevalensi *Stunting* yang Relatif Masih Tinggi

Isu strategis lainnya di berbagai wilayah Sumatera terkait tingginya prevalensi *stunting*. Data menunjukkan bahwa rata-rata angka *stunting* di Sumatera dapat mencapai sekitar 20 persen pada tahun 2023. Angka ini mengindikasikan bahwa seperlima dari balita di Sumatera mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis, yang berdampak pada perkembangan fisik dan kognitif mereka. Kondisi ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia masa depan dan potensi kesehatan regional. Prevalensi *stunting* yang tinggi memiliki konsekuensi jangka sehat terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) di Sumatera. Anak-anak yang mengalami *stunting* cenderung memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah, kesulitan dalam belajar, dan produktivitas yang kurang optimal saat dewasa. Hal ini secara langsung akan menghambat eseh peningkatan daya saing SDM Sumatera dan kemampuan wilayah untuk bertransformasi menuju ekonomi yang lebih inovatif dan berbasis pengetahuan. Potensi *brain drain* yang telah disinggung sebelumnya akan semakin diperparah jika generasi mendatang tidak memiliki fondasi kesehatan dan kesehatan yang kuat.

Tingginya angka *stunting* di Sumatera dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab yang kompleks dan multidimensional. Ini meliputi kurangnya akses terhadap makanan bergizi, praktik sanitasi dan kebersihan yang belum memadai, minimnya pengetahuan tentang gizi seimbang pada ibu dan pengasuh, serta kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas, termasuk imunisasi dan pemeriksaan kesehatan rutin. Keterkaitan dengan isu-isu lain seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, dan keterbatasan infrastruktur air bersih juga tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi terpadu dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan program-program gizi yang komprehensif, mulai dari edukasi tentang pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil dan menyusui, pemberian makanan tambahan, hingga perbaikan akses air bersih dan sanitasi. Kolaborasi lintas sektor antara kesehatan, pertanian,

kesehatan, dan pekerjaan umum, serta partisipasi aktif kesehatan, menjadi kunci keberhasilan dalam menurunkan angka stunting. Dengan investasi pada kesehatan dan gizi anak sejak dini, Sumatera dapat membangun generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif untuk masa depan yang lebih baik.

H. Tingkat Kemiskinan yang Relatif Masih Tinggi

Wilayah Sumatera masih dihadapkan pada isu strategis terkait tingkat kemiskinan yang signifikan. Pada tahun 2023, rata-rata kemiskinan di Sumatera tercatat sekitar 9 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian besar penduduk di wilayah ini yang hidup di bawah garis kemiskinan, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Isu ini menjadi lebih kompleks karena adanya disparitas antarprovinsi, dengan Provinsi Aceh memiliki tingkat kemiskinan tertinggi mencapai sekitar 14 persen. Perbedaan angka kemiskinan antarprovinsi di Sumatera mengindikasikan adanya akar permasalahan yang beragam di setiap wilayah. Di beberapa daerah, kemiskinan mungkin disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap lapangan kerja yang layak, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan, atau ketergantungan pada sektor pertanian dengan produktivitas rendah. Sementara itu, di wilayah seperti Aceh, faktor-faktor historis dan geografis mungkin turut berperan dalam tingginya angka kemiskinan, seperti dampak konflik masa lalu atau kerentanan terhadap bencana alam yang menghambat pemulihan ekonomi.

Tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi ini memiliki dampak multidimensional terhadap pembangunan di berbagai wilayah Sumatera. Kemiskinan tidak hanya berarti kurangnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, sanitasi, dan air bersih. Hal ini berkorelasi langsung dengan isu-isu lain seperti *stunting*, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan potensi *brain/talent drain*. Masyarakat miskin juga lebih rentan terhadap dampak bencana alam dan degradasi lingkungan, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengentasan kemiskinan yang inklusif dan terintegrasi. Kebijakan harus fokus pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan juga harus menjadi

prioritas. Dengan pendekatan yang komprehensif, Sumatera dapat secara bertahap menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.

I. Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal

Wilayah Sumatera menghadapi isu strategis yang mendesak terkait akses terhadap layanan pendidikan yang masih relatif rendah dan terbatas. Meskipun ada kemajuan, namun beberapa daerah, terutama di pedesaan dan daerah terpencil, masih kesulitan mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Hal ini terlihat dari masih adanya kesenjangan angka partisipasi sekolah, terutama pada jenjang menengah atas dan pendidikan tinggi. Keterbatasan jumlah sekolah, minimnya tenaga pengajar berkualitas yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil, serta fasilitas belajar yang belum memadai, secara langsung menghambat potensi anak-anak Sumatera untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bersaing di masa depan. Bersamaan dengan itu, akses terhadap layanan kesehatan di Sumatera juga masih relatif rendah dan terbatas. Banyak masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi atau yang secara geografis terisolasi, kesulitan mengakses fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas atau rumah sakit. Keterbatasan jumlah dokter dan tenaga medis spesialis, kurangnya peralatan medis yang memadai, serta jarak tempuh yang jauh dan sulit dijangkau, menjadi penghalang utama. Akibatnya, penanganan penyakit seringkali terlambat, angka kematian ibu dan anak masih menjadi perhatian, dan isu kesehatan masyarakat seperti stunting sulit diatasi secara optimal.

Keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan ini secara langsung berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) di Sumatera. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak cenderung memiliki kesempatan kerja yang terbatas dan produktivitas yang rendah saat dewasa. Demikian pula, masyarakat yang tidak memiliki akses kesehatan yang baik akan lebih rentan terhadap penyakit, yang mengurangi produktivitas dan meningkatkan beban ekonomi. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan ketertinggalan, menghambat upaya Sumatera untuk mencapai potensi pembangunan ekonominya secara penuh dan berkelanjutan. Untuk mengatasi isu strategis ini, peningkatan dan pemerataan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah, didukung oleh pemerintah pusat dan partisipasi aktif masyarakat,

perlu berinvestasi lebih banyak dalam pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, menempatkan tenaga pengajar dan tenaga medis yang berkualitas di seluruh wilayah, serta menyediakan beasiswa dan insentif bagi mereka yang bersedia mengabdikan diri di daerah terpencil. Pemanfaatan teknologi digital untuk pendidikan jarak jauh dan telemedisin juga perlu ditingkatkan. Dengan demikian, Sumatera dapat membangun masyarakat yang lebih sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

J. Konektivitas Antarwilayah dan Kesenjangan Infrastruktur Digital

Wilayah Sumatera masih dihadapkan pada isu strategis berupa keterbatasan infrastruktur layanan dasar yang esensial untuk pembangunan dan kesejahteraan. Banyak daerah, terutama di pelosok, masih kesulitan mengakses pasokan air bersih yang memadai, sanitasi yang layak, dan listrik yang stabil. Kondisi ini secara langsung berdampak pada kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, dan kualitas hidup. Tanpa infrastruktur dasar yang kuat, upaya peningkatan kualitas hidup dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan menjadi sangat terhambat. Selain layanan dasar, Sumatera juga bergulat dengan keterbatasan konektivitas antarwilayah. Kondisi jalan yang belum merata dan memadai di berbagai provinsi, serta minimnya akses ke pelabuhan dan bandara di beberapa daerah, menghambat pergerakan barang dan jasa. Akibatnya, biaya logistik menjadi tinggi, akses pasar bagi produk-produk lokal terbatas, dan investasi menjadi kurang menarik. Keterbatasan ini memperlebar jurang pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta menghambat potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Di era digital saat ini, kesenjangan infrastruktur digital menjadi isu kritis di Sumatera. Banyak daerah yang masih belum terjangkau jaringan internet berkualitas tinggi, bahkan di beberapa lokasi masih kesulitan mendapatkan sinyal telepon seluler yang stabil. Keterbatasan ini menghambat akses masyarakat terhadap informasi, layanan daring seperti pendidikan dan kesehatan digital, serta peluang ekonomi baru yang muncul dari ekonomi digital. Akibatnya, masyarakat di daerah tersebut terisolasi dari perkembangan teknologi dan inovasi, yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing wilayah. Untuk mengatasi isu strategis ini, peningkatan investasi pada infrastruktur layanan dasar, konektivitas, dan digital menjadi sangat mendesak. Pemerintah daerah, didukung oleh pemerintah pusat dan sektor

swasta, perlu memprioritaskan pembangunan jalan yang berkualitas, pengembangan pelabuhan dan bandara, serta percepatan pemerataan akses listrik, air bersih, dan sanitasi. Selain itu, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan internet hingga ke pelosok harus menjadi fokus utama. Dengan infrastruktur yang lebih baik, Sumatera dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi disparitas antarwilayah.

2.3.2.4 Isu Strategis Sumatera Selatan

A. Kemiskinan dan Stunting yang Masih Tinggi

Tingkat kemiskinan menjadi isu di setiap daerah, dan penanganannya bersifat multidimensi. Terdapat pola yang relatif sama dalam tren penurunan kemiskinan, yaitu penurunan kemiskinan akan sangat drastis dari di atas 30% menjadi 20%, dan menunjukkan perlambatan pada saat menurun dari 20% menuju 10%, dan stagnan pada interval 10-13%. Oleh karena itu, isu kemiskinan tetap menjadi isu strategis untuk diselesaikan di masa yang akan datang. Sumatera Selatan yang masih memiliki tingkat kemiskinan di atas kemiskinan nasional yaitu sebesar 10%, dan **tertinggi kedua** setelah Provinsi Bengkulu di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Ada anomali, dimana tingkat kemiskinan tinggi terkonsentrasi di beberapa wilayah kabupaten dengan pendapatan per kapita besar terutama daerah dengan SDA yang melimpah, dan Sumatera Selatan masih memiliki wilayah tertinggal dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Selain itu, tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan masih tinggi.

Prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Selatan masih cukup tinggi, daerah dengan angka stunting tertinggi yaitu Kabupaten Musi Rawas dan terendah di Kota Pagar Alam. Penurunan stunting terkait erat dengan gizi buruk, dan kecukupan gizi bagi ibu hamil dan anak, dukungan terhadap pekerja perempuan, dan pemberdayaan perempuan oleh karena itu penting memfokuskan pada fasilitas kesehatan dan pendidikan masyarakat. Penguatan program pengentasan kemiskinan ditujukan melalui kegiatan pemberdayaan terhadap dukungan pekerja perempuan, serta mendorong pengusaha perempuan dalam kegiatan ekonomi.

B. Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan Belum Optimal

Produktivitas Sektor Pertanian yang belum optimal di Sumatera Selatan akan mengancam ketahanan pangan. Hal ini tidak hanya menyangkut ketersediaan pangan tetapi juga keterjangkauan dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan cukup melimpah namun keterjangkaun dan pemanfaatan pangan masih rendah. Beberapa isu ketersediaan pangan, keterjangkauan/aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan secara global dan daerah yaitu: (1) Harga pangan dunia (inflasi pangan) yang tinggi akibat faktor iklim, gangguan pasokan, serta kompetisi penggunaan produk pertanian untuk pangan, pakan, dan bahan bakar akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga cenderung mendorong meningkatnya gizi buruk dan tingkat kemiskinan yang tinggi sehingga menimbulkan kerentanan pangan; (2) Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian akan berdampak pada berkurangnya lahan pertanian; (3) Sumber daya manusia di sektor pertanian mulai menua, rata-rata pertanian berusia antara 35-64 tahun, dan tingkat pendidikan rendah; (4) Peningkatan jumlah rumah tangga petani gurem yang menguasai lahan sempit (kurang dari 0,50 ha); (5) Masih tingginya *food loss* dan *food waste* (kehilangan pangan dan sisa pangan) akibat belum maksimalnya teknologi pasca panen, dan persoalan terkait agrologistik (infrastruktur jalan, fasilitas pendingin, kondisi geografis) dan perilaku konsumen yang tidak tepat dengan menyisakan makanan, (6) Perubahan iklim dapat meningkatkan potensi risiko gagal panen dan menurunnya ketersediaan serta akses pangan, sehingga diperlukan praktik pertanian yang cerdas dan tangguh iklim dalam memperkuat ketahanan sektor pangan terhadap risiko dari perubahan iklim.

Dalam dua dekade kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menurun sebesar 6 persen. Sub sektor perkebunan sebagai *leading* sektor pertanian menghadapi kendala volatilitas harga komoditas. Harga komoditas unggulan seperti Kelapa Sawit, Karet dan Kopi sangat ditentukan oleh permintaan dari luar negeri. Dilihat dari tingkat produktivitas, sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki produktivitas terendah di antara sektor lainnya dan cenderung menurun. Output yang dihasilkan sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang melambat. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan disebabkan oleh banyak faktor, seperti penurunan harga komoditas di pasar global seperti komoditas

karet, kelapa sawit dan batubara, serta ketidakpastian pada perekonomian global berdampak pada ekonomi regional.

Pengembangan potensi komoditas unggulan daerah belum optimal yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pengembangan potensi ekonomi daerah masih cenderung bersifat *business as usual*, kondisi ini terlihat masih terfokusnya kegiatan di sektor primer sehingga transformasi sektoral relatif lambat, dan hilirisasi produk untuk menciptakan nilai tambah masih terbatas. Potensi perkebunan khususnya produksi komoditi karet terbesar untuk produksi karet alam di Indonesia. Sumatera Selatan menyumbang 34% produksi karet alam nasional pada 2016. Perkembangan produksi karet pada tahun 2024 mencapai 1.008.362,07 ton. Secara rill rata-rata pertumbuhan produksi karet selama 2020-2024 turun yaitu sebesar -1,99%. Produksi kelapa sawit selama 2020-2024 mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan produksi sebesar 0,43%.

Tanaman perkebunan yang juga tumbuh positif adalah tanaman kelapa yang secara rill rata-rata pertumbuhan produksi sebesar 1,40 persen selama periode 2020-2024, demikian juga tanaman kopi yang tumbuh dengan rata-rata sebesar 3,67 persen dalam periode yang sama.

Permasalahan pengembangan sektor unggulan seperti perkebunan yaitu: (a) belum optimalnya pertumbuhan produksi tanaman perkebunan yang disebabkan oleh tingginya alih fungsi lahan menjadi lahan peruntukkan lainnya; dan (b) nilai tambah tanaman perkebunan relatif masih kecil dibandingkan sektor lainnya disebabkan oleh pengelolaan inefisien, oleh karena itu, hasil produksi tanaman perkebunan diarahkan pada kegiatan hilirisasi (*on farm*), artinya industrialisasi produk pertanian terutama tanaman perkebunan akan mendorong produktivitas sektor pertanian secara menyeluruh.

Sumatera Selatan memiliki potensi sumber daya perairan sungai dan laut yang cukup besar, namun produksi perikanan budidaya di Provinsi Sumatera Selatan masih belum dikembangkan secara optimal. Tercatat dari Tabel 2.25 yang disajikan menunjukkan bahwa pertumbuhan riil produksi perikanan budidaya mengalami penurunan yaitu sebesar -4,90 persen selama periode 2020-2024. Produksi perikanan budidaya di beberapa wilayah di Sumatera Selatan juga mengalami penurunan cukup besar, seperti Kabupaten Musi Rawas yang turun sebesar -38,77 persen, diikuti oleh Kota Prabumulih (-23,20%), Lubuklinggau (-20,24%), Musi Banyuasin (-15,76 %), Lahat (-38,77%).

Sementara wilayah yang produksi perikanan budidayanya tumbuh signifikan yaitu OKU Selatan yang tumbuh sebesar 18,79 persen, diikuti oleh Kabupaten Empat Lawang (9,28%), PALI (9,10%), Ogan Ilir (9,06%), Pagar Alam (5,87%), OKU Timur (3,86%) dan Banyuasin (2,46%). Peningkatan dan penurunan produksi perikanan budidaya dipengaruhi faktor yang beragam, seperti kondisi geografis, teknologi dan informasi pendukung, kualitas air, bibit, lahan, cuaca, dan peralihan tambak menjadi lahan pertanian atau pemukiman serta pengetahuan pembudidaya tentang cara budidaya ikan yang baik.

C. Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal

Perkembangan aspek demografi menunjukkan adanya fenomena *degrowth* atau pertumbuhan penduduk yang menurun. Kondisi ini berimplikasi kepada penyediaan kebutuhan sarana dan sarana di masa yang akan datang. Bonus demografi yang akan dialami 10 tahun ke depan perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Salah satu indikator kondisi pendidikan yang sedang berjalan adalah indikator akses dan pemerataan pendidikan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar cakupan pelayanan pendidikan sekaligus untuk mengetahui berapa banyak anak yang belum terlayani pendidikannya di setiap jenjang pendidikan. Salah satu aspek pemerataan pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM). APM SMA menunjukkan cakupan pelayanan pendidikan jenjang SMA. APM SMA di Sumatera Selatan periode 2020-2024 masih berkisar 60 persen, menunjukkan bahwa hampir setengah penduduk Sumatera Selatan belum tuntas Pendidikan SMA, padahal rata-rata semua lowongan pekerjaan mensyaratkan minimal Pendidikan SMA. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga terlihat dari IPM, nilai IPM Sumatera Selatan masih rendah, dan menempati urutan kedua terbawah di wilayah Sumbagsel (setelah Provinsi Lampung). Nilai IPM Sumatera Selatan tahun 2024 sebesar 73,84.

Peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja perlu dilakukan melalui penguatan kompetensi, pengembangan keterampilan baru, pendidikan kewirausahaan, ekosistem kemitraan DUDI. Saat ini, kualitas dan kualifikasi SDM tidak seimbang dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan banyaknya populasi usia produktif, dunia usaha yang akan membuka peluang pekerjaan akan semakin selektif dengan kualifikasi yang semakin sulit. Jika pemerintah tidak berhasil menyediakan fasilitas untuk membentuk sumber

daya manusia dengan baik, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Pemerintah harus menyediakan kebutuhan pendidikan yang memadai untuk membentuk sumber daya yang bagus.

Masih belum terjalinnya hubungan Industrial antara pemerintah, pekerja, dan perusahaan dengan baik. Mengakibatkan rendahnya daya saing tenaga kerja dan salah satu penyebab pengangguran. Sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja buruh dan pemerintah. Permasalahannya hubungan industrial saat ini masih belum harmonis. Seperti: peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB), lembaga kerja sama (LKS) bipartit, lembaga kerja sama (LKS) tripartit, peran SP/SB dan asosiasi pengusaha. Peran pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya pergeseran fungsi sosial dan ekonomi karena meningkatnya penduduk lanjut usia dalam bentuk perlindungan sosial dan biaya pengobatan.

D. Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimal

Pembangunan infrastruktur regional dan/atau lintas wilayah harus diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata. Terdapat wilayah yang memiliki indeks aksesibilitas yang rendah dan terdapat daerah yang masih sulit dijangkau moda transportasi. Selain itu masih terdapat *gap* kinerja Infrastruktur Jaringan Jalan (Kondisi Jalan Mantap sebesar 83,62%). Kemudian, masih terdapat wilayah yang belum terlayani jaringan listrik dan tidak terdapat jangkauan sinyal telepon dan akses internet.

Kesenjangan antarwilayah di Sumatera Selatan masih tergolong tinggi, hal ini tercermin dari nilai **Indeks Entropi Theil** pada tahun 2023 (data mutakhir) sebesar 1,339, masih lebih tinggi dari provinsi lain di Sumbagsel. Kondisi ini disebabkan oleh terpusatnya sumber daya penggerak ekonomi, seperti ketidakmerataan persebaran penduduk tenaga kerja terdidik dan terampil, investasi dan kredit perbankan, sarana dan prasarana. Selain itu, kondisi wilayah dengan topografi yang sulit seperti daerah pegunungan dan daerah perairan/rawa. Wilayah di bukit barisan masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, demikian pula wilayah di Pantai Timur Sumatera Selatan terkendala moda transportasi, dan terbatasnya sarana prasarana sehingga menimbulkan inefisiensi.

E. Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan, Banjir, dan Tanah Longsor Belum Optimal

Perubahan iklim yang terjadi akan menurunkan kualitas lingkungan dan pada akhirnya berpotensi mengganggu penghidupan masyarakat. Penurunan kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari: a) terjadinya **peningkatan luas lahan kritis** dalam periode waktu 2015-2019 (penambahan luas lahan sangat kritis pada tahun 2019 hampir delapan kali luas lahan sangat kritis pada tahun 2015, b) telah terjadi **peningkatan laju deforestasi** dari $\pm 2.853,5$ Ha/tahun menjadi ± 17.438 Ha/tahun, c) pemanfaatan **area gambut rentan terhadap kebakaran hutan** dan pemicu perubahan iklim, d) **terjadinya polusi udara** yang berdampak pada penurunan kualitas udara.

Isu strategis terkait penurunan kualitas lingkungan hidup di sektor pertambangan salah satunya adalah lahan bekas tambang. Terdapat 359 usaha tambang yang izinnya putus (tambang rakyat), hal ini dapat menimbulkan beberapa dampak seperti lingkungan, sosial, ekonomi, dan keamanan. Dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan antara lain banjir, pencemaran air, udara, dan tanah longsor. Dampak sosial yang dapat ditimbulkan antara lain pengangguran, kemiskinan, konflik sosial, dan gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan bahan kimia karena tidak ada mekanisme reklamasi dan pengelolaan limbah. Dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan antara lain berkurangnya pendapatan negara dari pajak dan retribusi. Dampak keamanan yang dapat ditimbulkan antara lain menjadi tempat berkumpulnya kelompok kriminal.

F. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal

Peningkatan daya saing ekonomi dan realisasi investasi di Provinsi Sumatera Selatan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kinerja perekonomian Provinsi Sumatera Selatan masih didominasi oleh sektor LU Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi sebesar 22,80 persen. Kemudian diikuti oleh LU Industri Pengolahan sebesar 18,70 persen; Pertanian, Kehutanan, Perikanan sebesar 14,11 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,43 persen, dan Konstruksi sebesar 11,67 persen. Struktur PDRB ini mencerminkan bahwa sebagian besar kegiatan perekonomian Sumatera Selatan masih sangat bergantung dan mengandalkan sektor primer. Selain itu, kondisi ini dapat juga diartikan bahwa terjadi permintaan dan penawaran

relatif tinggi serta pasar kompetitif pada kelima LU tersebut dibandingkan sektor lapangan usaha lainnya. Struktur PDRB yang masih mengandalkan sektor primer memerlukan transformasi ekonomi baik secara vertikal maupun horizontal. Berdasarkan data dari Kementerian PPN/BAPPENAS tercatat bahwa Provinsi di Sumatera dengan tingkat ekonomi inklusif tertinggi adalah Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan provinsi dengan tingkat ekonomi inklusif terendah adalah Aceh. Sementara Provinsi Sumatera Selatan masih di posisi kelima di Pulau Sumatera dengan skor IPEI yaitu sebesar 5,97 pada 2021, relatif lebih kecil dibandingkan IPEI Indonesia sebesar 6,00.

Skor IDSD di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 (data termutakhir) yaitu sebesar 3,46, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,36 pada 2023. Skor ini relatif lebih rendah dibandingkan skor IDSD Nasional yang mencapai 3,43 pada tahun 2024. Daya saing Provinsi Sumatera Selatan berada pada kategori Tinggi, dengan peringkat ke-6 dari 34 provinsi di Indonesia. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan nilai pada komponen lingkungan pendukung dan sumber daya manusia. Skor IDSD ini bergantung pada (i) kualitas infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan; (ii) kualitas pendidikan dan kesehatan; (iii) keterampilan dan produktivitas tenaga kerja; (iv) daya saing produk dan jasa; serta (v) iklim inovasi.

G. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah

Isu kemandirian daerah mengemuka setelah dua dekade otonomi daerah. Sebagian besar daerah masih menggantungkan pendapatan dari Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) dengan kontribusi rata-rata hampir 90% terhadap total pendapatan daerah, dan selebihnya bersumber dari kontribusi PAD. Kondisi ini terlihat dari indeks kemandirian fiskal di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan masih tergolong belum mandiri. Dari 17 kabupaten/kota hanya Kota Palembang yang termasuk dalam kategori **menuju mandiri**, sementara kabupaten/kota lainnya masih belum mandiri. Masih relatif tingginya proporsi belanja operasi, yaitu rata-rata 60% dari total pengeluaran menyebabkan celah fiskal untuk belanja modal menjadi sempit.

Pembagian pendapatan dari dana bagi hasil yang relatif masih kecil bagi daerah menjadi isu ke depan dalam meningkatkan pendapatan, dan kreatifitas pemerintah daerah dalam mencari sumber pendapatan, serta peningkatan

efisiensi dan alokasi belanja berkualitas akan menjadi faktor kunci dalam pengelolaan keuangan daerah.

Di sisi lain, Sumatera Selatan berpotensi untuk menguatkan kapasitas fiskalnya melalui pemanfaatan pendanaan inovatif. Berbagai skema yang dimaksud dapat meliputi sertifikasi lanskap dan imbal atau pembayaran jasa lingkungan, pasar komoditas air terkompensasi, pasar dan inisiatif karbon sukarela, dan pengembangan sistem sertifikasi komoditas unggulan. Pemanfaatan skema pendanaan inovatif ini dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah sekaligus meningkatkan komitmen dan upaya pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan *net zero emission*.

H. Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan

Provinsi Sumatera Selatan mengandalkan sumber daya alam sebagai penopang ekonomi dengan sektor unggulan, yaitu pertanian dan pertambangan batubara. Perubahan struktur ekonomi dari sektor primer ke sekunder terlihat melambat, indikasinya sektor manufaktur stagnan dalam dua dekade. Kedepannya terdapat berbagai potensi ancaman seperti perubahan iklim dan pengaruh krisis perekonomian global yang dapat mengancam keberlangsungan sektor unggulan dan penghidupan masyarakat Sumatera Selatan. Oleh karena itu, transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, cerdas iklim dan rendah emisi perlu dilakukan. Pemerintah Sumatera Selatan perlu mengantisipasi sekaligus mencegah kontraksi ekonomi yang mungkin muncul akibat gejolak eksternal, misalnya karena penurunan permintaan batubara di masa datang.

Perubahan struktur ekonomi dan bauran energi daerah menuju ekonomi hijau akan berdampak baik positif maupun negatif pada masyarakat Sumatera Selatan. Peran serta seluruh pihak sebagai aktor pembangunan sangat diperlukan dalam membahas dan memberikan input terkait rencana dan kebijakan transformasi ekonomi dan transisi energi daerah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah menyediakan Forum Konsultasi Daerah (FKD) untuk percepatan transformasi ekonomi Sumatera Selatan. Forum ini telah disahkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 95/KPTS/BAPPEDA/2025 pada 24 Januari 2025. Forum ini merupakan *platform* multipihak yang bertujuan untuk : (a) mengkoordinasikan kegiatan percepatan transformasi ekonomi dan sosial kepada masyarakat terdampak

termasuk masyarakat rentan dan termajinalkan, (b) memfasilitasi peningkatan kapasitas para pihak dalam isu transformasi ekonomi dan transisi energi berkeadilan, (c) mendorong pembentukan dan penguatan regulasi terkait percepatan transformasi ekonomi dan sosial, serta (d) memberikan masukan kepada pemerintah terkait percepatan transformasi ekonomi, sosial, dan transisi energi berkeadilan.

Transformasi ekonomi dilakukan sejalan dengan pengelolaan bentang lahan berkelanjutan dan transisi energi sangat penting untuk mengatasi krisis iklim yang sedang terjadi secara global, nasional, maupun regional. Sumatera Selatan mempunyai potensi besar dalam penurunan emisi GRK dari sektor berbasis lahan, juga pengembangan energi terbarukan dengan potensi besar terhadap energi surya, pembangkit listrik tenaga surya, air, angin, dan panas bumi. Sumatera Selatan ditetapkan menjadi Lumbung Pangan dan Lumbung Energi Nasional. Sumatera Selatan telah berkomitmen mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau sejak tahun 2017 yang berkontribusi terhadap perwujudan komitmen Indonesia dalam *Nationally Determined Contribution* dan target pembangunan berkelanjutan. Komitmen ini merespon terhadap 3 tantangan utama yang saat ini dihadapi, yaitu melemahnya kontribusi sektor ekonomi berbasis lahan, produktivitas rendah dan berkurangnya petani, dan belum meratanya pembangunan yang dirasakan oleh petani. Aspek penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau di Sumatera Selatan adalah pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan yang mendukung pelestarian bentang lahan dan penghidupan masyarakat, termasuk pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut. Pengelolaan ekosistem gambut memerankan bagian yang penting dalam mewujudkan penurunan emisi GRK dari sektor berbasis lahan di Sumsel. Selain itu, melalui penerapan agroforestri dan praktik pertanian yang baik, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dan perkebunan yang cerdas iklim, tangguh, dan berkontribusi pada ketahanan pangan serta diversifikasi penghidupan masyarakat.

Selain itu, salah satu upaya pemenuhan kebutuhan energi yang dilakukan yakni melalui pemanfaatan batubara, minyak bumi, gas alam, energi panas bumi, dan gas metana. Data tahun 2024, produksi batubara Sumatera Selatan mencapai 113,29 juta ton dimana angka produksi ini sudah melampaui produksi tahun 2023 sebesar 105,85 juta ton. Realisasi bauran energi terbarukan di Sumatera Selatan pada tahun 2024 mencapai 23,15%. Seiring

dengan berbagai komitmen Pemerintah Indonesia baik di level internasional maupun nasional terkait target pengurangan emisi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan pengkajian potensi pemanfaatan energi terbarukan agar secara bertahap dapat bertransisi dari penggunaan energi fosil, termasuk batubara, menuju penggunaan energi bersih.

Selain batubara yang banyak digunakan sebagai sumber energi, Sumatera Selatan memiliki potensi Energi Terbarukan yaitu potensi 21.032 MW dengan kapasitas terpasang baru 1.009,28 MW atau sebesar 4,8%. Artinya masih banyak potensi di sektor energi terbarukan yang bisa dikembangkan sehingga transisi energi dari bahan bakar fosil dapat berjalan, diantaranya pemanfaatan biomassa sebagai energi baru terbarukan yang memanfaatkan limbah perkebunan dan persawahan yang ada, maka dapat memanfaatkan residu kelapa sawit, kopi, kakao, kayu dan limbah sekam padi sebagai potensi. Selain itu, Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki potensi energi baru terbarukan antara lain potensi *Hydro* sebesar 448 MW, potensi solar panel sebesar 17.233 MWp, potensi *wind* sebesar 301 MW, potensi *bioenergy* 2132 MW dan potensi Geothermal sebesar 918 MW. Target bauran energi tahun 2025 EBT 21,06%; Minyak Bumi 31,69%; gas bumi 25,54%; Batubara 21,72%. Target bauran energi tahun 2050 EBT 22,56%; Minyak Bumi 33,24%; Gas Bumi 20,69%; Batubara 23,51%.

Kondisi bauran energi bersih Sumatera Selatan saat ini masih sesuai dengan target bauran yang ditetapkan dalam RUED Sumatera Selatan, namun perlu diantisipasi kemungkinan meningkatkan target bauran EBT mengingat rencana perubahan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan terus meningkatnya daya saing keekonomian energi terbarukan dibanding energi fosil. Kebijakan EBT di Indonesia berubah secara cepat, sehingga perlu pengamatan cermat atas perubahan yang mungkin terjadi. Dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa target bauran energi untuk sektor EBT adalah sebesar 74,83% pada tahun 2045, artinya Sumatera Selatan saat ini perlu mengembangkan skenario transisi energi secara umum, baik pada segi konservasi dan efisiensi energi di semua sektor, transportasi, non energi sektor Industri, energi non listrik sektor rumah tangga dan komersial dan juga energi primer listrik untuk bisa menyumbang target nasional bauran energi untuk EBT dengan skenario optimis. Diperlukan upaya dan komitmen percepatan pengakhiran masa operasional PLTU batu bara serta melakukan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Dalam upaya transisi peralihan menuju energi terbarukan, perlu mengintegrasikan pendekatan GEDSI (*Gender Equality, Disability and Sosial Inclusion*) dalam transisi energi yang berkeadilan, yang bertujuan mencegah ketimpangan dan memastikan bahwa semua warga negara termasuk perempuan, penyandang disabilitas, anak, pemuda, lansia dan kelompok rentan dapat menikmati manfaat dari transisi energi. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya peningkatan kapasitas serta mendorong stimulasi pendidikan terkait STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*) termasuk bidang EBT. Hal ini bertujuan untuk membuka akses dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi dalam transisi energi yang berkeadilan.

Target Indonesia untuk mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2060 telah disampaikan pada COP 26. Peta jalan menuju NZE di tahun 2060 sebagai dokumen jangka panjang memuat strategi dan arah kebijakan sektor energi yang mendukung aksi mitigasi perubahan iklim.

I. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial

Transformasi tata kelola pemerintahan terlihat dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Pelayanan Publik. Peningkatan indeks-indeks ini akan berkontribusi pada stabilitas sosial melalui pelayanan yang lebih baik. Tata kelola birokrasi di Provinsi Sumatera Selatan masih perlu ditingkatkan, karena Indeks Keterbukaan Informasi dan Integritas masih di bawah rata-rata nasional. Peningkatan integritas dan keterbukaan ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan menjaga stabilitas sosial. Sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Selatan masih memiliki Indeks SPBE predikat Baik, bahkan terdapat 3 kabupaten/kota dengan predikat Sangat Baik. Namun, masih terdapat 5 kabupaten/kota dengan predikat Cukup. Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan mendukung stabilitas sosial, diperlukan regulasi yang jelas, kelembagaan yang efektif, serta meritokrasi dan integritas, di mana kelembagaan yang efektif akan mendorong pelayanan publik yang berkualitas. Era digitalisasi mendorong kemudahan akses pelayanan dan keterbukaan informasi, sehingga reformasi birokrasi menuntut pelayanan yang terintegrasi antar sektor dengan manajemen ASN yang strategis dan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menegakkan tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik ini akan berdampak positif pada stabilitas sosial. Reformasi juga mencakup dukungan partisipasi politik dan

kepemimpinan bagi perempuan dalam lembaga pemerintahan dan politik, serta mendukung kampanye politik yang inklusif dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan. Hal ini akan memperkuat stabilitas sosial melalui kesetaraan dan inklusivitas. Penguatan program peninjauan regulasi kebijakan gender yang terkait diskriminatif terhadap perempuan, serta penguatan program penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik dan akan berkontribusi pada stabilitas sosial.

2.3.2.5 Isu Strategis KLHS RPJMD

A. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Kemiskinan ekstrem dan stunting adalah dua masalah sosial yang saling terkait dan memberikan dampak jangka panjang pada pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Kedua masalah ini memerlukan perhatian serius dan pendekatan yang terintegrasi untuk dapat diatasi dengan cepat dan efektif.

▪ Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana seseorang hidup di bawah garis kemiskinan yang sangat rendah, sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Bank Dunia, kemiskinan ekstrem biasanya didefinisikan sebagai pendapatan di bawah US\$1.90 per hari. Di Indonesia, meskipun angka kemiskinan secara keseluruhan telah menurun dalam beberapa dekade terakhir, masih ada kelompok masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, terutama di wilayah pedesaan, terpencil, dan terpinggirkan. Penyebab utama kemiskinan ekstrem meliputi:

- Ketidakmerataan akses pendidikan dan kesempatan kerja: Banyak masyarakat di daerah terpencil yang tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas atau kesempatan ekonomi yang layak, sehingga sulit untuk keluar dari kemiskinan.
- Keterbatasan akses layanan dasar: Akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan, sanitasi, dan air bersih memperburuk kondisi kehidupan dan memperpanjang siklus kemiskinan.
- Kurangnya infrastruktur yang mendukung: Infrastruktur yang buruk membuat distribusi barang, layanan, dan informasi menjadi

terhambat, sehingga wilayah miskin semakin sulit untuk berkembang.

- *Stunting*

Stunting adalah masalah gizi kronis yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak-anak, yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya. *Stunting* terjadi akibat kurangnya asupan gizi yang cukup, terutama pada periode emas 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Dampak *stunting* tidak hanya terbatas pada fisik, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak dan kemampuan kognitif anak, yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Faktor utama penyebab *stunting* di Indonesia meliputi:

- Kemiskinan: Anak-anak dari keluarga miskin cenderung tidak memiliki akses ke makanan yang bergizi, sanitasi yang layak, dan layanan kesehatan yang memadai.
- Kurangnya edukasi tentang gizi dan kesehatan ibu hamil: Banyak ibu hamil yang tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai pentingnya gizi dan perawatan selama kehamilan.
- Sanitasi yang buruk: Keterbatasan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik meningkatkan risiko infeksi dan penyakit pada anak-anak, yang dapat memperburuk kondisi gizi mereka.

- Keterkaitan Kemiskinan Ekstrem dan *Stunting*

Kemiskinan ekstrem dan *stunting* sering kali berhubungan erat, dimana kemiskinan ekstrem meningkatkan risiko *stunting* pada anak-anak. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem sering kali tidak mampu menyediakan makanan yang bergizi, layanan kesehatan yang memadai, dan lingkungan yang sehat bagi anak-anak mereka. Dampak dari *stunting* pada masa kecil juga dapat menyebabkan lingkaran kemiskinan yang berkelanjutan, karena anak-anak yang *stunting* cenderung memiliki keterbatasan dalam pertumbuhan intelektual dan fisik mereka, yang pada akhirnya mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan.

- Hambatan dalam Akselerasi Pengentasan

Beberapa tantangan yang memperlambat upaya akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem dan *stunting* di Indonesia antara lain Fragmentasi program sosial:

- Banyak program bantuan sosial yang berjalan terpisah-pisah dan tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga efektivitasnya menurun.
 - Kurangnya data yang akurat dan terintegrasi: Keterbatasan dalam pengumpulan dan pemanfaatan data membuat target intervensi sering kali tidak tepat sasaran.
 - Kapasitas lokal yang terbatas: Pemerintah daerah, terutama di daerah terpencil, sering kali kekurangan sumber daya manusia dan finansial untuk melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan dan stunting secara efektif.
- Pendekatan Solusi
- Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem dan *stunting*, beberapa solusi yang bisa diterapkan meliputi:
- Penguatan koordinasi antar lembaga: Program pengentasan kemiskinan dan penanggulangan *stunting* harus dikoordinasikan dengan baik di antara berbagai lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.
 - Peningkatan akses layanan dasar: Pembangunan infrastruktur dan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi harus menjadi prioritas utama di daerah yang paling terdampak.
 - Peningkatan edukasi gizi: Edukasi kepada masyarakat, terutama ibu hamil dan keluarga, mengenai pentingnya gizi dan pola hidup sehat sangat penting untuk mencegah *stunting*.
 - Pemberdayaan ekonomi lokal: Program-program yang mendukung kewirausahaan dan peningkatan keterampilan di daerah miskin harus ditingkatkan untuk membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

B. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Belum Optimal

Pengembangan potensi ekonomi daerah yang belum optimal menjadi salah satu isu yang signifikan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang beragam, seperti sektor pertanian, pariwisata, perikanan, industri kreatif, dan energi terbarukan. Namun, sering kali potensi ini belum dimaksimalkan karena berbagai hambatan yang menghalangi pembangunan

daerah secara optimal. Berikut beberapa permasalahan yang menyebabkan pengembangan ekonomi daerah belum optimal:

1) Keterbatasan Infrastruktur

Salah satu hambatan utama dalam pengembangan potensi ekonomi daerah adalah keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah-daerah terpencil dan terisolasi. Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan, jembatan, transportasi, dan akses internet, membatasi arus distribusi barang, jasa, dan informasi. Akibatnya, daerah-daerah ini kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan biaya logistik, dan membuat pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial menjadi terhambat.

2) Kurangnya Akses Terhadap Sumber Daya Keuangan

Akses terhadap sumber daya keuangan yang terbatas, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menjadi kendala dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Banyak UMKM dan usaha di daerah kesulitan mendapatkan modal untuk meningkatkan skala usaha, melakukan inovasi, atau memperbaiki teknologi produksi. Rendahnya literasi keuangan dan kurangnya akses terhadap lembaga keuangan formal juga memperparah kondisi ini.

3) Sumber Daya Manusia yang Belum Terampil

Pengembangan ekonomi daerah juga seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang belum memiliki keterampilan yang memadai. Banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan, kekurangan tenaga kerja yang terlatih atau berpendidikan tinggi, sehingga sulit untuk memajukan sektor-sektor ekonomi yang memerlukan keahlian khusus, seperti teknologi, pengolahan produk, atau pengelolaan pariwisata. Rendahnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasional di daerah membuat SDM lokal tidak siap bersaing dalam pasar yang semakin global.

4) Kurangnya Diversifikasi Ekonomi

Banyak daerah di Indonesia masih bergantung pada satu atau dua sektor ekonomi utama, seperti pertanian atau pertambangan. Ketergantungan yang tinggi pada satu sektor membuat daerah-daerah ini rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim ekonomi global. Misalnya, daerah-daerah yang bergantung pada pertanian sering kali mengalami kesulitan jika terjadi penurunan harga hasil pertanian atau bencana alam

yang mempengaruhi hasil panen. Kurangnya diversifikasi ekonomi ini menghambat daerah untuk mengembangkan potensi lain yang mungkin lebih berkelanjutan, seperti pariwisata, industri kreatif, atau energi terbarukan.

5) Regulasi dan Birokrasi yang Kompleks

Proses perizinan dan regulasi yang berbelit-belit sering kali menjadi hambatan bagi investor dan pelaku usaha dalam mengembangkan potensi ekonomi di daerah. Birokrasi yang kompleks dan kurangnya transparansi dalam pengurusan izin usaha membuat proses investasi menjadi lambat dan mahal. Selain itu, ketidakpastian hukum dan regulasi yang sering berubah-ubah menurunkan minat investor untuk menanamkan modal di daerah-daerah yang sebenarnya memiliki potensi besar.

6) Keterbatasan Akses Pasar

Banyak daerah yang memiliki produk lokal yang potensial namun kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya dukungan promosi, rendahnya kualitas produk yang sesuai dengan standar pasar global, serta terbatasnya jaringan distribusi. Produk-produk lokal sering kali hanya beredar di pasar lokal, sehingga nilai ekonominya tidak berkembang secara optimal.

7) Kurangnya Sinergi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Kegagalan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah juga dapat disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan pembangunan ekonomi yang *top-down* sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik dan karakteristik unik setiap daerah. Selain itu, kurangnya dukungan dan pendampingan dari pemerintah pusat dalam hal regulasi, pembiayaan, dan pengembangan kapasitas di tingkat lokal menghambat kemajuan daerah dalam memanfaatkan potensi ekonominya.

8) Kurangnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

Penggunaan teknologi dan inovasi di daerah masih sangat terbatas, terutama di sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan. Padahal, dengan pemanfaatan teknologi, produktivitas sektor-sektor tersebut dapat meningkat secara signifikan. Misalnya, penerapan teknologi *Internet of Things* (IoT) dalam pertanian dapat membantu petani meningkatkan efisiensi produksi, atau pemasaran digital yang dapat

membantu produk lokal menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, rendahnya adopsi teknologi di daerah masih menjadi penghambat bagi pengembangan ekonomi lokal.

9) Kesenjangan Pembangunan Antar Daerah

Salah satu permasalahan mendasar dalam pengembangan ekonomi daerah di Indonesia adalah kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pusat-pusat ekonomi cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara daerah-daerah terpencil tertinggal dalam hal infrastruktur, investasi, dan pelayanan publik. Kesenjangan ini memperdalam ketimpangan ekonomi antar wilayah dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang merata.

10) Kurangnya Investasi pada Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk dikembangkan di banyak daerah di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki keunikan budaya, alam, dan produk kreatif. Namun, potensi ini sering kali belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya infrastruktur pariwisata, promosi yang lemah, serta keterbatasan dalam pengelolaan destinasi wisata. Di sisi lain, pelaku ekonomi kreatif di daerah masih menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya akses ke pasar dan keterbatasan modal.

C. Kerentanan Ketahanan Pangan

Isu paling strategis ketiga yang disepakati adalah kerawanan pangan. Hal ini disebabkan karena tekanan pertumbuhan penduduk, *stunting* meningkat, kesejahteraan petani belum optimal, dan tata kelola pertanian dan perkebunan masih kurang optimal. Optimalisasi produktivitas pertanian di Sumatera Selatan perlu ditingkatkan kembali, melihat luas dari lahan pertanian yang tidak sejalan dengan tingkat produktivitas lahan tersebut.

D. Tata Kelola Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Degradasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi isu yang perlu diperhatikan dengan tingginya konversi lahan, pencemaran wilayah, dan perubahan dan kerusakan habitat, termasuk mangrove. Kondisi penurunan kualitas sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil memberikan dampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat pesisir, jabat, DDTL, dan semakin rentan akan bencana pesisir (intrusi air laut, abrasi, sedimentasi, dsb).

Provinsi Sumatera Selatan memiliki karakteristik pantai yang berpasir dan berlumpur. Lumpur umumnya bersumber dari muara-muara sungai. Pendangkalan pada muara sungai menyebabkan sedimentasi dan perubahan garis pantai, misalnya pada perairan di muara Banyuasin. Mangrove yang cukup lebat dapat ditemukan di sepanjang pantai, terutama pada kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Sembilang. Beberapa lokasi pesisir memiliki kerentanan abrasi yang diperparah dengan penurunan ekosistem mangrove. Selain mangrove, isu kerentanan ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya di Provinsi Sumatera Selatan antara lain kawasan konservasi, kegiatan budidaya, serta limbah industri dan rumah tangga.

E. Ancaman Keanekaragaman Hayati

Isu paling strategis kelima yang disepakati adalah ancaman keanekaragaman hayati. Hal ini disebabkan karena degradasi keanekaragaman hayati darat dan perairan. Isu penurunan keanekaragaman hayati darat dan perairan termasuk di dalamnya eksploitasi sumber keanekaragaman hayati, konflik satwa-manusia, dan penurunan kondisi biofisik habitat satwa. Selain itu, berdasarkan pelingkupan potensi dampak yang ditimbulkan antara lain kepunahan spesies, korban jiwa dari konflik satwa manusia, dan menimbulkan ketidakstabilan ekologis. Dampak yang ditimbulkan juga berkaitan dengan alih fungsi lahan, kerusakan ekosistem gambut, dan perubahan iklim.

F. Alih Fungsi Lahan dan Gambut

Isu paling strategis keenam yang disepakati adalah alih fungsi lahan dan gambut. Alih fungsi lahan dan hutan cukup masif terjadi dan memberikan dampak peningkatan lahan kritis (pada tahun 2022, lahan kritis seluas 180.310,48 Ha (91,44 %) dan lahan sangat kritis seluas 16.868,84 Ha (8,56%)). Isu ini disepakati karena kerusakan gambut semakin meningkat, demikian pula dengan keadaan kebakaran hutan dan lahan gambut, pengelolaan mangrove yang kurang efektif, deforestasi terus meningkat, kemiskinan di lahan gambut, pengendalian dan reklamasi lahan tambang, serta ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Selain itu, isu alih fungsi lahan dan hutan memberikan risiko pada penurunan keanekaragaman hayati, degradasi hutan, konflik lahan, penurunan kesuburan tanah, dan secara makro berdampak pada perubahan iklim.

Alih fungsi lahan terjadi ketika lahan dinilai tidak produktif dan terdapat kebutuhan penggunaan lahan untuk kegiatan ekonomi. Proses alih fungsi lahan terjadi terus menerus untuk beragam kepentingan baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Perubahan penggunaan lahan umumnya banyak terjadi untuk lahan pemukiman, sektor pertanian dan perkebunan. Luas pemukiman yang ada di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan penambahan jumlah penduduknya, begitupun dengan peralihan fungsi lahan industri. Alih fungsi lahan menjadi permasalahan utama penggunaan lahan di setiap daerah salah satunya di Sumatera Selatan. Alih fungsi lahan ini berdampak pada penurunan fungsi beberapa jenis ekosistem seperti hutan lindung, daerah aliran sungai dan lainnya. Hal ini selanjutnya akan menimbulkan deforestasi dan degradasi lingkungan, bencana alam (banjir dan kekeringan) serta konflik sosial yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di Sumatera Selatan.

Provinsi Sumatera Selatan mengalami perubahan tutupan lahan yang meningkat dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, yang dimana berdasarkan data yang ada perubahan tutupan lahan meningkat pada sektor pemukiman, pertanian dan perkebunan. Jenis tutupan lahan rawa dan hutan lahan kering sekunder merupakan jenis tutupan lahan yang terus menurun di Sumatera Selatan. Salah satu tutupan lahan yang terkena dampak perubahan yaitu lahan gambut. Dari tiga sektor yang mengalami kenaikan jumlah tutupan lahan yang cukup signifikan pun cukup banyak yang masuk dalam lahan gambut, termasuk dalam fungsi budidaya dan fungsi lindung ekosistem gambut. Ketidaktepatan dalam pemanfaatan lahan gambut sesuai fungsinya dapat merusak dari lahan gambut. Tumpang tindih sektor tersebut dapat kita lihat pada gambar berikut. Sebagai dampaknya sering terjadi bencana yang merugikan pembangunan, biaya hidup masyarakat semakin tinggi, banjir, kekeringan, dan berbagai masalah kesehatan lingkungan. Selain itu dapat meningkatkan hilangnya habitat bagi spesies-spesies asli yang tinggal di sekitar lahan gambut. Kerusakan lahan gambut juga salah satu penyumbang kenaikan emisi karbon di Sumatera Selatan.

G. Belum Optimalnya Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Isu paling strategis ketujuh yang disepakati adalah belum optimalnya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hal ini dikarenakan beberapa hal, seperti: meningkatnya kerentanan terhadap perubahan iklim, meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi, kerentanan daerah pesisir terhadap dampak perubahan iklim, pengelolaan persampahan dan limbah yang belum optimal, penurunan kualitas udara, rendahnya kapasitas adaptasi bencana, transisi energi baru terbarukan/rendah karbon, *climate-smart agriculture*, serta konektivitas infrastruktur kewilayahan terbatas.

Pada periode pengamatan 2015-2020, total emisi (mineral dan gambut) menunjukkan laju emisi yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 22.910.997 ton CO₂-eq/tahun atau 2,64 ton CO₂-eq/ha.tahun. Adapun data dari tahun 2015-2020 menunjukkan adanya proporsi emisi GRK di Provinsi Sumatera Selatan yang paling signifikan dari sektor Kehutanan disusul dengan sektor Energi. Emisi karbon yang berasal dari mineral dan gambut pada kurun waktu 2015-2020 berada paling tinggi pada titik-titik tertentu yang tersebar paling banyak di daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, disusul Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin.

Secara umum, kemampuan sekuestrasi karbon yang dihitung dari tutupan lahan di Sumatera Selatan masih menghasilkan total sekuestrasi yang tinggi, yakni 157.946.047,90 ton CO₂-eq dibandingkan total emisi yang dihasilkan yakni 43,766,390.40 ton CO₂-eq. Meski demikian, secara persebaran terdapat berbagai macam tingkat emisi dan sekuestrasi karbon yang ada pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang di antaranya bergantung pada sektor utama yang menopang PDRB. Emisi karbon maupun sekuestrasi karbon paling besar berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga kabupaten ini juga memiliki laju emisi (ton CO₂/ha.yr) yang rendah. Berbeda halnya dengan Kota Pagar Alam, meski total emisi dan total sekuestrasinya jauh lebih rendah dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun perhitungan laju emisinya paling besar di antara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan tabel profil emisi GRK ini, diperoleh gambaran bahwa setiap kabupaten/kota memiliki kapasitas sekuestrasi dan tingkatan emisi yang berbeda-beda. Perlu diantisipasi daerah-daerah dengan kemampuan sekuestrasi tinggi untuk mempertahankan kapasitasnya untuk melakukan sekuestrasi dengan aktivitas sektor PDRB yang rendah emisi dan tidak menurunkan kapasitas sekuestrasi, dan

memperhatikan daerah-daerah dengan emisi bersih yang tinggi karena total sekuestrasi karbon yang melampaui total emisi yang dihasilkan.

H. Polusi dan Kerusakan Lingkungan

Dengan banyaknya sumber daya alam yang ada di Sumatera Selatan, membuat begitu banyak jenis industri yang juga hadir dalam melakukan eksploitasi dan eksplorasi serta memanfaatkannya untuk dijadikan hasil produksi. Hal tersebut tentu saja memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan perekonomian Sumatera Selatan, namun hal tersebut juga dapat memberikan dampak negatif apabila kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungannya. Meningkatnya risiko pencemaran air akibat pembuangan limbah dan potensi pencemaran udara akibat polusi limbah industri ke udara dan bangkitan listrik tidak berkelanjutan.

Dalam pemanfaatan lahan hutan dan gambut juga, sangat berpotensi memberikan dampak buruk terhadap polusi dan kerusakan lingkungan. Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi yang menyumbangkan polusi asap terbesar akibat terjadinya kebakaran lahan dan hutan, selain pada polusi kebakaran ini sendiri juga akan berdampak pada kerusakan ekosistem yang ada di sekitarnya termasuk ke pada manusia. Hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan dalam menjadikan polusi dan kerusakan lingkungan ini sebagai isu strategis.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi beban emisi di Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan sebagai berikut:

- **Jumlah Kendaraan Bermotor**

Kendaraan bermotor diklasifikasikan pada empat kategori yaitu mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Pada tahun 2019, lebih dari satu juta kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan yang didominasi oleh kendaraan jenis sepeda motor (76%) dan mobil penumpang (20%). Kendaraan bermotor tersebut tersebar di 17 kabupaten/kota dengan populasi tertinggi di Kota Palembang dengan persentase masing-masing 57% untuk mobil pribadi, 49% untuk bus, 53% untuk truk dan 52% untuk sepeda motor.

- **Konsumsi Bahan Bakar**

Seperti yang dijelaskan di atas, konsumsi bahan bakar akan semakin tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan dan jarak perjalanan rata-rata untuk tiap jenis kendaraan. Berdasarkan data

nasional, konsumsi bahan bakar di sektor transportasi sebagian besar diperuntukkan bagi kendaraan sepeda motor (41%). Hal ini diakibatkan semakin tingginya populasi sepeda motor di Indonesia yang menyentuh angka 118 juta pada tahun 2018.

- **Kualitas Emisi Gas Buang**

Kualitas emisi menyatakan kandungan zat pencemar di dalam gas buang kendaraan tersebut. Kualitas gas buang yang baik adalah gas buang yang memiliki konsentrasi zat pencemar yang rendah dan memenuhi ambang batas yang ditetapkan. Dengan menerapkan standar emisi gas buang, pemerintah mewajibkan kendaraan yang beroperasi untuk memenuhi sejumlah kriteria. Hal ini akan mendorong para produsen kendaraan bermotor akan melengkapi sejumlah teknologi pada kendaraan yang diproduksi sehingga dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan tersebut.

Parameter yang digunakan meliputi zat karbon monoksida (CO), partikulat (konsentrasi dan jumlah), nitrogen oksida (NOX). Sementara untuk parameter sulfur oksida (SOX), kualitas gas buang ditentukan oleh kandungan sulfur didalam bahan bakar. Pada pengukuran emisi gas buang, konsentrasi zat pencemar ditampilkan dengan bermacam satuan seperti mg/Nm³, persen (%), part per million (ppm) atau mg/km.

I. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan

Isu paling strategis kesembilan (terakhir) yang disepakati adalah belum optimalnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan. Kondisi tersebut dapat tercermin pada saat musim kemarau panjang terlebih saat el nino terjadi di berbagai wilayah di Sumatera Selatan yang mengalami kekeringan dan masyarakat sulit untuk mendapatkan air bersih serta kebutuhan air untuk pertanian juga menjadi permasalahan yang dialami. Karena hal tersebut menyebabkan rendahnya capaian air minum dan sanitasi. Dilihat dari data lahan kritis Provinsi Sumatera Selatan, terutama di bagian hulu berada dalam kategori sangat kritis dan kritis, sehingga perlu diperbaiki tata kelola sumber daya air.

Pengelolaan sumber daya air antara lain diselenggarakan dengan berlandaskan pada wilayah sungai yang ditetapkan dan pola pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai. Pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sumatera Selatan diselenggarakan dengan berlandaskan pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 196/KPTS/M/2014 tentang Pola

Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau (WS MSBL).

Luas WS MSBL $\pm 86.680 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS). WS MSBL terdiri dari 4 (empat) sistem sungai utama, yaitu sistem Sungai Musi, sistem Sungai Banyuasin, sistem Sungai Sugihan, dan sistem Sungai Lemau. Keempat sistem sungai tersebut terhubung dengan beberapa anak sungai sehingga menjadi satu kesatuan Wilayah Sungai. Panjang sistem sungai keseluruhan $\pm 15.837 \text{ km}$.

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

3.1.1 Visi dan Misi

Perumusan Visi Provinsi Sumatera Selatan selaras dengan visi RPJMN 2025-2029. Visi Indonesia Emas 2045 menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 mencakup beberapa aspek penting dalam rangka mewujudkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Diharapkan Provinsi Sumatera Selatan yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumsel menjadi provinsi berdaya saing, tangguh, inovatif dan adil. Sumsel sebagai provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik. Untuk itu, visi Sumatera Selatan 2025-2029 adalah:

SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Sumsel memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di bagian Selatan Pulau Sumatera. Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berada di Kota Palembang, dengan jumlah penduduk sebanyak 9.064.690 jiwa pada tahun 2024. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di Utara, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung di Timur, Provinsi Lampung di Selatan dan Provinsi Bengkulu di Barat. Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat pusat Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi hingga akhir abad ke-14 dengan luas wilayah seluas 86.771,918 km² atau 4,6 persen dari total luas Indonesia.

Maju bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju kemajuan pembangunan suatu masyarakat atau daerah kabupaten/kota. Kemajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik dan nonfisik baik untuk lapisan masyarakat maupun daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpusat pada Ibukota Provinsi, melainkan diarahkan kepada pemerataan dan keadilan bagi kemajuan kabupaten dan kota dengan mengutamakan kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Terus bermakna kata berkesinambungan dan berkelanjutan serta tidak berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan melibatkan tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dimensi sosial, keberlanjutan berarti mampu menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya. Dimensi ekonomi mengacu pada kemampuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang layak, dan dimensi lingkungan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Semua mengandung arti keadaan atau kondisi seluruh/segenap/sekalian lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menikmati hasil dari kemajuan pembangunan, sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten maupun di kota untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan ketimpangan antar wilayah.

Implementasi Visi Sumatera Selatan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Partisipasi aktif masyarakat, koordinasi yang baik, serta pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan implementasi yang berhasil dan berkelanjutan. Dengan upaya yang terarah dan sinergi semua pihak, diharapkan visi ini dapat tercapai dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan secara menyeluruh. Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban

melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.

2. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Mewujudkan keterkaitan (*nexus*) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.
7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Misi 1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia mencakup pembangunan manusia di berbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya kesehatan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik dari sisi jasmani dan rohani, memiliki produktivitas yang tinggi, berpendidikan, dan profesional sehingga memiliki kompetensi yang baik dan mampu berdaya saing.

Sasaran:

- 1) Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM.
- 2) Meningkatkan Derajat Kesehatan.
- 3) Meningkatkan Pembangunan Sektor Kepemudaan.
- 4) Meningkatkan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak.

Misi 2. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tujuan 2. Meningkatnya daya saing dan ketahanan ekonomi daerah

Terciptanya kondisi ekonomi yang stabil dan berdaya saing sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan persaingan baik di tingkat regional dan nasional dengan mengembangkan ekonomi sektor unggulan daerah.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya Pengembangan Potensi Ekonomi Sektor Unggulan Daerah.
- 2) Meningkatnya Investasi dan Perdagangan Daerah.
- 3) Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.

Misi 3. Mewujudkan keterkaitan (*nexus*) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.

Tujuan 3. Terwujudnya keterkaitan ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air.

Keterkaitan antara ketahanan pangan, energi dan kedaulatan air saling mendukung untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ketahanan pangan diwujudkan melalui tersedianya kebutuhan pangan, dapat diakses dan terjangkau, dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Manajemen pengelolaan sumber daya air dilakukan untuk memastikan pasokan air bersih yang cukup.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya Ketahanan Pangan, Energi, dan Air.
- 2) Meningkatnya Pengembangan Hilirisasi Berbasis Sektor Unggulan (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan).

Tujuan 4. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan sehingga memastikan kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup di masa depan, utamanya penurunan emisi gas rumah kaca dan timbulan persampahan.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Misi 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Tujuan 5. Meningkatnya kualitas konektivitas daerah

Kualitas infrastruktur diperlukan untuk memperkuat hubungan antar wilayah, mempermudah mobilitas barang dan jasa serta meningkatkan aksesibilitas layanan. Aksesibilitas dan kualitas infrastruktur jalan yang baik memungkinkan distribusi barang jasa menjadi lebih efisien antar daerah, utamanya wilayah desa dan kecamatan. Dalam Era digitalisasi keberadaan layanan internet sangat penting sehingga akses internet di area *remote* perlu ditingkatkan.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang Berkualitas

Tujuan 6. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat

Peningkatan akses infrastruktur dasar masyarakat di wilayah terpencil sangat penting agar masyarakat dapat menikmati fasilitas dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Akses infrastruktur yang baik akan dapat mengurangi beban hidup masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi
- 2) Meningkatnya Akses Hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

Tujuan 7. Meningkatnya Pengelolaan Bencana

Pengelolaan bencana untuk meminimalkan dampak dan risiko bencana terhadap masyarakat, sehingga memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sistem pengelolaan bencana yang baik dilakukan dengan mitigasi bencana dan memperhatikan wilayah-wilayah yang rentan bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan lain lain.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana

Misi 5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan

Tujuan 8. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat

Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dilakukan dengan menciptakan lapangan kerja dengan kontribusi UMKM yang cukup sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang layak. Kesejahteraan sosial diupayakan dengan memperkuat sistem perlindungan sosial yang baik, utamanya bagi masyarakat yang rentan terhadap gejolak ekonomi.

Sasaran

- 1) Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha
- 2) Meningkatnya Upaya Perlindungan Sosial

Misi 6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan 9. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan (*government governance*) merupakan struktur dan proses tata kelola yang terdapat dalam instansi pemerintah. Peningkatan tata kelola pemerintahan diperlukan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang meliputi peningkatan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta peningkatan kapabilitas dan integritas aparatur pemerintah daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi
- 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Misi 7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Tujuan 10. Terwujudnya Stabilitas Sosial

Stabilitas sosial sangat penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan dan mencegah terjadi konflik yang dapat mengganggu kehidupan sosial ekonomi. Harmoni antar kelompok dengan meningkatkan toleransi antar kelompok sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila di tengah keragaman sosial, budaya dan agama diperlukan untuk menciptakan rasa saling menghargai sehingga dapat mengurangi potensi konflik.

Sasaran

- 1) Menguatnya Ketentraman di Masyarakat
- 2) Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan

Visi dan misi, kemudian secara detail dijabarkan dalam indikator tujuan, dan indikator sasaran seperti bentuk matriks sebagai berikut:

Tabel 3.1
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029
Visi : SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline	Target Capaian Indikator Sasaran Sampai Tahun 2030					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI I : Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.	1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1. Indeks Modal Manusia (IMM)			Indeks	0,52 (2023)	0,54	0,5475	0,555	0,5625	0,57	0,58
		2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	73,84	74,40	74,95	75,49	76,04	76,58	77,13
		3. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga			Indeks	n/a	69,16 - 69,17	69,41 - 69,42	69,66 - 69,67	69,9 - 69,92	70,15 - 70,17	70,39 - 70,42
			1.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM	1. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	Tahun	8,57	9,19 - 9,20	9,27 - 9,29	9,36 - 9,38	9,45 - 9,47	9,56 - 9,57	9,65 - 9,66
				2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,64	12,80-12,81	12,89-12,90	12,97-13,00	13,07-13,10	13,5 - 13,51	13,6 - 13,7
				3. Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :								
				Literasi membaca	%	5,88	5,88 - 11,76	8,82 - 13,23	11,76 - 14,70	14,71 - 16,17	17,65 - 17,65	19,12 - 20,59
				Numerasi	%	-	0,00 - 5,88	1,47 - 7,35	2,94 - 8,82	4,41 - 10,29	5,88 - 11,76	7,35 - 13,23
				4. Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :								
				Literasi membaca	%	36,67	65,01	93,34	100,00	100,00	100,00	100,00
				Numerasi	%	33,81	40,12	54,11	68,10	82,09	96,08	100,00
				5. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Satu Tahun Setelah kelulusan	%	80,89	82,54	82,59	82,59	84,29	85,98	87,68
				6. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	72,24	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	75,50

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline	Target Capaian Indikator Sasaran Sampai Tahun 2030					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,26	74,48	74,71	74,94	75,17	75,40	75,63
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	15,80	14,80	13,80	12,90	12,10	11,30	10,60
			1.3 Meningkatnya Pembangunan Sektor Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	54,00	55,45	56,89	58,34	59,78	61,63	62,67
			1.4 Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,479	0,465	0,453	0,441	0,428	0,416	0,403
				Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,87	93,93 – 93,99	93,99 – 94,10	94,07 – 94,18	94,13 – 94,21	94,19 – 94,29	94,25 – 94,38
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	61,90	64,00	66,00	68,00	70,00	72,00	74,00
MISI II : Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	2 Meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi daerah	1. Pertumbuhan Ekonomi			%	5,03	5,3 - 5,5	5,8 - 6,3	5,9 - 6,4	6,0 - 6,5	7,4 - 8,1	7,4 - 8,1
		2. PDRB per Kapita			Rp (Juta)	75,13	79,90	94,00	104,00	120,00	127,10	127,10
		3. Kontribusi PDRB Provinsi			%	3,02	3,06	3,09	3,11	3,14	3,30	3,30
		4. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional			%	n/a	1,41	1,42	1,43	1,44	1,45	1,46
		5. Indeks Entropy Theil			Indeks	1,339 (2023)	1,32	1,28	1,24	1,20	1,17	1,12
		6. Indeks Daya Saing Daerah			Indeks	3,46	3,48	3,50	3,52	3,55	3,60	3,65
			2.1 Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,59	2,70	2,82	2,95	3,09	3,24	3,40

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline	Target Capaian Indikator Sasaran Sampai Tahun 2030					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian	%	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman	%	2,01	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50
			2.2 Meningkatnya investasi dan perdagangan daerah	1. Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB)	%	31,01	30,5	31,16	31,23	31,31	31,98	31,98
				2. Persentase Pertumbuhan Investasi	%	49,37	7,50	7,50	7,70	7,80	8,00	8,20
				3. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	13,85	13,92	13,99	14,06	14,13	14,20	14,27
				4. Ekspor Barang dan Jasa (PDRB %)	%	16,84	21,26	21,58	21,89	22,21	22,52	22,84
				5. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	5,8	7,13	7,00	6,88	6,76	6,64	6,52
				6. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	0,48	0,53	0,58	0,64	0,70	0,77	0,85
			2.3 Terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah	1. Tingkat Inflasi	%	1,2	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,3 - 3,2	1,3 - 3,2
				2. Inklusi Keuangan	%	75,02	94,46	94,93	95,4	95,87	96,35	96,82
				3. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,65	3,72	3,75	3,79	3,82	3,85	3,87
MISI III : Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim	3	Terwujudnya keterkaitan ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air	1. Indeks Ekonomi Hijau Daerah		Indeks	n/a	62,22	62,63	63,05	63,46	63,89	64,28
			2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEL)		Indeks	n/a	20,19	21,99	23,79	25,59	27,39	29,19
			3.1 Meningkatnya ketahanan pangan, energi, dan air	1. Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,07	77,52	79,79	82,08	84,38	86,69	89,01
				2. Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	23,15	23,10	23,70	24,30	24,70	25,10	25,70

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline	Target Capaian Indikator Sasaran Sampai Tahun 2030					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				3. Rasio Elektrifikasi	%	99,9	100	100	100	100	100	100
				4. Persentase Desa Berlistrik	%	99,26	100	100	100	100	100	100
				5. Kapasitas air baku	m³/detik	2,2	2,24	2,46	2,69	2,91	3,14	3,36
				6. Indeks Ketahanan Air Provinsi	Indeks	n/a	3,57	3,65	3,74	3,82	3,90	3,98
			3.2 Meningkatnya pengembangan hilirisasi berbasis Sektor Unggulan (pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan)	1. Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	18,27	18,90	19,53	20,03	20,53	21,11	21,67
				2. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	4,39	5,15	5,16	5,17	5,18	5,19	5,20
				3. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	%	n/a	2,34	2,39	2,44	2,49	2,54	2,59
	4 Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Indeks	72,69	68,19	68,44	68,70	68,95	69,20	69,46
		2 Penurunan Intensitas Emisi GRK			%	68,10	69,97	65,48-68,68	76,42	79,69	80,74	83,55
		3 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman hayati			Indeks	n/a	0,465	0,469	0,473	0,477	0,482	0,486
			4.1 Meningkatnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca	Persentas Penurunan Emisi GRK Kumulatif	%	n/a	18,50	19,41	20,52	21,77	22,87	24,12
				Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	%	20,20	31,02	34,50	39,97	45,01	44,59	49,84
MISI IV : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/ Kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan	5 Meningkatnya kualitas konektivitas Daerah	1 Rasio Konektivitas			Rasio	0,630	0,634	0,660	0,685	0,710	0,735	0,760
			5.1 Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang berkualitas	Waktu Tempuh Jalan Provinsi	Jam/ 100 km	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
				V/C Rasio Jalan	Rasio	0,392	0,390	0,388	0,385	0,383	0,382	0,381
				Rata-rata load factor penumpang angkutan umum	%	70,00	71,00	71,50	72,00	72,50	73,00	73,50

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline	Target Capaian Indikator Sasaran Sampai Tahun 2030					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	6 Meningkatnya Kualitas infrastruktur dasar masyarakat	1 Persentase Bangunan Gedung, Hunian dan Permukiman dengan akses layak, terjangkau dan berkelanjutan	6.1 Meningkatnya akses air minum dan sanitasi	Akses Air Minum Layak	%	38,25	40,95	43,14	45,62	48,09	50,57	53,04
				Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak	%	87,23	89,35	90,35	92,76	95,18	97,59	100
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	77,34	80,54	82,43	84,32	86,22	88,11	90,00
			6.2 Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	23,93	34,00	38,00	40,50	43,00	43,10	43,20
	7 Meningkatnya Pengelolaan Bencana	1 Indeks Resiko Bencana (IRBI)			Indeks	40,04	65,01	68,60	69,60	70,60	71,60	72,60
					Indeks	131,05	130,41	129,78	129,14	128,51	127,88	127,24
			7.1 Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44
MISI V : Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan	8 Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1. Tingkat Kemiskinan			%	10,51	9,37 - 10,37	9,07 - 10,07	7,90 - 8,90	7,00 - 7,85	6,05 - 7,05	5,95 - 6,95
		2. Rasio Gini			Indeks	0,331	0,316 - 0,320	0,312 - 0,316	0,305 - 0,309	0,300 - 0,304	0,294 - 0,298	0,294 - 0,298
		8.1 Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,86	3,82 - 3,93	3,75-3,90	3,70-3,85	3,70-3,80	3,29 - 3,67	3,16 - 3,61
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,82	70,83	70,84	70,85	70,86	70,87	70,88
				Rasio Kewirausahaan	%	2,51	2,57	2,6	2,65	2,7	2,83	2,83
				Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	%	0,40	0,41	0,42	0,42	0,43	0,44	0,44
		8.2 Meningkatnya Upaya Perlindungan Sosial		Persentase Kemiskinan Ekstrem	%	0,59	0,34	0,20	0,11	0,07	0,04	0,02
				Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,12	57,22	57,32	57,52	57,72	57,92	58,12

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline	Target Capaian Indikator Sasaran Sampai Tahun 2030					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI VI : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas	9 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	1. Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	BB (74,73)	BB (75-76)	BB (76-77)	BB (77-78)	BB (78-79)	BB (79-80)	BB (80-81)
			9.1 Meningkatkan kualitas dan kapabilitas birokrasi	Nilai SAKIP	Nilai	BB (77,53)	BB (78,00)	BB (78,75)	BB (79,33)	BB (79,87)	A (80,07)	A (80,38)
				Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Manajemen Risiko Indeks	Indeks	2,866	2,923	2,982	3,041	3,102	3,164	3,228
				Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	1,89 (Sedang)	1,95 (Sedang)	2,02 (Sedang)	2,09 (Sedang)	2,15 (Sedang)	2,21 (Sedang)	2,28 (sedang)
				Indeks Integritas Daerah	Indeks	60,63	72,66	75,13	77,6	80,07	82,54	85
			9.2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	A (4,60) Pelayanan Prima	A (4,60)	A (4,65)	A (4,70)	A (4,75)	A (4,80)	A (4,85)
				Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5,88	5,9	6,08	6,26	6,44	6,8	6,82
MISI VII : Mewujudkan Kehidupan Beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal	10 Terwujudnya stabilitas sosial	1. Indeks Harmoni Indonesia (Sumatera Selatan)			Indeks	n/a	6,50	6,60	6,70	6,80	6,90	7,00
			10.1 Menguatnya Ketentraman di Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	76,82	78,01	78,15	78,35	78,35	78,85	79,1
				Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	%	70,82 (2020)	70,82	71,69	72,56	73,43	74,3	75,16
			10.2 Meningkatkan pembangunan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	57,51	58,71	59,81	59,91	60,01	60,89	61,10

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan integratif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang integratif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, strategi dan arah kebijakan daerah memiliki peran yang sangat penting. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sumatera Selatan tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sumatera Selatan tahun 2025-2029, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan misi yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI	STRATEGI RPJMD 2025-2029					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Isu 3 : Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal Isu 1 : Kemiskinan dan <i>stunting</i> masih tinggi	Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing	1. Meningkatkan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Kuratif, Preventif dan Promotif	1. Melanjutkan Program Berkas Plus (berobat dengan KTP + rumah singgah)	√	√	√	√	√	√
			2. Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.	2. Mengembangkan program Sumbang Rawat (layanan kesehatan langsung ke rumah warga miskin)	√	√	√	√	√	√
				3. Meningkatkan kualitas kesehatan perempuan dan anak	√	√	√	√	√	√
			3. Meningkatkan akses, partisipasi, dan motivasi masyarakat atau peserta didik dalam menempuh pendidikan	1. Meningkatkan kualitas serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan	√	√	√	√	√	√
				2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	√	√	√	√	√	√
			4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, kurikulum, dan sarana-prasarana pendidikan	1. Meningkatkan Program Sekolah Gratis yang Berkeadilan	√	√	√	√	√	√
				2. Penguatan Pendidikan Karakter dan Keterampilan Hidup	√	√	√	√	√	√
				1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik	√	√	√	√	√	√
				2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Fasilitas Pendidikan	√	√	√	√	√	√
				3. Mengembangkan Kurikulum Berbasis Lokal sesuai potensi daerah	√	√	√	√	√	√
				4. Meningkatkan Tata Kelola dan Sistem Informasi Pendidikan	√	√	√	√	√	√
				5. Meningkatkan kerja sama daerah, perguruan tinggi dan para pemangku kepentingan lainnya dalam riset dan inovasi	√	√	√	√	√	√
			5. Meningkatkan layanan perpustakaan sesuai standar perpustakaan nasional	1. Meningkatkan Tingkat Kegemaran Membaca	√	√	√	√	√	√
			6. Meningkatkan kualitas kompetensi pemuda	2. Mendorong lembaga-lembaga pertanian untuk	√	√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI	STRATEGI RPJMD 2025-2029					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				melahirkan agripreneur untuk kemajuan daerah.						
2.	Isu 2 : Produktivitas Pertanian dan Hilirasi Komoditi Unggulan Belum Optimal Isu 6 : Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal Isu 7 : Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah	Misi 2 : Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.	1. Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Petani	1. Meningkatkan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	√	√	√	√	√	√
				2. Meningkatkan Akses Permodalan dan Sarana Pertanian	√	√	√	√	√	√
			2. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	√	√	√	√	√	√
				2. Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	√	√	√	√	√	√
			3. Peningkatan Penerimaan dan Pendapatan Daerah dari Sektor ESDM	1. Meningkatkan Produksi Minerba	√	√	√	√	√	√
				2. Optimalisasi Tata Kelola mineral dan batubara	√	√	√	√	√	√
			4. Peningkatan Kemudahan Berinvestasi	1. Meningkatkan Pelayanan Perizinan yang Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)	√	√	√	√	√	√
				2. Meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	√	√	√	√	√	√
			5. Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	1. Meningkatkan Sistem Informasi Penanaman Modal	√	√	√	√	√	√
				2. Meningkatkan Penguatan Strategi Promosi	√	√	√	√	√	√
			6. Peningkatan Ekspor ke Luar Negeri	1. Meningkatkan Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Usaha Ekspor	√	√	√	√	√	√
				2. Diversifikasi dan Peningkatan Kualitas Produk Ekspor	√	√	√	√	√	√
				3. Meningkatkan Akses Pasar Ekspor	√	√	√	√	√	√
			7. Peningkatan Perdagangan Antar Wilayah	1. Meningkatkan kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang	√	√	√	√	√	√
				2. Meningkatkan kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	√	√	√	√	√	√
				3. Meningkatkan tertib niaga dan mutu produk	√	√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI	STRATEGI RPJMD 2025-2029					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			8. Upaya Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	1. Meningkatkan Penguatan Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan Harga	√	√	√	√	√	√
				2. Meningkatkan Penguatan Sistem Distribusi dan Logistik	√	√	√	√	√	√
				3. Meningkatkan Kapasitas dan Ketahanan Pasokan Barang Strategis	√	√	√	√	√	√
			9. Peningkatan Efektivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	1. Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Program dan Kebijakan Pengendalian Inflasi	√	√	√	√	√	√
				2. Meningkatkan Kapasitas TPID dalam Analisis dan Perumusan Kebijakan	√	√	√	√	√	√
			10. Optimalisasi upaya Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan	1. Meningkatkan Penguatan Peran Perbankan dan Lembaga Keuangan	√	√	√	√	√	√
				2. Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan	√	√	√	√	√	√
				3. Meningkatkan Pengembangan Inovasi dan Digitalisasi Keuangan	√	√	√	√	√	√
				4. Meningkatkan Penguatan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan	√	√	√	√	√	√
			3.	Isu 2 : Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan Belum Optimal Isu 8 : Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan	Misi 3 : Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim	1. Peningkatan Ketersediaan Pangan	1. Meningkatkan Ketersediaan Stok Pangan	√	√	√
2. Meningkatkan Efisiensi Distribusi dan Rantai Pasok Pangan	√	√					√	√	√	√
2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan	1. Meningkatkan Pengendalian Harga Komoditas Pangan	√				√	√	√	√	√
	2. Meningkatkan Upaya Pengurangan Disparitas Harga Antarwilayah	√				√	√	√	√	√
3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan	1. Meningkatkan Kecukupan Konsumsi Pangan	√				√	√	√	√	√
	2. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pangan Bergizi dan Berkualitas	√				√	√	√	√	√
4. Peningkatan Ketersediaan Energi	1. Meningkatkan Upaya Efisiensi Energi	√				√	√	√	√	√
	2. Meningkatkan Upaya Peningkatan Konservasi Energi	√				√	√	√	√	√
	3. Pengurangan Ketergantungan terhadap Energi Fosil	√				√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI	STRATEGI RPJMD 2025-2029					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5. Peningkatan Aksesibilitas Energi	1. Meningkatkan Upaya Peningkatan Cakupan Jaringan Distribusi Energi	√	√	√	√	√	√
				2. Meningkatkan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Daerah Terpencil	√	√	√	√	√	√
			6. Peningkatan Keterjangkauan Energi	1. Meningkatkan Upaya Penurunan Harga Energi	√	√	√	√	√	√
				2. Meningkatkan Subsidi dan Insentif energi untuk Kelompok Rentan	√	√	√	√	√	√
			7. Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air	1. Meningkatkan Upaya Rehabilitasi Lahan Kritis	√	√	√	√	√	√
				2. Meningkatkan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Berkelanjutan	√	√	√	√	√	√
				3. Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Konservasi Tanah dan Air	√	√	√	√	√	√
			8. Peningkatan Pendayagunaan Air	1. Meningkatkan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	√	√	√	√	√	√
				2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Sistem Pengelolaan Irigasi	√	√	√	√	√	√
				3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Irigasi	√	√	√	√	√	√
			9. Peningkatan Kemitraan dalam Hilirisasi	1. Meningkatkan Promosi Terkait Potensi Hilirisasi	√	√	√	√	√	√
				2. Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi Mitra Industri	√	√	√	√	√	√
			10. Peningkatan Fasilitas Pendukung Industri Hilir	1. Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung Pengembangan Fasilitas Pendukung Hilirisasi	√	√	√	√	√	√
				2. Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Hilirisasi	√	√	√	√	√	√
			11. Peningkatan Daya Saing Produk Hilir	1. Meningkatkan Penguatan Kapasitas Produksi dan Kualitas Produk	√	√	√	√	√	√
				2. Meningkatkan Penguatan Riset dan Inovasi Produk	√	√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI	STRATEGI RPJMD 2025-2029					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			12. Peningkatan Akses Pasar Produk Hilir	1. Meningkatkan Penguatan Promosi dan Branding Produk	√	√	√	√	√	√
				2. Meningkatkan Pengembangan Jaringan Distribusi Produk	√	√	√	√	√	√
			13. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air untuk mewujudkan kedaulatan air di Sumatera Selatan	1. Meningkatkan tata kelola aspek konservasi Sumber Daya Air terutama menurunkan luasan lahan kritis dan menurunkan laju deforestasi pada kawasan Hulu (OKU Selatan, Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Muara Enim)	√	√	√	√	√	√
				2. Meningkatkan tata kelola aspek pendayagunaan Sumber Daya Air terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mendukung kebutuhan rumah tangga, ketahanan pangan, dan industri di 17 Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√
				3. Meningkatkan tata kelola aspek pengendalian daya rusak air terutama pada pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan banjir dan longsor di 17 Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√
				4. Meningkatkan tata kelola pemberdayaan masyarakat dan lembaga dalam pengelolaan sumber daya air di 17 Kabupaten/kota	√	√	√	√	√	√
				5. Meningkatkan tata kelola sistem informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi untuk mendukung pengelolaan sumber daya air di 17 Kabupaten/kota	√	√	√	√	√	√
			14. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menurunkan emisi Gas Rumah kaca untuk mendukung	1. Meningkatkan kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut pada kawasan Hulu dan pesisir (OKU Selatan, Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Muara	√	√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI	STRATEGI RPJMD 2025-2029					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pembanguna yang berkelanjutan	Enim, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Ogan Ilir dan Musi Banyuasin).						
				2. Meningkatkan kualitas air dan udara melalui penerapan baku mutu pencemaran air dan udara berdasarkan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat, penegakkan hukum lingkungan dan pengawasan dalam penerapan baku mutu pencemaran air dan udara di 17 kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√
				3. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip keadilan ekologis, dan keadilan bagi generasi mendatang di 17 kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√
				4. Meningkatkan partisipasi masyarakat, kerjasama antar lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah yang kuat dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang sehat di 17 kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√
4.	Isu 4 : Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimal Isu 5 : Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan Banjir, dan Tanah	Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan	1. Meningkatkan Infrastruktur Konektivitas yang terintegrasi antar kawasan untuk mendukung pergerakan orang dan barang dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan	1. Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan kewenangan Provinsi di 16 Kabupaten/Kota kecuali Kota Prabumulih	√	√	√	√	√	√
				2. Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur simpul transportasi darat (Terminal tipe B di Lubuklinggau, Palembang, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, OKU Timur dan OKU Selatan)	√	√	√	√	√	√
				3. Mewujudkan pembangunan pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin	√	√	√	√	√	√
				4. Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur integrasi	√	√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI	STRATEGI RPJMD 2025-2029					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Longsor Belum Optimal			multi moda angkutan umum (Metropolitan Patungraya Agung)						
				5. Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur keselamatan transportasi darat dan sungai	√	√	√	√	√	√
				6. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.	√	√	√	√	√	√
				7. Mendorong beroperasionalnya jalan khusus angkutan batubara	√	√	√			
			2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas, merata, dan berwawasan lingkungan untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat.	1. Mendorong kerjasama antar daerah dalam rangka penyediaan air minum skala regional (Metropolitan Patungraya Agung)	√	√	√	√	√	√
				2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan Akses Air Minum di 17 Kabupaten/kota	√	√	√	√	√	√
				3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan Akses Pengelolaan Air Limbah di 17 Kabupaten/kota	√	√	√	√	√	√
				4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Persampahan di 17 Kabupaten/kota	√	√	√	√	√	√
				5. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pembangunan dan penataan bangunan, serta lingkungan di Kawasan strategis Daerah Provinsi dan kawasan prioritas di 17 Kabupaten/Kota		√	√	√	√	√
				6. Memberikan hunian yang layak bagi masyarakat antara lain dengan melanjutkan program bedah rumah guna memberikan hunian yang layak	√	√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI	STRATEGI RPJMD 2025-2029					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3. Meningkatkan kualitas tata kelola bencana dan ketahanan daerah	bagi masyarakat kurang mampu, mendukung program penyediaan 3 juta rumah di 17 Kabupaten/kota						
				7. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur pedesaan di 14 Kabupaten/kota	√	√	√	√	√	√
				1. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana di 17 Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√
				2. Meningkatkan penyediaan Sarana dan Prasarana Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana di 17 Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√
				3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, serta meningkatkan desa tangguh bencana di 17 Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√
5.	Isu 1 : Kemiskinan dan Stunting yang masih tinggi	Misi 5 : Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan	1. Memperluas Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja	1. Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pelatihan, permodalan, dan kemudahan berusaha	√	√	√			
				2. Meningkatkan kualitas keterampilan masyarakat melalui pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja	√	√	√			
				3. Meningkatkan kerja sama pemerintah dan pelaku bisnis untuk melahirkan pemula usaha serta peningkatan iklim investasi dengan kemudahan birokrasi	√	√	√			
				4. Meningkatkan pengembangan infrastruktur pendukung usaha seperti transportasi, listrik, dan internet	√	√	√	√	√	√
				5. Meningkatkan kemampuan pemasaran dan branding pelaku usaha, khususnya UMKM, agar produk dan layanan mereka lebih kompetitif dan dikenal luas	√	√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI	STRATEGI RPJMD 2025-2029					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2. Memperkuat Perlindungan Sosial yang Terintegrasi dan Berkesinambungan	6. Mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing usaha.		√	√	√		
				1. Mengembangkan Sistem Informasi Terpadu serta mengoptimalkan DT SEN sebagai basis data penyaluran bantuan		√	√	√		
				2. Meningkatkan Kapasitas Institusional melalui pelatihan SDM pelayanan sosial	√	√	√			
				3. Meningkatkan dan memperluas akses layanan sosial bagi semua kelompok rentan (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	√	√	√	√	√	√
				4. Memperkuat peran komunitas (masyarakat) dalam perlindungan sosial		√	√	√	√	√
				5. Mendorong kebijakan untuk peningkatan upah minimum regional yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah	√	√	√	√	√	√
			3. Meningkatkan Intervensi Terpadu untuk Penanganan Kemiskinan dan Stunting	1. Meningkatkan kualitas program pengurangan beban penduduk miskin	√	√	√	√	√	√
				2. Mengembangkan dan meningkatkan efektivitas dan integrasi program untuk pemberdayaan penduduk miskin	√	√	√	√	√	√
				3. Mendorong percepatan pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar	√	√	√	√	√	√
				4. Meningkatkan Koordinasi Multisektoral melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi.	√	√	√	√	√	√
				5. Meningkatkan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting	√	√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI	STRATEGI RPJMD 2025-2029					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6. Meningkatkan implementasi intervensi gizi spesifik dan sensitif	√	√	√	√	√	√
6.	Isu 9 : Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial	Misi 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas	1. Penerapan Sistem Pemerintahan Digital Terintegrasi untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan transformasi digital, pengembangan jaringan, keamanan <i>cyber</i> dan pengembangan sumber daya manusia digital	√	√	√	√		
				2. Melakukan percepatan reforma agraria tingkat daerah		√	√	√	√	
				3. Memperluas pemahaman masyarakat terhadap demokrasi melalui literasi	√	√	√	√		
				4. Mendorong percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (SPBE)		√	√	√	√	
			2. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Teknologi Informasi dan Partisipasi Publik Digital	1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan publik	√	√	√	√		
				2. Melakukan peningkatan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan atau kelompok rentan yang mengalami permasalahan hukum		√	√	√	√	
				3. Memperluas peningkatan reformasi birokrasi dalam rangka tata kelola pemerintahan yang lebih baik	√	√	√	√		
				4. Mendorong dan menjamin keterbukaan informasi publik terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat serta memperkuat peran pers dan masyarakat sipil		√	√	√	√	
			3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis transformasi digital yang didukung oleh kualitas data dan informasi	1. Meningkatkan percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terutama untuk pelayanan publik dan pelayanan administrasi pemerintahan di 17 Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√
				2. Meningkatkan transformasi digital melalui pengembangan jaringan, keamanan <i>cyber</i> dan pengembangan	√	√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI	STRATEGI RPJMD 2025-2029					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				sumber daya manusia digital di 17 Kabupaten/Kota						
				3. Meningkatkan kualitas pengelolaan satu data melalui pengelolaan data berbasis spasial dan non spasial untuk mendukung pembangunan di 17 Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√
7.	Isu 9 : Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial	Misi 7 : Mewujudkan kehidupan beragama, seni, dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal	1. Penguatan Identitas Budaya dan Moderasi Keagamaan	1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait fungsi Rumah Tahfiz sebagai basis pendidikan agama bagi anak-anak	√	√	√	√	√	
				2. Melakukan pengembangan toleransi kehidupan beragama		√	√	√	√	
				3. Mendorong Pembangunan Sarana dan Prasarana Budaya dan Agama dalam penguatan moderasi beragama dan pengembangan seni budaya lokal		√	√	√	√	√
			2. Revitalisasi Seni dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal	1. Meningkatkan pemahaman nilai-nilai kebangsaan melalui program penguatan Pancasila, nilai-nilai simbur cahaya, dan kearifan lokal	√	√	√	√	√	√
				2. Melakukan revitalisasi seni budaya melalui aksara ulu sebagai identitas budaya Sumatera Selatan		√	√	√	√	
				3. Mendorong pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Sumsel (ISBI Sumsel)		√	√	√	√	

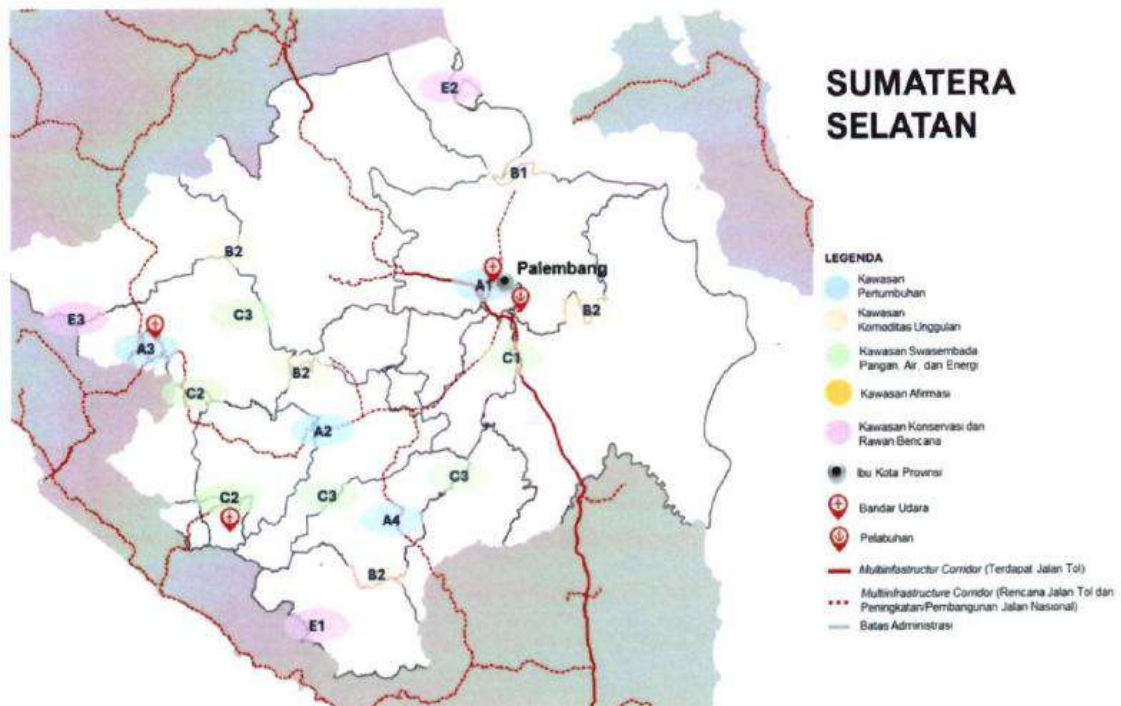
3.2.2 Arah Kebijakan Kewilayahan

3.2.2.1 Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Pengembangan wilayah merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang sejalan dengan visi-misi serta program prioritas daerah guna mencapai target pembangunan daerah. Pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan mempertimbangkan berbagai faktor penting. Oleh karena itu, penyusunan Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 mengacu pada berbagai pedoman perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, proyek strategis nasional yang berlangsung di Sumatera Selatan, serta dokumen perencanaan pembangunan nasional, yaitu RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Selain itu, sinkronisasi dalam perencanaan dan keselarasan antara perencanaan serta penganggaran menjadi aspek penting untuk memastikan keberhasilan prioritas pembangunan daerah

Prioritas pembangunan dituangkan dalam strategi pembangunan kewilayahan dengan konsep tematik, holistik, integratif dan spasial. Strategi kewilayahan Provinsi Sumatera Selatan mencakup strategi pembangunan per kawasan baik perdesaan-perkotaan disertai dengan rencana intervensi pembangunan di tiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Berlandaskan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk pengembangan Pulau Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai **Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan**. Peran Provinsi Sumatera Selatan dalam pencapaian jangka menengah wilayah untuk mengurangi kesenjangan dilaksanakan melalui perspektif pembangunan kewilayahan yaitu penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah yang terdiri dari tata ruang, pertanahan, informasi geospasial, layanan dasar, infrastruktur dasar, otonomi dan keuangan daerah.



Gambar 3. 1 Peta Kawasan di Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

A. Kawasan Pertumbuhan

1. Wilayah Metropolitan Palembang dan Kawasan Pengembangan Industri Palembang-Banyuasin
2. Kawasan Perkotaan Muara Enim dan Kawasan Pengembangan Industri Tanjung Enim
3. Kawasan Perkotaan Lubuk Linggau
4. Kawasan Perkotaan Baturaja

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Ekonomi Biru

1. Banyuasin

Sawit, Karet, Kelapa, Kopi

2. Cekungan Musi (Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Empat Lawang, Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir).

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi

Swasembada Pangan

1. Ogan-Komering-Banyuasin (Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur)
2. Musi Hulu (Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Empat Lawang, Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir)

D. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

1. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
2. Taman Nasional Sembilang
3. Taman Nasional Kerinci-Seblat

Sasaran pembangunan yang menjadi arahan nasional telah tercantum dalam Arah Pembangunan Wilayah RPJMN Tahun 2025-2029 untuk Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung target nasional. Adapun sandingan keselarasan antara sasaran pembangunan dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 3 Sandingan Sasaran Pembangunan antara RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Pembangunan	RPJMN		RPJMD	
		2025	2029	2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	7,1 (Rata-rata 2025-2029)			
		5,3*	8,1	5,30-5,50	7,4 - 8,1
2	PDRB per Kapita (Rp juta)	79,9*	127,1	79,9	127,1
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,0*	3,3	3,06	3,3
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,37 - 10,37	6,05 - 7,05	9,37 - 10,37	6,05 - 7,05
5	Rasio Gini	0,316-0,320	0,294-0,298	0,316-0,320	0,294-0,298
6	Indeks Modal Manusia	0,54	0,57	0,54	0,57
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	69,97	80,74	69,97	80,74
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	68,19	69,20	68,19	69,20
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,82 - 3,93	3,29 - 3,67	3,82-3,93	3,29 - 3,67

Keterangan : *Target yang telah dimutakhirkan berdasarkan Buku Saku Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 Provinsi Sumatera Selatan

3.2.2.2 Proyek Strategis Nasional

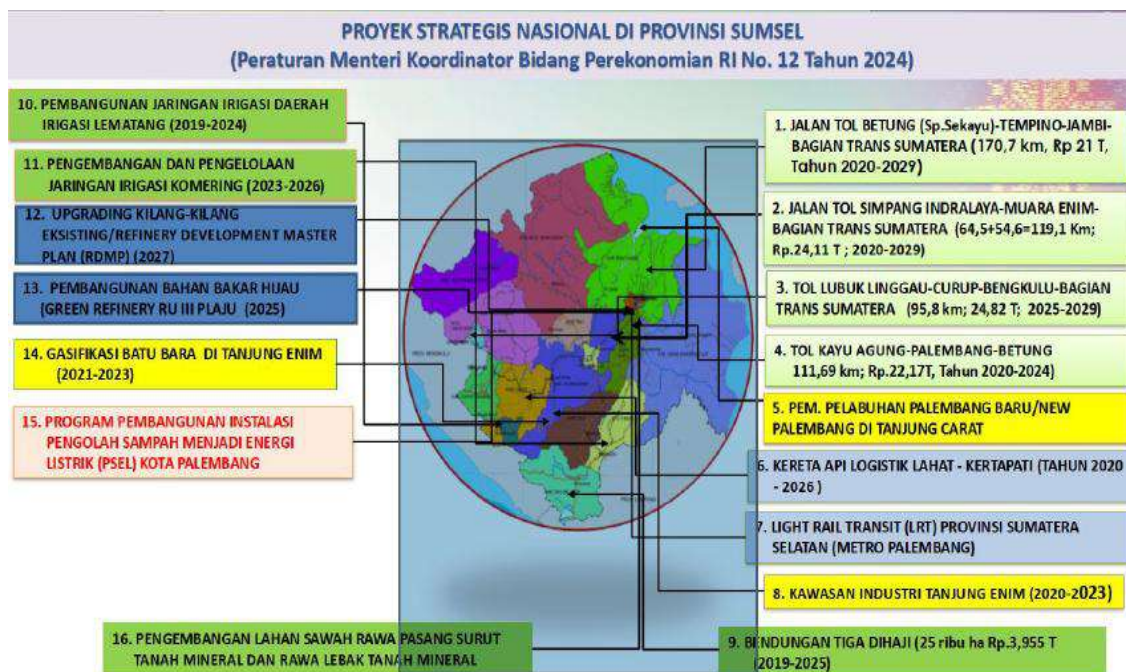
Perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian Proyek-Proyek Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan nasional. Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mendorong pemerataan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan beberapa Proyek Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3. 4 Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025-2029

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana
	<i>Makan Bergizi Gratis</i>		
1	Program Makan Bergizi Gratis	17 Kabupaten/Kota	• Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator) • Pemerintah Kab/Kota
	<i>Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</i>		
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	17 Kabupaten/Kota	• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator) • Pemerintah Kab/Kota
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	17 Kabupaten/Kota	• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator) • Pemerintah Kab/Kota
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	17 Kabupaten/Kota	• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (koordinator) • Pemerintah Kab/Kota
5	Program Penuntasan TBC	17 Kabupaten/Kota	• Kementerian Kesehatan (koordinator) • Pemerintah Kab/Kota
	<i>Swasembada Pangan</i>		
6	Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan <i>Food Estate</i>	Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Musi Rawas dan Kab. Muara Enim	• Kementerian Pertanian, Swasta (koordinator) • Pemerintah Kab/Kota

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana
7	Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan	13 Kabupaten dan 1 Kota Pagar Alam	• Kementerian Pekerjaan Umum • Pemerintah Kab/Kota
8	Biorefinery Sumatera	PT. Pertamina	• PT. Pertamina (koordinator) • Pemerintah Kab/Kota
9	Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan	Kota Palembang	• PT. Pertamina/PGN • Pemerintah Kota Palembang
	<i>Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital</i>		
10	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut	Kabupaten/Kota Sumatera Selatan	• Swasta • Pemerintah Kab/Kota
11	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu	17 Kabupaten/Kota	• Kemen PAN RB (koordinator) • Pemerintah Kab/Kota
12	Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia	17 Kabupaten/Kota	• Badan Informasi Geospasial • Pemerintah Kab/Kota
13	Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas	Kabupaten/Kota	BUMN (Penugasan)
14	Pembangunan 3 Juta Rumah	17 Kabupaten/Kota	• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator) • Pemerintah Kab/Kota
15	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	Kota Palembang	• Pemerintah Kota Palembang • Swasta



Gambar 3. 2 Peta Proyek Strategis di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI No.12 Tahun 2024

Sumber: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 12 Tahun 2024, terdapat 16 Proyek Strategis di Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas Sektor Jalan dan Jembatan berupa Proyek Jalan Tol, Sektor Pelabuhan berupa Pembangunan Pelabuhan, Sektor Kereta berupa Kereta Api Logistik dan *Light Rail Transit* (LRT), Sektor Kawasan berupa Kawasan Industri (KI), Sektor Bendungan dan Irigasi berupa Pembangunan Jaringan Irigasi, dan Sektor Energi berupa *Upgrading* kilang-kilang eksisting, *Green Refinery* (Bahan Bakar Hijau) dan Gasifikasi Batu Bara, serta sektor pertanian berupa pengembangan lahan sawah. Selain itu pada sektor kesehatan pengembangan Rumah Sakit Daerah dikonsentrasikan pada pengembangan kawasan RSUD Siti Fatimah di Kota Palembang, serta sebagai upaya peningkatan layanan kesehatan yang potensial berada di Kabupaten Musi Rawas.

Tabel 3. 5 Progres Proyek Strategis di Provinsi Sumatera Selatan

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
1	Jalan Tol Betung (SP. Sekayu)-Tempino-Jambi-Bagian Trans	Betung Kab.Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin,	Seksi Betung-Tungkal Jaya (62,38km) progres 16,97%, Seksi Tungkal Jaya-Bayung Lencir (56,76 km) progres 0,28%, Seksi Bayung

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
	Sumatra (170,7 Km, Rp. 21 T, Tahun 2020-2029)	Tempino dan Jambi	Lencir-Tempino (34km) 100% telah diresmikan pada 16 Oktober 2024, Seksi Tempino-Jambi(18km) progres 40,26%
2	Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim-Bagian Trans Sumatra (64,5+54,6=119,1 Km; Rp.24,11 T; 2020-2029)	Indralaya Kab.Ogan Ilir, Kota Prabumulih, Kab. Muara Enim	- Seksi Indralaya-Prabumulih (63,5 Km) Progres 100%, Operasional 31 Juli 2023, - Seksi Prabumulih-Muara Enim (56,85 Km) Progres Fisik 8,69% (Ditangguhkan). - Penambahan <i>Junction</i> Palembang (8,26km) progres 47%.
3	Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu-Bagian Trans Sumatra (95,8 Km; 24,82 T; 2025-2029)	Kota Lubuk Linggau, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang, dan Kota Bengkulu	- Seksi 1 Lubuk Linggau-Kepahiang 54,5 Km dan Seksi 2 Kepahiang-Taba Penanjung 23,7 Km ditangguhkan - Seksi 3 Taba Penanjung-Bengkulu (17,6 Km) sudah Operasional.
4	Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (111,69 Km; Rp. 22,17 T, Tahun 2020-2024)	Kab.Muara Enim, Kab.Lahat, Kab.Musi Rawas dan, Kota Lubuk Linggau	Tahap 1: Seksi Kayu Agung – Kramasan (Palembang) (42,5 Km) telah beroperasi. Tahap 2: - Seksi Kramasan – Sungai Rengas (21,5km) progres 89,06% - Seksi Sungai Rengas – Pangkalan Balai (33 Km) progress 4,24%
5	Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/ <i>New Palembang</i> di Tanjung Carat	Kab. Banyuasin	Terkait Lahan: SK Menteri KLHK No. 1259 Tahun 2024 tentang penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan produksi tetap untuk pembangunan Pelabuhan New Palembang atas nama Gubernur Sumsel di Kab. Banyuasin seluas 59,95 Ha.

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
			- Kantor Pertanahan Kab. Banyuasin telah bersurat ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terkait permohonan hak pengelolaan lahan seluas 59,95 Ha pada tanggal 3 Februari 2025. - Terkait Pengadaan tanah: - Sertifikasi lahan pelabuhan (59,95 Ha) telah dilakukan Pemeriksaan dan Sidang Panitia Tanah A pada tanggal 31 Januari 2025 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. - Sertifikasi lahan areal fasilitas penunjang (mozaik 5 seluas 810.577 m² dan mozaik 6 seluas 882.943 m²) telah dilakukan Pemeriksaan dan Sidang Panitia Tanah A oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. - Setelah sertifikat lahan selesai selanjutnya lahan akan diserahkan/dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan untuk dibangun Pelabuhan Palembang Baru/<i>New Palembang</i>.
6	Kereta Api Logistik Lahat – Kertapati (Tahun 2020-2026)	Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kota Prabumulih, Tarahan Lampung	<i>Milestone</i> KA Logistik Segmen I Lahat-Kertapati sedang berproses. - Terminal Bongkar Batubara (TBB)/Terminal <i>Unloading</i>

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
			<i>System (TULS)</i> Stasiun Kramasan, Sumatera Selatan progres 13,90% Pembangunan <i>Flyover</i> Koridor Ujan Mas beserta kebutuhan pembebasan lahan dibiayai oleh PT. Kereta Api (Persero)
7	Light Rail Transit (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang)	Kota Palembang	Status: Operasi 1) Total <i>Ridership LRT</i> Sumatera Selatan di tahun 2023 mencapai 4,08 Juta penumpang 2) Mekanisme Subsidi (PSO) dilakukan melalui Subsidi KA Perintis di Kementerian Perhubungan 3) Terdapat 2 eskalator yang belum terpasang
8	Kawasan Industri Tanjung Enim (2020-2023)	Tanjung Enim, Kab. Muara Enim	- Konstruksi ditunda sementara sampai diperoleh kepastian tenant baru - Upaya penjajakan calon tenant baru
9	Bendungan Tiga Dihaji (25 ribu ha Rp. 3,955 T (2025-2029)	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Progres konstruksi keseluruhan 49,6%
10	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang (2019-2024)	Kota Pagar Alam	<i>Phase II</i> Paket I Saluran Primer 5,49 Km dan Talang = 6 Bh <i>Phase II</i> Paket I Saluran Primer 5,49 Km dan Talang = 6 Bh progres 97,13% <i>Phase II</i> Paket II Saluran Sekunder = 34,43 Km Bangunan = 138 Bh progres 94,5%
11	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Kab. Ogan Komering Ulu Timur dan Kab.	<i>Package 1</i> Perjaya <i>Headworks</i>, Komering <i>Main Canal</i>, Lempuing <i>Secondary Canal (Section -3)</i>,

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
	Komering (2023-2026)	Ogan Komering Ilir	Lempuing <i>Sub Secondary Canal and Tertiary Development</i> (Block G and H) and <i>Telemetry System</i> sedang proses lelang • <i>Package 2 Belintang Secondary Canal</i> (BB.0-BB.15), Lempuing <i>Secondary and Sub Secondary Canal and Tertiary Development</i> (Blok I and J) progres 18,67% • <i>Package 3 Belintang Secondary Canal</i> (BB.15-BB.25), Lempuing <i>Secondary and Sub Secondary Canal and Tertiary Development</i> (Blok K) progress 18,10%
12	<i>Upgrading Kilang-Kilang Eksisting/ Refinery Development Master Plan (RDMP) (2027)</i>	Kota Palembang	Tahap transaksi <i>Bidding FEED, BEDP</i>
13	Pembangunan Bahan Bakar Hijau (<i>Green Refinery</i> RU III Plaju (2025)	Kota Palembang	• Pekerjaan Pra FS, Dokumen <i>Basic Engineering Design Package (BEDP)</i>, Dokumen <i>Front End Engineering Design (FEED)</i> sudah selesai.
14	Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim (2021-2023)	Kab. Muara Enim	• PTBA telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri berlaku Efektif pada Lahan Kawasan Industri 585,4 Ha di Tanjung Enim sejak tanggal 24 Mei 2021. • Proses mendapatkan mitra strategis pendanaan.
15	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik	Kota Palembang	• Progres pembangunan sudah tahap tiang pancang dan diharapkan ada <i>Ground Breaking</i>.

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
	(PSEL) Kota Palembang		• Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dengan PT. PLN pada 21 Desember 2023. • Jaminan pelaksanaan kegiatan sudah ada dan diserahkan dari PT. IGP.
16	Pengembangan Lahan Sawah Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral	Berlokasi di 7 Kabupaten: Kab. OKI, Kab. Ogan Ilir, Kab. MUBA, Kab. OKU Timur, Kab. PALI, Kab. Banyuasin, Kab. Muara Enim.	• Cetak Sawah seluas 2.000 Ha • Pembangunan Pabrik Penggilingan Padi Skala besar (1 unit) berlokasi di Desa Kota Bumi, Kec. Tanjung Lubuk Kab. Ogan Komering Ilir. • Progres: a. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Belitang Panen Raya (BPR) tentang Implementasi Cetak Sawah dan Pembangunan Penggilingan Padi Modern pada tanggal 13 Januari 2025. b. Rencana <i>Groundbreaking</i> Cetak Sawah seluas 2.000 Ha dan Pembangunan Penggilingan Padi Modern di Desa Kota Bumi Kec. Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir pada pertengahan April 2025. c. Survei Investigasi Desain (SID) Cetak Sawah untuk luasan 75.000 Ha dan Konstruksi Cetak Sawah seluas 50.000 Ha di 5 (lima) kabupaten yaitu Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir,

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
			Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu Timur dan Penukal Abab Lematang Ilir pada Tahun Anggaran 2025, sedangkan seluas 25.000 Ha akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dengan sumber dana APBN Kementerian Pertanian

(Progres kemajuan fisik per Januari-Februari 2025)

Sumber: Kementerian PUPR (BBPJN Sumsel, BBWSS VIII), Hutama Karya Trans Sumatera, Bappeda Prov. Sumsel, Dishub Prov. Sumsel, 2025

3.2.2.3 Kawasan Strategis Nasional di Wilayah Provinsi

Kawasan strategis nasional (KSN) yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, meliputi:

- KSN Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat;
- KSN Kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang;
- KSN Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan; dan
- KSN Kawasan Perkotaan Palembang – Betung – Indralaya – Kayuagung (Patungraya Agung).

1) KSN Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat

Taman Nasional Kerinci Seblat membentang melintasi empat provinsi: Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Di Provinsi Sumatra Selatan, Taman Nasional Kerinci Seblat meliputi wilayah Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kota Lubuklinggau. Taman Nasional Kerinci Seblat adalah taman nasional terbesar di Sumatera yang memiliki luas wilayah sebesar 13.750 km². Taman Nasional ini merupakan kawasan konservasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.901/Kpts-II/1999.

Taman Nasional Kerinci Seblat berfungsi sebagai kawasan perlindungan untuk proses ekologis yang menunjang kehidupan, kawasan pengawetan keanekaragaman hayati untuk kepentingan pelestarian sumber genetik, wahana bagi pendidikan dan penelitian, serta menunjang pengembangan budaya.

2) Kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang

Kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang merupakan taman nasional yang berdampingan dengan Taman Nasional Berbak. Kawasan seluas 202.896,31 hektar ini berada di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Beberapa tahun setelah diresmikan sebagai taman nasional, kawasan ini ditetapkan sebagai salah satu lahan basah. Hal tersebut sesuai dengan kondisi alam yang dimilikinya, yakni perpaduan antara dataran dan perairan. Lingkungan tersebut menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna yang bisa dijumpai di taman nasional ini.

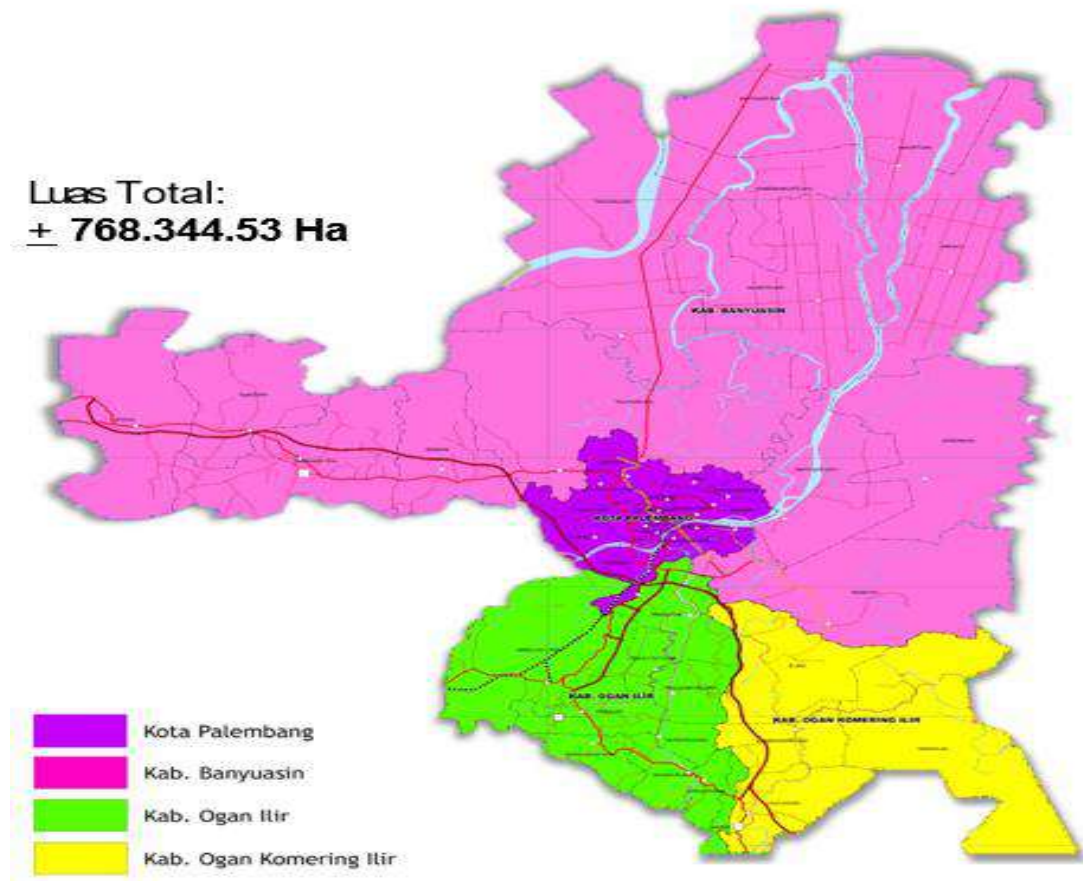
3) Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan taman nasional yang ditujukan untuk melindungi hutan hujan tropis Pulau Sumatera beserta kekayaan alam hayatinya. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan memiliki luas wilayah sekitar 313.572,48 hektar.

Secara administrasi pemerintahan, Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terletak di wilayah Provinsi Lampung seluas 248.861,48 hektar dan Provinsi Bengkulu seluas 64.711 hektar. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sebagai pelestarian Harimau Sumatera, Badak Sumatera dan Gajah Sumatera serta perlindungan sistem penyangga kehidupan yang didukung oleh pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

4) KSN Kawasan Perkotaan Patungraya Agung

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang ditetapkan untuk diprioritaskan penataan ruangnya. KSN memiliki pengaruh penting secara nasional, baik dalam bidang kedaulatan, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.



Gambar 3. 3 Lingkup Wilayah Patungraya Agung

Sumber: Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Palembang Betung Indralaya dan Kayu Agung (Patungraya Agung), wilayah delineasi meliputi:

- 1) Kawasan Seluruh wilayah Kota Palembang dengan luasan sebesar ±36,647.94 Ha, meliputi 18 Kecamatan;
- 2) Sebagian Wilayah Kabupaten Banyuasin dengan luasan sebesar ±516,025.4 Ha, meliputi 14 Kecamatan;
- 3) Sebagian Wilayah Kabupaten Ogan Ilir dengan luasan sebesar ±87,747.29 Ha, meliputi 10 Kecamatan;
- 4) Sebagian Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luasan sebesar ±88,396.94 Ha, meliputi 4 Kecamatan.

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup.

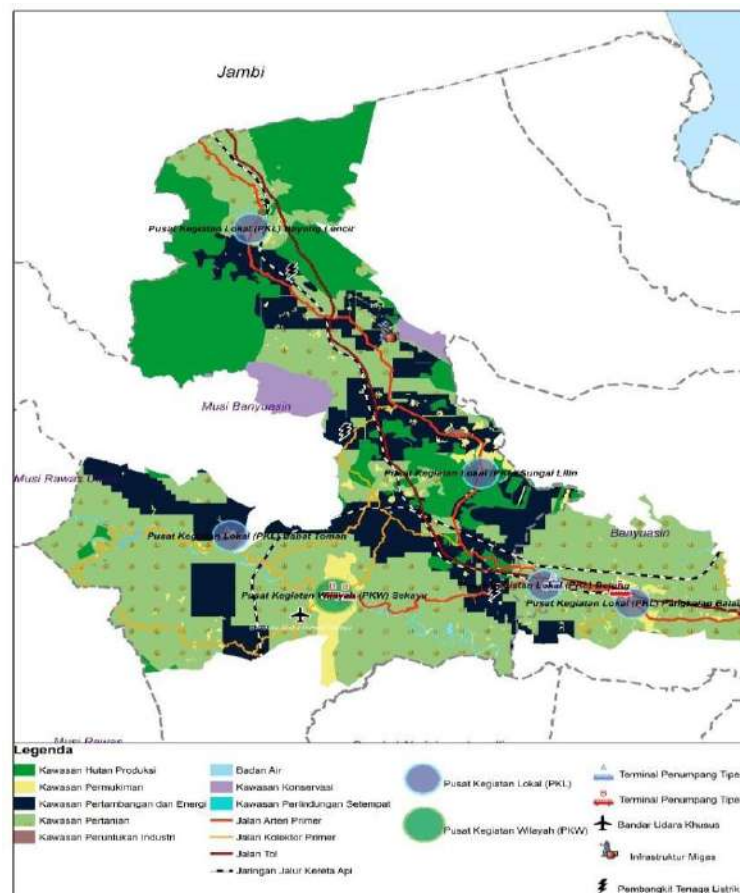
-

Sumber: Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

1. KSP Kawasan Sekayu dan Sekitarnya

KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya meliputi 2 (dua) wilayah kabupaten yaitu: Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin.

- 1) Kawasan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Keluang, Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Tungkal Jaya; dan
- 2) Kawasan wilayah Kabupaten Banyuasin meliputi seluruh kecamatan.



Gambar 3. 5 KSP Kawasan Sekayu dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya adalah mengembangkan pusat kegiatan ekonomi berbasis hilirisasi sumber daya alam terintegrasi dengan KSN Patungraya Agung.

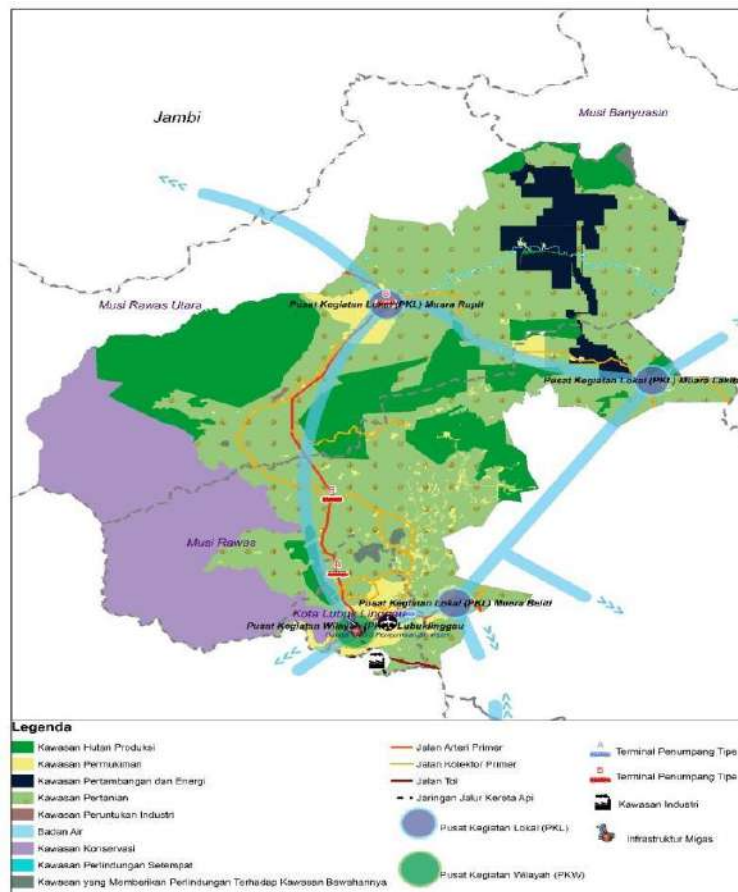
Arah pengembangan KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan Kawasan-Kawasan yang dapat mendukung fungsi PKN Patungraya Agung;
- b. pengembangan Kawasan Industri Hijau di Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biogas di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin;
- d. pengembangan *food estate* sentra produksi padi di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan serta pelayanan publik;
- f. pencegahan dan pengendalian kemungkinan dampak pencemaran dari aktivitas di sekitar Kawasan yang dapat mengganggu fungsi pusat kegiatan di sekitarnya; dan
- g. pengendalian Kawasan yang berfungsi lindung.

2. KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya

KSP Kawasan Lubuklinggau dan sekitarnya meliputi 3 (tiga) wilayah kabupaten/kota yaitu: Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

- 1) Kawasan wilayah Kota Lubuklinggau meliputi seluruh kecamatan;
- 2) Kawasan wilayah Kabupaten Musi Rawas meliputi Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu, Kecamatan Selangit, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Muara Lakitan, dan Kecamatan Megang Sakti; dan
- 3) Kawasan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Dapo.



Gambar 3. 6 KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

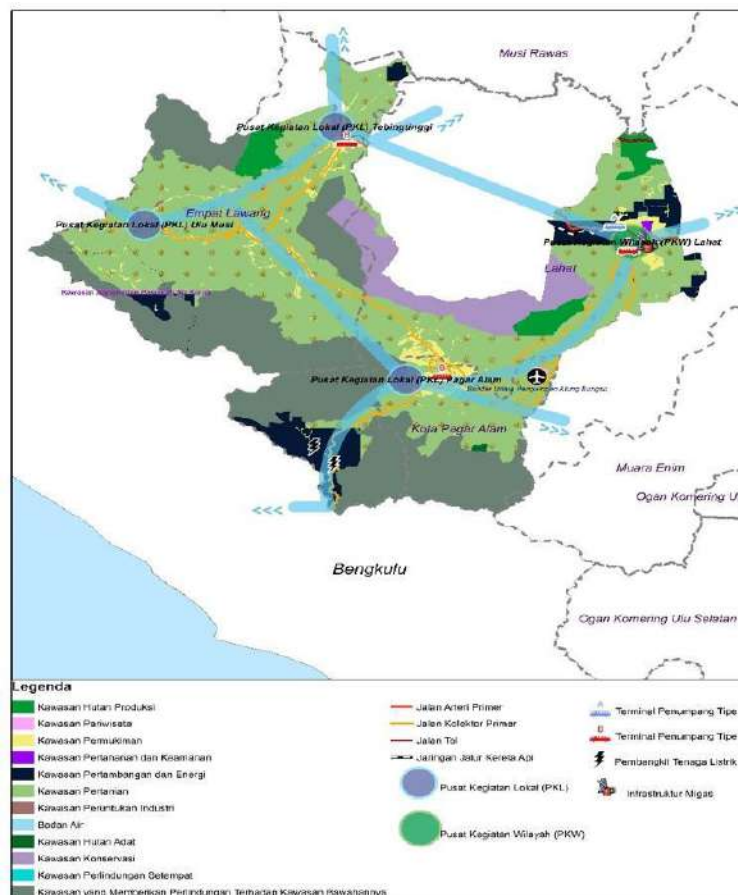
Tujuan pengembangan KSP Kawasan Lubuk Linggau dan Sekitarnya adalah mendukung percepatan peningkatan ekonomi dalam mendorong pertumbuhan Kawasan tertinggal.

Arah pengembangan KSP Kawasan Lubuk Linggau dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

- pengembangan Kawasan Perkotaan Lubuk Linggau dalam mendukung percepatan peningkatan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
- pengembangan Kawasan agropolitan Musi Rawas;
- pengembangan Kawasan yang mendukung PKW Lubuk Linggau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan di sekitarnya;
- pengembangan desa tertinggal di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara;

- e. pengembangan potensi sumber daya mineral logam seng, timah hitam dan batu bara di Kabupaten Musi Rawas Utara;
- f. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan;
- g. penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan kawasan;

3. KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya



Gambar 3. 7 Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

KSP Kawasan Pagar Alam dan sekitarnya meliputi 3 (tiga) wilayah kabupaten yaitu: Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Empat Lawang.

- 1) Kawasan wilayah Kota Pagar Alam meliputi seluruh kecamatan;
- 2) Kawasan wilayah Kabupaten Lahat meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Pulau Pinang,

Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Sukamerindu, Kecamatan Lahat, Kecamatan Gumay Talang dan Kecamatan Lahat Selatan

- 3) Kawasan wilayah Kabupaten Empat Lawang meliputi Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Sikap Dalam, Kecamatan Talang Padang dan Kecamatan Tebing Tinggi.

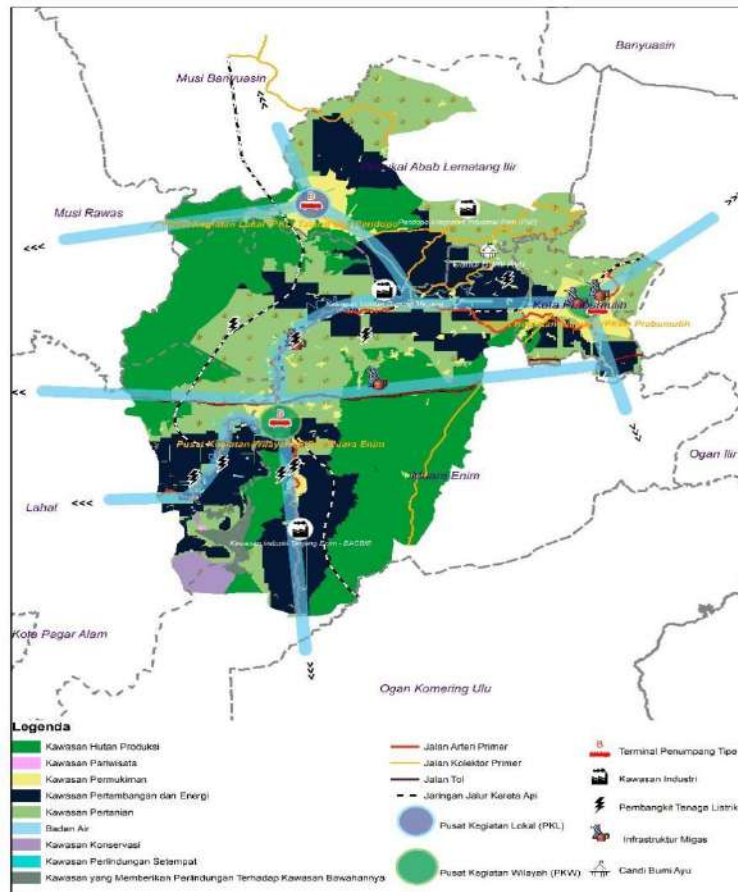
Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya adalah mengembangkan pusat kegiatan ekonomi baru berbasis pariwisata dan sumber daya energi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.

Arah pengembangan KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan potensi wisata minat khusus sejarah dan budaya dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang seimbang dan terpadu;
- b. pengembangan objek daya tarik wisata kawasan situs Megalith yang terdapat di Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam;
- c. pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan di Kota Pagar Alam;
- d. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan;
- e. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan; dan
- f. menjaga dan melestarikan Kawasan yang berfungsi lindung.

4. KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya

KSP Kawasan Muara Enim dan sekitarnya meliputi 4 (empat) wilayah kabupaten yaitu: Kabupaten Muara Enim, Kota Prabumulih, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kabupaten Lahat.



Gambar 3. 8 KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

- 1) Kawasan wilayah Kabupaten Muara Enim meliputi Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Benakat, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku;
- 2) Kawasan wilayah Kota Prabumulih meliputi seluruh kecamatan;
- 3) Kawasan wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir meliputi Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Talang Ubi dan Kecamatan Tanah Abang; dan
- 4) Kawasan wilayah Kabupaten Lahat meliputi Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Merapi Selatan dan Kecamatan Merapi Timur.

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya adalah mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.

Arah pengembangan KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

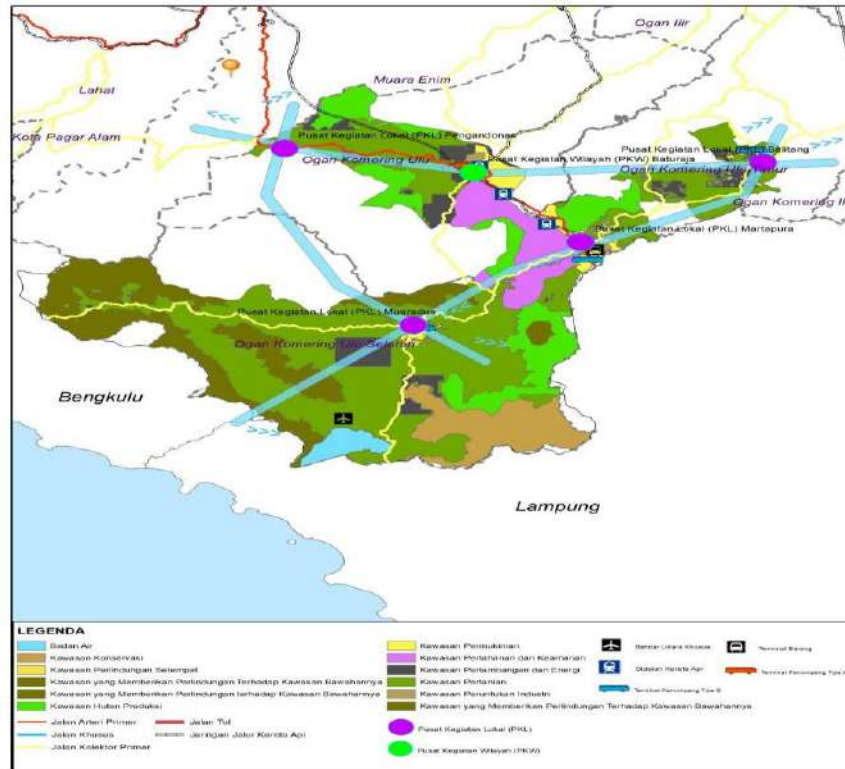
- a. pengembangan Kawasan Perkotaan Muara Enim untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan di sekitarnya;
- b. pengembangan potensi sumber daya alam berupa batu bara dan migas di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berwawasan lingkungan;
- c. pengembangan Kawasan industri di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- d. pengembangan Kawasan Wisata Candi Bumi Ayu di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- e. pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan dan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional di Kabupaten Muara Enim;
- f. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan;
- g. penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana Wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan Kawasan.

5. KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya

KSP Kawasan Martapura dan sekitarnya meliputi 3 (tiga) wilayah kabupaten yaitu: Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- 1) Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi Kecamatan Martapura, Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Jaya Pura, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kecamatan Buay Madang, Kecamatan Buay Madang Timur, Kecamatan Belitang Madang Raya, dan Kecamatan Belitang;
- 2) Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu meliputi Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Baturaja Barat; dan
- 3) Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meliputi Kecamatan Mekakau Ilir, Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Simpang, Kecamatan Buana

Pemaca, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Tiga Dihaji, Kecamatan Kisam Ilir, Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Sindang Danau dan Kecamatan Sungai Are.



Gambar 3. 9 KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya adalah mengembangkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan berbasis pertanian, energi dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.

Arah pengembangan KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

- pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
- pengembangan Kawasan agropolitan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- pengembangan kawasan wisata Goa Harimau dan Goa Puteri di Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- e. pengembangan Kawasan wisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi alam Danau Ranau dan pelabuhan dermaga Danau Ranau serta dermaga wisata;
- f. pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- g. pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biodiesel/biofuel berbasis kelapa sawit di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- h. pengembangan potensi sumber daya mineral logam bijih besi sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- i. pengembangan *food estate* sentra produksi padi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- j. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan melalui pengembangan jaringan jalan dan Bandar Udara Banding Agung;
- k. pengendalian Kawasan yang berfungsi lindung.

- **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Penetapan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan meliputi wilayah daerah Kabupaten Banyuasin (Kecamatan Air Salek, Kecamatan Makarti Jaya, Kecamatan Muara Padang dan Kecamatan Muara Sugihan), dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kecamatan Air Sugihan, Kecamatan Cengal, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kecamatan Sungai Menang dan Kecamatan Tulung Selapan).

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan adalah untuk mengendalikan ruang di Pesisir Timur Sumatera Selatan untuk mendukung peningkatan ekonomi hijau dan menjamin pembangunan berkelanjutan.

Arah pengembangan KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- a. perwujudan Kawasan Lindung untuk mendukung fungsi konservasi, keanekaragaman hayati, dan menjaga iklim makro, serta mencegah dan/atau mengurangi resiko bencana;

- b. penerapan budi daya ramah lingkungan, khususnya pada daerah pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- c. pengendalian dan pembatasan pembangunan guna mempertahankan fungsi hidrologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas;
- d. perlindungan pada Kawasan pesisir dan pantai;
- e. perwujudan untuk keterpaduan fungsi Kawasan di darat dan pesisir;
- f. optimalisasi lahan gambut fungsi budidaya sebagai kawasan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan potensial dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan;
- g. pengembangan *food estate* sentra produksi padi di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- h. pengembangan Kawasan kerbau rawa Pampangan dan itik Pegagan di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- i. percepatan pertumbuhan Kawasan tertinggal yaitu Kawasan Tulung Selapan – Cengal di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- j. peningkatan kerjasama Kawasan perbatasan provinsi; dan
- k. pengembangan Kawasan Pariwisata pesisir (*coastal ecotourism*) berbasis *zero-waste* terintegrasi dan mandiri energi.

3.2.2.5 Indikator Makro dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Kabupaten dan 4 (empat) Kota. Arah kebijakan pembangunan di 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2026 disusun dengan menggunakan pendekatan kabupaten/kota dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Patungraya Agung berdasarkan arahan

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Palembang, Betung, Indralaya dan Kayu Agung (Patungraya Agung), dan juga Kabupaten/Kota dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP), memperhatikan Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044.

Dalam hal pembangunan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan bahwa masih adanya kesenjangan baik ekonomi maupun sosial. Kesenjangan ini bisa dilihat dari kondisi makro pembangunan kabupaten/kota saat ini yang dijabarkan dalam enam indikator utama yaitu Pertumbuhan

Ekonomi, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB per Kapita dan Gini Ratio serta dua indikator lainnya, yaitu Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah. Untuk penjelasan secara lebih rinci mengenai arahan pengembangan wilayah, potensi dan keunggulan wilayah dan arah kebijakan pengembangan wilayah tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

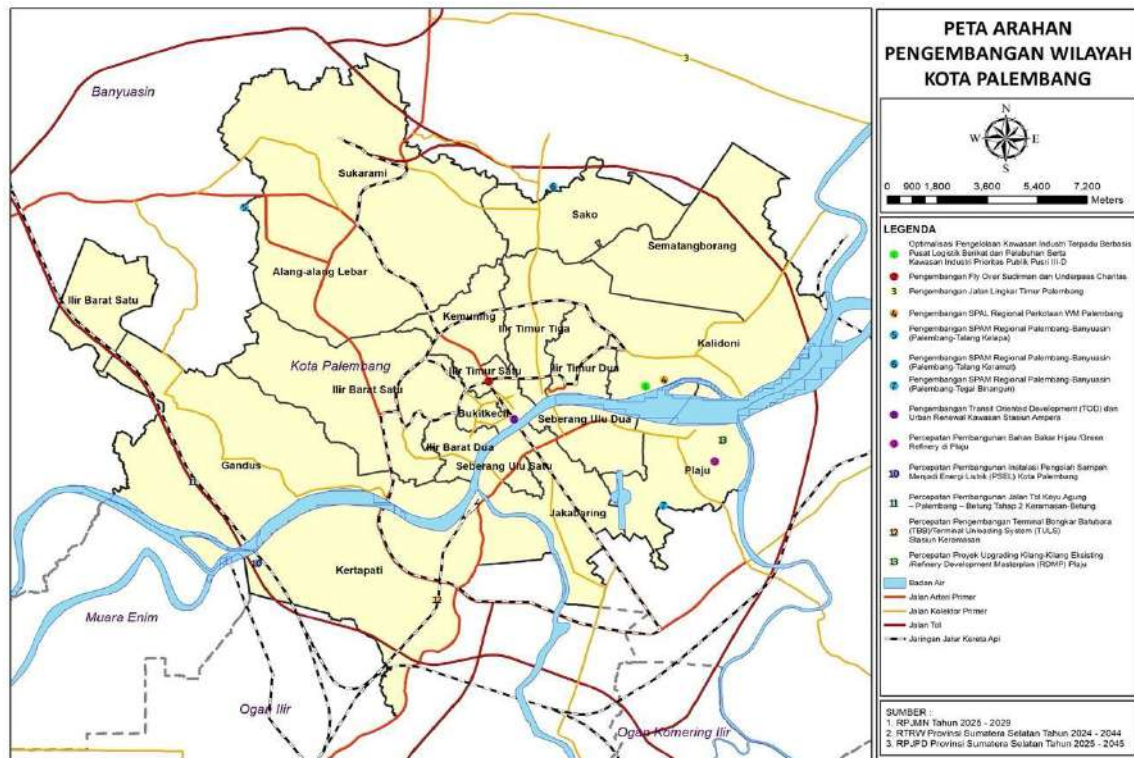
1. Kota Palembang

Pembangunan di Kota Palembang diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kota Palembang sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Capaian dan Target Indikator Makro Kota Palembang

No	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,13	5,1 – 5,5	6,5 – 7,0
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	121,15	134,45	169,50
3	Tingkat Kemiskinan (%)	9,77	8,9 – 9,9	7,0 – 7,5
4	Gini Ratio	0,354	0,329	0,321
5	Indeks Pembangunan Manusia	82,29	82,82	85,06
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ -e)	N/A	10.144,83	35.099,81
7	IKLH Daerah	63,14	61,46	62,47
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,98	6,08	5,1

Sumber: Capaian 2024: BPS 2025, KLHK 2024; Target 2025 dan 2029: hasil analisa dengan mempertimbangkan kesepakatan desk makro kabupaten/kota pada Pra Musrenbang RKPD Sumatera Selatan Tahun 2026, Ranperda RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, dan proyeksi hasil kajian akademisi



Gambar 3. 10 Peta Arahlan Pengembangan Wilayah Kota Palembang

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kota Palembang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dikembangkan sebagai Kawasan Perkotaan dan Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung, serta penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan. Kota Palembang juga direncanakan sebagai pusat kegiatan Kawasan Perkotaan Inti dalam KSN Patungraya Agung, sebagai pusat pemerintahan provinsi dan pusat pemerintahan kota, pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, pusat pelayanan pendidikan tinggi dan riset skala nasional, pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional, pusat pelayanan kesehatan skala nasional dan regional, pusat kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif, pusat pelayanan transportasi udara skala internasional, nasional dan regional, pusat pelayanan transportasi sungai dan laut skala nasional dan regional, pusat pelayanan transportasi darat skala nasional dan regional, pusat pertemuan, pameran, dan konvensi skala nasional dan internasional, dan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara. Kota Palembang juga memiliki Kawasan Konservasi yaitu Taman Wisata Alam Punti Kayu.

Dilihat dari Distribusi PDRB sektor yang menjadi sumber utama pertumbuhan daerah, terdapat 5 (lima) sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024 yaitu sebesar 79,30%, meliputi 1) Sektor Industri Pengolahan sebesar 31,68%; 2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda sebesar 18,78%; 3) Sektor Konstruksi sebesar 15,36%; 4) Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 7,74%; 5) Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,74%.

Pembangunan Kota Palembang akan menentukan sejauh mana wilayah Sumatera Selatan mendapatkan manfaat dari percepatan pembangunan Koridor Ekonomi Sumatera. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi Kota Palembang juga harus melakukan penanganan untuk mengatasi kemiskinan.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kota Palembang pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Pembangunan jaringan gas perkotaan.
- 10) Program pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kota Palembang (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung–Palembang– Betung Tahap 2 Keramasan-Betung sepanjang 111,69 Km.
- 2) *LRT* Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang).
- 3) Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati
- 4) *Upgrading* kilang-kilang *eksisting/refinery development master plan (RDMP)*. Pembangunan bahan bakar hijau (Green Refinery) RU III Plaju.

- 5) Pembangunan bahan bakar hijau/ *Green Refinery* di Plaju.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, prioritas pembangunan wilayah Kota Palembang pada tahun 2025-2029 antara lain diarahkan pada:

- 1) Pengembangan dan penataan WM Palembang, antara lain melalui:
 - Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Palembang;
 - Penyusunan *masterplan* penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu;
 - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau;
 - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan;
 - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan;
 - Penyusunan *metropolitan statistical area*;
 - Penataan Kawasan Strategis dan Penyediaan Perumahan Publik Vertikal Perkotaan Terpadu di Wilayah Metropolitan Palembang.
- 2) Pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD) dan *Urban Renewal* Kawasan Stasiun Ampera.
- 3) Pengembangan Jalan Lingkar Timur Palembang.
- 4) Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di WM Palembang.
- 5) Pengembangan SPAL Regional Perkotaan WM Palembang.
- 6) Pengembangan SPAM Regional Palembang-Banyuasin.
- 7) Pembangunan TPST Regional Palembang-Banyuasin.
- 8) Percepatan pengembangan Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati, khususnya pada pengembangan Terminal Bongkar Batubara (TBB)/ *Terminal Unloading System* (TULS) Stasiun Keramasan.
- 9) Percepatan proyek *Upgrading* Kilang-Kilang Eksisting/ *Refinery Development Masterplan* (RDMP) Plaju.
- 10) Pengembangan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di WM Palembang (PHTC).
- 11) Pengembangan koridor industri Palembang-Banyuasin dengan prioritas: industri kimia, industri energi, industri pengolahan hasil kelapa, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri manufaktur.

- 12) Optimalisasi pengelolaan kawasan industri terpadu berbasis pusat logistik berikat dan pelabuhan serta kawasan industri prioritas publik Pusri III-D.
- 13) Pengembangan *Fly Over* Sudirman dan *Underpass* Charitas.
- 14) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan /peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah.
- 15) *Samesta Green View: Large-Scale Integrated Housing in Talang Keramat, Palembang*
- 16) Revitalisasi Rusun Ilir Barat Palembang (*Revitalization of Ilir Barat Housing – Palembang*)
- 17) Jaringan Distribusi Gas Rumah Tangga di Kota Palembang (*Gas Distribution Network for Households in Palembang City*)

Dengan demikian berdasarkan arahan RPJMN Tahun 2025-2029, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Pengembangan Kota Palembang diarahkan menjadi **kota metropolitan modern yang terintegrasi, berdaya saing, dan berkelanjutan**, dengan fokus utama pada penguatan industri, infrastruktur, ekonomi hijau, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Kabupaten Banyuasin

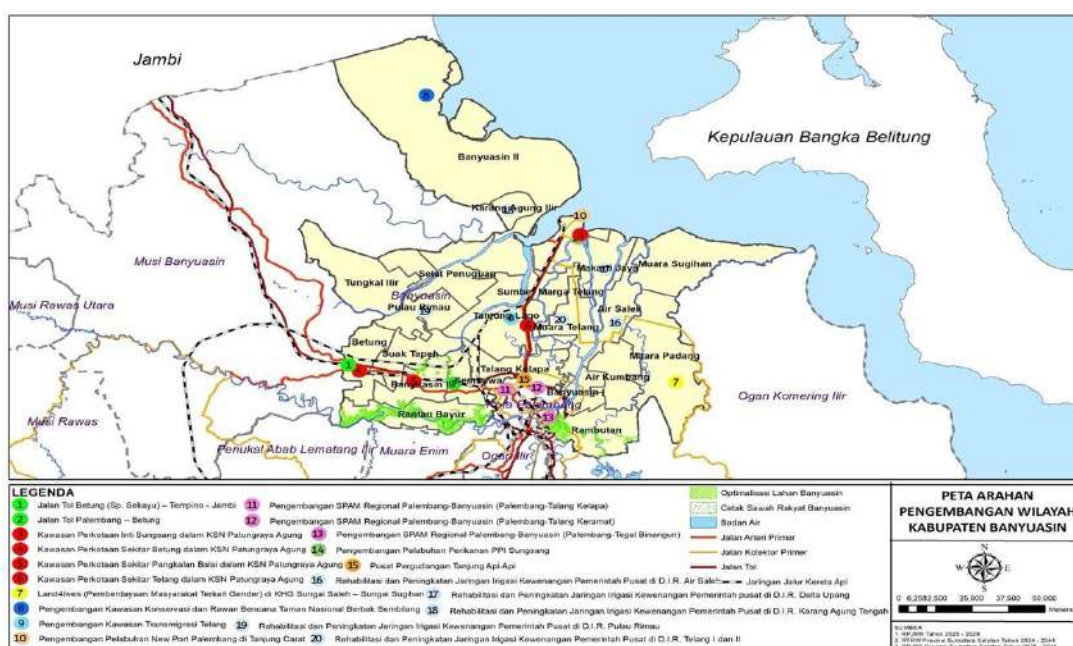
Pembangunan di Kabupaten Banyuasin diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Banyuasin sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Banyuasin

No	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,14	5,0-5,5	5,5 - 6,5
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	44,73	57,21	97,95
3	Tingkat Kemiskinan (%)	9,31	8,5 – 9,0	6,5 – 7,0
4	Gini Ratio	0,267	0,265 – 0,290	0,250 – 0,270
5	Indeks Pembangunan Manusia	71,55	72,94	75,01

No	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2029
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ -e)	N/A	5.010.054,71	7.745.586,63
7	IKLH Daerah	66,44	67,11	68,12
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,24	3,20	3,05

Sumber: Capaian 2024: BPS 2025, KLHK 2024; Target 2025 dan 2029: hasil analisa dengan mempertimbangkan kesepakatan desk makro kabupaten/kota pada Pra Musrenbang RKPD Sumatera Selatan Tahun 2026, Ranperda RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029, dan proyeksi hasil kajian akademisi



Gambar 3. 11 Peta Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Banyuasin

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Banyuasin memiliki 2 KSN mencakup Kawasan Perkotaan Patungraya Agung (Palembang–Betung–Indralaya–Kayu Agung) dan Taman Nasional Berbak Sembilang dan 2 PKL (Pangkalan Balai dan Sungsang), serta termasuk juga ke dalam KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan. Kabupaten Banyuasin dikembangkan terutama dalam sektor perdagangan jasa, kawasan pertanian, perikanan dan pariwisata. Arah pengembangan Kabupaten Banyuasin yaitu, pengembangan kawasan-kawasan yang dapat mendukung fungsi KSN Patungraya Agung dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di sekitarnya, penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana

dan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan serta pelayanan publik, mencegah dan mengendalikan kemungkinan dampak pencemaran dari aktivitas di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi pusat kegiatan di sekitarnya, dan menjaga kawasan yang berfungsi lindung. Selain itu, dikembangkan Kawasan Perkotaan Inti Sungsang dalam Metropolitan Patungraya Agung sebagai pusat pengembangan ekonomi skala nasional, pusat kegiatan industri, kawasan peruntukan pengembangan sistem logistik terpadu (multimoda), pusat pelayanan transportasi laut skala internasional, nasional dan regional, pusat kegiatan perikanan, dan pusat distribusi logistik.

Kawasan Perkotaan Sekitar dalam Metropolitan Patungraya Agung yang meliputi Betung, Pangkalan Balai, dan Telang juga dikembangkan. Betung sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat permukiman, pusat pelayanan transportasi darat skala nasional dan regional, dan pusat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, Pangkalan Balai sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan transportasi darat skala regional, pusat permukiman, dan pusat pelayanan kesehatan regional, serta Telang sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengembangan pertanian terpadu, pusat pengembangan perkebunan, pusat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, dan pusat kegiatan perikanan.

Kabupaten Banyuasin yang juga sebagai bagian dari KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan diarahkan untuk perwujudan Kawasan Lindung untuk mendukung fungsi konservasi, keanekaragaman hayati, dan menjaga iklim makro, serta mencegah dan/atau mengurangi resiko bencana; penerapan kaidah konservasi lahan dan kegiatan budi daya ramah lingkungan, khususnya pada daerah budi daya pertanian, perkebunan dan kehutanan; pengendalian dan pembatasan pembangunan guna mempertahankan fungsi hidrologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas; optimalisasi lahan gambut fungsi budidaya sebagai kawasan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan potensial dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan; pengembangan *food estate* sentra produksi padi, pengembangan kawasan kerbau rawa Pampangan dan Itik Pegagan; melindungi kawasan pesisir dan pantai; menjaga keterpaduan fungsi kawasan di darat dan pesisir; peningkatan kerjasama kawasan perbatasan

provinsi, dan pengembangan kawasan pariwisata pesisir (*coastal ecotourism*) berbasis *zero-waste*, terintegrasi dan mandiri energi.

Dilihat dari sektor unggulannya, sumber utama pertumbuhan ekonomi sebanyak 4 (empat) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 85,46% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 31,25%; 2) Sektor Industri Pengolahan sebesar 25,42%; 3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,60%; 4) Sektor Konstruksi sebesar 13,19%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Banyuasin pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 8) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 9) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 10) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 11) Pembangunan 3 juta rumah.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Banyuasin (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung sepanjang 111,69 Km.
- 2) Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi bagian dari Trans Sumatera sepanjang 170,7 km.
- 3) Pembangunan Pelabuhan Baru/*New Palembang* di Tanjung Carat.
- 4) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2026:

- 1) Pengembangan SPAM Regional Palembang-Banyuasin.

- 2) Pembangunan TPST Regional Palembang-Banyuasin.
- 3) Pengembangan Kawasan Transmigrasi Telang.
- 4) Pengembangan koridor industri Palembang-Banyuasin dengan prioritas: industri kimia, industri energi, industri pengolahan hasil kelapa, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri manufaktur.
- 5) Hilirisasi sawit untuk produk turunan dengan nilai tambah tinggi (*biofuel, fatty acid, fatty alcohol, biofertilizer, green diesel, green jet fuel, dan bioplastik biodegradable*).
- 6) Hilirisasi karet untuk produk lateks, ban, dan produk *value-added rubber* lainnya.
- 7) Hilirisasi Kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar kelapa yaitu, VCO, tepung kelapa, dan arang tempurung, serta produk hilirisasi lanjutan kelapa krimernabari, santan instan, dan karbon aktif.
- 8) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat di D.I.R. Air Saleh, D.I.R. Delta Upang, D.I.R. Karang Agung Tengah, D.I.R. Pulau Rimau, D.I.R. Telang I dan II.
- 9) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah.
- 10) Pengembangan KSPP Sumatera Selatan.
- 11) Peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi).
- 12) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 13) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 14) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 15) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
- 16) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- 17) Pengelolaan dan pengembangan lahan Pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian;

optimalisasi dan revitalisasi lahan Pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.

- 18) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascaPanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 19) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 20) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 21) Pengembangan Lokasi Prioritas Kawasan Swasembada Air dan Energi Cekungan Musi.
- 22) Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Betung-Kenten.
- 23) Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Betung-PLTU MT Sumsel 1.
- 24) Pembangunan infrastruktur sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Kenten-Sungsang-Muntok (Interkoneksi 275 kV Sumatera-Bangka).
- 25) Peningkatan produktivitas Perkebunan dan kualitas produksi (Sawit, karet, kelapa)
- 26) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas industri (Sawit, karet, kelapa)
- 27) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kelapa)

- 28) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kelapa)
- 29) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian (sawit, karet, kelapa)
- 30) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura
- 31) Pengembangan Lokasi Prioritas Kawasan Komoditas Unggulan Banyuasin Ekonomi Biru
- 32) Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Sungsang
- 33) Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap.
- 34) Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya
- 35) Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat
- 36) Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan.
- 37) Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan.
- 38) Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan.
- 39) Perlindungan pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi
- 40) Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan ,satwa dan biota perairan
- 41) Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi
- 42) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri
- 43) Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan
- 44) Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi
- 45) Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana
- 46) Peningkatan resiliensi Masyarakat terhadap bencana

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Pengembangan Kabupaten Banyuasin diarahkan menjadi **pusat pertumbuhan ekonomi dan logistik yang strategis di Sumatera Selatan** dengan fokus pada sektor

ekonomi unggulan, infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

3. Kabupaten Ogan Ilir

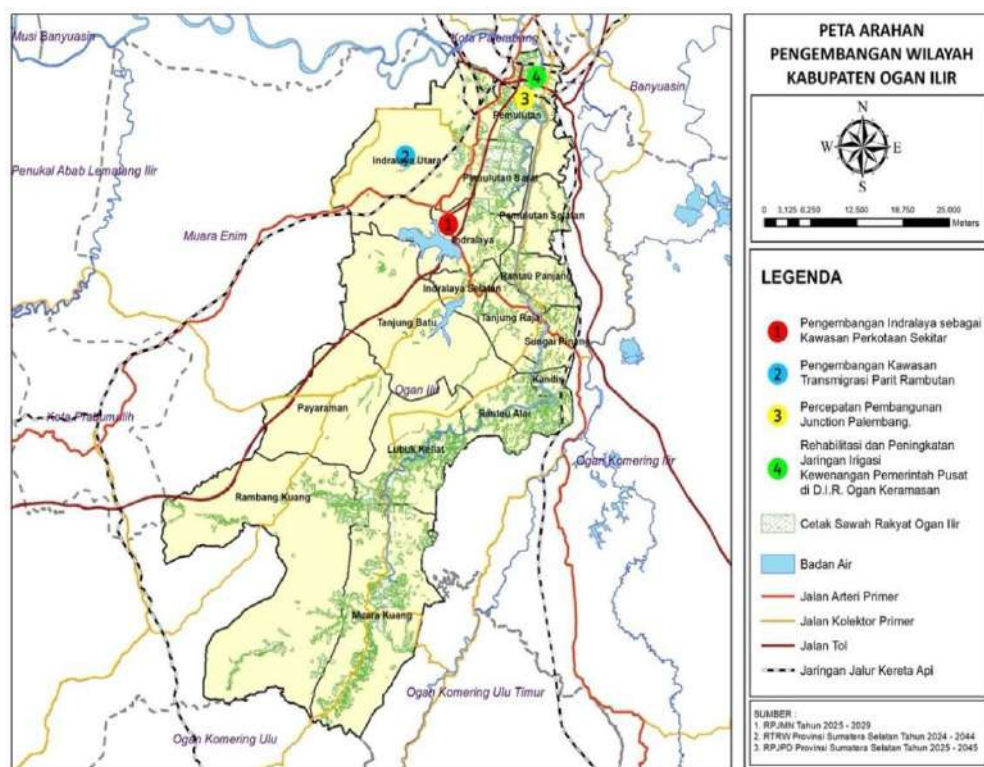
Pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Ogan Ilir sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Ilir

No	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,81	4,95 – 5,45	5,76 – 6,26
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	34,95	36,52	43,44
3	Tingkat Kemiskinan (%)	12,3	10,50 – 11,00	8,03 – 8,53
4	Gini Ratio	0,304	0,290 – 0,292	0,280 – 0,282
5	Indeks Pembangunan Manusia	72,67	73,62	75,72
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ -e)	N/A	80.979,57	121.404,29
7	IKLH Daerah	66,25	65,44	66,45
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,65	2,12 – 2,02	1,89 – 1,83

Sumber: Capaian 2024: BPS 2025, KLHK 2024; Target 2025 dan 2029: hasil analisa dengan mempertimbangkan kesepakatan desk makro kabupaten/kota pada Pra Musrenbang RKPD Sumatera Selatan Tahun 2026, Ranperda RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, dan proyeksi hasil kajian akademisi

Kabupaten Ogan Ilir memiliki 1 (satu) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Indralaya. Kawasan Indralaya dikembangkan sebagai Kawasan Perkotaan Sekitar dalam Metropolitan Patungraya Agung, yang berperan sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan tinggi dan riset skala nasional, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan transportasi nasional dan regional, pusat kegiatan industri dan pusat pelayanan kesehatan regional. Kabupaten Ogan Ilir diarahkan untuk memantapkan perannya sebagai sentra produksi pangan dan daerah penyangga perkotaan Palembang dan Prabumulih. Komoditi unggulan daerah adalah hortikultura buah-buahan, sayur-sayuran, padi dan ternak sapi.



Gambar 3. 12 Peta Arahkan Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Ilir

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Berdasarkan Distribusi PDRB Kabupaten Ogan Ilir menurut lapangan usaha tahun 2024, terdapat tiga sektor lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,41%; 2) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 20,46%; 3) Sektor Konstruksi sebesar 16,62%. Hal ini menggambarkan besarnya pengaruh kegiatan di daerah kota tetangga yaitu Kota Palembang dan Kota Prabumulih.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Ogan Ilir pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 8) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

- 9) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 10) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 11) Pembangunan 3 juta rumah.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Ogan Ilir (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Jalan Tol Samping Indralaya-Muara Enim-Bagian Trans Sumatera (119,1 Km).
- 2) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2025-2029 antara lain diarahkan pada:

- 1) Pengembangan sektor perdagangan jasa, kawasan pertanian, perikanan dan pariwisata.
- 2) Pengembangan Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan.
- 3) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat di Daerah Irigasi Rawa (DIR) Ogan Keramasan.
- 4) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah.
- 5) Pengembangan KSPP Sumatera Selatan.
- 6) Peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi).
- 7) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 8) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 9) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 10) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
- 11) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- 12) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan

akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascaPanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.

- 13) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 14) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 15) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Sub-DAS Ogan.
- 16) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada Sub-DAS Ogan.
- 17) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit,karet, dan kelapa).
- 18) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet dan kelapa).
- 19) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa).
- 20) Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI) pada komoditas produksi industri (sawit, karet, dan kelapa).
- 21) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, dan kelapa.
- 22) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 23) Pengembangan Indralaya sebagai Kawasan Perkotaan Sekitar.
- 24) Pengembangan Pusat Pendidikan.

- 25) Percepatan Pembangunan *junction* Palembang.
- 26) Pengembangan Daerah Perbatasan Palembang-Ogan Ilir.
- 27) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Ilir diarahkan untuk menjadi **pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, industri, dan jasa yang berkelanjutan**, serta sebagai **daerah penyangga utama Kota Palembang dan Prabumulih**. Dengan arah pengembangan ini, Kabupaten Ogan Ilir diharapkan menjadi **daerah yang maju secara ekonomi, unggul dalam sektor pertanian, kuat dalam infrastruktur dan konektivitas, serta berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan kawasan metropolitan sekitarnya**.

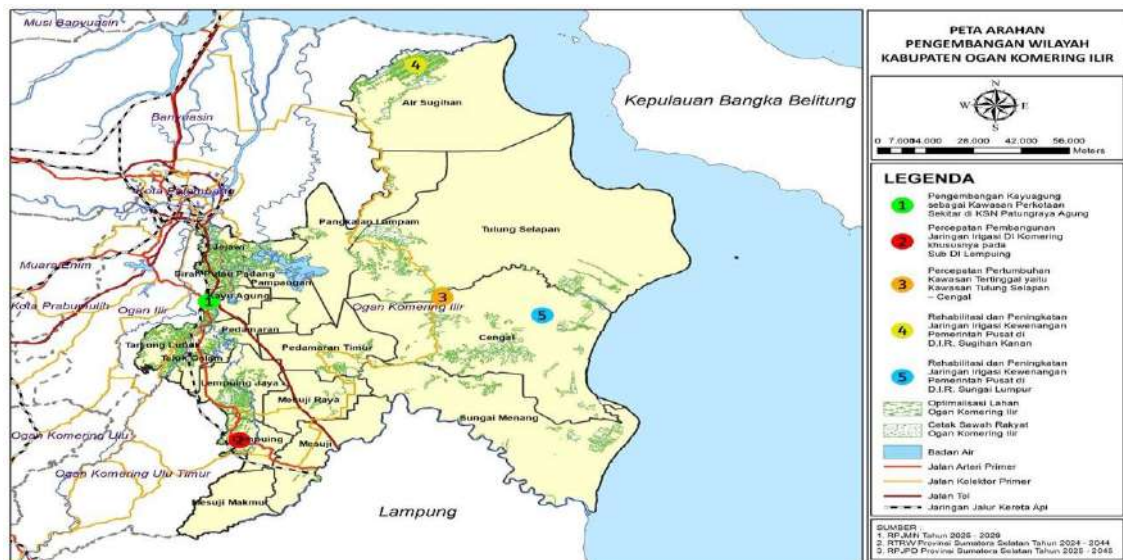
4. Kabupaten Ogan Komering Ilir

Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,13	5,25	5,5-6,0
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	57,8	58	120
3	Tingkat Kemiskinan (%)	12,08	11,05 – 11,60	9,0 – 9,35
4	Gini Ratio	0,306	0,290	0,282
5	Indeks Pembangunan Manusia	71,48	71,6	73,86
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ -e)	N/A	2.121.264,43	3.240.640,71
7	IKLH Daerah	69,90	69,10	70,12
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,38	3,2	2,95

Sumber: Capaian 2024: BPS 2025, KLHK 2024; Target 2025 dan 2029: hasil analisa dengan mempertimbangkan kesepakatan desk makro kabupaten/kota pada Pra Musrenbang RKPD Sumatera Selatan Tahun 2026, Ranperda RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, dan proyeksi hasil kajian akademisi



Gambar 3. 13 Peta Arahan Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki 1 (satu) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Kayu Agung, 3 (tiga) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Sungai Lumpur, Air Sugihan, dan Tugumulyo, serta juga termasuk ke dalam KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan. Kawasan Kayu Agung dikembangkan sebagai Kawasan Perkotaan Sekitar dalam Metropolitan Patungraja Agung, yang berperan sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa, pusat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, pusat kegiatan industri, dan pusat pelayanan transportasi darat skala regional.

Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai bagian dari KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan diarahkan untuk perwujudan Kawasan Lindung untuk mendukung fungsi konservasi, keanekaragaman hayati, dan menjaga iklim makro, serta mencegah dan/atau mengurangi resiko bencana; penerapan kaidah konservasi lahan dan kegiatan budi daya ramah lingkungan, khususnya pada daerah budi daya pertanian, perkebunan dan kehutanan; pengendalian dan pembatasan pembangunan guna mempertahankan fungsi hidrologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas; optimalisasi lahan gambut fungsi budidaya sebagai kawasan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan potensial dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan; pengembangan *food estate* sentra produksi padi, pengembangan kawasan kerbau rawa Pampangan dan Itik Pegagan; percepatan pertumbuhan kawasan tertinggal yaitu kawasan Tulung Selapan–Cengal; melindungi kawasan pesisir dan pantai; menjaga keterpaduan fungsi kawasan

di darat dan pesisir; peningkatan kerjasama kawasan perbatasan provinsi, dan pengembangan kawasan pariwisata pesisir (*coastal ecotourism*) berbasis *zero-waste*, terintegrasi dan mandiri energi.

Dilihat distribusi PDRB, ada sebanyak 4 (empat) sektor dengan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar pada tahun 2024, yaitu 1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 44,71%; 2) Sektor Industri Pengolahan sebesar 22,09%; 3) Sektor Konstruksi sebesar 12,22%; dan 4) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,09%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 8) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 9) Pembangunan 3 juta rumah.
- 10) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 11) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (111,69 Km).
- 2) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI Komering.
- 3) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2025-2029 antara lain diarahkan pada:

- 1) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat di D.I.R. Sugihan Kanan dan D.I.R. Sungai Lumpur

- 2) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
- 3) Pengembangan KSPP Sumatera Selatan
- 4) Peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi)
- 5) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)
- 6) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)
- 7) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
- 8) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
- 9) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik
- 10) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascaPanen melalui peningkatan prasarana pascapanen
- 11) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 12) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.

- 13) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering
- 14) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering
- 15) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, dan kelapa).
- 16) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet dan kelapa).
- 17) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa).
- 18) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, dan kelapa).
- 19) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, dan kelapa.
- 20) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 21) Peningkatan produktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan menuju kedaulatan pangan.
- 22) percepatan pertumbuhan kawasan tertinggal yaitu kawasan Tulung Selapan–Cengal di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 23) Melindungi kawasan pesisir dan pantai.
- 24) Melindungi Kawasan lindung gambut.
- 25) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
- 26) Penurunan *Stunting*.
- 27) Pengembangan Kayuagung sebagai Kawasan Perkotaan Sekitar.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ilir diarahkan untuk menjadi **sentra produksi pangan dan perkebunan berkelanjutan, kawasan industri berbasis hasil pertanian dan perkebunan, serta pusat perdagangan dan jasa di wilayah pesisir timur Sumatera Selatan**. Secara keseluruhan, Kabupaten Ogan Komering Ilir diarahkan menjadi **wilayah yang maju di sektor pertanian, industri, dan**

perdagangan berbasis sumber daya alam berkelanjutan, serta memiliki ketahanan lingkungan yang kuat terhadap perubahan iklim dan bencana alam.

5. Kabupaten Musi Banyuasin

Pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut:

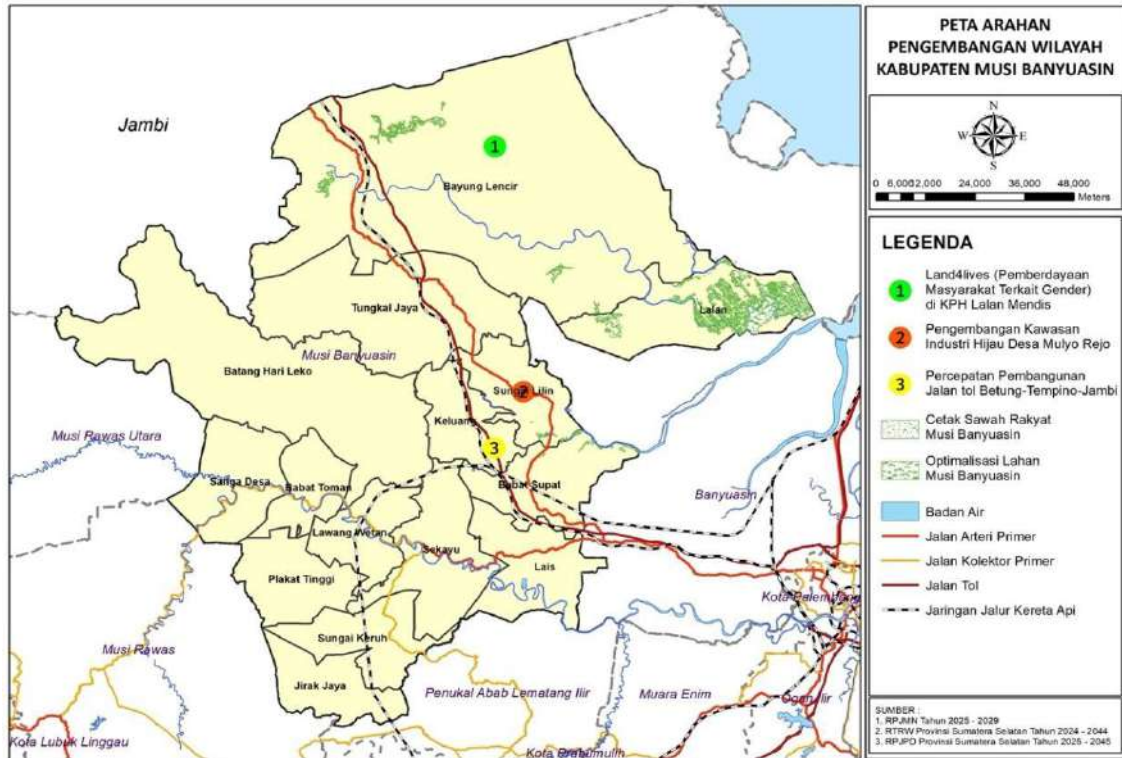
Tabel 3. 10 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,94	4,5 – 5,0	5,10 – 5,5
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	142,14	145,00-159,00	190,9
3	Tingkat Kemiskinan (%)	12,88	12,7 – 12,8	9,98 – 10,75
4	Gini Ratio	0,314	0,290 – 0,310	0,255 – 0,260
5	Indeks Pembangunan Manusia	72,27	72,67	73,5
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ -e)	N/A	1.828.335,80	2.688.752,02
7	IKLH Daerah	68,17	64,44	65,45
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,13	2,08	1,9

Sumber: Capaian 2024: BPS 2025, KLHK 2024; Target 2025 dan 2029: hasil analisa dengan mempertimbangkan kesepakatan desk makro kabupaten/kota pada Pra Musrenbang RKPD Sumatera Selatan Tahun 2026, Ranperda RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, dan proyeksi hasil kajian akademisi

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 1 KSN (Taman Nasional Berbak Sembilang), 1 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) (Sekayu), dan 3 Pusat Kegiatan Lokal (PKL) (Bayung Lencir, Sungai Lilin, dan Babat Toman). Arah pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu, pengembangan kawasan industri hijau desa Mulyo Rejo Kabupaten Musi Banyuasin, pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biogas, pengembangan *food estate* sentra produksi padi, penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung

pergerakan serta pelayanan publik, mencegah dan mengendalikan kemungkinan dampak pencemaran dari aktivitas di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi pusat kegiatan di sekitarnya, serta menjaga kawasan yang berfungsi lindung.



Gambar 3. 14 Peta Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Dilihat distribusi PDRB, ada sebanyak 5 (lima) sektor dengan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar pada tahun 2024 yaitu 1) Sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 49,79%, 2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,09%, 3) Sektor Industri Pengolahan sebesar 11,92%, 4) Sektor Konstruksi sebesar 8,20% dan 5) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,90%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.

- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Food Estate
- 7) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 8) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 9) Pembangunan 3 juta rumah.
- 10) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 11) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Musi Banyuasin (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- Jalan Tol Betung (SP.Sekayu)-Tempino-Jambi-Bagian Trans Sumatera ((170,7 Km).
- Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2025-2029 antara lain diarahkan pada:

- 1) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah.
- 2) Pengembangan KSPP Sumatera Selatan.
- 3) Peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi).
- 4) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 5) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 6) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 7) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
- 8) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.

- 9) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascaPanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 10) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 11) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 12) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi.
- 13) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada DAS Musi.
- 14) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, dan kelapa).
- 15) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet dan kelapa).
- 16) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa).
- 17) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, dan kelapa).
- 18) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, dan kelapa.
- 19) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 20) Peningkatan akses energi.

- 21) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir serta longsor.
- 22) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Berbak Sembilang.
- 23) Peningkatan produksi pertanian padi dan komoditas pangan lainnya melalui pendekatan pengembangan pertanian *holistic close loop model*, pengelolaan dengan *system integrated farm management* yang modern dan digital, dan penyediaan irigasi dan/atau irigasi presisi/*smart irrigation* sesuai kebutuhan komoditas.
- 24) Optimalisasi industri dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pengolahan produk unggulan daerah.
- 25) Peningkatan daya saing dan kualitas SDM.
- 26) Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi untuk mendukung sektor industri, teknologi, dan pariwisata
- 27) Pemutakhiran rutin dan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
- 28) Optimalisasi penurunan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat
- 29) Pemerataan kapasitas, kualitas, dan kuantitas pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan perlindungan sosial adaptif dan inklusif di kantong kemiskinan berdasarkan *spatial based policy*.
- 30) Optimalisasi Iklim investasi dan penanaman modal.
- 31) Pengembangan kawasan industri hijau Desa Mulyo Rejo.
- 32) Pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biogas.
- 33) *Land4lives* (Pemberdayaan Masyarakat Terkait Gender).

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten Musi Banyuasin diarahkan untuk menjadi **pusat industri hijau dan energi berkelanjutan berbasis sumber daya alam, serta sentra produksi pertanian dan perkebunan berdaya saing tinggi di Sumatera Selatan**. Dengan arah pengembangan ini, Kabupaten Musi Banyuasin diposisikan sebagai **kawasan industri hijau dan energi terbarukan yang berorientasi pada keberlanjutan**,

pertanian maju berbasis teknologi, serta pusat konektivitas dan infrastruktur strategis di Sumatera Selatan.

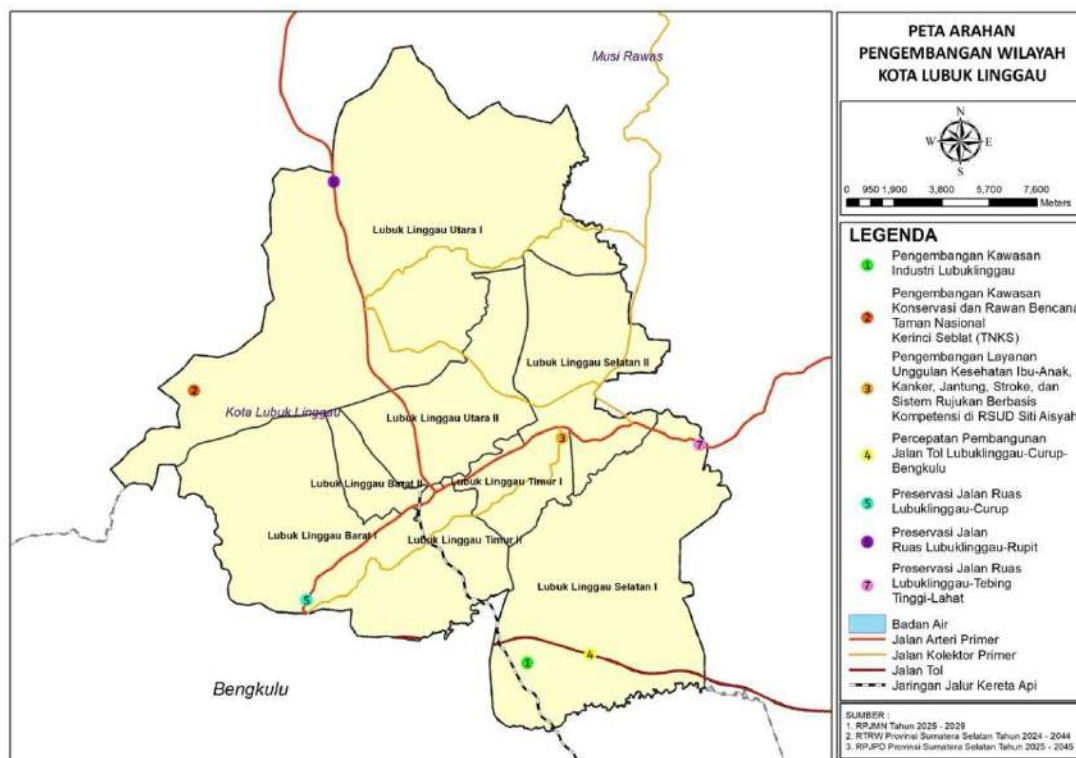
6. Kota Lubuk Linggau

Pembangunan di Kota Lubuk Linggau diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kota Lubuk Linggau sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Capaian dan Target Indikator Makro Kota Lubuk Linggau

No	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,62	4,5 – 5,0	5,7 – 6,3
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	35,43	40,37	46,93
3	Tingkat Kemiskinan (%)	11,14	10,2 – 10,7	9,0 – 8,26
4	Gini Ratio	0,353	0,332 – 0,350	0,306 – 0,308
5	Indeks Pembangunan Manusia	78,98	79,28	79,70
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ -e)	N/A	21.780,11	35.865,96
7	IKLH Daerah	71,83	68,74	69,75
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,29	4,96	3,65

Sumber: Capaian 2024: BPS 2025, KLHK 2024; Target 2025 dan 2029: hasil analisa dengan mempertimbangkan kesepakatan desk makro kabupaten/kota pada Pra Musrenbang RKPD Sumatera Selatan Tahun 2026, Ranperda RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029, dan proyeksi hasil kajian akademisi



Gambar 3. 15 Peta Arahlan Pengembangan Wilayah Kota Lubuk Linggau

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kota Lubuk Linggau memiliki 1 KSN Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), 1 PKW (Lubuklinggau). Arah pengembangan Kota Lubuk Linggau yaitu, pengembangan Kawasan Perkotaan Lubuk Linggau yang dapat mendukung percepatan peningkatan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang, pengembangan kawasan yang mendukung PKW Lubuk Linggau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan di sekitarnya, peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan; penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan Kawasan serta pelayanan publik; menjaga Kawasan yang berfungsi lindung; serta peningkatan kerjasama antar kawasan perbatasan.

Berdasarkan Distribusi PDRB, sektor yang menjadi sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 67,00% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 23,67%, 2) Sektor Konstruksi sebesar 21,09%; 3) Sektor Real Estat sebesar 8,58%; 4) Sektor Industri Pengolahan sebesar 7,16%; 5) Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,50%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kota Lubuk Linggau pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.

Arahan proyek strategis lainnya di Kota Lubuk Linggau (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu terkait pembangunan Jalan Tol Lubuklinggau-Curup-Bengkulu yang merupakan bagian dari Trans Sumatera sepanjang 94,9 km.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kota Lubuk Linggau pada tahun 2025-2029 antara lain diarahkan pada:

- 1) Penyusunan *masterplan* penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu.
- 2) Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau.
- 3) Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan.
- 4) Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan.
- 5) Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Lubuklinggau dalam Progran Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
- 6) Pengembangan SPAM Perkotaan Lubuklinggau.
- 7) Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau (PHTC).

- 8) Preservasi jalan ruas Lubuklinggau-Tebing Tinggi-Lahat, Lubuklinggau-Rupit, Lubuklinggau-Curup.
- 9) Pengembangan kota agropolitan Lubuklinggau.
- 10) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
- 11) Pengembangan destinasi wisata.
- 12) Pengembangan Kawasan Industri Lubuklinggau.
- 13) Pengembangan Pusat Pendidikan Perkotaan dan Kesehatan.
- 14) Pengembangan konektivitas wilayah.
- 15) Pemenuhan amenities perkotaan (antara lain ruang terbuka hijau, ruang terbuka publik, jalur pedestrian, *landmark* kota).
- 16) Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan perkotaan.
- 17) Optimalisasi kerjasama antar kabupaten/kota.
- 18) Penguatan promosi pariwisata.
- 19) *Scaling-up* UMKM dan wirausaha muda.
- 20) Optimalisasi investasi sektor swasta.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kota Lubuk Linggau diarahkan untuk menjadi **Pusat Perdagangan, Jasa, dan Konektivitas Regional Berbasis Perkotaan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan di Sumatera Selatan.**

7. Kabupaten Musi Rawas

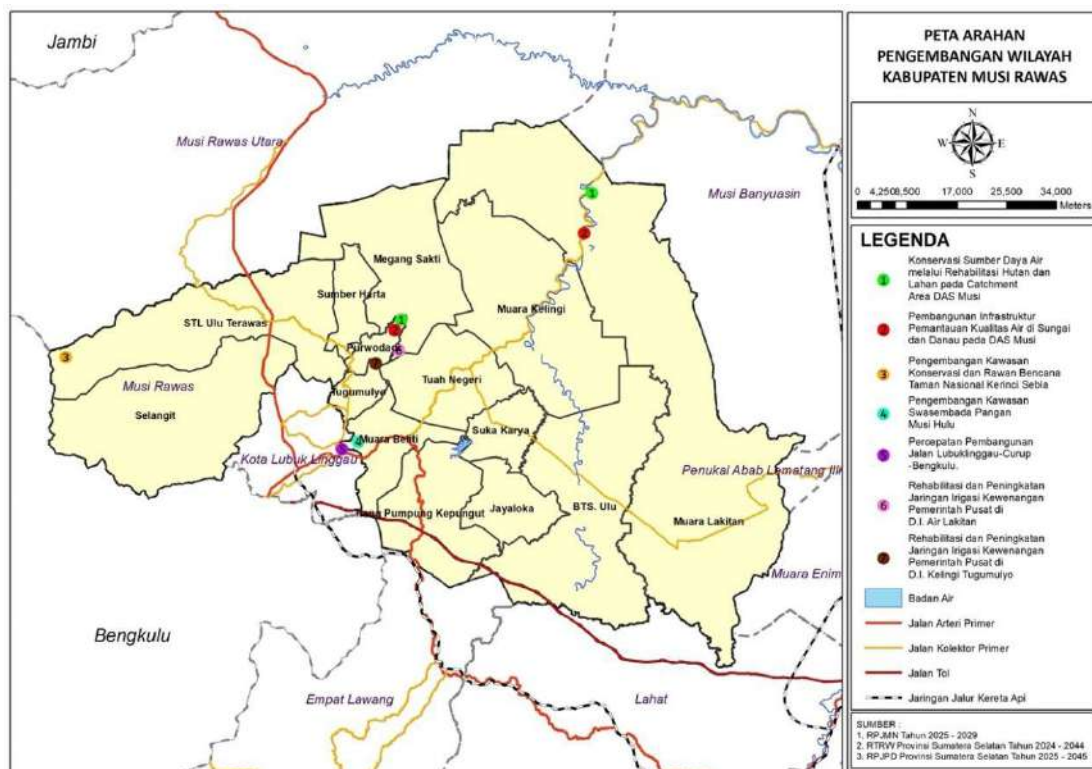
Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas

No	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,95	5,3	6,6
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	61,86	62,87	73,75
3	Tingkat Kemiskinan (%)	13,44	11,5	9,65
4	Gini Ratio	0,285	0,256	0,239

No	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2029
5	Indeks Pembangunan Manusia	71,21	71,35	75,74
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	654.108,15	899.633,82
7	IKLH Daerah	71,44	71,14	72,15
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,94	1,94	1,90

Sumber: Capaian 2024: BPS 2025, KLHK 2024; Target 2025 dan 2029: hasil analisa dengan mempertimbangkan kesepakatan desk makro kabupaten/kota pada Pra Musrenbang RKPD Sumatera Selatan Tahun 2026, Ranperda RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, dan proyeksi hasil kajian akademisi



Gambar 3. 16 Peta Arahlan Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Musi Rawas memiliki 1 KSN (Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)), 2 PKL (Muara Beliti dan Muara Lakitan). Arah pengembangan Kabupaten Musi Rawas diantaranya diarahkan sebagai pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan desa tertinggal, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan, penyediaan dan peningkatan

ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah, menjaga Kawasan yang berfungsi lindung, dan peningkatan kerjasama antar kawasan perbatasan.

Dilihat distribusi PDRB, sumber pertumbuhan wilayah sebanyak 5 (lima) sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2024 dengan total 90,42% adalah 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 30,83%, 2) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 28,77%, 3) Sektor Industri Pengolahan sebesar 14,60%, 4) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,88%, dan 5) Konstruksi 5,34%. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi, Kabupaten Musi Rawas harus melakukan penanganan untuk mengatasi kemiskinan.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Musi Rawas pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 8) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 9) Pembangunan 3 juta rumah.
- 10) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 11) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Musi Rawas (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Jalan Tol Betung (SP.Sekayu)-Tempino-Jambi-Bagian Trans Sumatera ((170,7 Km).

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2025-2029 antara lain diarahkan pada:

- 1) Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan Musi Hulu.

- 2) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat di Daerah Irigasi Kelingi Tugumulyo dan Daerah Irigasi Air Lakitan.
- 3) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah.
- 4) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 5) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 6) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 7) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
- 8) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- 9) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 10) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 11) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.

- 12) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* DAS Musi.
- 13) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada DAS Musi.
- 14) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi, dan kelapa).
- 15) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi, dan kelapa).
- 16) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi, dan kelapa).
- 17) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 18) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, dan kelapa.
- 19) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 20) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Kerinci Seblat.
- 21) Percepatan pembangunan Jalan Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu.
- 22) Mendorong realisasi investasi pada sektor riil terutama yang berfokus pada industri peningkatan nilai tambah dari sektor unggulan daerah (pertanian/perkebunan/ pertambangan).
- 23) Menyusun strategi diversifikasi ekonomi dalam rangka peningkatan inklusivitas dan keberlanjutan ekonomi ke depan.
- 24) Pemerataan jumlah fasilitas sarana dan prasarana layanan kesehatan terutama peningkatan jumlah faskes tingkat I.
- 25) Pemerataan kualitas pelayanan dasar (kesehatan dan Pendidikan) khususnya melalui penguatan kapasitas SDM baik untuk tenaga kesehatan maupun tenaga pendidik serta standarisasi sarana prasarana antar sekolah dan fasilitas kesehatan.
- 26) Pemanfaatan data Regsosek sebagai upaya peningkatan akurasi data penerima bantuan sosial ke depan.
- 27) Peningkatan kerjasama perdagangan antardaerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu.
- 28) Pengembangan konektivitas jalan intra kecamatan dan desa.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Pengembangan Kabupaten Musi Rawas diarahkan untuk menjadi **pusat pertanian dan perkebunan yang maju, berkelanjutan, serta terintegrasi dengan agroindustri dan konektivitas regional di Sumatera Selatan.**

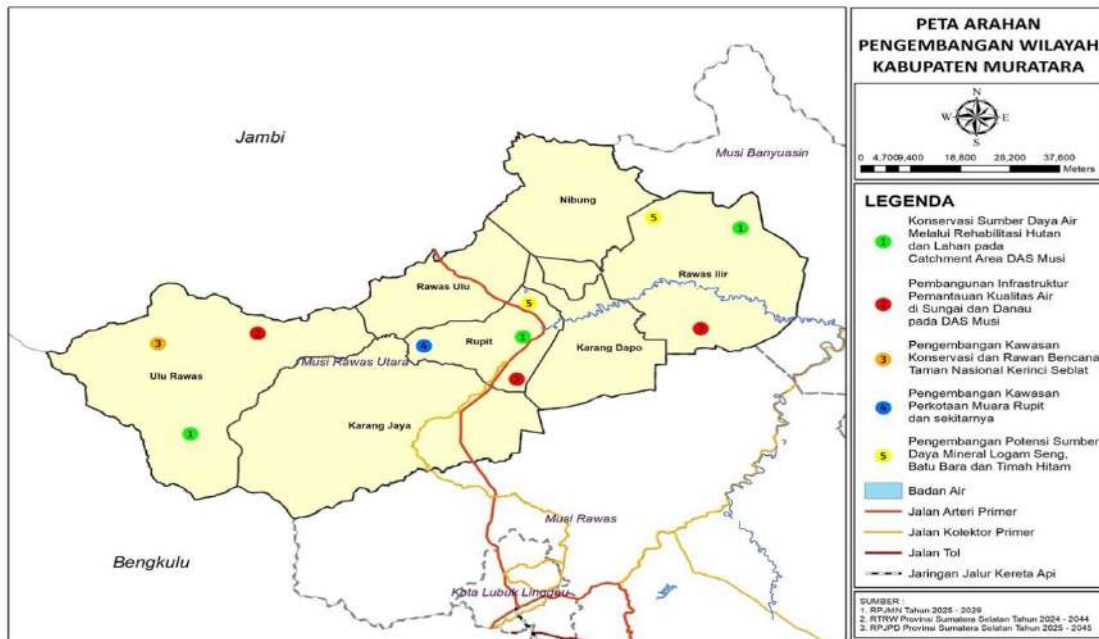
8. Kabupaten Musi Rawas Utara

Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,52	4,3 – 4,6	4,5 - 5,4
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	48,87	51,36	61,54
3	Tingkat Kemiskinan (%)	17,38	16,00 – 17,00	14,90 – 12,00
4	Gini Ratio	0,254	0,253	0,249
5	Indeks Pembangunan Manusia	70,45	71	72,07
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ -e)	N/A	639.336,12	906.613,65
7	IKLH Daerah	72,08	71,37	72,39
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,91	3,84-4,5	3,8

Sumber: Capaian 2024: BPS 2025, KLHK 2024; Target 2025 dan 2029: hasil analisa dengan mempertimbangkan kesepakatan desk makro kabupaten/kota pada Pra Musrenbang RKPD Sumatera Selatan Tahun 2026, Ranperda RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, dan proyeksi hasil kajian akademisi



Gambar 3. 17 Peta Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Pengembangan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai daerah otonomi baru memiliki 1 KSN (Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat), 1 PKL (Muara Rupit). Arah pengembangan Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu, pengembangan desa tertinggal, pengembangan potensi sumber daya mineral logam seng, batu bara, dan timah hitam, peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi, penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah, menjaga Kawasan yang berfungsi lindung; dan peningkatan kerjasama antar kawasan perbatasan.

Berdasarkan Distribusi PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara menurut lapangan usaha tahun 2024, terdapat 2 (dua) sektor lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 47,77% dan 2) Sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 21,54%.

Arahkan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Musi Rawas Utara pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.

- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 10) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025-2029 antara lain diarahkan pada:

- 1) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
- 2) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)
- 3) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)
- 4) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
- 5) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
- 6) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik
- 7) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen
- 8) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan

dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

- 9) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
- 10) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* DAS Musi
- 11) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada DAS Musi
- 12) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi, dan kelapa)
- 13) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi, dan kelapa)
- 14) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi, dan kelapa)
- 15) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa)
- 16) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, dan kelapa
- 17) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura
- 18) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Kerinci Seblat.
- 19) Menjadi indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
- 20) Pengembangan kawasan perkotaan Muara Rupit dan sekitarnya.
- 21) Pengembangan desa tertinggal.
- 22) Pengembangan potensi sumber daya mineral logam seng, batu bara dan timah hitam
- 23) Peningkatan kerjasama antarkawasan perbatasan
- 24) Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan
- 25) Perluasan akses internet dan digitalisasi
- 26) Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan (pertanian/Perkebunan/perikanan/peternakan *high value*)

- 27) Dukungan promosi dan kemudahan investasi penyediaan
- 28) Implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas, seperti pelatihan modal keterampilan, usaha, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
- 29) Mengembangkan program pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar, terutama bagi pemuda dan lulusan sekolah
- 30) Mengembangkan potensi pariwisata dengan mempromosikan objek wisata alam dan budaya, serta membangun infrastruktur pendukung penginapan dan aksesibilitas

Berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Pengembangan Kabupaten Musi Rawas Utara diarahkan untuk menjadi **pusat pertanian berkelanjutan, pertambangan yang terintegrasi, serta ekonomi berbasis potensi lokal yang inklusif dan berkelanjutan di Sumatera Selatan.**

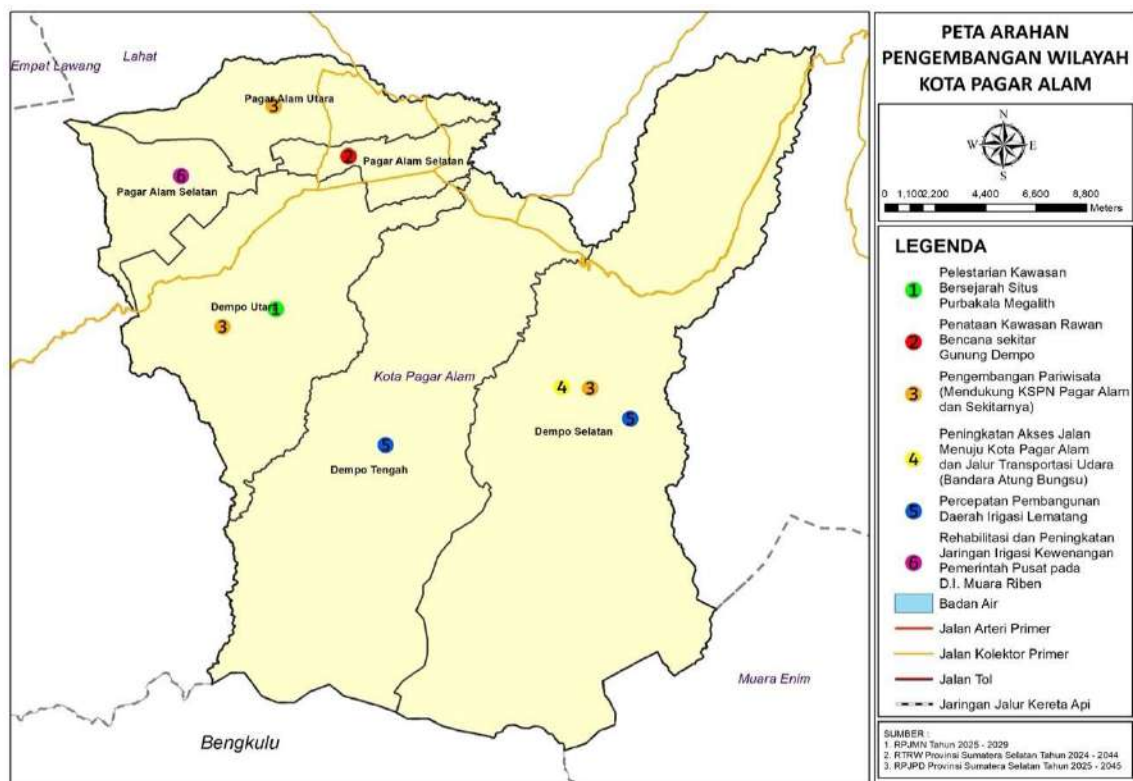
9. Kota Pagar Alam

Pembangunan di Kota Pagar Alam diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kota Pagar Alam sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Capaian dan Target Indikator Makro Kota Pagar Alam

No	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	5,50	6,52
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	25,54	30,97	40,69
3	Tingkat Kemiskinan (%)	8,18	7,48-7,60	5,0-5,5
4	Gini Ratio	0,283	0,278	0,264
5	Indeks Pembangunan Manusia	74,00	74,51	76,77
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ -e)	N/A	51.487,98	77.448,16
7	IKLH Daerah	72,17	72,02	73,03
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,34	2,00	1,57

Sumber: Capaian 2024: BPS 2025, KLHK 2024; Target 2025 dan 2029: hasil analisa dengan mempertimbangkan kesepakatan desk makro kabupaten/kota pada Pra Musrenbang RKPD Sumatera Selatan Tahun 2026, Ranperda RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, dan proyeksi hasil kajian akademisi



Gambar 3. 18 Peta Arahkan Pengembangan Wilayah Kota Pagar Alam

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kota Pagar Alam merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Arahkan pengembangan Kota Pagar Alam yaitu, pengembangan objek daya tarik wisata kawasan situs Megalith, pengembangan potensi wisata minat khusus sejarah dan budaya dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang seimbang dan terpadu, pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan, penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan, menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung, serta sebagai pengembangan Kawasan pariwisata dataran tinggi karena dikelilingi oleh bentang alam pegunungan dan daerah pertanian yang indah, sehingga potensi pengembangan pariwisata sangat menjanjikan.

Berdasarkan Distribusi PDRB, sektor yang menjadi sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 75,28% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23,84%; 2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

sebesar 20,61%; 3) Sektor Konstruksi sebesar 15,33%; 4) Sektor Jasa Pendidikan sebesar 10,12%; 5) Sektor Real Estate sebesar 5,38%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kota Pagar Alam pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 10) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kota Pagar Alam pada tahun 2025-2029, antara lain diarahkan pada:

- 1) Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah pusat pada D.I. Muara Riben.
- 2) Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 3) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 4) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 5) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 6) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, Peternakan dan hortikultura.
- 7) Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain Kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi and revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- 8) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses

alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/ pupuk dan pestisida berkualitas, mitigasi OPT dan Kesehatan hewan; peningkatan Infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.

- 9) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan, penguatan Kelembagaan koperasi dan korporasi petani, pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani, perluasan akses asuransi usaha tani: peningkatan Infrastruktur logistic dan perluasan akses layanan sistem resi gudang, pengelolaan penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 10) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 11) Pengembangan pariwisata (mendukung KSPN Pagar Alam dan sekitarnya).
- 12) Peningkatan ekonomi kreatif serta UMKM dengan skema kerja sama swasta dan komunitas lokal.
- 13) Pelestarian Kawasan Bersejarah Situs Purbakala Megalith.
- 14) Peningkatan akses jalan menuju Kota Pagar Alam dan jalur transportasi udara (Bandara Atung Bungsu).
- 15) Peningkatan produktivitas dan hilirisasi hasil perkebunan dan hortikultura.
- 16) Penataan Kawasan Rawan Bencana sekitar Gunung Dempo.
Pengembangan Pusat Kesehatan Perkotaan.
- 17) Penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan.
- 18) Peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan.
- 19) Menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung.
- 20) Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan, pariwisata, serta perdagangan.
- 21) Peningkatan daya saing dan kualitas SDM.

- 22) Beasiswa daerah untuk mempermudah akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
- 23) Optimalisasi pemberdayaan sosial, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah.
- 24) Pemberian bantuan yang bersifat pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Pengembangan Kota Pagar Alam diarahkan untuk menjadi **pusat pariwisata dataran tinggi berbasis sejarah dan alam, sentra hortikultura berkelanjutan, serta kota hijau yang mendukung ekonomi kreatif dan inklusif di Sumatera Selatan.**

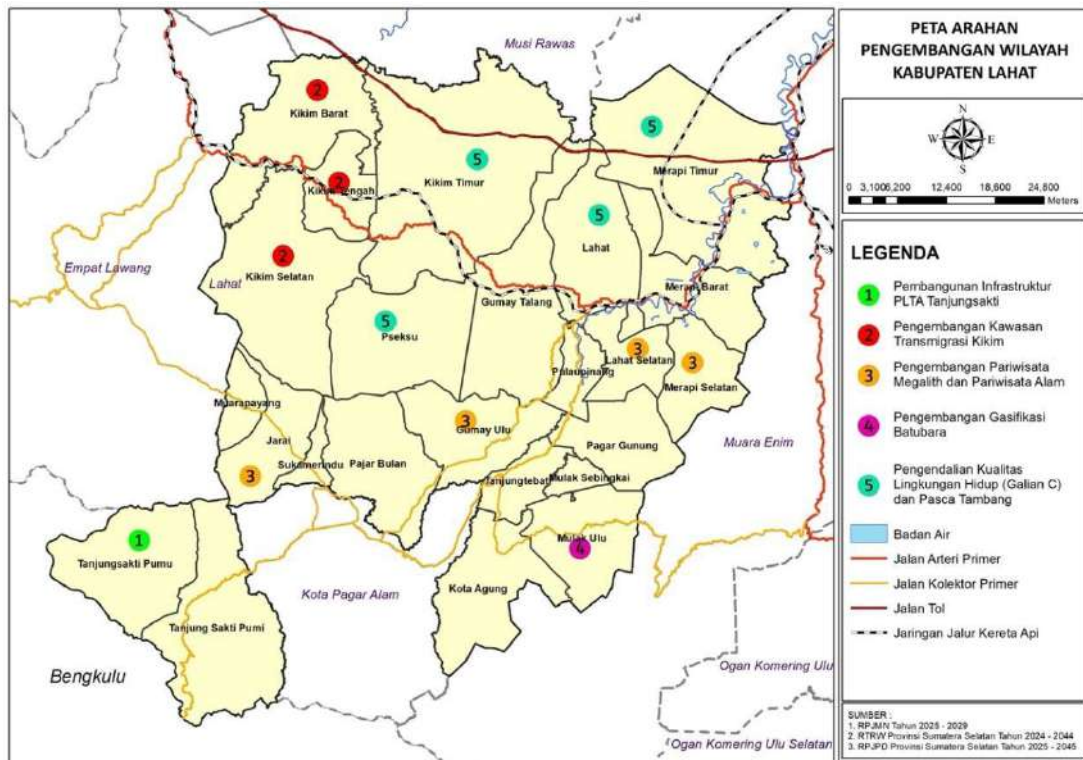
10. Kabupaten Lahat

Pembangunan di Kabupaten Lahat diharapkan untuk mendukung capaian makro provinsi sumatera selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Lahat sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Lahat

No	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,11	5,38 – 6,38	6,5 – 7,0
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	66,58	81,88	133,37
3	Tingkat Kemiskinan (%)	14,14	13,18 – 13,99	11,5 – 12,0
4	Gini Ratio	0,311	0,297 - 0,301	0,289 - 0,291
5	Indeks Pembangunan Manusia	72,83	73,33	76,08
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ -e)	N/A	187.024,11	258.654,63
7	IKLH Daerah	63,38	70,08	71,09
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,11	3,05	2,81

Sumber: Capaian 2024: BPS 2025, KLHK 2024; Target 2025 dan 2029: hasil analisa dengan mempertimbangkan kesepakatan desk makro kabupaten/kota pada Pra Musrenbang RKPD Sumatera Selatan Tahun 2026, Ranperda RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, dan proyeksi hasil kajian akademisi



Gambar 3. 19 Peta Arahlan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lahat

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Lahat memiliki 1 PKW, yaitu Lahat. Arah pengembangan Kabupaten Lahat yaitu, pengembangan potensi wisata minat khusus sejarah dan budaya dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang seimbang dan terpadu, pengembangan objek daya tarik wisata kawasan situs Megalith, penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan, serta menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung. Selanjutnya, Kabupaten Lahat memiliki 1 (satu) PSN yaitu Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati untuk mempercepat hilirisasi barang.

Dilihat Distribusi PDRB, sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 86,66% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 52,78%; 2) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,97%; 3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,88%; 4) Sektor Konstruksi sebesar 6,41%; 5) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,62%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Lahat pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 10) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Lahat (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Kereta Api Logistik Lahat – Kertapati

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Lahat pada tahun 2025-2029 antara lain diarahkan pada:

- 1) Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 2) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 3) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 4) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 5) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan dan hortikultura.
- 6) Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain Kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi and

revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.

- 7) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/ benih dan bibit berkualitas/ pupuk dan pestisida berkualitas' mitigasi OPT dan Kesehatan hewan; peningkatan Infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 8) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan, penguatan Kelembagaan koperasi dan korporasi petani: pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani: perluasan akses asuransi usaha tani: peningkatan Infrastruktur logistic dan perluasan akses layanan sistem resi gudang, dan pengelolaan penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 9) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 10) Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kikim.
- 11) Pengembangan gasifikasi batubara.
- 12) Pembangunan infrastruktur PLTA Tanjung Sakti.
- 13) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi, dan kelapa)
- 14) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi, dan kelapa)
- 15) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi, dan kelapa).
- 16) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 17) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi, dan kelapa.
- 18) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.

- 19) Melindungi Kawasan konservasi.
- 20) Pengembangan Pariwisata Megalith dan Pariwisata Alam.
- 21) Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup (Galian C) dan Pasca Tambang.
- 22) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana longsor.
- 23) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan peningkatan daya tarik pariwisata di Kabupaten Lahat melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas lokal.
- 24) Pemberian bantuan yang bersifat pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan sebagai upaya peningkatan ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan.
- 25) Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi untuk mendukung sektor industri, teknologi, dan pariwisata.
- 26) Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan tenaga Kesehatan.
- 27) Mendorong efisiensi iklim investasi di Kabupaten Lahat.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten Lahat diarahkan untuk menjadi **pusat pengembangan agribisnis, energi terbarukan, dan pariwisata berbasis sejarah dan alam, dengan infrastruktur modern serta lingkungan yang berkelanjutan.**

11. Kabupaten Empat Lawang

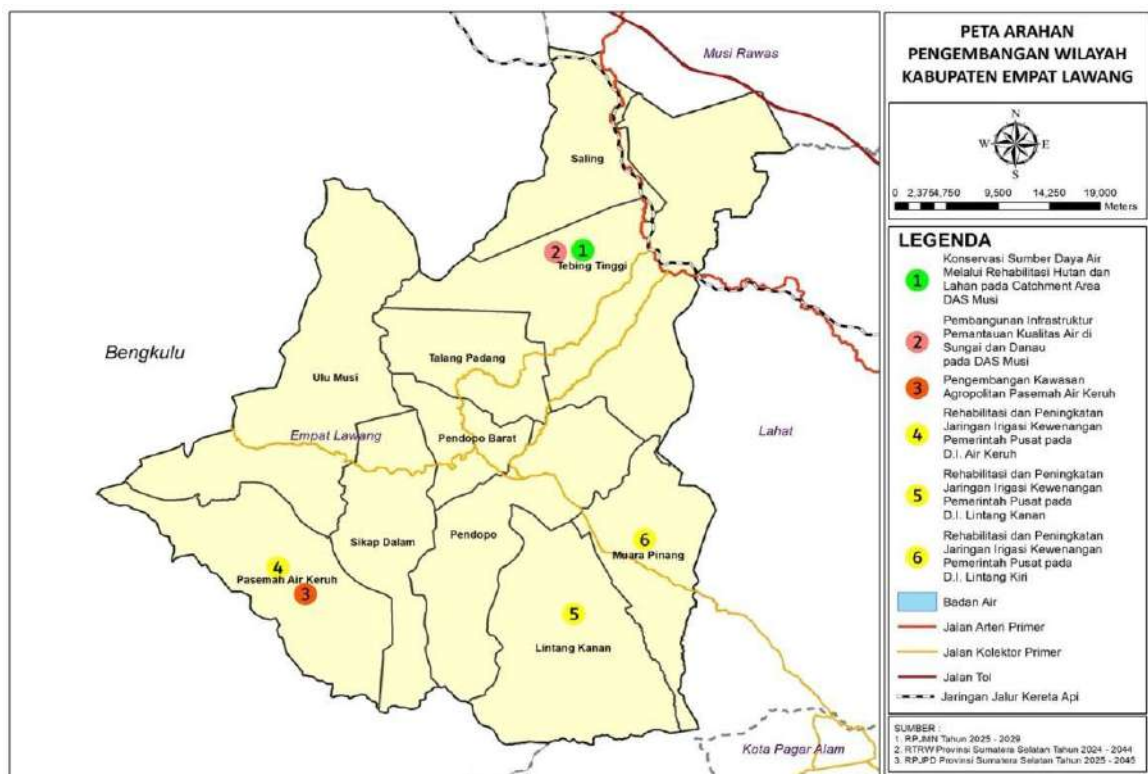
Pembangunan di Kabupaten Empat Lawang diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Empat Lawang sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Empat Lawang

No	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,44	4,95-5,00	4,95-5,00
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	19,45	19,82	22,60
3	Tingkat Kemiskinan (%)	10,78	10,25-10,92	8,0-8,5

No	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2029
4	Gini Ratio	0,396	0,290-0,328	0,322-0,320
5	Indeks Pembangunan Manusia	69,63	69,80	74,29
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	183.631,33	255.417,02
7	IKLH Daerah	65,85	66,67	67,68
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,84	2,80-3,20	2,7

Sumber: Capaian 2024: BPS 2025, Target 2025 dan 2029: hasil analisa dengan mempertimbangkan kesepakatan desk makro kabupaten/kota pada Pra Musrenbang RKPD Sumatera Selatan Tahun 2026, Ranperda RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, dan proyeksi hasil kajian akademisi



Gambar 3. 20 Peta Arahlan Pengembangan Wilayah Kabupaten Empat Lawang

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Empat Lawang memiliki 2 PKL (Tebing Tinggi dan Ulu Musi). Arahlan pengembangan Kabupaten Empat Lawang yaitu, pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perdagangan jasa dan pariwisata, diarahkan sebagai pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan, pengembangan potensi wisata minat khusus sejarah dan budaya dengan

pemanfaatan jasa lingkungan yang seimbang dan terpadu, Pengembangan kawasan agropolitan Pasemah Air Keruh, penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan; dan menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung.

Berdasarkan Distribusi PDRB Kabupaten Empat Lawang menurut lapangan usaha tahun 2024, terdapat tiga sektor lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan *share* sebesar 34,04%, 2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 22,61%, 3) Sektor Industri Pengolahan sebesar 12,21%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Empat Lawang pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 10) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2025-2029 antara lain diarahkan pada:

- 1) Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah pusat pada D.I. Air Keruh, D.I. Lintang Kanan, dan D.I. Lintang Kiri.
- 2) Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah daerah.
- 3) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).

- 4) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan Kawasan Peternakan).
- 5) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 6) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, Peternakan dan hortikultura.
- 7) Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain Kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi and revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- 8) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/ benih dan bibit berkualitas/ pupuk dan pestisida berkualitas, mitigasi OPT dan Kesehatan hewan; peningkatan Infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 9) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan, penguatan Kelembagaan koperasi dan korporasi petani, pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani, perluasan akses asuransi usaha tani: peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang, pengelolaan penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 10) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 11) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi.
- 12) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada DAS Musi.
- 13) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi, dan kelapa).

- 14) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi, dan kelapa).
- 15) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi, dan kelapa).
- 16) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 17) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi dan kelapa.
- 18) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 19) Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC).
- 20) Pengembangan destinasi wisata.
- 21) Pengembangan Kawasan Agropolitan Pasemah Air Keruh.
- 22) Peningkatan penangan dan pelayanan kesehatan melalui pemenuhan fasilitas kesehatan khususnya fasilitas kesehatan tingkat I.
- 23) Peningkatan kapasitas pengelolaan teknologi informasi dan digitalisasi pemerintah daerah terutama dalam mendukung percepatan pelayanan publik berbasis digital.
- 24) Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM penanggulangan bencana.
- 25) Inklusivitas pembangunan di antara berbagai kelas ekonomi.

Berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten Empat Lawang diarahkan untuk menjadi **pusat pengembangan pertanian terpadu, agribisnis berkelanjutan, dan ekowisata berbasis sumber daya alam, dengan dukungan infrastruktur modern serta pelayanan publik berbasis digital.**

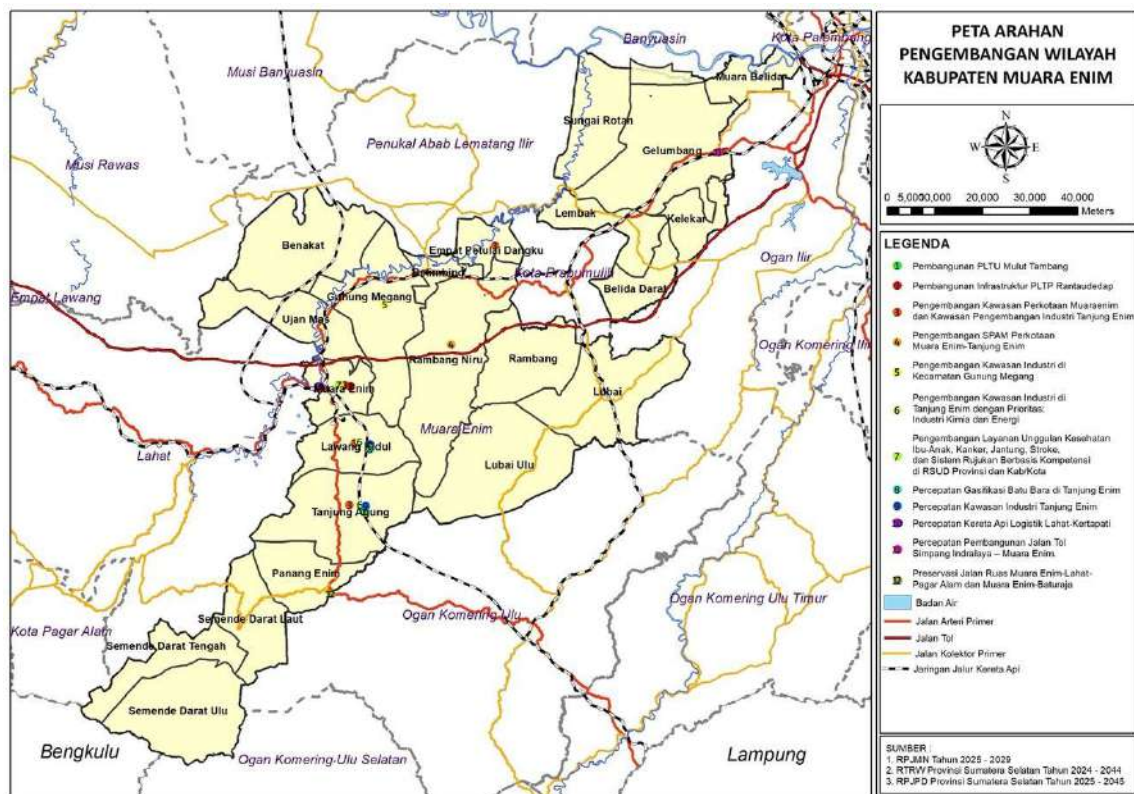
12. Kabupaten Muara Enim

Pembangunan di Kabupaten Muara Enim diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Muara Enim sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Muara Enim

No	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,89	7,01	8,28
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	182,11	193,73	256,17
3	Tingkat Kemiskinan (%)	9,79	9,49	7,0-7,5
4	Gini Ratio	0,309	0,312 - 0,307	0,300 - 0,295
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,10	73,67	75,93
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	8.005.066,77	11.101.306,29
7	IKLH Daerah	64,35	66,74	67,75
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,09	3,88	3,54

Sumber: Capaian 2024: BPS 2025, KLHK 2024; Target 2025 dan 2029: hasil analisa dengan mempertimbangkan kesepakatan desk makro kabupaten/kota pada Pra Musrenbang RKPD Sumatera Selatan Tahun 2026, Ranperda RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029, dan proyeksi hasil kajian akademisi

**Gambar 3. 21 Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Muara Enim**

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Muara Enim memiliki 1 PKW, yaitu Muara Enim. Arah pengembangan Kabupaten Muara Enim yaitu, pusat industri pertambangan batubara dan turunannya, sebagai lumbung energi, pengembangan kawasan perkotaan Muara Enim untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan di sekitarnya, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengembangan kawasan industri di kecamatan Gunung Megang, Pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan mendukung keberlanjutan energi nasional, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan, dan penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan kawasan.

Dilihat distribusi PDRB, sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 94,73% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 69,59%; 2) Sektor Industri Pengolahan sebesar 9,7%; 3) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,26%; 4) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,87%; dan 5) Sektor Konstruksi sebesar 3,31%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Muara Enim pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 8) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 9) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 10) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 11) Pembangunan 3 juta rumah.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Muara Enim (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Kawasan Industri Tanjung Enim.
- 2) Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim bagian dari Trans Sumatera sepanjang 119 km.
- 3) Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati.
- 4) Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim.
- 5) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2025-2029 antara lain diarahkan pada:

- 1) Pengembangan Kawasan Perkotaan Muaraenim dan Kawasan Pengembangan Industri Tanjung Enim.
- 2) Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Muara Enim, antara lain melalui:
 - Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu.
 - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau.
 - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan.
 - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan.
- 3) Pengembangan industri hilirisasi/industrialisasi di Tanjung Enim.
- 4) Hilirisasi hasil tambang batubara, termasuk produk-produk turunan, seperti briket, gasifikasi batubara, dan karbon aktif.
- 5) Pengembangan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, gen z, dan gen milenial di Kawasan Perkotaan Muara Enim (PHTC).
- 6) Pengembangan SPAM Perkotaan Muara Enim-Tanjung Enim.
- 7) Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim (PHTC).
- 8) Preservasi jalan ruas Muara Enim-Lahat-Pagar Alam dan Muara Enim-Baturaja.
- 9) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan /peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah.

- 10) Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 11) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 12) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan Kawasan Peternakan).
- 13) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 14) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, Peternakan dan hortikultura.
- 15) Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain Kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi and revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- 16) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/ benih dan bibit berkualitas/ pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan Kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 17) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan, penguatan Kelembagaan koperasi dan korporasi petani, pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani, perluasan akses asuransi usaha tani: peningkatan Infrastruktur logistic dan perluasan akses layanan sistem resi Gudang, pengelolaan penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 18) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 19) Pembangunan infrastruktur PLTP Rantau Dedap.
- 20) Pembangunan PLTU Mulut Tambang.

- 21) Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Muara Enim-Tarahan-Kalianda.
- 22) Pembangunan infrastruktur sistem jaringan transmisi listrik 275 kV Lumutbalai-Muara Enim-Gumawang-GITET 275 kV Lampung 1.
- 23) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 24) Pengembangan dan perlindungan Kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 25) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 26) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 27) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi dan kelapa.
- 28) Pengembang produksi bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 29) Indikasi daerah prioritas intervensi program Makan Bergizi Gratis, bantuan pangan, dan penanganan rawan pangan (PHTC).
- 30) Pengendalian kualitas lingkungan hidup.
- 31) Pengembangan destinasi pariwisata.
- 32) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
- 33) Penurunan *stunting*.
- 34) Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Gunung Megang.
- 35) pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional.
- 36) peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan.
- 37) Optimalisasi verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui pemanfaatan data regsosek.
- 38) Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur *high value economy & industry*.
- 39) Penguatan sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

- 40) Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan tenaga kesehatan.
- 41) Peningkatan pengetahuan sumber daya manusia terkait dengan mitigasi bencana.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten Muara Enim diarahkan untuk menjadi **pusat pengembangan industri berbasis energi dan sumber daya alam, dengan fokus pada hilirisasi sektor pertambangan, penguatan infrastruktur, serta pengembangan kawasan ekonomi dan pariwisata.**

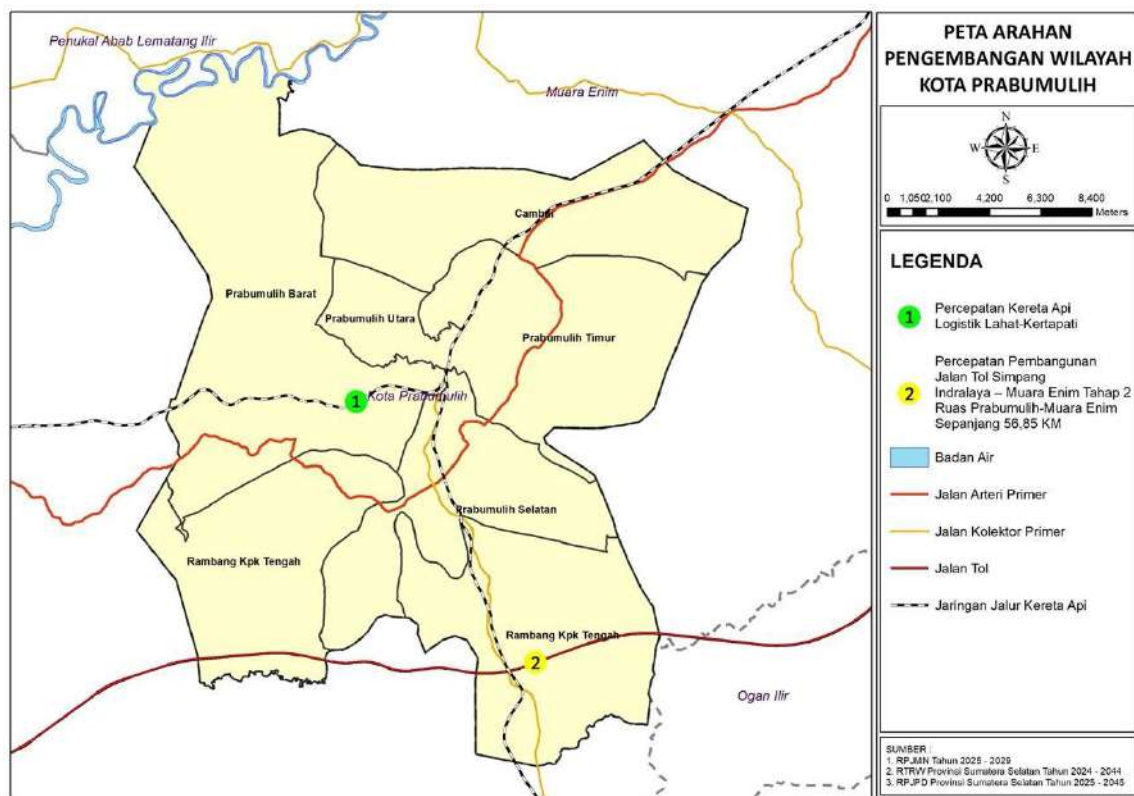
13. Kota Prabumulih

Pembangunan di Kota Prabumulih diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kota Prabumulih sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Capaian dan Target Indikator Makro Kota Prabumulih

No	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,01	5,3	6,1
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	51,81	54,03	64,07
3	Tingkat Kemiskinan (%)	10,13	10,0	7,5-8,0
4	Gini Ratio	0,353	0,347	0,339
5	Indeks Pembangunan Manusia	78,68	79,05	79,75
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ -e)	n/a	26.375,98	44.104,09
7	IKLH Daerah	62,79	62,17	63,18
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,94	4,85	4,43

Sumber: Capaian 2024: BPS 2025, KLHK 2024; Target 2025 dan 2029: hasil analisa dengan mempertimbangkan kesepakatan desk makro kabupaten/kota pada Pra Musrenbang RKPD Sumatera Selatan Tahun 2026, Ranperda RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, dan proyeksi hasil kajian akademisi



Gambar 3. 22 Peta Arahlan Pengembangan Wilayah Kota Prabumulih

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kota Prabumulih digolongkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Selain itu, Kota Prabumulih memiliki 2 (dua) kegiatan PSN meliputi pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim bagian dari Trans Sumatera sepanjang 119 km dan Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati. Arahlan pengembangan Kota Prabumulih yaitu, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan, dan penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan kawasan.

Berdasarkan Distribusi PDRB, sektor yang menjadi sumber utama pertumbuhan daerah di Kota Prabumulih pada tahun 2024 berdasarkan sektor lapangan usaha terdapat 5 (lima) sektor yang memberikan kontribusi sebesar 70,90% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 27,15%; 2) Sektor Konstruksi sebesar 17,12%; 3) Sektor Industri

Pengolahan sebesar 10,85%; 4) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,20%; dan 5) Sektor Real Estate sebesar 7,58%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kota Prabumulih pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 10) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kota Prabumulih (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Pembangunan jalan tol Simpang Indralaya–Muara Enim tahap 2 Ruas Prabumulih-Muara Enim sepanjang 56,85 km.
- 2) Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kota Prabumulih pada tahun 2025-2029 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan produktivitas perkebunan menuju kedaulatan pangan.
- 2) Pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- 3) Pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional.
- 4) Peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan.
- 5) Optimalisasi industri dan UMKM pengolahan produk unggulan daerah seperti hilirisasi produk nanas.
- 6) Peningkatan daya saing dan kualitas SDM.

- 7) Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi untuk mendukung sektor industri, teknologi, dan pariwisata.
- 8) Pemutakhiran rutin dan pemanfaatan data regsosek.
- 9) Pemerataan kapasitas, kualitas, dan kuantitas pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan perlindungan sosial adaptif dan inklusif di kantong kemiskinan berdasarkan *spatial based policy*.
- 10) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesadaran masyarakat terkait lingkungan.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kota Prabumulih diarahkan untuk menjadi **kota industri, energi, dan agroindustri berwawasan lingkungan dengan konektivitas tinggi serta kualitas hidup yang baik**.

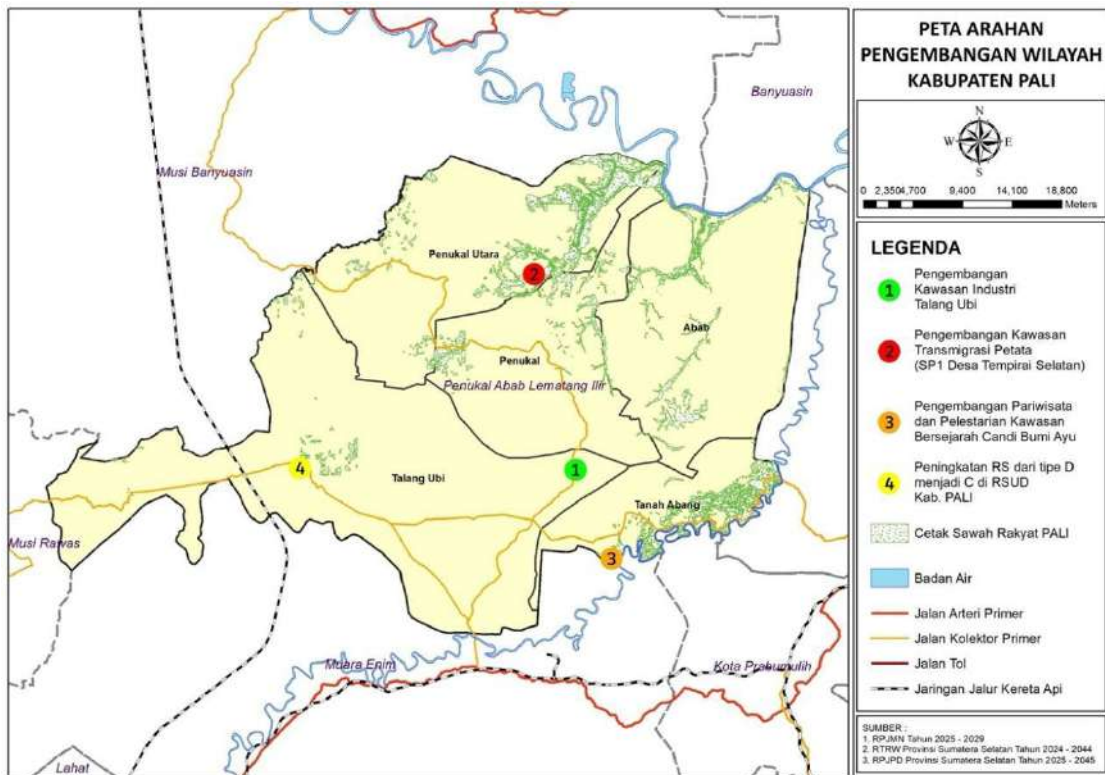
14. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Pembangunan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai berikut:

**Tabel 3. 19 Capaian dan Target Indikator Makro
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir**

No	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,98	5,2	5,5 – 6,0
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	45,70	47,56	88,11
3	Tingkat Kemiskinan (%)	9,82	9,3	6,50
4	Gini Ratio	0,293	0,290	0,279
5	Indeks Pembangunan Manusia	69,63	70,99	73,27
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ -e)	n/a	287.342,64	430.418,14
7	IKLH Daerah	71,02	67,95	68,96
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,72	3,65	3,5

Sumber: Capaian 2024: BPS 2025, KLHK 2024; Target 2025 dan 2029: hasil analisa dengan mempertimbangkan kesepakatan desk makro kabupaten/kota pada Pra Musrenbang RKPD Sumatera Selatan Tahun 2026, Ranperda RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, dan proyeksi hasil kajian akademisi



Gambar 3. 23 Peta Arahlan Pengembangan Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki 1 PKL (PKL Talang Ubi/Pendopo). Arahlan pengembangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai bagian dari KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya yaitu, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengembangan kawasan industri di Kawasan Industri Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pengembangan kawasan wisata Candi Bumi Ayu di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan, dan penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan kawasan.

Berdasarkan Distribusi PDRB Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menurut lapangan usaha tahun 2024, terdapat 4 (empat) sektor lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 38,94%, 2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,26%, 3) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 15,68% dan 4) Sektor Konstruksi dengan *share* sebesar 14,91%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 10) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2025-2029 antara lain diarahkan pada:

- 1) Pengembangan Kawasan Transmigrasi Petata (SP1 Desa Tempirai Selatan).
- 2) Peningkatan RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kab. Penukal Abab Lematang Ilir.
- 3) Peningkatan Produktivitas Perkebunan dan kualitas produksi (sawit dan karet).
- 4) Pengembangan dan perlindungan Kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit dan karet).
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit dan karet).
- 6) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit dan karet).

- 7) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit dan karet.
- 8) Pengembang produksi bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 9) Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan untuk mendukung kedaulatan pangan.
- 10) Pengembangan Pariwisata dan Pelestarian Kawasan Bersejarah Candi Bumi Ayu.
- 11) Pengembangan Kawasan Industri Talang Ubi.
- 12) Melindungi Kawasan lindung gambut.
- 13) Pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- 14) Pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional.
- 15) Peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan.
- 16) Diversifikasi ekonomi melalui optimalisasi hilirisasi sektor unggulan daerah seperti pertanian dan perkebunan.
- 17) Peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia.
- 18) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan peningkatan daya tarik pariwisata melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas lokal.
- 19) Pemberian bantuan yang bersifat pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan
- 20) Pemutakhiran rutin dan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
- 21) Pemerataan kapasitas, kualitas, dan kuantitas pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan perlindungan sosial adaptif dan inklusif di kantong kemiskinan berdasarkan *spatial based policy*.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten PALI diarahkan untuk menjadi **pusat industri berbasis perkebunan dan energi berkelanjutan, dengan konektivitas tinggi dan ekonomi inklusif yang berbasis budaya lokal.**

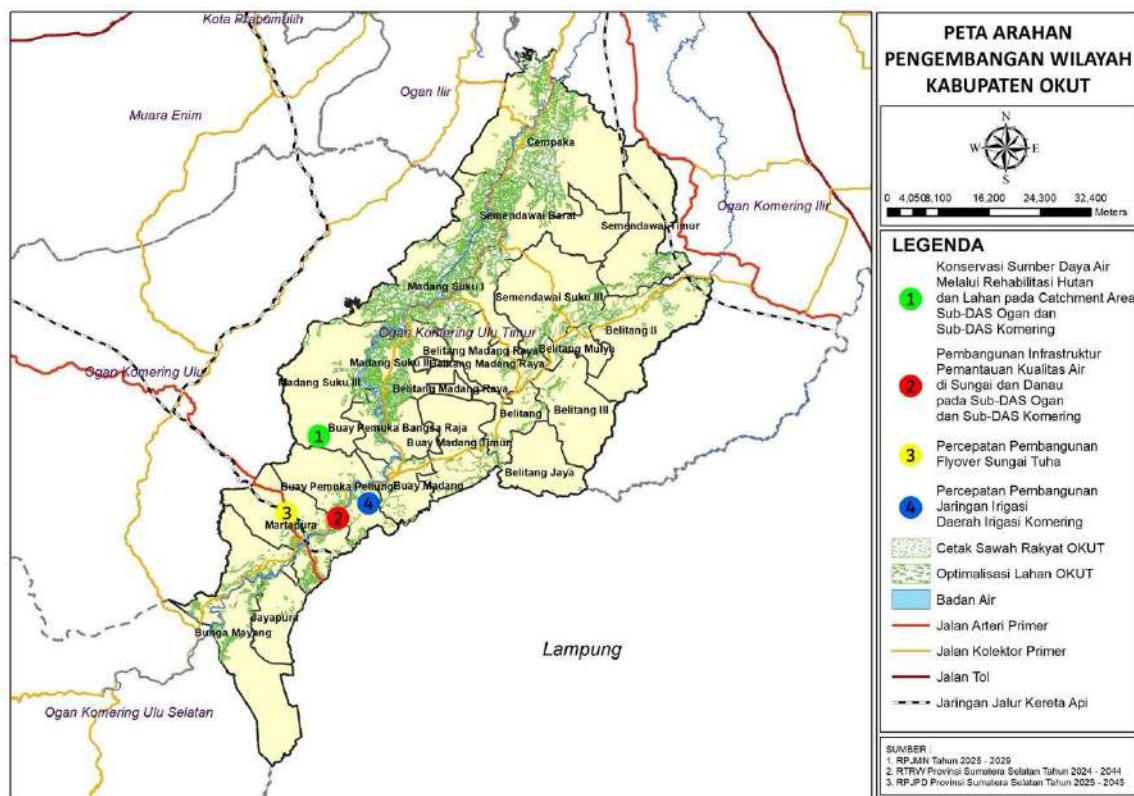
15. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai berikut:

**Tabel 3. 20 Capaian dan Target Indikator Makro
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur**

No	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,12	5,1 – 5,6	5,1 – 5,6
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	31,50	31,98	37,66
3	Tingkat Kemiskinan (%)	9,75	9,6	6,5–7,0
4	Gini Ratio	0,298	0,240 – 0,290	0,215 – 0,265
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,64	74,00	76,32
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ -e)	n/a	273.154,65	388.895,13
7	IKLH Daerah	68,73	66,30	67,31
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,45	3,3	2,9

Sumber: Capaian 2024: BPS 2025, KLHK 2024; Target 2025 dan 2029: hasil analisa dengan mempertimbangkan kesepakatan desk makro kabupaten/kota pada Pra Musrenbang RKPD Sumatera Selatan Tahun 2026, Ranperda RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, dan proyeksi hasil kajian akademisi



Gambar 3. 24 Peta Arahkan Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki 2 Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu di Gumawang dan Martapura. Arahkan pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai bagian dari KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya yaitu, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan *biodiesel/biofuel* berbasis kelapa sawit, pengembangan *food estate* sentra produksi padi, dan menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

Dilihat Distribusi PDRB, sumber utama pertumbuhan sebanyak 5 (lima) sektor pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 32,35%; 2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,66%; 3) Sektor Konstruksi sebesar 17,92%; 4) Sektor Industri Pengolahan sebesar 10,01%; dan 5) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,80%.

Arahkan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 8) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 9) Pembangunan 3 juta rumah.
- 10) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 11) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati khususnya proyek *flyover* Sungai Tuha.
- 2) Pembangunan Jaringan Irigasi DI Komering.
- 3) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Tahun 2025-2029 antara lain diarahkan pada:

- 1) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah.
- 2) Pengembangan KSPP Sumatera Selatan.
- 3) Peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi).
- 4) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 5) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 6) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 7) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
- 8) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan

pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida /pakan organik.

- 9) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascaPanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 10) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 11) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 12) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering.
- 13) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering.
- 14) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 15) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 16) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 17) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa)

- 18) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi dan kelapa.
- 19) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 20) Menjaga kawasan yang berfungsi lindung.
- 21) Pendekatan pengembangan pertanian holistik melalui model *closed-loop*.
- 22) Peningkatan kerjasama perdagangan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.
- 23) Mendorong realisasi investasi sektor riil dan peningkatan nilai tambah sektor unggulan daerah.
- 24) Pemanfaatan data Regsosek sebagai upaya peningkatan akurasi data penerima bantuan sosial.
- 25) Pemerataan kualitas pelayanan dasar dan kapasitas SDM tenaga kesehatan maupun tenaga pendidik.
- 26) Standarisasi sarana prasarana antar sekolah dan fasilitas kesehatan.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diarahkan untuk menjadi **pusat ketahanan pangan dan agribisnis unggulan berkelanjutan, dengan infrastruktur pendukung yang kuat serta daya saing ekonomi berbasis inovasi dan investasi.**

16. Kabupaten Ogan Komering Ulu

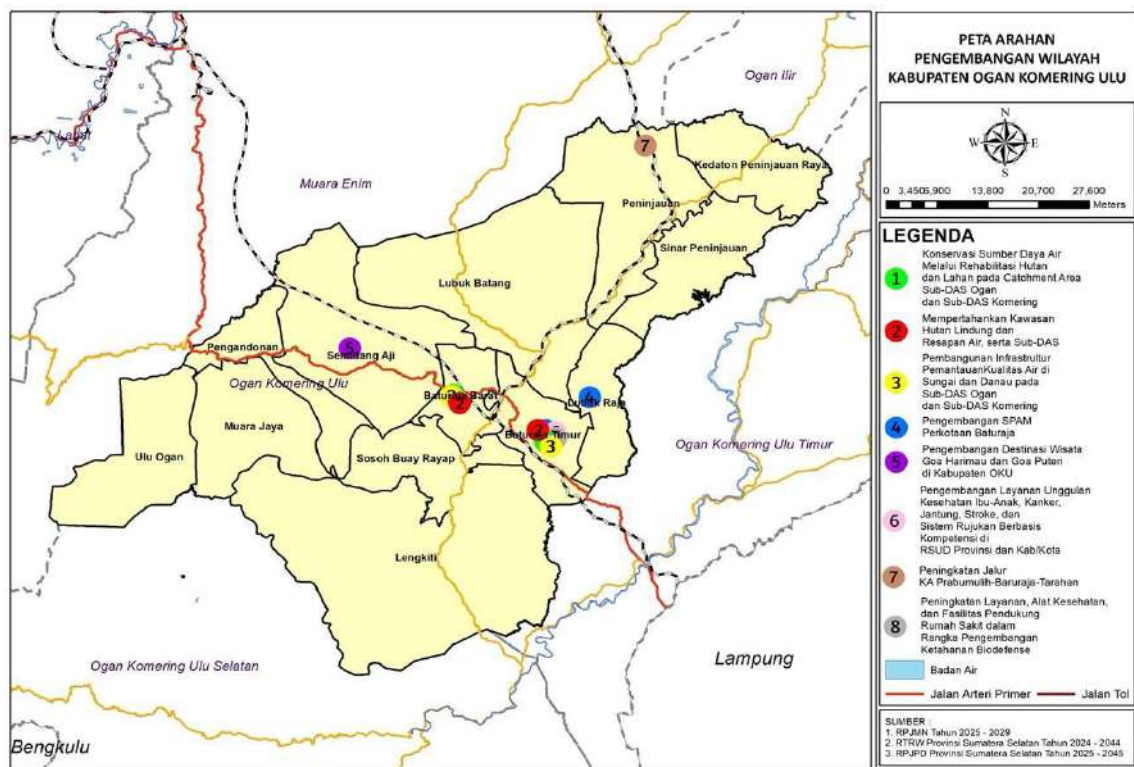
Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) diharapkan dapat mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten OKU sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu

No	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,06	5,30 – 5,60	6,5 – 7,0
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	53,43	54,52-55,10	64,96
3	Tingkat Kemiskinan (%)	10,68	10,30 -10,70	8,18 – 8,25
4	Gini Ratio	0,334	0,317-0,316	0,309-0,304

No	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2029
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,70	74,20	76,72
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ -e)	N/A	204.268,67	275.737,77
7	IKLH Daerah	67,94	68,75	69,76
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,05	3,85-3,97	3,41 – 3,73

Sumber: Capaian 2024: BPS 2025, KLHK 2024; Target 2025 dan 2029: hasil analisa dengan mempertimbangkan kesepakatan desk makro kabupaten/kota pada Pra Musrenbang RKPD Sumatera Selatan Tahun 2026, Ranperda RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029, dan proyeksi hasil kajian akademisi



Gambar 3. 25 Peta Arahlan Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki 1 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Baturaja, dan 2 Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pengandonan dan Peninjauan. Arah pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai bagian dari KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya diantaranya, pengembangan kawasan wisata Goa Harimau dan Goa Puteri, pengembangan potensi kawasan melalui

pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, dan menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

Dilihat distribusi PDRB, sumber pertumbuhan wilayah sebanyak 4 (empat) sektor dengan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB pada tahun 2024 adalah 1) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,70%, 2) Industri pengolahan sebesar 19,30%, 3) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 16,07%, dan 4) Pertambangan dan penggalan sebesar 13,36%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 7) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 10) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2025-2029, antara lain diarahkan pada:

- 6) Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Baturaja, antara lain melalui:
 - Penyusunan *masterplan* penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu
 - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau
 - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
 - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
- 7) Pengembangan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, gen z, dan gen milenial di Kawasan Perkotaan Baturaja (PHTC).
- 8) Pengembangan SPAM Perkotaan Baturaja.
- 9) Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja (PHTC).
- 10) Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan *biodefense* pada RS Tk-III dr. Noesmir Baturaja.
- 11) Preservasi jalan ruas Baturaja-Martapura, Baturaja-Prabumulih, dan Baturaja-Muaradua.
- 12) Pengembangan kota agropolitan Baturaja.
- 13) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah.
- 14) Pengembangan KSPP Sumatera Selatan.
- 15) Peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi).
- 16) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 17) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 18) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 19) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
- 20) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan

pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.

- 21) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascaPanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 22) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 23) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
- 24) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering.
- 25) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering.
- 26) Peningkatan Jalur KA Prabumulih-Baturaja-Tarahan.
- 27) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 28) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi dan kelapa)
- 29) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 30) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 31) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi dan kelapa.

- 32) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 33) Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC).
- 34) Pengembangan destinasi wisata Goa Harimau dan Goa Puteri di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- 35) Mempertahankan Kawasan Hutan Lindung dan resapan air, serta Sub-DAS.
- 36) Pengembangan Kawasan Industri.
- 37) Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- 38) Mempercepat hilirisasi dari sektor-sektor unggulan daerah.
- 39) Mengimplementasikan kebijakan yang dapat meningkatkan kemudahan berusaha guna menjaga momentum pergeseran struktur ekonomi menuju sektor sekunder.
- 40) Peningkatan daya saing dan kualitas SDM.
- 41) Mengadakan program pelatihan spesifik sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam rangka meningkatkan *employability* dari para tenaga kerja.
- 42) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat pelayanan dasar melalui pembangunan unit sekolah baru dan puskesmas pembantu.
- 43) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
- 44) Intensifikasi kegiatan pemeriksaan *Antenatal Care (ANC)* terutama di daerah dengan akses kesehatan yang cenderung terbatas.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu diarahkan untuk menjadi **pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industri, agribisnis, dan perkotaan yang berkelanjutan, dengan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang unggul serta daya saing yang tinggi.**

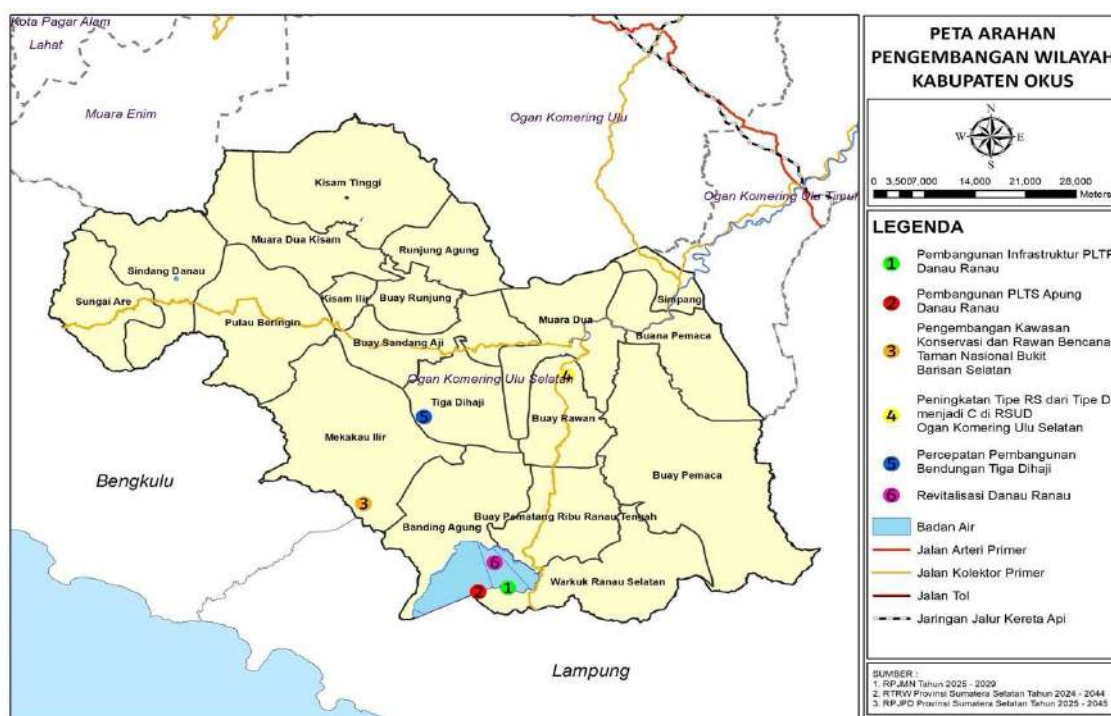
17. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten OKU Selatan

No	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,58	4,65	5,50
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	27,72	28,62	33,57
3	Tingkat Kemiskinan (%)	9,86	9,0-9,5	7,1-7,3
4	Gini Ratio	0,356	0,310 – 0,315	0,265 – 0,278
5	Indeks Pembangunan Manusia	70,00	72,4	82
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	155.181,23	213.266,84
7	IKLH Daerah	69,34	69,60	70,62
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,80	1,79	1,73

Sumber: Capaian 2024: BPS 2025, Target 2025 dan 2029: hasil analisa dengan mempertimbangkan kesepakatan desk makro kabupaten/kota pada Pra Musrenbang RKPD Sumatera Selatan Tahun 2026, Ranperda RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, dan proyeksi hasil kajian akademisi



Gambar 3. 26 Peta Arahlan Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki 1 (satu) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan 1 (satu)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Muaradua. Arah pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai bagian dari KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya yaitu, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengembangan kawasan ekonomi terpadu Danau Ranau, pengembangan kawasan wisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi alam Danau Ranau berupa pengembangan pelabuhan dermaga Danau Ranau dan dermaga wisata, Pengembangan energi panas bumi Ulu Danau sebagai salah satu energi terbarukan, pengembangan potensi sumber daya mineral logam bijih besi, pengembangan *food estate* sentra produksi padi, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan melalui pengembangan jaringan jalan dan bandara udara Banding Agung, serta menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

Dilihat Distribusi PDRB, sumber pertumbuhan wilayah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 84,36% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024 adalah 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 29,77 %; 2) Perdagangan sebesar 24,43%; 3) Konstruksi sebesar 17,42%; 4) Sektor Industri Pengolahan sebesar 8,19%; dan 5) Sektor *Real Estate* sebesar 4,55 %.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 7) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 10) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu Bendungan Tiga Dihaji.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2025-2029, antara lain diarahkan pada:

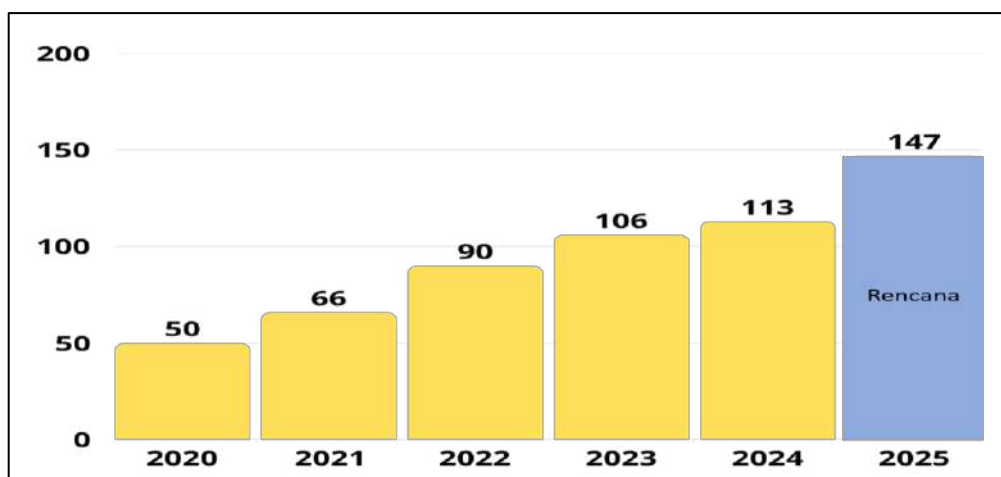
- 1) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering.
- 2) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering.
- 3) Revitalisasi Danau Ranau.
- 4) Pembangunan infrastruktur PLTP Danau Ranau.
- 5) Pembangunan PLTS Apung Danau Ranau.
- 6) Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Ogan Komering Ulu Selatan.
- 7) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 8) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 9) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 10) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 11) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi dan kelapa.
- 12) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 13) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
- 14) Pelestarian Kawasan Situs Bersejarah.
- 15) Peningkatan kerjasama dengan kawasan perbatasan.
- 16) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, serta longsor.
- 17) Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- 18) Peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi.
- 19) Menjaga kawasan yang berfungsi lindung.
- 20) Perluasan akses internet dan digitalisasi.

- 21) Mempercepat industrialisasi dan pemberdayaan aktivitas ekonomi dari sektor-sektor unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.
- 22) Dukungan promosi dan kemudahan investasi.
- 23) Mengadakan program pelatihan spesifik yang sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
- 24) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan dasar melalui pembangunan unit sekolah baru dan penguatan peran puskesmas pembantu.
- 25) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan serta standarisasi kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diarahkan untuk menjadi **kawasan ekonomi hijau berbasis agribisnis, energi terbarukan, dan konservasi lingkungan, dengan infrastruktur berkelanjutan serta ketahanan bencana yang tangguh.**

3.2.2.6 Pembangunan Jalan Khusus Batubara

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah penghasil batubara terbesar di Indonesia, dengan produksi yang meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir. Tahun 2024, produksi batubara mencapai 113,29 juta ton, melampaui capaian tahun sebelumnya sebesar 105,85 juta ton. Proyeksi tahun 2025 bahkan menargetkan produksi hingga 147,33 juta ton. Lonjakan produksi ini menuntut sistem transportasi batubara yang efisien, aman, dan ramah lingkungan. Salah satu kebijakan strategis untuk mendukung hal tersebut adalah pembangunan **Jalan Khusus Batubara** yang terpisah dari jalan umum.



Gambar 3. 27 Produksi Batubara Sumatera Selatan 2024-2025 (juta ton)

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Tabel 3. 23 Perusahaan dengan Produksi Batubara Terbesar Tahun 2024

No	Perusahaan	Produksi (Ton)
1	PT. Bukit Asam, Tbk.	41.999.196,14
2	PT. Mustika Indah Permai	5.997.769,80
3	PT. Budi Gema Gempita	4.252.292,80
4	PT. Dizamatra Powerindo	3.975.931,50
5	PT. Trimata Benua	3.249.356,48
6	PT. Bara Alam Utama	2.999.999,14
7	PT. Gorby Putra Utama	2.918.188,10
8	PT. Putra Muba Coal	2.892.603,31
9	PT. Manambang Muara Enim	2.789.603,09
10	PT. Baturona Adimulya	2.499.699,66

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Menindaklanjuti hal ini, Gubernur Sumatera Selatan telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 500.11-004-Instruksi/Dishub/2025 tentang Pelarangan Angkutan Batubara melalui Jalan Umum yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. Implementasi kebijakan ini membutuhkan percepatan penyelesaian pembangunan jaringan jalan khusus batubara di wilayah strategis, terutama di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat.

Pembangunan Jalan Khusus Batubara bertujuan untuk:

- Menyediakan infrastruktur khusus untuk angkutan batubara agar tidak mengganggu lalu lintas umum.

- Menurunkan angka kecelakaan dan kerusakan jalan umum akibat kendaraan berat angkutan tambang.
- Meningkatkan efisiensi logistik dari lokasi tambang ke pelabuhan.
- Mendukung target produksi nasional dan daerah dengan memperlancar rantai pasok batubara.
- Menunjang pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja.

**Tabel 3. 24 Jalan Khusus Batubara (Eksisting)
di Provinsi Sumatera Selatan**

No.	Perusahaan	Jarak (Km)	Trase
1	PT. Servo Lintas Raya	120	Pelabuhan PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya di Kabupaten PALI hingga <i>Stockpile</i> Muara Tiga Besar PT. Bukit Asam, Tbk, Kabupaten Muara Enim
2	PT. Musi Mitra Jaya	133	Pelabuhan PT. Sriwijaya Bara Logistik di Kabupaten Musi Banyuasin hingga <i>Stockpile</i> PT. Gorby Putra Utama, Kabupaten Musi Rawas Utara
3	PT. Energate Prima Indonesia	51	Pelabuhan PT. Energate Prima Indonesia di Kabupaten PALI hingga Desa Benuang, Kabupaten PALI

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, 2025

**Tabel 3. 25 Rencana Pembangunan Jalan Khusus Batubara
di Provinsi Sumatera Selatan**

No.	Perusahaan	Jarak (Km)	Trase
1	PT. Servo Lintas Raya	28	<i>Stockpile</i> Muara Tiga Besar PT. Bukit Asam, Tbk, Kab. Muara Enim hingga <i>Stockpile</i> PT. Bara Anugrah Sejahtera, Kab. Muara Enim
2	PT. Abani Andalus Energi	120	Desa Benuang, Kab. PALI hingga Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim
3	PT. Tiga Putri Bersaudara	30	Simpang PT. Muara Alam Sejahtera, Kab. Lahat hingga <i>Stockpile</i> KM 107 PT. Servo Lintas Raya, Kab. Muara Enim

No.	Perusahaan	Jarak (Km)	Trase
4	PT. RMK Energy	85	<i>Emplacement</i> PT. Truba Bara Banyu Enim, Gunung Megang hingga WIUP PT. Duta Energy Mineratama, Tanjung Enim
5	PT. Marga Bara Jaya	92	<i>Stockpile</i> PT. Triaryani, Kabupaten Musi Rawas Utara hingga Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin
6	PT RMK	43,5	IUP PT Manambang Muara Enim (PT MME) menuju <i>emplacement</i> PT RMK di Gunung Megang, melewati IUP Bangko Barat PT Bukit Asam, Tbk dan IUP PT Wiraduta Sejahtera Langgeng
7	PT Servo Lintas Raya	36,27	IUP PT Bara Anugerah Sejahtera (PT BAS) menuju Jalan Servo Lintas Raya (SLR) yang melewati IUP PT. Batubara Bukit Kendi (PT. BBK), PT. Kasih Karya Agung (PT. KKA), IUP PT. Cakra Gemilang Mandiri (PT. CGM), IUP Muara Tiga Besar PT. BA (MTB PTBA), PT. Golden Great Borneo (PT. GGM), PT. Banjasari Pribumi (PT. BP) dan PT. Budi Gema Gempita (PT. BGG)

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Tabel 3. 26 Pelabuhan Khusus di Provinsi Sumatera Selatan (Eksisting dan Rencana)

No	Pelabuhan	Lokasi	Komoditas	Status
1	PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya	PALI	Batubara	Eksisting
2	PT. Sriwijaya Bara Logistik	Musi Banyuasin	Batubara	Eksisting
3	PT. Energate Prima Indonesia	PALI	Batubara	Eksisting
4	PT. Dizamatra Powerindo (Patra Tani)	Muara Enim	Batubara	Eksisting
5	PT. RMK Energy, Tbk	Muara Enim	Batubara	Eksisting
6	PT. Wahana Bara Sentosa	Palembang	Batubara	Eksisting
7	PT. Fortuna Marina Sejahtera	Palembang	Batubara	Eksisting
8	PT. Muara Alam Sejahtera	Palembang	Batubara	Eksisting
9	PT. Bara Alam Utama	Palembang	Batubara	Eksisting
10	PT. Bukit Asam, Tbk.	Palembang	Batubara	Eksisting

No	Pelabuhan	Lokasi	Komoditas	Status
11	PT. Baturona Adimulya	Musi Banyuasin	Batubara	Eksisting
12	PT. Bara Mutiara Prima	Musi Banyuasin	Batubara	Eksisting
13	PT. Tempirai Energy Resources	Musi Banyuasin	Batubara	Eksisting
14	PT. Uci Jaya	Musi Banyuasin	Batubara	Eksisting
15	PT. Basin Coal Mining	Musi Banyuasin	Batubara	Eksisting
16	PT. Bhumi Sriwijaya Perdana Coal	Musi Banyuasin	Batubara	Eksisting
17	PT. Tigadaya Minergy	Musi Banyuasin	Batubara	Eksisting
18	PT. Putra Muba Coal	Musi Banyuasin	Batubara	Eksisting
19	PT. Lais Coal Mine	Musi Banyuasin	Batubara	Eksisting
20	PT. Trimata Benua	Banyuasin	Batubara	Eksisting
21	Dermaga Keramasan PTBA	Palembang	Batubara	Rencana
22	Palembang New Port (Tanjung Carat)	Banyuasin	Batubara	Rencana
23	PT. Karyatama Sukses Makmur	Ogan Komering Ilir	Pasir Kuarsa	Rencana
24	PT. Widari Mas Perkasa	Ogan Komering Ilir	Pasir Kuarsa	Rencana

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Arah kebijakan pembangunan jalan khusus batubara diarahkan pada:

1. Percepatan penyelesaian jalan khusus, sebagai bagian dari tulang punggung logistik batubara Sumsel.
2. Peningkatan fasilitasi koordinasi lintas perusahaan dan instansi dalam penyelesaian perizinan dan pengamanan trase.
3. Integrasi pembangunan jalan khusus dengan rencana pelabuhan khusus, guna memperlancar distribusi batubara hingga ke pasar ekspor.
4. Penguatan dukungan legal dan regulasi daerah, termasuk penyesuaian dengan RTRW dan RDTR untuk mengakomodasi jalur tambang.
5. Pemanfaatan teknologi dan implementasi manajemen risiko, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang melintasi pipa migas dan sungai besar.

Pembangunan jalan khusus batubara di wilayah Sumatera Selatan merupakan kebutuhan mendesak demi mendukung kelancaran aktivitas pertambangan yang berdampak langsung pada perekonomian daerah. Melalui pendekatan kolaboratif dan kebijakan kewilayahan yang tepat, pembangunan infrastruktur ini dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar keamanan serta lingkungan.

Keberhasilan pembangunan jalan khusus ini juga akan menjadi katalis dalam mewujudkan target RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 dalam sektor energi dan infrastruktur.

3.2.3 Prioritas Pembangunan

Penjabaran visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas
2. Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
3. Meningkatkan ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
4. Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas
7. Meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, berorientasi pada kearifan lokal

Prioritas pembangunan tersebut akan dilaksanakan bertahap selama 5 (lima) tahun melalui sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan sehingga dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan tahunan.

Tabel 3. 27 Keterkaitan Misi dan Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

No	Misi	Prioritas Pembangunan
1	Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing	1. Meningkatkan dan mengembangkan Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas
2	Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.	2. Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
3	Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim	3. Meningkatkan ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
4	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.	4. Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5	Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.	5. Meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan
6	Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju	6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan

No	Misi	Prioritas Pembangunan
	pelayanan publik yang berkualitas	kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas
7	Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.	7. Meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, berorientasi pada kearifan lokal

Sandingan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional RPJMD dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Tabel 3. 28 Persandingan antara Prioritas Nasional RPJMN dengan Prioritas Pembangunan Daerah

PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2025-2029	PRIORITAS DAERAH RPJMD PROVINSI SUMATERA SELATAN 2025-2029
PN1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
PN2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas PD7. Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal
PN3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2025-2029	PRIORITAS DAERAH RPJMD PROVINSI SUMATERA SELATAN 2025-2029
Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan PD5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan
PN4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PD1. Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas PD5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
PN5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
PN6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan PD5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
PN7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2025-2029	PRIORITAS DAERAH RPJMD PROVINSI SUMATERA SELATAN 2025-2029
Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
PN8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan PD7. Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal

3.2.3.1 Program Strategis Gubernur dan Wakil Gubernur

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dalam hal ini memuat juga janji-janji politik dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang secara resmi disampaikan ke KPU, terdiri dari Visi, 7 (tujuh) Misi, dan 12 (dua belas) program strategis (*Sumber: Visi, Misi dan Program H. Herman Deru, SH, MM dan H. Cik Ujang, S.H. yang disampaikan ke KPU Prov. Sumsel*).

Tabel 3. 29 Keterkaitan Misi dan Program Strategis HDCU RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

No	Misi	12 Program Strategis HDCU
1	Misi 1: Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing.	PS 2: Melanjutkan Program Berkat (Berobat Gratis Ber-KTP) - Bebas Iuran BPJS untuk Kelas 3 dengan Berkat Plus - Penyediaan Rumah Singgah bagi Keluarga Pasien - Meningkatkan Layanan Primer Kesehatan dengan Memperluas Ketersediaan Dokter Keluarga - Insentif Nakes Terutama di Daerah Terpencil - Pengembangan Investasi dalam Pembangunan Rumah Sakit Bertaraf Internasional - Meningkatkan Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan di Daerah dengan Merevitalisasi Puskesmas

No	Misi	12 Program Strategis HDCU
		PS 4: Pendidikan Yang Berkeadilan - Melanjutkan Program Sekolah yang Berkualitas dan Berkeadilan - Meningkatkan Sumber Daya Pendidikan dan Mendorong Kurikulum Bermuatan Lokal - Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Guru- Penyediaan Beasiswa Kuliah Bagi Siswa Berprestasi - Melanjutkan Program Literasi Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan PS 11: Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak - Mendukung Program Makan Siang Gratis. - Meningkatkan Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak - Mendukung Peningkatan Prestasi Akademik- Mengurangi Beban Ekonomi Keluarga - Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal- Penguatan Ekosistem untuk Kebijakan Inklusif Guna Peningkatan Pemenuhan Hak dan Penyandang Disabilitas
2	Misi 2: Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.	PS 1: Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat PS 9: Sumsel Wonderfull 2030 - Meningkatkan Wisata Olahraga (Sport Tourism) dengan menjadi tuan rumah event internasional, event nasional, event iconic Sumsel antara lain seperti Sriwijaya Ranau Grand Fondo, Sriwijaya Dempo Run, Festival Bidar Musi terbesar dan event-event besar lainnya. - Meningkatkan Wisata Kuliner (Food Tourism) dengan cara mempromosikan dan menggalakan kuliner-kuliner lokal yang ada di Sumatera Selatan.

No	Misi	12 Program Strategis HDCU
		- Meningkatkan Wisata Budaya (Culture Tourism) dengan menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di Sumatera Selatan. - Membangun Wisata Kesehatan (Health Tourism) PS 12: Revitalisasi Pasar Tradisional - Melanjutkan Revitalisasi Pasar Tradisional untuk Menjadi Sentra Pertumbuhan Ekonomi. - Meningkatkan Kapasitas Pasar-Pasar Rakyat untuk Memperkuat Ekonomi Kerakyatan - Membangun Pusat-Pusat Ekonomi Baru yang Dapat Menciptakan Lapangan Kerja dan Daya Saing Daerah untuk menghapus kemiskinan ekstrem
3	Misi 3: Mewujudkan keterkaitan (<i>nexus</i>) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.	PS 3: Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) - Mempertahankan Swasembada Beras dan Meningkatkan Produksi Pangan Lainnya (Sumsel Lumbung Pangan Nasional) - Melanjutkan Program Satu Desa Satu Penyuluh Pertanian - Ketersediaan Pupuk yang Mudah Terjangkau - Mendukung Program Food Estate - Melanjutkan Program 10 Juta Stek (Sambung Pucuk) Kopi - Meningkatkan Produksi Tanaman Lainnya
4	Misi 4: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.	PS 5: Infrastruktur Tuntas Merata - Mempertahankan Sumatera Selatan pada Kategori Jalan Rusak Terendah di Indonesia - Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dalam Wilayah dalam Keadaan Mantap - Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten dan Kota melalui BANGUBSUS (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus)

No	Misi	12 Program Strategis HDCU
		PS 6: Sumsel Interkoneksi - Melanjutkan Konektifitas Antar Daerah - Penyediaan Internet Desa, Terutama bagi Daerah yang Masih Blank Spot - Mewujudkan 100% Desa Teraliri Listrik - Menggalakan Program Listrik Masuk Sawah - Bantuan Operasional Desa/Kelurahan Sampai Dengan 150 Juta Tahunan
5	Misi 5: Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.	PS 3: Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) - Mempertahankan Swasembada Beras dan Meningkatkan Produksi Pangan Lainnya (Sumsel Lumbung Pangan Nasional) - Melanjutkan Program Satu Desa Satu Penyuluh Pertanian - Ketersediaan Pupuk yang Mudah Terjangkau - Mendukung Program Food Estate - Melanjutkan Program 10 Juta Stek (Sambung Pucuk) Kopi - Meningkatkan Produksi Tanaman Lainnya PS 7: 100.000 Sultan Muda Sumsel - Bantuan Operasional Desa/Kelurahan Sampai Dengan 150 Juta Per tahun - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Terampil dengan Memperbanyak Pelatihan Skill - Meningkatkan Promosi Usaha Kecil dan Menengah Para Wirausaha Muda Sumatera Selatan. PS 12: Revitalisasi Pasar Tradisional - Melanjutkan Revitalisasi Pasar Tradisional untuk Menjadi Sentra Pertumbuhan Ekonomi. - Meningkatkan Kapasitas Pasar-Pasar Rakyat untuk Memperkuat Ekonomi Kerakyatan - Membangun Pusat-Pusat Ekonomi Baru yang Dapat Menciptakan

No	Misi	12 Program Strategis HDCU
		Lapangan Kerja dan Daya Saing Daerah untuk menghapus kemiskinan ekstrem
6	Misi 6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.	PS 10: Sumsel Berintegritas dan Melayani - Melanjutkan dan Meningkatkan Upaya Menciptakan Pemerintahan yang Bersih (Good and Clean Government), Responsive dan Melayani. - Mengembangkan Meritokrasi, dengan memberikan kesempatan seseorang memimpin berdasarkan kemampuan dan prestasi. - Menerapkan Sistem Berbasis Elektronik, Keamanan Cyber dan Transformasi Digital dalam Pengembangan SDM. - Membangun Pendidikan Anti Korupsi, Keterbukaan Informasi Publik dan Reformasi Birokrasi.
7	Misi 7: Mewujudkan kehidupan beragama, seni, dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.	PS 8: Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya - Melanjutkan Program 1 Desa 1 Rumah Tahfiz - Mempermudah Pendirian Rumah-Rumah Ibadah di Daerah Sumatera Selatan - Melanjutkan Program Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (P2UKD) dan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Kelurahan (P2UKK) - Meningkatkan Upaya Program Moderasi Umat Beragama - Mewujudkan Pembangunan Masjid Raya Sumatera Selatan - Meningkatkan pendidikan agama, dan mengembangkan toleransi beragama. - Melaksanakan Program Rumah Layak Huni - Mendirikan ISBI Sumsel, membangun Taman Seni Budaya, Melestarikan Aksara Ulu, dan Memperkuat nilai-nilai kebangsaan serta kearifan lokal

Janji Gubernur dan Wakil Gubernur berupa Visi, Misi, dan Program Strategis yang disampaikan selama masa kampanye tersebut diterjemahkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 melalui strategi, arah kebijakan dan program pembangunan sehingga dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan tahunan.

3.2.3.2 Sinkronisasi RPJPD, RTRW dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan

Terkait penjabaran di atas, maka dapat dijelaskan sinkronisasi antara RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044 dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3. 30 Sinkronisasi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044 dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029

Arahan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045	Arahan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044	Misi dan Sasaran Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045
1. Memantapkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi dengan kebijakan (1) Pemantapan laju pertumbuhan ekonomi di atas 6,5 persen per tahun (2) Pemantapan struktur ekonomi yg didukung peningkatan nilai tambah industri dan jasa (3) Pemantapan sektor-sektor baru potensial (4) Penguatan surplus perdagangan dan investasi	1. Mengembangkan sistem perkotaan provinsi yang berkedudukan cukup strategis dan memiliki peran sebagai pintu keluar-masuk (<i>multi-gate</i>) dalam menciptakan keterkaitan ekonomi dan spasial dengan daerah luarnya 2. Mengembangkan sistem infrastruktur wilayah yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk mendukung Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi dan lumbung pangan nasional 3. Mengembangkan tata ruang yang akomodatif dengan tetap mempertimbangkan	1. Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan melalui: (1) Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan (Maju Ekonomi Kerakyatan) (2) Meningkatnya Investasi, Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan) (3) Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan (Maju

Arahan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045	Arahan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044	Misi dan Sasaran Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045
(5) penurunan pengangguran terbuka kurang dari 10 persen (6) penurunan kemiskinan dan kesenjangan melalui pemberdayaan UMKM, dan (7) Pemantapan kualitas SDM. 2. Memantapkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan kebijakan: (1) Pemantapan kualitas pelayanan pendidikan (2) Pemantapan penguasaan iptek (3) Pemantapan derajat kesehatan masyarakat (4) Pemantapan kualitas permukiman dan perumahan (5) Pemantapan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan pekerja anak, dan kelompok marjinal lainnya, peningkatan kualitas kehidupan beragama, seni dan budaya lokal.	keberlanjutan sumber daya alam membutuhkan pertimbangan aspek lingkungan, khususnya perwilayahan DAS dan sub DAS. Hal ini berkaitan erat dengan penyediaan sumber daya air bagi pembangunan. Provinsi Sumatera Selatan memiliki wilayah sungai strategis nasional seperti WS Musi, Sugihan, dan Banyuasin 4. Mengoptimalkan kedudukan dan peranan wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai “salah satu titik sentuh” dan “pintu gerbang” Kawasan Barat Indonesia ke wilayah Internasional (Asia-Pasifik, Timur Tengah, Eropa, dan lain-lain), serta ke wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) antara Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) dan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan Singapura-Johor-Riau (SIJORI) yang dapat memberi peluang pasar ekspor bagi Provinsi Sumatera Selatan 5. Mendorong pembentukan sistem kota-kota secara	Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan) (4) Menurunnya Pengangguran dan Kemiskinan (Maju Kesejahteraan Masyarakat) (5) Meningkatnya akses energi (Maju Akses Energi) 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas melalui: (1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Maju Kesehatan Masyarakat) (2) Meningkatnya akses pendidikan berkualitas (Maju Akses Pendidikan Berkualitas) (3) Meningkatnya pembangunan Gender dan Perlindungan anak (Maju Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan anak) 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

Arahan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045	Arahan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044	Misi dan Sasaran Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045
3. Mengembangkan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dengan kebijakan: (1) Pemantapan pemanfaatan sumber daya energi yang berwawasan lingkungan (2) Pemantapan tata ruang yang adil dan seimbang (3) Pemantapan sistem transportasi (4) Pemantapan jaringan infrastruktur (5) Revitalisasi pertanian, pemantapan agribisnis dan kelembagaan pertanian. 4. Pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih, dan bertanggungjawab dengan kebijakan: (1) Pemantapan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah (2) Pemantapan kualitas pelayanan umum (3) Pemantapan kapasitas keuangan daerah	hirarkis dengan memperhatikan keseimbangan antarsub wilayah.	dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif melalui : (1) Maju Pelayanan Publik berkualitas (Meningkatnya Pelayanan Publik berkualitas) (2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel) (3) Meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah daerah (Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas) 4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan

Arahan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045	Arahan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044	Misi dan Sasaran Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045
(4) Pemantapan peran serta masyarakat (5) Keterbukaan informasi (6) Pemantapan pembangunan politik lokal (7) Pemantapan penegakan hukum (8) Pemantapan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana (9) Pemantapan ketertiban dan keamanan daerah		keseimbangan daerah melalui: (1) Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup (Maju Kualitas Lingkungan Hidup) (2) Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas (Maju Infrastruktur dan Konektivitas) 5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius melalui: (1) Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan kehidupan beragama yang berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama) (2) Meningkatnya Seni, Budaya, dan Pariwisata (Maju Seni, Budaya, dan Pariwisata) (3) Meningkatnya pembangunan

Arahan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045	Arahan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044	Misi dan Sasaran Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045
		pemuda dan olahraga (Maju Pemuda dan Olahraga)

3.2.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Penjabaran Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, antara lain sebagai berikut:

Tabel 3. 31 Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Visi : Sumsel Maju Terus Untuk Semua						
1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing	1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM	Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah 1. Persentase Angka Partisipasi Sekolah 2. Persentase SPM Pendidikan 3. Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) 4. Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	1. Jumlah pengembangan Kurikulum 2. Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Program Pengembangan Kurikulum	DISDIK
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1. Persentase PTK berkualifikasi S-1 2. Persentase Guru yang memiliki sertifikasi pendidik	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	DISDIK
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Program Pembinaan Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		2	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	1. Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi 2. Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	DINAS KESEHATAN
				Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Persentase kab/kota yang memiliki RS Pemerintah Daerah dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar 2. Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan 3. Angka Kematian Ibu (AKI) 4. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN RSUD SITI FATIMAH RSK GIGI DAN MULUT RSK MATA RS ERNALDI BAHAR
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1. Persentase Kabupaten Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidp yang Aktif 2. Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		3	Meningkatnya Pembangunan Sektor Kepemudaan	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	1. Rasio Wirausaha Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	DISPORA

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		4	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPA
				Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	1. Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/ atau Penyusunan Kebijakan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DPPPA
				Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	1. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Perempuan	DPPPA
				Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2. Indeks Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	DPPPA
				Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	1. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Program Pemenuhan Hak Anak	DPPPA

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
				Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan Anak	1. Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPPA
2. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	2. Meningkatnya daya saing dan ketahanan ekonomi daerah	5	Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan daerah	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Peningkatan Produksi Hortikultura 3. Luas Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan 4. Luas Pengembangan Komoditi Hortikultura	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DINAS PERTANIAN TPH
				Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	1. Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B 2. Peningkatan Luas Lahan Siap Tanam : Padi	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DINAS PERTANIAN TPH

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
				Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1. Persentase penanganan bencana pertanian 2. Persentase penanganan DPI terhadap pertanian 3. Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi - Tanaman Pangan - Hortikultura	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DINAS PERTANIAN TPH
				Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan 2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi 3. Jumlah Kelembagaan penyuluh yang meningkat kapasitasnya 4. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya 5. Jumlah kemitraan usaha tani	Program Penyuluhan Pertanian	DINAS PERTANIAN TPH
				Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	1. Angka Kumulatif Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan 2. Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DISBUDPAR

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
				Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	1. Jumlah Wisatawan Mancanegara 2. Jumlah Wisatawan Nusantara	Program Pemasaran Pariwisata	DISBUDPAR
				Meningkatnya kualitas melalui ekosistem kreatif	1. Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	DISBUDPAR
				Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DISBUDPAR
				Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan: - Jumlah Produksi Daging - Jumlah Produksi Telur	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPP
				Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1. Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis 2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DKPP
				Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian	DKPP

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Luas Pengembangan Komoditi Perkebunan (ha)	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian	DINAS PERKEBUNAN
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	1. Persentase realisasi pembangunan prasarana perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian	DINAS PERKEBUNAN
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan	1. Luas Areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan Gangguan Usaha	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DINAS PERKEBUNAN
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian	DINAS PERKEBUNAN
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	1. Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB) (%) 2. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan 3. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DINAS PERINDUSTRIAN
			Meningkatnya tata kelola mineral dan Batubara	1. Persentase terlaksananya Pengelolaan Mineral dan Batubara di Wilayah Provinsi 2. Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah 3. Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	DINAS ESDM

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
				Meningkatnya produktivitas hasil hutan	1. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	Program Pengelolaan Hutan	DINAS KEHUTANAN
				Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	1. Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) 2. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
				Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	1. Indeks Keanekaragaman Hayati	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DINAS KEHUTANAN
		6	Meningkatnya investasi dan perdagangan	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	1. Realisasi Total Terhadap Target Investasi (%)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPSTP
				Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	1. Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPSTP
				Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	1. Presentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPSTP
				Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	1. Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPSTP
				Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	1. Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPSTP

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	Program Pengembangan Ekspor	DINAS PERDAGANGAN
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN
			Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	DINAS PERDAGANGAN
			Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	DINAS PERDAGANGAN
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	DINAS PERDAGANGAN
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	DISKOP UKM
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	DISKOP UKM
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi aktif	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	DISKOP UKM
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	DISKOP UKM

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim	3. Terwujudnya keterkaitan ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	DISKOP UKM
		7	Terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	BIRO PEREKONOMIAN
		8	Meningkatnya Ketahanan Pangan, energi, dan air	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Peningkatan Produksi Hortikultura 3. Luas Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan 4. Luas Pengembangan Komoditi Tanaman Hortikultura	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DINAS PERTANIAN TPH
				Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	1. Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B 2. Peningkatan Luas Lahan Siap Tanam: - Padi	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DINAS PERTANIAN TPH

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
				Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan 2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi 3. Jumlah kelembagaan penyuluh yang meningkat kapasitasnya 4. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya 5. Jumlah kemitraan usaha tani	Program Penyuluhan Pertanian	DINAS PERTANIAN TPH
				Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Udara 2. Indeks Kualitas Air 3. Indeks Kualitas Lahan 4. Indeks Kualitas Air Laut	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHP
				Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Program Pengelolaan Persampahan	DLHP
				Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	1. Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLHP
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	DLHP

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1. Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	DLHP
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	1. Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHP
			Meningkatnya Kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup	1. Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLHP
			Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLHP
			Meningkatnya Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	1. Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	DLHP
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	1. Persentase Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	DLHP

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir 2. Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi 3. Debit air baku yang dihasilkan (liter/detik)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DINAS PSDA
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	1. Persentase jumlah cadangan pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPP
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPP
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	1. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPP
			Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	1. Persentase Pangan Segar yang memenuhi persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	DKPP
			Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	1. Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Energi Terbarukan 2. Porsi EBT dalam Bauran Energi	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	DINAS ESDM

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
				Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	1. Jumlah Dokumen dan Laporan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 2. Rasio Elektrifikasi	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	DINAS ESDM
		9	Meningkatnya pengembangan hilirisasi berbasis Sektor Unggulan (pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan)	Laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	1. Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	DISLUTKAN
				Meningkatnya produksi perikanan budidaya	1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DISLUTKAN
				Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	1. Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	DISLUTKAN
				Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	1. Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	DINAS PERINDUSTRIAN
				Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	1. Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	DINAS PERINDUSTRIAN
	4. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan	10	Meningkatnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	1. Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLHP
				Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	DLHP

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) 1. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	4. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman hayati (IPKH)	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati	DLHP
				Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1. Persentase limbah B3 yang terkelola	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	DLHP
				Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	1. Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHP
				Meningkatnya Kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup	1. Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLHP
				Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLHP

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
				Meningkatnya Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	1. Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	DLHP
				Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Program Pengelolaan Persampahan	DLHP
4. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan	5. Meningkatnya kualitas konektivitas Daerah	11	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	1. Tingkat Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	DINAS PUBMTR
				Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. Konektivitas Darat 2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DISHUB
				Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	1. Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	Program Pengelolaan Perkeretaapian	DISHUB
				Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	1. Konektivitas Laut	Program Pengelolaan Pelayaran	DISHUB

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	6. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	12	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	1. Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota 2. Persentase Akses Air Minum Layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DISPERKIM
				Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	1. Persentase Cakupan infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Program Pengembangan Permukiman	DISPERKIM
				Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	1. Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) 2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DISPERKIM
				Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	1. Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	DISPERKIM

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		13	Meningkatnya bangunan gedung, hunian dan permukiman yang layak	Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi warga negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah	1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni 2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	DISPERKIM
				Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1. Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani	Program Kawasan Permukiman	DISPERKIM
				Meningkatnya Penyediaan Prasarana Sarana Umum (PSU) Permukiman	1. Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	DISPERKIM
				Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	1. Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	DISPERKIM
				Meningkatnya kualitas bangunan gedung	1. Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Program Penataan Bangunan Gedung	DISPERKIM

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
				Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	1. Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DISPERKIM
				Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	1. Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	DISPERKIM
	7. Meningkatkan Pengelolaan Bencana	14	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
				Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	1. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
				Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	1. Persentase Penanganan Pasca Bencana 2. Persentase Penanganan Pra Bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
				Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir 2. Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi 3. Debit air baku yang dihasilkan (liter/detik)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DINAS PSDA
5. Memperluas kesempatan berusaha dan	8. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan	15	Meningkatnya Kesempatan	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	1. Persentase Tenaga Kerja yang	Program Penempatan Tenaga Kerja	DISNAKERTRANS

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan	Sosial Masyarakat		Kerja dan Berusaha		ditempatkan di Dalam Negeri		
				Terkelolanya informasi tenaga kerja	1. Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	DISNAKERTRANS
				Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	1. Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya 2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	DISNAKERTRANS
				Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi	1. Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Program Hubungan Industrial	DISNAKERTRANS
				Terlindunginya Hak-Hak Pekerja	1. Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	DISNAKERTRANS
				Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	1. Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	DISNAKERTRANS
				Meningkatnya Kualitas Pembangunan kawasan transmigrasi	1. Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	DISNAKERTRANS
				Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan	1. Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	DISNAKERTRANS

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
				Kawasan Transmigrasi			
				Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	DISKOP UKM
				Meningkatnya daya saing UMKM	1. Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	Program Pengembangan UMKM	DISKOP UKM
		16	Meningkatnya Upaya Perlindungan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	1. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial 2. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	DINAS SOSIAL
				Meningkatnya Rehabilitasi sosial	1. Persentase Penyandang disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Program Rehabilitasi Sosial	DINAS SOSIAL

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					4. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin 2. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 3. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINAS SOSIAL
				Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	1. Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	DINAS SOSIAL

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
				Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	1. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial 2. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Program Penanganan Bencana	DINAS SOSIAL
				Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	1. Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	DINAS SOSIAL
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas	9. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	17	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas birokrasi	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	1. Indeks Kematangan Organisasi	Program Penataan Organisasi	BIRO ORGANISASI
				Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	1. Efektivitas Administrasi Pembangunan Daerah	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	BIRO ADPEM
				Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	1. Persentase fasilitasi pembinaan mental spiritual, pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti 2. Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	BIRO KESRA

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	1. Tingkat Kematangan UKPBJ	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	BIRO PBJ
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	1. Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Program Kepegawaian Daerah	BKD
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	1. Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	Program Kepegawaian Daerah	BKD
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	1. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Program Kepegawaian Daerah	BKD
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	1. Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	Program Kepegawaian Daerah	BKD
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	1. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BPSDMD
			Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	1. Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BPSDMD
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	1. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BPSDMD
			Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan,	1. Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BPSDMD

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			pengembangan dan evaluasi			
			1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan 3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA	1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayan 3. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan, Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD 2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur 3. Persentase Penurunan SILPA 4. Persentase laporan keuangan tepat waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Aset Daerah	1. Persentase penambahan nilai aset tetap 2. Asset Management 1) Apakah ada daftar aset tetap 2) Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap 3) Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan 4) Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD
			Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	1. Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Program Penataan Desa	DPMD
			Meningkatnya kerjasama desa	1. Persentase fasilitasi kerjasama desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	DPMD

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
				Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2. Persentase fasilitasi tata kelola desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	1. Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) 2. Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD
				Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	1. Tingkat Ketersediaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	DINAS KEARSIPAN
				Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	1. Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	DINAS KEARSIPAN
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	1. Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Program Perizinan Penggunaan Arsip	DINAS KEARSIPAN
				Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	1. Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan 2. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	INSPEKTORAT

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					Intern Pemerintah (SPIP) 3. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
				Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	1. Persentase penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Daerah 2. Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
		18	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	1. Persentase fasilitasi pengelolaan peraturan perundang-undangan pemerintah Provinsi/Kab/Kota, penyelesaian hukum, dan penyelenggaraan HAM yang dilaksanakan	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	BIRO HUKUM
				Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	1. Efektivitas Kerjasama Daerah 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA
				Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	1. Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	KESBANGPOL

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan		
				Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	1. Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	KESBANGPOL
				Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Program Pendaftaran Penduduk	DISDUKCAPIL
				Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	1. Pemanfaatan Data Kependudukan 2. Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DISDUKCAPIL
			Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	1. Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diselesaikan tepat waktu	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	DLHP
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	1. Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	DLHP
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	1. Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	DLHP
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	1. Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	DLHP
			Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	1. Persentase Tanah Kosong yang dikelola	Program Pengelolaan Tanah Kosong	DLHP
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	1. Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Program Penatagunaan Tanah	DLHP

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	1. Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah 2. Indeks SPBE 3. Indeks Pemdi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DISKOMINFO
				Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	1. Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	DISKOMINFO
				Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	1. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	DISKOMINFO
				Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	1. Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	DISKOMINFO
				Meningkatnya pemanfaatan hasil kelibangan dalam perencanaan pembangunan	1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	BRIDA
				Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan	1. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	BRIDA

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
				pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah 2. Jumlah Potensi unggulan daerah yang dikembangkan dari inovasi		
				Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	1. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	BRIDA
				Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	1. Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	BRIDA
				Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	1. Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah	BRIDA
				Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	1. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	BRIDA

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
				Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	1. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	BRIDA
				Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	1. Persentase Fasilitasi Pembinaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Riset dan Inovasi Daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	BRIDA
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Persentase Penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah Provinsi	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUMTR
7. Mewujudkan Kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal	10. Terwujudnya stabilitas sosial	19	Menguatnya Ketentraman di Masyarakat	Meningkatnya etika dan budaya politik	1. Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	KESBANGPOL
				Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	1. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
				Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	1. Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP
				Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	1. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP
				Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	1. Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP
				Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	1. Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOL PP
				Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1. Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOL PP
		20	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	1. Indeks Pembangunan Kebudayaan 2. Angka kumulatif jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan 3. Angka Kumulatif Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan	Program Pengembangan Kebudayaan	DISBUDPAR

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
				Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	1. Angka Kumulatif Jumlah Pergelaran Seni 2. Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	DISBUDPAR
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Program Pembinaan Sejarah	DISBUDPAR
				Meningkatnya Warisan Budaya Yang Dilestarikan	1. Angka Kumulatif Jumlah cagar budaya yang dilestarikan 2. Angka Kumulatif Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan 3. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	DISBUDPAR
				Meningkatnya Tata Kelola Museum	1. Jumlah Kunjungan Museum 2. persentase Kunjungan Wisatawan Ke Museum	Program Pengelolaan Permuseuman	DISBUDPAR
				Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	1. Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	DINAS PERPUSTAKAAN

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang seluruh rencana program Perangkat Daerah Sumatera Selatan tahun 2025-2030 dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah lima tahun kedepan. Bab ini memuat seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Berikut terlampir tabel indikasi rencana program seluruh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disertai kebutuhan pendanaan lima tahun ke depan.

Tabel 4.1

Program Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET (7)	PAGU (8)	TARGET (9)	PAGU (10)	TARGET (11)	PAGU (12)	TARGET (13)	PAGU (14)	TARGET (15)	PAGU (16)	TARGET (17)	PAGU (18)	
(1)	(2)		(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
PELAYANAN UMUM																
Layanan Urusan Walid Dasar																
PENDIDIKAN																
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN																
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase PTK berkualifikasi S-1	%	96,63	98,50	1.468.810.000	98,75	258.843.300	99	266.670.235	99,25	277.459.481	99,50	285.235.995	100	310.775.256	Dinas Pendidikan
	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	%	27,12	27,17		27,22		27,33		27,39		27,44		Dinas Pendidikan		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Angka Partisipasi Sekolah	%	70,8	100	1.016.962.895.559	100	1.004.738.766.369	100	1.035.120.177.930	100	1.077.000.240.132	100	1.107.185.936.946	100	1.206.320.378.059	Dinas Pendidikan
	Persentase SPM Pendidikan	%	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan		
	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	%	70,8	71,38		71,96		72,55		73,13		73,71		74,29		Dinas Pendidikan
	Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	48,95	50,55		52,14		53,74		55,33		56,93		58,53		Dinas Pendidikan
	Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	48,95	50,55		52,14		53,74		55,33		56,93		58,53		Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM																
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Jumlah pengembangan Kurikulum	Kurikulum	1	1	353.503.000	1	358.350.000	1	369.185.830	1	384.122.768	1	394.888.795	1	430.246.072	Dinas Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	61,46	62,46		63,46		64,46		65,46		66,46		67,46		Dinas Pendidikan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	1.850.095.505.110	100	1.861.524.754.000	100	1.917.813.763.218	100	1.995.406.840.243	100	2.051.333.239.936	100	2.235.004.082.830	Dinas Pendidikan
KESEHATAN																
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase kab/kota yang memiliki RS Pemerintah Daerah dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	%	65	70	247.565.948.598	75	227.136.128.875	80	271.580.719.060	85	282.494.252.993	90	288.292.460.249	95	309.931.831.206	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI)	angka	175	122		109		97		86		77		76		Dinas Kesehatan
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	15,8	14,8		13,8		12,9		12,1		11,3		10,6		Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN																
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	4,87	4,9	772.885.000	5	577.770.000	5,3	560.794.744	5,5	583.330.411	5,8	595.303.294	6,1	639.987.046	Dinas Kesehatan
	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	n/a	70		50		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	242.903.488.277	100	262.794.657.000	100	313.492.255.021	100	326.090.013.708	100	332.783.025.915	100	357.761.880.165	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN																
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Pasyankes yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar	%	75	91	141.246.000	92	1.000.000.000	93	1.064.686.969	94	1.107.471.661	95	1.130.202.566	96	1.215.036.115	Dinas Kesehatan
	Persentase Kab/kota dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (%)	%	60	65		70		76		83		90		95		Dinas Kesehatan
	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	n/a	25		30		35		40		45		50		Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Kabupaten Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	%	25	30	1.974.988.000	50	1.850.000.000	60	2.079.082.892	70	2.162.631.319	80	2.207.019.424	90	2.372.679.365	Dinas Kesehatan
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang diberdayakan	%	n/a	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN																
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	n/a	70	19.425.232.000	50	19.025.232.000	60	19.600.519.252	65	20.002.613.676	75	20.876.448.201	100	22.842.280.827	RSUD Siti Fatimah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	195.481.703.331	100	197.072.188.325	100	203.031.280.838	100	207.196.361.616	100	216.247.945.431	100	236.610.952.700	RSUD Siti Fatimah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	n/a	80	270.816.489.262	85	269.974.083.620	90	278.137.592.404	95	283.843.439.971	98	296.243.429.367	98	324.139.218.591	RSUD Siti Fatimah
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang diberdayakan	%	n/a	n/a	1.100.000.000	100	600.000.000	100	618.142.872	100	630.823.751	100	658.381.928	100	720.378.521	RSUD Siti Fatimah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	48.687.616.874	100	37.959.915.300	100	42.525.511.212	100	44.607.776.838	100	46.741.282.213	100	49.493.605.520	RS Mata
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	n/a	80	927.173.000	85	1.069.946.000	90	1.184.539.725	95	1.229.137.790	98	1.289.273.212	98	1.366.850.765	RS Mata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET (7)	PAGU (8)	TARGET (9)	PAGU (10)	TARGET (11)	PAGU (12)	TARGET (13)	PAGU (14)	TARGET (15)	PAGU (16)	TARGET (15)	PAGU (16)	
(1)	(2)	(3)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(19)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	n/a	80	400.000.000	85	582.009.000	90	710.311.007	95	734.570.619	98	767.281.950	98	809.481.120	RS Gigi Mulut
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	21.629.820.229	100	15.190.144.000	100	19.505.144.000	100	22.740.144.000	100	25.940.000.000	100	28.150.000.000	RS Gigi Mulut
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	n/a	70	123.750.000	50	115.500.000	60	68.202.642	65	70.797.558	75	74.296.507	100	78.810.318	RS Ernaldi Bahar
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	n/a	80	17.979.527.591	85	7.728.622.800	90	8.408.756.008	95	8.728.685.208	98	9.160.073.373	98	9.716.584.605	RS Ernaldi Bahar
PROGRAM KAPASITAS SUMBER DAYA																
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60	175.000.000	65	181.658.251	75	190.636.146	100	202.218.057	RS Ernaldi Bahar
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	42.098.489.105	100	38.089.634.060	100	41.670.748.670	100	43.256.201.887	100	45.394.005.365	100	48.151.873.429	RS Ernaldi Bahar
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)																
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	%	87,82	87,85	86.540.404.416	87,89	69.981.892.173	87,93	141.346.758.894	87,97	146.481.434.784	88,01	146.029.578.262	88,05	188.132.536.088	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	59,74	61,24		62,73		64,23		65,73		67,23		68,83		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	Debit air baku yang dihasilkan (liter/detik)	liter/detik	n/a	5		6		7		7		7		7		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	31.956.347.681	100	37.399.317.000	100	51.837.236.427	100	56.950.960.070	100	62.646.056.077	100	68.910.261.684	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	71.097.367.306	100	85.703.632.082	100	91.301.231.275	100	84.216.207.275	100	80.687.183.275	100	83.118.159.275	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN																
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang aman dan nyaman	Tingkat kemandapan jalan (%)	%	90,89	91,50	850.657.178.264	92,04	522.366.476.815	92,47	1.127.685.633.470	92,91	1.212.194.711.838	93,33	1.213.457.054.388	93,74	1.281.888.919.590	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG																
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	62,50	65,00	4.533.839.250	67,50	6.080.000.000	70,00	7.973.000.000	72,50	8.858.275.000	75,00	10.435.043.275	77,5	14.376.436.835	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang
	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang
PROGRAM PENATAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	30	31	2.287.656.039	32	950.000.000	33	4.550.000.000	34	5.687.500.000	35	7.109.375.000	36	8.886.718.700	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENATAN BANGUNAN GEDUNG																
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	30	41,43	1.097.833.565	52,86	1.995.000.000	64,29	7.217.500.000	75,71	9.021.875.000	87,14	11.277.343.750	98,57	14.096.679.650	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	4,79	8,0	2.084.232.217	11,40	1.430.000.000	14,80	3.946.700.000	18,20	5.738.705.000	21,60	7.799.510.700	25	10.169.437.300	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	77,34	80,54		82,43		84,32		86,22		88,11		90		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE																
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	16,67	16,67	42.845.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyuluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	1	1,6	871.350.351	1,7	1.852.500.000	1,8	2.165.400.000	4,78	13.741.189.000	7,18	15.802.367.300	9,57	18.172.722.300	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase Akses Air Minum Layak	%	87,23	89,35		90,35		92,76		95,18		97,59		100		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI																
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	%	1,54	67	3.762.104.072	73	3.548.732.750	80	5.387.619.000	87	6.195.761.800	93	7.125.126.000	100	8.193.894.900	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN																
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	%	78,68	78,98	8.162.115.022	79,27	7.038.000.000	79,78	13.513.690.000	80,13	15.540.743.500	80,51	17.871.855.000	80,92	20.552.633.200	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL																
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	%	n/a	1,1	-	1,30	650.000.000	1,50	1.500.000.000	1,70	1.725.000.000	1,90	1.983.750.000	10,18	2.281.312.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN																
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani	%	11,4	12,4	16.730.644.158	13,4	14.088.000.000	14,4	17.716.420.000	15,4	20.373.883.000	16,4	23.031.346.000	17,4	25.688.809.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN																

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET (7)	PAGU (8)	TARGET (9)	PAGU (10)	TARGET (11)	PAGU (12)	TARGET (13)	PAGU (14)	TARGET (15)	PAGU (16)	TARGET (15)	PAGU (16)	
(1)	(2)	(3)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(19)
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	83,97	2.650.528.904	84,21	4.712.464.000	84,45	6.190.300.000	84,69	7.118.845.000	84,94	8.186.671.700	85,18	9.414.672.400	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	100	83,09		83,11		83,13		83,15		83,17		83,18		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kecamatan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	%	16,86	21,86	119.947.840	26,86	200.000.000	31,86	387.000.000	36,86	445.050.000	41,86	511.807.000	46,86	588.578.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)																
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	49,37	49,54	52.111.979.725	50,62	45.099.436.000	52,70	47.381.041.100	54,77	50.381.041.100	56,85	54.381.041.100	58,92	59.381.041.100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	28.668.082.852	100	33.603.148.577	100	42.234.419.000	100	44.412.549.000	100	45.950.827.000	100	55.993.573.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA																
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100	100	5.583.538.654	100	6.510.209.000	100	14.331.335.176	100	18.630.735.729	100	24.219.956.448	100	31.485.943.382	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Penanganan Pra Bencana	%	100	100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	18.440.527.702	100	19.748.328.120	100	38.637.357.075	100	38.228.564.197	100	35.297.133.457	100	34.886.273.494	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN																
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	75	75	532.004.800	80	676.319.045	80	696.769.662	80	724.960.356	85	762.972.304	85	812.009.523	Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	75	75		80		80		80		85		85		Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan	%	100	100	1.921.747.174	100	1.845.000.000	100	1.900.789.332	100	1.977.693.615	100	2.081.390.301	100	2.215.163.953	Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtrannas	%	100	100		100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	100	100		100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	100	100		100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	35.617.731.562	100	39.532.893.387	100	40.728.293.768	100	42.376.125.114	100	44.598.038.410	100	47.464.412.136	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL																
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	12,5	25	357.851.000	30	640.000.000	35	671.901.654	40	699.086.211	45	735.741.496	50	783.028.556	Dinas Sosial
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	13,5	25		30		35		40		45		50		Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA																
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	100	100	936.000.000	100	1.160.000.000	100	1.217.821.749	100	1.267.093.757	100	1.333.531.462	100	1.419.239.257	Dinas Sosial
	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan /atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN																
Meningkatnya layanan penanganan warga negara mieran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	%	100	100	36.180.000	100	50.000.000	50	52.492.317	50	54.616.110	50	57.479.804	50	61.174.106	Dinas Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN																
Meningkatnya tata kelola Taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	%	100	100	98.000.000	100	390.000.000	100	409.440.071	100	426.005.660	100	448.342.474	100	477.158.026	Dinas Sosial
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	21.593.143.000	100	27.437.968.512	100	28.805.650.683	100	29.971.102.258	100	31.542.581.255	100	33.569.863.831	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL																
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	70	100	8.270.174.902	100	3.881.000.000	100	6.074.453.626	100	6.239.302.477	100	6.461.582.416	100	6.748.334.100	Dinas Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial		
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	%	70	70		72,5		75		77,5		80		100		Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET (7)	PAGU (8)	TARGET (9)	PAGU (10)	TARGET (11)	PAGU (12)	TARGET (13)	PAGU (14)	TARGET (15)	PAGU (16)	TARGET (15)	PAGU (16)	
(1)	(2)		(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(19)
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL																
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar ^{nya}	%	100	100		100	10.817.718.000	100	19.356.941.596	100	19.816.433.576	100	20.436.006.290	100	21.235.284.531	Dinas Sosial
	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar ^{nya}	%	100	100	100	100		100		100						
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar ^{nya}	%	100	100	100	100		100		100						
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar ^{nya}	%	100	100	100	100		100		100						
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar ^{nya}	%	100	100	100	100		100		100						
LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR																
TENAGA KERJA																
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL																
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja Pada Perusahaan Yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	%	n/a	537.920	166.762.000	537.920	275.000.000	537.920	359.064.171	537.920	370.526.869	537.920	385.983.015	537.920	405.922.177	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA																
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitas ^{nya}	%	2,6	2,6	340.000.000	2,6	740.000.000	2,6	966.209.042	2,6	997.054.121	2,6	1.038.645.203	2,6	1.092.299.676	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	84.623.111	84.700.000		84.800.000		84.900.000		85.000.000		85.100.000		85.200.000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA																
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Dalam Negeri	%	70	70	333.750.000	70	495.000.000	70	646.315.508	70	666.948.365	70	694.769.427	70	730.659.919	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN																
Terlindunginya hak-hak pekerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terlindungi Hak-Hak Dasar ^{nya}	%	n/a	537.920	317.936.000	537.920	800.000.000	537.920	3.044.550.316	537.920	3.077.896.347	537.920	3.122.859.679	537.920	3.180.864.515	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	28.945.800.324	100	33.624.259.124	100	41.902.788.116	100	43.304.332.588	100	45.194.156.023	100	47.632.118.051	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA																
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kab/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	35,29	35	-	58	100.000.000	88	130.568.789	100	134.737.043	100	140.357.460	29	147.608.064	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK																
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komperhensif	Indeks Pemehuan Hak Anak (IPHA)	Angka	60,19	69,54	410.660.000	70,55	485.000.000	71,41	648.708.507	72,15	669.166.936	72,8	696.752.803	72,8	732.339.881	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN																
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender)	%	42,08	44	1.365.584.500	46	2.164.500.000	48	2.895.112.503	50	2.986.416.152	50	3.109.528.746	50	3.268.349.842	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan	%	55,54	56		57		57,5		58		58,5		58,5		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK																
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	n/a	37,42	205.200.000	40	250.000.000	45	334.385.828	50	344.931.410	55	359.150.929	60	377.494.784	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA																
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Angka	n/a	0	148.400.000	1	185.000.000	3	247.445.513	5	255.249.244	7	265.771.688	7	279.346.140	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	12.809.191.500	100	12.477.396.860	100	16.689.058.744	100	17.215.384.392	100	17.925.074.711	100	18.840.608.943	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK																
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	71,11	71,61	1.131.084.400	71,86	960.000.000	72,08	1.284.041.581	72,26	1.324.536.616	72,43	1.379.139.569	72,43	1.449.579.972	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN																
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	377.138.000	100	430.000.000	100	575.143.625	100	593.282.026	100	617.739.598	100	649.291.029	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PANGAN																
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN																
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	1	1	456.800.000	1	375.000.000	1	1.200.000.000	1	1.400.000.000	1	1.600.000.000	1	2.025.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN																
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang memenuhi persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	98,75	100	324.430.000	100	315.000.000	100	740.000.000	100	850.000.000	100	960.000.000	100	1.100.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN																
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase jumlah cadangan pangan	%	0	50	-	52	-	54	75.000.000	56	125.000.000	58	200.000.000	60	250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT																
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	93,8	94,1	1.814.319.000	94,4	1.486.645.000	94,7	3.800.000.000	95	4.925.000.000	95,3	6.600.400.000	95,6	8.002.100.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET (7)	PAGU (8)	TARGET (9)	PAGU (10)	TARGET (11)	PAGU (12)	TARGET (13)	PAGU (14)	TARGET (15)	PAGU (16)	TARGET (15)	PAGU (16)	
(1)	(2)		(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(19)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	26.947.278.200	100	35.032.738.000	100	36.878.059.700	100	40.081.008.785	100	41.302.394.544	100	42.439.304.655	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PERTANAHAN																
PROGRAM PENATAGUNAAAN TANAH																
Meningkatnya terleb pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	%	0	100	80.767.445	100	75.000.000	100	200.000.000	100	225.000.000	100	250.000.000	100	275.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM																
Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diselesaikan tepat waktu	%	98	100	192.719.597	100	175.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG																
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang dikelola	%	100	100	143.640.445	100	150.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN																
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	98	100	88.381.493	100	150.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN																
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	50.079.435	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE																
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	%	n/a	95	113.216.966	95	175.000.000	95	200.000.000	95	225.000.000	95	250.000.000	95	275.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
LINGKUNGAN HIDUP																
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)																
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	%	16	17	269.230.109	17	250.000.000	17	200.000.000	17	200.000.000	17	200.000.000	17	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP																
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tidak ridana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	100	100	170.915.487	100	225.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)																
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH)	Indeks	n/a	0,465	95.553.956	0,469	225.000.000	0,473	500.000.000	0,477	550.000.000	0,482	575.000.000	0,486	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pegelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	n/a	45	232.073.000	52	275.000.000	52,5	250.000.000	53	250.000.000	53,5	250.000.000	54	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)																
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	100	100	101.092.000	100	50.000.000	100	200.000.000	100	225.000.000	100	275.000.000	100	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	59,54	75,48	1.777.305.554	75,68	1.855.000.000	75,88	2.781.440.000	76,08	2.916.440.000	76,28	3.051.440.000	76,48	3.186.440.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	90,25	61,80		62,20		62,60		63,00		63,40		63,80		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
	Indeks Lahan	Indeks	79,71	70,48		70,53		70,58		70,63		70,68		70,73		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
	Indeks Kualitas Air laut	Indeks	44,52	68,42		68,49		68,56		68,63		68,70		68,77		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT																
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup	%	100	100	625.431.592	100	600.000.000	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT																
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya	%	100	100	565.721.561	100	480.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	47.401.945.273	100	47.085.073.911	100	49.130.669.537	100	50.325.669.537	100	51.320.669.537	100	51.422.509.537	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP																
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitiasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	-	100	50.000.000	100	375.000.000	100	375.000.000	100	375.000.000	100	375.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH																
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	%	100	2 MHA	12.000.000	0 (pindah menjadi urusan kehutanan)	2 MHA	-	2 MHA	-	2 MHA	-	2 MHA	-	2 MHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET (7)	PAGU (8)	TARGET (9)	PAGU (10)	TARGET (11)	PAGU (12)	TARGET (13)	PAGU (14)	TARGET (15)	PAGU (16)	TARGET (15)	PAGU (16)	
(1)	(2)		(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(19)
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
PROGRAM PENCATATAN SIPIL																
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	99,056	99,057		99,059		99,060		99,061		99,063		99,066		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	48,52	50,01	117.869.000	50,55	300.000.000	50,58	387.760.643	51	400.265.404	51,02	417.126.654	51,04	425.763.600	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	52,58	53,02		53,05		53,011		53,1		53,15		53,16		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	53,35	53,55		53,57		53,61		53,64		53,71		53,72		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK																Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	7,47	9,3	82.707.900	9,5	400.000.000	9,7	517.014.190	9,7	533.687.206	10	556.168.872	12	567.684.799	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	57,67	57,69		57,71		58		58,02		58,11		58,12		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan	Laporan	2	3	253.620.000	4	554.000.000	5	716.064.654	6	739.156.780	7	770.293.888	8	786.243.447	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	40	60		65		70		75		80		85		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN																
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam Satu Tahun	%	100	100	36.000.000	100	50.000.000	100	64.626.774	100	66.710.901	100	69.521.109	100	70.960.600	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	8.304.793.378	100	10.133.400.850	100	13.097.780.091	100	13.520.165.961	100	14.089.705.302	100	14.381.444.074	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA																
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	16,9	18	1.196.000.000	28	919.000.000	38	1.155.259.395	48	1.193.565.648	58	1.245.217.276	68	1.311.850.331	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	%	54,4	60		65		70		75		80		85		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	100	100	4.512.090.057	100	3.809.447.000	100	4.788.791.554	100	4.947.578.974	100	5.161.685.765	100	5.437.893.699	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat															Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
PROGRAM PENATAAN DESA																
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	%	15	20	100.000.000	25	100.000.000	30	125.708.313	35	129.876.567	40	135.496.983	45	142.747.588	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA																
Meningkatnya kerjasama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	%	5,4	10	950.000.000	15	25.454.000.000	20	31.997.793.959	25	33.058.781.291	30	34.489.402.128	35	36.334.970.984	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	13.286.645.025	100	13.800.515.475	100	17.348.395.171	100	17.923.635.688	100	18.699.282.148	100	19.699.902.937	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK																
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Angka	2,34	2,32	-	2,3	-	2,28	-	2,27	-	2,25	-	2,23	-	
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	Angka	29,8	29,58	-	29,33	-	29,07	-	28,94	-	28,69	-	28,44	-	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)																
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	Angka	65,20	67,7	-	70,2	-	72,7	-	75,2	-	77,2	-	78,7	-	
PERHUBUNGAN																
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN																
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut	%	30	31	11.653.737.500	32	6.178.025.000	33	10.035.000.000	34	19.035.000.000	35	21.163.466.402	36	10.035.000.000	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN																
Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang ditangani	%	80	80	518.858.550	81	342.650.000	82	2.070.000.000	83	2.070.000.000	84	2.070.000.000	85	2.070.000.000	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	42.285.846.437	100	42.384.681.353	100	46.090.584.223	100	47.211.113.434	100	49.048.419.106	100	50.566.840.061	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	%	59	60	16.407.902.510	61	16.454.250.179	62	30.311.859.620	63	28.702.520.588	64	34.087.500.000	65	54.012.301.486	Dinas Perhubungan
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	50	51		52		53		54		55		56		Dinas Perhubungan
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA																
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah,	Indeks	n/a	56,05	4.518.775.263	56,05	9.315.000.000	56,06	8.640.000.000	56,07	9.610.000.000	56,08	10.843.400.000	56,09	11.927.740.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Indeks SPBE	Indeks	3	3,04		3,09		3,13		3,18		3,22		3,26		Dinas Komunikasi dan Informatika
	Indeks Pemdi.	Indeks	n/a	n/a		1,42		1,45		1,48		1,5		1,52		Dinas Komunikasi dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET (7)	PAGU (8)	TARGET (9)	PAGU (10)	TARGET (11)	PAGU (12)	TARGET (13)	PAGU (14)	TARGET (15)	PAGU (16)	TARGET (15)	PAGU (16)	
(1)	(2)		(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(19)
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK																
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survey)	%	74	75	8.624.088.325	76	9.530.000.000	78	14.945.000.000	79	16.439.500.000	80	17.901.050.000	81	19.691.155.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	17.892.944.750	100	20.710.835.359	100	24.568.509.733	100	26.785.360.706	100	29.363.896.777	100	32.300.286.455	Dinas Komunikasi dan Informatika
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM																
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	%	16,31	26,23	46.000.000	27,87	87.000.000	28,15	400.000.000	28,43	400.000.000	28,71	400.000.000	29,00	400.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI																
Meningkatnya produktivitas Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	17,12	16,43	416.444.000	16,83	228.000.000	16,99	8.400.000.000	17,13	8.525.000.000	17,22	8.525.000.000	17,30	9.900.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)																
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	%	2,77	2,77	197.452.350	2,80	300.000.000	2,83	8.800.000.000	2,85	9.300.000.000	2,88	11.500.000.000	2,91	12.000.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN																
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	15,56	14,35	235.370.000	14,52	100.000.000	14,74	400.000.000	14,95	400.000.000	15,10	400.000.000	15,23	400.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI																
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	9,57	9,57	81.700.000	9,67	210.000.000	9,76	400.000.000	9,86	400.000.000	9,96	400.000.000	10,06	400.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM																
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	%	41,00	41,00	1.605.005.750	41,41	500.000.000	41,82	4.000.000.000	42,24	6.000.000.000	42,66	6.000.000.000	43,09	7.000.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI																
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Koperasi	69,26	75,95	39.050.000	60,00	75.000.000	60,00	200.000.000	60,00	200.000.000	60,00	200.000.000	60,00	200.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Tersedianya dukungan administrasi/layanan perkantoran	%	98	98	12.717.695.856	98	15.274.842.260	98	18.725.000.000	98	18.600.000.000	98	18.900.000.000	98,00	18.525.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
PENANAMAN MODAL																
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL																
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100	80	1.186.770.580	82	1.073.407.580	84	1.627.077.959	86	1.708.431.857	88	1.809.353.449	90	1.943.546.122	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL																
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100	100	81.749.578	100	181.031.662	100	390.083.245	100	489.587.407	100	504.566.778	100	502.070.117	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL																
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi (%)	%	100	100	979.625.000	100	720.000.000	100	2.705.000.000	100	2.235.250.000	100	2.421.012.500	100	2.526.063.125	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL																
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan usaha	%	100	85	691.985.000	90	1.015.140.000	90	1.765.897.000	95	1.854.191.850	95	1.866.901.443	95	1.960.246.515	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase program penunjang urusan pemerintahan Daerah Povinsi Daerah Povinsi yang tercanai	%	100	100	18.689.928.000	100	22.011.310.000	100	28.079.949.055	100	30.209.046.145	100	31.819.598.089	100	33.410.677.630	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL																
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi (%)	%	100	5	600.000.000	6	600.000.000	6	1.430.000.000	7	1.501.500.000	7	1.576.575.000	7	1.655.403.750	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN																
Meningkatnya pembedayaan dan prestasi olahraga	Persentase atlet yang masuk pelatnas	%	3,9	4,4	83.340.895.109	4,8	48.455.846.296	5,2	49.921.059.999	5,6	61.858.109.778	6	64.664.243.094	6,4	59.463.010.760	Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN																
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio wirusaha pemuda	%	3.55	4.2	7.792.274.741	4.5	9.370.000.000	4.8	9.653.331.186	5.1	10.027.902.220	5.4	10.570.529.605	5.75	11.249.911.241	Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN																
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam kepramukaan	%	5	10	3.985.670.000	15	5.200.000.000	20	5.357.238.225	25	5.565.111.157	30	5.866.249.087	35	6.243.280.518	Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	%	100	100	23.085.481.691	100	28.845.866.720	100	29.718.111.504	100	30.871.241.292	100	32.541.738.328	100	34.633.238.024	Dinas Pemuda dan Olahraga
STATISTIK																
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL																
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,72	2,73	366.801.933	2,74	450.000.000	2,75	1.700.000.000	2,76	1.870.000.000	2,77	2.057.000.000	2,78	2.262.700.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
PERSANDIAN																
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI																
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	%	390	375	204.607.238	377	200.000.000	378	1.255.000.000	380	1.380.500.000	382	1.518.550.000	384	1.670.405.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET (7)	PAGU (8)	TARGET (9)	PAGU (10)	TARGET (11)	PAGU (12)	TARGET (13)	PAGU (14)	TARGET (15)	PAGU (16)	TARGET (15)	PAGU (16)		
(1)	(2)		(3)													(19)	
KEBUDAYAAN																	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA																	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Angka Kumulatif Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	559	561		563		565		567		569		571			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Angka Kumulatif Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Cagar Budaya	39	42	203.000.000	44	250.000.000	46	1.498.750.000	48	1.523.687.500	50	1.523.687.500	52	1.523.687.500		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	%	100	100		100		100		100		100		100			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH																	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	%	100	100	62.000.000	0	-	100	1.220.500.000	100	1.231.525.000	100	1.231.525.000	100	1.231.525.000		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN																	
Meningkatnya tata kelola museum	Jumlah Kunjungan Museum	Orang	88.351	83.967	3.966.599.900	85.646	4.093.999.900	87.359	6.498.558.205	89.106	6.773.486.115	90.889	6.773.486.115	92.706	6.773.486.115		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	%	100	100		100		100		100		100		100			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN																	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	57,51	57,71		57,81		57,91		58,01		58,11		58,21			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Angka kumulatif jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan OPK yang dilestarikan	OPK	907	917	3.555.000.000	927	3.811.215.000	937	8.507.500.000	947	8.815.379.258	957	8.882.875.000	967	8.882.875.000		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Angka Kumulatif Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan	Sertifikat	50	52		54		56		58		60		62			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL																	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Angka Kumulatif Jumlah Pergelaran Seni	Pergelaran	45	45	146.000.000	47	146.000.000	49	1.420.000.000	51	1.541.000.000	53	1.541.000.000	55	1.541.000.000		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	100	100		100		100		100		100		100			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	28.226.540.438	100	37.993.412.898	100	32.879.606.640	100	33.873.586.972	100	33.873.586.972	100	34.873.586.972		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PERPUSTAKAAN																	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO																	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	%	7,2	8	333.230.978	9	210.000.000	12	255.391.429	13	264.144.762	14	275.947.637	15	291.173.906		Dinas Perpustakaan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN																	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	69,62	69,00	3.997.378.000	70,00	2.382.680.000	71	2.897.695.476	72	2.997.011.627	73	3.130.928.169	74	3.303.686.871		Dinas Perpustakaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	16.136.415.972	100	18.922.928.798	100	23.013.113.457	100	23.801.869.163	100	24.865.416.592	100	26.237.443.309		Dinas Perpustakaan
KEARSIPAN																	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP																	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	100	100	592.843.000	100	645.000.000	100	700.743.167	100	743.970.593	100	774.096.091	100	821.862.489		Dinas Kearsipan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP																	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	100	100	89.350.000	100	120.000.000	100	130.928.961	100	138.785.227	100	144.576.017	100	153.276.742		Dinas Kearsipan
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP																	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	100	100	-	100	-	100	3.000.000	100	2.000.000	100	3.000.000	100	2.000.000		Dinas Kearsipan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	12.017.376.033	100	12.277.006.830	100	13.395.131.270	100	14.198.893.130	100	14.791.339.557	100	15.681.496.760		Dinas Kearsipan
LAYANAN URUSAN PILIHAN																	
KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
Meningkatnya kelestarian laut berkelanjutan	Luasan Kawasan Konservasi	Ha	976.03	976.03	569.655.000	976.03	570.000.000	976.03	1.200.000.000	976.03	1.300.000.000	976.03	1.350.000.000	976.03	1.430.000.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL																	
Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%	n/a	1,15	351.350.000	1,38	365.000.000	1,66	835.000.000	1,99	885.000.000	2,38	920.000.000	2,86	960.000.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA																	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	2922170000%	285.750	4.094.264.000	295.286	2.780.000.000	305.000	7.170.000.000	315.000	8.430.000.000	325.000	8.820.000.000	335.000	8.955.000.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP																	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	158.918	162.017	2.692.415.000	165.337	2.850.000.000	168.644	6.750.000.000	172.017	7.520.000.000	175.457	8.320.000.000	178.966	8.450.000.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN																	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita/ thn	46,16	31	1.388.106.000	31	1.450.000.000	32,13	3.700.000.000	32,83	3.850.000.000	33,51	3.900.000.000	34,00	4.000.000.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	24.251.548.085	100	25.982.619.060	100	27.936.400.000	100	27.606.400.000	100	28.281.400.000	100	29.796.400.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
PARIWISATA																	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA																	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	2.004	2.014	3.715.580.367	2.209	3.368.300.000	2.320	10.812.250.000	2.436	10.900.000.000	2.557	11.832.504.258	2.684	12.832.504.258		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Jumlah Wisatawan Nusantara	Orang	16.123.645	19.050.274		20.002.788		21.002.927		22.053.073		23.155.727		24.313.513			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB						
				2025		2026		2027		2028		2029		2030								
				TARGET (7)	PAGU (8)	TARGET (9)	PAGU (10)	TARGET (11)	PAGU (12)	TARGET (13)	PAGU (14)	TARGET (15)	PAGU (16)	TARGET (15)	PAGU (16)							
(1)	(2)		(3)													(19)						
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL																						
Meningkatnya kualitas melalui ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	100	100	7.000.000	100	467.000.000	100	1.682.500.000	100	1.716.625.000	100	2.716.625.000	100	2.716.625.000		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF																						
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	n / a	3.030.000.000	118.700.000	3.060.300.000	118.700.000	3.090.903.000	2.446.250.000	3.121.812.030	2.468.562.500	3.153.030.150	2.468.562.500	3.184.560.452	2.468.562.500		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA																						
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Angka Kumulatif Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan	Lokasi	135	140	611.800.000	145	797.300.000	150	2.441.250.000	155	2.563.312.500	160	2.563.312.500	165	2.563.312.500		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
PERTANIAN																						
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER																						
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	100	100	792.600.000	100	750.000.000	100%	2.500.000.000	100	2.900.000.000	100	3.025.000.000	100	3.705.000.000		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan					
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	100	100		100	100	100%	100	100	100	100	100	100	100		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan					
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN																						
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan																					
	- Jumlah Produksi Daging	Ton	167.514	175.890	1.247.020.000	184.684	770.000.000	193.918	700.000.000	203.614	875.000.000	213.795	975.000.000	224.485	1.350.000.000		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan					
	- Jumlah Produksi Telur	Ton	248.538	260.965		274.013		287.714		302.099	302.099	317.204	317.204	333.064	333.064		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan					
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN																						
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan																Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan					
	- Jumlah Produksi Daging	Ton	167.514	175.890	3.811.391.186	184.684	1.090.000.000	193.918	3.070.000.000	203.614	3.380.000.000	213.795	3.690.000.000	224.485	4.325.000.000		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan					
	- Jumlah Produksi Telur	Ton	248.538	260.965		274.013		287.714		302.099	302.099	317.204	317.204	333.064	333.064		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan					
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN																						
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	100	100	5.124.996.800	100	6.052.922.661	100	5.550.000.000	100	5.300.000.000	100	6.600.000.000	100	5.450.000.000		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan					
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN																						
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Peternakan)	%	n/a	100	-	100	-	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	75.000.000		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan					
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN																						
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	%	100	100	-	100	-	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	75.000.000		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan					
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN																						
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Luas pengembangan komoditi perkebunan	Ha	0	150	3.141.299.560	150	2.947.500.000	300	5.270.000.000	300	5.395.000.000	300	5.470.000.000	300	5.545.000.000		Dinas Perkebunan					
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN																						
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase realisasi pembangunan prasarana perkebunan	%	n/a	n/a	228.125.000	100	50.000.000	100	450.000.000	100	425.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000		Dinas Perkebunan					
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN																						
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan	Luas Areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan Gangguan Usaha	ha	0	850	534.985.000	375	775.750.000	550	1.450.000.000	550	1.450.000.000	550	1.450.000.000	550	1.450.000.000		Dinas Perkebunan					
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN																						
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha yang diawasi dan dibina	%	n/a	n/a	37.900.000	20	100.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000		Dinas Perkebunan					
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN																						
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	n/a	n/a	10.998.377.680	80	5.260.800.000	80	6.440.000.000	80	6.440.000.000	80	6.440.000.000	100	6.440.000.000		Dinas Perkebunan					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																						
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	15.563.852.324	100	21.370.489.564	100	25.671.511.798	100	27.571.511.798	100	29.571.511.798	100	31.496.511.798		Dinas Perkebunan					
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN																						
	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	n/a	n/a	643.720.000	95	400.000.000	95	2.250.000.000	95	1.850.000.000	95	1.700.000.000	95	1.850.000.000		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura					
	Persentase Penanganan DPI terhadap Pertanian	%	n/a	n/a		65		65		65		65		65		65	65	65	65		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					-		-		-		-		-		-	-	-	-	-		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	- Tanaman Pangan	ha	400	1015		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	- Hortikultura	ha	100	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura					
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN																						
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2H	ha		n/a		1014		3000		3619		12000		12000			Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura					
	Peningkatan Luas Lahan Siap Tanam :				1.339.804.300		850.000.000		3.936.349.214		2.600.000.000		2.600.000.000		22.311.476.700		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura					
	- Padi	ha	n/a	3		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a			Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET (7)	PAGU (8)	TARGET (9)	PAGU (10)	TARGET (11)	PAGU (12)	TARGET (13)	PAGU (14)	TARGET (15)	PAGU (16)	TARGET (15)	PAGU (16)	
(1)	(2)		(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(19)
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN																
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	ton	n/a	n/a		15000		25500		27500		39500		47500		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Peningkatan Produksi Hortikultura	ton	n/a	n/a		13	35.143.597.730	400	72.073.872.700	400	78.228.319.881	400	128.523.753.555	400	246.830.795.350	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Luas Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan	ha	2,5	12000		-		-		-		-		-		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Luas Pengembangan Komoditi Tanaman Hortikultura	ha	29	32		-		-		-		-		-		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN																
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	n/a	n/a		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	%	n/a	n/a		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Jumlah kelembagaan penyuluh yang meningkat kapasitasnya	unit	n/a	34	27.977.858.400	-	25.750.000.000	-	34.000.000.000	-	34.550.000.000	-	35.475.000.000	-	35.900.000.000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	unit	1,4	7		-		-		-		-		-		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Jumlah kemitraan usaha tani	unit	n/a	1		-		-		-		-		-		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	53.709.807.200	100	56.185.753.000	100	62.569.924.320	100	61.601.826.353	100	62.849.366.207	100	68.488.703.320	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
KEHUTANAN																
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA																
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam dan hayati dan ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati	angka	3,092	3,092	70.200.000	3,092	110.000.000	3,092	300.000.000	3,092	300.000.000	3,092	300.000.000	3,092	260.000.000	Dinas Kehutanan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN																
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	%	5,12	6	2.549.543.300	8	3.165.000.000	9	1.924.000.000	10	1.539.000.000	11	1.685.000.000	12	1.720.000.000	Dinas Kehutanan
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	2,16	3		4		5		6		7		8		Dinas Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)																
Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	1,67	1,67	27.322.600	1,67	50.000.000	1,67	345.000.000	1,67	350.000.000	1,67	350.000.000	1,67	350.000.000	Dinas Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN																
Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	1,4	1,63	10.283.938.500	1,86	5.370.722.500	2,09	5.278.840.000	2,31	6.022.840.000	2,54	6.642.840.000	2,77	7.463.090.000	Dinas Kehutanan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	95,45	100	58.796.152.406	100	72.483.877.710	100	86.071.554.239	100	87.707.554.239	100	88.941.554.239	100	90.126.304.239	Dinas Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN																
Meningkatnya tata kelola kegeologian dalam daerah provinsi	Persentase Terkelola aspek-aspek kegeologian dalam daerah provinsi	%	100	100	100.418.000	100	50.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA																
Meningkatnya tata kelola mineral dan batubara	Persentase terlaksananya Pengelolaan Mineral dan Batubara di Wilayah Provinsi	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah	Ha	0	0	729.690.200	400	580.500.000	0	2.325.000.000	0	1.525.000.000	0	1.625.000.000	0	1.625.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR	Buah	0	0		4		4		0		0		0		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN																
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Energi Terbarukan	%	100	100	236.473.300	100	1.125.000.000	100	3.550.000.000	100	3.900.000.000	100	4.900.000.000	100	5.900.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Porsi EBT dalam Bauran Energi	%	23,10	23,10		23,70		24,30		24,70		25,10		25,70		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN																
Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Jumlah Dokumen dan Laporan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dokumen	98	98	1.063.401.980	103	1.018.500.000	87	2.300.000.000	87	2.700.000.000	87	3.000.000.000	87	4.623.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Rasio Elektrifikasi	%	99,99	100		100		100		100		100		100		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	24.613.356.778	100	24.953.228.447	100	32.565.761.437	100	34.615.761.437	100	35.215.761.437	100	35.592.761.437	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PERDAGANGAN																
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN																
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	n/a	n/a	34.248.400	100	125.000.000	100	225.000.000	100	247.500.000	100	272.250.000	100	299.475.000	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN																
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	100	100	2.422.130.400	100	500.000.000	100	1.000.000.000	100	1.100.000.000	100	1.210.000.000	100	1.331.000.000	Dinas Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING																
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%	5,8	7,13	476.806.800	7,00	200.000.000	6,88	360.000.000	6,76	396.000.000	6,64	435.600.000	6,52	479.160.000	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR																
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	Juta US \$	6723	6862	554.156.243	7006	225.000.000	7216	405.000.000	7433	445.500.000	7693	490.050.000	7825	539.055.000	Dinas Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN																
Meningkatnya terlibat niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	90	90	922.832.414	90	450.000.000	92	900.000.000	94	990.000.000	96	1.089.000.000	98	1.143.450.000	Dinas Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET (7)	PAGU (8)	TARGET (9)	PAGU (10)	TARGET (11)	PAGU (12)	TARGET (13)	PAGU (14)	TARGET (15)	PAGU (16)	TARGET (15)	PAGU (16)	
(1)	(2)	(3)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(19)
PROGRAM PENGUNGANAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI																
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	%	100	100	122.500.000	100	150.000.000	100	300.000.000	100	330.000.000	100	363.000.000	100	381.150.000	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	11.875.278.617	100	17.109.606.874	100	30.397.898.515	100	32.078.898.515	100	33.727.998.515	100	35.414.608.515	Dinas Perdagangan
PERINDUSTRIAN																
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI																
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%))	%	18,27	18,90		19,53		20,03		20,53		21,11		21,67		Dinas Perindustrian
	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	5,1	5,15	2.924.954.831	5,16	8.641.895.905	5,17	16.679.512.417	5,18	16.925.200.000	5,19	17.250.200.000	5,2	18.200.000.000	Dinas Perindustrian
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	%	2,01	2,34		2,39		2,44		2,49		2,54		2,59		Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI																
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	%	100	100	242.128.750	100	150.060.725	100	750.000.000	100	775.000.000	100	800.000.000	100	825.000.000	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL																
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	%	100	100	172.318.250	100	125.000.000	100	825.000.000	100	850.000.000	100	875.000.000	100	900.000.000	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	11.508.639.134	100	12.368.190.167	100	16.939.474.175	100	17.643.786.592	100	18.268.786.592	100	18.268.986.592	Dinas Perindustrian
TRANSMIGRASI																
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI																
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi Yang Dilaksanakan	%	100	100	-	100	25.000.000	100	32.642.197	100	33.684.261	100	35.089.365	100	36.902.016	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI																
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang	%	100	100	133.368.300	100	245.000.000	100	289.893.534	100	299.148.042	100	311.626.693	100	327.724.747	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI																
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	&	100	100	29.365.500	100		100	30.000.000	100	30.957.714	100	32.249.084	100	33.915.011	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PENUNJANG URUSAN																
PERENCANAAN PEMBANGUNAN																
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100		100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	2.350.883.428	100	2.445.423.451	100	3.629.551.000	100	3.992.506.100	100	4.391.756.710	100	4.830.932.381	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100		100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	2.847.848.693	100	2.333.752.964	100	5.094.503.506	100	5.968.953.857	100	6.220.849.243	100	6.597.934.167	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100		100		100		100		100		100		100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	33.188.412.745	100	37.520.348.264	100	50.627.101.700	100	82.658.691.870	100%	55.279.561.057	100	60.713.884.163	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KEUANGAN																
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Penerimaan Dana Transfer	%	220.000.000	95	115.000.000	95	302.000.000	97	242.000.000	100	266.200.000	100	292.820.000	100	322.102.000	Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH																
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	4.656.837.746	-5% s/d 5%		-5% s/d 5%		-5% s/d 5%		-5% s/d 5%		-5% s/d 5%		-5% s/d 5%		Badan Pendapatan Daerah
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	4.656.837.746	48,45	5.398.909.010	49,89	9.082.172.300	51,32	11.732.886.600	52,76	12.906.175.260	54,2	14.196.792.786	55,64	15.616.472.065	Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	%	300.000.000	1,8		2		2,2		2,3		2,4		2,6		Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	16.015.853.000	62		65		67		72		78		80		Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	234.582.598.450	95	226.466.839.034	97	252.163.331.140	97	298.360.460.691	100	328.196.506.760	100	361.016.157.436	100	397.117.773.180	Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH																
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Aset Daerah	1. Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	3,64%	4		5		6		7		8		9		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	2. Asset Management															Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	1. Apakah ada daftar aset tetap															Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap	Ya/Tidak	Ya	Ya	5.608.013.108	Ya	6.320.000.000	Ya	6.674.360.000	Ya	7.341.796.000	Ya	8.075.975.600	Ya	8.883.573.160	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET (7)	PAGU (8)	TARGET (9)	PAGU (10)	TARGET (11)	PAGU (12)	TARGET (13)	PAGU (14)	TARGET (15)	PAGU (16)	TARGET (15)	PAGU (16)	
(1)	(2)		(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(19)
	3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan															Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran															Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan, Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	21,29	21,85		25,95		26,00		27,00		28,00		29,00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	%	29,13	32,20	3.811.438.889.012	36,60	3.853.484.382.218	40	3.069.441.669.153	40,50	3.106.324.318.714	41	3.132.370.425.647	41,50	3.388.257.176.500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Penurunan SILPA	%	0,93	2,00		2,50		3,00		3,50		4,00		4,50		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100		100		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	96,27	100	63.346.418.869	100	185.893.347.439	100	72.436.146.200	100	77.259.760.820	100	84.985.736.902	100	93.484.310.592	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH																
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%	90	90		90		90		90		90		90		Badan Kepegawaian Daerah
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan kompetensinya	%	89	89	2.644.412.308	90	1.933.115.000	91	1.991.568.764	92	2.072.145.904	92	2.180.795.020	93	2.320.957.542	Badan Kepegawaian Daerah
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	%	85	85		88		90		92		93		95		Badan Kepegawaian Daerah
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	90	90		90		91		92		92		92		Badan Kepegawaian Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	17.372.532.538	100	21.412.321.961	100	22.059.790.326	100	22.952.310.258	100	24.155.771.952	100	25.708.294.721	Badan Kepegawaian Daerah
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	%	n/a	100		100		100		100		100		100		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	%	n/a	100	2.273.264.871	100	3.247.040.000	100	3.345.224.386	100	3.480.569.255	100	3.663.066.430	100	3.898.496.456	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	n/a	100		100		100		100		100		100		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	%	n/a	100		100		100		100		100		100		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	n/a	100	39.690.650.284	100	40.716.875.155	100	41.948.076.919	100	43.645.259.631	100	45.933.717.634	100	48.885.937.195	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelibangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	n/a	65		70		75		80		85		90		Badan Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Jumlah Potensi unggulan daerah yang dikembangkan dari inovasi	%	n/a	65		70		75		80		85		90		Badan Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	%	n/a	65	1.547.370.000	70	2.167.600.000	75	5.300.000.000	80	4.625.000.000	85	5.050.000.000	90	6.450.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	%	n/a	65		70		75		80		85		90		Badan Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	%	n/a	65		70		75		80		85		90		Badan Riset dan Inovasi Daerah
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH																
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	n/a	65		70		75		80		85		90		Badan Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	%	n/a	65		70	520.000.000	75	1.100.000.000	80	1.250.000.000	85	1.350.000.000	90	1.900.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	n/a	65		70		75		80		85		90		Badan Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi Pembinaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Riset dan Inovasi Daerah	%	n/a	65		70		75		80		85		90		Badan Riset dan Inovasi Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	19.559.895.016	100	22.782.052.314	100	26.892.651.918	100	28.417.651.918	100	28.892.651.918	100	31.683.739.053	Badan Riset dan Inovasi Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET (7)	PAGU (8)	TARGET (9)	PAGU (10)	TARGET (11)	PAGU (12)	TARGET (13)	PAGU (14)	TARGET (15)	PAGU (16)	TARGET (15)	PAGU (16)	
(1)	(2)	(3)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(19)
PENGAWASAN																
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN																
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Daerah	%	100	85	6.336.229.800	85	5.677.068.300	85	8.193.407.979	85	8.603.078.378	85	8.796.632.026	85	9.236.463.628	Inspektorat
	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1															Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBLIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI																
	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	%	90	90	1.946.549.000	90	1.799.404.000	90	2.739.003.950	90	2.875.954.148	90	2.991.979.148	90	3.141.578.105	Inspektorat
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai														Inspektorat
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)															Inspektorat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	44.218.526.500	100	52.979.358.370	100	69.590.323.243	100	72.282.226.226	100	75.819.384.026	100	79.753.894.276	Inspektorat
SEKRETARIAT DPRD																
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD																
	Persentase Administrasi DPRD yang terlayani	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	n/a	Tepat Waktu		Tepat Waktu	199.158.274.812,00	Tepat Waktu	219.074.102.293,20	Tepat Waktu	220.481.512.522,52	Tepat Waktu	222.529.663.775	Tepat Waktu	226.782.630.152	Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	n/a	Tepat Waktu	155.591.771.448	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Sekretariat DPRD
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	n/a	100		100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	99,87%	100	239.879.135.788	100	268.300.449.000,00	100	234.877.587.360,00	100	234.772.690.854,40	100	236.593.598.489	100	239.010.342.428	Sekretariat DPRD
URUSAN PENUNJANG LAINNYA																
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG																
Meningkatkan kualitas layanan dalam menunjang tugas pimpinan di ibu kota Jakarta	Persentase Pelayanan Penghubung	%	100	100	955.000.000	100	618.000.000	100	710.700.000	100	817.305.000	100	939.900.750	100	1.080.885.863	Badan Penghubung
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	15.945.078.972	100	17.674.876.621	100	20.111.108.114	100	20.552.774.331	100	20.889.789.614	100	29.826.044.053	Badan Penghubung
UNSUR SEKRETARIAT DAERAH																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																Sekretariat Daerah
	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	231.887.060.432	100	278.111.347.249	100	300.745.395.500	100	267.160.784.100	100	268.239.405.325	100	271.911.380.010	100	291.082.096.164	Biro Umum dan Perlengkapan
	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	43.440.964.858	100	43.440.964.858	100	44.754.537.974	100	46.565.267.659	100	49.006.830.852	100	52.156.563.382	Biro Humas dan Protokol
	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	756.240.144	100	831.240.144	100	2.459.022.450	100	2.560.450.095	100	2.672.020.505	100	2.794.747.955	Biro Perekonomian
	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	1.384.001.646	100	1.573.905.612	100	1.621.497.559	100	1.687.101.940	100	1.775.561.992	100	1.889.679.662	Biro Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	1.729.000.000	100	2.000.824.779	100	1.809.260.000	100	1.863.968.621	100	1.939.383.171	100	2.041.071.120	100	2.172.253.406	Biro Hukum dan HAM
	Prosentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	1.150.488.957	100	760.084.000	100	783.067.511	100	814.749.742	100	857.469.629	100	912.580.313	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	1.129.078.800	100	1.180.518.800	100	1.216.215.469	100	1.265.422.490	100	1.331.772.564	100	1.417.367.313	Biro Organisasi
	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	823.404.926	100	1.134.877.269	100	1.126.127.269	100	2.080.537.266	100	2.164.713.994	100	2.278.216.746	100	2.424.640.689	Biro Administrasi Pembangunan
	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	1.529.400.000	100	1.561.682.354	100	776.000.000	100	1.970.440.289	100	2.167.484.318	100	2.384.232.750	100	2.622.656.025	Biro Pengadaan Barang/Jasa
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM																
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase fasilitasi pengelolaan peraturan perundang-undangan pemerintah Provinsi/Kab/Kota, penyelesaian hukum, dan penyelenggaraan HAM yang dilaksanakan	%	100	100	1.617.598.061	100	2.109.162.840	100	2.080.537.266	100	2.164.713.994	100	2.278.216.746	100	2.424.640.689	Biro Hukum dan HAM
PROGRAM KEBLIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN																
Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Administrasi Pembangunan Daerah	%	n/a	85	675.750.000	85	684.500.000	90	787.175.000	90	905.251.250	90	1.041.038.938	90	1.197.194.778	Biro Administrasi Pembangunan
PROGRAM KEBLIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA																
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	4.265.000.000	Level 3	5.171.035.850	Level 3	5.991.345.204	Level 3 Pusat Unggulan Pengadaan	6.890.046.985	Level 3 Pusat Unggulan Pengadaan	7.923.554.032	Level 4	9.112.087.137	Level 4	10.478.900.208	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT																
	Persentase fasilitasi pembinaan mental spiritual,peleyanan dasar dan non pelayanan dasar yang ditindaklanuti	%	100	100	35.603.937.210	100	43.353.268.244	100	44.664.189.579	100	46.471.263.847	100	48.907.898.125	100	52.051.272.120	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	n/a	90		90		90		90		90		90		Biro Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH																
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektivitas Kerjasama Daerah	%	n/a	80	63.682.777.550	80	89.087.147.507	80	5.191.299.952	80	5.230.839.314	80	5.271.168.917	80	5.271.168.917	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai	3.2405 (sedang)	3,4 (tinggi)		3,4 (tinggi)		3,4 (tinggi)		3,4 (tinggi)		3,4 (tinggi)		3,4 (tinggi)		
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI																
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	30	30	888.884.600	37	918.544.600	40	1.056.326.290	42	1.099.064.333	45	1.156.691.727	46	1.231.033.803	Biro Organisasi
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	86,19	100	2.542.830.475	100	2.628.421.475	100	3.354.153.159	100	3.634.806.988	100	3.725.677.163	100	3.818.819.092	Biro Perekonomian
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN																
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	60	64	4.946.448.774	70	5.080.000.000	75	5.233.609.650	80	5.445.356.946	85	5.730.874.108	90	6.099.204.814	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET (7)	PAGU (8)	TARGET (9)	PAGU (10)	TARGET (11)	PAGU (12)	TARGET (13)	PAGU (14)	TARGET (15)	PAGU (16)	TARGET (15)	PAGU (16)		
(1)	(2)		(3)													(19)	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK																	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	50	55	15.605.849.940	60	15.593.636.960	65	16.065.159.228	70	16.715.141.600	75	317.591.568.957	80	18.647.063.095		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN																	
Meningkatnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	4	3,8	1.874.680.000	4	1.361.944.950	4,5	1.403.127.605	4,8	1.459.896.928	5	1.536.443.908	5,5	1.635.193.149		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA																	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	%	20	20	1.266.350.000	25	800.000.000	40	824.190.496	60	857.536.527	80	902.499.860	100	960.504.695		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN PENANGAN KONELIK SOSIAL																	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	100	100	1.874.850.000	100	1.700.000.000	100	1.751.404.804	100	1.822.265.120	100	1.917.812.201	100	2.041.072.477		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	13.095.998.853	100	13.416.570.000	100	13.822.261.856	100	14.381.498.550	100	15.135.565.675	100	16.108.348.096		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja daerah Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,52 (2023)	0,54	0,5475	0,555	0,5625	0,57	0,58
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,84	74,4	74,95	75,49	76,04	76,58	77,13
3	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	15,8	14,8	13,8	12,9	12,1	11,3	10,6
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,03	5,30-5,50	5,8 - 6,3	5,9-6,4	6,0-6,5	7,4-8,1	7,4-8,1
5	PDRB per Kapita (ADHB)	Rp (Juta)	75,13	79,90	94,00	104,00	120,00	127,10	127,10
6	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,46	3,48	3,50	3,52	3,55	3,60	3,65
7	Tingkat Inflasi	%	1,2	1,5 - 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,3 – 3,2	1,3 – 3,2
8	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	n/a	62,22	62,63	63,05	63,46	63,89	64,28
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	n/a	20,19	21,99	23,79	25,59	27,39	29,19
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72,69	68,19	68,44	68,70	68,95	69,20	69,46
11	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	68,10	69,97	65,48-68,68	76,42	79,69	80,74	83,55
12	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,07	77,52	79,79	82,08	84,38	86,69	89,01
13	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Indeks	131,05	130,41	129,78	129,14	128,51	127,88	127,24
14	Tingkat Kemiskinan	%	10,51	9,37-10,37	9,07-10,07	7,90 – 8,90	7,00 – 7,85	6,05 – 7,05	5,95 - 6,95
15	Rasio Gini	Indeks	0,331	0,316 - 0,320	0,312-0,316	0,305-0,309	0,300-0,304	0,294 - 0,298	0,294-0,298
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,86	3,82-3,93	3,75-3,90	3,70-3,85	3,70-3,80	3,29 – 3,67	3,16 - 3,61
17	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (74,73)	BB (75-76)	BB (76-77)	BB (77-78)	BB (78-79)	BB (79-80)	BB (80-81)
18	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,479	0,465	0,453	0,441	0,428	0,416	0,403

Tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Aspek Geografi dan Demografi								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,07	77,52	79,79	82,08	84,38	86,69	89,01
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	5,97	5,75	5,36	4,88	4,40	4,00	3,45
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	881,65	926	972,01	1020,61	1071,64	1125,22	1181,48
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	87,23	89,35	90,35	92,76	95,18	97,59	100,00
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	72,69	68,19	68,44	68,70	68,95	69,20	69,46
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	4,79	8,00	11,40	14,80	18,20	21,60	25,00
7	Pengelolaan Sampah (Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah) (%)	%	n/a	21	21,5	23	25	35	36
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	n/a	43	44	45	46	62	63
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	68,10	69,97	65,48-68,68	76,42	79,69	80,74	83,55
10	Indeks Risiko Bencana	Indeks	131,05	130,41	129,78	129,14	128,51	127,88	127,24
11	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,09	1,07	1,05	1,03	1	0,98	0,95
13	Rasio Penduduk	%	103,70	103,60	103,50	103,40	103,30	103,20	103,00
14	Kepadatan Penduduk	Orang/km	101,85	103,2	104,5	105,8	107	108,3	109,6
	Indeks Akses Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	n/a	0,465	0,469	0,473	0,477	0,482	0,486
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,03	5,30 - 5,50	5,8 - 6,3	5,9 - 6,4	6,0 - 6,5	7,4 - 8,1	7,4 - 8,1
2	Tingkat Kemiskinan	%	10,51	9,37 - 10,37	9,07 - 10,07	7,90 - 8,90	7,00 - 7,85	6,05 - 7,05	5,95 - 6,95
3	PDRB per Kapita (ADHB)	Rp (Juta)	75,13	79,90	94,00	104,00	120,00	127,10	127,10
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,86	3,82-3,93	3,75-3,90	3,70-3,85	3,70-3,80	3,29 - 3,67	3,16 - 3,61
5	Indeks Gini	Indeks	0,331	0,316 - 0,320	0,312-0,316	0,305-0,309	0,300-0,304	0,294 - 0,298	0,294-0,298
6	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,52 (2023)	0,54	0,5475	0,555	0,5625	0,57	0,58
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,84	74,4	74,95	75,49	76,04	76,58	77,13
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,26	74,48	74,71	74,94	75,17	75,4	75,63
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,342	0,342	0,345	0,347	0,350	0,352	0,355
9	Prevalensi Stunting	%	15,8	14,8	13,8	12,9	12,1	11,3	10,6
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,57	9,19 - 9,20	9,27 - 9,29	9,36 - 9,38	9,45 - 9,47	9,56 - 9,57	9,65 - 9,66
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,64	12,80-12,81	12,89-12,90	12,97-13,00	13,07-13,10	13,5 - 13,51	13,6 - 13,7

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	72,24	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	75,50
13	Indeks Literasi Digital	Angka	3,43	3,47	3,50	3,52	3,55	3,58	3,60
14	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	31,94	49	50	52	55	60	65
15	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	76,82	78,01	78,15	78,35	78,35	78,85	79,1
16	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	57,51	58,71	59,81	59,91	60,01	60,89	61,10
17	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	61,90	64	66	68	70	72	74
18	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	n/a	69,16-69,17	69,41- 69,42	69,66-69,67	69,9-69,92	70,15-70,17	70,39-70,42
19	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,479	0,465	0,453	0,441	0,428	0,416	0,403
20	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	54,00	55,45	56,89	58,34	59,78	61,63	62,67
21	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	62,67	64,40	66,10	67,80	69,50	71,20	72,90
22	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	25	50	60	65	75	85	90
23	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	8,4	8,88	8,90	8,93	8,95	8,98	9,00
	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Jumlah	38.854	40.710	40.773	40.822	40.865	40.880	40.896
	Aset Perbankan Syariah/PDRB	%	2,98	2,96	3,17	3,40	3,69	3,99	4,34
	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	0,63
	PDRB per Kapita (ADHK)	Rp (Juta)	42,90	44,61	46,40	48,25	50,18	52,19	54,28
III	Aspek Daya Saing Daerah								
1	Angka Ketergantungan	%	47,24	47,19	47,09	46,93	46,76	46,58	46,42
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	18,27	18,90	19,53	20,03	20,53	21,11	21,67
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	2,01	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
4	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	n.a	3.030.000.000	3.060.300.000	3.090.903.000	3.121.812.030	3.153.030.150	3.184.560.452
5	Rasio Kewirausahaan	%	2,51	2,57	2,60	2,65	2,70	2,83	2,83
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,82	70,83	70,84	70,85	70,86	70,87	70,88
7	Indeks Inovasi Daerah	Skor	75,79	76,55	77,31	78,09	78,87	79,66	80,45
8	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	n/a	62,22	62,63	63,05	63,46	63,89	64,28
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	n/a	20,19	21,99	23,79	25,59	27,39	29,19
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	23,15	23,10	23,70	24,30	24,70	25,10	25,70
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5,88	5,90	6,08	6,26	6,44	6,80	6,82
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rp. Miliar	205.916,35	219.409,94	232.903,53	246.397,12	259.890,71	273.384,30	286.877,89
13	Ekspor Barang dan Jasa	Juta US\$	6.723	6.862	7.006	7.216	7.433	7.693	7.825

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
14	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	n/a (belum pernah diukur)	70 (puas)	71 (puas)	72 (puas)	73 (puas)	74 (puas)	75 (puas)
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	63,21	65,01	68,6	69,6	70,6	71,6	72,6
16	Persentase Desa Mandiri	%	19,89	20,18	20,56	20,98	21,54	21,79	22,17
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,02	1,25	1,252	1,256	1,258	1,26	1,27
18	Tingkat Inflasi	%	1,2	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,3 - 3,2	1,3 - 3,2
19	Inklusi Keuangan	%	75,02	94,46	94,93	95,4	95,87	96,35	96,82
20	Persentase Kemiskinan Ekstrem	%	0,59	0,34	0,20	0,11	0,07	0,04	0,02
21	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	15,20	16,73	17,90	17,90	17,90	20,25	21,42
22	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	0,71	0,73	0,74	0,74	0,74	0,75	0,76
23	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi	Rupiah	11.269.300,50	12.796.305,07	13.338.639,98	13.338.639,98	13.338.639,98	14.423.309,81	14.965.644,72
24	Total Kredit/PDRB	%	15,11	16,9	18,69	18,69	18,69	22,26	24,05
25	Kontribusi PDRB Provinsi	%	3,02	3,06	3,09	3,11	3,14	3,30	3,30
	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	%	n/a	1,41	1,42	1,43	1,44	1,45	1,46
	Indeks Entrophy Theil	Indeks	1,339 (2023)	1,32	1,28	1,24	1,20	1,17	1,12
	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	2,59	2,70	2,82	2,95	3,09	3,24	3,40
	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan penggalian	%	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330
	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,65	3,72	3,75	3,79	3,82	3,85	3,87
	Persentase Bangunan Gedung, Hunian dan Permukiman dengan akses layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	38,25	40,95	43,14	45,62	48,09	50,57	53,04
IV	Aspek Pelayanan Umum								
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	79,6	80,5	81,5	83	84,5	86	86,5
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3	3,04	3,09	3,13	3,18	3,22	3,26
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	A (4,60) Pelayanan Prima	A (4,60)	A (4,65)	A (4,70)	A (4,75)	A (4,80)	A (4,85)
4	Indeks Integritas Daerah	Indeks	60,63	72,66	75,13	77,6	80,07	82,54	85
5	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	95,47	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	78,17 (2023)	81,79	82,48	83,65	84,45	85,13	85,73
8	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	72,5	75,0	77,5	80,0	82,5	85,0	87,5
9	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,46	3,48	3,50	3,52	3,55	3,60	3,65
	Manajemen Risiko Indeks	Indeks	2,866	2,923	2,982	3,041	3,102	3,164	3,228
III	Aspek Pelayanan Umum								
III.1	Layanan Urusan Wajib Dasar								
1	Urusan Pendidikan								
1.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,64	12,80-12,81	12,89-12,90	12,97-13,00	13,07-13,10	13,5 - 13,51	13,6 - 13,7
1.2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,57	9,19 - 9,20	9,27 - 9,29	9,36 - 9,38	9,45 - 9,47	9,56 - 9,57	9,65 - 9,66
1.3	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :								
	Literasi Membaca	%	5,88	5,88 - 11,76	8,82 - 13,23	11,76 - 14,70	14,71 - 16,17	17,65 - 17,65	19,12 - 20,59
	Numerasi	%	0	0,00 - 5,88	1,47 - 7,35	2,94 - 8,82	4,41 - 10,29	5,88 - 11,76	7,35 - 13,23
1.4	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :								
	Literasi Membaca	%	36,67	65,01	93,34	100	100	100	100
	Numerasi	%	33,81	40,12	54,11	68,1	82,09	96,08	100
1.5	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Satu Tahun Setelah kelulusan	%	80,89	82,54	82,59	82,59	84,29	85,98	87,68
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	n/a	8,88	8,90	8,93	8,95	8,98	9,00
	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	n/a	74,46	74,987	75,514	76,041	76,568	77,095
2	Urusan Kesehatan								
2.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,26	74,48	74,71	74,94	75,17	75,4	75,63
2.2	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	175	122	109	97	86	77	76
2.3	Angka Kematian Balita	%	19,83	15	13,8	13,1	12,5	11,9	11,3
2.4	Prevalensi Stunting	%	15,8	14,8	13,8	12,9	12,1	11,3	10,6

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.5	Angka Keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	90	95	95	95	95	95	95
2.6	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,54	98,60	98,62	98,63	98,65	98,67	98,70
2.7	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	90	90	90	90	90	90	90
2.8	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	0	6	12	18	24	30	36
2.9	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	n/a	95	95	95	95	95	100
2.10	Persentase hipertensi dalam pengendalian	%	n/a	20	25	30	35	40	45
2.11	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,342	0,342	0,345	0,347	0,350	0,352	0,355
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1	Waktu Tempuh Jalan Provinsi	Jam/100 Km	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
3.2	Index Penyelenggaraan Penataan Ruang	Index	62,5	65	67,5	70	72,5	75	77,5
3.3	Kapasitas air baku	m ³ /detik	2,2	2,24	2,46	2,69	2,91	3,14	3,36
3.4	Indeks Ketahanan Air Provinsi	Indeks	n/a	3,57	3,65	3,74	3,82	3,90	3,98
3.5	Akses Air Minum Layak	%	87,23	89,35	90,35	92,76	95,18	97,59	100,00
3.6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	77,34	80,54	82,43	84,32	86,22	88,11	90,00
3.7	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	23,93	34,00	38,00	40,50	43,00	43,10	43,20
4	Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman								
4.1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	40,04	65,01	68,60	69,60	70,60	71,60	72,60
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
5.1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44
5.2	Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Angka	70,82 (2020)	70,82	71,69	72,56	73,43	74,3	75,16
	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Angka	n/a	60,26	62,17	64,08	66,12	68,57	71,23
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari	%		100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>penegakan hukum perda dan perkada di provinsi</i>								
6	Urusan Sosial								
6.1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,12	57,22	57,32	57,52	57,72	57,92	58,12
III.2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
1	Urusan Tenaga Kerja								
1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,82	70,83	70,84	70,85	70,86	70,87	70,88
1.2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	84.623.111	84.700.000	84.800.000	84.900.000	85.000.000	85.100.000	85.200.000
1.3	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak- Hak Dasarnya	%	70	70	72	74	77	80	82
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.1	Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan	Persen	55,35	57,12	57,30	57,50	58,00	58,50	58,75
2.2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,479	0,465	0,453	0,441	0,428	0,416	0,403
2.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,87	93,93 – 93,99	93,99 - 94,10	94,07 – 94,18	94,13 – 94,21	94,19 – 94,29	94,25 – 94,38
2.4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	61,90	64	66	68	70	72	74
3	Urusan Pangan								
3.1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74.07	77.52	79.79	82.08	84.38	86.69	89.01
3.2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	5.97	5,75	5.36	4.88	4.40	4,00	3.45
4	Urusan Pertanahan								
4.1	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	%	n/a	95	95	95	95	95	95
5	Urusan Lingkungan Hidup								
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72,69	68,19	68,44	68,70	68,95	69,20	69,46
5.2	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	%	n/a	18,50	19,41	20,52	21,77	22,87	24,12
5.3	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	%	20,20	31,02	34,50	39,97	45,01	44,59	49,84

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	n/a	45	52	52,5	53	53,5	54
5.5	Pengelolaan Sampah (Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah) (%)	%	n/a	21	21,5	23	25	35	36
5.6	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	% RT	n/a	43	44	45	46	62	63
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
6.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Rasio	72,24	85,68	88,06	90,44	92,82	95,2	97,58
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	n/a	9,30	9,50	9,70	9,70	10	12
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	n/a	57,69	57,71	58	58,02	58,11	58,12
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	n/a	99,057	99,059	99,060	99,061	99,063	99,066
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	95	50,01	50,55	50,58	51,00	51,02	51,04
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	90	53,02	53,05	53,01	53,10	53,15	53,16
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	n/a	53,55	53,57	53,61	53,64	53,71	53,72
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
7.1	Persentase Desa Mandiri	%	19,89	20,18	20,56	20,98	21,54	21,79	22,17
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
8.1	Angka Kelahiran Total (Total Fertily Rate/TFR) Per wanita usia subur (15-49 Tahun)	Angka	2,34	2,32	2,30	2,28	2,27	2,25	2,23
8.2	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Mcpr)	%	n/a	86,96	87,50	88,04	88,58	89,13	89,68

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.3	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specitif Fertility Rate (ASFR 15-19)	Angka	29,80	29,58	29,33	29,07	28,94	28,69	28,44
9	Urusan Perhubungan								
9.1	Rasio Konektivitas	Rasio	0,630	0,634	0,660	0,685	0,710	0,735	0,760
9.2	V/C Rasio	Rasio	0,392	0,390	0,388	0,385	0,383	0,382	0,381
9.3	Rata - rata Load Factor Angkutan Umum	%	70,00	71,00	71,50	72,00	72,50	73,00	73,5
10	Urusan Komunikasi dan Informatika								
10.1	Indeks IPTIK	Indeks	5,88	5,90	6,08	6,26	6,44	6,80	6,82
10.2	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Angka	n/a (belum dihitung)	56,04	56,05	56,06	56,07	56,08	56,09
10.3	Indeks SPBE	Indeks	3	3,04	3,09	3,13	3,18	3,22	3,26
11	Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah								
11.1	Rasio Kewirausahaan	%	2,51	2,57	2,60	2,65	2,70	2,83	2,83
11.2	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi	%	0,40	0,41	0,42	0,42	0,43	0,44	0,44
11.3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,48	0,53	0,58	0,64	0,70	0,77	0,85
12	Urusan Penanaman Modal								
12.1	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB)	%	31,01	30,50	31,16	31,23	31,31	31,98	31,98
12.2	Persentase Pertumbuhan Investasi	%	49,37	7,5	7,5	7,7	7,8	8,0	8,2
13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga								
13.1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	54	55,445	56,89	58,335	59,78	61,225	62,67
13.2	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,305	0,331	0,357	0,383	0,409	0,435	0,461
14	Urusan Statistik								
14.1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,72	2,73	2,74	2,75	2,76	2,77	2,78
15	Urusan Persandian								
15.1	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Indeks	390	375	377	378	380	382	384

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				(metode perhitungan baru)	(metode perhitungan baru)	(metode perhitungan baru)	(metode perhitungan baru)	(metode perhitungan baru)	(metode perhitungan baru)
16	Urusan Kebudayaan								
16.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	57,51	58,71	59,81	59,91	60,01	60,89	61,10
17	Urusan Perpustakaan								
17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	72,24	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	75,50
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	69,62	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
18	Urusan Kearsipan								
18.1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	90,11	91,5	91,8	92,25	92,5	92,8	93
18.2	Indeks Pengelolaan Arsip Elektronik	Indeks	84,12	85	85,5	86	86,5	86,75	87
III.3	Layanan Urusan Pilihan								
1	Urusan Kelautan dan Perikanan								
1.1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	117,43	117,50	117,87	118,18	118,45	118,92	119,50
1.2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Nilai	94,84	94,32	94,47	94,51	94,64	94,80	95,10
2	Urusan Pariwisata								
2.1	Rasio PDRB Penvediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persentase	2,01	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
2.2	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	2.004	2.014	2.209	2.320	2.436	2.557	2.684
2.3	Jumlah Wisatawan Nusantara	Orang	16.123.645	19.050.274	20.002.788	21.002.927	22.053.073	23.155.727	24.313.513
2.4	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	n.a	3.030.000 .000	3.060.300 .000	3.090.903 .000	3.121.812 .030	3.153.030 .150	3.184.560 .452
3	Urusan Pertanian								
3.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	120,83	122,04	123,25	124,45	125,66	126,87	128,08
3.2	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan:								
	- Padi	%	2,71	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	- Jagung	%	0,86	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
3.3	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	- Cabai Merah	%	15,18	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Persentase peningkatan produksi Karet	%	0,460	0,109	0,110	0,111	0,112	0,113	0,114
		Ton	1,008,362,07	1.009.461,18	1.010.571,59	1.011.693,33	1.012.826,42	1.013.970,92	1.015.126,84
	Persentase peningkatan produksi Kelapa Sawit	%	0,870	0,445	0,447	0,449	0,451	0,453	0,455
		Ton	3.399.995,63	3.415.125,61	3.430.391,22	3.445.793,68	3.461.334,21	3.477.014,05	3.492.834,47
	Persentase peningkatan produksi Kopi	%	5,810	3,713	3,715	3,718	3,720	3,725	3,730
		Ton	218.667,51	226.786,63	235.211,76	243.956,93	253.032,13	262.457,58	272.247,24
	Persentase peningkatan produksi Kelapa	%	0,140	1,441	1,445	1,447	1,449	1,451	1,455
		Ton	61.647,2	62.535,54	63.439,17	64.357,14	65.289,67	66.237,03	67.200,78
4	Urusan Kehutanan								
4.1	Persentase Tutupan Lahan	%	18,50	18,80	19,10	19,40	19,70	20,00	20,30
5	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral								
5.1	Rasio Elektrifikasi	%	99,9	100	100	100	100	100	100
5.2	Persentase Desa Berlistrik	%	99,26	100	100	100	100	100	100
5.3	Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	23,15	23,10	23,70	24,30	24,70	25,10	25,70
5.4	Intensitas Energi Primer	SBM/ Rp Milyar	220	197,1	190	180	170	157,8	155
5.5	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh/kapita	881,65	926	972,01	1020,61	1071,64	1125,22	1181,48
6	Urusan Perdagangan								
6.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	13,85	13,92	13,99	14,06	14,13	14,20	14,27
6.2	Ekspor Barang dan Jasa (PDRB %)	%	16,84	21,26	21,58	21,89	22,21	22,52	22,84
6.3	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi		5,80	7,13	7,00	6,88	6,76	6,64	6,52
7	Urusan Perindustrian								
7.1	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB) (%)	%	18,27	18,90	19,53	20,03	20,53	21,11	21,67
7.2	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	4,39	5,15	5,16	5,17	5,18	5,19	5,20
7.3	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	%	n/a	2,34	2,39	2,44	2,49	2,54	2,59

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Urusan Transmigrasi								
8.1	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi	Indeks	57,29	57,35	57,40	57,45	57,50	57,55	57,60
III.4	Penunjang Urusan								
1	Sekretariat Daerah								
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (74,73)	BB (75-76)	BB (76-77)	BB (77-78)	BB (78-79)	BB (79-80)	BB (80-81)
1.2	Nilai SAKIP	Nilai	BB (77,53) Sangat Baik	BB (78,00)	BB (78,75)	BB (79,33)	BB (79,87)	A (80,07)	A (80,38)
1.3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	A (4,60) Pelayanan Prima	A (4,60)	A (4,65)	A (4,70)	A (4,75)	A (4,80)	A (4,85)
1.4	Return on Asset (ROA) BUMD	%	-	1,82	2,10	2,20	2,30	2,35	2,40
1.5	Indeks Reformasi Hukum	Angka	79,6	80,5	81,5	83	84,5	86	86,5
2	Sekretariat DPRD								
2.1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	98,67	85	87	89	90	91	92
3	Perencanaan								
3.1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	96,51	96,55	96,6	96,65	96,7	96,75	96,80
4	Kuangan								
4.1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.2	Revenue Mobilization Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD			5,00	6,00	7,34	7,82	8,01	8,51
4.3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,02	1,25	1,252	1,256	1,258	1,26	1,27
4.4	Indeks Kapasitas Fiskal	Indeks	1,89 (Sedang)	1,95 (Sedang)	2,02 (Sedang)	2,09 (Sedang)	2,15 (Sedang)	2,21 (Sedang)	2,28 (sedang)
5	Kepegawaian								
5.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	76	76	77	77	77	78	78
6	Pendidikan dan Pelatihan								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	27	27	28	29	30	31	32
7	<i>Penelitian dan Pengembangan</i>								
7.1	Indeks Inovasi Daerah	Skor	75,79	76,55	77,31	78,09	78,87	79,66	80,45
7.2	Indeks Kapabilitas Inovasi	Skor	n/a	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	3,06
7.3	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	n/a	50	60	70	80	90	100
8	<i>Pengawasan</i>								
8.1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,041	3,13	3,16	3,19	3,21	3,25	3,27
9	<i>Pemerintahan Umum</i>								
9.1	Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	Indeks	n/a	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0
9.2	Indeks kerukunan Umat Beragama IKUB)	Indeks	76,82	78,01	78,15	78,35	78,35	78,85	79,1
9.3	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	78,17 (2023)	81,79	82,48	83,65	84,45	85,13	85,73
10	<i>Pengelolaan Penghubung</i>								
10.1	Indeks Kepuasan terhadap layanan penghubung	Indeks	80	83	88	93	95	98	100

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini menjabarkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang akan menjadi arah pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dalam lima tahun (2025-2029). RPJMD ini memuat masalah dan isu strategis dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan serta bagaimana mencapainya agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Perodesasi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sehingga tidak sama dengan masa jabatan kepala daerah, yakni 2025-2030.

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044.

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan untuk periode lima tahun dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Selatan periode 2025-2029. Selain itu dokumen ini juga menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, sekaligus menjadi rujukan bagi penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 telah mengedepankan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dengan memberikan ruang bagi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan. RPJMD ini juga mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek pembangunan daerah, mencakup pencapaian SDGs, transformasi digital melalui peningkatan akses dan kualitas layanan komunikasi, pembangunan rendah karbon dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta pembangunan berketahanan iklim melalui upaya adaptasi, peningkatan ketahanan, dan pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, pelaksanaan RPJMD harus dijalankan secara konsisten, transparan, profesional, partisipatif, dan akuntabel sesuai kaidah-kaidah pelaksanaan yang berlaku, sebagai berikut:

- 1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat, termasuk dunia usaha agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 ini dengan sebaik-baiknya.
- 2) Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahunan.
- 3) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban menyusun Renstra PD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
- 4) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Renstra PD Kabupaten/Kota, harus memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
- 5) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 dan menjaga sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan RPJMD kabupaten/kota, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban melakukan fasilitasi, pengendalian,

monitoring, dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja RPJMD provinsi maupun kabupaten/kota.

- 6) Gubernur Sumatera Selatan berkewajiban menyebarluaskan RPJMD kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan, penerapan manajemen risiko dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko, dengan berpedoman pada prinsip terintegrasi, kolaboratif, transparan, inklusif, berbasis informasi terbaik, memperhitungkan ketidakpastian, serta berkelanjutan melalui perbaikan terus-menerus.

Proses manajemen risiko meliputi enam tahapan, yaitu: (1) komunikasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal; (2) identifikasi risiko melalui penentuan kejadian, penyebab, sumber, dan konsekuensinya terhadap pencapaian RPJMD; (3) analisis risiko berdasarkan tingkat kemungkinan dan konsekuensi; (4) evaluasi risiko untuk mendukung pengambilan keputusan; (5) mitigasi risiko melalui pemilihan alternatif terbaik, penyusunan, dan pelaksanaan rencana mitigasi; serta (6) pemantauan dan review terhadap seluruh proses manajemen risiko.

Kerangka manajemen risiko mencakup pembentukan struktur yang terdiri atas Komite Manajemen Risiko, Unit Pemilik Risiko, dan *Compliance Office for Risk Management*, serta pengembangan budaya sadar risiko melalui pemahaman dan pengelolaan risiko sebagai bagian integral dari setiap pengambilan keputusan.

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko menjadi dasar bagi setiap pimpinan dan ASN Pemerintah Provinsi dalam menerapkan manajemen risiko pada setiap kegiatan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Untuk menjamin pelaksanaan RPJMD tersebut, diperlukan penyesuaian sejumlah regulasi kewenangan provinsi, termasuk perubahan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Urusan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

5.2 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Selatan, maka diperlukan pedoman penyusunan RKPD 2030 yang akan dilaksanakan pada tahun 2029. Diketahui, tahun 2029 merupakan tahun terakhir periode RPJMD ini, sedangkan masa jabatan Gubernur terpilih tahun 2025-2030. Oleh karena itu, Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan ini memuat perencanaan pembangunan hingga tahun 2030 sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah dan pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030. Selain itu, penyusunan RKPD tahun 2030 pada saat belum ada RPJMD baru, berpedoman pada arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, RKPD tahun 2029, dan program strategis nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang berlaku saat itu.

 GUBERNUR SUMATERA SELATAN
H. HERMAN DERU



Bappeda Provinsi Sumatera Selatan